SEKOLAH NEGARAWAN
FREE
INDONESIA
SAVE NUSANTARA
Jilid 1
Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., M. H.

GLOSARIUM

A

Aplikasi (Applications)

Dalam analogi sistem komputer, aplikasi adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi tertentu di atas sistem operasi dan dapat dipasang, diperbarui, maupun dihapus tanpa mengubah struktur inti sistem. Dalam konteks kenegaraan, istilah ini dianalogikan sebagai pemerintah, yakni instrumen operasional sementara yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, kebijakan, dan pengelolaan negara.

B

Bangsa

Kesatuan manusia yang terbentuk melalui pengalaman sejarah, kesadaran identitas, nilai, kebudayaan, cita-cita, dan rasa kebersamaan yang melampaui ikatan keluarga maupun kelompok sosial. Dalam kerangka buku ini, bangsa merupakan kesadaran kolektif yang menyatukan masyarakat dalam identitas dan tujuan bersama, yang kemudian menjadi salah satu landasan pembentukan negara.

BIOS (Basic Input/Output System)

Sistem dasar yang tertanam pada perangkat komputer untuk mengatur proses awal aktivasi perangkat sebelum sistem utama berjalan. Dalam analogi negara, BIOS merepresentasikan konstitusi sebagai aturan dasar yang menentukan bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dan dibatasi.

Boot Process
Tahapan awal ketika sistem komputer dinyalakan hingga seluruh komponen inti siap beroperasi. Dalam analogi negara, boot process menggambarkan mekanisme legal pembentukan pemerintahan, transisi kekuasaan, dan aktivasi sistem kenegaraan sesuai konstitusi.

D

Device
Perangkat fisik yang menjadi wadah seluruh komponen sistem digital. Dalam konteks analogi negara, device merepresentasikan tubuh fisik negara, mencakup wilayah, rakyat, institusi, sumber daya alam, dan infrastruktur nasional.

F

Firmware
Lapisan perangkat lunak dasar yang tertanam langsung pada perangkat keras dan berfungsi sebagai penghubung awal antara hardware dengan sistem utama. Dalam analogi buku ini, firmware disepadankan dengan aturan dasar negara.

Full Root Access
Hak akses tertinggi dalam sistem komputer yang memungkinkan pengendalian penuh atas seluruh konfigurasi, izin, dan operasi sistem. Dalam analogi negara, konsep ini merepresentasikan kedaulatan penuh rakyat sebagai pemilik sah negara.

H

Hardware

Komponen fisik dari suatu sistem komputer, seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat pendukung lainnya. Dalam konteks kenegaraan, hardware merepresentasikan unsur fisik negara, termasuk wilayah, aparatur, lembaga, penduduk, serta sumber daya material.

K

Keluarga

Unit sosial paling dasar tempat manusia pertama kali membangun hubungan, nilai, tanggung jawab, identitas, dan kehidupan bersama. Dalam kerangka buku ini, keluarga merupakan fondasi awal pembentukan masyarakat, karena dari keluargalah manusia belajar hidup dalam keteraturan, saling menghormati, berbagi peran, dan membangun tanggung jawab bersama.

Kernel

Inti utama sistem operasi yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk pengelolaan sumber daya sistem. Dalam analogi negara, kernel merepresentasikan Pancasila sebagai nilai inti yang menjadi dasar operasional seluruh sistem kebangsaan.

Kernel Panic

Kondisi kegagalan fatal pada inti sistem yang menyebabkan komputer tidak dapat beroperasi secara normal. Dalam konteks negara, istilah ini menggambarkan krisis nilai atau kegagalan ideologis yang menyebabkan disorientasi dalam hukum, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan.

Konstitusi
Aturan dasar tertinggi yang mengatur struktur, kewenangan, hak, kewajiban, dan mekanisme kerja negara. Dalam analogi teknologi pada buku ini, konstitusi disepadankan dengan BIOS atau firmware.

M

Malware
Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, mengganggu, atau mengambil alih sistem secara tidak sah. Dalam analogi negara, malware merepresentasikan kekuatan destruktif seperti oligarki, kolonialisme modern, mafia kebijakan, atau infiltrasi kepentingan yang merusak kedaulatan nasional.

Masyarakat
Kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sosial dan membentuk hubungan, norma, nilai, kebiasaan, serta tata kehidupan bersama. Dalam analogi buku ini, masyarakat merupakan jaringan sosial yang terbentuk dari keluarga dan individu yang saling berinteraksi sebelum berkembang menjadi kesadaran kebangsaan dan organisasi negara.

O

Operating System (Sistem Operasi)

Lingkungan utama yang menjalankan fungsi-fungsi sistem dan menjadi perantara antara inti sistem dengan aplikasi pengguna. Dalam analogi kenegaraan, sistem operasi merepresentasikan peradaban bangsa, yakni sistem nilai, budaya, etika, dan cara hidup yang menerjemahkan prinsip dasar negara ke dalam kehidupan nyata.

Ownership Capture

Keadaan ketika kepemilikan formal masih berada pada pemilik sah, namun kendali nyata telah berpindah ke pihak lain. Dalam konteks negara, istilah ini menjelaskan situasi ketika rakyat secara hukum berdaulat, tetapi secara praktik kehilangan kendali atas sistem negara.

P

Pancasila

Dasar filosofis bangsa Indonesia yang dalam kerangka analogi buku ini diposisikan sebagai kernel negara, yakni inti nilai yang mengatur orientasi seluruh sistem kebangsaan.

Pemerintah

Organisasi operasional negara yang menjalankan administrasi, kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan. Dalam analogi komputer, pemerintah disepadankan dengan aplikasi, bukan pemilik sistem.

Peradaban Nusantara
Keseluruhan sistem nilai, budaya, etika, tradisi, cara berpikir, dan praktik hidup bangsa Indonesia yang menjadi medium penerjemah nilai dasar negara ke dalam realitas sosial.

R

Rakyat
Pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokratis. Dalam analogi sistem teknologi buku ini, rakyat diposisikan sebagai root owner, yakni pemilik utama sistem negara.

Root Owner
Pemilik tertinggi dalam sistem komputer yang memiliki kewenangan mutlak atas seluruh sistem. Dalam analogi negara, istilah ini digunakan untuk menggambarkan posisi rakyat sebagai pemilik sah negara.

S

Sovereignty (Kedaulatan)
Kewenangan tertinggi untuk menentukan arah, aturan, dan keputusan dalam suatu sistem politik. Dalam analogi teknologi, kedaulatan setara dengan hak root access.

System Hijacking
Pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Dalam analogi negara, istilah ini menggambarkan pembajakan negara oleh kekuatan

non-konstitusional atau kepentingan yang menyimpang dari kedaulatan rakyat.

System Integrity
Kondisi keutuhan sistem sehingga seluruh komponen bekerja sesuai desain asli. Dalam konteks negara, system integrity menggambarkan terjaganya kedaulatan, konstitusi, nilai dasar, dan independensi sistem kebangsaan.

T

Temporary Governance
Konsep yang menempatkan pemerintahan sebagai struktur operasional sementara, bukan pemilik negara. Pemerintah dapat berubah melalui mekanisme konstitusional tanpa mengubah kepemilikan negara oleh rakyat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku "**FREE INDONESIA, SAVE NUSANTARA JILID 1**" ini dapat diselesaikan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara kita kerap kali terjebak pada cara pandang yang keliru. Seringkali masyarakat memahami negara hanya sebatas wujud fisik seperti gedung pemerintahan, lembaga, dan birokrasi, atau bahkan menyamakan negara dengan pejabat yang sedang berkuasa. Akibatnya, rakyat perlahan kehilangan kesadaran atas posisi sejatinya dalam struktur kehidupan kolektif dan seringkali memosisikan diri hanya sebagai pengguna (*user*) atau subjek yang lemah. Buku ini hadir sebagai sebuah refleksi kritis dan fundamental untuk membongkar kesalahpahaman tersebut.

Untuk memudahkan pembacaan atas realitas yang kompleks, buku ini menawarkan kerangka analitis yang segar, yaitu membaca negara melalui pendekatan sistem teknologi. Dalam kerangka ini, negara diposisikan sebagai *hardware* (perangkat fisik), konstitusi sebagai *firmware*, Pancasila sebagai *kernel* (inti sistem), dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system*. Sementara itu, pemerintah diposisikan secara proporsional sebagai *applications* (instrumen operasional sementara) yang tidak bersifat permanen. Di puncak struktur ini, rakyat ditegaskan posisinya

secara mutlak sebagai *Root Owner* yaitu pemilik sah sistem negara yang memiliki kedaulatan tertinggi.

Lebih jauh, buku ini membedah ancaman terbesar dari sebuah sistem kebangsaan, yaitu ketika terjadi *system hijacking* atau pembajakan sistem oleh kekuatan yang tidak memiliki legitimasi. Saat ini, kita dihadapkan pada realitas di mana sistem negara rentan terinfeksi oleh *malware* kekuasaan, seperti oligarki dan kolonialisme modern, yang diam-diam mengambil alih kendali nyata negara. Kondisi ini menyebabkan kedaulatan rakyat direduksi; kepemilikan secara legal masih ada, namun rakyat kehilangan *root access* atau kendali substantif dalam praktiknya.

Dengan menelusuri kembali "Source Code Nusantara", buku ini juga mengingatkan kita bahwa Indonesia modern berdiri di atas fondasi peradaban yang sangat tua. Dari jaringan maritim Sumatra, tata organisasi Jawa, keseimbangan kosmologis Bali dan Nusa Tenggara, kesadaran ekologis Kalimantan, etos pergerakan Sulawesi, keterhubungan global Maluku, hingga kedalaman relasi eksistensial Papua. Semua itu menjadikan bangsa ini sebagai sebuah *multi-civilizational platform* yang kaya, di mana Pancasila berfungsi sebagai inti penyatu keberagaman tersebut.

Harapan terbesar dari lahirnya buku ini adalah untuk menggugah kembali kesadaran kolektif kita. Rakyat bukanlah sekadar "tamu" (*guest*) di rumahnya sendiri. Kita adalah pemilik sah yang harus sadar dan bangkit untuk mengambil kembali kendali kedaulatan atas sistem bangsa ini.

Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendiskusikan, membaca, dan merawat gagasan ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang bermakna bagi perjuangan merawat Ibu Pertiwi.

Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

GLOSARIUM ii
KATA PENGANTAR..... ix
DAFTAR ISI xii
BAGIAN I - MEMAHAMI SISTEM BANGSA 1
BAB 1 - MANUSIA, BANGSA, NEGARA, DAN PERADABAN 2
1.1. Manusia 3
1.2. Keluarga 9
1.3. Masyarakat..... 15
1.4. Bangsa..... 28
1.5. Negara 34
1.6. Peradaban 41
BAB 2 - NEGARA ITU PERANGKAT, BANGSA ITU SISTEM..... 48
2.1. Kesalahan Cara Pandang terhadap Negara 48
2.2. Negara sebagai Perangkat: Analogi Teknologi sebagai Kerangka Baca 54
2.3. *Hardware*: Negara sebagai Perangkat Fisik Kekuasaan..... 61
2.4. Firmware: Konstitusi sebagai Aturan Dasar Sistem..... 66
2.5. Kernel (inti sistem): Pancasila sebagai Inti Operasional Sistem Kebangsaan 72
2.6. Operating System: Peradaban Nusantara sebagai Sistem Kehidupan 78
2.7. Applications: Pemerintah sebagai Instrumen Operasional Sementara..... 84

2.8. *Malware*: Oligarki dan Kolonialisme Modern sebagai Perusak Sistem 90
2.9. *Root Owner*: Rakyat sebagai Pemilik Sah Negara 96
2.10. *Root Administrator*: MPR sebagai Mandataris Kedaulatan Rakyat 102
2.11. Ketika Sistem Dibajak 109
BAB 3 - ROOT ACCESS RAKYAT 116
3.1. Dasar Konstitusional Kedaulatan Rakyat 116
3.2. Apa Itu Kedaulatan? 121
3.3. Owner vs User 128
3.4. Root vs Guest 133
3.5. Ownership vs Control 139
3.6. Legal Sovereignty vs Practical Sovereignty 145
3.7. Ketika Pemilik Kehilangan Root Access 150
3.8. Rakyat adalah Pemilik Sah Negara 155
3.9. MPR sebagai *Root Administrator* Kedaulatan Rakyat 161

BAGIAN II - SOURCE CODE NUSANTARA 167
BAB 4 - NUSANTARA SEBELUM INDONESIA 168
4.1. Nusantara Bukan Sekadar Nama Geografis 168
4.2. Sebelum Negara Modern, Sudah Ada Jaringan Peradaban 174
4.3. Sriwijaya: Arsitektur Jaringan Maritim Nusantara 180
4.4. Majapahit: Imajinasi Politik Kepulauan 185
4.5. Perdagangan sebagai Sistem Penyatu 191

4.6. *Spiritual Networks* dan Sirkulasi Nilai 197
4.7. Kesadaran Kepulauan sebagai Embrio Identitas Bersama.....202
4.8. Indonesia adalah Fase Kekuasaan, Bukan Titik Awal Peradaban.....208
BAB 5 - MULTI-CIVILIZATIONAL PLATFORM ...215
5.1. Indonesia Bukan Bangsa Tunggal yang Homogen.....215
5.2. Sumatra: Peradaban Maritim, Dagang, dan Spiritualitas Jaringan.....221
5.3. Jawa: Peradaban Organisasi, Tata, dan Simbol Kekuasaan 226
5.4. Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Timur: Peradaban Ritual, Kosmologi, dan Keseimbangan 232
5.5. Kalimantan: Peradaban Hutan, Ruang, dan Harmoni Alam 237
5.6. Sulawesi: Peradaban Mobilitas, Kehormatan, dan Keberanian Menjelajah.....243
5.7. Maluku: Peradaban Persimpangan Dunia, Rempah, dan Pluralitas Interaksi 248
5.8. Papua: Peradaban Komunitas, Kosmologi, dan Martabat Eksistensial.....254
BAB 6 - DARI NUSANTARA KE PANCASILA 261
6.1. Pancasila Bukan Produk Vakum Sejarah 261
6.2. Ketuhanan: Akar Spiritual Nusantara 267
6.3. Kemanusiaan: Akar Adab dan Martabat 272
6.4. Persatuan: Akar Geopolitik Kepulauan..277
6.5. Kerakyatan: Akar Musyawarah dan Kebijaksanaan Kolektif 283

6.6. Keadilan Sosial: Akar Gotong Royong dan Solidaritas Kehidupan Bersama 289
6.7. Pancasila sebagai Kernel (inti sistem) Bangsa.....294
6.8. Ketika Pancasila Menjadi Slogan, Bukan Kernel (inti sistem).....300
6.9. Pancasila sebagai Sari Pati Peradaban Nusantara.....305

BAGIAN III - FIRMWARE NEGARA.....312
BAB 7 - KONSTITUSI SEBAGAI FIRMWARE NEGARA 313
7.1. Apa Itu Firmware?.....313
7.2. *Booting* Negara: Negara Tidak Hidup Otomatis.....319
7.3. *Hardware* Initialization: Mengenali Komponen Negara 325
7.4. *Permission Structure*: Siapa Boleh Mengakses Apa 330
7.5. *Authority Routing*: Aliran Kewenangan dalam Sistem Negara 336
7.6. Legitimasi: Dari Mana Sistem Mendapat Otoritas.....341
7.7. Hubungan Antar Lembaga sebagai Arsitektur Sistem Negara 347
7.8. Jika *Firmware* Salah, Negara Akan Salah Hidup.....353
7.9. UUD sebagai *Firmware* Indonesia.....359
BAB 8 - FIRMWARE YANG DIUBAH 365
8.1. *Firmware* Tidak Selalu Tetap.....365

8.2. UUD NRI Tahun 1945 sebagai *Firmware* Awal Republik 370
8.3. Apa yang Terjadi pada Amandemen? 375
8.4. Pergeseran Jalur Kedaulatan 380
8.5. MPR: Dari Lembaga Tertinggi Menjadi Lembaga Negara 385
8.6. Presiden: Dari Mandataris Menjadi Pemegang Mandat Langsung 390
8.7. Partai Politik sebagai *Gateway* Sistem 396
8.8. Konsekuensi *Firmware* Baru 401
8.9. Apakah *Firmware* Baru Sesuai dengan Kernel (inti sistem) Pancasila? 407
8.10. Negara yang Sama, Sistem yang Berbeda 412
BAB 9 - KEDAULATAN PARTAI POLITIK 418
9.1. Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi 418
9.2. Pasal 6A dan Jalur Pencalonan Presiden 423
9.3. *Gateway* Politik dan Hak Akses Kekuasaan 428
9.4. Gatekeeping: Siapa Menentukan Kandidat? 434
9.5. Elite Capture dalam Sistem Kepartaian . 439
9.6. *Pseudo Sovereignty*: Kedaulatan yang Tampak, Tetapi Tidak Utuh 444
9.7. Dari Kedaulatan Rakyat ke Kedaulatan Partai 450
9.8. Apakah Ini Sesuai dengan Sila Kerakyatan? 455
9.9. Ketika Pemilik Tidak Mengendalikan Sistem 460

BAB 10 - KETIKA ROOT ACCESS DIBAJAK 467
10.1. *Root Owner* dan Root Access.....467
10.2. Negara Milik Rakyat Secara Formal 472
10.3. Dari Pemilik Menjadi Pengguna.....477
10.4. *Access Denied* 483
10.5. *Political Alienation* 489
10.6. Demokrasi Tanpa Kepemilikan 494
10.7. Ketika Negara Menjadi Platform Tertutup.....500
10.8. Gejala-Gejala Pembajakan *Root Access* ..505
10.9. Mengapa Rakyat Tidak Menyadarinya?.....511
10.10. Tamu di Rumah Sendiri 518

BAGIAN IV - MALWARE SYSTEM.....524
BAB 11 - OLIGARKI SEBAGAI MALWARE.....525
11.1. Apa Itu *Malware*?.....525
11.2. Dari *Root Access* ke *Economic Capture* 531
11.3. Economic Capture 536
11.4. *Media Capture* 542
11.5. *Political Capture*.....547
11.6. *Regulatory Capture* 553
11.7. *Malware* Tidak Selalu Merusak Sistem..558
11.8. Mengapa Sulit Dilihat?.....563
11.9. Gejala-Gejala Oligarki 568
11.10. Negara yang Melayani Siapa?.....574
BAB 12 - DEMOKRASI TRANSAKSIONAL SEBAGAI SPYWARE 581
12.1. Apa Itu *Spyware*? 581
12.2. Dari Oligarki ke Manipulasi Persepsi...587
12.3. Manipulasi Opini Publik 592

12.4. *Polling Illusion* 598
12.5. *Behavioral Engineering* 603
12.6. Demokrasi sebagai Industri Perhatian.. 608
12.7. *Pseudo Consent* 614
12.8. Ketika Rakyat Memilih Apa yang Sudah Dipilihkan 619
12.9. Demokrasi yang Menghasilkan Kepatuhan..... 625
12.10. Dari Kedaulatan Menuju Persetujuan Semu 631
BAB 13 - KOLONIALISME MODERN SEBAGAI ROOTKIT 637
13.1. Apa Itu *Rootkit*? 637
13.2. Dari Kolonialisme Klasik ke Kolonialisme Modern 643
13.3. *Debt Dependency* (Ketergantungan Utang) 650
13.4. *Foreign Influence* 656
13.5. *Resource Exploitation* 662
13.6. *Policy Engineering* 666
13.7. Ketika Negara Tetap Merdeka Secara Formal..... 672
13.8. *Root Access* yang Dipinjamkan 678
13.9. Koloni Tanpa Kolonial 684
13.10. *Rootkit* Global dan Negara Berkedaulatan..... 689
BAB 14 - KETIKA NEGARA TERINFEKSI 695
14.1. Dari Sistem yang Melayani Menjadi Sistem yang Membebani 695
14.2. Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas 701

14.3. Birokrasi yang Menjadi Mesin Ekstraksi 706
14.4. Ekonomi yang Menekan Rakyat 712
14.5. Aparat yang Kehilangan Orientasi Pelayanan 718
14.6. Kebijakan yang Semakin Elitis 723
14.7. Hilangnya Kepercayaan Publik 729
14.8. Ketika Rakyat Menjadi Terdakwa Permanen 735
14.9. Gejala Sistemik, Bukan Insidental 740
14.10. Negara yang Berubah Menjadi *Malware* 747

BAGIAN I - MEMAHAMI SISTEM BANGSA

BAB 1
MANUSIA, BANGSA, NEGARA, DAN PERADABAN

1.1. Manusia

Segala pembicaraan tentang bangsa, negara, kekuasaan, hukum, maupun peradaban harus dimulai dari satu titik paling mendasar, yaitu manusia. Kesalahan konseptual yang sering terjadi dalam pembahasan kenegaraan adalah menempatkan negara sebagai pusat segala sesuatu, seolah-olah manusia hadir untuk melayani sistem yang dibangun atas nama negara. Cara pandang seperti ini secara perlahan membalik hubungan yang seharusnya bersifat fundamental, karena pada hakikatnya negara merupakan hasil konstruksi manusia, bukan manusia yang merupakan hasil konstruksi negara. Sebelum negara dibentuk, sebelum konstitusi ditulis, sebelum hukum dilembagakan, manusia telah lebih dahulu hidup, berpikir, berinteraksi, dan membangun kehidupan bersama.

Manusia pertama-tama adalah makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia membawa kebutuhan dasar yang melekat secara alamiah pada keberadaannya, seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat berlindung, keamanan fisik, kesehatan, reproduksi, dan keberlangsungan hidup. Seluruh kebutuhan tersebut membentuk fondasi paling awal dari kehidupan manusia. Pada tingkat ini, manusia memiliki kesamaan dengan makhluk hidup lainnya, karena dorongan untuk mempertahankan eksistensi merupakan hukum dasar kehidupan biologis. Namun justru dari keterbatasan biologis tersebut muncul kebutuhan untuk bekerja sama, karena manusia secara

individual tidak memiliki kemampuan mutlak untuk memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri.

Jika dibandingkan dengan banyak makhluk lain, manusia justru tampak memiliki kelemahan biologis yang cukup besar. Manusia tidak memiliki kecepatan fisik yang dominan, tidak memiliki perlindungan tubuh alami yang kuat, dan tidak dibekali kemampuan bertahan hidup yang superior secara instingtif. Keterbatasan tersebut memaksa manusia mengembangkan cara lain untuk mempertahankan kehidupan. Kerja sama menjadi kebutuhan alami, bukan pilihan tambahan. Dari kebutuhan untuk saling membantu inilah kehidupan kolektif mulai bertumbuh.

Namun manusia tidak dapat dipahami hanya sebagai makhluk biologis. Jika kehidupan manusia hanya digerakkan oleh naluri bertahan hidup, maka sejarah tidak akan mengenal ilmu pengetahuan, seni, teknologi, hukum, organisasi sosial, maupun sistem ketatanegaraan.

Kehidupan manusia akan berhenti pada pola survival semata. Yang membedakan manusia dari sekadar organisme hidup adalah kapasitas untuk berpikir, merenung, mengingat, merancang, dan membangun abstraksi tentang dunia di sekitarnya.

Karena itu manusia adalah makhluk rasional. Rasionalitas memungkinkan manusia mengenali pola, memahami hubungan sebab-akibat, menyusun logika, mengevaluasi pengalaman, serta membangun sistem yang tidak ditemukan secara alami. Dari kemampuan berpikir tersebut lahir ilmu pengetahuan, teknologi, tata kelola, ekonomi, hingga organisasi kekuasaan. Negara,

dalam pengertian modern, merupakan salah satu hasil dari kapasitas rasional manusia untuk merancang mekanisme pengelolaan kehidupan bersama. Dengan demikian, negara bukan entitas alamiah, melainkan hasil desain pemikiran manusia.

Pemahaman bahwa negara adalah hasil desain memiliki konsekuensi penting. Sesuatu yang dirancang manusia selalu memiliki kemungkinan berhasil maupun gagal. Desain yang sehat dapat melahirkan keteraturan, perlindungan, dan keadilan. Sebaliknya, desain yang keliru dapat menghasilkan ketimpangan, penindasan, pembajakan kekuasaan, bahkan kerusakan sistemik yang berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, negara tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral dan kebal dari kritik, karena pada dasarnya negara merupakan konstruksi yang lahir dari proses intelektual manusia.

Dalam kerangka berpikir buku ini, pemahaman tersebut menjadi sangat penting karena posisi manusia tidak boleh diturunkan menjadi sekadar objek dari sistem yang diciptakannya sendiri. Jika rakyat merupakan pemilik sah kehidupan kolektif, maka seluruh instrumen kenegaraan harus dipahami sebagai alat yang bekerja untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Dalam analogi yang digunakan dalam buku ini, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau *root owner*, sementara struktur yang dibangun di atasnya hanyalah instrumen operasional yang harus tunduk pada desain dasar kehidupan bersama. Menempatkan manusia sebagai objek dari

sistem yang seharusnya melayani justru merupakan bentuk pembalikan logika kedaulatan.

Selain sebagai makhluk biologis dan rasional, manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak ada manusia yang benar-benar tumbuh dalam ruang hampa sosial, karena bahasa dipelajari dari interaksi, nilai diwariskan melalui hubungan antargenerasi, dan identitas dibentuk melalui lingkungan kehidupan bersama.

Bahkan seseorang yang merasa sangat mandiri tetap bergantung pada sistem sosial yang dibangun oleh orang lain. Jalan yang digunakan, pengetahuan yang diwarisi, makanan yang tersedia, dan simbol-simbol budaya yang dikenali merupakan hasil dari kehidupan sosial yang panjang.

Sifat sosial manusia melahirkan komunitas sebagai bentuk awal kehidupan bersama. Keluarga menjadi unit pertama tempat manusia belajar relasi, tanggung jawab, dan kerja sama. Dari keluarga berkembang kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat hingga struktur sosial yang semakin kompleks.

Dalam proses tersebut, manusia mulai mengenal pembagian peran, mekanisme penyelesaian konflik, kepemimpinan, norma sosial, dan kesepakatan kolektif. Seluruh unsur ini tumbuh secara organik dari kebutuhan hidup bersama, bukan dari perintah negara.

Fakta ini sangat penting untuk dipahami karena kehidupan sosial manusia telah ada jauh sebelum negara modern dikenal. Norma hidup bersama telah berkembang sebelum undang-undang ditulis.

Kesepakatan sosial telah lahir sebelum konstitusi dilembagakan. Mekanisme kepemimpinan telah dikenal sebelum jabatan formal negara dibentuk. Artinya, keteraturan sosial bukan ciptaan negara, melainkan konsekuensi alami dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Kesalahan besar dalam cara pandang pemerintahan modern sering muncul ketika negara diperlakukan sebagai sumber utama seluruh keteraturan. Pandangan seperti ini menjadikan manusia seolah-olah bergantung sepenuhnya pada struktur kekuasaan untuk dapat hidup teratur.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa manusia membentuk komunitas terlebih dahulu, mengembangkan norma terlebih dahulu, membangun solidaritas terlebih dahulu, dan baru pada tahap tertentu membentuk organisasi kekuasaan formal. Negara adalah instrumen turunan, bukan sumber pertama kehidupan kolektif manusia.

Namun manusia masih memiliki satu dimensi yang jauh lebih dalam daripada aspek biologis, rasional, dan sosial. Manusia adalah makhluk spiritual yang tidak hanya bertanya tentang bagaimana hidup, tetapi juga untuk apa hidup.

Manusia tidak hanya mencari keamanan, tetapi juga kebenaran. Manusia tidak hanya mengejar keteraturan, tetapi juga keadilan. Dimensi inilah yang menjadikan kehidupan manusia berbeda secara fundamental dari sekadar sistem biologis atau mekanisme sosial biasa.

Spiritualitas dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai ritual formal keagamaan, melainkan sebagai kesadaran tentang makna, moralitas, tanggung jawab, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan realitas yang melampaui kepentingan material jangka pendek.

Dari dimensi spiritual lahir pertanyaan tentang benar dan salah, adil dan zalim, pantas dan tidak pantas, luhur dan rendah. Tanpa dimensi ini, manusia mungkin tetap cerdas, tetapi belum tentu bijaksana. Tanpa spiritualitas, akal dapat berubah menjadi alat pembenaran bagi dominasi yang sangat terorganisasi.

Sejarah manusia memperlihatkan bahwa kemajuan teknis tidak otomatis menghasilkan kemajuan moral. Teknologi dapat digunakan untuk pendidikan, tetapi juga untuk propaganda.

Organisasi dapat digunakan untuk pelayanan, tetapi juga untuk penindasan. Hukum dapat digunakan untuk perlindungan, tetapi juga untuk legitimasi ketidakadilan. Karena itu kehidupan kolektif yang sehat membutuhkan fondasi etis, bukan hanya kecanggihan organisasi.

Dari perpaduan sifat biologis, rasional, sosial, dan spiritual inilah manusia menjadi pembentuk komunitas kehidupan yang kompleks. Manusia bukan sekadar makhluk yang bertahan hidup, tetapi makhluk yang menciptakan makna, membangun keteraturan, menyusun identitas, dan mewariskan nilai. Dari manusia lahir keluarga, masyarakat, tradisi, kebudayaan, hingga kesadaran kolektif yang lebih besar. Pada titik inilah manusia menjadi fondasi bagi

lahirnya bangsa, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

1.2. Keluarga

Manusia tidak lahir dalam keadaan mampu menjalani kehidupannya sendiri. Sejak pertama kali hadir di dunia, manusia membutuhkan orang lain untuk merawat, melindungi, dan membimbingnya. Ia membutuhkan tempat untuk bertumbuh, mengenal kasih sayang, belajar berbicara, mengenal lingkungan, dan memahami bagaimana memperlakukan orang lain. Tempat pertama yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat manusia menjalani kehidupan bersama. Sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas, seorang anak terlebih dahulu mengenal orang-orang yang berada paling dekat dengannya. Dari merekalah ia menerima perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan berbagai bentuk pembelajaran pertama tentang kehidupan. Karena itu, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan manusia.

Di dalam keluarga, manusia pertama kali belajar bahwa kehidupan tidak hanya tentang dirinya sendiri. Seorang anak belajar bahwa ada orang lain yang harus diperhatikan. Ia belajar berbagi, menunggu, menghormati, meminta maaf, mengucapkan terima kasih, membantu, dan memahami perasaan orang lain. Hal-hal yang tampak sederhana tersebut sebenarnya merupakan dasar bagi kemampuan seseorang untuk hidup bersama.

Keluarga juga menjadi tempat pertama seseorang mengenal nilai. Kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, penghormatan, kesetiaan, kepedulian, dan kerja sama biasanya pertama kali diperkenalkan melalui kehidupan keluarga. Nilai tersebut tidak cukup hanya diajarkan melalui kata-kata. Anak terutama mempelajarinya melalui contoh yang ia lihat dan pengalaman yang ia jalani setiap hari.

Karena itu, keluarga pada dasarnya adalah tempat pendidikan pertama manusia. Pendidikan tidak selalu berarti kegiatan belajar di dalam ruang kelas. Ketika seorang anak melihat orang tuanya menepati janji, ia sedang belajar tentang kejujuran. Ketika ia melihat orang tuanya membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan, ia sedang belajar tentang kepedulian. Ketika ia diajarkan untuk menyelesaikan kesalahan dan meminta maaf, ia sedang belajar tentang tanggung jawab.

Apa yang dialami seseorang di dalam keluarga dapat memberikan pengaruh yang panjang terhadap kehidupannya. Cara seseorang memperlakukan orang lain, cara ia menghadapi masalah, cara ia membangun kepercayaan, dan cara ia menjalankan tanggung jawab sering kali dipengaruhi oleh pengalaman yang diperolehnya sejak masa awal kehidupan.

Keluarga juga merupakan tempat pertama seseorang mengenal batas. Seorang anak memiliki keinginan, tetapi tidak semua keinginannya dapat dipenuhi. Ia belajar bahwa ada aturan dalam kehidupan bersama. Ia belajar bahwa kebebasan dirinya memiliki hubungan dengan keberadaan orang lain. Ia belajar

bahwa menggunakan sesuatu harus memperhatikan orang lain, bahwa berbicara memiliki akibat, dan bahwa setiap tindakan memiliki tanggung jawab.

Melalui proses tersebut, keluarga membantu seseorang membangun kemampuan mengendalikan dirinya. Kemampuan mengendalikan diri sangat penting karena kehidupan bersama tidak mungkin berjalan apabila setiap orang hanya mengikuti keinginannya sendiri. Seseorang perlu belajar menahan diri, mempertimbangkan akibat tindakannya, dan memahami kebutuhan orang lain.

Keluarga juga merupakan tempat pertama seseorang mengenal kepercayaan. Seorang anak bergantung kepada orang tua dan anggota keluarganya. Dari hubungan tersebut tumbuh pengalaman tentang apakah dunia di sekitarnya merupakan tempat yang aman, apakah orang lain dapat dipercaya, dan apakah dirinya dihargai. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain ketika ia tumbuh dewasa.

Dalam keluarga pula seseorang pertama kali belajar mengenai tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak, sementara anak secara bertahap belajar memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Ketika anak bertambah besar, tanggung jawabnya juga berkembang. Ia mulai membantu pekerjaan rumah, menjaga adik, memperhatikan orang tua, dan mengambil bagian dalam kehidupan keluarga.

Tanggung jawab membuat seseorang memahami bahwa kehidupan bersama membutuhkan kontribusi setiap anggota. Keluarga tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya satu orang yang melakukan semuanya sementara anggota lainnya tidak peduli. Setiap anggota memiliki peran yang berbeda sesuai dengan keadaan dan kemampuannya, tetapi semuanya saling berkaitan.

Keluarga juga menjadi tempat pertama manusia belajar mengenai perbedaan. Orang-orang dalam satu keluarga tidak selalu memiliki sifat, keinginan, kemampuan, dan cara berpikir yang sama. Orang tua dapat memiliki pandangan yang berbeda dengan anak. Kakak dapat memiliki kebiasaan yang berbeda dengan adik. Perbedaan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi seseorang untuk belajar memahami bahwa hidup bersama tidak berarti semua orang harus sama.

Dari keluarga pula seseorang belajar menyelesaikan perbedaan. Perbedaan pendapat dapat dibicarakan. Kesalahan dapat diperbaiki. Perselisihan dapat diselesaikan. Kemarahan dapat diredakan. Hubungan dapat dipulihkan melalui permintaan maaf dan saling memahami. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal ketika seseorang kelak berhadapan dengan lingkungan yang lebih luas.

Keluarga juga merupakan tempat pertama berlangsungnya proses pewarisan kebudayaan. Bahasa yang digunakan seseorang, cara menghormati orang lain, kebiasaan makan, cara menyambut tamu, tradisi keluarga, cerita tentang leluhur, dan berbagai kebiasaan lainnya sering kali pertama kali diterima melalui

keluarga. Dengan demikian, keluarga menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan satu generasi dengan generasi berikutnya.

Namun keluarga bukan hanya tempat menerima warisan masa lalu. Keluarga juga merupakan tempat membentuk masa depan. Orang tua memberikan pengalaman kepada anak, tetapi anak juga membawa gagasan baru ke dalam keluarga. Karena itu, hubungan antargenerasi bukan hanya proses satu arah. Orang tua belajar dari anak, dan anak belajar dari orang tua. Keluarga berkembang melalui hubungan tersebut.

Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Perbedaan, kesalahpahaman, keterbatasan ekonomi, perbedaan keinginan, dan berbagai persoalan lainnya dapat terjadi dalam kehidupan keluarga. Yang membuat keluarga kuat bukan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan anggota keluarga untuk menghadapi masalah bersama.

Kasih sayang menjadi salah satu kekuatan utama keluarga. Kasih sayang membuat seseorang merasa diterima dan memiliki tempat untuk kembali. Namun kasih sayang tidak berarti membiarkan segala sesuatu tanpa batas. Kasih sayang juga berarti memberikan nasihat, menetapkan batas, mengajarkan tanggung jawab, dan membantu seseorang menjadi lebih baik.

Keluarga yang baik memberikan keseimbangan antara kasih sayang dan tanggung jawab. Anak membutuhkan perhatian, tetapi juga membutuhkan pembelajaran tentang disiplin. Anak membutuhkan kebebasan, tetapi juga membutuhkan batas. Anak membutuhkan dukungan, tetapi juga perlu belajar

mandiri. Keseimbangan tersebut membantu seseorang tumbuh menjadi manusia yang mampu mengurus dirinya sekaligus memperhatikan orang lain.

Ketika seseorang mulai keluar dari lingkungan keluarga, ia membawa pengalaman yang telah diperolehnya ke dalam lingkungan yang lebih luas. Ia mulai berinteraksi dengan tetangga, teman, guru, dan berbagai orang lainnya. Cara ia berkomunikasi, bekerja sama, menghadapi perbedaan, dan membangun kepercayaan akan terus berkembang melalui pengalaman tersebut.

Dengan demikian, keluarga bukanlah keseluruhan kehidupan sosial manusia, tetapi merupakan awal dari kehidupan sosial manusia. Dari keluarga seseorang belajar prinsip-prinsip dasar yang kemudian digunakan dalam hubungan yang lebih luas.

Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang kasih sayang sebelum ia mengenal kepedulian kepada orang lain. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang tanggung jawab sebelum ia menerima tanggung jawab yang lebih luas. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar menghormati sebelum ia berhadapan dengan berbagai manusia yang berbeda. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar bekerja sama sebelum ia menjadi bagian dari lingkungan yang lebih besar.

Karena itu, kualitas masyarakat tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kualitas keluarga yang membentuk manusia di dalamnya. Masyarakat yang terdiri atas manusia yang terbiasa menghormati, bertanggung jawab, bekerja sama, dan peduli akan

memiliki dasar hubungan yang lebih kuat. Sebaliknya, ketika banyak manusia tumbuh tanpa pengalaman yang cukup tentang kasih sayang, tanggung jawab, penghormatan, dan kepercayaan, kehidupan bersama akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Keluarga dengan demikian bukan sekadar tempat tinggal bersama. Keluarga adalah tempat pembentukan manusia. Di dalamnya karakter mulai dibentuk, nilai mulai diperkenalkan, tanggung jawab mulai dipelajari, dan kemampuan hidup bersama mulai tumbuh.

Dari keluargalah manusia mulai mengenal kehidupan bersama. Setelah itu, lingkaran kehidupannya semakin luas. Ia mengenal tetangga, teman, sekolah, lingkungan kerja, komunitas, dan berbagai kelompok lainnya. Hubungan yang semula terbatas di dalam keluarga berkembang menjadi hubungan sosial yang lebih luas.

Dari sinilah perjalanan manusia menuju masyarakat dimulai. Keluarga adalah tempat pertama manusia belajar menjadi manusia bersama manusia lainnya. Dan masyarakat yang baik pada akhirnya berawal dari manusia yang belajar hidup bersama sejak lingkungan yang paling dekat dengan dirinya yaitu keluarga.

1.3. Masyarakat

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup bersama. Sejak dilahirkan, manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia lahir dalam keluarga, tumbuh di tengah lingkungan, belajar dari orang-orang

di sekitarnya, memenuhi kebutuhan melalui bantuan orang lain, dan sepanjang hidupnya membangun hubungan dengan sesamanya. Kehidupan bersama yang berlangsung terus-menerus itulah yang membentuk masyarakat.

Masyarakat tidak muncul hanya karena ada sekumpulan manusia yang tinggal di tempat yang sama. Masyarakat terbentuk karena manusia saling berhubungan. Mereka saling mengenal, berkomunikasi, bekerja sama, saling membantu, berbagi pengalaman, memiliki kebiasaan, mengenal aturan, dan membangun berbagai bentuk hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat pada dasarnya adalah manusia yang hidup bersama dalam suatu hubungan yang teratur dan memiliki kehidupan bersama yang saling berkaitan.

Kehidupan masyarakat bermula dari kebutuhan manusia untuk saling melengkapi. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan makanan, tempat tinggal, pendidikan, pengetahuan, perlindungan, pekerjaan, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sebagian kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, tetapi sebagian besar membutuhkan keterlibatan orang lain. Seorang petani membutuhkan pedagang, pedagang membutuhkan pembeli, seorang guru membutuhkan murid, seorang murid membutuhkan guru, dan sebuah keluarga membutuhkan lingkungan yang mendukung kehidupannya. Saling membutuhkan inilah yang membuat manusia membangun hubungan yang semakin luas.

Hubungan tersebut pada awalnya dapat berlangsung sederhana. Dalam keluarga, misalnya, terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan, sedangkan anak belajar menerima, menghormati, dan kemudian bertanggung jawab. Ketika manusia hidup berdampingan dengan keluarga lain, terbentuk hubungan antar tetangga. Ketika hubungan semakin luas, terbentuklah lingkungan, kelompok, komunitas, dan berbagai bentuk kehidupan bersama lainnya. Dari hubungan yang sederhana kemudian berkembang menjadi hubungan yang semakin kompleks.

Masyarakat dengan demikian memiliki akar yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat bukan sesuatu yang jauh dan abstrak. Masyarakat dapat ditemukan di dalam keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat kerja, pasar, desa, komunitas, dan berbagai tempat manusia berinteraksi. Ketika manusia saling berhubungan dan membangun kehidupan bersama, di situlah masyarakat berada.

Salah satu unsur utama masyarakat adalah interaksi. Manusia saling berbicara, saling mendengarkan, saling membantu, saling belajar, saling memengaruhi, dan saling memberikan tanggapan. Melalui interaksi tersebut, manusia mengenal orang lain dan sekaligus mengenal dirinya sendiri. Seorang anak belajar berbicara karena berinteraksi dengan orang lain. Seseorang belajar bersikap sopan karena melihat dan mengalami hubungan dengan lingkungannya.

Seseorang belajar bertanggung jawab karena dipercaya oleh orang lain. Banyak hal yang membentuk diri manusia sesungguhnya lahir dari hubungan sosial yang dijalaninya.

Interaksi yang berlangsung terus-menerus kemudian melahirkan kebiasaan. Suatu tindakan yang dilakukan berulang kali dan diterima oleh lingkungan dapat menjadi kebiasaan bersama. Dari kebiasaan tersebut dapat berkembang aturan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Masyarakat mengenal cara menghormati orang yang lebih tua, cara memperlakukan tamu, cara membantu tetangga, cara berbicara kepada orang lain, dan berbagai kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam kehidupan bersama terdapat pula nilai. Nilai memberikan ukuran mengenai sesuatu yang dianggap baik, penting, pantas, atau berharga. Kejujuran dianggap baik. Saling menghormati dianggap penting. Menolong orang yang mengalami kesulitan dianggap sebagai perbuatan yang baik. Menjaga kepercayaan dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang memengaruhi cara manusia bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai kemudian menjadi salah satu dasar terbentuknya norma. Norma memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai perilaku yang diharapkan dalam kehidupan bersama. Norma membantu manusia memahami apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang

sebaiknya dihindari. Tanpa adanya norma, hubungan antarmanusia akan lebih mudah mengalami kekacauan karena setiap orang dapat bertindak hanya berdasarkan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan orang lain.

Namun norma tidak selalu berarti aturan tertulis. Banyak aturan dalam kehidupan masyarakat tidak pernah dituliskan, tetapi tetap dipahami dan dijalankan. Menghormati orang tua, menjaga perasaan orang lain, tidak mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga sopan santun merupakan contoh perilaku yang banyak tumbuh melalui kebiasaan dan nilai kehidupan. Masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk keteraturan melalui kesadaran dan kebiasaan bersama.

Karena itu, keteraturan masyarakat tidak hanya dibangun melalui aturan yang tertulis. Keteraturan juga tumbuh dari kesadaran manusia untuk menghormati sesamanya. Semakin kuat kesadaran tersebut, semakin mudah kehidupan bersama berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika manusia hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain, hubungan sosial menjadi mudah rusak.

Salah satu kekuatan terbesar masyarakat adalah kerja sama. Manusia bekerja sama karena menyadari bahwa banyak hal tidak dapat dilakukan seorang diri. Sebuah rumah dapat dibangun karena banyak orang bekerja bersama. Sebuah lingkungan dapat dibersihkan karena warga bekerja bersama. Sebuah keluarga dapat bertahan karena anggota keluarganya saling membantu. Sebuah kegiatan dapat berjalan karena

banyak orang memberikan tenaga, waktu, pikiran, atau sumber daya.

Kerja sama membuat manusia mampu mencapai sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan masing-masing individu. Seseorang mungkin hanya mampu mengangkat satu bagian pekerjaan, tetapi ketika banyak orang mengerjakannya bersama, pekerjaan yang besar dapat diselesaikan. Inilah salah satu alasan mengapa kehidupan manusia berkembang melalui kebersamaan.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, semangat kerja sama tersebut dikenal sangat kuat melalui gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kesadaran bahwa kehidupan seseorang berkaitan dengan kehidupan orang lain. Ketika seorang tetangga mengalami kesulitan, orang-orang di sekitarnya membantu. Ketika lingkungan membutuhkan perbaikan, masyarakat bekerja bersama. Ketika ada anggota masyarakat yang mengalami musibah, orang lain datang memberikan bantuan. Gotong royong menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dibangun oleh hubungan kepentingan, tetapi juga oleh kepedulian.

Kepedulian melahirkan solidaritas. Solidaritas adalah kesadaran bahwa kehidupan orang lain juga penting bagi kehidupan bersama. Solidaritas membuat manusia tidak hanya bertanya, "Apa yang saya dapatkan?" tetapi juga bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untuk orang lain?" Sikap seperti inilah yang membuat masyarakat memiliki kekuatan untuk menghadapi kesulitan.

Masyarakat yang memiliki solidaritas tidak berarti masyarakat yang seluruh anggotanya selalu memiliki keadaan yang sama. Perbedaan tetap ada. Ada yang lebih tua dan lebih muda, ada yang memiliki kemampuan berbeda, ada yang bekerja dalam bidang berbeda, dan ada yang memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan kesadaran bahwa mereka tetap hidup bersama.

Perbedaan merupakan bagian alami dari masyarakat. Tidak ada masyarakat yang seluruh anggotanya memiliki pemikiran, kebiasaan, kemampuan, dan keinginan yang sama. Bahkan dalam satu keluarga pun dapat ditemukan perbedaan. Perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, perbedaan cara pandang antara tetangga, atau perbedaan kepentingan dalam sebuah kelompok merupakan sesuatu yang wajar.

Yang penting bukan menghilangkan perbedaan, tetapi belajar hidup dengan perbedaan. Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang memaksa semua orang menjadi sama. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu menghargai perbedaan dan mencari jalan agar perbedaan tersebut tidak merusak hubungan bersama.

Karena itu, kemampuan untuk berdialog menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika terdapat perbedaan, manusia perlu mendengarkan sebelum menjawab, memahami sebelum menilai, dan mencari jalan keluar sebelum memperbesar masalah. Dialog memungkinkan manusia melihat bahwa orang

lain mungkin memiliki pengalaman yang berbeda sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda pula.

Selain kerja sama, masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari konflik. Selama manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, kemungkinan terjadinya konflik akan selalu ada. Konflik antara anggota keluarga, antar tetangga, antarkelompok, atau antarpihak dalam suatu kegiatan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik tidak selalu berarti kehancuran. Konflik dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki hubungan apabila diselesaikan dengan baik. Melalui konflik, manusia dapat mengetahui adanya masalah yang sebelumnya tidak terlihat. Perbedaan pendapat dapat membantu seseorang memahami sudut pandang lain. Perselisihan dapat mendorong lahirnya kesepakatan baru yang lebih baik.

Yang berbahaya bukan keberadaan konflik, tetapi ketidakmampuan mengelola konflik. Konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian dapat berubah menjadi kebencian. Kebencian dapat berkembang menjadi permusuhan. Permusuhan dapat merusak kepercayaan dan memecah hubungan yang telah dibangun dalam waktu lama. Karena itu, masyarakat membutuhkan kebiasaan menyelesaikan masalah melalui komunikasi, musyawarah, saling memahami, dan kesediaan mencari jalan keluar.

Kehidupan masyarakat juga membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan sesuatu yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan kualitas hubungan antarmanusia. Seorang anak percaya kepada

orang tuanya. Suami dan istri membangun kehidupan melalui kepercayaan. Tetangga saling percaya dalam menjaga lingkungan. Pedagang dan pembeli membutuhkan kepercayaan. Teman membutuhkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan sosial akan menjadi penuh kecurigaan.

Kepercayaan tidak muncul dengan sendirinya. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan pengalaman yang baik. Sekali kepercayaan rusak, hubungan dapat berubah secara mendalam. Karena itu, menjaga kepercayaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terbesar dalam kehidupan masyarakat.

Selain kepercayaan, masyarakat membutuhkan rasa memiliki. Manusia ingin merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Seseorang merasa menjadi bagian dari keluarga, lingkungan, kelompok, komunitas, atau tempat di mana ia hidup. Rasa memiliki membuat seseorang bersedia menjaga lingkungan dan memperhatikan kepentingan bersama.

Ketika seseorang merasa memiliki lingkungan tempat tinggalnya, ia akan lebih peduli terhadap kebersihan. Ketika seseorang merasa memiliki komunitasnya, ia akan lebih bersedia membantu anggota lainnya. Ketika seseorang merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok, ia akan memiliki dorongan untuk menjaga hubungan yang telah dibangun bersama. Rasa memiliki inilah yang membuat masyarakat tidak hanya menjadi kumpulan individu,

tetapi menjadi kehidupan bersama yang memiliki ikatan.

Masyarakat juga memiliki pembagian peran. Setiap orang menjalankan peran tertentu sesuai dengan kedudukan, kemampuan, usia, pengalaman, dan lingkungan kehidupannya. Dalam keluarga terdapat orang tua dan anak. Dalam lingkungan pendidikan terdapat guru dan peserta didik. Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai pekerjaan yang saling melengkapi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang menghasilkan barang, memberikan jasa, mengajar, merawat, membangun, mengangkut, menjual, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya.

Pembagian peran membuat kehidupan bersama menjadi lebih teratur. Tidak semua orang harus melakukan pekerjaan yang sama. Justru karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda, berbagai kebutuhan manusia dapat saling dipenuhi. Perbedaan pekerjaan bukan alasan untuk menganggap seseorang lebih berharga daripada orang lain. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik memiliki manfaat bagi kehidupan bersama.

Masyarakat juga menjadi tempat berlangsungnya proses belajar. Manusia belajar bukan hanya di dalam ruang pendidikan, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari. Anak belajar dari orang tua. Seseorang belajar dari tetangga. Orang muda belajar dari orang yang lebih tua. Orang dewasa juga belajar dari generasi yang lebih muda. Pengetahuan dan pengalaman terus berpindah melalui hubungan antarmanusia.

Proses belajar tersebut membentuk kebiasaan dan karakter. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kejujuran cenderung belajar menghargai kejujuran. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang suka membantu akan mengenal arti kepedulian. Sebaliknya, lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakpedulian juga dapat memengaruhi perilaku seseorang. Karena itu, kualitas masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan manusia yang hidup di dalamnya.

Masyarakat juga memiliki kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil kehidupan manusia yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahasa, tradisi, kesenian, makanan, pakaian, cerita, pengetahuan, tata cara pergaulan, dan berbagai kebiasaan merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui kebudayaan, masyarakat menyimpan pengalaman masa lalu dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

Namun kebudayaan bukan sesuatu yang berhenti. Kebudayaan dapat berubah seiring perubahan kehidupan. Generasi baru dapat mempertahankan nilai yang dianggap baik, mengembangkan hal-hal baru, dan meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak sesuai. Dengan demikian, masyarakat selalu berada dalam proses antara mempertahankan sesuatu yang dianggap berharga dan menerima perubahan yang diperlukan.

Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Cara manusia bekerja berubah. Cara manusia berkomunikasi berubah. Cara manusia memperoleh pengetahuan berubah. Teknologi

membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan lingkungan juga memengaruhi cara manusia memenuhi kebutuhannya. Semua perubahan tersebut membuat masyarakat terus bergerak.

Perubahan dapat membawa manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan. Perubahan yang cepat dapat membuat sebagian orang kesulitan menyesuaikan diri. Kebiasaan lama dapat bertemu dengan kebiasaan baru. Nilai yang diwariskan dapat berhadapan dengan cara hidup yang berbeda. Karena itu, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang membuat kehidupan bersama tetap memiliki arah.

Masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang tidak pernah berubah. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu berubah tanpa kehilangan kemanusiaannya. Kemajuan tidak hanya diukur dari semakin canggihnya alat yang digunakan manusia, tetapi juga dari semakin baiknya hubungan antarmanusia. Teknologi dapat berkembang dengan cepat, tetapi jika manusia menjadi semakin tidak peduli terhadap sesamanya, maka perkembangan tersebut belum tentu menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Ukuran kemajuan masyarakat pada akhirnya dapat dilihat dari bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya. Apakah orang yang lemah mendapatkan bantuan? Apakah orang yang berbeda tetap dihormati? Apakah anak-anak mendapatkan perhatian? Apakah orang tua dihargai? Apakah tetangga saling membantu? Apakah orang dapat menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang

lain? Apakah masyarakat mampu menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan kualitas kehidupan bersama.

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang baik. Di dalamnya terdapat kepercayaan, kepedulian, kerja sama, tanggung jawab, penghormatan, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan. Masyarakat seperti ini tidak berarti bebas dari masalah. Masalah tetap ada, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk menghadapinya bersama.

Pada akhirnya, masyarakat adalah tempat manusia belajar hidup bersama. Di dalam masyarakat manusia belajar bahwa dirinya bukan satu-satunya manusia yang memiliki kebutuhan. Ia belajar bahwa tindakannya dapat memengaruhi orang lain. Ia belajar bahwa kebebasan membutuhkan tanggung jawab. Ia belajar bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik apabila manusia saling membantu. Ia juga belajar bahwa perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh.

Masyarakat pada hakikatnya adalah kehidupan bersama yang dibangun oleh hubungan antarmanusia. Di dalamnya terdapat kebutuhan, interaksi, nilai, norma, kebiasaan, kerja sama, solidaritas, kepercayaan, kebudayaan, pembagian peran, dan perubahan. Semua unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk kehidupan yang terus berkembang.

Karena itu, membangun masyarakat pada dasarnya adalah membangun hubungan antarmanusia. Membangun kepercayaan, menumbuhkan kepedulian,

menjaga kebersamaan, menghormati perbedaan, membiasakan kerja sama, dan menanamkan tanggung jawab merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang baik.

Masyarakat yang kuat tidak dibangun hanya dengan banyaknya manusia, tetapi dengan kuatnya hubungan di antara manusia.

Dan pada akhirnya, kualitas sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Jika manusia belajar menghormati, membantu, bekerja sama, menjaga kepercayaan, dan bertanggung jawab, maka kehidupan bersama akan tumbuh menjadi kehidupan yang sehat dan bermartabat.

Masyarakat adalah tempat manusia menjadi manusia bersama manusia lainnya.

1.4. Bangsa

Setelah manusia dipahami sebagai fondasi utama kehidupan kolektif, pembahasan berikutnya harus diarahkan pada entitas yang lahir dari interaksi manusia dalam lintasan sejarah yang panjang, yaitu bangsa. Pemahaman tentang bangsa sangat penting karena banyak kekeliruan dalam kehidupan kenegaraan berawal dari ketidakjelasan membedakan bangsa dengan negara. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap keduanya sebagai sesuatu yang identik, padahal secara konseptual bangsa dan negara merupakan dua entitas yang berbeda. Bangsa hidup dalam kesadaran kolektif manusia, sedangkan negara hidup dalam struktur organisasi kekuasaan.

Bangsa bukan sekadar kumpulan manusia yang tinggal dalam satu wilayah administratif. Jika sekadar keberadaan manusia dalam satu wilayah sudah cukup untuk membentuk bangsa, maka setiap batas geografis otomatis akan melahirkan identitas kebangsaan yang kokoh. Kenyataannya tidak demikian. Banyak wilayah memiliki struktur pemerintahan, tetapi tidak memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Sebaliknya, terdapat komunitas manusia yang tetap memiliki identitas kebangsaan meskipun kehilangan struktur negara formal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa tidak semata-mata dibentuk oleh administrasi teritorial.

Bangsa pada dasarnya adalah kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman hidup bersama dalam perjalanan sejarah. Kesadaran tersebut tidak muncul secara instan, melainkan tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan memori, penderitaan, perjuangan, bahasa, simbol, tradisi, dan nilai bersama. Bangsa bukan sekadar agregasi biologis manusia, tetapi komunitas makna yang memandang dirinya sebagai satu kesatuan. Karena itu bangsa lebih dekat dengan konsep identitas kolektif daripada sekadar pengelompokan administratif.

Salah satu unsur paling mendasar dalam pembentukan bangsa adalah memori bersama. Memori bersama merupakan kumpulan pengalaman historis yang hidup dalam kesadaran kolektif suatu komunitas. Pengalaman tersebut dapat berupa penderitaan akibat penjajahan, perjuangan mempertahankan martabat, kemenangan bersama, trauma kolektif, pengorbanan generasi terdahulu, maupun harapan yang diwariskan

dari satu masa ke masa berikutnya. Dari memori semacam inilah lahir rasa keterhubungan yang melampaui hubungan personal.

Dua orang yang belum pernah saling mengenal dapat merasa dekat karena menyadari bahwa keduanya berasal dari bangsa yang sama. Kedekatan tersebut bukan lahir dari hubungan individual, melainkan dari keberadaan narasi historis yang sama-sama diwarisi. Memori bersama menciptakan rasa "kita" yang tidak dapat dibentuk hanya melalui dokumen administratif atau aturan formal. Negara dapat mencatat nama penduduk, tetapi bangsa membentuk rasa kebersamaan yang hidup dalam kesadaran manusia.

Karena bangsa hidup dalam memori, penghancuran memori sering menjadi salah satu strategi paling efektif dalam melemahkan suatu bangsa. Ketika sejarah dipelintir, narasi kolektif diputus, atau generasi muda dipisahkan dari pemahaman atas perjalanan bangsanya, identitas kebangsaan mulai mengalami erosi. Bangsa yang kehilangan memori perlahan kehilangan arah, karena tidak lagi memahami perjalanan yang membentuk keberadaannya. Dalam kondisi seperti itu, bangsa menjadi mudah diarahkan oleh kekuatan yang memiliki kepentingan tertentu.

Selain memori bersama, bahasa merupakan unsur fundamental lain dalam pembentukan bangsa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi praktis untuk menyampaikan informasi sehari-hari. Bahasa adalah medium berpikir, rumah makna, dan wadah tempat identitas kolektif dirawat. Melalui bahasa, manusia menamai realitas, menyusun konsep, mewariskan nilai,

membangun simbol, dan menjelaskan pengalaman bersama. Tanpa bahasa, kesadaran kolektif akan kehilangan medium ekspresinya.

Bahasa memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar fungsi komunikatif. Cara manusia memahami keadilan, kehormatan, tanggung jawab, kebebasan, dan pengorbanan sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Bahasa membentuk struktur kesadaran, bukan hanya isi percakapan. Oleh karena itu, dominasi terhadap bahasa sering menjadi strategi kolonial yang sangat efektif. Bangsa yang kehilangan kedaulatan atas bahasanya perlahan kehilangan cara berpikir yang otentik tentang dirinya sendiri.

Dalam sejarah kolonialisme, penguasaan terhadap bahasa sering menjadi instrumen pembentukan ketundukan jangka panjang. Ketika bahasa asli dipinggirkan dan digantikan oleh bahasa dominan yang membawa cara pandang asing, perubahan yang terjadi bukan hanya pada alat komunikasi, melainkan juga pada struktur kesadaran. Cara memahami hukum, kekuasaan, nilai, bahkan harga diri dapat ikut berubah. Karena itu mempertahankan bahasa berarti mempertahankan fondasi identitas bangsa.

Bangsa juga dibentuk oleh identitas bersama. Identitas bukan sekadar label formal yang ditempelkan pada suatu kelompok manusia, melainkan kesadaran mendalam tentang siapa diri kolektif tersebut. Identitas terbentuk dari simbol, sejarah, budaya, pengalaman, nilai, dan orientasi bersama yang berkembang dalam waktu panjang. Identitas kebangsaan memungkinkan

individu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tanpa identitas bersama, solidaritas akan rapuh dan kehidupan kolektif mudah terpecah.

Sejarah menjadi unsur berikutnya yang sangat menentukan. Sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal, daftar tokoh, atau catatan peristiwa formal yang dihafal secara administratif. Sejarah adalah kesadaran tentang perjalanan kolektif yang membentuk karakter suatu bangsa. Dari sejarah, suatu bangsa memahami siapa dirinya, apa yang pernah diperjuangkan, kesalahan apa yang pernah terjadi, ancaman apa yang pernah dihadapi, dan nilai apa yang harus dijaga. Bangsa yang tidak memahami sejarahnya akan kesulitan memahami masa depannya.

Kesadaran sejarah memiliki fungsi moral dan strategis sekaligus. Secara moral, sejarah mengingatkan suatu bangsa tentang pengorbanan yang telah dibayar untuk mencapai titik tertentu. Secara strategis, sejarah memberikan pelajaran tentang pola ancaman, bentuk manipulasi, dan kesalahan desain yang pernah terjadi. Bangsa yang kehilangan kesadaran sejarah akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama, karena tidak memiliki referensi pengalaman kolektif yang memadai.

Solidaritas merupakan unsur yang menunjukkan apakah suatu bangsa benar-benar hidup atau sekadar menjadi label administratif. Solidaritas adalah kemampuan untuk merasakan bahwa persoalan sebagian anggota komunitas merupakan persoalan bersama. Ketika ketidakadilan yang terjadi di satu

wilayah memicu kegelisahan nasional, solidaritas bekerja. Ketika penderitaan kelompok tertentu dipahami sebagai luka kolektif, solidaritas hidup. Tanpa solidaritas, keberadaan bangsa hanya menjadi formalitas simbolik.

Solidaritas tidak berarti semua orang harus memiliki latar belakang yang identik. Justru solidaritas menemukan maknanya ketika perbedaan dapat tetap hidup dalam kesadaran kebersamaan. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang meniadakan keberagaman, melainkan bangsa yang mampu menjadikan keberagaman sebagai bagian dari identitas kolektif yang utuh. Tanpa solidaritas, perbedaan mudah dimanfaatkan menjadi alat fragmentasi. Dalam kondisi seperti itu, bangsa melemah dari dalam.

Selain solidaritas, bangsa juga dibentuk oleh kesadaran nasib kolektif. Nasib kolektif berarti kesadaran bahwa kehidupan bersama menciptakan keterhubungan yang tidak dapat dihindari. Krisis ekonomi, ketidakadilan hukum, kerusakan moral, konflik kekuasaan, dan ancaman eksternal tidak berhenti pada individu tertentu, melainkan menciptakan dampak sistemik bagi kehidupan bersama. Kesadaran ini membangun pemahaman bahwa masa depan tidak sepenuhnya bersifat individual.

Ketika suatu komunitas menyadari bahwa keberlangsungan hidup bersama saling terkait, maka lahirlah energi kebangsaan yang kuat. Dalam kesadaran seperti itu, kemajuan bersama menjadi penting, bukan hanya keuntungan individual. Perlindungan terhadap

kehidupan kolektif menjadi kebutuhan bersama, bukan agenda kelompok tertentu. Inilah salah satu fondasi psikologis yang membedakan bangsa dari sekadar populasi.

Pada titik ini, tesis penting harus ditegaskan dengan jelas, yaitu bangsa tidak sama dengan negara. Bangsa adalah entitas historis, kultural, psikologis, dan peradaban yang tumbuh dari kesadaran kolektif manusia. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama melalui struktur hukum, aparatur, wilayah, dan mekanisme formal. Menyamakan bangsa dengan negara merupakan kekeliruan konseptual yang sangat berbahaya, karena dapat membuat organisasi kekuasaan diperlakukan seolah-olah identik dengan identitas kolektif rakyat.

Bangsa dapat tetap hidup meskipun negara berubah, runtuh, atau mengalami transformasi. Sejarah dunia menunjukkan bahwa identitas kebangsaan sering kali bertahan jauh lebih lama daripada struktur ketatanegaraan formal. Sebaliknya, negara tanpa bangsa hanyalah bangunan administratif yang kosong, karena tidak memiliki jiwa kolektif yang memberi makna bagi keberadaannya. Oleh karena itu, memahami bangsa secara benar merupakan syarat penting sebelum membahas negara sebagai instrumen organisasi kekuasaan.

1.5. Negara

Setelah memahami manusia sebagai subjek utama kehidupan kolektif dan bangsa sebagai entitas

kesadaran historis yang hidup dalam memori bersama, pembahasan berikutnya harus diarahkan pada negara. Pada bagian inilah ketelitian konseptual menjadi sangat penting, karena banyak kekacauan berpikir dalam kehidupan ketatanegaraan lahir dari kegagalan membedakan antara bangsa dan negara. Tidak sedikit masyarakat yang memperlakukan negara seolah-olah identik dengan bangsa, bahkan lebih jauh lagi, memosisikan negara sebagai entitas tertinggi yang tidak boleh dipertanyakan. Padahal negara pada hakikatnya bukan sumber kehidupan kolektif, melainkan instrumen organisasi yang dibentuk manusia untuk mengelola kehidupan bersama.

Negara adalah organisasi kekuasaan. Definisi ini harus ditegaskan secara jelas agar pembahasan tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan yang mengaburkan sifat dasarnya. Negara bukan makhluk metafisik yang memiliki kehendak moral independen, bukan pula entitas spiritual yang suci dengan sendirinya. Negara adalah struktur yang dirancang untuk mengatur kehidupan bersama melalui kewenangan formal yang dilembagakan. Karena merupakan organisasi kekuasaan, negara harus selalu dipahami secara rasional, kritis, dan proporsional.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki kemampuan untuk membuat aturan, menentukan kebijakan, mengatur distribusi sumber daya, menjatuhkan sanksi, serta mempertahankan keteraturan melalui instrumen formal. Kemampuan inilah yang membedakan negara dari sekadar komunitas sosial biasa. Dalam teori pemerintahan

modern, kapasitas tersebut dikenal sebagai *coercive power*, yaitu kemampuan institusional untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak berhenti sebagai simbol, melainkan benar-benar memiliki daya berlaku dalam kehidupan nyata. Tanpa kemampuan semacam itu, negara tidak akan memiliki efektivitas operasional.

Namun keberadaan *coercive power* tidak boleh dipahami secara dangkal sebagai legitimasi mutlak untuk menggunakan pemaksaan atas nama keteraturan. Kehidupan bersama memang membutuhkan mekanisme penegakan aturan agar norma tidak berubah menjadi sekadar nasihat moral tanpa konsekuensi. Akan tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengenai siapa yang mengendalikan kekuasaan tersebut, atas dasar nilai apa kekuasaan itu dijalankan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan tersebut digunakan. Di sinilah perbedaan antara negara yang sehat dan negara yang menyimpang mulai terlihat.

Negara yang sehat menggunakan kekuasaan untuk menjaga keteraturan demi kemaslahatan bersama. Sebaliknya, negara yang kehilangan orientasi dapat menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan struktur demi kepentingan kelompok tertentu. Secara teknis, kedua bentuk negara tersebut mungkin sama-sama memiliki hukum, aparatur, lembaga, dan sistem administrasi yang tampak rapi. Namun secara moral dan filosofis, keduanya sangat berbeda. Organisasi kekuasaan yang kehilangan orientasi rakyat dapat berubah menjadi mesin dominasi

yang bekerja dengan efisiensi tinggi tetapi tanpa legitimasi moral.

Dalam kerangka konseptual buku ini, negara tidak pernah boleh dipahami sebagai pemilik sah kehidupan kolektif. Sebagaimana glosarium menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau *root owner*, maka seluruh struktur kenegaraan harus dipahami sebagai instrumen yang bekerja di bawah kedaulatan tersebut. Negara bukan pemilik rakyat, sebagaimana aplikasi bukan pemilik sistem utama dalam sebuah arsitektur digital. Ketika organisasi kekuasaan mulai memosisikan dirinya sebagai entitas yang lebih tinggi daripada rakyat, yang terjadi bukan penguatan negara, melainkan penyimpangan dari desain dasar kedaulatan.

Negara juga selalu bekerja melalui hukum. Hukum menjadi instrumen formal yang memberikan bentuk operasional terhadap kekuasaan. Melalui hukum, kewenangan diatur, kewajiban ditentukan, sanksi dirumuskan, dan relasi antara warga dengan struktur kekuasaan didefinisikan. Tanpa hukum, kekuasaan akan bergerak secara arbitrer dan cenderung bergantung pada kehendak individu. Oleh karena itu, hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam struktur kenegaraan.

Namun hukum tidak boleh secara otomatis diperlakukan sebagai identik dengan keadilan. Banyak masyarakat terjebak dalam asumsi bahwa sesuatu yang legal pasti benar, padahal legalitas dan keadilan tidak selalu berjalan seiring. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sistem hukum yang disusun secara rapi justru

digunakan untuk melegitimasi penindasan, diskriminasi, eksploitasi, bahkan kolonialisme. Artinya, hukum hanyalah instrumen teknis yang sangat bergantung pada desain dasar dan nilai yang mengarahkan penggunaannya.

Dalam konteks ini, hukum yang terlepas dari nilai dasar bangsa dapat berubah menjadi alat kekuasaan yang dingin dan mekanistik. Aturan tetap berjalan, prosedur tetap dipenuhi, birokrasi tetap bergerak, tetapi keadilan substantif justru menghilang. Dalam analogi sistem yang digunakan dalam buku ini, kondisi seperti itu menyerupai sistem yang masih beroperasi secara teknis tetapi telah kehilangan integritas desain aslinya atau mengalami gangguan terhadap *system integrity*. Secara lahiriah sistem tampak hidup, tetapi secara substantif telah menjauh dari tujuan pembentukannya.

Selain hukum, negara memiliki unsur wilayah sebagai ruang operasional kekuasaan. Wilayah menentukan batas geografis tempat negara menjalankan kewenangan formalnya. Di dalam wilayah tersebut, hukum diberlakukan, aparatur bekerja, kebijakan dijalankan, dan otoritas formal dipertahankan. Namun wilayah tidak boleh disalahpahami sebagai inti dari identitas bangsa. Tanah dapat menjadi ruang hidup bersama, tetapi bangsa tidak lahir semata-mata dari keberadaan batas geografis.

Dalam analogi teknologi yang digunakan dalam buku ini, wilayah, infrastruktur, institusi fisik, sumber daya material, dan perangkat kenegaraan lebih dekat

dengan konsep *device* atau *hardware*, yaitu komponen tempat sistem bekerja. Namun keberadaan perangkat fisik tidak otomatis melahirkan kehidupan kolektif yang sehat. Sebuah perangkat dapat memiliki bentuk sempurna, tetapi tanpa sistem nilai yang benar, perangkat tersebut tidak memiliki arah. Hal yang sama berlaku pada negara.

Negara juga bekerja melalui aparatur. Aparatur merupakan tangan operasional negara yang menjalankan fungsi-fungsi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Kepolisian, militer, lembaga penegakan hukum, regulator, institusi pelayanan publik, hingga berbagai struktur administratif merupakan bagian dari aparatur negara. Melalui aparatur inilah keputusan formal berubah menjadi tindakan nyata. Tanpa aparatur, negara tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan kewenangannya ke dalam praktik.

Meski demikian, aparatur hanyalah instrumen pelaksana, bukan sumber legitimasi. Bahaya muncul ketika aparatur mulai memosisikan dirinya sebagai pusat negara, seolah-olah keberadaan rakyat harus tunduk sepenuhnya pada logika kelembagaan. Pada titik tersebut, fungsi pelayanan mulai bergeser menjadi dominasi struktural. Yang seharusnya menjadi alat berubah menjadi pengendali. Distorsi seperti inilah yang sering menjadi awal pembesaran kekuasaan yang menjauh dari rakyat.

Birokrasi menjadi unsur berikutnya yang membentuk kehidupan negara. Secara ideal, birokrasi diciptakan untuk memastikan keteraturan administrasi, kesinambungan sistem, efisiensi operasional, dan

stabilitas pelayanan. Birokrasi memungkinkan negara tetap berjalan meskipun figur pemerintahan berubah. Dengan kata lain, birokrasi menyediakan struktur keberlanjutan agar negara tidak sepenuhnya bergantung pada personalitas tertentu. Dalam batas tertentu, birokrasi memang diperlukan sebagai mekanisme operasional modern.

Namun birokrasi juga memiliki sisi gelap yang tidak boleh diabaikan. Struktur yang terlalu tebal, terlalu rumit, terlalu kaku, atau terlalu jauh dari rakyat dapat berubah menjadi labirin kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Manusia dipaksa menyesuaikan diri dengan prosedur yang kehilangan makna substantif. Efisiensi berubah menjadi formalitas administratif. Pelayanan berubah menjadi hambatan. Ketika kondisi ini terjadi, birokrasi tidak lagi menjadi instrumen publik, melainkan menjadi struktur yang mempertahankan eksistensinya sendiri.

Kesalahan besar dalam kehidupan pemerintahan modern adalah ketika negara diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat. Ketika negara dianggap identik dengan bangsa, kritik terhadap struktur kekuasaan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kolektif. Padahal bangsa adalah entitas yang hidup dalam sejarah, memori, solidaritas, dan kesadaran bersama, sedangkan negara hanyalah perangkat organisasi yang dirancang untuk mengelola kehidupan tersebut. Menyamakan keduanya sama saja dengan menyamakan pemilik rumah dengan bangunan tempat tinggalnya.

Negara yang sehat memahami batas dirinya. Negara yang sehat tidak mengklaim kepemilikan atas rakyat. Negara yang sehat bekerja di bawah nilai dasar bangsa dan tunduk pada desain konstitusional yang membatasi kekuasaannya. Sebaliknya, negara yang kehilangan orientasi dapat berubah menjadi struktur yang hanya mempertahankan dirinya sendiri, bahkan ketika keberadaan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Karena itu negara harus dipahami sebagai instrumen, bukan pusat tertinggi kehidupan kolektif. Di atas negara terdapat sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu sistem nilai yang memberi arah terhadap kehidupan bersama. Organisasi kekuasaan tanpa orientasi nilai hanya akan menjadi mesin administratif yang efisien tetapi berpotensi kehilangan kemanusiaan. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju unsur yang lebih dalam daripada negara, yaitu peradaban.

1.6. Peradaban

Setelah manusia dipahami sebagai subjek utama kehidupan, bangsa dipahami sebagai entitas kesadaran kolektif, dan negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan, pembahasan berikutnya harus diarahkan pada unsur yang jauh lebih mendasar daripada seluruh struktur tersebut, yaitu peradaban. Jika manusia adalah pembentuk kehidupan, bangsa adalah identitas kolektif, dan negara adalah instrumen organisasi, maka peradaban adalah sistem nilai yang memberi arah terhadap keseluruhan kehidupan bersama. Tanpa

peradaban, manusia dapat hidup secara biologis, bangsa dapat tetap memiliki identitas, dan negara dapat tetap berjalan secara administratif, tetapi seluruh kehidupan kolektif akan kehilangan orientasi makna.

Peradaban bukan sekadar kumpulan artefak budaya, peninggalan sejarah, bangunan monumental, atau simbol kemajuan material. Pemahaman yang menyederhanakan peradaban hanya pada pencapaian fisik merupakan kekeliruan yang sangat mendasar. Peradaban pada hakikatnya adalah sistem hidup yang membentuk cara suatu komunitas memahami dunia, manusia, kebenaran, kekuasaan, keadilan, keindahan, dan tujuan hidup bersama. Peradaban adalah cara suatu bangsa memproses realitas dalam kerangka nilai yang diyakininya.

Dalam kerangka analogi yang digunakan dalam buku ini, peradaban dapat dipahami sebagai *operating system* dari kehidupan kolektif. Sebagaimana sebuah perangkat tidak dapat berfungsi secara bermakna hanya dengan keberadaan perangkat keras, demikian pula kehidupan kebangsaan tidak dapat berjalan secara sehat hanya dengan keberadaan wilayah, aparatur, hukum, dan institusi formal. Perangkat keras tanpa sistem operasi hanyalah benda mati yang tidak memiliki arah kerja. Demikian pula negara tanpa peradaban hanyalah mesin kekuasaan yang bergerak tanpa orientasi nilai.

Pemahaman ini sangat penting karena banyak bangsa modern terjebak dalam ilusi bahwa kemajuan institusional otomatis berarti kemajuan peradaban. Sebuah negara dapat memiliki gedung pemerintahan megah, birokrasi yang tertata, sistem digital yang

canggih, dan perangkat hukum yang lengkap, tetapi tetap mengalami kemunduran peradaban jika kehilangan orientasi nilai. Peradaban tidak diukur hanya dari kompleksitas organisasi, melainkan dari kualitas cara hidup yang dibangun di atas sistem tersebut. Struktur dapat terlihat modern, tetapi jiwa kehidupan kolektif dapat mengalami kemerosotan.

Salah satu unsur utama dalam peradaban adalah *worldview* atau pandangan hidup. *Worldview* merupakan cara dasar suatu komunitas memahami realitas, menafsirkan kehidupan, dan menentukan orientasi eksistensialnya. Dari *worldview* lahir cara memandang manusia, kekuasaan, kebebasan, hukum, ilmu pengetahuan, moralitas, dan relasi dengan sesuatu yang dianggap transenden. Tidak ada peradaban yang lahir tanpa *worldview*, karena tanpa kerangka pemahaman dasar, kehidupan kolektif tidak memiliki orientasi yang konsisten.

Perbedaan *worldview* akan menghasilkan bentuk peradaban yang berbeda. Peradaban yang memandang manusia hanya sebagai instrumen produksi akan menghasilkan struktur sosial yang berbeda dengan peradaban yang memandang manusia sebagai makhluk bermartabat. Peradaban yang memandang kekuasaan sebagai hak dominasi akan melahirkan desain negara yang berbeda dengan peradaban yang memandang kekuasaan sebagai amanah pelayanan. Dengan demikian, bentuk organisasi kekuasaan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup yang menjadi fondasi peradabannya.

Nilai menjadi unsur kedua yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban. Nilai adalah standar yang digunakan untuk menilai apa yang dianggap baik, buruk, luhur, tercela, penting, atau tidak penting dalam kehidupan bersama. Dari nilai lahir prioritas sosial, orientasi kebijakan, bentuk pendidikan, pola kepemimpinan, dan struktur kelembagaan. Peradaban tanpa nilai yang jelas akan bergerak secara pragmatis tanpa arah moral yang stabil. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi sering menggantikan kebijaksanaan, sementara kekuatan menggantikan keadilan.

Dalam konteks kebangsaan Indonesia, pembicaraan tentang nilai tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai fondasi filosofis bangsa. Dalam glosarium buku ini, Pancasila diposisikan sebagai kernel (inti sistem), yaitu inti nilai yang mengatur orientasi seluruh sistem kebangsaan. Jika peradaban adalah *operating system*, maka sistem tersebut seharusnya menerjemahkan nilai inti tersebut ke dalam praktik kehidupan nyata. Dengan kata lain, peradaban menjadi medium yang membuat nilai dasar bangsa tidak berhenti sebagai dokumen konseptual, melainkan hidup dalam perilaku kolektif.

Ilmu pengetahuan juga merupakan unsur penting dalam peradaban. Tidak ada peradaban besar yang tumbuh dalam kebodohan struktural. Ilmu memungkinkan manusia memahami realitas secara lebih akurat, memperbaiki kehidupan material, mengembangkan teknologi, dan memperluas kapasitas berpikir kolektif. Namun ilmu dalam peradaban tidak boleh dipahami sebagai akumulasi informasi semata.

Ilmu harus memiliki orientasi etis agar tidak berubah menjadi alat dominasi yang sangat efisien.

Sejarah manusia memperlihatkan bahwa masyarakat yang sangat maju secara teknis belum tentu maju secara moral. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat digunakan untuk pengawasan massal, manipulasi psikologis, perang modern, dan pembentukan ketergantungan sistemik. Karena itu ilmu yang terlepas dari moral akan menghasilkan peradaban yang timpang. Kecanggihan teknis tanpa kebijaksanaan justru dapat mempercepat kerusakan kolektif.

Moral merupakan unsur mendasar lain dalam peradaban. Moral menentukan batas perilaku yang dianggap layak dalam kehidupan bersama. Dari moral lahir gagasan tentang kejujuran, tanggung jawab, amanah, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pengendalian kekuasaan. Tanpa moral, struktur kehidupan bersama mudah berubah menjadi arena persaingan brutal yang hanya diatur oleh kekuatan dan kepentingan. Negara dalam lingkungan seperti itu cenderung berubah menjadi alat dominasi, bukan pelayan kehidupan kolektif.

Spiritualitas juga merupakan bagian integral dari peradaban. Spiritualitas memberikan dimensi kedalaman terhadap kehidupan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh materialisme semata. Dalam spiritualitas, manusia bertanya tentang tujuan hidup, tanggung jawab moral, hubungan dengan Sang Pencipta, dan makna keberadaan di luar kepentingan pragmatis. Peradaban yang kehilangan spiritualitas

cenderung mengalami kekosongan orientasi, meskipun secara material tampak maju.

Budaya merupakan ekspresi konkret dari peradaban dalam kehidupan sehari-hari. Budaya tampak dalam bahasa, kebiasaan, etika sosial, cara berpikir, pola relasi, tradisi, simbol, hingga cara suatu masyarakat menanggapi perubahan. Budaya bukan sekadar hiburan atau folklor, melainkan manifestasi nilai yang hidup dalam praktik kolektif. Karena itu budaya menjadi salah satu indikator paling nyata untuk membaca kesehatan suatu peradaban.

Estetika juga tidak boleh diabaikan dalam pembicaraan tentang peradaban. Cara suatu bangsa memahami keindahan mencerminkan kedalaman pandangan hidupnya. Arsitektur, seni, sastra, simbol, dan ekspresi kreatif lainnya menunjukkan bagaimana suatu masyarakat memaknai harmoni, keseimbangan, dan nilai kehidupan. Peradaban yang sehat tidak hanya mengejar fungsi teknis, tetapi juga memahami pentingnya keindahan sebagai bagian dari kemanusiaan.

Pada akhirnya, seluruh unsur tersebut membentuk tata hidup. Tata hidup adalah pola operasional nyata dari suatu peradaban dalam kehidupan sehari-hari. Tata hidup menentukan bagaimana masyarakat bekerja, belajar, berinteraksi, menyelesaikan konflik, memandang kekuasaan, memperlakukan hukum, membangun keluarga, dan menempatkan nilai dalam kehidupan publik. Tata hidup adalah bentuk paling konkret dari sistem peradaban yang hidup.

Di sinilah hubungan antara manusia, bangsa, negara, dan peradaban menjadi jelas. Manusia adalah subjek utama yang membangun kehidupan bersama. Bangsa adalah kesadaran kolektif yang lahir dari pengalaman historis bersama. Negara adalah instrumen organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mengelola kehidupan tersebut. Peradaban adalah sistem nilai yang memberi arah terhadap keseluruhan proses tersebut.

Jika manusia adalah pencipta sistem, bangsa adalah identitas kolektifnya, dan negara adalah instrumen organisasionalnya, maka peradaban adalah jiwa yang menentukan ke mana seluruh sistem itu bergerak. Negara tanpa peradaban hanyalah mesin kekuasaan. Bangsa tanpa peradaban akan kehilangan arah. Manusia tanpa peradaban mudah terjebak dalam kehidupan biologis dan pragmatis yang dangkal.

Karena itu tesis utama bab ini menemukan bentuknya secara utuh. Bangsa tidak sama dengan negara, karena negara hanyalah salah satu instrumen dalam struktur kehidupan kolektif yang lebih besar. Di atas negara terdapat peradaban sebagai sistem hidup, sementara di bawah seluruh struktur tersebut tetap berdiri manusia sebagai subjek utama yang menjadi sumber legitimasi seluruh kehidupan bersama.

BAB 2
NEGARA ITU PERANGKAT, BANGSA ITU SISTEM

2.1. Kesalahan Cara Pandang terhadap Negara

Salah satu persoalan paling mendasar dalam kehidupan berbangsa adalah kesalahan dalam memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara. Kesalahan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar, karena cara suatu masyarakat memahami negara akan menentukan bagaimana masyarakat tersebut memosisikan diri terhadap kekuasaan, hukum, pemerintahan, dan kedaulatan. Ketika konsep dasar tentang negara keliru, maka seluruh relasi antara rakyat dengan sistem kekuasaan

berpotensi mengalami distorsi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dapat dengan mudah kehilangan kesadaran atas posisi sejatinya dalam struktur kehidupan kolektif.

Bagi sebagian besar masyarakat, negara sering dipahami secara sangat fisik dan dangkal. Negara dibayangkan sebagai gedung-gedung pemerintahan, kantor kementerian, ruang sidang parlemen, istana presiden, markas aparat, atau bangunan-bangunan resmi yang menampilkan simbol kekuasaan. Dalam imajinasi publik, negara sering diwujudkan dalam bentuk bendera, lambang resmi, seragam pejabat, kendaraan dinas, pagar institusi, hingga upacara-upacara formal kenegaraan. Seluruh representasi tersebut memang merupakan bagian dari manifestasi negara, tetapi memahami negara hanya dari permukaan fisik semacam itu merupakan penyederhanaan yang berbahaya.

Kesalahan berikutnya adalah kecenderungan menyamakan negara dengan pejabat yang sedang berkuasa. Ketika presiden dianggap negara, menteri dianggap negara, lembaga dianggap negara, atau birokrasi dianggap negara, maka terjadi pencampuradukan antara instrumen operasional dengan struktur yang lebih besar. Dalam kondisi seperti itu, kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap negara, padahal keduanya bukan entitas yang sama. Cara pandang seperti ini sangat problematik karena membuat struktur kekuasaan operasional memperoleh legitimasi yang tidak semestinya.

Dalam glosarium konseptual buku ini, pemerintah secara tegas diposisikan sebagai *applications* atau aplikasi, yaitu perangkat operasional yang bekerja di atas sistem utama dan dapat dipasang, diperbarui, diganti, bahkan dihapus tanpa mengubah kepemilikan sistem secara mendasar. Analogi ini sangat penting karena menjelaskan bahwa pemerintah bersifat sementara, sedangkan kehidupan kebangsaan jauh lebih besar daripada pergantian pejabat. Jika pemerintah dipahami sebagai pemilik negara, maka masyarakat akan mudah terjebak dalam logika ketundukan terhadap operator sementara, bukan terhadap prinsip dasar kedaulatan rakyat.

Kesalahan cara pandang terhadap negara juga sering lahir dari pendidikan politik yang terlalu administratif. Negara diajarkan sebagai kumpulan lembaga, pembagian kekuasaan, struktur pemerintahan, mekanisme pemilu, dan daftar institusi formal. Pendekatan semacam ini memang berguna untuk menjelaskan arsitektur organisasi, tetapi sering gagal menjelaskan hakikat negara secara lebih mendalam. Akibatnya, negara dipahami seperti daftar organ tubuh tanpa pemahaman mengenai sistem kehidupan yang menghubungkan seluruh bagian tersebut. Pengetahuan formal tersedia, tetapi kesadaran konseptual justru lemah.

Akibat dari cara pandang yang sempit ini sangat serius. Ketika negara dipahami hanya sebagai gedung, lembaga, dan pejabat, maka masyarakat cenderung memosisikan diri sebagai pihak luar yang sekadar berinteraksi dengan sistem, bukan sebagai pemilik sah

dari sistem tersebut. Negara dipandang seperti sesuatu yang berada "di sana", terpisah dari rakyat, berdiri sebagai kekuatan yang harus dihadapi, ditaati, atau bahkan ditakuti. Hubungan antara rakyat dengan negara berubah menjadi hubungan antara subjek yang lemah dengan entitas yang dianggap superior. Dalam kondisi demikian, kesadaran kedaulatan perlahan memudar.

Padahal dalam kerangka berpikir yang sehat, negara tidak pernah boleh diposisikan sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat. Dalam glosarium buku ini, rakyat ditempatkan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi sistem yang memiliki legitimasi paling mendasar atas seluruh struktur yang dibangun.

Konsep ini bukan sekadar analogi teknis, melainkan penegasan filosofis bahwa negara memperoleh legitimasi dari rakyat, bukan sebaliknya. Jika rakyat kehilangan kesadaran sebagai pemilik, maka struktur kekuasaan akan sangat mudah mengalami pembesaran yang tidak terkendali.

Kesalahan memahami negara sebagai sekadar lembaga fisik juga menyebabkan masyarakat gagal membaca bentuk-bentuk kerusakan sistemik yang lebih halus. Ketika seluruh perhatian hanya tertuju pada gedung, pejabat, atau kebijakan yang tampak di permukaan, maka persoalan yang lebih mendalam sering luput dari perhatian.

Sistem dapat terlihat berjalan normal, kantor tetap beroperasi, hukum tetap diproduksi, pemilu tetap berlangsung, birokrasi tetap bergerak, tetapi secara substantif arah kehidupan kolektif bisa saja telah

mengalami penyimpangan serius. Banyak masyarakat tidak menyadari kondisi tersebut karena yang dilihat hanya aktivitas permukaan.

Dalam dunia teknologi, sebuah perangkat dapat terlihat normal dari luar, tetapi sesungguhnya telah mengalami gangguan internal yang sangat serius. Layar menyala, tombol berfungsi, aplikasi terbuka, tetapi sistem inti mungkin telah rusak atau bahkan dibajak.

Analogi ini penting karena kehidupan kenegaraan sering menunjukkan gejala yang serupa. Negara dapat tampak stabil secara administratif, tetapi sesungguhnya kehilangan orientasi dasar, mengalami infiltrasi kepentingan, atau bergerak menjauh dari desain awal kedaulatan rakyat. Tanpa kemampuan berpikir sistemik, kondisi seperti ini sulit dikenali.

Kesalahan cara pandang terhadap negara juga berkaitan erat dengan kebiasaan mempersonifikasikan kekuasaan. Banyak masyarakat lebih mudah memahami negara melalui figur daripada melalui sistem. Wajah pemimpin menjadi simbol negara. Suara pejabat dianggap suara negara. Pergantian figur dianggap perubahan negara secara keseluruhan.

Padahal figur hanyalah aktor sementara dalam sistem yang jauh lebih besar. Ketika pemahaman terlalu berpusat pada figur, masyarakat akan mudah terjebak dalam loyalitas personal yang mengaburkan evaluasi terhadap struktur.

Bahaya terbesar dari seluruh kesalahan ini adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk membedakan antara negara sebagai instrumen dan kekuasaan sebagai operator sementara. Ketika batas

tersebut kabur, maka kritik terhadap kebijakan dianggap pengkhianatan, evaluasi terhadap birokrasi dianggap ancaman, dan tuntutan terhadap akuntabilitas dianggap gangguan terhadap stabilitas. Dalam suasana seperti itu, negara perlahan berubah dari instrumen pelayanan menjadi objek pemujaan struktural. Padahal organisasi kekuasaan yang tidak dapat dikritik merupakan salah satu gejala awal penyimpangan sistemik.

Karena itu, sebelum membahas desain negara yang sehat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar kesalahan cara pandang terhadap negara itu sendiri. Negara bukan sekadar gedung. Negara bukan sekadar lembaga. Negara bukan sekadar pejabat. Negara bukan sekadar birokrasi. Seluruh unsur tersebut hanyalah manifestasi permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kompleks.

Jika bangsa adalah kesadaran kolektif yang hidup dalam sejarah, identitas, solidaritas, dan nilai bersama, maka negara harus dipahami sebagai sistem organisasi yang dibangun untuk mengelola kehidupan kolektif tersebut. Negara bukan benda mati yang berdiri sendiri, melainkan arsitektur yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terhubung. Untuk memahami kerusakan, pembajakan, atau kemungkinan perbaikannya, negara harus dibaca sebagai sistem. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju kerangka analogi yang lebih utuh, yaitu memahami negara melalui pendekatan sistem teknologi.

2.2. Negara sebagai Perangkat: Analogi Teknologi sebagai Kerangka Baca

Setelah memahami kesalahan mendasar dalam cara pandang terhadap negara, langkah berikutnya adalah membangun kerangka baca yang lebih tepat untuk memahami bagaimana negara sesungguhnya bekerja. Tantangan terbesar dalam membahas negara sering terletak pada kecenderungan melihat gejala permukaan tanpa memahami arsitektur di baliknya.

Gedung dapat terlihat megah, lembaga dapat tampak aktif, hukum dapat terus diproduksi, dan pejabat dapat silih berganti menjalankan fungsi formalnya, tetapi seluruh aktivitas tersebut belum tentu menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai tujuan. Untuk memahami apakah suatu negara sehat, rusak, dibajak, atau kehilangan orientasi, diperlukan cara berpikir yang tidak berhenti pada bentuk luar, melainkan mampu membaca hubungan antar-komponen secara menyeluruh.

Dalam buku ini, pendekatan yang digunakan untuk membaca negara adalah analogi teknologi. Pilihan ini bukan sekadar upaya menyederhanakan konsep agar lebih mudah dipahami, melainkan sebuah kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja secara terintegrasi.

Dunia modern sangat akrab dengan teknologi digital, terutama dengan gagasan tentang perangkat, sistem operasi, aplikasi, keamanan, kerusakan sistem, hingga pembajakan kendali. Analogi ini memungkinkan pembaca memahami negara bukan sebagai benda yang statis, melainkan sebagai sistem

hidup yang tersusun dari lapisan-lapisan fungsi yang saling bergantung.

Setiap sistem teknologi yang kompleks bekerja melalui struktur yang tidak dapat dipahami hanya dari tampilan luar. Sebuah perangkat komputer, misalnya, tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat bentuk casing, layar, atau tombol-tombolnya. Di balik tampilan fisik tersebut terdapat lapisan sistem yang menentukan bagaimana perangkat bekerja, bagaimana instruksi dijalankan, siapa yang memiliki kendali, dan bagaimana ancaman dapat merusak keseluruhan operasi. Hal yang sama berlaku pada negara. Memahami negara hanya dari simbol-simbol formal sama seperti memahami komputer hanya dari bentuk luarnya tanpa mengetahui sistem internal yang menggerakkannya.

Dalam kerangka glosarium buku ini, analogi teknologi tersebut telah disusun secara konseptual agar memiliki koherensi yang utuh. Negara diposisikan sebagai *hardware*, konstitusi sebagai *firmware*, Pancasila sebagai kernel (inti sistem), peradaban Nusantara sebagai *operating system*, pemerintah sebagai *applications*, oligarki dan kolonialisme modern sebagai *malware*, sedangkan rakyat ditempatkan sebagai *root owner*. Struktur analogi ini bukan permainan istilah, melainkan alat baca untuk memahami relasi kekuasaan, legitimasi, fungsi, dan potensi penyimpangan dalam kehidupan kebangsaan.

Negara diposisikan sebagai *hardware* karena negara merupakan perangkat fisik dan struktural tempat seluruh sistem bekerja. Wilayah, institusi, aparatur, infrastruktur, lembaga formal, dan seluruh unsur material kenegaraan membentuk tubuh operasional negara. Namun sebagaimana perangkat keras tidak otomatis hidup hanya karena bentuk fisiknya lengkap, demikian pula negara tidak otomatis sehat hanya karena memiliki gedung, pejabat, dan birokrasi yang tampak aktif. Keberadaan struktur material hanyalah salah satu lapisan, bukan keseluruhan sistem.

Konstitusi dipahami sebagai *firmware* karena berfungsi sebagai aturan dasar yang tertanam dalam desain sistem. Dalam dunia teknologi, *firmware* mengatur bagaimana perangkat melakukan proses

awal, mengenali fungsi dasar, dan membatasi relasi antar-komponen. Dalam konteks negara, fungsi tersebut dijalankan oleh konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi yang menentukan bagaimana kekuasaan dibentuk, dibatasi, dan dijalankan. Jika desain dasar ini cacat, maka keseluruhan operasi negara akan membawa potensi kerusakan sejak awal.

Pancasila diposisikan sebagai kernel (inti sistem), yaitu inti utama yang mengatur orientasi dasar seluruh sistem. Dalam arsitektur teknologi, kernel (inti sistem) bukan elemen yang selalu tampak di permukaan, tetapi justru menjadi pusat yang menentukan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berinteraksi. Dalam kerangka kebangsaan Indonesia, posisi tersebut ditempati oleh Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa. Artinya, Pancasila bukan sekadar simbol seremoni atau slogan, melainkan inti nilai yang seharusnya menentukan arah seluruh sistem kebangsaan.

Peradaban Nusantara diposisikan sebagai *operating system*, yaitu lingkungan utama tempat seluruh fungsi kehidupan bersama dijalankan. Sebagaimana *operating system* menerjemahkan kemampuan inti perangkat menjadi pengalaman operasional yang dapat dijalankan pengguna, demikian pula peradaban menerjemahkan nilai dasar bangsa ke dalam praktik kehidupan nyata. Budaya, etika, *worldview*, moralitas, tata hidup, dan pola relasi sosial merupakan bagian dari sistem operasi tersebut. Tanpa peradaban yang sehat, nilai dasar bangsa hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak hidup dalam realitas.

Pemerintah diposisikan sebagai *applications*, yaitu perangkat operasional yang menjalankan fungsi tertentu di atas sistem utama. Analogi ini sangat penting karena membantu membongkar kesalahan besar dalam cara pandang pemerintahan. Pemerintah bukan pemilik negara. Pemerintah adalah operator sementara yang menjalankan fungsi administratif, kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan operasional dalam kerangka sistem yang lebih besar. Sebagaimana aplikasi dapat diperbarui, diganti, atau dihapus tanpa mengubah kepemilikan perangkat, demikian pula pemerintah tidak identik dengan negara.

Analogi ini sekaligus menjelaskan mengapa loyalitas terhadap bangsa tidak boleh disamakan dengan loyalitas terhadap pemerintah. Kritik terhadap aplikasi yang bermasalah tidak berarti membenci keseluruhan sistem. Evaluasi terhadap operator yang gagal tidak berarti mengkhianati perangkat. Justru kemampuan untuk memperbaiki fungsi operasional merupakan bagian dari kesadaran sistem yang sehat. Kekeliruan besar muncul ketika pemerintah diperlakukan seolah-olah identik dengan negara, sehingga setiap kritik dianggap ancaman terhadap kebangsaan.

Ancaman terhadap sistem juga perlu dipahami dalam kerangka yang sama. Dalam glosarium buku ini, oligarki, kolonialisme modern, mafia kebijakan, dan berbagai kekuatan destruktif diposisikan sebagai *malware*. Analogi ini sangat relevan karena *malware* tidak selalu merusak perangkat secara kasatmata. Banyak ancaman bekerja secara diam-diam, mengambil kendali,

mencuri sumber daya, mengubah fungsi, atau membuat sistem tetap terlihat normal sambil sesungguhnya bergerak melawan kepentingan pemilik sah.

Di sinilah konsep pembajakan sistem menjadi sangat penting. Sebuah perangkat dapat tetap menyala, aplikasi dapat tetap berjalan, dan tampilan luar dapat terlihat normal, tetapi kendali sebenarnya sudah berpindah ke pihak yang tidak memiliki legitimasi. Dalam glosarium, kondisi ini dijelaskan melalui konsep *ownership capture* dan *system hijacking*, yaitu keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pihak yang sah, tetapi kendali nyata telah diambil alih oleh kekuatan lain. Dalam konteks negara, kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi ketika rakyat secara hukum tetap disebut berdaulat, tetapi secara praktis kehilangan kendali atas arah sistem.

Karena itu, posisi rakyat menjadi unsur paling fundamental dalam analogi ini. Rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi yang memiliki hak kedaulatan penuh atas sistem. Konsep ini bukan sekadar metafora teknis, melainkan penegasan filosofis bahwa negara bukan milik pemerintah, bukan milik pejabat, bukan milik birokrasi, dan bukan milik partai politik. Seluruh struktur negara seharusnya bekerja di bawah legitimasi rakyat sebagai pemilik sah kehidupan kolektif.

Namun dalam sistem yang sehat, *root owner* tidak selalu mengelola seluruh sistem secara langsung. Karena itu dibutuhkan *root administrator*, yaitu pihak yang menerima mandat dari *root owner* untuk menjaga, mengawasi, dan memastikan sistem berjalan sesuai

kehendak pemiliknya. Dalam analogi ketatanegaraan, posisi ini ditempati oleh MPR sebagai mandataris kedaulatan rakyat. MPR bukan pemilik kedaulatan, melainkan pengelola mandat tertinggi yang bertugas memastikan konstitusi, pemerintah, dan seluruh perangkat negara tetap bekerja untuk rakyat, bukan berbalik menguasai rakyat.

Pendekatan analogi teknologi ini bukan dimaksudkan untuk mereduksi kompleksitas kehidupan kebangsaan menjadi mesin digital. Tujuan utamanya justru untuk membantu pembaca melihat bahwa negara adalah sistem yang tersusun atas lapisan-lapisan fungsi, nilai, kendali, dan ancaman yang saling berhubungan. Dengan kerangka ini, persoalan kebangsaan dapat dibaca secara lebih jernih. Kerusakan tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan figur. Penyimpangan tidak lagi dibaca hanya sebagai kesalahan kebijakan. Pembajakan dapat dikenali sebagai persoalan sistemik.

Pada titik inilah tesis bab ini mulai menemukan bentuknya. Negara tidak boleh dipahami hanya sebagai gedung, lembaga, dan pejabat. Negara adalah perangkat yang bekerja di dalam sistem kehidupan yang jauh lebih besar. Untuk memahami bagaimana perangkat tersebut bekerja, setiap komponennya harus dibaca secara terstruktur. Karena itu pembahasan berikutnya harus bergerak lebih detail, dimulai dari memahami negara sebagai *hardware* dalam arsitektur sistem kebangsaan.

2.3. *Hardware*: Negara sebagai Perangkat Fisik Kekuasaan

Setelah kerangka analogi teknologi diletakkan sebagai alat baca, pembahasan harus bergerak pada komponen paling kasatmata dalam struktur negara, yaitu *hardware*. Dalam dunia teknologi, *hardware* adalah perangkat fisik yang menjadi wadah tempat seluruh sistem bekerja. Prosesor, memori, penyimpanan, papan sirkuit, layar, tombol, dan seluruh komponen material merupakan bagian dari perangkat keras. Dalam glosarium buku ini, konsep tersebut dipadankan dengan unsur fisik negara, yakni wilayah, institusi, aparatur, infrastruktur, sumber daya material, serta seluruh struktur nyata yang membentuk tubuh operasional negara. Pemahaman ini penting karena banyak masyarakat berhenti hanya pada level ini ketika membayangkan negara.

Bagi sebagian besar orang, negara memang tampak pertama-tama sebagai sesuatu yang fisik. Gedung kementerian, kantor pemerintahan, markas aparat, ruang sidang parlemen, gedung pengadilan, jalan nasional, pelabuhan, bandara, bendungan, kantor pelayanan publik, hingga batas wilayah yang tergambar dalam peta sering menjadi representasi spontan tentang negara. Pandangan semacam ini tidak sepenuhnya salah, tetapi jelas belum cukup. Yang terlihat di permukaan hanyalah tubuh fisik negara, bukan keseluruhan sistem yang menghidupkannya. Sama seperti seseorang yang melihat komputer hanya sebagai kotak perangkat keras tanpa memahami sistem internal yang membuatnya berfungsi.

Negara memang membutuhkan tubuh fisik untuk dapat bekerja. Tanpa wilayah, negara tidak memiliki ruang operasional. Tanpa institusi, negara tidak memiliki organ pelaksana. Tanpa aparatur, negara tidak memiliki tangan untuk mengeksekusi fungsi-fungsi operasional. Tanpa infrastruktur, koordinasi dan distribusi layanan akan lumpuh. Dalam pengertian ini, *hardware* merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan, karena kehidupan kolektif modern membutuhkan struktur material yang memungkinkan sistem berjalan secara nyata.

Namun kesalahan besar muncul ketika keberadaan *hardware* dianggap identik dengan kesehatan sistem secara keseluruhan. Sebuah perangkat dapat terlihat baru, kokoh, mahal, dan canggih secara fisik, tetapi tetap tidak berguna jika sistem yang menggerakkannya rusak. Hal yang sama berlaku pada negara. Gedung pemerintahan dapat megah, lembaga dapat banyak, aparatur dapat tersebar luas, dan infrastruktur dapat berkembang pesat, tetapi seluruh itu belum tentu menunjukkan bahwa negara bekerja sesuai tujuan. Kekuatan fisik tidak otomatis identik dengan kesehatan sistem.

Dalam konteks kenegaraan, wilayah merupakan salah satu unsur *hardware* yang paling fundamental. Wilayah menyediakan ruang tempat hukum berlaku, aparatur bekerja, kebijakan dijalankan, dan kehidupan kolektif berlangsung. Tanpa wilayah yang jelas, negara kehilangan batas operasional formalnya. Namun wilayah tidak boleh diperlakukan sebagai inti dari makna negara itu sendiri. Wilayah adalah ruang tempat

sistem bekerja, bukan sumber legitimasi moral dari keberadaan sistem tersebut.

Banyak kekeliruan berpikir muncul ketika batas geografis dianggap cukup untuk membentuk kehidupan kebangsaan yang sehat. Seolah-olah selama garis batas negara masih ada, maka negara pasti tetap utuh. Padahal sejarah menunjukkan bahwa keberadaan wilayah saja tidak menjamin kualitas kehidupan kolektif. Banyak entitas kekuasaan memiliki wilayah yang jelas, tetapi mengalami krisis legitimasi, konflik internal, atau pembusukan kelembagaan. Artinya, keberadaan *hardware* tidak otomatis menciptakan *system integrity*.

Selain wilayah, institusi formal juga merupakan bagian penting dari *hardware* negara. Kementerian, parlemen, pengadilan, badan pengawas, regulator, aparat keamanan, dan berbagai organ kelembagaan membentuk struktur fisik organisasi kekuasaan. Institusi-institusi tersebut memungkinkan fungsi negara dijalankan secara terstruktur, terdistribusi, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan modern, negara tanpa institusi akan sangat sulit mempertahankan koordinasi dalam skala besar.

Namun keberadaan institusi tidak selalu berarti fungsi berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah negara dapat memiliki banyak lembaga, tetapi justru terjebak dalam fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, atau pemborosan struktural. Dalam beberapa kasus, institusi bahkan lebih sibuk mempertahankan eksistensinya sendiri daripada melayani kepentingan rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan organ

fisik belum tentu mencerminkan efektivitas sistem. Tubuh dapat lengkap, tetapi fungsi bisa terganggu.

Aparatur negara juga merupakan bagian integral dari *hardware*. Aparatur adalah instrumen manusiawi yang menerjemahkan kewenangan formal menjadi tindakan konkret. Kepolisian menjaga keteraturan, birokrasi mengelola administrasi, lembaga pelayanan publik menjalankan distribusi layanan, dan berbagai struktur teknis melaksanakan fungsi operasional sehari-hari. Tanpa aparatur, negara akan menjadi desain pasif yang tidak memiliki kemampuan eksekusi.

Namun aparatur bukan pemilik sistem. Kesalahan serius sering muncul ketika aparatur mulai memosisikan dirinya sebagai pusat negara, seolah-olah rakyat hanyalah objek yang harus tunduk pada logika kelembagaan. Dalam kondisi seperti itu, orientasi pelayanan bergeser menjadi dominasi administratif. Struktur yang seharusnya menjadi alat publik berubah menjadi kekuatan yang menuntut kepatuhan tanpa akuntabilitas. Pergeseran semacam ini merupakan salah satu tanda bahwa fungsi *hardware* mulai bergerak melampaui batas desainnya.

Sumber daya material juga termasuk dalam kategori *hardware* negara. Kekayaan alam, energi, infrastruktur logistik, fasilitas publik, jaringan komunikasi, dan berbagai aset strategis membentuk kapasitas material negara. Dalam skala tertentu, kekuatan material memang penting karena menentukan kemampuan negara memenuhi fungsi dasarnya. Negara tanpa kapasitas material yang memadai akan

kesulitan menjalankan pelayanan, perlindungan, maupun pembangunan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa kekayaan material tidak otomatis menghasilkan kehidupan kebangsaan yang sehat. Banyak negara kaya sumber daya justru mengalami ketimpangan, korupsi, konflik kepentingan, dan penetrasi kekuatan eksternal. Fenomena ini menunjukkan bahwa *hardware* yang kaya tidak menjamin arah sistem yang benar. Tanpa orientasi nilai yang sehat, kekayaan material justru dapat menjadi titik masuk bagi pembajakan kepentingan.

Dalam analogi teknologi, *hardware* hanyalah wadah tempat sistem bekerja. Perangkat keras menyediakan kemampuan teknis, tetapi tidak menentukan arah moral atau orientasi operasional. Sebuah komputer yang sangat mahal tetap tidak berguna tanpa sistem dasar yang benar. Bahkan perangkat yang kuat dapat berubah menjadi alat yang berbahaya jika sistem internalnya dikendalikan oleh pihak yang salah. Analogi ini sangat relevan untuk memahami negara.

Karena itu, negara sebagai *hardware* harus dipahami secara proporsional. Negara memang membutuhkan tubuh fisik, struktur kelembagaan, aparatur, wilayah, dan kapasitas material. Akan tetapi seluruh unsur tersebut hanyalah lapisan terluar dari sistem yang lebih besar. Menilai kesehatan negara hanya dari pembangunan gedung, banyaknya institusi, atau kuatnya aparatur sama seperti menilai kesehatan komputer hanya dari desain casing dan spesifikasi perangkat keras.

Kesalahan memahami negara hanya sebagai *hardware* merupakan akar dari banyak ilusi pemerintahan. Masyarakat mudah terkesan oleh simbol kekuatan fisik, tetapi gagal membaca apakah desain dasarnya sehat. Struktur dapat terlihat kokoh, tetapi orientasi bisa rusak. Institusi dapat terus berjalan, tetapi fungsi dapat menyimpang. Aparatur dapat bekerja aktif, tetapi kepentingan yang dilayani belum tentu kepentingan rakyat sebagai pemilik sah sistem.

Karena itu, *hardware* hanyalah permulaan. Perangkat fisik membutuhkan aturan dasar yang menentukan bagaimana sistem pertama kali berjalan, bagaimana komponen saling berhubungan, dan apa batas operasionalnya. Dalam analogi teknologi, fungsi tersebut dijalankan oleh *firmware*. Dalam kehidupan kenegaraan, posisi tersebut ditempati oleh konstitusi. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak ke lapisan berikutnya, yaitu memahami konstitusi sebagai *firmware* negara.

2.4. Firmware: Konstitusi sebagai Aturan Dasar Sistem

Setelah negara dipahami sebagai *hardware* atau perangkat fisik tempat kehidupan kenegaraan dijalankan, pembahasan berikutnya harus bergerak ke lapisan yang lebih dalam, yaitu *firmware*. Dalam dunia teknologi, *firmware* adalah perangkat lunak dasar yang tertanam langsung pada perangkat keras untuk mengatur fungsi-fungsi fundamental sebelum sistem utama berjalan. *Firmware* menentukan bagaimana perangkat mengenali komponen internalnya,

bagaimana proses awal dijalankan, dan bagaimana hubungan dasar antarbagian dibentuk. Dalam glosarium buku ini, posisi tersebut dipadankan dengan konstitusi, yaitu aturan dasar negara yang menentukan bagaimana struktur kenegaraan dibentuk, dijalankan, dan dibatasi.

Analogi ini sangat penting karena banyak masyarakat memahami konstitusi hanya sebagai dokumen hukum formal, padahal perannya jauh lebih mendasar daripada sekadar teks legal. Konstitusi bukan hanya kumpulan pasal. Konstitusi adalah desain dasar sistem. Sebagaimana sebuah perangkat tidak memulai operasi secara acak, negara juga tidak boleh berjalan tanpa kerangka dasar yang jelas. Tanpa aturan dasar yang mengatur relasi kekuasaan, struktur kenegaraan akan bergerak secara liar, bergantung pada kehendak figur, tekanan kelompok, atau kepentingan jangka pendek.

Dalam kehidupan pemerintahan modern, konstitusi sering diperlakukan seperti dokumen simbolik yang hanya dibuka ketika terjadi sengketa hukum atau perdebatan formal. Padahal konstitusi sesungguhnya menentukan bagaimana negara "dinyalakan" sejak awal. Dalam analogi teknologi, terdapat proses yang dikenal sebagai *boot process*, yaitu tahapan awal ketika sistem mulai aktif dan seluruh komponen dasar dikenali agar operasi dapat berjalan dengan benar. Dalam glosarium buku ini, proses tersebut dianalogikan sebagai mekanisme legal pembentukan pemerintahan, transisi kekuasaan, dan aktivasi sistem kenegaraan sesuai desain konstitusional.

Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar aturan saat sistem sudah berjalan, tetapi fondasi yang menentukan bagaimana sistem mulai bekerja.

Pemahaman ini membawa konsekuensi yang sangat besar. Jika *firmware* dalam sebuah perangkat rusak, maka seluruh sistem berpotensi mengalami gangguan bahkan sebelum sistem operasi dijalankan. Perangkat keras yang mahal dan kuat tidak banyak berarti jika lapisan dasar yang mengatur fungsi awal mengalami cacat. Hal yang sama berlaku pada negara. Negara dapat memiliki wilayah luas, institusi lengkap, aparatur besar, dan sumber daya melimpah, tetapi jika desain konstitusionalnya keliru, maka kerusakan sistemik dapat tertanam sejak awal.

Konstitusi memiliki fungsi pertama sebagai penentu arsitektur kekuasaan. Melalui konstitusi, ditentukan siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana kewenangan diperoleh, sejauh mana batas kekuasaan tersebut, dan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan. Tanpa desain semacam ini, negara akan bergerak berdasarkan improvisasi kekuasaan. Struktur seperti itu sangat berbahaya karena membuka ruang dominasi tanpa kontrol. Konstitusi menjadi pengaman pertama agar kekuasaan tidak tumbuh liar melampaui legitimasi yang diberikan.

Konstitusi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Fungsi ini sangat penting karena kekuasaan secara alamiah memiliki kecenderungan untuk membesar jika tidak dikendalikan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak penyimpangan negara tidak selalu dimulai dari kekuatan eksternal, melainkan

dari ekspansi internal kekuasaan yang kehilangan batas. Ketika struktur negara memperoleh kewenangan tanpa pengendalian yang memadai, organisasi kekuasaan perlahan berubah menjadi entitas yang mempertahankan dirinya sendiri. Konstitusi seharusnya menjadi mekanisme yang mencegah proses tersebut.

Namun konstitusi tidak cukup hanya membatasi. Konstitusi juga harus menentukan arah dasar legitimasi. Dalam negara yang sehat, seluruh struktur kekuasaan memperoleh legitimasi dari sumber yang jelas. Dalam kerangka buku ini, sumber tersebut adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau *root owner*. Artinya, konstitusi tidak boleh dibangun dengan logika yang memosisikan rakyat sebagai objek administrasi, melainkan harus menegaskan bahwa seluruh struktur negara bekerja di bawah legitimasi rakyat sebagai pemilik sah sistem.

Jika desain konstitusi menjauh dari prinsip tersebut, persoalannya bukan sekadar kelemahan teknis hukum, melainkan kerusakan arsitektural. Dalam analogi teknologi, kerusakan semacam ini jauh lebih serius daripada masalah aplikasi yang bermasalah. Aplikasi masih dapat diperbarui atau diganti. Namun jika lapisan dasar yang mengatur sistem sudah mengalami distorsi, maka perbaikan menjadi jauh lebih kompleks. Karena itu kualitas desain konstitusi menentukan kualitas jangka panjang kehidupan kenegaraan.

Konstitusi juga menentukan bagaimana relasi antar-komponen negara dibangun. Hubungan antara

eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga pengawasan, aparatur, dan berbagai organ lain tidak boleh dibiarkan berkembang secara improvisasional. Sistem yang sehat membutuhkan kejelasan struktur agar fungsi tidak saling bertabrakan atau saling menelan. Dalam dunia teknologi, *firmware* memastikan perangkat mengenali komponen internalnya secara benar. Dalam negara, konstitusi seharusnya memastikan relasi antar-organ kekuasaan berjalan dalam batas yang jelas.

Namun penting dipahami bahwa keberadaan konstitusi tidak otomatis menjamin sistem berjalan sehat. Sebagaimana *firmware* dapat dirancang dengan buruk, demikian pula konstitusi dapat membawa kelemahan desain yang serius. Sebuah konstitusi mungkin terlihat rapi secara formal, tetapi tetap mengandung celah yang memungkinkan pembesaran kekuasaan, dominasi kelompok tertentu, atau pelemahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, konstitusi harus dipahami bukan sekadar sebagai teks hukum yang harus dihormati, tetapi sebagai desain sistem yang harus terus dievaluasi secara rasional.

Dalam konteks inilah perdebatan tentang perubahan konstitusi menjadi relevan. Banyak masyarakat memperlakukan konstitusi seolah-olah identik dengan sesuatu yang absolut dan tidak boleh disentuh. Sikap semacam ini berbahaya jika membuat kesalahan desain permanen tidak pernah dikoreksi. Dalam teknologi, tidak ada perancang yang menganggap *firmware* sepenuhnya kebal dari evaluasi. Jika ditemukan kelemahan mendasar yang mengganggu fungsi sistem, koreksi menjadi kebutuhan

rasional. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kenegaraan, selama perubahan dilakukan demi memperbaiki integritas desain, bukan demi kepentingan jangka pendek.

Meski demikian, konstitusi tidak boleh dipahami sebagai sumber nilai tertinggi. Ini adalah pembedaan yang sangat penting. Dalam analogi buku ini, konstitusi diposisikan sebagai *firmware*, bukan sebagai kernel (inti sistem). Artinya, konstitusi adalah aturan dasar operasional, tetapi bukan inti nilai terdalam yang memberi arah moral terhadap sistem. Sebuah *firmware* dapat menentukan bagaimana perangkat bekerja, tetapi arah dasar sistem ditentukan oleh inti yang lebih fundamental. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, posisi tersebut ditempati oleh Pancasila.

Pembedaan ini penting karena banyak negara modern terjebak dalam legalisme sempit, yaitu kecenderungan memperlakukan teks hukum sebagai sumber legitimasi tertinggi tanpa mempertanyakan orientasi nilai di baliknya. Padahal hukum dapat dirancang dengan sangat teknis tetapi tetap menjauh dari keadilan substantif. Konstitusi dapat mengatur prosedur dengan detail tetapi tetap kehilangan ruh filosofis yang seharusnya menjadi fondasi bangsa. Karena itu konstitusi harus tunduk pada inti nilai yang lebih mendalam, bukan menjadi pengganti nilai itu sendiri.

Pada akhirnya, konstitusi sebagai *firmware* harus dipahami sebagai desain dasar yang menentukan bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan dibatasi, bagaimana legitimasi dibentuk, dan

bagaimana sistem pertama kali diaktifkan. Negara tanpa konstitusi yang sehat akan mudah bergerak liar, sementara konstitusi tanpa fondasi nilai yang benar dapat menghasilkan sistem yang tertib secara teknis tetapi menyimpang secara moral. Karena itu setelah memahami konstitusi sebagai lapisan dasar operasional, pembahasan harus bergerak ke inti terdalam dari sistem kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai kernel (inti sistem).

2.5. Kernel (inti sistem): Pancasila sebagai Inti Operasional Sistem Kebangsaan

Setelah negara dipahami sebagai *hardware* dan konstitusi dipahami sebagai *firmware*, pembahasan harus bergerak ke lapisan yang jauh lebih mendasar, yaitu kernel (inti sistem). Dalam arsitektur teknologi, kernel (inti sistem) merupakan inti utama sistem operasi yang mengatur hubungan antara perangkat keras dengan seluruh fungsi perangkat lunak. Kernel (inti sistem) bukan komponen yang selalu tampak di permukaan, tetapi justru menjadi pusat yang menentukan bagaimana seluruh sistem bekerja. Dalam glosarium buku ini, posisi tersebut secara tegas dipadankan dengan Pancasila sebagai inti nilai yang menjadi dasar operasional seluruh sistem kebangsaan. Pemahaman ini sangat penting, karena tanpa meletakkan Pancasila pada posisi yang tepat, seluruh pembacaan terhadap negara akan mudah terjebak dalam simbolisme kosong.

Selama ini, salah satu kesalahan paling umum dalam kehidupan berbangsa adalah memperlakukan

Pancasila sebagai ornamen semata, bukan sebagai sistem nilai yang hidup. Pancasila sering hadir dalam pidato, upacara, slogan resmi, dokumen formal, dinding kantor pemerintahan, atau materi pendidikan kewarganegaraan, tetapi kehadiran simbolik tersebut tidak selalu diikuti oleh pemahaman struktural terhadap fungsinya. Akibatnya, Pancasila lebih sering diperlakukan sebagai dekorasi konseptual daripada fondasi operasional. Dalam kondisi seperti itu, bangsa memiliki simbol nilai, tetapi tidak memiliki sistem yang benar-benar digerakkan oleh nilai tersebut.

Analogi kernel (inti sistem) membantu membongkar kesalahan tersebut. Dalam sebuah sistem teknologi, kernel (inti sistem) bukan aksesori tambahan yang dapat dipasang untuk mempercantik tampilan. Kernel (inti sistem) adalah pusat kendali yang menentukan bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan sistem, bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana instruksi diterjemahkan, dan bagaimana stabilitas sistem dipertahankan. Jika kernel (inti sistem) bermasalah, keseluruhan sistem berpotensi mengalami kegagalan serius. Karena itu menempatkan Pancasila sebagai kernel (inti sistem) berarti memahami bahwa Pancasila bukan sekadar simbol identitas nasional, melainkan inti yang menentukan arah operasional kehidupan kebangsaan.

Pancasila, dalam kerangka ini, bukan sekadar daftar lima prinsip normatif yang dihafalkan secara formal. Pancasila adalah inti filosofis yang seharusnya menentukan bagaimana negara memahami manusia, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hukum

dirancang, bagaimana keadilan ditegakkan, bagaimana ekonomi diorientasikan, dan bagaimana kehidupan bersama dibentuk. Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya sumber legitimasi retoris, melainkan pusat orientasi sistemik. Jika posisi ini hilang, maka Pancasila hanya tinggal nama tanpa fungsi substantif.

Penting dipahami bahwa kernel (inti sistem) bekerja pada lapisan yang lebih mendalam daripada *firmware*. *Firmware* mengatur aturan dasar operasional perangkat, sedangkan kernel (inti sistem) menentukan bagaimana keseluruhan sistem memahami dan menjalankan fungsi dasarnya. Dalam konteks kebangsaan, konstitusi dapat menentukan struktur formal kekuasaan, tetapi Pancasila seharusnya menentukan orientasi moral dan filosofis dari struktur tersebut. Ini berarti konstitusi tidak boleh bergerak bertentangan dengan Pancasila, karena aturan dasar operasional harus tunduk pada inti nilai yang lebih mendasar.

Pembedaan ini sangat penting karena banyak negara modern terjebak dalam legalisme yang terlalu teknis. Selama prosedur formal terpenuhi, sistem dianggap berjalan dengan benar, meskipun secara substantif menjauh dari nilai keadilan, kemanusiaan, atau kedaulatan rakyat. Cara pandang seperti ini sama seperti perangkat yang secara teknis aktif tetapi diarahkan oleh logika yang salah. Sistem mungkin berjalan, tetapi arah operasionalnya bermasalah. Karena itu ukuran kesehatan kebangsaan tidak cukup dinilai dari kepatuhan prosedural, melainkan dari kesesuaian

operasional sistem dengan nilai inti yang menjadi fondasinya.

Jika Pancasila diposisikan sebagai kernel (inti sistem), maka seluruh relasi dalam negara harus dapat ditelusuri kembali kepada nilai dasarnya. Pertanyaan mendasar yang harus diajukan bukan hanya apakah suatu kebijakan legal, tetapi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan orientasi nilai bangsa. Bukan hanya apakah suatu keputusan dapat dilaksanakan, tetapi apakah keputusan tersebut menjaga martabat manusia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan orientasi moral kebangsaan. Dengan cara pandang ini, Pancasila menjadi alat evaluasi substantif, bukan sekadar simbol legitimasi.

Dalam analogi teknologi, kernel (inti sistem) juga berfungsi menjaga komunikasi antara perangkat keras dengan lapisan operasional yang lebih tinggi. Jika kernel (inti sistem) gagal menjalankan fungsi tersebut, sistem kehilangan kemampuan untuk bekerja secara stabil. Dalam kehidupan kebangsaan, Pancasila seharusnya menjalankan fungsi serupa. Pancasila menghubungkan struktur negara yang bersifat material dengan kehidupan sosial yang bersifat dinamis. Pancasila menghubungkan organisasi kekuasaan dengan tujuan moral bangsa. Pancasila menjadi titik temu antara desain formal negara dengan makna substantif kehidupan bersama.

Tanpa inti semacam itu, negara berpotensi berubah menjadi organisasi teknokratis yang efisien tetapi kehilangan arah. Sistem hukum tetap berjalan. Aparatur tetap aktif. Birokrasi tetap memproses

administrasi. Kebijakan tetap diproduksi. Namun seluruh aktivitas tersebut dapat bergerak semata-mata berdasarkan logika teknis, bukan nilai kebangsaan. Kondisi seperti ini sangat berbahaya karena secara lahiriah sistem tampak hidup, tetapi secara substantif telah menjauh dari fondasi filosofisnya.

Dalam dunia teknologi terdapat istilah *kernel panic*, yaitu kondisi ketika inti sistem mengalami kegagalan fatal sehingga keseluruhan operasi tidak dapat berjalan normal. Dalam glosarium buku ini, kondisi tersebut dianalogikan sebagai krisis nilai atau kegagalan ideologis yang menyebabkan disorientasi dalam hukum, pemerintahan, dan kehidupan kebangsaan. Analogi ini sangat relevan untuk membaca kondisi suatu bangsa yang secara administratif tampak berjalan, tetapi secara moral mengalami kebingungan arah.

Ketika hukum diproduksi tanpa orientasi keadilan, ketika kekuasaan dijalankan tanpa rasa tanggung jawab moral, ketika pembangunan hanya diukur dari angka material, atau ketika rakyat perlahan kehilangan posisi sebagai pemilik sah sistem, maka sesungguhnya yang sedang terjadi bukan sekadar masalah kebijakan. Yang sedang terjadi adalah gangguan pada inti sistem. Dalam bahasa analogi buku ini, bangsa sedang mengalami gejala *kernel panic*. Sistem masih bergerak, tetapi kehilangan stabilitas nilai yang seharusnya menjadi penopangnya.

Bahaya terbesar dari kondisi tersebut adalah ilusi normalitas. Karena institusi masih bekerja, banyak orang mengira sistem baik-baik saja. Karena pemilu

tetap berlangsung, demokrasi dianggap sehat. Karena hukum tetap diproduksi, keadilan dianggap hadir. Karena pemerintahan tetap berjalan, negara dianggap stabil. Padahal kerusakan inti justru sering paling sulit dikenali karena tidak selalu tampak secara fisik. Sama seperti perangkat yang terlihat normal dari luar, tetapi inti sistemnya telah terganggu.

Menempatkan Pancasila sebagai kernel (inti sistem) juga berarti menolak cara pandang yang menjadikan ideologi sekadar alat propaganda. Pancasila tidak boleh digunakan sebagai stempel untuk melegitimasi kebijakan tanpa evaluasi kritis. Justru karena Pancasila adalah inti nilai, maka seluruh kebijakan harus diuji terhadapnya. Ideologi yang sehat bukan alat pembungkaman kritik, melainkan standar moral untuk mengoreksi penyimpangan sistem. Jika ideologi dipakai untuk menutup evaluasi, maka fungsi inti sistem telah dibalik menjadi alat kekuasaan.

Pada akhirnya, memahami Pancasila sebagai kernel (inti sistem) berarti memahami bahwa bangsa ini memiliki pusat nilai yang seharusnya menghidupkan seluruh struktur kebangsaan. Negara bukan sekadar mesin administrasi. Konstitusi bukan sekadar aturan formal. Pemerintah bukan sekadar operator teknis. Seluruh unsur tersebut seharusnya bekerja dalam orbit nilai yang jelas. Tanpa inti semacam itu, sistem kebangsaan akan tetap bergerak, tetapi kehilangan arah.

Karena kernel (inti sistem) tidak bekerja sendirian, nilai inti tersebut membutuhkan lingkungan yang menerjemahkannya ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam arsitektur teknologi, fungsi tersebut

dijalankan oleh *operating system*. Dalam kehidupan kebangsaan, posisi tersebut ditempati oleh peradaban Nusantara sebagai sistem hidup yang menerjemahkan nilai dasar bangsa ke dalam realitas sosial.

2.6. Operating System: Peradaban Nusantara sebagai Sistem Kehidupan

Setelah Pancasila dipahami sebagai kernel (inti sistem) atau inti nilai yang menjadi pusat orientasi sistem kebangsaan, pembahasan berikutnya harus bergerak ke lapisan yang menerjemahkan inti tersebut ke dalam pengalaman kehidupan nyata, yaitu *operating system*. Dalam dunia teknologi, *operating system* merupakan lingkungan utama yang memungkinkan perangkat bekerja secara fungsional, teratur, dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Operating system bukan inti nilai terdalam, tetapi lapisan yang membuat inti tersebut dapat diwujudkan dalam praktik operasional. Dalam glosarium buku ini, posisi tersebut dipadankan dengan peradaban bangsa, khususnya Peradaban Nusantara, sebagai sistem hidup yang menerjemahkan nilai dasar bangsa ke dalam realitas sosial.

Analogi ini sangat penting karena salah satu kesalahan besar dalam kehidupan kebangsaan adalah menganggap nilai dasar cukup hanya dengan deklarasi formal. Banyak bangsa memiliki ideologi, konstitusi, simbol nasional, dan prinsip-prinsip luhur yang terdengar sangat baik di atas kertas, tetapi kehidupan sehari-harinya justru bergerak dalam arah yang sangat berbeda. Persoalan seperti ini terjadi karena nilai inti

tidak pernah benar-benar diterjemahkan menjadi sistem hidup. Dalam istilah analogi buku ini, kernel (inti sistem) ada, tetapi tidak memiliki *operating system* yang sehat untuk menjalankan fungsinya.

Dalam sistem teknologi, kernel (inti sistem) yang sangat baik tetap tidak akan memberi manfaat nyata tanpa *operating system* yang mampu menerjemahkan fungsinya menjadi pengalaman operasional. Pengguna tidak berinteraksi langsung dengan kernel (inti sistem). Pengguna berinteraksi dengan lingkungan sistem yang membuat perangkat terasa hidup, dapat digunakan, dan menghasilkan pengalaman tertentu. Dalam kehidupan kebangsaan, situasinya tidak berbeda. Rakyat tidak setiap hari berinteraksi dengan konsep abstrak Pancasila dalam bentuk teoritis. Rakyat berinteraksi dengan budaya, tata nilai, kebiasaan sosial, etika publik, cara hukum dijalankan, cara kekuasaan dipraktikkan, dan cara kehidupan bersama berlangsung.

Di titik inilah peradaban mengambil posisi yang sangat menentukan. Peradaban bukan sekadar warisan masa lalu, bukan kumpulan benda budaya, bukan nostalgia sejarah, dan bukan pula sekadar simbol identitas yang dipamerkan pada momentum seremonial. Peradaban adalah sistem hidup. Peradaban menentukan bagaimana suatu bangsa memahami manusia, kekuasaan, keadilan, tanggung jawab, kehormatan, ilmu pengetahuan, moralitas, hingga relasi dengan kehidupan yang lebih luas. Dengan kata lain, peradaban adalah lingkungan operasional tempat nilai inti bangsa benar-benar dijalankan.

Dalam BAB sebelumnya telah ditegaskan bahwa peradaban mencakup *worldview*, nilai, ilmu, moral, spiritualitas, budaya, estetika, dan tata hidup. Seluruh unsur tersebut bukan elemen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu sistem yang membentuk cara hidup kolektif. Jika Pancasila merupakan inti nilai yang memberi orientasi filosofis, maka peradaban adalah medium yang membuat orientasi tersebut hidup dalam perilaku nyata. Tanpa medium tersebut, nilai dasar hanya akan berhenti sebagai deklarasi ideologis tanpa daya transformasi sosial.

Peradaban Nusantara, dalam konteks buku ini, bukan dipahami secara sempit sebagai romantisme masa lalu atau glorifikasi kebudayaan tradisional tanpa kritik. Peradaban Nusantara harus dipahami sebagai keseluruhan sistem nilai, etika, tradisi berpikir, cara hidup, spiritualitas, dan pandangan tentang kehidupan yang tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat Nusantara. Dalam glosarium, Peradaban Nusantara dijelaskan sebagai keseluruhan sistem nilai, budaya, etika, tradisi, cara berpikir, dan praktik hidup bangsa Indonesia yang menjadi medium penerjemah nilai dasar negara ke dalam realitas sosial. Definisi ini menunjukkan bahwa peradaban bukan lapisan dekoratif, melainkan lingkungan operasional yang sangat fundamental.

Pemahaman ini penting karena banyak masyarakat modern terjebak dalam kesalahan berpikir yang menyamakan kemajuan dengan modernisasi teknis semata. Gedung tinggi dianggap bukti kemajuan. Digitalisasi dianggap bukti transformasi. Sistem

administratif yang semakin kompleks dianggap indikator kematangan negara. Padahal modernisasi teknis tidak identik dengan kemajuan peradaban. Sebuah masyarakat dapat sangat maju secara administratif tetapi tetap mengalami kemerosotan etika, kehilangan solidaritas, mengalami degradasi moral, atau menjauh dari nilai kemanusiaan. Dalam kondisi seperti itu, sistem tampak modern, tetapi *operating system* kehidupan kolektif sesungguhnya sedang rusak.

Worldview menjadi salah satu komponen paling mendasar dari *operating system* peradaban. Cara suatu bangsa memahami manusia akan menentukan bagaimana hukum dibentuk. Cara suatu bangsa memahami kekuasaan akan menentukan bagaimana negara dijalankan. Cara suatu bangsa memahami keadilan akan menentukan bagaimana konflik diselesaikan. Jika *worldview* suatu masyarakat berpusat pada dominasi, maka sistem kehidupan akan cenderung melahirkan struktur penindasan. Jika *worldview* berpusat pada martabat manusia, maka kehidupan kolektif akan bergerak ke arah yang berbeda.

Nilai juga menjadi komponen inti dari *operating system* peradaban. Nilai menentukan apa yang dianggap penting, apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang harus dihindari. Dari nilai lahir budaya kerja, etika kepemimpinan, orientasi pendidikan, bentuk interaksi sosial, hingga prioritas kebijakan publik. Jika nilai utama suatu sistem adalah keuntungan semata, maka seluruh struktur akan bergerak mengikuti logika utilitarian yang sempit. Jika nilai utama berakar pada

keadilan dan kemanusiaan, maka arah sistem akan berbeda secara fundamental.

Budaya menjadi ekspresi nyata dari *operating system* tersebut. Budaya tidak boleh direduksi menjadi kesenian, pakaian tradisional, atau ekspresi simbolik yang dangkal. Budaya adalah pola perilaku kolektif yang hidup dalam keseharian. Cara masyarakat berbicara, menyelesaikan konflik, menghormati orang lain, memahami waktu, memperlakukan kekuasaan, dan membangun hubungan sosial merupakan bagian dari budaya. Karena itu budaya bukan ornamen tambahan, melainkan indikator nyata dari bagaimana sistem kehidupan bekerja.

Moral dan spiritualitas juga menjadi bagian tak terpisahkan dari *operating system* peradaban. Tanpa moral, sistem kehidupan akan bergerak secara teknis tetapi kehilangan batas etis. Tanpa spiritualitas, kehidupan kolektif mudah terjebak dalam materialisme pragmatis yang memiskinkan orientasi manusia. Sebuah bangsa dapat tampak maju secara ekonomi, tetapi tetap mengalami kehancuran sosial jika moralitas publik runtuh. Dalam konteks ini, *operating system* yang sehat bukan hanya yang efisien, tetapi yang mampu menjaga arah kemanusiaan.

Ilmu pengetahuan juga merupakan komponen penting dari sistem ini. Namun ilmu dalam konteks peradaban tidak boleh dipahami hanya sebagai akumulasi data atau kecanggihan teknis. Ilmu harus menjadi instrumen pencerahan yang memperkuat martabat manusia dan kualitas kehidupan bersama. Jika ilmu dipisahkan dari nilai, ilmu dapat berubah menjadi

alat manipulasi yang sangat efektif. Dalam kondisi seperti itu, sistem mungkin menjadi semakin canggih, tetapi justru semakin jauh dari tujuan kemanusiaan.

Dalam analogi teknologi, *operating system* juga menentukan pengalaman pengguna. Dua perangkat dengan spesifikasi fisik yang sama dapat menghasilkan pengalaman yang sangat berbeda karena menggunakan sistem operasi yang berbeda. Analogi ini sangat relevan untuk membaca bangsa-bangsa modern. Dua negara dapat memiliki sumber daya yang setara, struktur kelembagaan yang serupa, bahkan teknologi yang sama, tetapi menghasilkan kehidupan kolektif yang sangat berbeda karena sistem nilai dan peradaban yang menopangnya berbeda.

Karena itu peradaban bukan pelengkap negara. Peradaban adalah sistem kehidupan yang menentukan bagaimana negara dijalankan secara nyata. Negara tanpa peradaban yang sehat akan berubah menjadi mesin administratif yang dingin. Hukum tetap berlaku, institusi tetap bekerja, dan aparatur tetap bergerak, tetapi seluruh sistem kehilangan ruh kemanusiaan. Dalam kondisi seperti itu, rakyat dapat hidup dalam negara yang tampak tertib tetapi sesungguhnya terasing dari nilai yang seharusnya melindungi kehidupan bersama.

Jika Pancasila adalah kernel (inti sistem) yang memberi inti orientasi, maka Peradaban Nusantara adalah *operating system* yang menerjemahkan orientasi tersebut menjadi praktik hidup. Namun sistem kehidupan tidak berhenti di sana. Di atas *operating system*, terdapat lapisan yang menjalankan fungsi-

fungsi operasional sehari-hari dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Dalam analogi buku ini, lapisan tersebut adalah *applications*, yaitu pemerintah.

2.7. Applications: Pemerintah sebagai Instrumen Operasional Sementara

Setelah negara dipahami sebagai *hardware*, konstitusi sebagai *firmware*, Pancasila sebagai kernel (inti sistem), dan Peradaban Nusantara sebagai *operating system*, pembahasan berikutnya harus bergerak ke lapisan yang paling sering dilihat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemerintah. Pada titik inilah banyak kekeliruan konseptual paling sering terjadi, karena masyarakat kerap menyamakan pemerintah dengan negara, bahkan dalam banyak kasus memperlakukan pemerintah seolah-olah sebagai pemilik sah kehidupan kebangsaan. Padahal dalam kerangka analogi buku ini, pemerintah tidak menempati posisi tersebut. Dalam glosarium, pemerintah secara tegas diposisikan sebagai *applications*, yaitu perangkat operasional yang berjalan di atas sistem utama untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Analogi ini sangat penting karena membongkar salah satu kekeliruan paling umum dalam kehidupan modern. Banyak orang memahami negara melalui wajah pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika presiden berganti, masyarakat merasa negara berubah. Ketika kabinet berganti, arah kehidupan kolektif dianggap otomatis berubah secara fundamental. Ketika pejabat tertentu berbicara, pernyataan tersebut

diperlakukan seolah-olah suara final negara. Cara pandang seperti ini menciptakan pencampuradukan antara operator dengan sistem yang dioperasikan.

Dalam dunia teknologi, *applications* adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi tertentu di atas sistem operasi. Sebuah aplikasi dapat digunakan untuk menulis dokumen, mengelola komunikasi, menjalankan analisis, atau mengakses layanan tertentu. Aplikasi sangat penting karena menjadi medium operasional yang langsung digunakan sehari-hari. Namun seberapa penting pun suatu aplikasi, aplikasi bukan pemilik perangkat. Aplikasi tidak menentukan kepemilikan sistem. Aplikasi bekerja dalam batas yang diizinkan oleh sistem utama.

Dalam konteks kenegaraan, pemerintah menjalankan fungsi serupa. Pemerintah bertugas mengelola administrasi, menjalankan kebijakan, memberikan pelayanan publik, mengoordinasikan pembangunan, menjaga operasional kelembagaan, serta menerjemahkan keputusan-keputusan formal ke dalam tindakan konkret. Pemerintah adalah lapisan operasional yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena masyarakat berinteraksi langsung dengan pemerintah, muncul ilusi bahwa pemerintah adalah keseluruhan negara. Padahal keduanya merupakan entitas yang berbeda secara konseptual.

Pembedaan ini harus dijaga dengan sangat tegas. Negara adalah struktur sistemik yang jauh lebih besar. Bangsa adalah kesadaran kolektif yang jauh lebih dalam. Pemerintah hanyalah operator sementara yang menjalankan fungsi tertentu dalam periode tertentu.

Sebagaimana aplikasi dapat dipasang, diperbarui, diperbaiki, atau diganti tanpa mengubah kepemilikan perangkat, demikian pula pemerintah dapat berganti melalui mekanisme konstitusional tanpa mengubah hakikat negara sebagai milik rakyat. Dalam glosarium, konsep ini ditegaskan melalui istilah temporary governance, yaitu pandangan bahwa pemerintahan merupakan struktur operasional sementara, bukan pemilik negara.

Pemahaman ini sangat penting bagi kesehatan demokrasi. Jika masyarakat menyamakan pemerintah dengan negara, maka kritik terhadap kebijakan akan mudah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Evaluasi terhadap pejabat akan dipersepsikan sebagai tindakan anti-kebangsaan. Ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan dapat dicap sebagai bentuk permusuhan terhadap sistem. Dalam kondisi seperti itu, ruang koreksi publik menyempit, sementara operator memperoleh legitimasi yang melampaui batas fungsionalnya.

Padahal dalam sistem yang sehat, kritik terhadap pemerintah justru merupakan bagian dari mekanisme pemeliharaan sistem. Dalam dunia teknologi, ketika sebuah aplikasi bermasalah, pengguna berhak mengevaluasi, memperbarui, mengganti, atau bahkan menghapus aplikasi tersebut demi menjaga kinerja sistem secara keseluruhan. Tidak ada logika sehat yang menyatakan bahwa kritik terhadap aplikasi sama dengan kebencian terhadap perangkat. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Evaluasi

terhadap pemerintah bukan ancaman terhadap negara, melainkan bagian dari tanggung jawab pemilik sistem.

Kesalahan memahami pemerintah sebagai pemilik negara sering menghasilkan pembesaran ego kelembagaan yang sangat berbahaya. Pemerintah mulai melihat dirinya sebagai pusat legitimasi, bukan pelaksana mandat. Struktur pelayanan berubah menjadi struktur dominasi. Kebijakan tidak lagi diposisikan sebagai instrumen untuk melayani rakyat, tetapi sebagai ekspresi kehendak operator yang harus diterima tanpa koreksi. Dalam kondisi seperti itu, relasi antara rakyat dan pemerintah berubah dari hubungan mandat menjadi hubungan subordinasi.

Bahaya semacam ini sangat nyata karena pemerintah memiliki akses langsung terhadap instrumen operasional negara. Pemerintah mengelola anggaran, memimpin birokrasi, memengaruhi kebijakan publik, mengendalikan banyak proses administratif, dan memiliki pengaruh besar terhadap arah implementasi hukum. Karena kedekatan dengan alat-alat operasional tersebut, operator sering tampak seolah-olah identik dengan sistem. Namun kedekatan terhadap instrumen tidak pernah sama dengan kepemilikan atas sistem.

Dalam kerangka buku ini, rakyat tetap merupakan *root owner*, yaitu pemilik sah dengan legitimasi tertinggi atas keseluruhan sistem kebangsaan. Pemerintah hanya menjalankan fungsi yang didelegasikan melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki legitimasi independen yang berdiri di atas rakyat. Setiap

kewenangan yang dijalankan bersifat mandat, bukan kepemilikan. Pembedaan ini sangat penting agar struktur kekuasaan tidak mengalami pembesaran yang merusak prinsip dasar kedaulatan.

Pemerintah juga harus dipahami sebagai lapisan yang sangat dinamis. Dalam sistem digital, aplikasi terus mengalami pembaruan karena kebutuhan berubah, tantangan berkembang, dan fungsi operasional perlu menyesuaikan diri. Dalam kehidupan kenegaraan, pergantian pemerintahan mencerminkan kebutuhan serupa. Bangsa yang sehat tidak bergantung pada satu operator tunggal. Negara yang sehat tidak dibangun di atas loyalitas personal terhadap figur tertentu. Justru kemampuan mengganti operator secara damai dan konstitusional merupakan tanda bahwa sistem bekerja dengan sehat.

Ketika loyalitas terhadap pemerintah berubah menjadi loyalitas mutlak terhadap figur atau kelompok operator, sistem mulai kehilangan keseimbangan. Pemerintah diperlakukan seperti entitas permanen. Kritik dianggap pengkhianatan. Evaluasi dianggap ancaman stabilitas. Dalam kondisi seperti itu, operator perlahan naik kelas secara semu, seolah-olah menjadi inti sistem. Padahal inti sistem bukan pemerintah. Inti sistem adalah nilai dasar bangsa, sedangkan pemerintah hanyalah lapisan operasional.

Pemerintah yang sehat memahami keterbatasan posisinya. Pemerintah yang sehat menyadari bahwa kekuasaan yang dijalankan bersifat amanah, bukan hak milik. Pemerintah yang sehat memahami bahwa mandat publik bukan lisensi untuk mendominasi, melainkan

tanggung jawab untuk melayani. Sebaliknya, pemerintah yang kehilangan kesadaran ini akan cenderung memperlakukan struktur negara sebagai alat kekuasaan kelompok, bukan sebagai instrumen pelayanan rakyat.

Dalam analogi teknologi, aplikasi juga dapat mengalami kerusakan. Aplikasi dapat menjadi lambat, tidak responsif, penuh kesalahan, atau bahkan bertindak di luar fungsi yang seharusnya. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah juga dapat mengalami penyimpangan serupa. Kebijakan dapat tidak efektif. Birokrasi dapat menjadi lamban. Pelayanan dapat berubah menjadi hambatan. Struktur administratif dapat kehilangan orientasi pelayanan. Namun persoalan tersebut tidak selalu berarti keseluruhan sistem harus dihancurkan. Dalam banyak kasus, yang diperlukan adalah koreksi terhadap lapisan operasional.

Namun ada kondisi yang lebih serius ketika aplikasi tidak sekadar rusak, melainkan menjadi saluran masuk bagi ancaman yang lebih besar. Dalam dunia teknologi, aplikasi dapat menjadi pintu masuk *malware* yang mengambil alih fungsi sistem. Analogi ini sangat relevan untuk kehidupan ketika pemerintah tidak lagi sekadar bermasalah secara administratif, tetapi mulai menjadi medium penetrasi kepentingan oligarki, kolonialisme modern, mafia kebijakan, atau kekuatan lain yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Pada titik inilah pembahasan harus bergerak ke ancaman sistemik yang lebih berbahaya, yaitu *malware* dalam kehidupan kebangsaan.

2.8. *Malware*: Oligarki dan Kolonialisme Modern sebagai Perusak Sistem

Setelah memahami pemerintah sebagai *applications* atau lapisan operasional yang menjalankan fungsi-fungsi sehari-hari dalam kehidupan negara, pembahasan berikutnya harus diarahkan pada ancaman yang bekerja tidak selalu terlihat dari permukaan, tetapi memiliki potensi merusak sistem secara sangat serius. Dalam dunia teknologi, ancaman semacam ini dikenal sebagai *malware*, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri sumber daya, memanipulasi fungsi, atau bahkan mengambil alih kendali sistem tanpa legitimasi sah. Dalam glosarium buku ini, konsep tersebut dipadankan dengan kekuatan destruktif seperti oligarki, kolonialisme modern, mafia kebijakan, dan berbagai bentuk infiltrasi kepentingan yang merusak kedaulatan nasional. Analogi ini bukan hiperbola retoris, melainkan alat baca yang sangat relevan untuk memahami kerusakan sistemik dalam kehidupan kebangsaan.

Salah satu kesalahan besar dalam membaca persoalan negara adalah kecenderungan menganggap seluruh kerusakan hanya sebagai akibat dari kelemahan figur pemimpin atau ketidakmampuan pemerintah menjalankan fungsi operasional. Padahal tidak semua persoalan berasal dari ketidakcakapan operator. Dalam banyak kasus, sistem justru tampak berjalan normal di permukaan, sementara di bagian dalam telah terjadi penetrasi kepentingan yang bekerja diam-diam, terstruktur, dan sangat efektif. Inilah karakter ancaman

yang paling berbahaya, karena kerusakan tidak selalu hadir dalam bentuk kehancuran yang terlihat jelas.

Dalam dunia digital, *malware* tidak selalu membuat perangkat langsung mati. Banyak *malware* justru dirancang agar perangkat tetap tampak normal sehingga pengguna tidak segera menyadari bahwa kendali sedang diambil alih. Layar tetap menyala, aplikasi tetap terbuka, dan fungsi dasar masih terlihat berjalan. Namun di balik tampilan normal tersebut, sumber daya dicuri, data dimanipulasi, akses dibuka untuk pihak luar, atau perilaku sistem diam-diam diubah. Analogi ini sangat relevan untuk membaca kehidupan kebangsaan modern.

Dalam konteks negara, oligarki merupakan salah satu bentuk *malware* yang paling nyata. Oligarki bukan sekadar keberadaan kelompok kaya atau *elite* ekonomi, melainkan kondisi ketika kekuatan ekonomi tertentu memperoleh pengaruh yang tidak proporsional terhadap arah kebijakan, distribusi sumber daya, desain regulasi, dan proses pengambilan keputusan publik. Dalam kondisi semacam ini, struktur formal negara tetap berjalan, tetapi orientasi kebijakan perlahan bergeser dari kepentingan rakyat menuju kepentingan kelompok yang memiliki daya tekan material.

Bahaya oligarki terletak pada kemampuannya bekerja melalui struktur yang tampak legal. Tidak semua penetrasi kepentingan hadir melalui pelanggaran hukum yang vulgar. Banyak proses justru berjalan melalui mekanisme formal, lobi kebijakan, pengaruh ekonomi, pembentukan opini publik, atau kedekatan dengan operator sistem. Karena itu oligarki

sering sulit dikenali oleh masyarakat awam. Yang tampak hanyalah kebijakan resmi, padahal di belakangnya terdapat konfigurasi kepentingan yang jauh lebih kompleks.

Kolonialisme modern juga harus dipahami dalam kerangka yang sama. Jika kolonialisme klasik bekerja melalui pendudukan fisik dan dominasi teritorial langsung, kolonialisme modern sering bekerja melalui mekanisme yang jauh lebih halus dan canggih. Pengaruh ekonomi, ketergantungan teknologi, tekanan finansial, dominasi pasar, penetrasi regulasi global, hingga pembentukan pola pikir yang menjauhkan bangsa dari kemandirian dapat menjadi instrumen kolonialisme modern. Dalam bentuk ini, penjajahan tidak selalu datang dengan bendera asing dan pasukan bersenjata, tetapi dapat hadir melalui sistem ketergantungan yang tampak normal.

Bahaya dari kolonialisme modern justru terletak pada kemampuannya menciptakan ilusi kedaulatan. Secara formal, negara tetap merdeka. Bendera tetap berkibar. Pemerintahan tetap berjalan. Pemilu tetap dilaksanakan. Lembaga negara tetap aktif. Namun arah kebijakan, struktur ekonomi, dan desain pembangunan dapat secara perlahan bergerak mengikuti kepentingan eksternal. Dalam kondisi seperti itu, kemerdekaan hanya bertahan sebagai simbol, sementara kemandirian substantif terus mengalami erosi.

Mafia kebijakan merupakan bentuk *malware* lain yang tidak kalah berbahaya. Dalam kondisi ini, kebijakan publik tidak lagi lahir murni dari kebutuhan rakyat atau orientasi nilai bangsa, melainkan dari

konfigurasi kepentingan tersembunyi yang memanfaatkan akses terhadap sistem. Regulasi dapat dirancang untuk melindungi kelompok tertentu. Penegakan hukum dapat bergerak selektif. Distribusi sumber daya dapat diarahkan secara tidak proporsional. Seluruh proses tersebut dapat berlangsung melalui prosedur yang tampak formal, sehingga kerusakan tidak mudah dikenali sebagai ancaman sistemik.

Dalam analogi teknologi, *malware* sering bekerja dengan cara menyusup melalui jalur yang sah secara teknis. Aplikasi yang tampak biasa dapat menjadi pintu masuk ancaman. File yang tampak normal dapat membawa kode berbahaya. Sistem keamanan yang lemah dapat dimanfaatkan untuk penetrasi. Dalam kehidupan kebangsaan, pola serupa sangat mungkin terjadi. Pemerintah sebagai *applications* dapat menjadi jalur masuk bagi kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Kebijakan yang tampak administratif dapat menjadi medium pengalihan sumber daya. Struktur hukum yang tampak legal dapat menjadi alat legitimasi pengaruh yang menyimpang.

Di titik inilah konsep *system hijacking* menjadi sangat relevan. Dalam glosarium, *system hijacking* dijelaskan sebagai pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Dalam konteks negara, kondisi ini terjadi ketika struktur formal tetap berada di tempatnya, tetapi kendali nyata atas arah kebijakan, distribusi kekuasaan, atau penggunaan sumber daya telah berpindah ke pihak yang tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

Sistem tetap hidup secara teknis, tetapi kepemilikan substantif telah terganggu.

Konsep lain yang sangat penting adalah *ownership capture*. Dalam glosarium, istilah ini menjelaskan situasi ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali nyata telah berpindah ke pihak lain. Dalam kehidupan kebangsaan, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi demokrasi. Rakyat secara hukum tetap disebut pemegang kedaulatan. Konstitusi tetap mengakui legitimasi rakyat. Namun secara praktis, keputusan strategis justru bergerak mengikuti kepentingan yang tidak tunduk pada kehendak rakyat.

Salah satu ciri utama *malware* adalah kemampuannya menguras sumber daya sistem untuk kepentingannya sendiri. Dalam konteks negara, hal ini dapat terlihat ketika kekayaan publik terus mengalir keluar dari kepentingan rakyat, sementara manfaat sosial yang dihasilkan sangat minim. Anggaran dapat habis, sumber daya alam dapat terkuras, kapasitas institusi dapat melemah, dan rakyat tetap tidak memperoleh peningkatan kualitas hidup yang sebanding. Sistem tetap berjalan, tetapi energi utamanya dikonsumsi oleh kepentingan lain.

Ciri lain dari *malware* adalah kemampuan mengubah fungsi sistem tanpa langsung menghancurkannya. Ini sangat penting untuk dipahami, karena ancaman terhadap negara tidak selalu hadir dalam bentuk kehancuran dramatis. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru perubahan fungsi secara perlahan. Negara yang seharusnya melayani

rakyat berubah menjadi pelayan kepentingan tertentu. Hukum yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat tekanan. Kebijakan yang seharusnya menyejahterakan berubah menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan.

Karena *malware* bekerja secara tersembunyi, masyarakat yang hanya melihat permukaan sering tidak menyadari kerusakan yang sedang terjadi. Selama gedung masih berdiri, sistem dianggap baik-baik saja. Selama pejabat masih bekerja, negara dianggap sehat. Selama pemilu masih berlangsung, demokrasi dianggap utuh. Padahal kerusakan terdalam justru sering terjadi ketika bentuk luar tetap terlihat normal. Inilah sebabnya berpikir sistemik menjadi sangat penting.

Negara yang sehat tidak hanya membutuhkan *hardware* yang kuat, *firmware* yang jelas, kernel (inti sistem) yang sehat, *operating system* yang hidup, dan *applications* yang berfungsi baik. Negara yang sehat juga membutuhkan kemampuan mendeteksi serta menolak ancaman yang merusak integritas sistem. Tanpa kesadaran terhadap ancaman semacam ini, rakyat mudah terjebak dalam ilusi bahwa masalah hanya terletak pada pergantian operator, padahal persoalan sebenarnya berada pada pembajakan yang jauh lebih dalam.

Karena itu, setelah memahami ancaman *malware*, pembahasan harus kembali pada pertanyaan paling fundamental, yaitu jika sistem dapat dibajak, lalu siapa sebenarnya pemilik sah sistem tersebut. Pertanyaan ini membawa pembahasan menuju inti paling penting dari

keseluruhan analogi, yaitu rakyat sebagai *root owner* atau pemilik tertinggi negara.

2.9. *Root Owner*: Rakyat sebagai Pemilik Sah Negara

Setelah membahas negara sebagai *hardware*, konstitusi sebagai *firmware*, Pancasila sebagai kernel (inti sistem), peradaban sebagai *operating system*, pemerintah sebagai *applications*, serta oligarki dan kolonialisme modern sebagai *malware*, pembahasan akhirnya sampai pada pertanyaan paling mendasar dari keseluruhan analogi ini, yaitu siapa sebenarnya pemilik sah sistem tersebut. Pertanyaan ini sangat penting, karena tanpa jawaban yang jelas, seluruh struktur yang telah dibahas akan kehilangan orientasi legitimasi. Sistem dapat dibangun dengan sangat kompleks, aturan dapat disusun dengan sangat rinci, dan kekuasaan dapat diorganisasi dengan sangat rapi, tetapi jika kepemilikan sejatinya tidak dipahami, maka sistem sangat mudah dibajak oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam dunia teknologi, dikenal konsep *root owner*, yaitu pemilik tertinggi yang memiliki kewenangan penuh terhadap sistem. Pemilik ini memiliki full *root access*, yakni hak akses tertinggi untuk mengatur konfigurasi, menentukan izin, memasang atau menghapus aplikasi, mengendalikan fungsi inti, serta mengambil keputusan final terhadap keseluruhan perangkat. Dalam glosarium buku ini, konsep tersebut secara tegas dipadankan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Analogi ini bukan sekadar permainan istilah modern, melainkan

penegasan filosofis yang sangat mendasar tentang hakikat negara.

Salah satu kesalahan paling serius dalam kehidupan bernegara adalah ketika rakyat perlahan berhenti memandang dirinya sebagai pemilik, lalu mulai memandang dirinya sekadar sebagai pengguna, objek administrasi, atau bahkan pihak yang harus tunduk tanpa syarat terhadap operator sistem. Dalam kondisi seperti itu, relasi antara rakyat dan negara mengalami pembalikan logika yang sangat berbahaya. Yang seharusnya menjadi pemilik berubah menjadi pihak yang merasa sekadar menumpang. Yang seharusnya menjalankan mandat justru tampil sebagai pemilik mutlak. Ketika pembalikan ini terjadi, inti persoalan kenegaraan sesungguhnya sudah mulai bergeser.

Dalam tradisi pemerintahan modern, konsep kedaulatan rakyat sering diucapkan sebagai slogan normatif. Istilah tersebut muncul dalam konstitusi, pidato resmi, pendidikan kewarganegaraan, dan retorika demokrasi. Namun tidak semua masyarakat benar-benar memahami konsekuensi praktis dari konsep tersebut. Jika rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maka seluruh struktur negara memperoleh legitimasi dari rakyat, bukan sebaliknya. Artinya, negara bukan entitas yang berdiri di atas rakyat, melainkan instrumen yang dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik sah kehidupan kolektif.

Analogi *root owner* membantu menjelaskan hal ini dengan sangat terang. Dalam sebuah sistem digital,

keberadaan aplikasi tidak menghapus hak pemilik utama. *Operator* yang menjalankan fungsi tertentu tidak otomatis berubah menjadi pemilik perangkat. Bahkan sistem yang sangat kompleks tetap berada di bawah otoritas pihak yang memiliki akses tertinggi. Dengan kerangka ini, pemerintah tidak dapat dipahami sebagai pemilik negara. Aparatur tidak dapat dipahami sebagai sumber legitimasi. Struktur kekuasaan tidak dapat mengklaim kepemilikan atas rakyat. Seluruhnya bekerja di bawah prinsip bahwa rakyat adalah pemilik utama sistem.

Konsekuensi dari pemahaman ini sangat besar. Jika rakyat adalah *root owner*, maka pemerintah hanyalah operator mandat. Jika rakyat adalah *root owner*, maka hukum harus bekerja untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan untuk menundukkan rakyat demi kenyamanan struktur. Jika rakyat adalah *root owner*, maka kebijakan publik harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk melayani konfigurasi kepentingan tertentu. Dengan kata lain, konsep ini bukan metafora kosong, melainkan fondasi logis dari seluruh desain kenegaraan yang sehat.

Namun persoalan besar muncul ketika rakyat secara formal diakui sebagai pemilik, tetapi secara praktis kehilangan akses terhadap sistem. Dalam glosarium buku ini, kondisi semacam itu dijelaskan melalui konsep *ownership capture*, yaitu keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali nyata telah berpindah ke pihak lain. Analogi ini sangat kuat untuk membaca banyak fenomena pemerintahan modern. Secara hukum, rakyat

disebut berdaulat. Secara administratif, rakyat menjadi dasar legitimasi pemilu. Secara simbolik, seluruh sistem mengaku bekerja atas nama rakyat. Namun dalam praktik, rakyat sering tidak memiliki pengaruh nyata terhadap arah strategis sistem.

Kondisi seperti ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi kedaulatan. Rakyat merasa tetap menjadi pemilik karena sistem terus menggunakan bahasa demokrasi. Pemilu tetap berlangsung. Kampanye tetap dilakukan. Representasi formal tetap dijaga. Namun keputusan substantif dapat bergerak dalam orbit kepentingan yang sama sekali tidak tunduk pada kehendak rakyat. Ketika keadaan seperti ini terjadi, persoalannya bukan sekadar kelemahan demokrasi prosedural, melainkan gangguan serius terhadap struktur kepemilikan sistem.

Dalam dunia teknologi, pemilik yang kehilangan *root access* terhadap perangkatnya sendiri sesungguhnya telah kehilangan kendali, meskipun perangkat tersebut secara formal masih berada di tangannya. Situasi serupa sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kebangsaan. Rakyat tetap tinggal di dalam negara, tetap membayar pajak, tetap tunduk pada hukum, tetap ikut dalam ritual demokrasi, tetapi tidak lagi benar-benar menentukan arah sistem. Dalam kondisi seperti itu, kepemilikan berubah menjadi formalitas, bukan realitas.

Di sinilah konsep *system hijacking* menjadi sangat relevan. Dalam glosarium, istilah ini dijelaskan sebagai pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Jika *ownership capture* menjelaskan hilangnya kendali substantif, maka *system*

hijacking menjelaskan bentuk aktif dari pembajakan tersebut. Dalam kehidupan kebangsaan, pembajakan tidak selalu hadir melalui kudeta yang dramatis atau perubahan rezim yang terbuka. Pembajakan dapat terjadi secara halus melalui dominasi kepentingan, manipulasi regulasi, infiltrasi kebijakan, atau konsolidasi kekuatan yang menjauhkan sistem dari pemilik sahnya.

Karena itu persoalan kedaulatan tidak boleh dipahami secara dangkal sebagai sekadar simbol kemerdekaan formal. Kedaulatan berarti kemampuan nyata untuk menentukan arah sistem. Sebuah bangsa tidak sungguh-sungguh berdaulat jika keputusan strategisnya dikendalikan pihak lain. Rakyat tidak sungguh-sungguh berdaulat jika partisipasinya berhenti pada legitimasi prosedural tanpa akses substantif terhadap arah kebijakan. Kedaulatan yang sehat membutuhkan hubungan nyata antara kepemilikan formal dan kendali substantif.

Pemahaman ini sekaligus membedakan rakyat dari sekadar pengguna pasif sistem. Dalam banyak negara modern, warga perlahan didorong menjadi konsumen layanan negara, bukan pemilik sistem kenegaraan. Negara diperlakukan seperti penyedia jasa, sementara rakyat diposisikan seperti pelanggan yang hanya menerima layanan. Analogi ini sangat menyesatkan. Pelanggan dapat memilih layanan, tetapi tidak memiliki legitimasi tertinggi atas sistem. Rakyat dalam negara demokratis tidak berada pada posisi tersebut. Rakyat adalah sumber legitimasi, bukan sekadar penerima layanan.

Ketika rakyat kehilangan kesadaran sebagai pemilik, struktur kekuasaan sangat mudah membesar. Pemerintah mulai melihat mandat sebagai hak milik. Aparatur mulai menempatkan rakyat sebagai objek kontrol. Hukum bergerak untuk menjaga stabilitas struktural, bukan keadilan substantif. Kebijakan dirancang untuk mempertahankan konfigurasi kekuasaan yang ada. Dalam kondisi seperti itu, masalah utama bukan hanya kesalahan kebijakan, tetapi hilangnya kesadaran dasar tentang siapa pemilik sah sistem.

Rakyat sebagai *root owner* juga berarti rakyat memiliki tanggung jawab, bukan hanya hak. Dalam sistem digital, pemilik utama tidak cukup hanya mengklaim kepemilikan, tetapi juga harus memahami sistem yang dimiliki. Pemilik yang sepenuhnya buta terhadap perangkatnya sendiri sangat mudah kehilangan kendali. Analogi ini sangat relevan dalam kehidupan kebangsaan. Kedaulatan rakyat tidak dapat hidup jika rakyat tidak memahami struktur negara, tidak memahami mekanisme kekuasaan, tidak memahami ancaman sistemik, dan tidak memiliki kesadaran kritis terhadap penyimpangan.

Dengan demikian, konsep *root owner* bukan sekadar glorifikasi romantis terhadap rakyat. Konsep ini adalah panggilan untuk memulihkan kesadaran kepemilikan. Negara bukan milik pemerintah. Negara bukan milik *elite*. Negara bukan milik birokrasi. Negara bukan milik oligarki. Negara adalah sistem yang secara legitimatif dimiliki oleh rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi.

Pada titik inilah keseluruhan analogi dalam bab ini mencapai fondasi yang paling mendasar. Negara adalah sistem. Rakyat adalah pemilik sah sistem tersebut. Namun kepemilikan tidak selalu berarti pengelolaan langsung terhadap seluruh fungsi yang ada di dalamnya. Sebagaimana sebuah sistem yang besar membutuhkan *administrator* untuk menjaga integritas, keamanan, dan arah kerjanya, negara juga memerlukan sebuah mekanisme yang menerima mandat langsung dari pemilik kedaulatan untuk memastikan seluruh perangkat negara tetap bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dari sinilah pembahasan bergerak kepada lapisan berikutnya dalam analogi ini, yaitu konsep *root administrator*, yang dalam kerangka kedaulatan rakyat diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris rakyat dan penjaga hubungan antara pemilik kedaulatan dengan seluruh struktur negara.

2.10. *Root Administrator*: MPR sebagai Mandataris Kedaulatan Rakyat

Setelah memahami rakyat sebagai *root owner* atau pemilik tertinggi sistem negara, muncul pertanyaan yang sangat penting. Dalam praktiknya, apakah pemilik harus menjalankan sendiri seluruh fungsi pengelolaan sistem? Dalam dunia teknologi, jawabannya tidak. Sebuah sistem yang besar dan kompleks biasanya memiliki pemilik utama yang memegang hak kepemilikan tertinggi, tetapi pengelolaan operasional sehari-hari dijalankan oleh pihak yang memperoleh mandat administratif. Pihak tersebut dikenal sebagai

root administrator, yaitu *administrator* utama yang memiliki akses tertinggi untuk mengelola sistem atas nama pemilik sah.

Konsep ini sangat membantu menjelaskan hubungan antara rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam desain negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Jika rakyat adalah *root owner*, maka diperlukan sebuah lembaga yang bertindak sebagai *root administrator*, yaitu pihak yang menerima mandat langsung untuk menjaga, mengawasi, dan memastikan sistem tetap berjalan sesuai kehendak pemiliknya. Dalam kerangka inilah MPR dapat dipahami sebagai mandataris rakyat, bukan sebagai pemilik negara, bukan pula sebagai penguasa tertinggi yang berdiri di atas rakyat.

Perbedaan antara pemilik dan *administrator* sangat penting untuk dipahami. Dalam sistem digital, *administrator* memiliki akses yang sangat luas. *Administrator* dapat mengatur pengguna, mengubah konfigurasi, memberikan atau mencabut izin, melakukan pemeliharaan sistem, bahkan mengambil tindakan korektif ketika terjadi gangguan. Namun seluruh kewenangan tersebut tidak berasal dari dirinya sendiri. Kewenangan tersebut berasal dari mandat yang diberikan oleh pemilik sistem. *Administrator* bekerja atas nama pemilik, bukan menggantikan kedudukan pemilik.

Analogi ini memberikan penjelasan yang sangat jelas terhadap konsep kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilik tidak mungkin menjalankan seluruh fungsi kenegaraan secara langsung setiap saat. Negara

modern memiliki jutaan bahkan ratusan juta warga negara dengan wilayah yang luas dan struktur yang kompleks. Karena itu diperlukan mekanisme perwakilan yang memungkinkan kehendak rakyat diterjemahkan ke dalam pengelolaan sistem negara. Dalam desain tersebut, MPR berfungsi sebagai *administrator* utama yang menerima mandat untuk menjaga agar seluruh struktur negara tetap bekerja sesuai dengan tujuan yang dikehendaki rakyat.

Posisi ini berbeda dengan pemerintah. Pemerintah dalam analogi sebelumnya diposisikan sebagai *applications*, yaitu pelaksana fungsi-fungsi operasional negara sehari-hari. Pemerintah mengelola administrasi, menjalankan program pembangunan, melaksanakan kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pemerintah bukan pengendali tertinggi sistem. Sebagaimana aplikasi bekerja di bawah sistem operasi, pemerintah bekerja di bawah kerangka konstitusi dan kedaulatan rakyat.

MPR berada pada posisi yang berbeda. MPR tidak menjalankan operasional harian negara. MPR berfungsi menjaga hubungan antara pemilik sistem dan keseluruhan struktur negara. Dalam bahasa ketatanegaraan klasik, posisi ini dikenal sebagai mandataris rakyat. Artinya, MPR menerima mandat langsung dari pemilik kedaulatan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat negara bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam glosarium buku ini, posisi tersebut sangat dekat dengan konsep *root administrator*. *Administrator* utama tidak menciptakan sistem. *Administrator* utama

tidak memiliki sistem. *Administrator* utama tidak berhak mengubah tujuan dasar sistem sesuka hati. *Administrator* utama bertugas menjaga agar sistem tetap setia kepada kehendak pemiliknya. Ketika terjadi penyimpangan, *administrator* bertanggung jawab melakukan koreksi. Ketika terjadi gangguan, *administrator* bertanggung jawab melakukan pemulihan. Ketika terdapat pihak yang mencoba membajak sistem, *administrator* bertanggung jawab melindungi kepentingan pemilik.

Konsep ini sekaligus menjelaskan mengapa dalam desain negara yang benar-benar berbasis kedaulatan rakyat, MPR seharusnya memiliki kedudukan yang berbeda dari lembaga-lembaga operasional negara lainnya. DPR menjalankan fungsi legislasi. Presiden menjalankan fungsi eksekutif. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi yudikatif. Namun seluruh cabang kekuasaan tersebut tetap merupakan bagian dari sistem yang harus bekerja sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemilik negara. Diperlukan sebuah institusi yang menjaga agar hubungan antara rakyat dan keseluruhan sistem tetap terpelihara. Di sinilah fungsi MPR sebagai mandataris rakyat menemukan relevansinya.

Tanpa keberadaan *root administrator*, sistem menghadapi risiko yang sangat besar. Dalam dunia teknologi, pemilik yang tidak memiliki *administrator* terpercaya sering kali kehilangan kendali terhadap sistem yang dimilikinya. *Operator* dapat bertindak melampaui kewenangannya. Pengguna tertentu dapat

memperoleh akses yang berlebihan. Ancaman dari luar dapat masuk tanpa terdeteksi. Sistem tetap berjalan, tetapi arah pengelolaannya perlahan menjauh dari kepentingan pemilik.

Dalam kehidupan bernegara, kondisi serupa dapat terjadi. Jika tidak ada lembaga yang secara khusus bertugas menjaga kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi, maka cabang-cabang kekuasaan dapat berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan yang semakin otonom. Pemerintah dapat menganggap mandat sebagai hak milik. Partai politik dapat menganggap negara sebagai instrumen kekuasaan. Oligarki dapat memperoleh ruang yang semakin besar untuk memengaruhi arah kebijakan. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan negara semakin menjauh.

Karena itu, fungsi utama MPR sebagai *root administrator* bukanlah mengelola pemerintahan sehari-hari, melainkan menjaga integritas sistem. MPR memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi pedoman. MPR memastikan bahwa arah negara tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat. MPR memastikan bahwa cabang-cabang kekuasaan tidak melampaui mandat yang diberikan. MPR menjadi penghubung antara rakyat sebagai pemilik dan seluruh struktur negara sebagai pengelola.

Penting untuk ditegaskan bahwa konsep *root administrator* tidak berarti MPR lebih tinggi daripada rakyat. Justru sebaliknya. *Administrator* memperoleh kedudukan karena adanya pemilik. Tanpa pemilik, *administrator* kehilangan sumber legitimasi. Karena itu MPR tidak boleh dipahami sebagai pusat kedaulatan.

MPR hanyalah pelaksana mandat kedaulatan. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat sebagai *root owner*. MPR hanya menjalankan fungsi administratif tertinggi untuk memastikan bahwa sistem negara tetap setia kepada pemilik sahnya.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat yang menegaskan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan, konsep ini memiliki makna yang sangat penting. Kerakyatan tidak cukup diwujudkan melalui pemilu periodik. Kerakyatan juga membutuhkan mekanisme kelembagaan yang menjaga agar seluruh struktur negara tetap tunduk pada kehendak rakyat. Permusyawaratan bukan hanya metode pengambilan keputusan, tetapi juga mekanisme menjaga hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, rakyat sebagai *root owner* dan MPR sebagai *root administrator* membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rakyat adalah sumber kepemilikan dan legitimasi. MPR adalah penerima mandat untuk menjaga sistem atas nama rakyat. Pemerintah adalah pelaksana operasional. Hukum adalah aturan yang mengikat seluruh komponen sistem. Ketika hubungan ini berjalan dengan benar, negara bekerja sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun ketika *administrator* melupakan mandatnya, atau ketika *administrator* berubah menjadi pemilik semu, maka potensi pembajakan sistem mulai muncul.

Oleh karena itu, MPR sebagai mandataris rakyat bukanlah simbol seremonial dalam struktur

ketatanegaraan. MPR merupakan *root administrator* yang bertugas menjaga agar negara tidak pernah terlepas dari pemilik sahnya. Selama rakyat tetap menjadi *root owner* dan MPR tetap menjalankan fungsi sebagai *root administrator*, kedaulatan rakyat tidak hanya hidup sebagai slogan konstitusional, tetapi menjadi kenyataan yang bekerja dalam keseluruhan desain sistem negara.

Namun keberadaan pemilik dan *administrator* tidak serta-merta menjamin sistem selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam dunia teknologi, banyak sistem yang secara formal masih memiliki pemilik dan *administrator* yang sah, tetapi kendali nyata atas sistem tersebut telah berhasil dipengaruhi, dimanipulasi, atau bahkan diambil alih oleh pihak lain. Perangkat tetap menyala, aplikasi tetap berjalan, dan pengguna masih merasa sistem bekerja normal. Akan tetapi pada lapisan yang lebih dalam, arah kerja sistem sudah tidak lagi sepenuhnya mengikuti kehendak pemilik maupun *administrator* yang sah.

Analogi yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Rakyat tetap diakui sebagai pemegang kedaulatan. MPR tetap berdiri sebagai mandataris rakyat. Pemerintah tetap bekerja. Lembaga negara tetap berfungsi. Namun dalam kondisi tertentu, pengaruh oligarki, mafia kebijakan, kolonialisme modern, atau berbagai bentuk infiltrasi kepentingan dapat menggeser arah sistem tanpa mengubah bentuk luarnya. Negara tetap tampak hidup, tetapi substansi kedaulatannya perlahan mengalami gangguan.

Di titik inilah muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Apa yang terjadi ketika sistem negara tidak lagi

sepenuhnya bekerja untuk pemilik sahnya? Bagaimana mengenali tanda-tanda ketika kendali substantif mulai bergeser dari rakyat kepada kekuatan lain yang tidak memperoleh legitimasi langsung dari kedaulatan rakyat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan berikutnya akan memasuki salah satu persoalan paling penting dalam desain kenegaraan, yaitu kondisi ketika sistem tetap berjalan secara formal, tetapi sesungguhnya telah mengalami pembajakan dari dalam.

2.11. Ketika Sistem Dibajak

Setelah memahami seluruh komponen dalam analogi sistem kebangsaan, negara sebagai *hardware*, konstitusi sebagai *firmware*, Pancasila sebagai kernel (inti sistem), Peradaban Nusantara sebagai *operating system*, pemerintah sebagai *applications*, oligarki dan kolonialisme modern sebagai *malware*, rakyat sebagai *root owner*, serta MPR sebagai *root administrator*, muncul satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu apa yang terjadi ketika seluruh sistem tersebut tetap tampak berjalan, tetapi kendali sejatinya tidak lagi berada di tangan pemilik yang sah. Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi teoretis, melainkan inti dari banyak persoalan kebangsaan modern. Sebab ancaman paling berbahaya terhadap sebuah negara tidak selalu hadir dalam bentuk kehancuran yang terlihat jelas, melainkan justru dalam bentuk sistem yang tampak normal tetapi sesungguhnya telah dibajak.

Dalam imajinasi banyak orang, keruntuhan negara sering dibayangkan dalam bentuk dramatis.

Kudeta militer, perang saudara, invasi asing, kehancuran ekonomi total, atau lumpuhnya pemerintahan sering dianggap sebagai tanda utama bahwa suatu negara sedang mengalami krisis. Padahal dalam banyak kasus, bentuk kerusakan yang paling serius justru jauh lebih halus. Gedung pemerintahan tetap berdiri. Aparatur tetap bekerja. Pemilu tetap berlangsung. Hukum tetap diproduksi. Birokrasi tetap berjalan. Dari luar, sistem tampak stabil. Namun stabilitas semacam itu belum tentu menunjukkan bahwa negara masih bekerja sesuai desain aslinya.

Dalam dunia teknologi, kondisi semacam ini sangat dikenal. Sebuah perangkat dapat tetap menyala, layar dapat tetap menampilkan fungsi normal, aplikasi dapat tetap digunakan, dan pengguna dapat merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Namun di balik tampilan tersebut, kendali sistem bisa saja telah diambil alih oleh pihak lain. Data dapat dicuri tanpa disadari. Fungsi dapat dimanipulasi tanpa pemberitahuan. Sumber daya dapat dikuras diam-diam. Perangkat tetap terlihat normal, tetapi sesungguhnya tidak lagi bekerja untuk kepentingan pemiliknya. Analogi inilah yang sangat relevan untuk memahami pembajakan sistem kebangsaan.

Dalam glosarium buku ini, kondisi semacam itu dijelaskan melalui konsep *system hijacking*, yaitu pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Konsep ini sangat penting karena membantu membedakan antara kerusakan yang tampak di permukaan dengan pembajakan yang bekerja secara struktural. Sistem yang dibajak tidak selalu

hancur secara fisik. Justru dalam banyak kasus, pembajakan paling efektif terjadi ketika bentuk luar tetap dipertahankan agar tidak memicu perlawanan yang terlalu cepat.

Bentuk pembajakan semacam ini sangat berbahaya karena menciptakan ilusi normalitas. Masyarakat melihat aktivitas formal dan menganggap sistem baik-baik saja. Pemerintahan tetap berjalan, sehingga stabilitas dianggap terjaga. Pemilu tetap dilaksanakan, sehingga demokrasi dianggap hidup. Hukum tetap diberlakukan, sehingga keadilan dianggap bekerja. Padahal aktivitas formal tidak otomatis berarti fungsi substantif berjalan sesuai tujuan. Sebuah mesin dapat bergerak sangat aktif sambil menghasilkan arah yang sepenuhnya salah.

Di sinilah konsep *ownership capture* menjadi sangat relevan. Dalam glosarium, *ownership capture* dijelaskan sebagai keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali nyata telah berpindah ke pihak lain. Dalam kehidupan kebangsaan, kondisi ini sangat mungkin terjadi ketika rakyat secara konstitusional tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi keputusan strategis justru bergerak mengikuti kepentingan yang tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Secara formal, rakyat tetap pemilik. Secara substantif, rakyat kehilangan kendali.

Bentuk pembajakan ini sering bekerja secara perlahan, bukan melalui peristiwa tunggal yang mudah dikenali. Pengaruh ekonomi yang terlalu dominan dapat menggeser arah kebijakan. Ketergantungan

terhadap kekuatan eksternal dapat membatasi ruang kemandirian nasional. Struktur hukum dapat disesuaikan untuk melayani kepentingan tertentu. Pemerintah sebagai operator dapat menjadi medium masuknya konfigurasi kekuasaan yang tidak lagi tunduk pada kepentingan rakyat. Semua proses tersebut dapat berlangsung tanpa mengubah simbol-simbol formal negara.

Salah satu indikator utama bahwa pembajakan sedang terjadi adalah ketika organisasi kekuasaan mulai bekerja lebih untuk mempertahankan dirinya sendiri daripada melayani pemilik sah sistem. Hukum lebih sibuk menjaga stabilitas struktural daripada keadilan substantif. Kebijakan lebih sensitif terhadap tekanan kelompok kuat daripada kebutuhan rakyat luas. Birokrasi lebih setia pada prosedur yang mempertahankan dirinya daripada pada tujuan pelayanan publik. Dalam kondisi seperti ini, negara secara perlahan berubah dari instrumen rakyat menjadi alat yang bekerja untuk konfigurasi kekuasaan tertentu.

Indikator lain adalah ketika kritik terhadap operator sistem diperlakukan seolah-olah sebagai ancaman terhadap keseluruhan negara. Dalam sistem yang sehat, evaluasi terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Namun dalam sistem yang sedang dibajak, kritik sering dibingkai sebagai ancaman terhadap stabilitas, gangguan terhadap ketertiban, atau bentuk ketidaksetiaan terhadap bangsa. Narasi semacam ini sangat efektif untuk melindungi pembajakan, karena perhatian publik dialihkan dari

persoalan sistemik menuju konflik emosional yang bersifat simbolik.

Pembajakan sistem juga sering ditandai oleh perubahan fungsi institusi tanpa perubahan bentuk formal. Lembaga yang seharusnya menjadi pengawas berubah menjadi legitimator. Hukum yang seharusnya melindungi berubah menjadi instrumen tekanan. Aparatur yang seharusnya melayani berubah menjadi alat pengendalian. Kebijakan yang seharusnya menyejahterakan berubah menjadi mekanisme distribusi keuntungan yang tidak proporsional. Yang berubah bukan nama institusinya, melainkan fungsi substantifnya.

Bahaya terbesar dari kondisi semacam ini adalah ketidaksadaran kolektif. Karena bentuk formal tetap dipertahankan, banyak masyarakat tidak merasa ada masalah mendasar. Selama aktivitas administratif berjalan, sistem dianggap normal. Selama layanan dasar masih tersedia, negara dianggap sehat. Padahal kerusakan terdalam justru sering tidak terjadi pada bentuk luar, melainkan pada orientasi dan kendali internal. Ketika rakyat tidak menyadari pembajakan tersebut, proses pengambilalihan dapat berlangsung semakin dalam tanpa resistensi berarti.

Dalam konteks buku ini, kondisi semacam itu sesungguhnya adalah bentuk paling serius dari kerusakan *system integrity*. Dalam glosarium, *system integrity* dijelaskan sebagai kondisi keutuhan sistem ketika seluruh komponen bekerja sesuai desain asli. Jika integritas sistem rusak, maka keberadaan komponen yang lengkap tidak lagi menjamin kesehatan

keseluruhan. Negara dapat tetap memiliki wilayah, lembaga, hukum, aparatur, dan pemerintahan, tetapi seluruhnya bekerja dalam arah yang tidak lagi sesuai dengan prinsip dasar pembentukannya.

Karena itu pembajakan negara tidak selalu harus dibaca sebagai hilangnya kemerdekaan formal. Suatu bangsa dapat tetap memiliki bendera, lagu kebangsaan, pemilu, dan institusi negara, tetapi secara substantif mengalami pelemahan kedaulatan yang serius. Kedaulatan sejati bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan kemampuan nyata untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kehendak pemilik sahnya. Jika kemampuan tersebut hilang, maka kemerdekaan hanya bertahan sebagai bentuk, bukan substansi.

Kesadaran inilah yang menjadi salah satu inti penting dari buku ini. Persoalan bangsa bukan semata-mata tentang siapa yang sedang menjadi operator, melainkan tentang apakah keseluruhan sistem masih bekerja sesuai desain awal yang menempatkan rakyat sebagai pemilik tertinggi. Jika sistem telah dibajak, pergantian operator saja belum tentu cukup. Perbaikan kosmetik tidak akan menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan adalah pemulihan kendali sistem kepada pemilik sahnya.

Pada titik inilah tesis besar bab ini menemukan bentuk yang utuh. Negara tidak boleh dipahami hanya sebagai gedung, lembaga, pejabat, atau aktivitas administratif yang tampak di permukaan. Negara adalah sistem. Sebagaimana sistem dapat dirancang, dijaga, dirusak, bahkan dibajak, demikian pula kehidupan kenegaraan. Memahami hal ini adalah

langkah pertama untuk membedakan antara ilusi keteraturan dengan kedaulatan yang sesungguhnya.

BAB 3
ROOT ACCESS RAKYAT

3.1. Dasar Konstitusional Kedaulatan Rakyat

Setiap pembicaraan tentang kedaulatan rakyat harus dimulai dari dasar yang paling fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu konstitusi. Dalam konteks negara hukum, legitimasi tertinggi atas struktur kekuasaan tidak boleh dibangun hanya di atas opini, tafsir kekuasaan, atau kebiasaan administratif, melainkan harus bertumpu pada norma dasar yang menjadi fondasi sistem. Karena itu, sebelum membahas rakyat sebagai pemilik sah negara dalam kerangka filosofis maupun analogi teknologi, terlebih dahulu harus ditegaskan posisi konstitusional rakyat dalam desain negara Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Kalimat ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya memuat konsekuensi ketatanegaraan yang sangat besar. Rumusan tersebut tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan pemerintah. Tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan lembaga negara. Tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan pejabat publik. Kalimat tersebut secara eksplisit menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan kata lain, seluruh struktur kekuasaan negara memperoleh legitimasi awalnya dari rakyat.

Pemahaman ini harus dibaca secara hati-hati. Istilah "berada di tangan rakyat" bukan ungkapan simbolik yang sekadar dimaksudkan untuk memperindah wajah demokrasi. Frasa tersebut merupakan penegasan tentang sumber legitimasi kekuasaan. Dalam teori ketatanegaraan, pertanyaan paling mendasar selalu berkisar pada satu hal, yaitu dari mana kekuasaan memperoleh legitimasi tertingginya. Dalam sistem monarki absolut, legitimasi dapat diklaim berasal dari garis keturunan atau doktrin tertentu. Dalam sistem otoritarian, legitimasi sering dibangun melalui kontrol kekuasaan itu sendiri. Dalam negara demokratis, legitimasi tertinggi seharusnya berasal dari rakyat.

Artinya sangat jelas. Negara tidak berdiri sebagai entitas yang memiliki kewenangan secara mandiri di

atas rakyat. Negara tidak melahirkan rakyat. Sebaliknya, rakyatlah yang menjadi sumber legitimasi bagi keberadaan negara. Negara memperoleh bentuknya melalui desain ketatanegaraan. Kekuasaan memperoleh legalitas melalui konstitusi. Namun legitimasi awal dari seluruh struktur tersebut tetap kembali kepada rakyat sebagai sumber kedaulatan. Dalam kerangka ini, rakyat bukan objek dari negara, melainkan dasar legitimatif dari keberadaan negara itu sendiri.

Di titik inilah konsep dalam glosarium buku ini menjadi sangat relevan. Rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi sistem yang memiliki legitimasi paling mendasar terhadap keseluruhan struktur. Dalam analogi teknologi, *root owner* bukan sekadar pengguna biasa, melainkan pemilik yang memiliki hak kendali tertinggi atas perangkat dan sistem yang berjalan di dalamnya. Jika analogi ini ditarik ke dalam kehidupan ketatanegaraan, maka Pasal 1 ayat (2) dapat dibaca sebagai penegasan bahwa rakyat adalah pemilik sah sistem negara, sementara seluruh struktur kekuasaan bekerja berdasarkan mandat yang bersumber dari rakyat.

Namun rumusan Pasal 1 ayat (2) tidak berhenti pada kalimat "kedaulatan berada di tangan rakyat." Terdapat lanjutan yang sangat penting, yaitu "dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Bagian ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca secara dangkal. Sebagian orang menafsirkan frasa tersebut seolah-olah rakyat menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada struktur negara, lalu tidak lagi

memiliki posisi substantif selain sebagai peserta prosedural dalam mekanisme formal. Tafsir semacam ini problematik, karena mencampuradukkan antara sumber kedaulatan dengan mekanisme pelaksanaan kedaulatan.

Frasa "dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" tidak menghapus fakta bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Frasa tersebut justru menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan tidak dilakukan secara liar, spontan, atau tanpa desain institusional. Dalam analogi sistem yang telah dibangun dalam bab sebelumnya, kondisi ini menyerupai pemilik sistem yang tetap memiliki legitimasi tertinggi, tetapi menggunakan aturan dasar operasional agar sistem berjalan tertib. Dalam glosarium, konstitusi diposisikan sebagai *firmware*, yaitu aturan dasar yang mengatur bagaimana sistem dijalankan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar bukan pengganti rakyat, melainkan instrumen desain pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pembedaan ini sangat penting karena banyak penyimpangan lahir dari kekeliruan memahami relasi antara rakyat dan konstitusi. Jika konstitusi dipahami sebagai alat yang memindahkan kedaulatan dari rakyat kepada struktur kekuasaan, maka desain demokrasi berubah menjadi formalitas administratif. Namun jika konstitusi dipahami sebagai mekanisme untuk mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat secara tertib, maka logika dasarnya tetap sehat. Rakyat tetap pemilik sah, sedangkan struktur negara hanyalah bentuk

operasional dari mandat yang dijalankan dalam kerangka hukum.

Dalam teori hukum tata negara, perbedaan antara sumber legitimasi dan pelaksana kewenangan merupakan hal yang sangat mendasar. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi bukan sumber kedaulatan. Parlemen menjalankan fungsi legislasi, tetapi bukan sumber legitimasi tertinggi. Pengadilan menegakkan hukum, tetapi bukan pemilik negara. Seluruh lembaga tersebut bekerja dalam desain konstitusional, tetapi tidak menggantikan posisi rakyat sebagai sumber legitimasi utama. Ketika pembedaan ini kabur, struktur negara sangat mudah membesar melampaui batas mandatnya.

Dalam kerangka buku ini, persoalan tersebut dapat dijelaskan melalui analogi yang sangat sederhana. Kepemilikan sebuah perangkat tetap berada pada pemilik sah meskipun sistem dioperasikan melalui aturan tertentu. Pemilik tidak kehilangan hak kepemilikan hanya karena perangkat menggunakan konfigurasi teknis tertentu untuk berjalan dengan aman dan tertib. Demikian pula rakyat tidak kehilangan kedaulatannya hanya karena pelaksanaan sistem kenegaraan diatur melalui konstitusi. Yang berubah adalah bentuk pelaksanaan, bukan sumber legitimasi.

Kesalahan besar dalam kehidupan pemerintahan modern adalah ketika masyarakat mulai memandang negara sebagai entitas yang berdiri sendiri di atas rakyat. Dalam cara pandang seperti ini, rakyat ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima keputusan, mengikuti prosedur, dan tunduk pada

struktur yang tampak superior. Secara perlahan, rakyat berhenti memandang diri sebagai pemilik sah sistem, lalu berubah menjadi peserta pasif dalam mekanisme administratif. Jika kondisi ini dibiarkan, makna Pasal 1 ayat (2) menyusut menjadi slogan tanpa substansi.

Karena itu Pasal 1 ayat (2) harus dibaca bukan hanya secara tekstual, tetapi juga secara filosofis. Konstitusi tidak sedang menyatakan bahwa rakyat sekadar penting dalam demokrasi. Konstitusi sedang menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kedaulatan tertinggi. Negara memperoleh legitimasi dari rakyat. Struktur kekuasaan memperoleh kewenangan dari rakyat. Hukum memperoleh dasar keberlakuan dari desain yang berakar pada legitimasi rakyat. Tanpa rakyat sebagai sumber kedaulatan, keseluruhan struktur tersebut kehilangan dasar moralnya.

Pada titik inilah fondasi BAB ini menjadi jelas. Sebelum membahas apakah rakyat sungguh memiliki kendali nyata atas negara, terlebih dahulu harus ditegaskan bahwa secara konstitusional rakyat adalah pemilik sahnya. Pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah rakyat memiliki legitimasi, melainkan apa sebenarnya makna kedaulatan itu sendiri. Karena memiliki status sebagai pemegang kedaulatan tidak selalu berarti memiliki kendali substantif. Dari sinilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yakni apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kedaulatan.

3.2. Apa Itu Kedaulatan?

Setelah ditegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang makna dari kedaulatan itu sendiri. Pertanyaan ini sangat mendasar, karena banyak persoalan dalam kehidupan bernegara justru lahir dari penggunaan istilah "kedaulatan" secara retoris tanpa pemahaman yang memadai tentang substansinya. Kedaulatan sering diperlakukan sebagai slogan semata, simbol demokrasi, atau ungkapan normatif yang terdengar mulia, tetapi jarang dibedah secara serius sebagai konsep yang memiliki konsekuensi nyata terhadap desain kekuasaan. Padahal tanpa memahami makna kedaulatan secara benar, rakyat dapat dengan mudah merasa berdaulat secara simbolik, tetapi tidak memiliki kendali nyata terhadap sistem yang mengatasnamakan dirinya.

Secara konseptual, kedaulatan adalah kewenangan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan. Kedaulatan menunjuk pada sumber legitimasi final yang menentukan siapa yang memiliki hak paling mendasar untuk menetapkan arah, aturan, dan keputusan dalam kehidupan bersama. Dalam setiap sistem pemerintahan, selalu terdapat pertanyaan mendasar tentang siapa pemegang otoritas tertinggi. Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan filosofis tentang sumber kekuasaan yang sah. Tanpa jawaban yang jelas terhadap pertanyaan ini, struktur negara hanya menjadi

organisasi kekuasaan tanpa dasar legitimasi yang kokoh.

Dalam glosarium buku ini, sovereignty atau kedaulatan dijelaskan sebagai kewenangan tertinggi untuk menentukan arah, aturan, dan keputusan dalam suatu sistem pemerintahan, yang dalam analogi teknologi setara dengan hak *root access*. Definisi ini sangat membantu karena menggeser pemahaman kedaulatan dari sekadar istilah yang abstrak menjadi konsep yang lebih konkret dan operasional. Jika kedaulatan setara dengan *root access*, maka kedaulatan bukan sekadar status kehormatan, melainkan hak kendali tertinggi atas sistem. Dengan kata lain, siapa yang sungguh berdaulat adalah pihak yang memiliki kapasitas final untuk menentukan bagaimana sistem bekerja.

Dalam sejarah pemikiran pemerintahan, konsep kedaulatan selalu berkaitan dengan pertanyaan tentang otoritas tertinggi. Dalam monarki absolut, kedaulatan sering diletakkan pada raja sebagai sumber final keputusan. Dalam sistem teokratis tertentu, legitimasi kedaulatan diklaim berasal dari tafsir kekuasaan religius tertentu. Dalam sistem otoritarian, kekuasaan sering mengklaim legitimasi dari stabilitas atau kekuatan koersif. Namun dalam negara republik atau demoktratis modern, konsep kedaulatan seharusnya berpindah secara fundamental kepada rakyat. Artinya, rakyat bukan sekadar peserta dalam sistem, melainkan sumber legitimasi final dari keseluruhan struktur negara.

Namun persoalan besar muncul ketika istilah kedaulatan hanya dipahami secara simbolik. Banyak masyarakat diajarkan bahwa rakyat berdaulat, tetapi tidak pernah diajak memahami apa konsekuensinya. Jika kedaulatan berarti kewenangan tertinggi, maka pertanyaan yang harus diajukan sangat sederhana namun sangat tajam, yakni apakah rakyat sungguh memiliki kewenangan tertinggi dalam praktik kehidupan bernegara. Jika jawaban atas pertanyaan tersebut tidak jelas, maka istilah kedaulatan berisiko berubah menjadi kosmetik demokrasi semata.

Analogi *root access* sangat berguna untuk menjelaskan persoalan ini. Dalam dunia teknologi, pemilik dengan akses *root* memiliki kewenangan tertinggi terhadap sistem. Pemilik dapat mengatur konfigurasi dasar, mengendalikan izin akses, memasang atau menghapus aplikasi, mengaudit fungsi, mengubah pengaturan sistem, dan mengambil keputusan final atas keseluruhan perangkat. Posisi ini sangat berbeda dengan pengguna biasa yang hanya diizinkan menggunakan fungsi tertentu tanpa akses terhadap inti sistem. Jika kedaulatan rakyat sungguh bermakna, maka rakyat seharusnya berada pada posisi yang setara dengan pemilik *root access*, bukan sekadar pengguna terbatas.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi menjadi hak untuk memilih pemimpin setiap beberapa tahun sekali. Partisipasi elektoral memang merupakan salah satu mekanisme demokrasi, tetapi tidak identik dengan keseluruhan makna kedaulatan. Jika kedaulatan hanya dipahami sebagai hak mencoblos

dalam pemilu, maka rakyat pada dasarnya hanya diberi akses untuk memilih operator, bukan mengendalikan sistem. Pemahaman seperti ini terlalu sempit dan berpotensi mengaburkan persoalan yang jauh lebih mendasar tentang siapa yang sungguh menentukan arah negara.

Kedaulatan rakyat juga tidak sama dengan sekadar pengakuan hukum formal. Sebuah konstitusi dapat menyatakan bahwa rakyat berdaulat, tetapi pernyataan formal tersebut belum otomatis menciptakan kedaulatan substantif. Kedaulatan sejati menuntut adanya hubungan antara legitimasi formal dengan kemampuan nyata untuk memengaruhi arah sistem. Jika pengakuan hukum tidak diikuti oleh akses substantif terhadap pengambilan keputusan strategis, maka yang lahir hanyalah simbol kedaulatan, bukan kedaulatan yang hidup.

Dalam konteks ini, penting membedakan antara kekuasaan administratif dan kedaulatan rakyat. Pemerintah dapat memiliki kewenangan administratif untuk menjalankan kebijakan. Aparatur dapat memiliki otoritas operasional untuk menegakkan aturan. Lembaga negara dapat memiliki fungsi konstitusional tertentu. Namun seluruh bentuk kewenangan tersebut berbeda secara mendasar dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat bukan sekadar kewenangan menjalankan fungsi, melainkan sumber legitimasi tertinggi yang menjadi dasar keberadaan seluruh fungsi tersebut.

Pembedaan ini penting karena banyak masyarakat secara tidak sadar menganggap pihak yang

menjalankan kekuasaan sebagai pihak yang berdaulat. Karena pemerintah terlihat membuat keputusan, pemerintah dianggap sumber kekuasaan. Karena aparat menegakkan aturan, aparat dianggap representasi tertinggi negara. Karena lembaga negara tampak dominan, lembaga tersebut dianggap pemilik sistem. Cara berpikir seperti ini merupakan kebalikan dari prinsip demokrasi. Menjalankan kekuasaan tidak sama dengan memiliki legitimasi tertinggi atas kekuasaan tersebut.

Kedaulatan juga harus dipahami sebagai persoalan kontrol, bukan hanya status simbolik. Dalam bahasa sederhana, berdaulat berarti memiliki kapasitas nyata untuk menentukan arah. Jika keputusan strategis selalu ditentukan pihak lain, maka klaim kedaulatan menjadi sangat lemah. Jika sistem bekerja di luar jangkauan pemilik sahnya, maka legitimasi formal kehilangan substansi praktisnya. Inilah sebabnya pembahasan tentang kedaulatan harus bergerak melampaui teks hukum menuju pertanyaan tentang realitas kontrol.

Dalam kehidupan kebangsaan modern, persoalan ini menjadi sangat kompleks karena struktur negara bekerja melalui institusi yang besar, birokrasi yang rumit, sistem hukum yang teknis, dan mekanisme yang tidak selalu mudah dipahami publik. Kompleksitas tersebut sering menciptakan jarak psikologis antara rakyat dengan sistem negara. Semakin rumit sistem, semakin mudah rakyat merasa bahwa negara adalah sesuatu yang berada di luar dirinya.

Ketika kondisi ini terjadi, kedaulatan rakyat perlahan berubah dari prinsip hidup menjadi deklarasi formal.

Di sinilah analogi teknologi kembali menunjukkan kekuatannya. Banyak pemilik perangkat modern menggunakan sistem setiap hari tanpa memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Pemilik tetap memegang perangkat secara fisik, tetapi tidak sungguh memahami konfigurasi internalnya. Dalam kondisi seperti itu, kehilangan kendali menjadi jauh lebih mudah. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Rakyat dapat hidup di dalam negara, tunduk pada hukum, berpartisipasi dalam prosedur demokrasi, tetapi tetap tidak memahami bagaimana kekuasaan sungguh bekerja. Ketidaktahuan seperti ini membuka ruang bagi distorsi kedaulatan.

Karena itu kedaulatan tidak boleh dipahami sebagai slogan kehormatan, melainkan sebagai konsep yang menuntut kesadaran, kapasitas, dan kendali nyata. Kedaulatan berarti posisi tertinggi dalam legitimasi. Kedaulatan berarti hak menentukan arah sistem. Kedaulatan berarti kapasitas untuk memastikan bahwa organisasi kekuasaan tetap bekerja sesuai mandat pemilik sahnya. Jika seluruh unsur tersebut tidak hadir, maka istilah kedaulatan hanya tinggal bahasa yang indah tetapi kosong.

Pada titik inilah pembahasan harus bergerak ke persoalan yang lebih konkret. Jika kedaulatan berarti hak kendali tertinggi, maka perlu dijelaskan perbedaan mendasar antara pemilik dan pengguna. Sebab banyak sistem tampak memberi ruang partisipasi, tetapi

sesungguhnya hanya menempatkan rakyat sebagai pengguna terbatas, bukan sebagai pemilik sejati.

3.3. Owner vs User

Setelah memahami bahwa kedaulatan berarti kewenangan tertinggi untuk menentukan arah sistem, pembahasan berikutnya harus bergerak pada pembedaan yang sangat mendasar tetapi sering luput dari kesadaran publik, yaitu perbedaan antara pemilik dan pengguna. Pembedaan ini tampak sederhana, tetapi justru sangat penting untuk memahami posisi rakyat dalam negara. Banyak sistem memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, tetapi tidak semua partisipasi menunjukkan kepemilikan. Banyak orang dapat menggunakan suatu sistem, tetapi tidak semua pengguna memiliki hak menentukan bagaimana sistem tersebut dibentuk, diubah, atau dikendalikan. Karena itu, untuk memahami makna nyata dari kedaulatan rakyat, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya apakah rakyat terlibat, tetapi apakah rakyat sungguh berada pada posisi sebagai pemilik.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara pemilik dan pengguna sangat jelas. Pemilik rumah memiliki hak menentukan aturan dasar di dalam rumah tersebut. Pemilik kendaraan berhak menentukan siapa yang boleh menggunakan, bagaimana kendaraan diperlakukan, kapan dilakukan perubahan, dan apakah kendaraan akan dijual, diperbaiki, atau dihentikan penggunaannya. Sebaliknya, pengguna hanya menikmati fungsi dalam batas yang diizinkan. Pengguna dapat memakai fasilitas tertentu, tetapi tidak

memiliki legitimasi untuk mengubah struktur dasar kepemilikan. Pembedaan ini intuitif dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sering menjadi kabur ketika masuk ke pembicaraan tentang negara.

Dalam dunia teknologi, pembedaan ini bahkan lebih tegas. Pemilik sistem memiliki hak konfigurasi, pengaturan akses, pengelolaan aplikasi, dan kendali atas fungsi mendasar perangkat. Pengguna biasa hanya diberi akses terbatas sesuai izin yang ditentukan. Pengguna dapat memakai aplikasi, membuka fitur tertentu, atau menjalankan fungsi tertentu, tetapi tidak memiliki hak untuk menentukan arsitektur sistem. Dalam glosarium buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik sah dengan legitimasi tertinggi atas keseluruhan sistem. Jika posisi ini benar, maka rakyat tidak boleh dipahami sekadar sebagai pengguna layanan negara.

Namun dalam praktik kehidupan pemerintahan modern, banyak masyarakat secara perlahan didorong untuk memandang dirinya sebagai pengguna, bukan pemilik. Negara dipresentasikan sebagai penyedia layanan. Pemerintah tampil sebagai operator utama. Rakyat ditempatkan sebagai penerima kebijakan, pengguna fasilitas publik, pembayar kewajiban, dan peserta prosedural dalam ritus demokrasi. Dalam konstruksi seperti ini, hubungan antara rakyat dan negara tampak seperti hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa. Cara pandang tersebut tampak modern dan administratif, tetapi secara filosofis sangat problematik.

Pelanggan memang memiliki hak tertentu, tetapi pelanggan bukan pemilik sistem. Pelanggan dapat mengajukan keluhan, menggunakan layanan, atau memilih penyedia lain jika tersedia, tetapi tidak memiliki legitimasi tertinggi atas arsitektur sistem. Jika rakyat diposisikan seperti pelanggan, maka makna kedaulatan mengalami penyusutan besar. Rakyat tidak lagi dipahami sebagai sumber legitimasi tertinggi, melainkan sekadar penerima layanan dari struktur yang tampak lebih tinggi. Dalam kondisi seperti ini, bahasa demokrasi tetap digunakan, tetapi struktur psikologis kekuasaan bergerak ke arah yang sangat berbeda.

Pembedaan antara pemilik dan pengguna menjadi sangat penting karena banyak sistem pemerintahan modern menciptakan ilusi partisipasi tanpa memberikan kepemilikan substantif. Rakyat diberi ruang untuk memilih operator dalam pemilu. Rakyat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam forum tertentu. Rakyat diberi hak formal dalam mekanisme demokrasi prosedural. Namun pertanyaannya adalah apakah seluruh bentuk partisipasi tersebut menunjukkan posisi sebagai pemilik, atau sekadar menunjukkan akses terbatas sebagai pengguna sistem yang sudah dirancang oleh pihak lain.

Seorang pengguna dapat diberi tombol untuk memilih pengaturan tertentu tanpa menjadi pemilik perangkat. Seorang pengguna dapat diberi hak menggunakan aplikasi tertentu tanpa memperoleh akses terhadap sistem inti. Demikian pula rakyat dapat diberi ruang partisipasi tertentu tanpa sungguh

memiliki kendali substantif terhadap desain kekuasaan. Karena itu keberadaan partisipasi formal saja tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan. Yang harus dilihat adalah apakah rakyat memiliki posisi legitimatif tertinggi yang memungkinkan koreksi nyata terhadap sistem.

Dalam konteks ketatanegaraan, pemilik berarti sumber legitimasi. Pemilik berarti pihak yang atas namanya sistem dibangun. Pemilik berarti pihak yang kepentingannya menjadi tujuan akhir keberadaan sistem. Jika negara dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, maka rakyat tidak boleh direduksi menjadi pengguna administratif. Negara bukan perusahaan layanan yang menjadikan warga sebagai konsumen. Negara adalah instrumen organisasi yang dibentuk untuk mengelola kehidupan bersama atas dasar legitimasi rakyat sebagai pemilik sah.

Masalah besar muncul ketika operator sistem mulai diperlakukan seperti pemilik. Pemerintah membuat kebijakan, sehingga dianggap pemilik arah negara. Aparatur menegakkan aturan, sehingga dianggap pemilik otoritas tertinggi. Lembaga negara menjalankan fungsi formal, sehingga dianggap sumber legitimasi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat perlahan hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima konsekuensi dari keputusan sistem, bukan sebagai pemilik yang memberi legitimasi atas keberadaan sistem tersebut.

Pergeseran semacam ini sangat berbahaya karena menciptakan budaya pemerintahan subordinatif. Rakyat mulai merasa bahwa negara adalah sesuatu yang

berada di luar jangkauan. Kritik dianggap bentuk gangguan, bukan ekspresi kepemilikan. Evaluasi dianggap ancaman terhadap stabilitas, bukan hak pemilik terhadap sistem yang berjalan atas namanya. Dalam jangka panjang, rakyat dapat kehilangan kesadaran dasar tentang posisi konstitusionalnya sendiri. Padahal Pasal 1 ayat (2) secara eksplisit menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam glosarium buku ini, terdapat konsep *ownership capture*, yaitu keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali nyata berpindah ke pihak lain. Konsep ini sangat relevan untuk membaca hubungan antara rakyat dan negara. Secara formal, rakyat diakui sebagai pemilik. Namun secara praktis, rakyat dapat didorong untuk berperilaku seperti pengguna yang hanya mengikuti alur sistem tanpa kendali substantif. Inilah salah satu bentuk paling halus dari penyusutan makna kedaulatan.

Perbedaan antara pemilik dan pengguna juga menyangkut orientasi psikologis terhadap sistem. Pemilik memiliki rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kesadaran terhadap keberlangsungan sistem. Pengguna cenderung berfokus pada fungsi yang tersedia untuk digunakan. Jika rakyat diposisikan sebagai pengguna, maka keterlibatan pemerintahan mudah menyusut menjadi hubungan transaksional jangka pendek. Yang dinilai hanyalah layanan yang diterima, bukan arah dasar sistem. Namun jika rakyat memahami dirinya sebagai pemilik, maka keterlibatan berubah menjadi

tanggung jawab terhadap integritas keseluruhan negara.

Dalam konteks ini, demokrasi tidak boleh berhenti pada penyediaan akses penggunaan. Demokrasi yang sehat harus menjaga kesadaran bahwa rakyat adalah pemilik sistem. Partisipasi bukan hadiah dari operator. Hak bersuara bukan kemurahan hati kekuasaan. Kritik bukan gangguan terhadap negara. Seluruhnya merupakan ekspresi logis dari posisi rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang harus diajukan sangat sederhana tetapi sangat tajam, yaitu apakah rakyat dalam praktik kehidupan bernegara sungguh diperlakukan sebagai pemilik, atau hanya sebagai pengguna dengan akses terbatas. Jika rakyat hanya diberi ruang untuk menggunakan fungsi tertentu tanpa akses terhadap inti kendali, maka makna kedaulatan telah mengalami penyempitan serius. Jika rakyat sungguh pemilik, maka pembahasan berikutnya harus bergerak lebih dalam pada pembedaan yang lebih tajam lagi, yaitu antara pemilik dengan *root access* dan pengguna tamu dengan akses terbatas.

3.4. Root vs Guest

Setelah membedakan antara pemilik dan pengguna, pembahasan berikutnya harus bergerak ke pembedaan yang lebih tajam, yaitu antara pemilik dengan akses penuh dan pengguna dengan akses terbatas. Dalam dunia teknologi, tidak semua pengguna berada pada posisi yang sama. Sebagian pengguna memiliki hak administratif tertinggi, sementara

sebagian lainnya hanya diberi akses terbatas sesuai izin yang ditentukan. Pembedaan ini sangat penting karena membantu menjelaskan bahwa partisipasi dalam suatu sistem tidak otomatis berarti kendali atas sistem tersebut. Dalam konteks negara, persoalan ini sangat relevan untuk menguji apakah rakyat sungguh berada pada posisi sebagai pemilik berdaulat, atau justru hanya ditempatkan seperti pengguna tamu dalam sistem yang secara formal disebut miliknya sendiri.

Dalam arsitektur sistem digital, *root* adalah tingkat akses tertinggi. Posisi ini bukan sekadar akses untuk menggunakan fungsi tertentu, melainkan kewenangan untuk mengendalikan keseluruhan sistem. Pemilik dengan akses *root* dapat mengubah konfigurasi inti, menentukan hak akses pengguna lain, memasang atau menghapus perangkat lunak, melakukan audit terhadap sistem, menghentikan proses yang merusak, memperbaiki gangguan struktural, bahkan mereset keseluruhan sistem jika diperlukan. Dalam glosarium buku ini, konsep full *root access* dijelaskan sebagai hak kendali tertinggi atas sistem, yang dalam konteks ketatanegaraan setara dengan kedaulatan rakyat yang sejati.

Sebaliknya, guest adalah pengguna dengan akses yang sangat terbatas. Pengguna tamu dapat memakai fungsi tertentu sesuai izin yang diberikan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sistem. Pengguna tamu tidak dapat mengatur konfigurasi inti. Pengguna tamu tidak dapat menentukan siapa operator utama. Pengguna tamu tidak dapat mengaudit keseluruhan sistem. Pengguna tamu tidak dapat

menghapus program yang merusak. Keberadaan pengguna tamu sepenuhnya bergantung pada batas yang ditentukan pihak lain. Dalam posisi ini, penggunaan tidak sama dengan kepemilikan, dan partisipasi tidak sama dengan kedaulatan.

Analogi ini sangat kuat untuk membaca kehidupan pemerintahan modern. Banyak sistem pemerintahan tampak memberikan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi. Rakyat dapat memilih dalam pemilu. Rakyat dapat menyampaikan aspirasi. Rakyat dapat mengikuti forum publik tertentu. Rakyat dapat menggunakan fasilitas negara. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh bentuk partisipasi tersebut menunjukkan *root access*, atau hanya menunjukkan status sebagai guest user dalam sistem yang batas-batasnya sudah ditentukan tanpa kendali substantif dari rakyat sendiri.

Jika kedaulatan sungguh berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konseptual rakyat seharusnya berada pada posisi *root*, bukan guest. Sebab kedaulatan bukan sekadar izin untuk hadir dalam sistem, melainkan hak untuk menentukan arah sistem. Kedaulatan bukan sekadar hak menggunakan fungsi yang disediakan, melainkan kewenangan tertinggi untuk menentukan bagaimana sistem dibangun, dijalankan, dan dikoreksi. Jika rakyat hanya diberi ruang partisipasi yang terbatas tanpa kendali substantif, maka makna kedaulatan mengalami penyusutan yang sangat serius.

Dalam kehidupan sehari-hari, analogi ini sangat mudah dipahami. Pemilik rumah memiliki akses penuh terhadap rumahnya. Pemilik dapat mengubah tata letak, mengganti pengelola, memperbaiki kerusakan, menentukan siapa yang boleh masuk, dan menghentikan pihak yang merusak properti tersebut. Sebaliknya, tamu hanya menikmati ruang yang diizinkan. Tamu tidak dapat mengubah struktur rumah, tidak dapat mengganti aturan dasar, dan tidak memiliki legitimasi untuk mengambil keputusan strategis. Jika pemilik rumah justru hidup seperti tamu, sementara pihak lain menentukan seluruh aturan, maka terdapat persoalan serius dalam relasi kepemilikan.

Dalam konteks negara, analogi tersebut membawa pertanyaan yang sangat tajam. Apakah rakyat sungguh memiliki kemampuan untuk mengoreksi arah sistem ketika terjadi penyimpangan mendasar. Apakah rakyat memiliki kapasitas substantif untuk memastikan bahwa operator bekerja sesuai mandat. Apakah rakyat memiliki mekanisme nyata untuk menghentikan kerusakan sistemik ketika lembaga formal gagal menjalankan fungsi koreksinya. Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut lemah atau tidak jelas, maka klaim bahwa rakyat berdaulat patut diuji secara lebih kritis.

Banyak sistem demokrasi modern menciptakan kesan bahwa rakyat memiliki posisi kuat karena keterlibatan prosedural cukup tinggi. Pemilu diadakan secara berkala. Kampanye berlangsung terbuka. Partisipasi publik didorong secara formal. Namun keterlibatan prosedural tidak identik dengan *root access*.

Seorang pengguna tamu pun dapat diberi akses untuk menjalankan fungsi tertentu tanpa pernah memperoleh kendali atas inti sistem. Karena itu ukuran kedaulatan tidak boleh berhenti pada keberadaan partisipasi formal semata.

Dalam glosarium buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik sah dengan legitimasi tertinggi atas sistem negara. Konsep ini bukan sekadar metafora teknis, melainkan penegasan filosofis terhadap makna kedaulatan. Jika rakyat adalah *root owner*, maka seluruh struktur negara seharusnya bekerja sebagai instrumen mandat, bukan sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat. Pemerintah hanyalah *applications*. Konstitusi adalah *firmware*. Negara adalah *hardware*. Tidak satu pun dari komponen tersebut boleh membalik relasi kepemilikan.

Namun persoalan besar dalam praktik pemerintahan modern adalah terjadinya ilusi *root access*. Rakyat diberi kesan memiliki kendali karena dapat memilih operator, tetapi tidak selalu memiliki akses substantif terhadap desain sistem. Rakyat diberi ruang menyampaikan aspirasi, tetapi tidak selalu memiliki pengaruh nyata terhadap konfigurasi kekuasaan yang lebih dalam. Rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi dalam banyak kasus justru diperlakukan seperti pihak yang hanya boleh menerima keputusan yang sudah ditentukan oleh mekanisme yang jauh dari jangkauan publik.

Dalam situasi seperti ini, rakyat secara psikologis dapat kehilangan kesadaran kepemilikannya sendiri. Negara mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang "di

atas". Lembaga dipandang sebagai pusat kuasa yang tidak terjangkau. Aparatur dianggap sebagai representasi final negara. Kritik dianggap sebagai gangguan terhadap keteraturan. Dalam kondisi semacam ini, rakyat tidak lagi bertindak seperti pemilik dengan *root access*, melainkan seperti tamu yang merasa harus berhati-hati agar tidak melampaui batas akses yang diberikan.

Padahal pemilik sejati tidak memerlukan izin dari operator untuk menyadari hak kepemilikannya. Pemilik justru menjadi sumber legitimasi dari keberadaan operator. Dalam kerangka demokrasi yang sehat, pemerintah memperoleh mandat dari rakyat, bukan sebaliknya. Lembaga negara bekerja atas dasar legitimasi rakyat, bukan di luar rakyat. Jika relasi ini terbalik, maka yang sedang terjadi bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan pembalikan logika kedaulatan.

Konsep *guest mentality* dalam kehidupan kebangsaan sangat berbahaya karena menciptakan masyarakat yang pasif secara kenegaraan. Rakyat merasa cukup selama layanan minimum tetap berjalan. Keterlibatan menyusut menjadi kepatuhan administratif. Kesadaran berubah menjadi konsumsi kebijakan. Dalam kondisi seperti itu, ruang bagi *ownership capture* menjadi semakin besar, karena pemilik sah tidak lagi bertindak sebagai pemilik yang sadar terhadap sistemnya sendiri.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam subbab ini sangat sederhana tetapi mendasar yaitu apakah rakyat sungguh memiliki *root access* terhadap

negara, atau hanya ditempatkan sebagai guest user dalam sistem yang mengatasnamakan dirinya. Jika rakyat hanya menjadi tamu dalam rumah kebangsaannya sendiri, maka persoalan yang dihadapi bukan sekadar kekurangan partisipasi, melainkan penyimpangan mendasar terhadap makna kedaulatan. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju persoalan yang lebih tajam lagi, yaitu perbedaan antara kepemilikan formal dan kendali nyata.

3.5. Ownership vs Control

Setelah membedakan antara pemilik dan pengguna, serta antara *root access* dan guest access, pembahasan berikutnya harus masuk ke wilayah yang lebih tajam dan lebih problematis, yaitu perbedaan antara kepemilikan dan kendali. Pembedaan ini sangat penting karena dalam banyak sistem, kepemilikan formal tidak selalu berarti penguasaan nyata. Banyak orang secara hukum tercatat sebagai pemilik, tetapi dalam praktik tidak memiliki kendali substantif terhadap apa yang secara legal menjadi miliknya. Dalam konteks negara, persoalan ini menjadi sangat krusial karena dapat menjelaskan bagaimana rakyat secara konstitusional diakui sebagai pemegang kedaulatan, tetapi dalam realitas pemerintahan justru tidak sungguh menentukan arah sistem.

Dalam kehidupan sehari-hari, contoh tentang perbedaan antara kepemilikan dan kendali sangat mudah ditemukan. Sebuah rumah dapat tercatat atas nama seseorang, tetapi seluruh keputusan tentang penggunaan rumah tersebut ditentukan pihak lain.

Sebuah kendaraan dapat secara legal dimiliki seseorang, tetapi penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan pihak yang berbeda. Sebuah perusahaan dapat memiliki pemegang saham formal, tetapi arah strategisnya ditentukan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh dominan di luar struktur kepemilikan yang tampak. Dalam seluruh contoh tersebut, terdapat satu pelajaran penting, yaitu memiliki secara formal tidak selalu berarti mengendalikan secara nyata.

Dalam dunia teknologi, situasi serupa bahkan lebih jelas. Seseorang dapat membeli perangkat, membawa pulang perangkat tersebut, dan secara hukum menjadi pemilik sahnya. Namun jika akses sistem inti telah dikunci, konfigurasi utama dikendalikan pihak lain, atau sistem telah dibajak oleh program berbahaya, maka kepemilikan tersebut menjadi sangat terbatas secara praktis. Perangkat tetap berada di tangan pemilik, tetapi kendali nyata telah bergeser. Dalam glosarium buku ini, kondisi semacam ini dijelaskan melalui konsep *ownership capture*, yaitu keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali substantif telah berpindah ke pihak lain.

Konsep ini sangat penting untuk memahami banyak persoalan dalam kehidupan ketatanegaraan modern. Secara konstitusional, rakyat Indonesia diakui sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, rakyat adalah sumber legitimasi negara. Secara filosofis, seluruh

struktur kenegaraan seharusnya bekerja berdasarkan mandat rakyat. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah posisi kepemilikan formal tersebut sungguh diikuti oleh kendali substantif terhadap arah sistem.

Di titik inilah banyak ilusi demokrasi mulai terlihat. Rakyat diberi pengakuan formal sebagai pemilik. Pemilu diadakan secara berkala. Bahasa kedaulatan rakyat terus digunakan dalam retorika kenegaraan. Representasi formal tetap dijaga melalui berbagai mekanisme konstitusional. Namun pengakuan formal tersebut belum otomatis menjawab siapa yang sungguh mengendalikan arah strategis negara. Kepemilikan legal dapat tetap berada di tangan rakyat, sementara kendali praktis bergerak dalam orbit kekuatan yang sama sekali berbeda.

Pembedaan antara *ownership* dan *control* sangat penting karena demokrasi modern sering kali lebih piawai menjaga simbol kepemilikan daripada memastikan kendali substantif. Sistem dapat terus menggunakan bahasa "atas nama rakyat," sementara keputusan nyata ditentukan oleh konfigurasi kekuatan yang tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak rakyat. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi dapat tampak sehat secara prosedural, tetapi sesungguhnya mengalami gangguan mendasar pada struktur kepemilikannya.

Dalam analogi teknologi, pemilik perangkat yang kehilangan kendali mungkin tetap dapat menggunakan sebagian fungsi dasar. Perangkat masih bisa dinyalakan. Aplikasi tertentu masih bisa

digunakan. Tampilan luar terlihat normal. Namun fungsi inti tidak lagi berada di bawah kontrol pemilik. Pengaturan utama tidak dapat diubah. Program tertentu tidak dapat dihapus. Aktivitas tersembunyi tidak dapat diaudit. Jika kondisi seperti ini terjadi, pemilik tetap ada secara formal, tetapi kedaulatan praktis telah hilang. Analogi ini sangat relevan untuk membaca relasi antara rakyat dan negara.

Dalam kehidupan bernegara, kendali substantif berarti kemampuan nyata untuk memengaruhi arah sistem. Kendali berarti bukan hanya memberi legitimasi prosedural, tetapi juga memastikan bahwa legitimasi tersebut memiliki konsekuensi praktis terhadap pengambilan keputusan. Jika rakyat hanya diminta memberikan persetujuan periodik tanpa akses nyata terhadap arah strategis negara, maka posisi rakyat lebih dekat dengan pemberi legitimasi simbolik daripada pemilik dengan kendali substantif.

Penting dipahami bahwa kepemilikan tanpa kendali adalah bentuk kepemilikan yang rapuh. Kepemilikan semacam ini mudah berubah menjadi formalitas hukum yang kosong. Dalam sistem ekonomi, pemilik tanpa kendali dapat menjadi boneka legal. Dalam sistem teknologi, pemilik tanpa kendali hanyalah pengguna yang memiliki dokumen kepemilikan. Dalam sistem pemerintahan, rakyat tanpa kendali berisiko menjadi simbol demokrasi tanpa daya substantif. Di titik inilah istilah kedaulatan harus diuji secara serius, bukan hanya diulang secara retoris.

Banyak masyarakat modern hidup dalam ilusi bahwa partisipasi prosedural sudah cukup untuk

membuktikan kendali. Selama pemilu berjalan, sistem dianggap demokratis. Selama suara dapat diberikan, rakyat dianggap berdaulat. Selama representasi formal tersedia, legitimasi dianggap terjaga. Padahal partisipasi prosedural tidak otomatis identik dengan kontrol substantif. Seorang investor minoritas dapat ikut rapat tanpa sungguh menentukan arah perusahaan. Seorang pengguna aplikasi dapat memilih preferensi tertentu tanpa memiliki akses terhadap desain inti sistem. Demikian pula rakyat dapat ikut dalam proses formal tanpa sungguh menentukan arah strategis negara.

Dalam glosarium buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*. Konsep ini tidak hanya menekankan kepemilikan formal, tetapi juga mengandaikan hak kendali tertinggi. Root owner bukan sekadar nama pemilik. Root owner adalah pihak yang memiliki kapasitas substantif untuk mengatur sistem. Karena itu jika rakyat hanya memiliki pengakuan formal tanpa kontrol nyata, maka posisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan makna *root ownership*.

Persoalan menjadi lebih serius ketika struktur yang seharusnya menjadi pelaksana mandat justru memperoleh kendali yang semakin besar. Pemerintah sebagai operator mulai bertindak seolah-olah sebagai pusat sistem. Lembaga formal mulai bekerja lebih untuk mempertahankan stabilitas internal daripada menjaga akuntabilitas kepada pemilik sah. Kebijakan mulai bergerak mengikuti tekanan kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, terjadi pergeseran dari kepemilikan substantif menuju kepemilikan nominal.

Dalam banyak kasus, kehilangan kendali tidak terjadi secara dramatis. Tidak selalu ada peristiwa tunggal yang menandai perpindahan kekuasaan. Yang terjadi justru proses perlahan, yaitu penyempitan ruang koreksi, pembesaran kekuasaan operator, normalisasi ketidaksetaraan akses, dan pembentukan budaya yang menjadikan rakyat sekadar pemberi legitimasi pasif. Karena prosesnya gradual, banyak masyarakat tidak segera menyadari bahwa posisi kepemilikannya sedang mengalami erosi.

Karena itu pembahasan tentang kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada pertanyaan "siapa pemilik secara formal," tetapi harus bergerak ke pertanyaan yang jauh lebih tajam yaitu "siapa yang sungguh mengendalikan sistem." Jika jawaban atas pertanyaan pertama adalah rakyat, tetapi jawaban atas pertanyaan kedua mengarah ke konfigurasi kekuatan lain, maka terdapat persoalan serius dalam desain kehidupan bernegara.

Dengan demikian, perbedaan antara *ownership* dan *control* menjadi salah satu kunci terpenting untuk membaca kesehatan demokrasi. Kepemilikan formal memberi legitimasi. Kendali substantif memberi realitas. Tanpa keduanya berjalan bersama, kedaulatan rakyat mudah berubah menjadi bahasa hukum yang indah tetapi kehilangan daya hidup. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pembedaan berikutnya yang sangat penting, yaitu antara kedaulatan yang diakui secara hukum dan kedaulatan yang benar-benar hidup dalam praktik.

3.6. Legal Sovereignty vs Practical Sovereignty

Setelah membedakan antara kepemilikan dan kendali, pembahasan berikutnya harus masuk pada pembedaan yang sangat menentukan dalam membaca realitas pemerintahan modern, yaitu perbedaan antara kedaulatan yang diakui secara hukum dan kedaulatan yang sungguh hidup dalam praktik. Pembedaan ini sangat penting karena banyak negara secara formal mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi dalam kenyataan sehari-hari, arah sistem justru tidak sepenuhnya ditentukan oleh rakyat. Di sinilah letak salah satu ilusi terbesar dalam demokrasi modern, yakni keberadaan pengakuan hukum sering dianggap cukup untuk membuktikan keberadaan kedaulatan substantif.

Secara hukum, posisi rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat jelas. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini memberikan legitimasi normatif yang sangat kuat. Dalam bahasa hukum tata negara, posisi tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi atas keseluruhan struktur kekuasaan. Dengan kata lain, dari perspektif legal, rakyat adalah pemilik sah sistem negara.

Namun pengakuan hukum tidak selalu identik dengan realitas operasional. Dalam banyak sistem, hukum dapat menyatakan satu hal, sementara praktik kekuasaan menunjukkan hal yang berbeda. Sebuah organisasi dapat memiliki aturan internal yang sangat

ideal, tetapi dalam kenyataan sehari-hari keputusan justru ditentukan oleh kekuatan informal. Sebuah perusahaan dapat memiliki struktur tata kelola yang tampak sehat di atas dokumen, tetapi pengaruh nyata berada di luar mekanisme resmi. Hal yang sama sangat mungkin terjadi dalam kehidupan bernegara. Karena itu pengakuan legal harus dibedakan dari efektivitas praktis.

Dalam kerangka buku ini, pembedaan tersebut dapat dijelaskan melalui analogi teknologi yang sangat sederhana. Secara legal, seseorang dapat menjadi pemilik sah sebuah perangkat. Bukti pembelian tercatat atas nama pemilik tersebut. Kepemilikan formal tidak diragukan. Namun jika akses sistem inti telah dikendalikan pihak lain, jika konfigurasi utama tidak dapat diubah oleh pemilik, atau jika keputusan penting tentang perangkat ditentukan oleh kekuatan di luar pemilik, maka kepemilikan legal tidak otomatis berarti kedaulatan praktis. Pemilik tetap ada secara hukum, tetapi kendali substantif telah bergeser.

Di sinilah perbedaan antara *legal sovereignty* dan *practical sovereignty* menjadi sangat penting. *Legal sovereignty* adalah kedaulatan yang diakui secara normatif oleh sistem hukum. *Practical sovereignty* adalah kemampuan nyata untuk mengendalikan arah sistem dalam praktik kehidupan bernegara. Keduanya idealnya berjalan bersamaan. Namun sejarah pemerintahan dunia menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu identik. Banyak sistem mempertahankan legitimasi legal sambil secara praktis membatasi kedaulatan substantif rakyat.

Dalam glosarium buku ini, kedaulatan dipahami sebagai kewenangan tertinggi untuk menentukan arah, aturan, dan keputusan dalam suatu sistem, yang setara dengan hak *root access*. Jika definisi ini digunakan secara konsisten, maka pengakuan legal saja belum cukup. Sebab kewenangan tertinggi bukan hanya soal siapa yang disebut berdaulat dalam dokumen hukum, melainkan siapa yang sungguh memiliki kapasitas menentukan arah sistem secara nyata. Dengan kata lain, kedaulatan harus diuji bukan hanya melalui teks, tetapi melalui distribusi kendali aktual.

Dalam negara demokratis, *legal sovereignty* biasanya tampak melalui mekanisme formal seperti konstitusi, pemilu, representasi rakyat, dan prosedur-prosedur legitimasi publik. Seluruh elemen tersebut penting karena menjadi kerangka institusional yang membedakan negara demokratis dari sistem otoritarian. Namun keberadaan struktur formal tidak otomatis menjamin bahwa rakyat memiliki *practical sovereignty*. Sistem dapat sangat rapi secara prosedural tetapi tetap menghasilkan distribusi kendali yang timpang.

Sebagai contoh, rakyat dapat memilih wakil melalui pemilu, tetapi jika arah kebijakan strategis secara konsisten lebih ditentukan oleh tekanan ekonomi tertentu, pengaruh oligarki, konfigurasi *elite* tertutup, atau ketergantungan terhadap kekuatan eksternal, maka partisipasi formal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan substantif. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi formal, tetapi tidak selalu menjadi penentu arah nyata. Di sinilah demokrasi

prosedural berisiko berubah menjadi mekanisme legitimasi tanpa kontrol substantif.

Dalam glosarium buku ini, kondisi ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah tetapi kendali substantif berpindah ke pihak lain dijelaskan melalui konsep *ownership capture*. Konsep ini sangat tepat untuk membaca jurang antara *legal sovereignty* dan *practical sovereignty*. Secara hukum, rakyat tetap pemilik. Secara formal, rakyat tetap disebut berdaulat. Namun jika keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh kekuatan lain, maka yang terjadi adalah penangkapan kedaulatan dalam bentuk yang sangat halus.

Kondisi semacam ini sangat berbahaya justru karena tetap mempertahankan simbol-simbol demokrasi. Pemilu tetap berlangsung. Kampanye tetap berjalan. Lembaga perwakilan tetap aktif. Bahasa konstitusional tetap digunakan. Dari luar, sistem tampak sehat. Namun realitas distribusi kendali dapat menunjukkan cerita yang berbeda. Inilah bentuk ilusi kekuasaan yang sangat efektif, karena masyarakat tetap merasa hidup dalam sistem yang berdaulat sementara kendali substantif perlahan bergeser.

Perbedaan ini juga menjelaskan mengapa sebagian masyarakat merasakan paradoks dalam kehidupan bernegara. Secara formal, rakyat disebut sebagai pemegang kedaulatan. Namun secara praktis, banyak keputusan besar terasa jauh dari jangkauan publik. Kebijakan strategis tampak lahir dari ruang yang tidak sepenuhnya transparan. Koreksi publik sering memiliki dampak terbatas terhadap konfigurasi

kekuasaan yang lebih dalam. Dalam kondisi seperti ini, legalitas tetap ada, tetapi pengalaman sehari-hari tidak selalu mencerminkan rasa kepemilikan substantif.

Dalam analogi teknologi, situasi ini menyerupai pemilik perangkat yang secara hukum sah, tetapi hanya diberi akses seperti pengguna biasa. Nama pemilik tercatat. Hak formal diakui. Namun fungsi inti tidak dapat disentuh. Program tertentu tidak dapat dihapus. Pengaturan strategis tidak dapat diubah. Aktivitas internal tidak dapat diaudit secara penuh. Jika kondisi semacam ini terjadi, maka status legal pemilik tidak cukup untuk membuktikan keberadaan kedaulatan praktis.

Karena itu pembicaraan tentang kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada glorifikasi konstitusional. Pengakuan hukum adalah fondasi yang sangat penting, tetapi fondasi bukan keseluruhan bangunan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pengakuan tersebut diterjemahkan menjadi kendali nyata dalam praktik kehidupan bernegara. Jika tidak, maka rakyat berisiko hidup dalam demokrasi yang secara legal sah tetapi secara substantif mengalami defisit kedaulatan.

Perbedaan antara *legal sovereignty* dan *practical sovereignty* juga menuntut kedewasaan dalam membaca sistem pemerintahan. Tidak setiap keberadaan prosedur demokrasi berarti distribusi kekuasaan sudah sehat. Tidak setiap pengakuan konstitusional berarti rakyat sungguh memiliki *root access*. Tidak setiap legitimasi formal berarti pemilik sah masih memegang kendali substantif. Demokrasi yang matang menuntut

kemampuan membedakan bentuk dengan isi, simbol dengan realitas, dan legalitas dengan efektivitas.

Pada titik inilah pembahasan BAB ini semakin mengerucut. Jika rakyat diakui secara legal sebagai pemilik sah, tetapi belum tentu memegang kendali praktis secara penuh, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih serius yaitu apa yang terjadi ketika pemilik sah kehilangan akses terhadap sistemnya sendiri. Dari sanalah pembahasan harus bergerak menuju kondisi ketika rakyat secara formal tetap disebut berdaulat, tetapi secara nyata kehilangan *root access* terhadap negara.

3.7. Ketika Pemilik Kehilangan Root Access

Setelah membedakan antara kedaulatan legal dan kedaulatan praktis, pembahasan berikutnya harus masuk pada salah satu kondisi paling serius dalam kehidupan bernegara, yaitu ketika pemilik sah sistem secara formal tetap diakui, tetapi secara nyata kehilangan akses terhadap kendali tertinggi. Dalam kerangka analogi teknologi yang telah dibangun sepanjang buku ini, kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai keadaan ketika *root owner* masih tercatat sebagai pemilik sistem, tetapi *root access* tidak lagi benar-benar berada di tangan pemilik tersebut. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan eksistensial tentang makna kedaulatan itu sendiri.

Dalam dunia teknologi, kehilangan *root access* merupakan persoalan yang sangat serius. Pemilik perangkat mungkin masih memegang perangkat secara fisik. Nama pemilik mungkin masih tercatat secara

resmi. Bukti kepemilikan mungkin masih lengkap. Namun jika akses tertinggi terhadap sistem telah dikunci, jika konfigurasi inti tidak dapat diubah, jika program tertentu tidak dapat dihapus, atau jika aktivitas internal tidak dapat diaudit secara bebas, maka kepemilikan tersebut menjadi sangat terbatas secara substantif. Pemilik masih ada secara legal, tetapi kendali nyata telah berpindah.

Analogi ini sangat relevan untuk kehidupan kebangsaan modern. Rakyat dapat tetap diakui sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konstitusi. Bahasa demokrasi dapat terus digunakan dalam narasi resmi. Pemilu tetap dilaksanakan. Struktur kelembagaan tetap berjalan. Namun seluruh simbol tersebut belum otomatis membuktikan bahwa rakyat sungguh memegang *root access* terhadap negara. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah rakyat benar-benar memiliki kapasitas substantif untuk menentukan arah sistem, mengoreksi penyimpangan, menghentikan kerusakan, dan memastikan bahwa seluruh struktur bekerja sesuai mandatnya.

Dalam glosarium buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi dengan legitimasi paling mendasar terhadap sistem negara. Sementara full *root access* dijelaskan sebagai hak kendali tertinggi atas keseluruhan sistem. Jika kedua konsep ini dibaca bersama, maka kedaulatan rakyat bukan hanya soal pengakuan simbolik, melainkan harus mencakup kemampuan nyata untuk menjalankan hak kepemilikannya. Jika kemampuan tersebut hilang, maka yang tersisa hanyalah kepemilikan nominal.

Salah satu tanda utama bahwa pemilik mulai kehilangan *root access* adalah ketika hubungan antara rakyat dan negara berubah dari hubungan kepemilikan menjadi hubungan ketundukan administratif. Dalam hubungan kepemilikan, rakyat memandang negara sebagai instrumen yang dibangun atas dasar legitimasi rakyat. Dalam hubungan ketundukan administratif, rakyat mulai memandang negara sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak lagi dipersepsikan sebagai alat pelayanan, melainkan sebagai kekuatan yang harus dihadapi, ditaati, atau bahkan ditakuti tanpa ruang koreksi yang sehat.

Gejala lain muncul ketika akses rakyat terhadap koreksi substantif semakin menyempit. Pemilu tetap ada, tetapi ruang pengaruh terhadap arah strategis negara terasa sangat terbatas. Kritik tetap dimungkinkan secara formal, tetapi dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan yang lebih dalam sangat kecil. Aspirasi publik dapat disalurkan, tetapi tidak selalu memiliki hubungan nyata dengan keputusan strategis. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi tetap ada, tetapi lebih menyerupai akses pengguna biasa daripada *root access* pemilik sistem.

Dalam dunia teknologi, pengguna biasa dapat memakai perangkat setiap hari tanpa pernah menyentuh inti sistem. Pengguna dapat membuka aplikasi, mengakses fungsi tertentu, dan berinteraksi dengan tampilan luar tanpa mengetahui atau mengendalikan konfigurasi internal. Situasi semacam ini tidak bermasalah jika pengguna memang bukan

pemilik. Namun jika pengguna tersebut adalah pemilik sah yang seharusnya memiliki kendali tertinggi, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan serius pada struktur kepemilikan.

Dalam kehidupan bernegara, persoalan serupa dapat terjadi ketika rakyat hanya terlibat pada level permukaan. Rakyat diminta berpartisipasi dalam ritus demokrasi, tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap desain sistemik yang lebih dalam. Rakyat diberi ruang untuk memilih operator, tetapi tidak sungguh menentukan parameter dasar yang mengarahkan operator tersebut. Rakyat dapat menyampaikan ketidakpuasan, tetapi tidak memiliki mekanisme efektif untuk mengembalikan sistem ke jalur yang sesuai dengan mandat kedaulatan.

Di sinilah konsep *ownership capture* menjadi sangat relevan. Dalam glosarium, *ownership capture* dijelaskan sebagai keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali substantif berpindah ke pihak lain. Kondisi ini menjelaskan dengan sangat tepat situasi ketika rakyat masih disebut berdaulat, tetapi tidak sungguh memiliki akses terhadap kendali strategis negara. Kepemilikan tetap diakui secara simbolik, tetapi fungsi kepemilikan mengalami pengosongan.

Jika kondisi tersebut berlanjut lebih jauh, persoalannya tidak lagi berhenti pada kehilangan akses, tetapi bergerak menuju pembajakan sistem. Dalam glosarium, kondisi ini dijelaskan melalui konsep *system hijacking*, yaitu pengambilalihan kendali sistem oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi sah. Ketika pemilik

kehilangan *root access*, ruang bagi pembajakan menjadi semakin besar. Sebab sistem yang tidak diawasi oleh pemilik sah sangat mudah dimanfaatkan oleh operator yang menyimpang, kelompok berkepentingan, atau kekuatan eksternal yang memiliki agenda berbeda.

Salah satu gejala paling halus dari hilangnya *root access* adalah perubahan psikologi kedaulatan rakyat. Pemilik yang sadar akan haknya cenderung bersikap kritis, aktif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap integritas sistem. Sebaliknya, pemilik yang kehilangan akses perlahan berubah menjadi pengguna pasif. Keterlibatan pemerintahan menyusut menjadi aktivitas seremonial. Kritik dianggap sia-sia. Struktur negara dipandang terlalu jauh untuk disentuh. Dalam kondisi seperti ini, pembajakan sistem menjadi semakin mudah karena pemilik sah kehilangan kesadaran atas posisi dasarnya sendiri.

Bahaya dari situasi ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga filosofis. Jika rakyat kehilangan *root access*, maka konsep kedaulatan rakyat kehilangan makna substantifnya. Kedaulatan berubah menjadi deklarasi hukum tanpa daya hidup. Demokrasi berubah menjadi prosedur legitimasi tanpa kontrol nyata. Negara tetap berjalan, tetapi relasi antara pemilik dan sistem mengalami distorsi yang sangat serius. Secara formal, rakyat tetap menjadi pusat legitimasi. Secara praktis, rakyat berubah menjadi penonton dalam sistem yang seharusnya menjadi miliknya.

Penting dipahami bahwa kehilangan *root access* tidak selalu terjadi karena pengambilalihan yang dramatis. Tidak selalu ada momen tunggal yang

menandai perpindahan kendali. Yang sering terjadi justru proses perlahan, yaitu pembesaran operator, penyempitan ruang koreksi, dominasi kepentingan tertentu, normalisasi ketidakberdayaan publik, dan pembentukan budaya kekuasaan yang menjauhkan rakyat dari kesadaran kepemilikannya. Karena prosesnya gradual, banyak masyarakat tidak segera menyadari bahwa posisi dasarnya sedang terkikis.

Karena itu persoalan terbesar bukan hanya apakah rakyat kehilangan akses, tetapi apakah rakyat menyadari kehilangan tersebut. Pemilik yang sadar kehilangan kendali masih memiliki peluang untuk memulihkan sistem. Pemilik yang tidak menyadari kehilangan kendali justru hidup dalam ilusi kepemilikan sambil sistemnya terus bergerak menjauh. Di titik inilah pembahasan tentang kedaulatan rakyat mencapai bentuk yang sangat konkret. Kedaulatan bukan sekadar pengakuan hukum, melainkan hubungan nyata antara kepemilikan, kendali, dan kesadaran.

Dengan demikian, subbab ini membawa satu kesimpulan penting, yakni ketika rakyat kehilangan *root access*, yang hilang bukan sekadar kemampuan teknis untuk mengoreksi sistem, melainkan inti substantif dari kedaulatan itu sendiri. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju penegasan paling penting dari keseluruhan bab ini, yaitu bahwa rakyat bukan sekadar peserta dalam negara, melainkan pemilik sah negara itu sendiri.

3.8. Rakyat adalah Pemilik Sah Negara

Setelah seluruh pembahasan tentang dasar konstitusional kedaulatan, makna filosofis kedaulatan, perbedaan antara pemilik dan pengguna, pembedaan antara *root access* dan guest access, jurang antara kepemilikan dan kendali, hingga perbedaan antara kedaulatan legal dan kedaulatan praktis, bab ini akhirnya sampai pada satu penegasan yang tidak dapat dihindari, yaitu rakyat adalah pemilik sah negara. Penegasan ini bukan slogan semata, bukan retorika populis, dan bukan sekadar metafora yang dibuat untuk menggugah emosi pembaca. Penegasan ini adalah kesimpulan logis dari keseluruhan struktur konseptual yang telah dibangun.

Jika Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka secara hukum sumber legitimasi tertinggi berada pada rakyat. Jika kedaulatan dimaknai sebagai kewenangan tertinggi untuk menentukan arah, aturan, dan keputusan dalam suatu sistem, maka rakyat secara prinsip menempati posisi paling mendasar dalam struktur negara. Jika rakyat merupakan sumber legitimasi tertinggi, maka seluruh struktur negara memperoleh keberadaannya melalui legitimasi yang berasal dari rakyat. Dari titik ini, kesimpulannya sangat jelas, yaitu rakyat bukan sekadar peserta dalam negara, melainkan pemilik sah dari keseluruhan sistem kenegaraan.

Dalam kehidupan pemerintahan modern, kesimpulan ini sering terdengar radikal hanya karena masyarakat telah terlalu lama dibiasakan memandang negara dari perspektif yang terbalik. Negara

dipersepsikan sebagai entitas besar yang berdiri di atas rakyat. Pemerintah dipandang sebagai pusat pengendali. Aparatur diposisikan sebagai representasi final negara. Lembaga-lembaga formal tampak seperti sumber legitimasi yang berdiri sendiri. Dalam cara pandang semacam ini, rakyat hanya terlihat sebagai pihak yang hidup di bawah sistem. Padahal dalam logika demokrasi yang sehat, struktur tersebut justru bekerja karena legitimasi rakyat.

Dalam analogi teknologi yang digunakan dalam buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi sistem yang memiliki legitimasi paling mendasar atas seluruh komponen yang bekerja di dalamnya. Negara adalah *hardware*. Konstitusi adalah *firmware*. Pancasila adalah kernel (inti sistem). Peradaban Nusantara adalah *operating system*. Pemerintah adalah *applications*. Bahkan ancaman seperti oligarki dan kolonialisme modern dibaca sebagai *malware*. Namun tidak satu pun dari seluruh komponen tersebut dapat menggantikan posisi pemilik. Sistem dapat kompleks, tetapi kepemilikan tetap berada pada pemilik sahnya.

Pemahaman ini sangat penting karena selama rakyat tidak memandang dirinya sebagai pemilik, seluruh struktur kenegaraan sangat mudah mengalami distorsi. Pemerintah yang seharusnya menjadi operator mandat dapat mulai bertindak seperti pemilik. Aparatur yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan dapat berubah menjadi alat dominasi administratif. Lembaga yang seharusnya menjadi instrumen rakyat dapat lebih sibuk mempertahankan

dirinya sendiri. Ketika rakyat kehilangan kesadaran kepemilikannya, organisasi kekuasaan dengan sangat mudah membesar melampaui legitimasi dasarnya.

Penting untuk menegaskan bahwa kepemilikan rakyat atas negara tidak berarti negara harus dijalankan secara anarkis, spontan, atau tanpa mekanisme institusional. Kepemilikan tidak identik dengan kekacauan. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik sah sebuah sistem tetap dapat menggunakan aturan, struktur, dan mekanisme operasional agar sistem berjalan tertib. Dalam konteks negara, fungsi tersebut dijalankan melalui konstitusi, hukum, lembaga, dan mekanisme demokrasi. Namun keberadaan instrumen tersebut tidak menghapus posisi rakyat sebagai pemilik. Yang diatur adalah cara pelaksanaan kedaulatan, bukan sumber legitimasi kedaulatan.

Di sinilah perbedaan mendasar antara pemilik dan operator harus terus dijaga. Pemerintah memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi operasional negara, tetapi mandat tidak sama dengan kepemilikan. Lembaga negara menjalankan fungsi konstitusional tertentu, tetapi fungsi tidak sama dengan legitimasi tertinggi. Aparatur menegakkan aturan, tetapi penegakan aturan tidak sama dengan sumber kedaulatan. Jika seluruh pembedaan ini kabur, maka rakyat sangat mudah didorong menjadi sekadar pengguna administratif dalam sistem yang sesungguhnya dibangun atas nama rakyat.

Kesalahan besar dalam kehidupan kebangsaan modern adalah menjadikan rakyat sebagai simbol legitimasi, tetapi bukan pusat kendali substantif. Rakyat

diminta memberikan suara dalam pemilu, tetapi setelah itu sistem berjalan dalam orbit yang jauh dari jangkauan publik. Rakyat diakui sebagai sumber kedaulatan, tetapi ruang koreksi substantif sangat terbatas. Rakyat disebut sebagai pemegang legitimasi tertinggi, tetapi banyak keputusan strategis terasa ditentukan oleh konfigurasi kekuatan yang tidak secara langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam kondisi seperti ini, kepemilikan rakyat hanya bertahan secara formal, sementara fungsi kepemilikannya mengalami pengosongan.

Dalam glosarium buku ini, kondisi semacam itu dijelaskan melalui konsep *ownership capture*, yaitu keadaan ketika kepemilikan formal tetap berada pada pemilik sah, tetapi kendali substantif berpindah ke pihak lain. Konsep ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pengakuan formal saja tidak cukup. Menjadi pemilik sah harus berarti memiliki hubungan nyata dengan arah sistem. Jika hubungan tersebut putus, maka yang tersisa hanyalah legalitas tanpa daya substantif.

Namun penegasan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara bukan hanya soal hak. Kepemilikan juga membawa tanggung jawab. Dalam dunia teknologi, pemilik yang tidak memahami sistemnya sendiri sangat mudah kehilangan kendali. Pemilik yang tidak peduli terhadap keamanan sistem membuka ruang bagi pembajakan. Pemilik yang menyerahkan seluruh kesadaran kepada operator tanpa pengawasan akan menghadapi risiko distorsi fungsi. Analogi ini sangat relevan dalam kehidupan kebangsaan. Rakyat yang

tidak memahami struktur negara, tidak memahami cara kerja kekuasaan, dan tidak memiliki kesadaran kritis terhadap arah sistem akan sangat mudah kehilangan makna kedaulatannya.

Karena itu gagasan rakyat sebagai pemilik sah negara bukan sekadar glorifikasi terhadap rakyat. Gagasan ini adalah panggilan untuk membangun kesadaran kenegaraan yang lebih dewasa. Menjadi pemilik berarti memahami sistem yang dimiliki. Menjadi pemilik berarti memiliki kepedulian terhadap integritas sistem. Menjadi pemilik berarti berani membedakan antara loyalitas terhadap bangsa dan kepatuhan buta terhadap operator. Menjadi pemilik berarti memahami bahwa kritik terhadap penyimpangan bukan bentuk pengkhianatan, melainkan ekspresi tanggung jawab terhadap sistem yang sah dimiliki.

Dalam konteks yang lebih filosofis, gagasan ini juga memulihkan martabat rakyat dalam hubungan dengan negara. Rakyat bukan objek administrasi. Rakyat bukan penonton demokrasi. Rakyat bukan konsumen layanan negara semata. Rakyat adalah subjek yang menjadi dasar legitimasi seluruh organisasi kenegaraan. Negara tidak berdiri di atas rakyat. Negara berdiri karena rakyat. Struktur kekuasaan tidak melahirkan legitimasi secara mandiri. Legitimasi lahir dari rakyat sebagai sumber kedaulatan.

Pada titik inilah tesis besar bab ini menemukan bentuknya secara utuh. Rakyat adalah pemilik sah negara. Jika posisi ini dipahami secara benar, maka seluruh pembacaan terhadap negara berubah.

Pemerintah tidak lagi tampak sebagai pemilik. Aparatur tidak lagi tampak sebagai pusat legitimasi. Lembaga tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri di atas rakyat. Seluruh struktur kembali pada tempat yang semestinya yaitu sebagai instrumen yang bekerja untuk melayani pemilik sah sistem kebangsaan.

Namun kepemilikan tidak berarti seluruh fungsi negara dijalankan langsung oleh pemilik. Sebagaimana setiap sistem besar memerlukan *administrator* yang menjaga sistem atas nama pemiliknya, negara juga memerlukan institusi yang menerima mandat untuk menjaga kedaulatan rakyat. Karena itu, setelah memahami rakyat sebagai pemilik sah negara, pembahasan berikutnya akan menjelaskan posisi MPR sebagai penerima mandat rakyat dalam menjaga integritas sistem kenegaraan.

3.9. MPR sebagai *Root Administrator* Kedaulatan Rakyat

Setelah memahami bahwa rakyat adalah pemilik sah negara, pembahasan berikutnya membawa kita pada pertanyaan yang sangat penting. Jika rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, siapakah yang bertugas menjaga agar kedaulatan tersebut tetap bekerja dalam kehidupan bernegara sehari-hari? Pertanyaan ini penting karena kepemilikan tidak selalu berarti pengelolaan langsung. Dalam hampir setiap sistem yang besar dan kompleks, terdapat perbedaan antara pihak yang memiliki sistem dan pihak yang memperoleh mandat untuk menjaga serta mengelola sistem atas nama pemiliknya. Perbedaan inilah yang

menjadi dasar untuk memahami kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam kerangka kedaulatan rakyat.

Dalam glosarium yang digunakan sepanjang buku ini, rakyat diposisikan sebagai *root owner*, yaitu pemilik tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem negara. Dari rakyat lahir kedaulatan. Dari rakyat lahir mandat. Dari rakyat lahir seluruh kewenangan yang kemudian dijalankan oleh berbagai lembaga negara. Namun negara modern memiliki wilayah yang luas, penduduk yang besar, serta persoalan yang sangat kompleks. Tidak mungkin seluruh fungsi kenegaraan dijalankan secara langsung oleh rakyat setiap saat. Karena itu diperlukan sebuah institusi yang menerima mandat untuk menjaga sistem atas nama pemiliknya. Dalam analogi teknologi, fungsi tersebut dikenal sebagai *root administrator*. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, fungsi tersebut secara konseptual berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris kedaulatan rakyat.

Penting untuk dipahami bahwa MPR bukan pemilik negara. Kepemilikan tetap berada pada rakyat. MPR memperoleh kedudukan karena adanya mandat yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagaimana seorang *administrator* sistem memperoleh akses karena diberikan oleh pemilik, MPR memperoleh kewenangan karena rakyat memberikan mandat konstitusional kepadanya. Oleh karena itu, MPR tidak dapat diposisikan sebagai sumber kedaulatan. MPR hanyalah penerima mandat kedaulatan. Kedaulatan

tetap berada di tangan rakyat dan tidak pernah berpindah kepada lembaga mana pun.

Pemahaman ini sangat penting karena dalam praktik ketatanegaraan sering muncul kecenderungan untuk menyamakan lembaga dengan sumber legitimasi. Ketika sebuah lembaga memperoleh kewenangan yang besar, masyarakat sering kali melihat lembaga tersebut seolah-olah menjadi pemilik kekuasaan itu sendiri. Padahal dalam negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, tidak ada satu pun lembaga yang menjadi pemilik kekuasaan. Seluruh kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui mandat yang diberikan rakyat. Karena itu, MPR harus dipahami sebagai penjaga kedaulatan, bukan pemilik kedaulatan.

MPR juga bukan pemerintah. Perbedaan ini harus ditegaskan secara jelas karena selama ini banyak pembahasan mencampurkan antara fungsi pemerintahan dan fungsi penjagaan kedaulatan. Pemerintah bertugas menjalankan fungsi operasional negara. Pemerintah menyusun kebijakan, mengelola birokrasi, menjalankan pembangunan, mengatur administrasi, serta melaksanakan berbagai program kenegaraan. Dalam analogi yang telah digunakan sebelumnya, pemerintah lebih tepat dipahami sebagai *applications*, yaitu perangkat operasional yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem negara.

Posisi MPR berbeda secara mendasar. MPR tidak dibentuk untuk mengelola operasional harian negara. MPR tidak dibentuk untuk menjadi pesaing pemerintah. MPR juga tidak dibentuk untuk mengambil

alih fungsi legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Fungsi utama MPR adalah menjaga hubungan antara rakyat sebagai pemilik negara dan keseluruhan sistem negara yang bekerja atas nama rakyat. Karena itulah MPR lebih tepat dipahami sebagai *root administrator* daripada sebagai operator sistem.

Dalam dunia teknologi, *administrator* utama memiliki tanggung jawab menjaga integritas sistem. *Administrator* memastikan bahwa seluruh komponen bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemilik. *Administrator* melakukan koreksi ketika terjadi penyimpangan. *Administrator* menjaga agar tidak ada pengguna atau kelompok tertentu yang mengambil alih sistem tanpa legitimasi yang sah. Seluruh fungsi tersebut dilakukan demi melindungi kepentingan pemilik sistem. Analogi ini membantu menjelaskan mengapa MPR memiliki peran yang berbeda dibanding lembaga-lembaga negara lainnya.

Sebagai *root administrator*, MPR bertugas menjaga agar negara tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat. Ketika muncul perubahan konstitusional yang mendasar, MPR menjadi forum yang memastikan bahwa perubahan tersebut tetap berpijak pada kehendak rakyat. Ketika terjadi penyimpangan dalam hubungan antara rakyat dan negara, MPR menjadi institusi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan koreksi. Ketika terdapat kebutuhan untuk menata ulang desain ketatanegaraan, MPR menjadi ruang tempat bangsa melakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan. Dengan demikian, fungsi

utama MPR bukan menjalankan negara, melainkan menjaga agar negara tidak terlepas dari pemilik sahnya.

Dalam perspektif ini, MPR dapat dipahami sebagai rumah kedaulatan rakyat. Rumah kedaulatan bukan berarti tempat kekuasaan tertinggi berada, melainkan tempat kedaulatan rakyat memperoleh bentuk kelembagaannya. Di sanalah mandat rakyat dijaga. Di sanalah hubungan antara rakyat dan negara dipelihara. Di sanalah prinsip bahwa rakyat adalah pemilik negara memperoleh perlindungan konstitusional. Tanpa rumah kedaulatan yang jelas, hubungan antara rakyat dan negara sangat mudah menjadi kabur. Kedaulatan tetap diakui secara formal, tetapi tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk menjaganya.

Konsep rumah kedaulatan juga menjelaskan mengapa MPR harus berdiri di atas kepentingan rakyat jangka panjang. Pemerintah dapat berganti. Partai politik dapat datang dan pergi. Konstelasi pemerintahan dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun kedaulatan rakyat harus tetap dijaga melampaui seluruh dinamika tersebut. Karena itulah MPR tidak boleh dipahami hanya sebagai bagian dari kompetisi biasa. MPR memiliki fungsi yang lebih mendasar, yaitu menjaga agar seluruh kompetisi tetap berlangsung dalam koridor kedaulatan rakyat.

Hubungan antara rakyat sebagai *root owner* dan MPR sebagai *root administrator* membentuk fondasi yang sangat penting dalam desain negara berbasis kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi sumber legitimasi. MPR menjadi penjaga mandat. Pemerintah menjadi

pelaksana operasional. Hukum menjadi aturan yang mengikat seluruh komponen sistem. Ketika hubungan tersebut berjalan dengan baik, negara bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya. Kedaulatan rakyat tidak hanya hidup dalam teks konstitusi, tetapi hadir sebagai kenyataan yang bekerja dalam keseluruhan desain kenegaraan.

Namun keberadaan pemilik dan *administrator* yang sah tidak selalu menjamin bahwa sistem berjalan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dalam banyak kasus, kendali substantif dapat bergeser kepada kekuatan lain yang tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Negara tetap tampak bekerja, lembaga tetap berfungsi, dan prosedur tetap berjalan. Akan tetapi arah sistem perlahan bergerak menjauh dari pemiliknya. Untuk memahami bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi, pembahasan berikutnya akan memasuki persoalan mengenai reduksi, pembelokan, dan pembajakan kedaulatan rakyat.

BAGIAN II - SOURCE CODE NUSANTARA

BAB 4
NUSANTARA SEBELUM INDONESIA

4.1. Nusantara Bukan Sekadar Nama Geografis

Ketika istilah Nusantara disebutkan, banyak orang segera membayangkan gugusan pulau yang membentang dari barat hingga timur, lautan yang memisahkan daratan, jalur pelayaran, serta ruang geografis yang kini dikenal sebagai wilayah Indonesia. Cara pandang seperti ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas sangat tidak memadai. Nusantara bukan sekadar istilah geografis yang menunjuk pada bentang ruang fisik. Nusantara adalah konsep yang jauh lebih dalam, karena di dalamnya terkandung sejarah interaksi manusia, jaringan peradaban, pertukaran nilai, dinamika ekonomi, hubungan spiritual, dan kesadaran kolektif yang tumbuh dalam lintasan waktu yang panjang.

Kesalahan memahami Nusantara hanya sebagai istilah geografis sesungguhnya lahir dari kebiasaan modern yang terlalu menekankan peta sebagai dasar identitas negara. Dalam dunia modern, wilayah sering dipahami melalui garis batas administratif, koordinat kartografis, zona yurisdiksi, dan kedaulatan teritorial yang didefinisikan secara formal oleh negara. Cara berpikir ini sangat dipengaruhi oleh logika *nation-state* modern, yaitu model negara-bangsa yang menempatkan batas wilayah sebagai elemen utama identitas negara. Namun jika kerangka ini dipaksakan untuk membaca sejarah Nusantara, maka pemahaman

yang lahir akan sangat dangkal, bahkan berpotensi menyesatkan.

Nusantara lahir jauh sebelum konsep negara modern mengambil bentuk seperti sekarang. Pada masa ketika peta pemerintahan belum dibatasi oleh model administratif modern, kehidupan manusia di kawasan kepulauan ini telah membangun hubungan yang kompleks melalui perdagangan, migrasi, pertukaran budaya, penyebaran spiritualitas, hubungan diplomatik, dan jejaring pengetahuan. Artinya, keterhubungan yang membentuk Nusantara tidak tumbuh dari keputusan administratif modern, melainkan dari dinamika kehidupan manusia yang jauh lebih tua. Nusantara bukan hasil gambar peta. Nusantara adalah hasil sejarah interaksi peradaban.

Dalam kerangka besar buku ini, pemahaman tersebut sangat penting karena buku ini tidak sedang membaca bangsa hanya sebagai konstruksi administratif, melainkan sebagai entitas yang hidup dalam kesadaran historis, nilai, memori kolektif, dan peradaban. Pada BAB sebelumnya telah ditegaskan bahwa bangsa tidak identik dengan negara, dan negara hanyalah salah satu instrumen organisasi kekuasaan. Dengan logika yang sama, Nusantara tidak boleh direduksi menjadi sekadar ruang fisik tempat negara modern berdiri. Nusantara harus dipahami sebagai ruang kehidupan yang melahirkan kemungkinan terbentuknya kesadaran kebangsaan di kemudian hari.

Secara etimologis, istilah Nusantara sering dikaitkan dengan konsep ruang kepulauan yang saling terhubung. Namun pembacaan etimologis saja tidak

cukup. Yang jauh lebih penting adalah membaca realitas historis di balik istilah tersebut. Sebuah istilah hanya memiliki kekuatan makna jika didukung oleh pengalaman peradaban yang nyata. Dalam konteks ini, Nusantara memperoleh maknanya bukan semata dari kata, tetapi dari keberadaan jaringan kehidupan yang benar-benar berlangsung selama berabad-abad. Pelabuhan-pelabuhan yang ramai, jalur perdagangan yang aktif, hubungan antarkerajaan, mobilitas manusia lintas pulau, serta sirkulasi gagasan spiritual membentuk realitas yang jauh lebih substantif daripada sekadar penamaan geografis.

Jika Nusantara hanya dipahami sebagai ruang geografis, maka pulau-pulau akan terlihat sebagai entitas yang terpisah oleh laut. Namun jika Nusantara dipahami sebagai ruang peradaban, maka laut justru berubah fungsi dari pemisah menjadi penghubung. Inilah salah satu perbedaan paling penting dalam cara membaca sejarah kawasan ini. Cara pandang daratan

modern sering melihat laut sebagai batas. Cara pandang peradaban maritim justru melihat laut sebagai jalur interaksi. Dalam konteks Nusantara, laut bukan sekadar ruang kosong di antara pulau-pulau, melainkan medium kehidupan yang memungkinkan terbentuknya jaringan sosial, ekonomi, dan spiritual.

Pemahaman ini penting karena identitas Nusantara tidak dibangun di atas logika keterpisahan, melainkan keterhubungan. Pulau-pulau memang berbeda secara geografis. Bahasa berkembang dalam variasi yang kaya. Tradisi lokal tumbuh dalam bentuk yang beragam. Sistem pemerintahan mengalami dinamika yang berbeda-beda. Namun keberagaman tersebut tidak meniadakan keterhubungan. Justru dalam ruang kepulauan inilah tumbuh pola interdependensi yang membentuk pengalaman kolektif yang khas. Nusantara adalah pluralitas yang hidup dalam jaringan, bukan fragmentasi yang berdiri sendiri-sendiri.

Dalam analogi sistem yang digunakan sepanjang buku ini, Nusantara dapat dipahami sebagai bagian dari *source code* peradaban yang mendahului struktur negara modern. Negara adalah *hardware*. Konstitusi adalah *firmware*. Pancasila adalah kernel (inti sistem). Peradaban adalah *operating system*. Dalam konteks ini, Nusantara bukan sekadar lokasi tempat perangkat dipasang, melainkan lingkungan historis yang menyediakan bahan dasar bagi pembentukan sistem kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, Indonesia modern tidak lahir dari ruang kosong. Indonesia berdiri di atas lapisan sejarah yang jauh lebih tua.

Pemahaman bahwa Nusantara adalah ruang peradaban juga membantu membedakan antara identitas historis dengan konstruksi administratif modern. Tidak semua bentuk keterhubungan masa lalu dapat dipaksakan menjadi identik dengan nasionalisme modern. Akan tetapi, ketidakidentikan tersebut tidak berarti tidak ada fondasi historis sama sekali. Yang perlu dibaca bukan klaim bahwa Nusantara identik dengan Indonesia modern, melainkan fakta bahwa kawasan ini telah memiliki pola interaksi kolektif yang memungkinkan lahirnya imajinasi kebangsaan pada tahap sejarah berikutnya.

Dalam konteks perdagangan, misalnya, kawasan Nusantara telah lama menjadi jalur sirkulasi ekonomi yang sangat aktif. Dalam konteks spiritualitas, kawasan ini menjadi ruang pertemuan dan penyebaran nilai-nilai besar dunia. Dalam konteks budaya, terjadi pertukaran simbol, bahasa, gagasan, dan praktik hidup yang membentuk karakter khas kawasan. Dalam konteks ketatanegaraan, muncul bentuk-bentuk organisasi kekuasaan yang membangun jaringan pengaruh lintas wilayah. Seluruh elemen ini menunjukkan bahwa Nusantara jauh lebih tepat dipahami sebagai sistem kehidupan daripada sekadar koordinat geografis.

Kesalahan memahami Nusantara hanya sebagai geografi juga berbahaya secara filosofis, karena dapat membuat bangsa ini kehilangan kedalaman historisnya. Jika Indonesia dipahami seolah-olah lahir sepenuhnya dari konstruksi pemerintahan abad modern, maka identitas kebangsaan menjadi rapuh dan dangkal. Bangsa yang tidak memahami akar peradabannya akan

lebih mudah menerima narasi bahwa keberadaannya semata-mata merupakan produk administratif modern. Padahal peradaban yang sehat selalu memiliki hubungan dengan memori sejarah yang lebih panjang daripada bentuk negara yang sedang berjalan.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan nasib kolektif. Jika demikian, maka penelusuran terhadap Nusantara menjadi penting bukan sekadar sebagai nostalgia sejarah, melainkan sebagai upaya memahami lapisan memori yang lebih dalam dari kehidupan kolektif bangsa ini. Nusantara bukan sekadar nama lama yang romantis. Nusantara adalah jejak sistem kehidupan yang membantu menjelaskan mengapa Indonesia dapat lahir sebagai entitas kebangsaan.

Karena itu, tesis utama subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Nusantara bukan sekadar istilah geografis. Nusantara adalah ruang peradaban. Nusantara adalah jaringan interaksi manusia. Nusantara adalah ekosistem sejarah yang membentuk pengalaman kolektif lintas pulau. Nusantara adalah fondasi kultural dan peradaban yang mendahului kelahiran Indonesia sebagai negara modern.

Dari titik inilah pembahasan harus bergerak lebih jauh. Jika Nusantara bukan sekadar geografi, maka pertanyaan berikutnya adalah seperti apa bentuk nyata jaringan kehidupan tersebut sebelum negara modern bernama Indonesia lahir. Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa pembahasan menuju jejak-jejak awal

jaringan peradaban yang telah lama hidup di kawasan ini.

4.2. Sebelum Negara Modern, Sudah Ada Jaringan Peradaban

Salah satu kekeliruan paling umum dalam membaca sejarah kebangsaan adalah kecenderungan menyamakan keberadaan bangsa atau kesadaran kolektif dengan keberadaan negara modern. Banyak orang secara tidak sadar menganggap bahwa sebelum berdirinya negara bernama Indonesia, kawasan ini hanyalah kumpulan wilayah yang tercerai-berai tanpa keterhubungan yang berarti. Cara pandang semacam ini lahir dari kebiasaan modern yang terlalu menjadikan *nation-state* sebagai satu-satunya kerangka untuk memahami kehidupan sosial. Padahal sejarah manusia jauh lebih tua daripada negara modern, dan peradaban sering kali tumbuh lebih dahulu sebelum struktur negara mengambil bentuk formal seperti yang dikenal sekarang.

Negara modern adalah konstruksi yang relatif baru dalam sejarah manusia. Model negara-bangsa dengan batas teritorial yang tegas, sistem birokrasi formal, administrasi terpusat, identitas kewarganegaraan, dan legitimasi konstitusional merupakan hasil perkembangan sejarah yang jauh lebih muda dibanding perjalanan panjang peradaban manusia. Sebelum model tersebut menguat, berbagai komunitas manusia telah membangun sistem kehidupan yang kompleks melalui hubungan perdagangan, pertukaran budaya, jaringan spiritual,

aliansi kekuasaan, migrasi, serta hubungan pengetahuan lintas wilayah. Dengan demikian, absennya negara modern tidak berarti absennya keterhubungan peradaban.

Dalam konteks Nusantara, pembedaan ini sangat penting. Jika sejarah kawasan ini hanya dibaca menggunakan lensa negara modern, maka yang terlihat hanyalah kepingan-kepingan wilayah yang tampak terpisah. Pulau-pulau akan dipahami sebagai unit geografis yang berdiri sendiri. Kerajaan-kerajaan akan diperlakukan sebagai entitas lokal yang terisolasi. Perbedaan bahasa dan budaya akan dianggap sebagai bukti keterpisahan total. Namun pembacaan yang lebih cermat menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Sebelum negara modern bernama Indonesia lahir, kawasan ini telah menjadi ruang interaksi yang hidup, dinamis, dan saling terhubung melalui jaringan peradaban yang sangat luas.

Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa keterhubungan peradaban tidak selalu identik dengan penyatuan kekuasaan formal. Dua wilayah dapat berada dalam sistem interaksi yang intens tanpa harus berada di bawah satu pemerintahan administratif tunggal. Dalam sejarah perdagangan dunia, kota-kota yang berbeda kekuasaan dapat terhubung sangat erat melalui jalur ekonomi. Dalam sejarah spiritual, komunitas yang berbeda wilayah dapat terikat melalui jaringan keyakinan dan pengetahuan. Dalam sejarah budaya, identitas kolektif dapat tumbuh melalui pertukaran simbol, bahasa, dan pengalaman bersama tanpa harus terlebih dahulu memiliki negara bersama.

Nusantara adalah contoh yang sangat kuat dari dinamika tersebut. Kawasan kepulauan ini sejak lama telah menjadi titik temu berbagai arus kehidupan manusia. Jalur pelayaran menghubungkan pelabuhan-pelabuhan lintas wilayah. Pedagang berpindah dari satu pusat perdagangan ke pusat lain. Komunitas spiritual membangun hubungan lintas pulau. Pengetahuan bergerak melalui mobilitas manusia. Barang, bahasa, kepercayaan, simbol, teknologi, dan praktik sosial beredar melintasi batas-batas kekuasaan lokal. Semua ini menunjukkan keberadaan jaringan kehidupan yang jauh melampaui batas administrasi kekuasaan setempat.

Dalam BAB sebelumnya telah ditegaskan bahwa bangsa tidak identik dengan negara. Bangsa dibentuk

oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan pengalaman kolektif. Negara hanyalah organisasi kekuasaan formal yang mengelola kehidupan bersama dalam bentuk tertentu. Jika prinsip ini digunakan untuk membaca sejarah Nusantara, maka absennya negara modern tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan keberadaan fondasi keterhubungan kolektif. Justru fondasi-fondasi itulah yang dalam jangka panjang memungkinkan lahirnya bentuk kebangsaan modern.

Laut memainkan peran yang sangat menentukan dalam pembentukan jaringan ini. Dalam cara pandang kontinental modern, laut sering diperlakukan sebagai batas pemisah. Namun dalam logika peradaban maritim, laut justru berfungsi sebagai penghubung utama. Laut adalah jalur mobilitas, ruang interaksi, medium perdagangan, serta koridor penyebaran budaya dan spiritualitas. Dalam konteks Nusantara, laut bukan penghalang bagi hubungan antarpulau, melainkan infrastruktur alami yang memungkinkan keterhubungan dalam skala besar.

Karena itu, keterhubungan Nusantara tidak dibangun di atas model sentralisasi administratif seperti negara modern, melainkan di atas jaringan yang lebih cair namun sangat hidup. Hubungan ekonomi menghubungkan pelabuhan-pelabuhan. Hubungan budaya memungkinkan pertukaran simbol dan nilai. Hubungan spiritual menghubungkan komunitas lintas wilayah. Hubungan kekuasaan membentuk aliansi, pengaruh, dan relasi antarentitas kekuasaan. Keseluruhan dinamika ini membentuk sesuatu yang

jauh lebih besar daripada sekadar koeksistensi geografis. Yang terbentuk adalah ekosistem peradaban.

Dalam perspektif buku ini, inilah yang dimaksud dengan *source code* Nusantara. Sebelum Indonesia menjadi perangkat pemerintahan modern, sudah terdapat logika dasar kehidupan kolektif yang bekerja di kawasan ini. Belum berbentuk negara modern, tetapi sudah terdapat pola konektivitas. Belum memiliki konstitusi nasional, tetapi sudah terdapat norma-norma interaksi. Belum memiliki identitas kewarganegaraan modern, tetapi sudah terdapat pengalaman lintas wilayah yang membentuk memori kolektif tertentu. Dengan kata lain, fondasi sistem kehidupan telah tumbuh jauh sebelum perangkat formal dibangun.

Jaringan perdagangan menjadi salah satu pengikat utama. Nusantara sejak lama berada dalam jalur perdagangan regional dan global yang sangat strategis. Komoditas bernilai tinggi bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Pedagang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya bertemu dalam ruang ekonomi yang sama. Pertemuan ini tidak hanya menghasilkan pertukaran barang, tetapi juga pertukaran cara pandang, bahasa, norma sosial, dan praktik hidup. Dalam banyak kasus sejarah, perdagangan justru menjadi salah satu medium paling efektif dalam membangun keterhubungan peradaban.

Namun perdagangan bukan satu-satunya unsur. Jaringan spiritual juga memainkan peran yang sangat penting. Penyebaran Hindu, Buddha, dan kemudian Islam menunjukkan bahwa kawasan Nusantara bukan ruang yang tertutup, melainkan ruang yang aktif dalam

sirkulasi gagasan besar dunia. Yang berpindah bukan hanya ajaran formal, tetapi juga sistem nilai, etika, pendidikan, simbol, dan pandangan hidup. Dalam bahasa BAB 1, inilah unsur-unsur yang membentuk peradaban yaitu *worldview*, nilai, moral, spiritualitas, budaya, dan tata hidup. Dengan demikian, keterhubungan Nusantara bersifat material sekaligus immaterial.

Mobilitas manusia juga memperkuat jaringan ini. Pelaut, pedagang, pendakwah, cendekiawan, utusan pejabat, dan komunitas migran menciptakan aliran interaksi yang membuat kawasan ini tidak pernah benar-benar terisolasi. Setiap mobilitas membawa informasi. Setiap perjumpaan membawa kemungkinan transformasi. Setiap hubungan membuka ruang pembentukan kesadaran baru. Dalam konteks seperti ini, Nusantara bukan kumpulan pulau yang diam, melainkan ruang hidup yang terus bergerak.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembacaan ini tidak sedang mengklaim bahwa nasionalisme modern telah eksis dalam bentuk yang sama pada masa lampau. Klaim seperti itu akan terlalu simplistik dan tidak akurat secara akademik. Yang sedang ditegaskan adalah keberadaan fondasi historis berupa jaringan peradaban yang menciptakan keterhubungan lintas wilayah. Dari jaringan inilah embrio kesadaran kolektif jangka panjang dapat tumbuh. Indonesia modern bukan replika langsung dari struktur masa lalu, tetapi juga bukan entitas yang muncul dari ruang hampa sejarah.

Jika bangsa dibangun di atas memori bersama, maka jaringan peradaban inilah bagian dari memori

tersebut. Jika bangsa membutuhkan pengalaman kolektif, maka interaksi lintas wilayah selama berabad-abad menjadi bagian dari pengalaman itu. Jika identitas membutuhkan akar sejarah, maka Nusantara menyediakan lapisan akar yang jauh lebih tua daripada republik modern. Karena itu memahami Nusantara berarti memahami bahwa Indonesia bukan awal dari cerita, melainkan salah satu fase kekuasaan dari perjalanan peradaban yang jauh lebih panjang.

Dari titik inilah pembahasan perlu bergerak menuju bentuk-bentuk konkret dari jaringan tersebut. Sebab jika Nusantara memang telah membangun ekosistem peradaban sebelum Indonesia lahir, maka jejak historisnya harus dapat dilihat dalam struktur-struktur besar yang pernah muncul di kawasan ini. Salah satu contoh paling penting adalah Sriwijaya sebagai arsitektur awal jaringan maritim Nusantara.

4.3. Sriwijaya: Arsitektur Jaringan Maritim Nusantara

Jika pembahasan pada subbab sebelumnya menegaskan bahwa sebelum negara modern telah ada jaringan peradaban yang hidup di kawasan Nusantara, maka Sriwijaya merupakan salah satu bukti historis paling penting dari tesis tersebut. Sriwijaya tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar kerajaan lokal yang berkuasa atas wilayah tertentu dalam pengertian administratif modern. Cara baca seperti itu terlalu sempit dan gagal menangkap karakter sesungguhnya dari struktur yang dibangun Sriwijaya. Yang jauh lebih tepat adalah memahami Sriwijaya sebagai arsitektur jaringan maritim yang menunjukkan kemampuan

kawasan Nusantara membangun konektivitas ekonomi, sosial, spiritual, dan pengetahuan dalam skala regional.

Salah satu kesalahan umum dalam membaca sejarah adalah memaksakan model negara modern ke dalam struktur kekuasaan masa lampau. Ketika kata "kerajaan" disebut, imajinasi modern sering langsung membayangkan pemerintahan teritorial yang memiliki batas tegas seperti negara masa kini. Padahal banyak entitas kekuasaan pra-modern bekerja dengan logika yang berbeda. Kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk kontrol administratif penuh atas setiap jengkal wilayah. Dalam banyak kasus, yang lebih penting adalah kemampuan membangun pengaruh, mengendalikan jalur strategis, membentuk hubungan patronase, menjaga konektivitas, dan mempertahankan dominasi atas simpul-simpul penting interaksi. Dalam konteks inilah Sriwijaya harus dibaca.

Sriwijaya tumbuh sebagai kekuatan maritim besar yang berkembang terutama antara abad ketujuh hingga abad ketiga belas. Posisi geografisnya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan yang menghubungkan India, Tiongkok, Asia Tenggara, dan kawasan-kawasan maritim lain yang lebih luas. Namun keunggulan Sriwijaya bukan hanya soal lokasi. Banyak wilayah memiliki posisi strategis tetapi gagal membangun pengaruh besar. Yang membedakan Sriwijaya adalah kemampuannya memanfaatkan posisi tersebut untuk membentuk sistem jaringan yang efektif.

Dalam konteks perdagangan, Sriwijaya menunjukkan bahwa kawasan Nusantara bukan ruang pasif yang hanya menjadi jalur lalu lintas pihak luar.

Sriwijaya justru menjadi aktor aktif dalam pengelolaan jalur ekonomi maritim. Pengaruh terhadap Selat Malaka dan koridor perdagangan regional menunjukkan tingkat kecanggihan strategis yang tidak dapat diremehkan. Jalur perdagangan bukan sekadar ruang perpindahan barang, tetapi juga ruang pertukaran informasi, budaya, teknologi, dan relasi. Dengan mengendalikan simpul-simpul strategis tersebut, Sriwijaya tidak sekadar memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun posisi sebagai penghubung utama dalam jaringan regional.

Yang penting dicatat adalah bahwa jaringan perdagangan semacam ini tidak hanya menciptakan transaksi material. Perdagangan menciptakan perjumpaan antarmanusia. Perjumpaan melahirkan pertukaran bahasa, norma sosial, pengetahuan, dan cara pandang. Dalam konteks ini, Sriwijaya tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga sebagai simpul peradaban. Sebuah pelabuhan besar bukan hanya tempat bongkar muat komoditas. Pelabuhan adalah titik pertemuan gagasan, budaya, dan jaringan manusia yang sangat dinamis. Karena itu membaca Sriwijaya hanya sebagai kekuatan dagang berarti mereduksi dimensi peradabannya.

Sriwijaya juga sangat penting dalam konteks spiritual dan intelektual. Salah satu aspek paling signifikan dari Sriwijaya adalah posisinya sebagai pusat pembelajaran Buddhis yang diakui dalam jaringan Asia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini menjadi tempat singgah dan pembelajaran bagi para peziarah serta cendekiawan yang bergerak dalam

jaringan intelektual Buddhis. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Nusantara bukan sekadar konsumen gagasan luar, tetapi juga bagian aktif dari sirkulasi pengetahuan global pada zamannya.

Dalam kerangka buku ini, unsur tersebut sangat penting karena peradaban tidak dibangun hanya melalui kekuatan ekonomi atau dominasi segelintir orang. Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa peradaban mencakup *worldview*, nilai, ilmu, moral, spiritualitas, budaya, dan tata hidup. Jika sebuah entitas mampu menjadi pusat sirkulasi spiritual dan intelektual, maka entitas tersebut telah bergerak melampaui fungsi kelembagaan biasa. Sriwijaya menunjukkan karakter seperti itu. Struktur ini bukan hanya organisasi kekuasaan, tetapi simpul kehidupan peradaban.

Dari perspektif *source code* Nusantara, Sriwijaya menunjukkan keberadaan logika konektivitas yang sangat khas. Laut tidak dipahami sebagai penghalang, melainkan sebagai infrastruktur alami kehidupan. Mobilitas bukan ancaman, melainkan sumber peluang. Hubungan lintas wilayah bukan penyimpangan dari identitas, melainkan bagian dari cara hidup. Ini merupakan karakter fundamental dari peradaban maritim yang berbeda secara mendasar dari logika negara kontinental yang menjadikan batas wilayah sebagai instrumen utama pembentuk identitas negara. Sriwijaya juga menunjukkan bahwa keterhubungan Nusantara tidak harus dibangun melalui homogenisasi budaya. Jaringan yang efektif tidak selalu berarti keseragaman total. Justru salah satu kekuatan utama jaringan maritim adalah kemampuan menghubungkan

keberagaman dalam satu ekosistem interaksi. Pelabuhan-pelabuhan besar secara alami mempertemukan berbagai etnis, bahasa, dan tradisi. Kemampuan mempertahankan fungsi konektivitas di tengah keberagaman semacam ini merupakan ciri kedewasaan peradaban.

Dalam konteks buku ini, Sriwijaya dapat dipahami sebagai salah satu bentuk awal dari arsitektur sistemik Nusantara. Tentu tidak dalam pengertian bahwa Sriwijaya identik dengan Indonesia modern. Klaim seperti itu terlalu simplistik dan tidak akurat secara historis. Namun Sriwijaya menunjukkan bahwa kawasan ini telah memiliki kapasitas untuk membangun jaringan pengaruh, sistem konektivitas, dan simpul peradaban jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ini yang penting bagi tesis buku ini.

Dengan analogi sistem yang digunakan sepanjang buku, Sriwijaya dapat dipandang sebagai salah satu prototipe awal dari jaringan operating environment Nusantara. Belum berbentuk republik. Belum memiliki konstitusi nasional. Belum mengenal model kewarganegaraan modern. Namun sudah terdapat logika sistemik, yaitu penghubung, distribusi, integrasi, dan sirkulasi. Dalam bahasa teknologi, yang terlihat adalah bentuk awal dari arsitektur jaringan, bukan perangkat pemerintahan modern.

Sriwijaya juga membantah narasi yang memandang kawasan Nusantara sebagai wilayah pinggiran yang baru memiliki arti setelah intervensi kolonial atau pembentukan negara modern. Sejarah Sriwijaya menunjukkan bahwa kawasan ini pernah

menjadi pusat aktivitas regional yang signifikan. Artinya, fondasi kapasitas peradaban telah ada jauh sebelum struktur kekuasaan modern dibangun. Indonesia tidak muncul dari kevakuman sejarah, melainkan berdiri di atas jejak-jejak kemampuan kolektif yang telah teruji dalam lintasan panjang.

Namun Sriwijaya bukan satu-satunya ekspresi dari logika peradaban Nusantara. Jika Sriwijaya menunjukkan kekuatan konektivitas maritim dan jaringan perdagangan-spiritual, maka sejarah berikutnya juga memperlihatkan bentuk lain dari imajinasi integrasi kawasan. Salah satu ekspresi paling penting dari perkembangan tersebut muncul dalam pengalaman Majapahit, yang membawa pembahasan dari sekadar konektivitas menuju gagasan geopolitik kepulauan yang lebih eksplisit.

4.4. Majapahit: Imajinasi Politik Kepulauan

Jika Sriwijaya menunjukkan bahwa Nusantara telah memiliki kapasitas membangun jaringan maritim yang kuat melalui perdagangan, spiritualitas, dan konektivitas regional, maka Majapahit memperlihatkan dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu munculnya gagasan mengenai keterhubungan antarpulau. Majapahit tidak boleh dibaca secara simplistik sebagai Indonesia modern dalam bentuk awal, karena pendekatan semacam itu tidak akurat secara historis dan terlalu memaksakan kategori kenegaraan masa kini ke masa lampau. Namun Majapahit juga tidak dapat direduksi menjadi sekadar kerajaan lokal biasa. Yang jauh lebih penting adalah membaca Majapahit sebagai

salah satu ekspresi historis dari kesadaran integratif kawasan kepulauan yang menjadi bagian dari fondasi panjang peradaban Nusantara.

Kesalahan umum dalam membaca sejarah Majapahit adalah kecenderungan bergerak ke dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah glorifikasi berlebihan yang menjadikan Majapahit seolah-olah identik dengan negara modern, lengkap dengan berbagai konsep kenegaraan kontemporer yang sesungguhnya belum dikenal pada masa tersebut. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang memandang Majapahit hanya sebagai kekuasaan lokal yang tidak memiliki makna lebih luas bagi pembentukan kesadaran kawasan. Kedua pendekatan tersebut sama-sama problematik. Yang diperlukan adalah pembacaan yang cermat, proporsional, dan memahami konteks sejarahnya secara utuh.

Majapahit tumbuh pada abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan. Namun, yang menjadikan Majapahit penting dalam konteks buku ini bukan semata-mata luas pengaruhnya, melainkan imajinasi geopolitik yang tercermin dalam upaya membangun keterhubungan lintas wilayah kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Nusantara tidak hanya memiliki pengalaman dalam konektivitas ekonomi dan budaya, tetapi juga pernah melahirkan upaya untuk memahami ruang kepulauan sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan.

Dalam konteks sejarah, penting dipahami bahwa konsep integrasi pada masa pra-modern tidak identik

dengan model sentralisasi administratif seperti yang dikenal dalam negara modern. Tidak setiap bentuk pengaruh berarti penguasaan administratif secara penuh terhadap seluruh wilayah. Dalam berbagai sistem pemerintahan pra-modern, pengaruh dapat bekerja melalui relasi patronase, aliansi, pengakuan simbolik, jaringan kekuasaan, hubungan tributari, atau penguasaan terhadap simpul-simpul strategis tertentu. Karena itu, pembacaan terhadap Majapahit tidak boleh terjebak pada pertanyaan modern yang terlalu sempit mengenai batas administratif formal. Yang lebih penting adalah memahami adanya kesadaran mengenai keterhubungan antarkawasan dalam ruang kepulauan.

Dalam konteks inilah nama Gajah Mada dan konsep Sumpah Palapa sering menjadi simbol penting dalam imajinasi sejarah Nusantara. Terlepas dari berbagai perdebatan akademik tentang detail historis dan cakupan pengaruh aktual, gagasan tentang penyatuan wilayah-wilayah kepulauan menunjukkan adanya kesadaran bahwa ruang maritim ini dapat dipikirkan sebagai medan relasional yang lebih besar daripada entitas lokal yang terpisah-pisah. Bagi buku ini, yang penting bukan romantisasi literal, melainkan fakta bahwa terdapat jejak imajinasi integratif dalam sejarah kawasan.

Majapahit menunjukkan bahwa laut bukan sekadar ruang pemisah, melainkan medan strategis yang dapat menjadi jalur konektivitas antarkawasan. Hal ini penting karena kembali menegaskan karakter khas Nusantara sebagai peradaban maritim. Dalam logika kontinental, penguasaan sering dibayangkan

melalui dominasi atas daratan yang saling terhubung secara geografis. Dalam logika kepulauan, pengaruh justru dibangun melalui penguasaan jalur mobilitas, keterhubungan antarpelabuhan, distribusi pengaruh, serta kemampuan menjaga jaringan interaksi. Majapahit menunjukkan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan logika tersebut.

Dalam BAB sebelumnya, negara telah dijelaskan sebagai organisasi kekuasaan, sementara bangsa dipahami sebagai entitas yang dibentuk oleh memori bersama, identitas, solidaritas, dan sejarah kolektif. Jika kerangka ini diterapkan pada Majapahit, maka yang terlihat bukan sekadar struktur kekuasaan, tetapi juga kontribusi terhadap memori historis tentang keterhubungan kawasan. Sejarah tidak hanya penting karena fakta material yang terjadi, tetapi juga karena jejak gagasan mengenai kehidupan bersama yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, Majapahit menjadi bagian dari memori panjang tentang kemungkinan integrasi kawasan Nusantara.

Majapahit juga penting karena menunjukkan bahwa organisasi kekuasaan di kawasan ini tidak selalu bersifat pasif atau defensif. Terdapat kemampuan membangun visi strategis, membentuk jaringan pengaruh, dan memahami dinamika geopolitik regional. Ini membantah narasi yang memandang kawasan Nusantara sebagai ruang yang secara historis selalu terfragmentasi tanpa kapasitas organisasi skala besar. Sejarah justru menunjukkan bahwa terdapat pengalaman membangun struktur pengaruh yang

cukup kompleks, baik dalam dimensi kekuasaan, ekonomi, maupun budaya.

Namun yang lebih penting daripada ukuran kekuasaan formal adalah logika integratif yang tercermin di dalamnya. Buku ini tidak sedang menulis sejarah kerajaan demi glorifikasi masa lampau, melainkan menelusuri *source code* peradaban Nusantara. Dalam kerangka tersebut, Majapahit menjadi penting karena memperlihatkan salah satu bentuk ekspresi dari kesadaran keterhubungan kawasan. Kesadaran seperti ini merupakan bahan mentah penting bagi pembentukan identitas kolektif yang lebih besar di kemudian hari.

Dalam analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, jika Sriwijaya dapat dibaca sebagai arsitektur awal jaringan konektivitas maritim, maka Majapahit menunjukkan perkembangan menuju lapisan koordinasi kekuasaan yang lebih kompleks. Belum dalam bentuk negara modern, tetapi sudah menunjukkan logika integrasi sistemik. Belum berbentuk republik dengan konstitusi formal, tetapi sudah menampilkan imajinasi tentang ruang bersama yang melampaui lokalitas sempit. Ini penting karena *source code* sebuah sistem tidak selalu lahir sekaligus dalam bentuk sempurna. Sering kali perkembangan berlangsung melalui berbagai prototipe historis.

Majapahit juga memperlihatkan bahwa keberagaman bukan hambatan otomatis bagi keterhubungan. Kawasan kepulauan ini sejak lama dihuni oleh komunitas yang berbeda bahasa, budaya, dan tradisi. Namun keberagaman tersebut tidak selalu

menghasilkan isolasi total. Justru sejarah menunjukkan adanya upaya membangun relasi dalam keragaman. Ini menjadi pelajaran penting bagi pembacaan kebangsaan modern, karena identitas kolektif yang sehat tidak harus lahir dari keseragaman mutlak.

Penting untuk ditegaskan kembali bahwa Indonesia modern bukan kelanjutan administratif langsung dari Majapahit. Republik Indonesia lahir dari konteks sejarah yang sangat berbeda, melalui perjuangan antikolonial, pembentukan konstitusi modern, dan konstruksi kebangsaan yang khas abad ke-20. Namun menyatakan bahwa Indonesia tidak identik dengan Majapahit bukan berarti menafikan kontribusi sejarah Majapahit terhadap memori peradaban Nusantara. Hubungan yang lebih tepat bukan hubungan identitas literal, melainkan hubungan genealogis dalam lapisan kesadaran historis.

Jika Sriwijaya menunjukkan kekuatan jaringan maritim dan spiritual, Majapahit menunjukkan artikulasi kekuasaan dari imajinasi keterhubungan kawasan. Bersama-sama, keduanya menunjukkan bahwa Nusantara memiliki sejarah panjang sebagai ruang interaksi yang hidup, bukan kumpulan pulau pasif yang baru memperoleh makna setelah kolonialisme atau pembentukan negara modern. Indonesia lahir bukan di atas kekosongan, melainkan di atas fondasi peradaban yang telah berproses selama berabad-abad.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak ke unsur yang bahkan lebih fundamental dan lebih organik dalam membangun keterhubungan kawasan, yaitu

perdagangan. Sebab sebelum gagasan integrasi yang mengambil bentuk tertentu, interaksi ekonomi telah lebih dahulu menjadi salah satu perekat paling kuat dalam kehidupan Nusantara.

4.5. Perdagangan sebagai Sistem Penyatu

Jika Sriwijaya menunjukkan kekuatan konektivitas maritim dan Majapahit memperlihatkan imajinasi tentang keterhubungan kawasan, maka perdagangan merupakan salah satu unsur paling mendasar yang secara organik menyatukan kehidupan Nusantara jauh sebelum lahirnya negara modern. Dalam banyak pembacaan sejarah yang terlalu berfokus pada perang, kekuasaan, dan pergantian dinasti, perdagangan sering diperlakukan hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa. Padahal dalam realitas sejarah, perdagangan jauh melampaui fungsi transaksi material. Perdagangan adalah medium perjumpaan manusia, pertukaran gagasan, penyebaran nilai, pembentukan jaringan sosial, dan penciptaan kesadaran tentang keterhubungan ruang hidup.

Ketika membicarakan Nusantara, penting untuk memahami bahwa kawasan ini tidak berkembang sebagai peradaban yang terisolasi. Posisi geografis kawasan kepulauan ini menempatkannya dalam jalur pergerakan manusia dan komoditas yang sangat strategis. Dari barat hingga timur, laut membuka koridor mobilitas yang menghubungkan berbagai pusat kehidupan. Jalur-jalur perdagangan tidak sekadar mengangkut barang, tetapi membawa manusia, bahasa, teknologi, praktik sosial, pengetahuan, dan sistem

kepercayaan. Dalam konteks seperti ini, perdagangan bukan sekadar fungsi ekonomi, melainkan infrastruktur peradaban.

Salah satu kesalahan dalam membaca sejarah ekonomi adalah menganggap perdagangan hanya sebagai urusan pertukaran komoditas. Cara pandang ini terlalu sempit karena memisahkan ekonomi dari dinamika sosial dan budaya. Dalam praktik sejarah, pasar adalah ruang sosial. Pelabuhan adalah titik pertemuan peradaban. Aktivitas jual beli menciptakan kebutuhan komunikasi, kepercayaan, norma interaksi, serta stabilitas hubungan. Di mana perdagangan tumbuh, di sana jaringan sosial juga berkembang. Karena itu perdagangan dalam konteks Nusantara harus dipahami sebagai sistem penyatu, bukan hanya mekanisme transaksi.

Komoditas seperti rempah-rempah sering menjadi simbol utama dalam sejarah perdagangan Nusantara, tetapi nilai sesungguhnya terletak pada jaringan yang dibentuk di sekeliling komoditas tersebut. Barang yang bernilai tinggi menciptakan arus mobilitas. Mobilitas menciptakan titik temu. Titik temu melahirkan pertukaran budaya dan pengetahuan. Dengan demikian, komoditas hanyalah pemicu permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu terbentuknya sistem interaksi lintas wilayah yang hidup secara terus-menerus.

Pelabuhan-pelabuhan di kawasan Nusantara memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika ini. Pelabuhan bukan sekadar fasilitas logistik, melainkan simpul sosial dan peradaban. Di ruang-

ruang seperti inilah manusia dari berbagai latar belakang bertemu, bernegosiasi, belajar memahami perbedaan, membangun kepercayaan, dan menciptakan pola interaksi baru. Bahasa-bahasa berkembang karena kebutuhan komunikasi. Norma perdagangan lahir karena kebutuhan stabilitas. Hubungan sosial terbentuk karena frekuensi perjumpaan yang tinggi. Semua ini menunjukkan bahwa perdagangan adalah medium pembentuk struktur sosial lintas wilayah.

Dalam konteks buku ini, unsur tersebut sangat penting karena pada BAB 1 telah ditegaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan nasib kolektif. Unsur-unsur semacam itu tidak selalu lahir pertama kali dari organisasi kekuasaan formal. Sering kali justru tumbuh dari pengalaman hidup bersama yang berlangsung berulang kali dalam lintasan sejarah. Perdagangan menciptakan pengalaman seperti itu. Ketika komunitas dari berbagai wilayah terus berinteraksi selama generasi demi generasi, lahirlah kesadaran bahwa kehidupan masing-masing tidak sepenuhnya terpisah.

Perdagangan juga mengajarkan interdependensi. Sebuah wilayah penghasil komoditas tertentu membutuhkan akses ke pasar yang lebih luas. Wilayah lain membutuhkan barang yang tidak tersedia di tempatnya sendiri. Jalur pelayaran membutuhkan keamanan. Transaksi membutuhkan stabilitas hubungan. Dengan demikian, perdagangan menciptakan kesadaran praktis bahwa kehidupan satu wilayah terhubung dengan kehidupan wilayah lain. Ini

bukan sekadar teori, tetapi pengalaman konkret yang membentuk cara pandang kolektif.

Dalam masyarakat maritim, hubungan semacam ini sangat kuat karena laut bukan hambatan, melainkan jalur kehidupan. Ini adalah salah satu karakter paling khas dari Nusantara. Dalam logika kontinental, keterhubungan sering dibangun melalui jalan darat dan perluasan teritorial. Dalam logika maritim, keterhubungan dibangun melalui mobilitas, pelayaran, pelabuhan, dan sirkulasi manusia. Nusantara tumbuh dalam logika kedua ini. Karena itu perdagangan bukan tambahan sekunder dalam sejarah kawasan ini, melainkan bagian dari struktur dasar kehidupan.

Perdagangan juga menciptakan ruang perjumpaan lintas identitas. Pedagang tidak datang dari satu etnis atau satu latar budaya. Pelabuhan mempertemukan komunitas yang berbeda bahasa, keyakinan, dan kebiasaan. Dalam konteks seperti ini, kemampuan berinteraksi dengan perbedaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting karena keterhubungan kawasan tidak dibangun di atas homogenitas mutlak, melainkan di atas kemampuan mengelola keragaman dalam interaksi yang produktif. Nusantara belajar menjadi ruang plural bukan semata karena ideologi modern, tetapi karena pengalaman historis yang panjang.

Selain itu, perdagangan juga mendorong perkembangan institusi sosial tertentu. Kepercayaan menjadi unsur penting dalam transaksi. Reputasi menjadi aset sosial. Kesepakatan memerlukan norma. Perlindungan jalur memerlukan koordinasi kekuasaan.

Dengan demikian, perdagangan bukan sekadar menghubungkan wilayah, tetapi juga mendorong pembentukan tata kehidupan yang lebih kompleks. Dalam bahasa BAB 1, ini berkaitan langsung dengan unsur peradaban yaitu nilai, moral, tata hidup, dan praktik sosial.

Perdagangan bahkan berperan sebagai medium penyebaran pengetahuan. Teknologi pelayaran, metode navigasi, sistem pengukuran, praktik akuntansi sederhana, cara negosiasi, hingga pengetahuan geografis berkembang melalui kebutuhan perdagangan. Pengetahuan tidak hanya lahir di ruang akademik formal. Dalam sejarah peradaban, banyak inovasi tumbuh dari kebutuhan praktis interaksi manusia. Nusantara sebagai kawasan perdagangan aktif tentu tidak terlepas dari dinamika tersebut.

Dalam perspektif *source code* Nusantara, perdagangan dapat dipahami sebagai salah satu protokol utama yang membuat sistem keterhubungan kawasan bekerja. Jika menggunakan analogi teknologi yang konsisten dengan buku ini, perdagangan bukan sekadar aplikasi ekonomi, melainkan semacam communication protocol yang memungkinkan node-node kehidupan di berbagai wilayah saling berhubungan. Tanpa protokol komunikasi, sistem jaringan tidak akan hidup. Demikian pula tanpa perdagangan, keterhubungan kawasan Nusantara tidak akan berkembang dengan intensitas yang sama.

Penting juga dicatat bahwa perdagangan membangun keterhubungan yang relatif lebih organik dibanding dominasi formal. Kekuasaan dapat berubah

melalui perang atau pergantian rezim. Namun interaksi ekonomi yang mengakar sering bertahan lebih lama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup. Karena itu perdagangan menjadi perekat yang sangat efektif. Banyak komunitas yang mungkin tidak berada dalam satu struktur kekuasaan formal tetap terhubung erat karena hubungan ekonomi yang terus berlangsung.

Hal inilah yang membuat perdagangan menjadi fondasi penting dalam memahami mengapa Indonesia tidak lahir dari kekosongan sejarah. Sebelum republik modern berdiri, kawasan ini telah memiliki pengalaman panjang tentang keterhubungan, interdependensi, mobilitas, dan interaksi lintas identitas. Pengalaman tersebut tidak identik dengan nasionalisme modern, tetapi menyediakan bahan historis bagi pembentukan kesadaran kolektif yang lebih besar di kemudian hari.
Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa yang pertama kali menyatukan Nusantara bukan organisasi negara modern, dan bahkan bukan semata-mata kekuatan kekuasaan, melainkan jaringan kehidupan yang tumbuh melalui interaksi ekonomi. Perdagangan adalah salah satu perekat paling awal dan paling organik dalam pembentukan ekosistem peradaban Nusantara.

Namun perdagangan hanya menjelaskan satu sisi dari keterhubungan kawasan. Manusia tidak hidup hanya dari pertukaran barang. Peradaban juga dibentuk oleh pertukaran makna, nilai, keyakinan, dan pandangan hidup. Karena itu pembahasan berikutnya harus bergerak ke jaringan yang sama pentingnya,

bahkan dalam banyak hal lebih mendalam, yaitu jaringan spiritual yang membentuk sirkulasi nilai di Nusantara.

4.6. *Spiritual Networks* dan Sirkulasi Nilai

Jika perdagangan menjadi jalur utama pertukaran barang dan pembentukan keterhubungan material di Nusantara, maka jaringan spiritual menjadi medium pertukaran makna, nilai, dan pandangan hidup yang membentuk lapisan peradaban yang jauh lebih dalam. Manusia tidak hidup hanya dari kebutuhan ekonomi. Peradaban tidak dibangun hanya melalui komoditas, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Di balik interaksi material selalu terdapat pertanyaan yang lebih mendasar tentang makna hidup, moralitas, tatanan sosial, hubungan dengan Yang Transenden, serta orientasi etis dalam kehidupan bersama. Dalam konteks Nusantara, jaringan spiritual memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk keterhubungan lintas wilayah jauh sebelum negara modern bernama Indonesia lahir.

Salah satu kesalahan dalam membaca sejarah spiritual adalah memahaminya secara terlalu sempit sebagai urusan ritual keagamaan individual. Padahal dalam sejarah peradaban, spiritualitas selalu memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas. Sistem keyakinan membentuk cara manusia memahami kehidupan. Nilai-nilai moral memengaruhi struktur hubungan sosial. Tradisi pendidikan lahir dari kebutuhan transmisi pengetahuan. Simbol spiritual membangun identitas kolektif. Institusi-institusi keagamaan menciptakan

jaringan sosial yang melampaui batas geografis. Karena itu ketika membahas jaringan spiritual, yang sedang dibahas bukan sekadar perpindahan ajaran formal, melainkan sirkulasi sistem nilai yang membentuk peradaban.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa peradaban terdiri dari *worldview*, nilai, ilmu, moral, spiritualitas, budaya, estetika, dan tata hidup. Dengan kerangka tersebut, jaringan spiritual harus dipahami sebagai salah satu mekanisme utama yang memungkinkan unsur-unsur tersebut bergerak lintas wilayah. Jika perdagangan menghubungkan manusia melalui kebutuhan material, spiritualitas menghubungkan manusia melalui pencarian makna, nilai, dan orientasi hidup. Dalam banyak kasus sejarah, pengaruh spiritual justru meninggalkan jejak yang lebih tahan lama dibanding perubahan kekuasaan.

Kawasan Nusantara sejak lama merupakan ruang terbuka bagi sirkulasi nilai-nilai besar dunia. Hindu, Buddha, dan kemudian Islam tidak hadir di kawasan ini melalui ruang hampa. Penyebaran tersebut berlangsung melalui jaringan manusia yang hidup, melalui mobilitas pelaut, pedagang, pendakwah, cendekiawan, pengembara spiritual, serta komunitas-komunitas yang membangun hubungan lintas wilayah. Dengan demikian, spiritualitas di Nusantara tidak berkembang dalam isolasi, melainkan dalam arus interaksi yang sangat dinamis.

Namun penting untuk memahami bahwa penyebaran spiritualitas bukan sekadar proses "masuknya pengaruh luar." Cara baca seperti itu terlalu

dangkal dan menempatkan masyarakat Nusantara sebagai objek pasif. Realitas sejarah jauh lebih kompleks. Yang terjadi adalah proses interaksi, adaptasi, dialog, transformasi, dan pembentukan bentuk-bentuk kehidupan baru yang khas. Nilai yang datang dari luar tidak selalu diterima secara mekanis. Nilai-nilai tersebut berinteraksi dengan budaya lokal, tata hidup setempat, struktur sosial yang sudah ada, dan pengalaman sejarah masyarakat kawasan ini. Dari proses inilah lahir corak peradaban Nusantara yang unik.

Jaringan Buddhis pada masa Sriwijaya merupakan salah satu contoh penting. Sriwijaya tidak hanya menjadi simpul perdagangan, tetapi juga pusat pembelajaran spiritual dan intelektual yang terhubung dengan jaringan Asia yang lebih luas. Fakta ini menunjukkan bahwa Nusantara sejak awal bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang pengetahuan dan pencarian spiritual. Yang bergerak melalui jaringan tersebut bukan hanya manusia, tetapi juga gagasan, teks, etika, dan pandangan hidup.

Perkembangan Islam di Nusantara juga menunjukkan pola yang sangat penting dalam konteks keterhubungan kawasan. Penyebaran Islam tidak hanya membawa doktrin teologis, tetapi juga jaringan pendidikan, etika perdagangan, tradisi keilmuan, hubungan sosial, dan struktur solidaritas yang luas. Jalur-jalur perdagangan menjadi medium penting, tetapi yang tumbuh kemudian bukan sekadar relasi ekonomi, melainkan komunitas nilai. Masjid, surau, pesantren, majelis ilmu, dan hubungan antarulama

menjadi simpul-simpul jaringan yang membentuk kehidupan sosial lintas wilayah.

Dalam konteks ini, spiritualitas menjadi kekuatan integratif yang sangat besar. Seorang pedagang dari satu wilayah dapat menemukan rasa keterhubungan dengan komunitas di wilayah lain melalui nilai yang sama. Seorang pelajar dapat berpindah lintas daerah untuk belajar dalam tradisi yang terhubung. Seorang pendakwah dapat membawa pesan yang membangun solidaritas baru. Semua ini menunjukkan bahwa jaringan spiritual bukan sekadar urusan privat, melainkan struktur sosial yang memperkuat keterhubungan kawasan.

Yang lebih penting lagi, jaringan spiritual membawa *worldview*. Dalam bahasa BAB 1, *worldview* adalah cara pandang mendasar tentang manusia, kehidupan, moralitas, hubungan sosial, dan posisi manusia dalam semesta. Ketika *worldview* tertentu bergerak melalui jaringan spiritual, yang berubah bukan hanya praktik ritual, tetapi cara masyarakat memahami realitas. Cara pandang terhadap keadilan, kewajiban moral, hubungan antarmanusia, tanggung jawab sosial, bahkan struktur kekuasaan dapat dipengaruhi oleh perubahan *worldview* semacam ini.

Karena itu spiritualitas harus dipahami sebagai salah satu *source code* paling dalam dalam pembentukan peradaban. Sistem pemerintahan dapat berganti. Struktur ekonomi dapat berubah. Organisasi kekuasaan dapat runtuh. Namun sistem nilai yang tertanam dalam kehidupan kolektif sering bertahan jauh lebih lama. Dalam banyak peradaban besar, kesinambungan justru

lebih banyak dijaga oleh jaringan nilai dibanding struktur kekuasaan formal. Nusantara menunjukkan pola serupa.

Jaringan spiritual juga memperkuat mobilitas intelektual. Tradisi keilmuan tidak pernah benar-benar tumbuh dalam ruang tertutup. Hubungan antara guru dan murid, pusat pembelajaran dan komunitas lokal, jaringan pengajaran dan transmisi teks membentuk sirkulasi pengetahuan yang memperkaya kehidupan kawasan. Ini sangat penting karena peradaban tidak dapat bertahan hanya dengan interaksi ekonomi. Peradaban membutuhkan transmisi gagasan, pendidikan, refleksi moral, dan pengembangan intelektual.

Selain itu, jaringan spiritual membantu membangun solidaritas yang melampaui identitas lokal sempit. Dalam masyarakat kepulauan yang sangat beragam, solidaritas semacam ini sangat penting. Kesamaan nilai tidak menghapus keberagaman budaya, tetapi menciptakan lapisan keterhubungan yang lebih luas. Dalam konteks Nusantara, ini menjadi salah satu unsur yang memungkinkan kawasan ini memiliki pengalaman kolektif yang melampaui fragmentasi geografis.

Namun seperti halnya perdagangan, penting untuk tidak jatuh pada simplifikasi historis. Jaringan spiritual tidak otomatis menciptakan kesatuan pemerintahan modern. Tidak setiap keterhubungan nilai berarti lahirnya nasionalisme modern. Klaim seperti itu akan terlalu anakronistik. Yang sedang ditegaskan adalah keberadaan infrastruktur sosial-

peradaban yang memperkuat konektivitas kawasan dalam lapisan yang lebih mendalam daripada sekadar hubungan ekonomi.

Dalam analogi sistem yang digunakan sepanjang buku ini, jika perdagangan dapat dipahami sebagai protokol komunikasi material, maka jaringan spiritual dapat dipahami sebagai lapisan transfer nilai dalam *source code* Nusantara. Tanpa lapisan nilai, sistem hanya menjadi mekanisme pertukaran fungsi tanpa orientasi moral. Dengan lapisan nilai, keterhubungan memperoleh arah peradaban. Inilah yang membuat jaringan spiritual menjadi sangat penting dalam pembentukan fondasi historis Nusantara.

Dengan demikian, tesis subbab ini sangat jelas, bahwa Nusantara tidak hanya terhubung oleh barang, tetapi juga oleh makna. Tidak hanya oleh perdagangan, tetapi juga oleh nilai. Tidak hanya oleh mobilitas manusia, tetapi juga oleh sirkulasi *worldview*. Jaringan spiritual menjadi salah satu fondasi terdalam dari keterhubungan peradaban kawasan ini.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan yang lebih mendasar, yakni jika perdagangan dan spiritualitas telah membangun keterhubungan yang kuat, apakah semua itu melahirkan bentuk awal kesadaran kolektif tentang ruang kepulauan sebagai satu ekosistem kehidupan. Dari sanalah pembahasan akan bergerak menuju kesadaran kepulauan sebagai embrio identitas bersama.

4.7. Kesadaran Kepulauan sebagai Embrio Identitas Bersama

Setelah menelusuri perdagangan sebagai sistem penyatu dan jaringan spiritual sebagai medium sirkulasi nilai, pembahasan berikutnya harus bergerak ke lapisan yang lebih mendalam, yaitu kemungkinan lahirnya kesadaran kolektif tentang ruang hidup bersama.

Pada titik ini, penting untuk menjaga ketelitian konseptual. Buku ini tidak sedang mengklaim bahwa nasionalisme modern Indonesia telah hadir dalam bentuk yang utuh pada masa lampau. Klaim semacam itu terlalu sederhana, tidak akurat secara historis, dan berisiko memaksakan kategori kekuasaan abad modern ke konteks sejarah yang sangat berbeda. Namun menolak klaim tersebut bukan berarti menafikan keberadaan embrio kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman panjang keterhubungan kawasan. Di sinilah konsep kesadaran kepulauan menjadi sangat penting.

Kesadaran kepulauan bukan nasionalisme modern dalam pengertian formal. Kesadaran kepulauan adalah pengenalan bertahap terhadap kenyataan bahwa kehidupan di kawasan ini tidak sepenuhnya terpisah meskipun terbentang dalam bentuk geografis yang tampak terfragmentasi. Kesadaran ini lahir bukan dari deklarasi kekuasaan tunggal, melainkan dari pengalaman hidup yang berulang selama berabad-abad. Perdagangan menciptakan interdependensi. Mobilitas manusia menciptakan keterhubungan sosial. Jaringan spiritual membangun kesamaan nilai. Hubungan kekuasaan membentuk pengalaman relasional antarwilayah.

Semua ini perlahan membentuk pemahaman bahwa kepulauan ini bukan sekadar kumpulan ruang yang tidak saling berkaitan.

Dalam cara pandang geografis yang dangkal, kepulauan sering dibaca sebagai simbol keterpisahan. Laut dianggap sebagai pemisah alami yang memecah kehidupan manusia menjadi unit-unit terisolasi. Namun sejarah Nusantara justru menunjukkan logika yang sangat berbeda. Laut di kawasan ini lebih sering berfungsi sebagai jalur kehidupan daripada sebagai batas keterputusan. Bagi masyarakat maritim, laut bukan ruang kosong yang memisahkan, melainkan koridor yang menghubungkan. Cara pandang ini sangat penting karena memengaruhi bagaimana manusia memahami dirinya dalam relasi dengan ruang.

Jika laut dipahami sebagai pemisah, maka identitas cenderung berkembang secara tertutup dan lokalistik. Jika laut dipahami sebagai penghubung, maka identitas memiliki peluang berkembang melalui interaksi dan keterhubungan. Nusantara tumbuh dalam pengalaman kedua. Jalur pelayaran memungkinkan mobilitas antarpulau. Pelabuhan menjadi simpul interaksi. Komoditas bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Gagasan spiritual berpindah mengikuti arus manusia. Bahasa-bahasa saling bersentuhan. Dengan pola seperti ini, kesadaran tentang ruang bersama memiliki fondasi pengalaman yang nyata.

Penting untuk memahami bahwa identitas kolektif tidak selalu lahir pertama kali melalui dokumen pemerintahan. Dalam banyak kasus sejarah, identitas justru tumbuh dari pengalaman sosial yang

berlangsung berulang. Manusia yang terus berinteraksi akan mengembangkan pola pengenalan terhadap satu sama lain. Komunitas yang terhubung melalui kebutuhan bersama akan membangun rasa keterikatan tertentu. Kesadaran kolektif sering lahir lebih dahulu sebagai pengalaman hidup sebelum kemudian diformalkan dalam bentuk legitimasi. Nusantara memberikan banyak contoh tentang dinamika seperti ini.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan nasib kolektif. Jika kerangka ini digunakan secara hati-hati, maka pertanyaan pentingnya bukan apakah bangsa Indonesia modern sudah eksis secara penuh di masa lampau, melainkan apakah telah ada unsur-unsur pengalaman kolektif yang menjadi bahan mentah bagi pembentukan identitas yang lebih besar. Jawaban historis terhadap pertanyaan ini menunjukkan banyak indikasi yang signifikan.

Interdependensi ekonomi, misalnya, menciptakan pengalaman bahwa kehidupan satu wilayah tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Kebutuhan terhadap komoditas tertentu, stabilitas jalur perdagangan, keamanan pelayaran, dan relasi pasar menciptakan kesadaran praktis tentang keterhubungan. Demikian pula jaringan spiritual menciptakan hubungan nilai yang melampaui lokalitas sempit. Komunitas yang berbagi pandangan hidup tertentu akan memiliki lapisan solidaritas yang lebih luas daripada sekadar kedekatan geografis.

Hubungan antarentitas kekuasaan juga memperkuat pengalaman ini. Baik melalui aliansi, pengaruh, patronase, diplomasi, maupun kompetisi, interaksi antarkerajaan memperlihatkan bahwa kawasan ini tidak hidup dalam isolasi mutlak. Bahkan konflik sekalipun merupakan bentuk relasi. Hubungan tidak selalu harmonis, tetapi keberadaan relasi menunjukkan pengenalan terhadap keberadaan pihak lain dalam satu medan kehidupan yang sama. Dalam konteks sejarah, kesadaran tentang medan bersama sering tumbuh melalui dinamika semacam ini.

Bahasa juga memainkan peran penting. Dalam ruang perdagangan dan interaksi maritim, kebutuhan komunikasi melahirkan medium-medium penghubung. Bahasa bukan sekadar alat bicara, tetapi instrumen pembentuk kesadaran sosial. Ketika komunitas yang berbeda mulai menemukan cara berkomunikasi, ruang keterhubungan menjadi lebih luas. Bahasa membantu membangun kepercayaan, negosiasi, pertukaran pengetahuan, dan hubungan sosial. Dalam konteks ini, perkembangan medium komunikasi lintas komunitas merupakan bagian dari proses pembentukan kesadaran kolektif.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa kesadaran kepulauan bukan berarti keseragaman total. Nusantara sejak awal merupakan ruang keberagaman yang sangat kaya. Bahasa berbeda. Tradisi berbeda. Sistem sosial berkembang dalam variasi yang luas. Struktur kekuasaan tidak seragam. Namun keberagaman tidak otomatis meniadakan keterhubungan. Justru salah satu kekuatan besar Nusantara adalah kemampuan

membangun relasi di tengah pluralitas. Identitas kolektif yang sehat tidak selalu lahir dari homogenitas, melainkan dari kemampuan membangun kesadaran bersama tanpa menghapus keragaman.

Dalam kerangka *source code* Nusantara, kesadaran kepulauan dapat dipahami sebagai salah satu logika dasar yang memungkinkan sistem kehidupan kawasan ini bekerja. Sebuah jaringan yang hidup membutuhkan lebih dari sekadar koneksi teknis. Jaringan juga membutuhkan pengenalan terhadap keberadaan sistem bersama. Dalam analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, konektivitas tanpa kesadaran sistem hanya menghasilkan lalu lintas fungsi. Namun ketika muncul pemahaman tentang ekosistem bersama, jaringan mulai memiliki orientasi yang lebih dalam. Kesadaran kepulauan adalah bentuk awal dari orientasi tersebut.

Penting juga untuk membedakan kesadaran kepulauan dari konsep negara modern. Kesadaran ini belum berarti adanya konstitusi bersama, pemerintahan terpusat, kewarganegaraan formal, atau sistem kekuasaan nasional. Yang sedang dibahas adalah lapisan yang lebih mendasar, adalah kesadaran relasional tentang hidup dalam ruang keterhubungan. Ini penting karena identitas kebangsaan modern tidak lahir dari ruang kosong. Sebuah bangsa membutuhkan memori, pengalaman, dan narasi yang memberi kedalaman historis terhadap keberadaannya.

Jika Indonesia dipahami semata-mata sebagai konstruksi pemerintahan abad ke-20 tanpa akar peradaban yang lebih tua, maka identitas kebangsaan

menjadi sangat dangkal. Namun jika Indonesia dipahami sebagai fase pemerintahan modern yang tumbuh di atas pengalaman panjang keterhubungan Nusantara, maka identitas tersebut memperoleh kedalaman sejarah yang jauh lebih kuat. Kesadaran kepulauan menjadi jembatan penting antara peradaban lama dan konstruksi kebangsaan modern.

Dengan demikian, tesis subbab ini harus ditegaskan secara cermat, bahwa Nusantara tidak melahirkan nasionalisme modern dalam bentuk yang sama seperti abad ke-20, tetapi Nusantara membentuk pengalaman keterhubungan yang memungkinkan tumbuhnya embrio kesadaran kolektif. Embrio inilah yang menjadi salah satu bahan historis penting dalam pembentukan identitas bersama pada tahap sejarah berikutnya.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak menuju sintesis yang lebih eksplisit. Jika Nusantara memiliki jaringan perdagangan, sirkulasi spiritual, pengalaman pemerintahan, dan kesadaran kepulauan yang panjang, maka kesimpulan yang tak terhindarkan adalah bahwa Indonesia modern bukan titik awal peradaban kawasan ini. Indonesia adalah fase baru yang berdiri di atas fondasi yang jauh lebih tua.

4.8. Indonesia adalah Fase Kekuasaan, Bukan Titik Awal Peradaban

Setelah menelusuri Nusantara sebagai ruang peradaban, melihat keberadaan jaringan kehidupan sebelum lahirnya negara modern, membaca Sriwijaya sebagai arsitektur konektivitas maritim, memahami

Majapahit sebagai ekspresi imajinasi kekuasaan kepulauan, menelaah perdagangan sebagai sistem penyatu, serta menempatkan jaringan spiritual sebagai medium sirkulasi nilai, pembahasan pada bab ini akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting, yaitu Indonesia bukan titik awal peradaban kawasan ini. Indonesia adalah fase pemerintahan modern yang lahir di atas fondasi sejarah yang jauh lebih tua. Penegasan ini sangat penting, karena tanpa pemahaman tersebut, identitas kebangsaan mudah terjebak dalam cara pandang yang terlalu sempit dan terlalu pendek secara historis.

Salah satu kekeliruan paling umum dalam memahami Indonesia adalah kecenderungan memperlakukan kemerdekaan formal sebagai titik nol sejarah. Dalam cara pandang seperti ini, seolah-olah segala sesuatu baru dimulai ketika republik berdiri. Sejarah sebelumnya diperlakukan sekadar sebagai latar belakang yang terputus dari kehidupan kebangsaan modern. Nusantara dipahami sebagai ruang geografis pasif yang baru memperoleh makna ketika negara modern dibentuk. Cara pandang semacam ini tidak hanya dangkal, tetapi juga merugikan secara filosofis, karena memutus hubungan bangsa dengan akar peradabannya sendiri.

Negara modern memang merupakan bentuk kekuasaan yang sangat penting. Republik Indonesia adalah hasil perjuangan besar yang melibatkan kesadaran kebangsaan, perlawanan antikolonial, artikulasi pemerintahan modern, serta penyusunan struktur konstitusional yang menjadi dasar kehidupan

bernegara saat ini. Semua itu merupakan tonggak historis yang sangat penting. Namun pentingnya republik tidak berarti sejarah bangsa dimulai pada saat republik lahir. Sebuah negara dapat lahir pada satu momen tertentu, tetapi peradaban yang menopangnya sering kali telah berproses jauh sebelumnya.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa tidak identik dengan negara. Negara adalah organisasi kekuasaan. Bangsa adalah entitas yang dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan nasib kolektif. Jika kerangka ini diterapkan secara konsisten, maka keberadaan negara Indonesia tidak dapat dipahami sebagai awal dari seluruh pengalaman kolektif kawasan ini. Negara adalah bentuk organisasi pemerintahan modern. Bangsa dan peradaban memiliki kedalaman waktu yang jauh lebih panjang. Karena itu, memahami Indonesia hanya sebagai konstruksi administratif modern tanpa akar sejarah yang lebih tua merupakan penyederhanaan yang serius.

Yang telah ditunjukkan dalam subbab-subbab sebelumnya adalah keberadaan lapisan-lapisan historis yang membentuk fondasi kehidupan kolektif kawasan ini. Sriwijaya menunjukkan kapasitas membangun jaringan maritim dan pusat spiritual-intelektual. Majapahit menunjukkan ekspresi imajinasi integratif terhadap ruang kepulauan. Perdagangan menunjukkan interdependensi material yang menghubungkan komunitas lintas wilayah. Jaringan spiritual menunjukkan sirkulasi *worldview*, nilai, moral, dan tata hidup. Kesadaran kepulauan menunjukkan bahwa keterhubungan tersebut perlahan membentuk

pengenalan terhadap ruang hidup bersama. Seluruh elemen ini memperlihatkan bahwa sebelum republik modern berdiri, telah ada pengalaman peradaban yang panjang.

Penting untuk menegaskan bahwa hubungan antara Nusantara dan Indonesia bukan hubungan identitas literal. Buku ini tidak sedang mengklaim bahwa Sriwijaya adalah Indonesia, bahwa Majapahit identik dengan republik modern, atau bahwa nasionalisme abad ke-20 sudah hadir dalam bentuk yang sama pada masa lampau. Klaim semacam itu terlalu sederhana, tidak akurat secara akademik, dan cenderung mencampuradukkan kategori sejarah yang berbeda. Hubungan yang lebih tepat adalah hubungan genealogis. Indonesia adalah fase kekuasaan baru yang tumbuh di atas memori, pengalaman, dan jejak peradaban yang telah lebih dahulu hidup.

Istilah genealogis sangat penting di sini. Genealogi tidak berarti kesamaan bentuk, tetapi kesinambungan lapisan sejarah. Seorang manusia dewasa tidak identik dengan masa kanak-kanaknya, tetapi keberadaan masa kanak-kanak tetap menjadi bagian dari sejarah pembentukannya. Demikian pula Indonesia modern tidak identik dengan struktur kekuasaan pra-modern, tetapi pengalaman sejarah Nusantara tetap menjadi bagian dari lapisan pembentuk identitas kebangsaan. Tanpa memahami genealogi tersebut, identitas nasional mudah berubah menjadi konstruksi kekuasaan yang dangkal dan kehilangan kedalaman peradaban.

Dalam konteks *source code* Nusantara, analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini menjadi sangat relevan. Sebuah sistem digital yang tampak modern di permukaan tetap dibangun di atas lapisan kode dasar yang lebih tua. Pengguna mungkin hanya melihat antarmuka terbaru, tetapi stabilitas sistem sering ditentukan oleh fondasi yang tidak terlihat. Dalam konteks kebangsaan, republik modern dapat dipahami sebagai bentuk antarmuka pemerintahan kontemporer, sementara peradaban Nusantara merupakan bagian dari *source code* historis yang memberi kedalaman identitas dan orientasi sistem.

Cara pandang ini sangat penting karena memengaruhi bagaimana bangsa memahami dirinya sendiri. Bangsa yang menganggap dirinya lahir dari ruang kosong akan cenderung rapuh secara identitas. Bangsa yang tidak memahami akar sejarahnya akan lebih mudah menerima narasi bahwa keberadaannya hanya hasil konstruksi administratif modern atau produk kebetulan geopolitik. Sebaliknya, bangsa yang memahami lapisan peradabannya akan memiliki fondasi identitas yang lebih kuat, karena memahami bahwa kehidupan kolektifnya memiliki kedalaman sejarah yang panjang.

Namun pemahaman tentang akar peradaban tidak boleh berubah menjadi romantisme masa lalu yang tidak kritis. Sejarah bukan museum nostalgia. Tujuan menelusuri Nusantara bukan untuk membangun glorifikasi buta terhadap masa lampau, melainkan untuk memahami fondasi konseptual dari kehidupan kebangsaan. Peradaban lama tidak harus

disalin mentah-mentah ke masa kini. Yang perlu diambil adalah logika, pelajaran, orientasi, dan kesadaran tentang akar identitas kolektif. Dengan pendekatan seperti ini, sejarah menjadi sumber refleksi, bukan alat propaganda romantik.

Dalam kerangka buku ini, poin tersebut sangat penting karena pembahasan tidak berhenti pada sejarah. Buku ini sedang membangun kritik terhadap cara memahami negara, kedaulatan, dan sistem kebangsaan. Jika Indonesia adalah fase pemerintahan modern yang berdiri di atas peradaban yang lebih tua, maka desain negara modern seharusnya tidak boleh sepenuhnya terputus dari *source code* peradaban yang membentuk masyarakatnya. Ketika struktur kekuasaan modern kehilangan hubungan dengan akar peradaban, maka sistem berisiko menjadi artifisial, kering, dan kehilangan legitimasi kultural.

Peradaban bukan sekadar cerita masa lalu. Peradaban adalah sumber *worldview*. Dalam BAB 1, *worldview* dijelaskan sebagai bagian penting dari peradaban yang membentuk cara manusia memahami kehidupan, kekuasaan, moralitas, dan tata hidup. Jika republik modern dibangun tanpa memahami *worldview* yang tumbuh dari sejarah masyarakatnya sendiri, maka negara dapat berubah menjadi mesin administratif yang bekerja secara formal tetapi terasing dari basis kebudayaannya. Inilah salah satu akar dari banyak krisis kebangsaan modern.

Dengan demikian, memahami bahwa Indonesia adalah fase kekuasaan, bukan titik awal peradaban, bukan sekadar koreksi sejarah. Ini adalah koreksi

filosofis terhadap cara memahami negara. Negara bukan pencipta bangsa. Negara bukan pencipta peradaban. Negara adalah instrumen yang lahir dalam momen sejarah tertentu untuk mengorganisasi kehidupan kolektif yang telah memiliki akar jauh lebih tua. Pemahaman ini sangat penting untuk mengembalikan proporsi yang sehat antara negara, bangsa, dan peradaban.

Tesis utama subbab ini karena itu harus ditegaskan secara jelas, bahwa Indonesia bukan awal dari cerita, melainkan salah satu bab dalam perjalanan panjang peradaban Nusantara. Republik adalah bentuk pemerintahan modern. Nusantara adalah lapisan peradaban yang lebih tua. Bangsa Indonesia berdiri bukan di atas kekosongan, melainkan di atas memori, nilai, interaksi, dan pengalaman sejarah yang telah berproses selama berabad-abad.

Kesadaran ini menjadi jembatan penting menuju pembahasan berikutnya. Jika Indonesia modern berdiri di atas *source code* peradaban Nusantara, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat mendasar adalah, apakah negara modern yang dibangun benar-benar selaras dengan *source code* tersebut, atau justru mengalami deviasi dari fondasi peradabannya sendiri. Dari pertanyaan itulah analisis buku ini akan bergerak ke lapisan kritik yang lebih tajam terhadap desain negara modern Indonesia.

BAB 5
MULTI-CIVILIZATIONAL PLATFORM

5.1. Indonesia Bukan Bangsa Tunggal yang Homogen

Salah satu kesalahan paling mendasar dalam memahami Indonesia adalah kecenderungan melihat Indonesia sebagai bangsa tunggal yang homogen, seolah-olah seluruh wilayah yang kini berada dalam satu struktur negara memiliki asal-usul peradaban, pola budaya, pengalaman sejarah, dan struktur nilai yang seragam sejak awal. Cara pandang seperti ini mungkin tampak sederhana dan memudahkan penyederhanaan narasi kebangsaan, tetapi secara historis maupun filosofis sangat problematik. Indonesia bukan produk dari satu etnis tunggal, bukan ekspresi dari satu kebudayaan lokal yang diperluas, dan bukan kelanjutan linear dari satu peradaban tunggal yang mendominasi seluruh kawasan. Indonesia lahir sebagai konstruksi kebangsaan modern yang berdiri di atas pertemuan banyak lapisan peradaban yang telah tumbuh jauh sebelumnya.

Pemahaman tentang homogenitas bangsa sering dipengaruhi oleh model *nation-state* Eropa modern. Dalam model tersebut, negara kerap tumbuh dari konsolidasi etnis dominan, bahasa nasional tunggal, pengalaman sejarah yang relatif lebih terkonsentrasi, dan struktur identitas yang dibangun di atas homogenisasi yang kuat. Meskipun realitas Eropa sendiri jauh lebih kompleks daripada gambaran tersebut, model inilah yang sering secara tidak sadar digunakan untuk membaca bangsa-bangsa modern di

luar Eropa. Akibatnya, Indonesia kerap dipaksa masuk ke dalam kerangka yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas historis dan peradabannya sendiri.

Indonesia tidak lahir dari satu bangsa etnis yang kemudian membangun negara. Indonesia justru lahir dari kesepakatan pemerintahan modern yang mempertemukan banyak komunitas historis yang memiliki pengalaman peradaban masing-masing. Di dalam ruang yang kini disebut Indonesia, telah hidup tradisi maritim Sumatra, struktur organisasi sosial Jawa, kosmologi Bali, ketahanan komunal Nusa Tenggara, hubungan ekologis Kalimantan, etos mobilitas Sulawesi, keterhubungan global Maluku, dan kompleksitas kosmologis Papua, beserta banyak lapisan lain yang jauh lebih kaya daripada daftar sederhana apa pun. Karena itu, memahami Indonesia sebagai bangsa

homogen berarti mengabaikan kenyataan paling mendasar tentang komposisinya sendiri.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan nasib kolektif. Jika definisi tersebut dibaca secara serius, maka Indonesia tidak dapat dipahami sebagai bangsa homogen yang lahir dari satu memori lokal tunggal. Memori yang membentuk Indonesia bersifat berlapis. Sejarah yang membentuk Indonesia bersifat plural. Solidaritas yang menopang Indonesia lahir bukan dari keseragaman identitas asal, tetapi dari keputusan kolektif untuk membangun kebersamaan di tengah keragaman peradaban. Dengan demikian, Indonesia adalah konstruksi kebangsaan yang jauh lebih kompleks daripada model homogen sederhana.

BAB sebelumnya telah menunjukkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi Nusantara sebagai ruang peradaban yang lebih tua daripada republik modern. Namun Nusantara sendiri bukan ruang yang homogen. Nusantara adalah ekosistem peradaban yang plural. Terdapat jaringan perdagangan, sirkulasi spiritual, interaksi, dan pengalaman keterhubungan lintas kawasan, tetapi seluruh proses tersebut tidak menghapus keragaman internal. Justru kekhasan Nusantara terletak pada kemampuannya membangun keterhubungan di tengah pluralitas. Dari sinilah pentingnya memahami Indonesia bukan sebagai peleburan total yang menghapus perbedaan, melainkan sebagai *platform* yang menampung keberagaman peradaban.

Istilah "*platform*" dalam konteks buku ini bukan pilihan kebahasaan yang kebetulan. Dalam analogi teknologi yang telah dibangun sejak awal, *platform* adalah lingkungan sistem yang memungkinkan berbagai komponen berbeda bekerja dalam satu ekosistem operasional. Sebuah *platform* tidak harus membuat seluruh aplikasi menjadi identik. Justru kekuatan *platform* terletak pada kemampuannya menampung keragaman fungsi dalam arsitektur yang terkoordinasi. Dengan logika yang sama, Indonesia tidak harus dipahami sebagai proyek homogenisasi total, melainkan sebagai ruang kebangsaan yang menampung berbagai warisan peradaban dalam satu konstruksi bersama.

Pemahaman ini sangat penting karena kesalahan membaca Indonesia sebagai bangsa homogen sering melahirkan distorsi kebijakan. Jika negara menganggap seluruh masyarakat memiliki pola sejarah, budaya, dan logika sosial yang identik, maka desain kebijakan cenderung seragam secara berlebihan. Keragaman diperlakukan sebagai gangguan administratif. Perbedaan nilai lokal dianggap hambatan integrasi. Struktur kebangsaan berubah menjadi mesin standardisasi. Padahal bangsa yang dibangun dari pluralitas peradaban justru membutuhkan pendekatan yang memahami keragaman sebagai bagian dari struktur dasarnya.

Penting untuk menegaskan bahwa menyatakan Indonesia bukan bangsa homogen bukan berarti menolak keberadaan identitas nasional. Argumen buku ini bukan anti-kebangsaan. Justru sebaliknya, argumen

ini berusaha memperkuat pemahaman kebangsaan dengan fondasi yang lebih akurat. Identitas nasional yang sehat tidak harus dibangun di atas mitos homogenitas. Identitas nasional dapat tumbuh dari kesadaran bersama, kesepakatan nilai, solidaritas historis, dan tujuan kolektif, meskipun masyarakat yang membentuknya berasal dari lapisan peradaban yang beragam.

Dalam konteks ini, Indonesia lebih tepat dipahami sebagai bangsa peradaban, bukan bangsa etnis homogen. Bangsa peradaban adalah komunitas kebangsaan yang lahir dari keputusan hidup bersama dalam satu struktur kekuasaan, sambil membawa warisan peradaban yang plural. Pendekatan ini jauh lebih sesuai dengan realitas Indonesia. Tidak ada satu peradaban lokal yang dapat secara sah mengklaim diri sebagai satu-satunya representasi asli Indonesia. Indonesia bukan milik satu akar budaya tunggal. Indonesia adalah hasil perjumpaan, negosiasi, dan sintesis dari banyak akar.

Kesalahan lain yang sering muncul adalah kecenderungan melihat pluralitas Indonesia hanya sebagai persoalan "keberagaman budaya" dalam arti folkloristik yang dangkal. Keragaman sering direduksi menjadi pakaian adat, tarian, makanan khas, atau simbol-simbol budaya permukaan. Padahal yang jauh lebih penting adalah keragaman *worldview*, struktur nilai, logika sosial, relasi dengan alam, konsep kehormatan, model kepemimpinan, dan tata kehidupan yang berkembang dalam berbagai peradaban kawasan. Buku ini tidak sedang membicarakan pluralitas sebagai

katalog budaya, tetapi pluralitas sebagai struktur peradaban.

Dalam BAB 1, peradaban dijelaskan sebagai himpunan *worldview*, nilai, ilmu, moral, spiritualitas, budaya, estetika, dan tata hidup. Jika definisi ini digunakan, maka keragaman Indonesia bukan sekadar variasi ekspresi budaya, tetapi variasi lapisan peradaban yang nyata. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Indonesia adalah ruang pertemuan berbagai sistem makna, bukan sekadar kumpulan daerah administratif.

Namun pluralitas peradaban tidak berarti fragmentasi yang mustahil dipersatukan. Justru salah satu kekuatan Indonesia adalah keberadaan nilai-nilai lintas peradaban yang saling beririsan. Gotong royong, kehormatan, musyawarah, adab, rasa malu, amanah, dan spiritualitas muncul dalam berbagai bentuk di banyak kawasan meskipun ekspresinya berbeda. Kesamaan nilai semacam inilah yang memungkinkan kebersamaan tanpa harus menghapus kekhasan masing-masing peradaban.

Dalam kerangka *source code*, Indonesia dapat dipahami sebagai sistem yang dibangun bukan di atas satu modul tunggal, melainkan di atas integrasi berbagai subsistem peradaban. Jika integrasi dipahami secara sehat, keberagaman menjadi kekuatan. Jika integrasi dipaksakan melalui homogenisasi, sistem justru kehilangan kompatibilitas dengan komponen-komponen dasarnya. Inilah sebabnya memahami Indonesia sebagai bangsa homogen bukan hanya salah

secara historis, tetapi juga berbahaya secara desain kebangsaan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan secara jelas, bahwa Indonesia bukan bangsa tunggal yang homogen dalam pengertian etnis atau peradaban tunggal. Indonesia adalah konstruksi kebangsaan modern yang berdiri di atas pluralitas peradaban yang telah hidup jauh sebelumnya. Kesatuan Indonesia tidak lahir dari penghapusan keragaman, tetapi dari kemampuan membangun *platform* bersama di atas perbedaan yang nyata.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak lebih konkret menuju pemetaan lapisan-lapisan peradaban yang membentuk Indonesia. Sebab untuk memahami Indonesia sebagai *platform* multi-peradaban, perlu dilihat bagaimana karakter peradaban besar di berbagai kawasan memberi kontribusi terhadap struktur kebangsaan yang ada hari ini.

5.2. Sumatra: Peradaban Maritim, Dagang, dan Spiritualitas Jaringan

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Sumatra menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu simpul peradaban utama yang membentuk wajah kebangsaan Indonesia. Sumatra bukan sekadar pulau besar di bagian barat republik modern, melainkan ruang peradaban yang sejak lama hidup dalam arus perdagangan, mobilitas manusia, pertukaran gagasan, dan sirkulasi spiritualitas lintas kawasan. Karakter historis tersebut menjadikan Sumatra sebagai salah satu fondasi penting dalam *source*

code kebangsaan Indonesia. Membaca Sumatra hanya sebagai wilayah administratif modern akan menghasilkan pemahaman yang dangkal, karena yang sesungguhnya hadir adalah bentang peradaban yang kaya, plural, dinamis, dan terhubung secara historis dengan dunia luar.

Namun Sumatra sendiri bukan entitas homogen. Sumatra merupakan ruang besar yang dihuni oleh banyak komunitas peradaban dengan sejarah, struktur sosial, dan ekspresi budaya yang beragam. Di wilayah utara berkembang peradaban Aceh dengan jejak martabat kekuasaan dan spiritualitas yang kuat, komunitas Gayo dan Alas dengan karakter pegunungan dan solidaritas komunal, serta berbagai rumpun Batak seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Simalungun yang memperlihatkan kekayaan struktur genealogis, organisasi sosial, dan tradisi komunitas yang khas. Di kawasan kepulauan terdapat Nias dengan karakter kehormatan dan kekuatan komunitas yang menonjol.

Di bagian barat berkembang Minangkabau dengan tradisi intelektual, mobilitas diaspora, dan struktur adat yang kuat, sementara Mentawai menunjukkan hubungan yang khas antara manusia, komunitas, dan lingkungan hidup. Di kawasan timur dan tengah tumbuh tradisi Melayu dalam berbagai ekspresi seperti Melayu Riau, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang yang memiliki jejak kuat dalam perdagangan, bahasa, diplomasi, dan jaringan maritim. Di wilayah selatan berkembang Lampung, Komering, Ogan, Rejang, dan Kerinci yang masing-masing

membawa lapisan pengalaman historis dan karakter sosial yang memperkaya struktur besar Sumatra sebagai ruang peradaban. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Sumatra bukan satu budaya tunggal, melainkan ekosistem peradaban yang hidup dalam pluralitas.

Yang menyatukan mozaik besar tersebut bukan keseragaman etnis, melainkan pola keterhubungan historis yang sangat kuat. Sumatra sejak lama hidup dalam logika maritim. Laut bukan dipahami sebagai batas pemisah, melainkan jalur mobilitas dan interaksi. Letak geografis yang strategis menjadikan kawasan ini berada di jalur penting antara Samudra Hindia, Selat Malaka, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga kawasan Asia Timur. Namun sebagaimana telah ditegaskan dalam pembahasan sebelumnya, posisi strategis tidak otomatis melahirkan peradaban besar. Yang membedakan Sumatra adalah kemampuan mengubah posisi geografis menjadi jaringan kehidupan yang aktif.

Dalam konteks ini, perdagangan menjadi salah satu unsur pembentuk paling penting. Sumatra berkembang bukan sebagai ruang tertutup yang hidup dalam isolasi, melainkan sebagai kawasan yang terbiasa berinteraksi dengan dunia luar. Aktivitas perdagangan tidak hanya membentuk kekuatan ekonomi, tetapi juga menciptakan budaya negosiasi, keterbukaan sosial, kemampuan adaptasi, dan pengalaman hidup dalam pluralitas. Pelabuhan, jalur sungai, pesisir, dan pusat-pusat perdagangan menjadi simpul tempat manusia dari berbagai latar belakang bertemu, bertukar, berinteraksi, dan membangun relasi. Dari ruang-ruang semacam inilah tumbuh peradaban yang outward-

looking, terbuka terhadap konektivitas, namun tetap menjaga identitas internal.

Dalam BAB 4 telah dibahas bagaimana Sriwijaya menjadi salah satu bukti paling nyata dari kapasitas Sumatra dalam membangun arsitektur jaringan maritim yang kompleks. Warisan tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa Sumatra bukan sekadar wilayah penerima arus global, melainkan aktor aktif dalam membentuk dinamika kawasan. Tradisi maritim semacam ini meninggalkan jejak panjang dalam karakter peradaban Sumatra. Mobilitas, perdagangan, relasi diplomatik, dan konektivitas bukan unsur asing, melainkan bagian dari ritme historis kawasan ini.

Namun perdagangan hanya satu lapisan. Lapisan lain yang sama pentingnya adalah spiritualitas jaringan. Sumatra memiliki posisi yang sangat kuat dalam sejarah sirkulasi spiritualitas Nusantara. Aceh, misalnya, menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan keilmuan Islam yang menghubungkan Nusantara dengan dunia yang lebih luas. Mandailing juga memiliki jejak kuat dalam tradisi intelektual Islam. Minangkabau memperlihatkan dinamika yang kaya dalam hubungan antara adat, agama, dan mobilitas sosial. Tradisi Melayu turut menjadi medium penting dalam penyebaran bahasa, etika sosial, dan nilai spiritual. Ini menunjukkan bahwa Sumatra tidak hanya terhubung melalui barang, tetapi juga melalui *worldview*.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa peradaban terdiri dari *worldview*, nilai, ilmu, moral, spiritualitas, budaya, estetika, dan tata hidup. Jika kerangka ini

digunakan, maka Sumatra memperlihatkan peradaban yang sangat kaya dalam dimensi tersebut. Perdagangan membawa keterhubungan material. Spiritualitas membawa sirkulasi nilai. Struktur komunitas menjaga solidaritas internal. Tradisi intelektual membentuk kesadaran reflektif. Bahasa menjadi medium konektivitas sosial. Semua unsur tersebut membentuk ekosistem peradaban yang jauh melampaui batas administratif modern.

Salah satu karakter penting Sumatra adalah kemampuan memadukan keterbukaan dengan identitas. Peradaban yang hidup dalam jalur perdagangan global sering menghadapi risiko kehilangan karakter internal akibat tekanan eksternal. Namun sejarah Sumatra menunjukkan pola yang lebih kompleks. Keterhubungan dengan dunia luar tidak selalu berarti peleburan identitas. Justru banyak komunitas di Sumatra menunjukkan kemampuan beradaptasi sambil mempertahankan struktur sosial, nilai, dan martabat kolektifnya sendiri. Ini adalah kualitas peradaban yang sangat penting.

Dalam kerangka *multi-civilizational platform*, Sumatra membawa logika konektivitas. Dalam analogi sistem yang digunakan sepanjang buku ini, Sumatra dapat dipahami sebagai salah satu network node utama dalam arsitektur kebangsaan Indonesia. Sebuah sistem besar membutuhkan kemampuan membangun relasi, komunikasi, mobilitas, dan distribusi. Sumatra membawa warisan tersebut dalam bentuk historis yang sangat kuat. Tanpa memahami kontribusi Sumatra,

pembacaan terhadap Indonesia akan kehilangan salah satu fondasi pentingnya.

Namun penting untuk menegaskan bahwa membaca Sumatra sebagai simpul peradaban tidak berarti menyederhanakan seluruh kompleksitas internalnya menjadi satu formula tunggal. Justru kekuatan Sumatra terletak pada pluralitas internal yang tetap hidup dalam pola keterhubungan bersama. Ini sangat selaras dengan tesis besar buku ini bahwa Indonesia bukan bangsa homogen, melainkan *platform* multi-peradaban.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, Sumatra adalah salah satu pilar utama *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan karakter historis sebagai peradaban maritim, dagang, dan spiritualitas jaringan. Kontribusi Sumatra terhadap Indonesia bukan sekadar teritorial, melainkan warisan peradaban yang membentuk cara bangsa ini memahami konektivitas, keterbukaan, mobilitas, dan sirkulasi nilai. Dari titik ini, pembahasan bergerak menuju simpul peradaban lain yang sangat menentukan dalam pembentukan Indonesia modern, yaitu Jawa, dengan warisan organisasi sosial, tata kekuasaan, simbol legitimasi, dan arsitektur kehidupan kolektif.

5.3. Jawa: Peradaban Organisasi, Tata, dan Simbol Kekuasaan

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Jawa menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu simpul peradaban dengan pengaruh besar terhadap pembentukan

organisasi sosial, tata kehidupan kolektif, simbol legitimasi, dan arsitektur kekuasaan. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa "Jawa" dalam konteks ini tidak dipahami sebagai entitas tunggal yang homogen. Kawasan yang secara kultural terhubung dengan ruang Jawa justru memperlihatkan pluralitas internal yang sangat kaya.

Di dalam bentang ini terdapat tradisi Jawa dengan berbagai ekspresi historisnya, peradaban Sunda dengan karakter sosial dan budaya yang kuat, komunitas Baduy dengan keteguhan tata hidup yang khas, Betawi sebagai simpul urban pertemuan berbagai pengaruh, Cirebon sebagai ruang persilangan budaya, Banyumas dengan karakter sosial tersendiri, Osing di ujung timur Jawa, komunitas Tengger dengan kedalaman tradisi spiritual pegunungan, hingga Madura dengan etos kehormatan dan solidaritas yang sangat kuat. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Jawa bukan satu warna tunggal, melainkan mozaik peradaban yang kompleks.

Namun di tengah pluralitas tersebut, terdapat pola historis yang cukup konsisten dalam kontribusi kawasan ini terhadap struktur kebangsaan Indonesia. Jika Sumatra membawa logika keterhubungan maritim dan jaringan perdagangan-spiritual, maka kawasan Jawa secara historis lebih menonjol dalam pembangunan struktur internal kehidupan kolektif. Di ruang inilah berkembang bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih sistematis, pola kekuasaan yang lebih terstruktur, tata simbolik yang kompleks, dan kemampuan mengelola hubungan sosial dalam skala

besar. Karena itu Jawa sangat penting untuk dipahami sebagai salah satu fondasi system architecture dalam kebangsaan Indonesia.

Dalam sejarah panjang Nusantara, kawasan Jawa memperlihatkan kapasitas yang sangat kuat dalam membangun struktur ketatanegaraan. Majapahit menjadi salah satu contoh historis yang paling dikenal, bukan karena harus dipahami sebagai identik dengan negara modern Indonesia, melainkan karena menunjukkan kemampuan membangun koordinasi, pengaruh, legitimasi, dan tata kekuasaan dalam skala yang besar. Pengalaman sejarah seperti ini menunjukkan bahwa kawasan Jawa memiliki warisan panjang dalam membangun struktur, bukan sekadar konektivitas spontan.

Namun kontribusi Jawa tidak berhenti pada kerajaan-kerajaan besar. Dalam perkembangan berikutnya, berbagai bentuk organisasi sosial, tata administrasi, struktur patronase, dan simbolisasi kekuasaan terus berkembang dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, "kekuasaan" tidak selalu berarti dominasi koersif semata, tetapi juga kemampuan menciptakan keteraturan sosial yang diterima melalui struktur makna tertentu. Inilah yang membuat Jawa penting dalam pembacaan buku ini, karena kekuasaan dipahami bukan hanya sebagai alat paksaan, tetapi juga sebagai konstruksi simbolik yang membentuk legitimasi.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang mencakup hukum, aparat, birokrasi, wilayah, dan instrumen pengaturan

kehidupan kolektif. Jika definisi ini dibaca secara hati-hati, maka warisan Jawa memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pembentukan negara modern Indonesia. Bukan dalam arti negara harus meniru struktur sejarah tertentu secara literal, tetapi dalam arti terdapat pengalaman panjang tentang bagaimana kehidupan bersama diorganisasi melalui tata, prosedur, hierarki, dan simbol.

Salah satu karakter penting kawasan ini adalah penghargaan terhadap tata. Tata di sini bukan sekadar aturan administratif. Tata adalah struktur keteraturan sosial yang membentuk hubungan antarindividu, komunitas, posisi sosial, bahkan cara berkomunikasi. Dalam banyak ekspresi budaya Jawa dan kawasan sekitarnya, keteraturan hubungan memiliki nilai yang sangat penting. Bahasa, protokol sosial, simbol penghormatan, struktur posisi, hingga ekspresi budaya menunjukkan bahwa keteraturan bukan sekadar instrumen teknis, tetapi bagian dari struktur peradaban.

Peradaban Sunda juga memperkaya struktur ini dengan karakter sosial yang khas. Harmoni sosial, penghormatan terhadap relasi komunitas, sensitivitas budaya, dan tata kesopanan memperlihatkan bentuk peradaban yang kuat dalam struktur sosial yang teratur namun tidak identik dengan model kekuasaan sentralistik klasik Jawa. Baduy menghadirkan dimensi lain yang sangat penting, yaitu keteguhan menjaga tata hidup dan konsistensi nilai di tengah tekanan perubahan zaman. Betawi menunjukkan wajah urban dari pertemuan budaya yang hidup dalam struktur

sosial yang cair namun tetap membangun identitas kolektif.

Cirebon menjadi ruang persilangan yang sangat menarik karena memperlihatkan interaksi antara pengaruh Jawa, Sunda, Islam, perdagangan, dan simbol kekuasaan yang saling bertemu. Banyumas menunjukkan karakter sosial yang lebih egaliter dalam beberapa ekspresi budaya lokalnya. Osing memperlihatkan kesinambungan identitas lokal yang tetap bertahan di tengah arus sejarah yang besar. Tengger menunjukkan kedalaman spiritualitas komunitas yang sangat khas dalam konteks pegunungan. Madura membawa etos kehormatan, solidaritas, keberanian, dan loyalitas komunitas yang sangat kuat. Seluruh unsur ini memperlihatkan bahwa kawasan Jawa bukan monolit, melainkan ruang peradaban yang plural namun tetap memiliki kontribusi sistemik yang jelas.

Salah satu kekuatan besar peradaban kawasan ini adalah kemampuan membangun simbol legitimasi. Simbol dalam konteks ini bukan sekadar ornamen budaya. Simbol adalah instrumen pembentuk makna sosial. Kekuasaan yang hanya bertumpu pada paksaan cenderung rapuh. Kekuasaan yang membangun legitimasi simbolik memiliki daya tahan yang lebih besar karena bekerja pada lapisan kesadaran sosial. Dalam sejarah kawasan Jawa, unsur ini berkembang sangat kuat, baik melalui tata istana, simbol, bahasa kekuasaan, maupun struktur penghormatan sosial.

Ini penting karena negara modern sering kali terlalu teknokratis dalam memahami kekuasaan. Sistem

administratif modern cenderung melihat negara sebagai mesin prosedural. Padahal legitimasi sosial juga dibentuk oleh simbol, budaya, dan struktur makna. Kawasan Jawa membawa pelajaran penting bahwa organisasi kehidupan kolektif membutuhkan dimensi simbolik selain struktur formal.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, Jawa dapat dipahami sebagai salah satu modul system *organization*. Jika Sumatra membawa logika konektivitas jaringan, maka Jawa membawa logika struktur internal. Sebuah *platform* besar membutuhkan keduanya. Sistem tanpa konektivitas menjadi terisolasi. Sistem tanpa organisasi menjadi kacau. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, kontribusi kawasan Jawa terhadap kemampuan organisasi sangat signifikan.

Namun warisan ini juga harus dibaca secara kritis. Struktur yang terlalu kuat dapat berubah menjadi sentralisme yang menekan keragaman. Tata yang sehat dapat berubah menjadi formalisme kosong. Harmoni yang positif dapat berubah menjadi penekanan terhadap kritik. Simbol legitimasi dapat berubah menjadi alat pembekuan kekuasaan. Karena itu buku ini tidak sedang melakukan glorifikasi tanpa refleksi, melainkan membaca logika peradaban dengan kesadaran kritis.

Dalam konteks *multi-civilizational platform*, kawasan Jawa menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan energi konektivitas, tetapi juga kemampuan mengorganisasi kehidupan bersama. Bangsa yang besar membutuhkan struktur, tata,

koordinasi, dan kemampuan membangun legitimasi. Kontribusi kawasan ini terletak sangat kuat pada dimensi tersebut.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Jawa dalam pengertian kawasan peradaban yang luas, termasuk Jawa, Sunda, Baduy, Betawi, Cirebon, Banyumas, Osing, Tengger, dan Madura, adalah salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis yang sangat kuat dalam organisasi sosial, tata kehidupan, simbol legitimasi, dan arsitektur kekuasaan. Dari titik ini, pembahasan bergerak menuju Bali, simpul peradaban yang menghadirkan kontribusi berbeda namun sama pentingnya, terutama dalam kosmologi, spiritualitas, ritual, keseimbangan, dan estetika kehidupan.

5.4. Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Timur: Peradaban Ritual, Kosmologi, dan Keseimbangan

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, kawasan Bali dan gugusan kepulauan yang membentang hingga Nusa Tenggara menghadirkan salah satu karakter peradaban yang sangat khas, yaitu kedalaman hubungan antara spiritualitas, komunitas, ritual, kosmologi, kehormatan sosial, dan keseimbangan hidup. Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa kawasan ini bukan ruang homogen yang dapat dipahami melalui satu identitas tunggal. Di dalam bentang ini hidup masyarakat Bali, Sasak, Samawa, Bima, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Sumba, Timor, Rote, Sabu, Alor, dan

Lembata, masing-masing dengan sejarah, struktur sosial, ekspresi budaya, dan warisan nilai yang khas. Meskipun demikian, terdapat pola peradaban yang cukup kuat yang menghubungkan kawasan ini, yaitu penekanan pada keterhubungan manusia dengan komunitas, leluhur, ruang hidup, dan dimensi spiritual yang membentuk tata kehidupan sehari-hari.

Jika Sumatra memperlihatkan logika konektivitas jaringan dan Jawa menunjukkan kekuatan organisasi sosial serta tata kekuasaan, maka kawasan Bali hingga Nusa Tenggara memperlihatkan bentuk peradaban yang lebih menekankan keseimbangan eksistensial. Kehidupan tidak dipahami semata sebagai urusan ekonomi, administrasi, atau organisasi kekuasaan, tetapi sebagai relasi yang harus dijaga antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, manusia dengan sejarah komunitas, dan manusia dengan dimensi transenden. Dalam konteks buku ini, unsur ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kebangsaan Indonesia tidak dibangun hanya oleh kekuatan segelintir orang dan ekonomi, tetapi juga oleh warisan *worldview* yang memahami kehidupan sebagai keterhubungan makna.

Bali merupakan salah satu simpul paling jelas dari pola tersebut. Bali menghadirkan struktur peradaban di mana ritual, spiritualitas, tata ruang, komunitas, simbol, dan estetika tidak berdiri terpisah, melainkan menyatu dalam satu sistem kehidupan. Kehidupan sosial tidak hanya diatur oleh aturan formal, tetapi juga oleh ritme budaya dan spiritual yang membentuk kesadaran kolektif. Ruang hidup tidak

sekadar ditata berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga berdasarkan struktur makna. Dalam konteks ini, Bali memperlihatkan bagaimana peradaban dapat membangun keseimbangan antara dimensi material dan nonmaterial secara sangat kuat.

Namun pola serupa dalam bentuk berbeda juga tampak di kawasan sekitarnya. Sasak menghadirkan lapisan sejarah spiritual dan komunitarian yang kuat. Samawa dan Bima memperlihatkan hubungan antara kehormatan sosial, struktur komunitas, dan identitas historis yang kokoh. Di Flores berkembang berbagai simpul peradaban seperti Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata yang menunjukkan relasi kuat antara komunitas, tradisi, simbol, serta keterhubungan dengan ruang hidup dan sejarah kolektif. Sumba menghadirkan struktur kehormatan dan simbolisme sosial yang sangat kuat. Timor, Rote, Sabu, dan Alor menunjukkan ketahanan komunitas, solidaritas sosial, serta struktur identitas yang tumbuh dari relasi mendalam dengan lingkungan dan pengalaman sejarah masing-masing.

Yang menarik, meskipun ekspresi budaya sangat beragam, terdapat pola kesamaan yang dapat dibaca pada level peradaban. Komunitas memiliki posisi sentral. Individu tidak dipahami sebagai unit terpisah yang sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang membawa tanggung jawab timbal balik. Kehormatan sosial memiliki makna penting. Hubungan dengan leluhur, sejarah komunitas, dan struktur simbolik membentuk orientasi moral tertentu. Kehidupan spiritual tidak sepenuhnya

dipisahkan dari kehidupan sosial. Tata hidup sehari-hari tidak dipahami sebagai urusan praktis semata, tetapi sebagai bagian dari keterhubungan yang lebih luas.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa peradaban mencakup *worldview*, nilai, moral, spiritualitas, budaya, estetika, dan tata hidup. Kawasan Bali hingga Nusa Tenggara memperlihatkan integrasi yang sangat kuat antara unsur-unsur tersebut. Di sini, spiritualitas bukan sekadar ritual keagamaan formal. Spiritualitas adalah cara memahami kehidupan. Ritual bukan sekadar seremoni, tetapi mekanisme reproduksi nilai. Komunitas bukan sekadar organisasi sosial, tetapi ruang makna. Estetika bukan sekadar keindahan visual, tetapi bagian dari struktur simbolik kehidupan.

Kosmologi menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam membaca kawasan ini. Kosmologi di sini dipahami sebagai cara pandang mendasar tentang keteraturan semesta dan posisi manusia di dalamnya. Cara manusia menata ruang, memahami waktu, menjaga relasi sosial, bahkan mengelola konflik sering dipengaruhi oleh kosmologi yang hidup dalam struktur budaya. Dalam konteks modern, unsur seperti ini sering dianggap tidak relevan karena terlalu simbolik. Padahal dalam perspektif peradaban, kosmologi adalah bagian dari operating logic yang membentuk perilaku kolektif.

Keseimbangan menjadi konsep kunci. Bukan keseimbangan dalam arti romantik yang menolak perubahan, melainkan keseimbangan sebagai orientasi etis terhadap kehidupan. Hubungan manusia dengan komunitas harus dijaga. Hubungan dengan lingkungan

harus diperhatikan. Kehormatan harus dipertahankan. Struktur sosial harus memiliki keteraturan. Kehidupan spiritual harus tetap memberi arah moral. Dalam konteks kebangsaan modern yang sering terjebak pada logika materialistik dan administratif semata, warisan ini sangat penting.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, kawasan Bali hingga Nusa Tenggara membawa harmonic operating logic. Sebuah *platform* besar tidak hanya membutuhkan konektivitas seperti Sumatra atau organisasi seperti Jawa. Sebuah sistem juga membutuhkan kemampuan menjaga keseimbangan internal agar tidak berubah menjadi mesin yang dingin dan terputus dari dimensi kemanusiaan. Tanpa keseimbangan nilai, sistem akan cenderung eksploitatif. Tanpa kedalaman spiritual, sistem akan kehilangan arah moral. Tanpa komunitas, sistem akan mengalami atomisasi sosial.

Namun seperti pembahasan sebelumnya, penting menjaga proporsi akademik. Kawasan ini sangat plural. Tidak seluruh komunitas memiliki struktur nilai yang identik. Tidak semua ekspresi budaya dapat dipukul rata ke dalam satu formula. Buku ini tidak sedang membuat katalog etnografi atau generalisasi etnis yang dangkal. Yang sedang dibangun adalah pembacaan terhadap pola kontribusi peradaban dalam struktur kebangsaan Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, keberagaman internal tidak dihapus, tetapi dibaca sebagai variasi dalam satu spektrum kontribusi peradaban.

Dalam konteks *multi-civilizational platform*, kawasan ini menunjukkan bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh logika negara, perdagangan, atau kekuasaan, tetapi juga oleh warisan peradaban yang menempatkan keseimbangan, komunitas, spiritualitas, kehormatan, dan struktur simbolik sebagai bagian penting kehidupan bersama. Ini sangat penting karena bangsa yang sehat membutuhkan fondasi moral dan kosmologis, bukan hanya instrumen administratif.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Bali dan gugusan peradaban hingga Nusa Tenggara, yang mencakup Bali, Sasak, Samawa, Bima, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Sumba, Timor, Rote, Sabu, Alor, dan Lembata, merupakan salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis berupa spiritualitas, ritual, kosmologi, keseimbangan, kehormatan komunitas, dan kedalaman tata hidup.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak menuju Kalimantan, simpul peradaban yang menghadirkan kontribusi berbeda, terutama dalam relasi ekologis, kesadaran ruang, komunitas berbasis lingkungan hidup, dan harmoni manusia dengan alam.

5.5. Kalimantan: Peradaban Hutan, Ruang, dan Harmoni Alam

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Kalimantan menghadirkan salah satu karakter peradaban yang sangat penting karena membawa perspektif yang berbeda dari kawasan-

kawasan yang telah dibahas sebelumnya. Jika Sumatra memperlihatkan logika konektivitas maritim, Jawa menghadirkan arsitektur organisasi sosial dan simbol kekuasaan, serta Bali-Nusa Tenggara menunjukkan kedalaman spiritualitas dan keseimbangan kosmologis, maka Kalimantan menghadirkan warisan peradaban yang sangat kuat dalam relasi manusia dengan ruang hidup, komunitas, lingkungan, dan keberlangsungan ekologis. Kalimantan bukan sekadar pulau besar yang kaya sumber daya alam atau frontier pembangunan modern. Kalimantan adalah ruang peradaban yang membentuk cara pandang tentang kehidupan sebagai hubungan yang tidak terputus antara manusia, komunitas, sungai, hutan, dan semesta tempat kehidupan berlangsung.

Namun seperti kawasan lain dalam buku ini, Kalimantan tidak dapat dipahami sebagai entitas tunggal yang homogen. Di dalam bentang besar ini hidup berbagai komunitas dengan sejarah dan karakter masing-masing. Rumpun Dayak dalam berbagai ekspresinya seperti Ngaju, Kenyah, Iban, Kayan, Benuaq, dan banyak komunitas lainnya memperlihatkan keragaman internal yang sangat kaya. Di samping itu berkembang pula tradisi Banjar dengan karakter perdagangan sungai dan Islam yang kuat, Kutai dengan jejak Sejarah dan peradaban yang panjang, serta Tidung yang memperlihatkan hubungan khas antara identitas pesisir, mobilitas, dan ruang perbatasan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Kalimantan bukan satu warna tunggal, melainkan mozaik peradaban yang kompleks.

Meski plural, terdapat pola historis yang cukup kuat dalam kontribusi kawasan ini terhadap struktur kebangsaan Indonesia. Salah satu karakter paling menonjol adalah hubungan yang sangat erat dengan ruang hidup ekologis. Dalam banyak sistem modern, ruang dipahami secara administratif sebagai wilayah yang dapat dibagi, dipetakan, dikuasai, dan dieksploitasi. Dalam pengalaman peradaban Kalimantan, ruang jauh lebih dari sekadar objek penguasaan. Hutan bukan hanya sumber komoditas. Sungai bukan hanya jalur transportasi. Tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ruang hidup merupakan bagian dari struktur kehidupan kolektif yang membentuk identitas, relasi sosial, keberlangsungan komunitas, dan bahkan orientasi moral.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa peradaban mencakup *worldview*, nilai, moral, spiritualitas, budaya, dan tata hidup. Dengan kerangka tersebut, hubungan manusia dengan lingkungan tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan teknis bertahan hidup. Cara sebuah masyarakat membaca alam akan membentuk cara masyarakat tersebut memahami kehidupan. Dalam konteks Kalimantan, hubungan ini sangat kuat. Banyak komunitas berkembang dengan kesadaran bahwa manusia bukan penguasa tunggal atas ruang hidup, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Cara pandang seperti ini membentuk struktur etika yang berbeda dari logika eksploitasi modern.

Komunitas-komunitas Dayak dalam berbagai ekspresinya memperlihatkan warisan yang sangat penting dalam konteks ini. Tentu tidak seluruh

komunitas Dayak identik, karena masing-masing memiliki sejarah, struktur sosial, dan pengalaman budaya yang berbeda. Namun pada level peradaban, terlihat pola kuat berupa kedekatan dengan lingkungan hidup, solidaritas komunitas, penghormatan terhadap ruang hidup, serta tata nilai yang tidak memisahkan manusia dari ekologi kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dibentuk juga oleh peradaban yang memahami keberlangsungan hidup sebagai relasi, bukan dominasi.

Sungai memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter Kalimantan. Dalam banyak kawasan, sungai bukan sekadar bentang geografis, tetapi infrastruktur kehidupan. Sungai menghubungkan komunitas, menjadi jalur mobilitas, menopang ekonomi, dan membentuk struktur interaksi sosial. Jika Sumatra dan Sulawesi memperlihatkan logika maritim laut terbuka, Kalimantan menunjukkan bentuk konektivitas yang tumbuh melalui jaringan sungai dan ruang ekologis internal. Ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa konsep keterhubungan Nusantara tidak selalu memiliki bentuk yang sama.

Banjar menghadirkan dimensi lain yang sangat signifikan. Tradisi Banjar menunjukkan perpaduan antara konektivitas sungai, perdagangan, Islam, dan struktur sosial yang berkembang dalam relasi dengan mobilitas kawasan. Ini menegaskan bahwa Kalimantan bukan hanya ruang ekologis pedalaman, tetapi juga memiliki sejarah perdagangan, urbanitas lokal, dan keterhubungan yang aktif dengan kawasan lain. Kutai menambahkan lapisan historis berupa pengalaman

yang panjang, memperlihatkan bahwa kawasan ini juga memiliki jejak organisasi kekuasaan yang penting dalam sejarah Nusantara. Tidung menunjukkan karakter khas kawasan utara yang hidup dalam relasi perbatasan, pesisir, dan dinamika mobilitas regional.

Salah satu kontribusi besar Kalimantan terhadap gagasan kebangsaan Indonesia adalah kesadaran tentang keberlangsungan. Dunia modern sering bergerak dengan logika percepatan pembangunan, ekstraksi maksimal, dan efisiensi ekonomi jangka pendek. Cara pandang semacam ini sering mengorbankan lingkungan hidup dan merusak fondasi jangka panjang kehidupan kolektif. Warisan peradaban Kalimantan mengingatkan bahwa keberlangsungan adalah bagian dari kebijaksanaan peradaban. Sistem yang merusak ruang hidupnya sendiri pada akhirnya sedang menghancurkan fondasi eksistensinya sendiri.

Komunitas juga menjadi unsur yang sangat penting. Dalam banyak ekspresi kehidupan Kalimantan, individu tidak dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari jaringan sosialnya. Kehidupan bersama, solidaritas, tanggung jawab timbal balik, dan struktur komunitas memiliki posisi yang penting. Ini kembali menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dibangun oleh struktur negara formal, tetapi juga oleh warisan komunitarian yang hidup dalam berbagai simpul peradaban.

Spiritualitas juga tidak terpisah dari pembacaan ini. Dalam banyak sistem kehidupan yang dekat dengan lingkungan ekologis besar, relasi dengan alam tidak hanya dipahami secara material, tetapi juga memiliki

dimensi simbolik, moral, dan spiritual. Ini tidak selalu harus dibaca dalam kategori agama formal modern. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kehidupan memiliki batas moral tertentu dalam relasi dengan semesta. Dalam konteks buku ini, unsur tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa *worldview* kebangsaan Indonesia tidak hanya dibentuk oleh kekuasaan dan ekonomi, tetapi juga oleh hubungan etis dengan kehidupan itu sendiri.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, Kalimantan dapat dipahami sebagai modul ecological resilience. Sebuah *platform* besar membutuhkan konektivitas, organisasi, legitimasi, nilai, dan juga keberlanjutan. Sistem yang kuat tetapi merusak fondasi ekologisnya sendiri adalah sistem yang pada akhirnya rapuh. Kalimantan membawa pengingat penting bahwa kebangsaan yang sehat harus memahami hubungan antara manusia, komunitas, dan lingkungan hidup secara lebih bijaksana.

Namun seperti pembahasan kawasan lain, penting menjaga ketelitian akademik. Kalimantan sangat kompleks, plural, dan terus mengalami transformasi modern. Buku ini tidak sedang meromantisasi masa lalu atau membangun stereotip etnografis. Yang sedang dibaca adalah pola kontribusi peradaban terhadap struktur besar kebangsaan Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, pluralitas internal tetap dihormati, sementara kontribusi konseptualnya tetap dapat dipahami.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Kalimantan dengan mozaik

peradaban Dayak dalam berbagai rumpunnya seperti Ngaju, Kenyah, Iban, Kayan, Benuaq dan lainnya, serta Banjar, Kutai, dan Tidung, merupakan salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis berupa kesadaran ekologis, relasi harmonis dengan ruang hidup, solidaritas komunitas, keberlangsungan, dan tata kehidupan yang memahami manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan yang lebih besar.

Dari titik ini, pembahasan bergerak menuju Sulawesi, kawasan yang menghadirkan karakter peradaban yang sangat dinamis melalui mobilitas, etos maritim, diaspora, kehormatan, dan keberanian menjelajah lintas ruang.

5.6. Sulawesi: Peradaban Mobilitas, Kehormatan, dan Keberanian Menjelajah

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Sulawesi menghadirkan karakter peradaban yang sangat dinamis karena membawa warisan kuat dalam mobilitas, keberanian menjelajah, etos maritim, kehormatan sosial, dan kemampuan membangun jaringan lintas ruang. Jika Sumatra menunjukkan logika konektivitas perdagangan, Jawa menghadirkan struktur organisasi, Bali-Nusa Tenggara menampilkan keseimbangan spiritual dan komunitarian, serta Kalimantan membawa kesadaran ekologis, maka Sulawesi memperlihatkan energi peradaban yang bergerak. Sulawesi bukan sekadar wilayah geografis di tengah Nusantara, melainkan salah

satu simpul peradaban yang secara historis sangat aktif dalam pergerakan manusia, perdagangan, diaspora, interaksi budaya, dan pembentukan jaringan sosial yang melampaui batas lokal.

Namun sejak awal perlu ditegaskan bahwa Sulawesi bukan entitas tunggal yang homogen. Di dalam bentang besar ini hidup berbagai komunitas dengan sejarah dan karakter yang kaya, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Minahasa, Gorontalo, Mongondow, Sangir, Talaud, Buton, Tolaki, Kaili, hingga Bajo. Masing-masing memiliki sejarah sosial, orientasi budaya, dan pengalaman peradaban yang khas. Buku ini tidak sedang menyederhanakan seluruh keragaman tersebut ke dalam stereotip tunggal. Namun pada level peradaban, terdapat pola kontribusi historis yang cukup kuat untuk dibaca sebagai karakter umum kawasan, yaitu mobilitas, keberanian, kehormatan, dan keterhubungan lintas ruang.

Salah satu ciri paling menonjol dari Sulawesi adalah orientasi terhadap pergerakan. Dalam banyak kawasan Nusantara, mobilitas memang penting, tetapi di Sulawesi mobilitas berkembang sebagai karakter peradaban yang sangat kuat. Laut bukan dipahami sebagai batas akhir wilayah, melainkan sebagai jalur kehidupan. Perjalanan bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi bagian dari dinamika sosial, ekonomi, dan identitas. Dalam konteks seperti ini, ruang dipahami bukan sebagai kurungan, tetapi sebagai medan kemungkinan.

Bugis dan Makassar menjadi simbol paling dikenal dari energi maritim semacam ini. Tradisi

pelayaran, perdagangan, kemampuan membangun jaringan, dan keberanian menjelajah menjadikan kawasan ini salah satu simpul penting dalam arsitektur maritim Nusantara. Namun yang penting dalam konteks buku ini bukan sekadar romantisme pelayaran, melainkan struktur mental yang dibentuk oleh pengalaman tersebut. Komunitas yang hidup dalam mobilitas akan membangun cara pandang yang berbeda terhadap risiko, peluang, hubungan sosial, dan keterhubungan dunia.

Mandar juga memperlihatkan karakter maritim yang kuat, memperkaya identitas Sulawesi sebagai kawasan yang tidak memandang laut sebagai pemisah. Buton menambahkan dimensi historis penting melalui pengalaman ketatanegaraan dan konektivitas maritim regional. Bajo menghadirkan bentuk yang bahkan lebih ekstrem dari orientasi maritim, dengan kehidupan yang secara historis sangat erat dengan laut sebagai ruang eksistensial. Semua ini menunjukkan bahwa Sulawesi membawa kontribusi besar terhadap karakter Indonesia sebagai bangsa kepulauan yang seharusnya memahami laut sebagai penghubung, bukan sekadar batas.

Namun Sulawesi tidak hanya tentang laut dan mobilitas. Toraja memperlihatkan kedalaman komunitarian, simbolisme sosial, penghormatan terhadap struktur kehidupan kolektif, dan hubungan yang kuat antara identitas, ritual, serta memori sejarah komunitas. Minahasa menunjukkan tradisi pendidikan, organisasi sosial, dan keterbukaan terhadap dinamika perubahan yang kuat. Gorontalo membawa warisan hubungan antara nilai spiritual, tata sosial, dan identitas

kolektif. Mongondow, Sangir, Talaud, Tolaki, dan Kaili masing-masing memperlihatkan ekspresi khas tentang komunitas, kehormatan, ketahanan, dan relasi terhadap ruang hidup. Ini menunjukkan bahwa Sulawesi bukan sekadar peradaban mobilitas, tetapi juga ruang kompleks dengan banyak lapisan nilai.

Salah satu unsur yang sangat penting dalam membaca Sulawesi adalah konsep kehormatan. Kehormatan di sini tidak dipahami sebagai sekadar kebanggaan simbolik, tetapi sebagai struktur moral yang memengaruhi perilaku sosial, loyalitas, tanggung jawab, dan martabat komunitas. Dalam banyak peradaban, kehormatan menjadi salah satu instrumen utama pengatur kehidupan bersama sebelum negara modern mengambil peran besar. Kehormatan menciptakan disiplin sosial. Kehormatan membentuk integritas relasi. Kehormatan menjaga posisi individu dalam komunitas. Dalam konteks Sulawesi, unsur ini sangat menonjol.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, solidaritas, identitas, dan pengalaman kolektif. Sulawesi memperlihatkan bahwa solidaritas tidak selalu dibangun melalui struktur administratif formal. Solidaritas dapat tumbuh melalui loyalitas komunitas, pengalaman mobilitas bersama, etika kehormatan, dan jaringan hubungan sosial yang hidup lintas ruang. Ini sangat penting dalam memahami bahwa fondasi bangsa tidak semata-mata berasal dari negara.

Keberanian juga merupakan karakter yang tidak dapat diabaikan. Keberanian di sini bukan sekadar

keberanian fisik, tetapi keberanian sosial untuk bergerak, mengambil risiko, menjalin hubungan baru, menghadapi ketidakpastian, dan beradaptasi dengan dunia yang berubah. Peradaban yang tumbuh dalam mobilitas biasanya membangun kapasitas seperti ini. Dalam konteks kebangsaan modern, warisan semacam ini sangat penting karena bangsa yang hidup dalam dunia global memerlukan keberanian bergerak, bukan sekadar bertahan dalam stagnasi.

Dalam konteks *worldview*, Sulawesi memperlihatkan orientasi yang sangat aktif terhadap kehidupan. Dalam BAB 1, *worldview* dijelaskan sebagai bagian penting dari peradaban yang membentuk cara memahami kehidupan, relasi sosial, moralitas, dan posisi manusia dalam semesta. Sulawesi memperlihatkan *worldview* yang tidak pasif. Kehidupan dipahami sebagai medan gerak, hubungan, tantangan, dan kesempatan. Ini sangat berbeda dari peradaban yang lebih menekankan stabilitas internal atau keterikatan ekologis tertentu. Justru karena perbedaan inilah Sulawesi menjadi penting dalam *multi-civilizational platform* Indonesia.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, Sulawesi dapat dipahami sebagai modul mobility engine. Sebuah *platform* besar tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi, nilai spiritual, atau kesadaran ekologis. Sebuah sistem juga membutuhkan energi pergerakan, kemampuan menjelajah, jaringan aktif, dan adaptasi terhadap ruang yang berubah. Tanpa unsur ini, sistem berisiko stagnan.

Sulawesi membawa energi dinamis tersebut ke dalam konstruksi kebangsaan Indonesia.

Namun seperti seluruh pembahasan dalam buku ini, pembacaan harus tetap proporsional. Sulawesi sangat plural dan tidak dapat direduksi menjadi satu formula budaya tunggal. Buku ini tidak sedang membangun stereotip etnografis, melainkan membaca kontribusi konseptual peradaban terhadap struktur kebangsaan Indonesia. Dengan pendekatan ini, pluralitas tetap dihormati, sementara pola kontribusi historis tetap dapat dikenali.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Sulawesi dengan mozaik peradaban Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Minahasa, Gorontalo, Mongondow, Sangir, Talaud, Buton, Tolaki, Kaili, dan Bajo, merupakan salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis berupa mobilitas, etos maritim, kehormatan, keberanian, diaspora, dan kemampuan membangun jaringan lintas ruang.

Dari titik ini, pembahasan bergerak menuju Maluku, simpul peradaban yang menghadirkan warisan keterhubungan global, perdagangan rempah, pluralitas interaksi, dan posisi strategis sebagai persimpangan dunia.

5.7. Maluku: Peradaban Persimpangan Dunia, Rempah, dan Pluralitas Interaksi

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Maluku menempati posisi yang sangat istimewa karena menghadirkan salah satu

bentuk peradaban yang tumbuh dari persimpangan global, perdagangan bernilai tinggi, interaksi lintas bangsa, serta pluralitas hubungan sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Jika Sumatra memperlihatkan konektivitas maritim regional, Sulawesi menghadirkan mobilitas dan etos pergerakan, maka Maluku menunjukkan bentuk peradaban yang hidup di titik temu dunia. Maluku bukan sekadar gugusan kepulauan di bagian timur Nusantara. Maluku adalah salah satu simpul strategis yang menjadikan kawasan Nusantara bagian aktif dari sejarah global jauh sebelum lahirnya negara modern.

Namun seperti seluruh kawasan dalam buku ini, Maluku tidak dapat dipahami sebagai entitas tunggal yang homogen. Di dalam bentang ini hidup berbagai komunitas dengan sejarah dan karakter khas masing-masing, seperti Ambon, Seram, Kei, Tanimbar, Buru, Ternate, dan Tidore. Setiap komunitas memiliki struktur sosial, pengalaman historis, tradisi budaya, dan ekspresi identitas yang berbeda. Buku ini tidak sedang mereduksi seluruh keragaman tersebut menjadi satu formula etnografis yang simplistik. Yang sedang dibaca adalah pola kontribusi peradaban yang cukup kuat untuk dipahami sebagai karakter kawasan dalam pembentukan struktur kebangsaan Indonesia.

Salah satu karakter paling menonjol dari Maluku adalah posisi sebagai persimpangan interaksi global. Dalam sejarah dunia, tidak banyak kawasan yang memiliki pengaruh strategis begitu besar karena satu komoditas yang mengubah arah geopolitik internasional. Rempah menjadikan Maluku bukan

sekadar titik perdagangan regional, tetapi simpul yang menarik perhatian kekuatan dunia. Namun penting untuk tidak memahami hal ini secara terlalu ekonomistik. Yang menjadikan Maluku penting bukan hanya komoditasnya, tetapi jaringan interaksi yang tumbuh di sekelilingnya. Barang bernilai tinggi menciptakan arus manusia, arus kekuasaan, arus pengetahuan, arus konflik, dan arus pertukaran budaya.

Dalam konteks ini, Maluku menjadi salah satu bukti paling jelas bahwa Nusantara bukan wilayah pinggiran yang baru memiliki arti setelah negara modern lahir. Kawasan ini telah lama berada dalam arus sejarah dunia. Ternate dan Tidore, misalnya, menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki pengalaman, diplomasi, perdagangan, dan organisasi kekuasaan yang signifikan. Ambon memperlihatkan dinamika pertemuan budaya yang kompleks. Seram, Kei, Tanimbar, Buru, dan kawasan lainnya menunjukkan keberagaman struktur sosial dan komunitarian yang memperkaya identitas kawasan ini. Dengan demikian, Maluku bukan ruang pasif yang hanya menerima pengaruh luar, melainkan aktor aktif dalam jaringan sejarah global.

Salah satu unsur penting dalam membaca Maluku adalah pluralitas interaksi. Kawasan yang hidup di persimpangan perdagangan global cenderung mengalami intensitas perjumpaan yang sangat tinggi. Perjumpaan tersebut membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, interaksi menciptakan keterbukaan, adaptasi sosial, kemampuan bernegosiasi, dan pembentukan identitas yang dinamis. Di sisi lain,

interaksi yang intens juga dapat membawa konflik, perebutan pengaruh, dan tekanan eksternal. Dalam konteks Maluku, kedua dinamika tersebut merupakan bagian dari pengalaman historis yang membentuk karakter peradaban kawasan ini.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa dibentuk oleh memori bersama, sejarah, solidaritas, identitas, dan pengalaman kolektif. Jika kerangka tersebut diterapkan, maka Maluku membawa memori yang sangat penting tentang bagaimana sebuah komunitas hidup dalam arus dunia tanpa kehilangan struktur identitasnya sendiri. Ini bukan proses yang sederhana. Peradaban yang hidup di persimpangan global harus terus membangun keseimbangan antara keterbukaan dan pertahanan identitas. Maluku menunjukkan kemampuan historis semacam itu.

Komunitas-komunitas di Maluku juga memperlihatkan pentingnya struktur solidaritas sosial. Dalam banyak kawasan kepulauan, kehidupan kolektif tidak hanya bergantung pada kekuatan individu, tetapi pada kemampuan komunitas menjaga relasi timbal balik. Dalam konteks Maluku, solidaritas ini berkembang dalam bentuk yang khas, dipengaruhi oleh pengalaman hidup di ruang kepulauan, hubungan antarkomunitas, serta sejarah panjang interaksi dengan kekuatan luar. Ini menunjukkan bahwa fondasi bangsa tidak hanya dibangun oleh negara, tetapi juga oleh etika sosial yang hidup dalam komunitas.

Maluku juga sangat penting dalam konteks hubungan antara perdagangan dan kekuasaan. Dalam sejarah global, perdagangan sering menjadi pintu

masuk intervensi kekuasaan. Kawasan yang kaya komoditas bernilai tinggi sering menjadi sasaran perebutan dominasi eksternal. Pengalaman Maluku memperlihatkan bagaimana ekonomi, geopolitik, dan kekuasaan dapat saling bertaut. Dalam konteks buku ini, pelajaran tersebut sangat penting karena memperlihatkan bahwa kontrol atas sumber daya strategis selalu berkaitan dengan pertanyaan tentang kedaulatan.

Dalam kerangka *worldview*, Maluku menunjukkan bentuk peradaban yang memahami kehidupan sebagai interaksi. Tidak dalam arti kehilangan akar identitas, tetapi dalam arti terbiasa hidup dalam pertemuan dengan dunia luar. Dalam BAB 1, *worldview* dipahami sebagai cara mendasar memahami kehidupan, relasi sosial, dan posisi manusia dalam dunia. Maluku membawa *worldview* yang sangat relevan bagi Indonesia modern sebagai bangsa kepulauan yang berada di persimpangan global. Bangsa yang hidup di posisi strategis tidak dapat membangun mentalitas tertutup sepenuhnya. Namun keterbukaan tanpa identitas juga berbahaya. Maluku menghadirkan pengalaman historis tentang ketegangan tersebut.

Pluralitas menjadi kata kunci lain yang sangat penting. Kawasan yang hidup dalam interaksi intens cenderung membangun kapasitas untuk hidup dengan perbedaan, meskipun tentu sejarah tidak selalu berjalan tanpa konflik. Yang penting dalam konteks buku ini adalah pengakuan bahwa Indonesia dibangun juga oleh peradaban yang terbiasa menghadapi kompleksitas

pluralitas nyata, bukan sekadar pluralitas simbolik yang dipajang dalam slogan.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, Maluku dapat dipahami sebagai modul global interface. Sebuah *platform* besar tidak hanya membutuhkan struktur internal dan identitas yang kuat, tetapi juga kemampuan berinteraksi dengan dunia luar. Sistem yang sepenuhnya tertutup akan stagnan. Sistem yang terlalu terbuka tanpa perlindungan identitas akan mudah dikuasai. Maluku membawa pengalaman historis tentang bagaimana sebuah peradaban hidup dalam hubungan intens dengan arus global.

Namun pembacaan ini harus tetap proporsional. Maluku sangat plural, kompleks, dan memiliki dinamika internal yang tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal. Buku ini tidak sedang membangun glorifikasi romantik atau simplifikasi budaya. Yang sedang dilakukan adalah pembacaan filosofis terhadap kontribusi peradaban dalam struktur kebangsaan Indonesia. Dengan pendekatan ini, pluralitas tetap dihormati, sementara kontribusi konseptual tetap dapat dipahami.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas, bahwa Maluku, dengan mozaik peradaban Ambon, Seram, Kei, Tanimbar, Buru, Ternate, dan Tidore, merupakan salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis berupa keterhubungan global, perdagangan strategis, pluralitas interaksi, solidaritas komunitas, dan pengalaman menghadapi dinamika kekuasaan dunia.

Dari titik ini, pembahasan bergerak menuju Papua, kawasan yang menghadirkan kontribusi peradaban yang sangat mendalam dalam relasi dengan ruang hidup, komunitas, kosmologi, identitas, dan penghormatan terhadap eksistensi manusia dalam keterhubungan dengan alam.

5.8. Papua: Peradaban Komunitas, Kosmologi, dan Martabat Eksistensial

Dalam konstruksi Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, Papua menghadirkan salah satu simpul peradaban yang sangat mendalam karena membawa perspektif tentang manusia, komunitas, ruang hidup, kosmologi, dan martabat eksistensial yang berbeda dari banyak kawasan lain di Nusantara. Jika Sumatra memperlihatkan konektivitas jaringan, Jawa menghadirkan organisasi sosial, Bali-Nusa Tenggara menunjukkan keseimbangan spiritual, Kalimantan membawa kesadaran ekologis, Sulawesi menghadirkan mobilitas dinamis, dan Maluku memperlihatkan keterhubungan global, maka Papua menghadirkan dimensi peradaban yang sangat kuat dalam keterikatan antara manusia, komunitas, identitas, dan ruang kehidupan. Papua bukan sekadar wilayah geografis di ujung timur Indonesia. Papua adalah salah satu lapisan peradaban besar Nusantara yang menghadirkan cara pandang mendasar tentang keberadaan manusia dalam relasi dengan komunitas dan semesta kehidupan.

Namun sejak awal harus ditegaskan bahwa Papua bukan entitas homogen yang dapat direduksi menjadi satu gambaran tunggal. Di dalam bentang yang

sangat luas ini hidup berbagai komunitas dengan sejarah, bahasa, struktur sosial, dan pengalaman peradaban yang sangat kaya. Dani, Asmat, Mee, Biak, Sentani, Amungme, Kamoro, Marind, Korowai, Arfak, Maybrat, Moi, dan banyak komunitas lainnya menunjukkan pluralitas internal yang luar biasa. Buku ini tidak sedang menyederhanakan seluruh keragaman tersebut menjadi satu stereotip etnografis. Yang sedang dibangun adalah pembacaan terhadap pola kontribusi peradaban yang dapat dikenali dalam struktur besar kebangsaan Indonesia.

Salah satu karakter paling penting dalam membaca Papua adalah kedalaman hubungan antara komunitas dan eksistensi. Dalam banyak sistem modern, manusia cenderung dipahami sebagai individu administratif yang berdiri sendiri, terhubung dengan negara melalui status kewarganegaraan formal. Dalam banyak struktur kehidupan di Papua, manusia jauh lebih erat dipahami dalam konteks komunitas, relasi sosial, sejarah kolektif, dan ruang hidup yang konkret. Identitas tidak sekadar melekat sebagai label personal, tetapi tumbuh dalam jaringan relasi yang membentuk keberadaan itu sendiri. Dalam konteks buku ini, unsur ini sangat penting karena mengingatkan bahwa bangsa tidak dibangun hanya dari agregasi individu formal, tetapi juga dari komunitas yang hidup.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan pembentuk komunitas. Papua memperlihatkan dimensi ini secara sangat kuat. Komunitas bukan sekadar unit sosial tambahan, melainkan struktur utama kehidupan. Relasi sosial,

solidaritas, tanggung jawab timbal balik, sejarah kolektif, dan identitas hidup dalam jaringan komunitarian yang mendalam. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin terdorong ke arah individualisme administratif, warisan semacam ini menghadirkan refleksi penting tentang makna kehidupan bersama.

Papua juga menghadirkan kedalaman kosmologis yang sangat penting. Kosmologi di sini dipahami bukan sebagai mitologi yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai cara pandang mendasar tentang dunia, hubungan manusia dengan ruang hidup, nilai moral, serta struktur makna keberadaan. Dalam banyak peradaban, kosmologi membentuk tata kehidupan konkret. Cara memahami tanah, lingkungan, komunitas, dan hubungan sosial tidak dapat dipisahkan dari *worldview* yang mendasarinya. Dalam konteks Papua, unsur ini sangat kuat.

Ruang hidup dalam konteks Papua tidak dapat dipahami hanya sebagai aset material atau koordinat administratif. Dalam sistem modern, tanah sering direduksi menjadi objek legal, sumber daya ekonomi, atau bagian dari penguasaan negara. Dalam banyak pengalaman peradaban Papua, ruang hidup memiliki dimensi identitas, sejarah, keberlangsungan, dan martabat kolektif. Hubungan manusia dengan ruang bukan hubungan mekanis, tetapi hubungan eksistensial. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa desain kebangsaan yang sehat harus mampu

memahami bahwa tidak semua ruang dapat dibaca hanya dengan logika birokratis modern.

Komunitas-komunitas seperti Dani, Mee, Sentani, Biak, Marind, atau berbagai kelompok lain menunjukkan bentuk-bentuk kehidupan sosial yang tumbuh dari relasi yang kuat dengan ruang hidup dan identitas komunitas. Asmat menghadirkan kekayaan simbolik dan ekspresi budaya yang sangat dalam. Amungme dan Kamoro menunjukkan pentingnya hubungan antara manusia, tanah, dan keberadaan kolektif. Korowai memperlihatkan struktur kehidupan yang dibentuk oleh relasi ekologis yang intens. Arfak, Maybrat, Moi, dan komunitas lainnya menambah lapisan pluralitas yang memperkaya kompleksitas Papua sebagai ruang peradaban. Seluruhnya menunjukkan bahwa Papua bukan pinggiran kebangsaan, melainkan salah satu sumber penting pembentuk makna bangsa.

Martabat menjadi unsur yang sangat penting dalam membaca Papua. Martabat di sini bukan sekadar kebanggaan simbolik, tetapi pengakuan terhadap keberadaan manusia dan komunitas sebagai subjek penuh dalam kehidupan bersama. Dalam konteks buku ini, unsur ini sangat relevan karena pembahasan tentang kedaulatan rakyat dan kepemilikan negara pada BAB sebelumnya sangat berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar diperlakukan sebagai pemilik sah ruang kehidupan bersama. Papua menghadirkan refleksi penting bahwa bangsa yang sehat harus mampu menghormati martabat komunitas, bukan hanya mengatur administrasinya.

Dalam konteks *worldview*, Papua membawa cara pandang yang sangat penting tentang hubungan antara manusia dan kehidupan. Dalam BAB 1, *worldview* dijelaskan sebagai fondasi peradaban yang membentuk cara memahami eksistensi, moralitas, dan kehidupan bersama. Papua memperlihatkan *worldview* yang tidak semata-mata materialistik atau administratif. Kehidupan dipahami dalam hubungan dengan komunitas, sejarah, alam, dan struktur makna yang lebih luas. Dalam dunia modern yang sering sangat teknokratis, warisan ini sangat penting sebagai koreksi filosofis.

Papua juga menunjukkan bahwa pluralitas Indonesia bukan sekadar variasi budaya permukaan. Pluralitas Indonesia mencakup variasi mendalam dalam cara memahami manusia, komunitas, ruang, moralitas, dan kehidupan itu sendiri. Ini sangat penting bagi tesis besar buku ini. Jika Indonesia adalah *multi-civilizational platform*, maka Papua merupakan salah satu bukti paling kuat bahwa bangsa ini dibangun di atas lapisan *worldview* yang benar-benar beragam, bukan sekadar perbedaan simbolik.

Dalam analogi *source code* yang digunakan sepanjang buku ini, Papua dapat dipahami sebagai modul existential grounding. Sebuah sistem besar tidak cukup hanya memiliki konektivitas, organisasi, mobilitas, atau interaksi global. Sistem juga membutuhkan kesadaran mendasar tentang manusia sebagai subjek kehidupan. Jika sistem kehilangan orientasi terhadap martabat manusia dan komunitas, sistem akan berubah menjadi mesin administratif tanpa

jiwa. Papua membawa pengingat sangat penting tentang fondasi tersebut.

Namun seperti seluruh pembahasan dalam buku ini, pembacaan harus tetap proporsional dan akademik. Papua sangat plural, kompleks, dan terus bergerak dalam dinamika modernitas. Buku ini tidak sedang meromantisasi atau membekukan komunitas-komunitas tersebut dalam citra statis. Yang sedang dilakukan adalah pembacaan terhadap kontribusi konseptual peradaban terhadap struktur kebangsaan Indonesia. Dengan pendekatan ini, penghormatan terhadap pluralitas tetap terjaga.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Papua dengan mozaik peradaban Dani, Asmat, Mee, Biak, Sentani, Amungme, Kamoro, Marind, Korowai, Arfak, Maybrat, Moi, dan banyak komunitas lainnya merupakan salah satu simpul utama dalam *multi-civilizational platform* Indonesia, dengan kontribusi historis berupa komunitarianisme, kosmologi, martabat eksistensial, relasi mendalam dengan ruang hidup, dan penghormatan terhadap manusia sebagai bagian dari sistem kehidupan yang lebih besar.

Dari titik ini, pembahasan harus bergerak menuju sintesis nilai bersama yang menjadi titik temu seluruh simpul peradaban Nusantara, karena Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman identitas, melainkan pada irisan nilai yang memungkinkan kebersamaan dalam keberagaman.

BAB 6
DARI NUSANTARA KE PANCASILA

6.1. Pancasila Bukan Produk Vakum Sejarah

Salah satu kekeliruan paling mendasar dalam memahami Pancasila adalah melihatnya sebagai produk kenegeraan yang lahir secara tiba-tiba pada satu momentum sejarah tertentu, seolah-olah lima sila tersebut muncul sebagai hasil perumusan administratif yang terlepas dari perjalanan panjang bangsa. Cara pandang seperti ini membuat Pancasila tampak sebagai teks formal yang sekadar ditempatkan di awal dokumen kenegaraan, bukan sebagai hasil pematangan peradaban. Padahal, jika bangsa dipahami secara serius sebagaimana telah dibangun dalam bab-bab sebelumnya, maka Pancasila tidak mungkin lahir dari ruang kosong. Sebuah bangsa yang memiliki memori kolektif panjang, pengalaman sejarah berlapis, struktur nilai yang hidup, dan khazanah peradaban yang kaya tidak mungkin menghasilkan fondasi filosofis tanpa akar historis.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa bukan sekadar kumpulan manusia yang hidup di wilayah yang sama. Bangsa adalah entitas yang dibentuk oleh sejarah bersama, identitas, solidaritas, bahasa, pengalaman kolektif, dan kesadaran akan nasib yang saling terhubung. Dalam BAB 4 ditegaskan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi Nusantara yang jauh lebih tua daripada republik modern. Dalam BAB 5 dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*, sebuah ruang besar tempat berbagai peradaban

hidup, tumbuh, berinteraksi, dan membentuk pola nilai yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran kebangsaan. Jika seluruh fondasi ini diterima, maka Pancasila harus dibaca sebagai hasil kristalisasi dari proses panjang tersebut, bukan sebagai ciptaan yang lahir mendadak dari ruang sidang.

Istilah "kristalisasi" sangat penting dalam konteks ini. Kristalisasi bukan penciptaan dari ketiadaan. Kristalisasi adalah proses pengendapan, pemurnian, dan pengambilan sari pati dari unsur-unsur yang telah lama ada. Air laut mengandung berbagai unsur yang tersebar. Melalui proses tertentu, unsur tersebut dapat mengkristal menjadi bentuk yang lebih padat, lebih jelas, dan lebih terstruktur. Analogi ini relevan untuk memahami Pancasila. Nilai-nilai yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila bukan nilai

yang jatuh dari langit tanpa sejarah. Nilai-nilai tersebut telah hidup dalam berbagai ekspresi kehidupan Nusantara, meskipun belum selalu disebut dengan nama yang sama.

Ketika Pancasila dibaca hanya sebagai produk kompromi antarkelompok, pembacaan itu menjadi sangat dangkal. Memang benar bahwa perumusan formal Pancasila berlangsung dalam konteks tertentu menjelang kemerdekaan. Namun, momentum perumusan formal tidak identik dengan kelahiran nilai itu sendiri. Sebuah deklarasi dapat menjadi momen artikulasi, bukan momen penciptaan ontologis. Dengan kata lain, sidang-sidang kenegaraan mungkin menjadi ruang bagi penamaan dan perumusan, tetapi bahan dasarnya telah hidup jauh sebelumnya dalam struktur peradaban bangsa.

Inilah perbedaan penting antara "dokumen" dan "substansi". Dokumen dapat lahir pada tanggal tertentu, sedangkan substansi dapat hidup selama berabad-abad. Jika pembaca hanya terpaku pada dokumen, Pancasila akan tampak sebagai konstruksi abad ke-20. Sebaliknya, jika pembaca bergerak ke lapisan substansi, Pancasila dapat dipahami sebagai hasil perumusan nilai-nilai yang telah tumbuh dalam perjalanan panjang Nusantara. Buku ini memilih pembacaan kedua karena lebih mampu menangkap kesinambungan sejarah dan kedalaman peradaban bangsa.

Penting juga ditegaskan bahwa membaca Pancasila sebagai kristalisasi peradaban tidak berarti mengklaim bahwa seluruh masyarakat Nusantara masa

lalu hidup dengan formulasi lima sila yang identik secara literal. Argumen buku ini bukan argumen simplistik semacam itu. Yang dimaksud adalah keberadaan pola nilai yang secara substantif beresonansi dengan prinsip-prinsip yang kemudian dikristalkan dalam Pancasila. Spiritualitas hidup dalam berbagai komunitas. Penghormatan terhadap martabat manusia hidup dalam struktur adab. Musyawarah hidup dalam praktik pengambilan keputusan kolektif. Solidaritas sosial hidup dalam gotong royong. Kesadaran keterhubungan hidup dalam pengalaman kepulauan. Semua ini menunjukkan adanya material peradaban yang kemudian memperoleh formulasi filosofis yang lebih padat.

Dalam konteks ini, Pancasila tidak boleh dipahami sebagai ideologi impor yang dipaksakan ke atas bangsa. Banyak bangsa modern mengadopsi sistem nilai yang sepenuhnya diimpor dari pengalaman sejarah lain, lalu berusaha memaksakan kompatibilitasnya melalui mekanisme hukum atau kekuasaan. Buku ini justru menempatkan Pancasila sebagai antitesis dari pendekatan semacam itu. Pancasila bukan copy-paste ideology. Pancasila bukan transplantasi konsep asing tanpa akar sosial. Pancasila adalah upaya mengekstrak bahasa filosofis dari pengalaman kebangsaan sendiri.

Tentu, bangsa mana pun tidak pernah hidup dalam isolasi total. Nusantara sejak lama adalah ruang interaksi global. Dalam BAB 4 dan BAB 5 telah dijelaskan bagaimana Sumatra, Maluku, Sulawesi, Jawa, dan kawasan lain hidup dalam arus perdagangan, spiritualitas, migrasi, dan pertukaran gagasan lintas

kawasan. Karena itu pengaruh eksternal dalam perjalanan sejarah adalah kenyataan yang wajar. Namun menerima kenyataan interaksi global berbeda dengan menganggap identitas bangsa sepenuhnya hasil impor. Bangsa yang sehat tidak steril dari pengaruh luar, tetapi memiliki kemampuan menyerap, mengolah, dan mengintegrasikan unsur luar ke dalam struktur makna sendiri. Pancasila harus dibaca dalam kerangka kemampuan kreatif tersebut.

Dalam arsitektur analogi buku ini, posisi Pancasila sangat strategis. Jika BAB 1–5 membangun *source code* bangsa, maka Pancasila adalah bentuk kristalisasi logika intinya. Artinya, Pancasila bukan sekadar slogan normatif, tetapi representasi padat dari prinsip-prinsip dasar yang dianggap paling mendasar bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia. Ini penting, karena tanpa pemahaman seperti ini, Pancasila mudah direduksi menjadi hafalan formal, simbol upacara, atau instrumen retoris kekuasaan.

Ketika Pancasila kehilangan hubungan dengan sejarah peradaban bangsa, Pancasila menjadi abstrak. Ketika Pancasila menjadi abstrak, masyarakat sulit merasakan relevansinya. Ketika relevansi hilang, Pancasila mudah berubah menjadi dekorasi semata. Inilah salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan kebangsaan modern yaitu fondasi filosofis diperlakukan sebagai simbol administratif, bukan sebagai ekspresi kesadaran peradaban. Buku ini berusaha mengembalikan hubungan yang terputus tersebut.

Dalam BAB 3 telah dibahas tentang rakyat sebagai pemilik sah negara. Pembahasan tersebut

sangat relevan di sini. Jika rakyat adalah pemilik negara, maka fondasi filosofis negara seharusnya dapat ditelusuri kembali ke pengalaman hidup rakyat sebagai bangsa, bukan sekadar ke desain *elite*. Pancasila memperoleh legitimasi moral yang kuat justru ketika dibaca sebagai bahasa filosofis dari perjalanan kolektif bangsa, bukan sebagai konstruksi yang sepenuhnya datang dari atas.

Penting pula dipahami bahwa membaca Pancasila sebagai kristalisasi tidak berarti menutup ruang evaluasi kritis. Kristalisasi bukan sakralisasi buta. Sebuah bangsa tetap perlu terus menafsirkan, menghidupkan, dan menguji relevansi fondasi nilainya dalam konteks zaman yang berubah. Namun evaluasi yang sehat harus dimulai dari pemahaman yang benar tentang asal-usul filosofisnya, bukan dari asumsi keliru bahwa Pancasila hanyalah slogan semata hasil kompromi administratif.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan sangat jelas yaitu Pancasila bukan produk vakum sejarah. Pancasila adalah hasil kristalisasi pengalaman panjang peradaban Nusantara, pengendapan nilai yang hidup dalam berbagai komunitas bangsa, lalu dirumuskan menjadi bahasa filosofis kebangsaan modern. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak ke pertanyaan yang lebih substantif yaitu jika Pancasila adalah kristalisasi peradaban, maka bagaimana masing-masing sila dapat ditelusuri akarnya dalam pengalaman hidup Nusantara.

6.2. Ketuhanan: Akar Spiritual Nusantara

Jika Pancasila adalah kristalisasi peradaban Nusantara, maka sila pertama tidak dapat dipahami sebagai tempelan formal yang diletakkan demi memenuhi kebutuhan simbolik sebuah negara modern. Sila Ketuhanan harus dibaca sebagai pengakuan terhadap salah satu lapisan terdalam dalam perjalanan bangsa ini yaitu spiritualitas. Nusantara sejak awal bukan ruang peradaban yang dibangun di atas pandangan hidup materialistik semata. Dalam berbagai bentuk kehidupan komunitas, dalam struktur adat, dalam praktik sosial, dalam ritus, dalam seni, dalam cara manusia memahami alam, bahkan dalam cara kekuasaan memperoleh legitimasi, unsur spiritual selalu hadir sebagai bagian yang sangat mendasar.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, rasional, dan sosial, tetapi juga makhluk spiritual. Pengakuan ini penting, karena bangsa dibentuk oleh manusia, dan karakter manusia akan memengaruhi struktur peradaban yang dibangunnya. Jika manusia hanya dipahami sebagai makhluk ekonomi atau biologis, maka peradaban yang lahir cenderung bersifat utilitarian dan mekanistik. Namun jika manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki relasi dengan sesuatu yang melampaui dirinya, maka struktur sosial, etika, hukum, dan kebudayaan akan membawa dimensi transenden. Nusantara berkembang dalam horizon kedua.

Jejak spiritualitas Nusantara sangat tua, jauh sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara modern. Berbagai komunitas awal di kepulauan ini telah

mengenal cara memahami keberadaan yang melampaui manusia. Bentuknya beragam, istilahnya berbeda, ekspresinya tidak seragam, tetapi pola dasarnya menunjukkan satu hal yaitu kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai urusan material. Alam tidak dilihat hanya sebagai benda mati. Kehidupan tidak dianggap sekadar rangkaian aktivitas biologis. Manusia tidak diposisikan sebagai pusat mutlak realitas. Dalam struktur semacam itu, terdapat kesadaran tentang keterhubungan dengan dimensi yang lebih besar.

Perjalanan sejarah kemudian memperkaya struktur spiritual tersebut. Pengaruh Hindu membawa kosmologi yang kompleks, relasi antara manusia, alam, dan keteraturan semesta. Pengaruh Buddha menghadirkan kedalaman refleksi tentang penderitaan, kesadaran, dan pengendalian diri. Islam membawa struktur tauhid yang sangat kuat, mengubah bukan hanya ritus keagamaan tetapi juga etika sosial, hukum, pendidikan, perdagangan, dan kepemimpinan. Kekristenan turut membentuk komunitas-komunitas dengan ekspresi spiritual yang khas. Tradisi-tradisi lokal tetap bertahan dalam berbagai bentuk, menghadirkan warisan spiritual yang melekat dalam identitas komunitas.

Yang penting dipahami adalah bahwa keragaman ekspresi spiritual tersebut tidak menghapus fakta yang lebih mendasar yaitu bangsa ini tumbuh dalam peradaban yang mengakui dimensi ketuhanan atau transendensi. Karena itu, ketika Pancasila menempatkan Ketuhanan pada posisi pertama, hal tersebut bukan sekadar kompromi kekuasaan antar

kelompok agama. Penempatan tersebut mencerminkan pembacaan filosofis terhadap struktur terdalam bangsa. Sebuah bangsa yang secara historis hidup dalam kesadaran spiritual tidak mungkin membangun fondasi negaranya dengan mengabaikan unsur tersebut.

Namun pembacaan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sila Ketuhanan tidak identik dengan dominasi satu agama tertentu atas seluruh bangsa. Pancasila tidak sedang mereduksi bangsa menjadi negara teokratis dalam pengertian kekuasaan formal satu otoritas agama atas sistem pemerintahan. Yang diakui adalah fondasi spiritual bangsa, bukan monopoli kelembagaan tertentu atas negara. Ini perbedaan yang sangat penting. Bangsa yang memiliki akar spiritual tidak otomatis harus menjadi negara agama dalam bentuk legal formal yang sempit.

Dalam konteks Nusantara, spiritualitas justru berkembang dalam ruang interaksi yang kompleks. Sumatra mengenal dinamika Islam, adat, dan tradisi perdagangan yang membawa jaringan peradaban luas. Jawa mengenal sinkronisasi budaya yang rumit antara tradisi lokal, Hindu-Buddha, dan Islam. Bali mempertahankan struktur spiritual kosmologis yang kuat. Sulawesi memperlihatkan relasi antara agama, adat, dan kehormatan komunitas. Maluku membawa pengalaman perjumpaan lintas iman dalam jalur perdagangan global. Papua memiliki struktur relasi spiritual yang sangat melekat dengan komunitas dan alam. Semua ini menunjukkan bahwa akar spiritual Nusantara bersifat hidup, beragam, dan berlapis.

Karena itu Ketuhanan dalam Pancasila harus dibaca sebagai pengakuan terhadap fondasi spiritual bangsa, bukan sebagai instrumen pemaksaan homogenitas keyakinan. Dalam bahasa peradaban, bangsa ini lahir dari masyarakat yang percaya bahwa kehidupan memiliki dimensi moral dan transenden. Negara yang lahir dari bangsa semacam ini akan kehilangan kompatibilitas filosofis jika sepenuhnya memutus hubungan dengan unsur spiritual tersebut.

Dalam arsitektur analogi buku ini, posisi Ketuhanan sangat penting karena berkaitan dengan core logic bangsa. Sistem nilai apa pun selalu memerlukan sumber legitimasi moral terdalam. Jika seluruh kehidupan berbangsa hanya ditopang oleh prosedur legal formal tanpa horizon etis yang lebih tinggi, maka kekuasaan mudah berubah menjadi sekadar teknik administrasi. Dalam kondisi seperti itu, legalitas dapat dipisahkan dari moralitas. Keputusan dapat sah secara prosedural tetapi kosong secara etis. Inilah salah satu bahaya modernitas yang terlalu teknokratis.

Ketuhanan dalam Pancasila menghadirkan pengingat bahwa tidak semua yang legal otomatis benar. Tidak semua yang formal otomatis adil. Tidak semua keputusan kekuasaan memperoleh legitimasi hanya karena memenuhi prosedur administratif. Dalam kerangka ini, sila pertama bukan hanya pengakuan spiritual, tetapi juga fondasi etik yang membatasi kesombongan kekuasaan.

Dalam BAB 3 telah dibahas tentang rakyat sebagai pemilik sah negara. Pembahasan tersebut dapat

diperdalam di sini. Jika rakyat adalah pemilik negara, bukan berarti negara menjadi otoritas absolut yang bebas dari ukuran moral. Dalam tradisi spiritual yang sehat, kekuasaan selalu dipahami sebagai amanah, bukan kepemilikan mutlak. Prinsip ini sangat kuat dalam banyak tradisi Nusantara. Pemimpin dipandang sebagai pemegang tanggung jawab, bukan penguasa tanpa batas. Jabatan bukan alat pemuasan ego, tetapi ruang pengabdian yang akan diuji secara moral.

Penting juga ditegaskan bahwa sila Ketuhanan bukan sekadar urusan ritual keagamaan. Jika direduksi menjadi persoalan simbol ibadah atau identitas formal, maknanya menjadi sangat sempit. Ketuhanan dalam konteks peradaban jauh lebih luas. Ketuhanan menyentuh cara manusia memahami kebenaran, tanggung jawab, keadilan, kesombongan, keterbatasan, dan makna hidup bersama. Dengan kata lain, sila pertama bukan ornamen pembuka, tetapi fondasi orientasi moral bangsa.

Ketika bangsa kehilangan hubungan dengan dimensi spiritual ini, kekuasaan mudah mengalami degenerasi. Politik berubah menjadi sekadar perebutan posisi. Hukum menjadi alat teknis. Birokrasi menjadi mesin dingin. Kebijakan kehilangan empati. Rakyat diperlakukan sebagai objek administrasi. Dalam kondisi seperti itu, negara mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan kedalaman etisnya.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Ketuhanan dalam Pancasila bukan produk kompromi simbolik, melainkan kristalisasi dari akar spiritual peradaban Nusantara. Bangsa ini tumbuh

dalam kesadaran bahwa kehidupan tidak berhenti pada materi, bahwa kekuasaan tidak berdiri di ruang moral yang kosong, dan bahwa manusia hidup dalam horizon tanggung jawab yang lebih tinggi. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sila berikutnya yaitu bagaimana kesadaran spiritual tersebut membentuk penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat dalam prinsip kemanusiaan.

6.3. Kemanusiaan: Akar Adab dan Martabat

Jika sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia tumbuh dari kesadaran spiritual, maka sila kedua memperlihatkan konsekuensi etis dari kesadaran tersebut yaitu penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat. Spiritualitas yang sehat tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dan Yang Transenden. Spiritualitas yang matang selalu memancar ke dalam cara manusia memperlakukan sesama. Karena itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bukan unsur yang berdiri terpisah dari sila Ketuhanan, melainkan kelanjutan logis dari kesadaran bahwa kehidupan memiliki fondasi moral yang lebih tinggi daripada kepentingan sesaat.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk rasional, sosial, spiritual, dan pembentuk komunitas. Pengakuan ini sangat penting karena cara sebuah bangsa memahami manusia akan menentukan bentuk peradabannya. Jika manusia dipahami hanya sebagai unit ekonomi, maka masyarakat akan dibangun di atas logika kompetisi dan utilitas. Jika manusia dipahami

hanya sebagai objek kekuasaan, maka kekuasaan akan cenderung memperlakukan rakyat sebagai instrumen administrasi. Namun jika manusia dipahami sebagai makhluk bermartabat, maka sistem sosial akan menempatkan penghormatan, etika, dan keadilan sebagai prinsip dasar.

Kata "beradab" dalam sila kedua memiliki kedalaman yang jauh melampaui kesopanan formal. Adab bukan sekadar tata krama permukaan. Adab adalah struktur moral yang mengatur cara manusia menempatkan diri dalam relasi dengan sesama, dengan komunitas, dengan kekuasaan, dengan alam, bahkan dengan kebenaran. Adab adalah kesadaran tentang batas, tanggung jawab, kehormatan, dan penghormatan. Karena itu, ketika sila kedua menggunakan istilah "beradab," yang dimaksud bukan hanya perilaku santun, tetapi kualitas peradaban yang mengakui martabat manusia.

Jejak nilai semacam ini sangat kuat dalam perjalanan Nusantara. Dalam berbagai komunitas bangsa, manusia tidak dipahami semata-mata sebagai individu biologis yang kebetulan hidup berdampingan. Kehidupan selalu dibangun di atas pengakuan terhadap posisi manusia dalam jaringan sosial dan moral tertentu. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, penghormatan terhadap relasi sosial, kesadaran akan tata, dan pentingnya keseimbangan menunjukkan keberadaan struktur adab yang kuat. Dalam tradisi Minangkabau, relasi antara musyawarah, penghormatan terhadap struktur sosial, dan etika kehidupan bersama mencerminkan penghargaan

terhadap martabat manusia dalam komunitas. Dalam banyak komunitas Dayak, penghormatan terhadap relasi sosial dan keberlangsungan hidup bersama menunjukkan prinsip yang serupa.

Papua juga memperlihatkan dimensi yang sangat mendalam dalam konteks ini. Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa berbagai komunitas di Papua membawa warisan komunitarian yang kuat, dengan penghormatan terhadap relasi manusia, ruang hidup, dan martabat eksistensial. Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap manusia bukan monopoli satu kawasan atau satu tradisi budaya. Kecenderungan ini tersebar luas dalam pengalaman Nusantara, meskipun dengan ekspresi yang berbeda-beda.

Sulawesi memperlihatkan struktur kehormatan yang sangat kuat dalam banyak komunitasnya. Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan komunitas lain membawa tradisi yang menempatkan martabat, kehormatan, dan integritas sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial. Tentu bentuknya berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain, tetapi pola dasarnya menunjukkan satu hal yaitu manusia dipahami sebagai subjek moral, bukan sekadar objek sosial. Maluku, dengan pengalaman pluralitas interaksi global, juga memperlihatkan bagaimana komunitas harus mengembangkan etika hidup bersama agar relasi sosial tetap terjaga dalam ruang yang kompleks.

Dengan demikian, sila Kemanusiaan bukan produk impor dari wacana abstrak tentang hak asasi manusia yang sepenuhnya datang dari luar sejarah bangsa. Ini penting untuk ditegaskan secara hati-hati.

Bukan berarti gagasan universal tentang hak asasi manusia tidak bernilai, tetapi buku ini sedang menunjukkan bahwa penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk bermartabat memiliki akar yang dapat ditelusuri dalam pengalaman Nusantara sendiri. Dengan kata lain, penghormatan terhadap manusia bukan konsep asing yang dipaksakan ke atas bangsa, melainkan resonansi dengan struktur moral yang telah lama hidup dalam berbagai bentuk.

Namun ada perbedaan penting antara "kemanusiaan" dalam pengertian peradaban Nusantara dan humanisme modern yang sepenuhnya sekuler-materialistik. Dalam banyak tradisi modern tertentu, manusia diposisikan sebagai pusat mutlak realitas, hampir tanpa keterikatan moral yang lebih tinggi. Dalam konteks Pancasila, kemanusiaan justru berdiri setelah Ketuhanan. Urutan ini sangat filosofis. Artinya, penghormatan terhadap manusia tidak lahir dari absolutisasi manusia, tetapi dari pengakuan bahwa manusia memiliki martabat justru karena kehidupan memiliki fondasi moral yang lebih tinggi.

Karena itu, sila kedua tidak mendorong individualisme ekstrem yang melepaskan manusia dari komunitas. Kemanusiaan dalam Pancasila tetap hidup dalam relasi sosial. Ini sangat sesuai dengan pengalaman Nusantara, di mana manusia hampir selalu dipahami dalam konteks komunitas, keluarga, adat, dan kehidupan bersama. Martabat manusia diakui, tetapi manusia tidak dibayangkan sebagai atom sosial yang sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab kolektif.

Dalam konteks negara modern, sila ini memiliki implikasi yang sangat besar. Jika manusia adalah makhluk bermartabat, maka negara tidak boleh memperlakukan rakyat hanya sebagai angka statistik, objek kebijakan, atau sumber legitimasi prosedural. Rakyat bukan bahan baku administrasi. Rakyat bukan sekadar pemilih periodik. Rakyat adalah manusia yang memiliki martabat intrinsik. Negara yang melupakan prinsip ini akan berubah menjadi mesin birokrasi yang dingin dan mekanistik.

Dalam BAB 3 telah dibahas bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Sila kedua memperdalam gagasan tersebut dengan satu pengingat penting yaitu pemilik negara bukan sekadar entitas hukum abstrak, tetapi manusia konkret yang memiliki martabat. Karena itu, desain negara yang sehat harus dibangun bukan hanya atas prinsip kedaulatan formal, tetapi juga atas penghormatan terhadap kemanusiaan substantif. Kedaulatan tanpa kemanusiaan berisiko berubah menjadi kekuasaan massa yang brutal. Kemanusiaan tanpa kedaulatan berisiko menjadi moralitas tanpa struktur kekuasaan. Pancasila mencoba menjaga keseimbangan keduanya.

Kata "adil" dalam sila ini juga sangat penting. Adab tanpa keadilan dapat berubah menjadi formalitas moral kosong. Penghormatan simbolik terhadap manusia tidak cukup jika struktur sosial dan tata kehidupan bersama tetap menghasilkan ketimpangan, penindasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Karena itu, kemanusiaan dalam Pancasila bukan hanya etika interpersonal, tetapi juga prinsip

yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan negara. Negara harus mengakui martabat manusia bukan hanya dalam pidato, tetapi juga melalui struktur, kebijakan, dan tindakan nyata yang menjamin perlakuan adil terhadap setiap warga negara.

Dalam arsitektur analogi buku ini, sila kedua menunjukkan bahwa kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa tidak dibangun di atas logika efisiensi teknokratis semata. Sistem yang sehat harus memiliki orientasi pada manusia sebagai subjek moral. Tanpa prinsip ini, negara dapat menjadi sangat efisien tetapi tidak manusiawi. Sistem dapat sangat rapi tetapi kejam. Hukum dapat sangat lengkap tetapi kehilangan jiwa.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kristalisasi dari akar adab dan penghormatan terhadap martabat manusia yang telah lama hidup dalam peradaban Nusantara. Bangsa ini tidak lahir dari logika kekuasaan yang melihat manusia sebagai instrumen, tetapi dari pengalaman panjang yang menempatkan manusia sebagai subjek kehidupan bersama. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sila berikutnya yaitu bagaimana pengalaman geografis, historis, dan peradaban Nusantara melahirkan kebutuhan mendalam akan persatuan.

6.4. Persatuan: Akar Geopolitik Kepulauan

Jika sila Ketuhanan menunjukkan akar spiritual bangsa, dan sila Kemanusiaan memperlihatkan akar adab serta penghormatan terhadap martabat manusia,

maka sila Persatuan membawa pembahasan ke dimensi yang sangat konkret sekaligus strategis yaitu bagaimana realitas geografis, sejarah peradaban, dan pengalaman kolektif Nusantara membentuk kebutuhan akan kebersamaan dalam skala yang jauh lebih besar daripada komunitas lokal. Persatuan dalam konteks Pancasila bukan slogan sentimental yang diciptakan untuk membangun semangat nasionalisme kosong. Persatuan adalah jawaban historis terhadap realitas Nusantara sebagai ruang kepulauan yang kompleks, plural, luas, dan secara geopolitik sangat rentan terhadap fragmentasi.

Dalam banyak negara yang terbentuk di daratan kontinental, persatuan sering dibayangkan melalui kesinambungan ruang geografis yang relatif menyatu. Jalur darat menghubungkan wilayah demi wilayah secara organik. Interaksi sosial berlangsung melalui kontinuitas fisik yang lebih mudah dibangun. Nusantara berbeda. Bangsa ini lahir dari ribuan pulau, laut yang luas, komunitas yang beragam, bahasa yang berlapis, struktur budaya yang berbeda, pengalaman sejarah lokal yang tidak identik, dan pola perkembangan peradaban yang tumbuh dalam banyak simpul sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, persatuan bukan keadaan otomatis. Persatuan adalah proyek peradaban.

Namun justru di sinilah letak keunikan Nusantara. Laut yang secara kasat mata tampak sebagai pemisah, dalam pengalaman sejarah justru sering menjadi penghubung. Dalam perspektif geopolitik kontinental, laut sering dipahami sebagai batas. Dalam

pengalaman Nusantara, laut adalah jalur kehidupan. Laut membawa perdagangan, pertukaran gagasan, perpindahan manusia, penyebaran agama, diplomasi, bahkan pembentukan jaringan kekuasaan. Karena itu persatuan Nusantara tidak lahir melawan geografi, melainkan melalui pembacaan kreatif terhadap geografi itu sendiri.

Dalam BAB 4 telah dijelaskan bahwa Nusantara bukan sekadar istilah geografis, tetapi ruang peradaban yang telah memiliki jaringan keterhubungan jauh sebelum lahirnya negara modern. Sriwijaya adalah salah satu contoh penting. Kekuatannya tidak bertumpu pada penguasaan daratan yang luas dalam pengertian kontinental klasik, melainkan pada kemampuan mengelola jaringan maritim, perdagangan, hubungan antarwilayah, dan konektivitas strategis. Ini menunjukkan bahwa gagasan tentang keterhubungan antarpulau bukan penemuan modern. Nusantara telah mengenal logika persatuan dalam bentuk historisnya sendiri.

Majapahit juga menghadirkan pelajaran penting dalam konteks ini. Terlepas dari berbagai perdebatan historis tentang bentuk pengaruh dan cakupan kekuasaannya, yang relevan dalam pembacaan filosofis buku ini adalah adanya kesadaran tentang keterhubungan kepulauan sebagai horizon kekuasaan dan peradaban. Ini menunjukkan bahwa pengalaman Nusantara telah lama bergerak melampaui batas komunitas lokal yang sempit. Dengan kata lain, benih-benih kesadaran persatuan telah hidup sebelum istilah "Indonesia" memperoleh bentuk modernnya.

Namun persatuan dalam konteks Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspansi kekuasaan. Persatuan yang sehat bukan dominasi satu pusat terhadap pinggiran. Persatuan adalah kemampuan membangun kebersamaan tanpa menghapus keberagaman. Ini sangat penting, karena Indonesia bukan bangsa homogen. Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masing-masing membawa struktur nilai, sejarah, dan ekspresi peradaban yang berbeda. Persatuan dalam konteks seperti ini tidak berarti penyeragaman. Persatuan berarti arsitektur kebersamaan.

Di sinilah sila Persatuan memperoleh kedalaman filosofisnya. Persatuan bukan tuntutan administratif semata. Persatuan adalah jawaban terhadap kebutuhan geopolitik dan peradaban. Bangsa kepulauan tanpa prinsip persatuan akan mudah terfragmentasi, mudah diperebutkan, mudah dipengaruhi kekuatan luar, dan mudah berubah menjadi kumpulan entitas yang saling terasing. Sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah-wilayah strategis yang gagal membangun persatuan sering menjadi arena intervensi dan perebutan pengaruh. Nusantara memahami risiko tersebut sejak lama.

Dalam konteks modern, makna ini semakin penting. Indonesia berada pada posisi geopolitik yang sangat strategis, berada di jalur perdagangan global, dikelilingi dinamika kekuatan regional dan internasional, memiliki sumber daya besar, dan

mengelola masyarakat yang sangat plural. Dalam kondisi seperti ini, persatuan bukan sekadar idealisme moral, tetapi kebutuhan strategis. Bangsa yang terpecah akan sangat rentan. Bangsa yang bersatu memiliki peluang mempertahankan kedaulatan secara lebih kokoh.

Namun penting ditegaskan bahwa persatuan dalam Pancasila bukan nasionalisme agresif yang meniadakan kemanusiaan. Urutan sila menunjukkan struktur logika yang sangat penting. Persatuan hadir setelah Ketuhanan dan Kemanusiaan. Artinya, persatuan harus dibangun di atas fondasi spiritual dan penghormatan terhadap martabat manusia. Persatuan yang mengorbankan kemanusiaan akan berubah menjadi totalitarianisme. Persatuan yang memaksakan homogenitas akan menghancurkan pluralitas peradaban bangsa sendiri. Karena itu persatuan dalam Pancasila adalah persatuan yang beradab.

Dalam konteks Nusantara, prinsip ini sangat sesuai. Persatuan tidak pernah berarti penghapusan identitas lokal secara total. Yang dicari adalah kesadaran bahwa perbedaan dapat hidup dalam satu horizon kebangsaan yang lebih besar. Ini selaras dengan pengalaman sejarah banyak komunitas yang hidup dalam jaringan perdagangan, interaksi budaya, dan hubungan antarpulau. Kebersamaan tidak selalu menuntut keseragaman. Justru kemampuan hidup dalam pluralitas adalah salah satu kekuatan Nusantara.

Dalam BAB 3 telah dibahas tentang rakyat sebagai pemilik sah negara. Sila Persatuan memperluas makna tersebut. Rakyat sebagai pemilik negara bukan

kumpulan individu yang berdiri sendiri tanpa hubungan, tetapi komunitas kebangsaan yang berbagi nasib strategis bersama. Tanpa persatuan, konsep kedaulatan rakyat akan mudah terfragmentasi menjadi kompetisi kepentingan sempit. Persatuan menjadi ruang tempat kedaulatan kolektif dapat memperoleh bentuk kekuasaan yang stabil.

Dalam arsitektur analogi buku ini, sila Persatuan dapat dipahami sebagai prinsip integrasi dalam kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Sistem besar yang terdiri dari banyak modul memerlukan logika integrasi agar tidak terpecah menjadi bagian-bagian yang saling bertentangan. Tanpa integrasi, kompleksitas berubah menjadi kekacauan. Dengan integrasi yang sehat, keragaman justru menjadi kekuatan. Indonesia sebagai *multi-civilizational platform* membutuhkan prinsip ini secara mendasar.

Penting pula dicatat bahwa persatuan bukan keadaan final yang otomatis terjaga selamanya. Persatuan adalah proses yang harus terus dirawat melalui keadilan, penghormatan, dialog, dan desain negara yang sehat. Persatuan yang dibangun di atas ketimpangan atau dominasi akan rapuh. Persatuan yang dibangun di atas rasa memiliki bersama akan jauh lebih kokoh. Karena itu sila Persatuan tidak boleh dibaca hanya sebagai slogan simbolik, tetapi sebagai prinsip strategis kebangsaan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu sila Persatuan adalah kristalisasi dari pengalaman geopolitik dan peradaban Nusantara sebagai ruang kepulauan yang plural tetapi saling

terhubung. Persatuan bukan konstruksi administratif yang dipaksakan, melainkan kebutuhan historis, strategis, dan filosofis bagi bangsa yang lahir dari jaringan kepulauan besar. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sila berikutnya yaitu bagaimana tradisi musyawarah dan kebijaksanaan kolektif Nusantara melahirkan prinsip kerakyatan dalam Pancasila.

6.5. Kerakyatan: Akar Musyawarah dan Kebijaksanaan Kolektif

Jika sila Persatuan menjawab kebutuhan geopolitik Nusantara sebagai ruang kepulauan yang luas dan plural, maka sila Kerakyatan menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar tentang bagaimana keputusan bersama seharusnya diambil dalam kehidupan kebangsaan. Prinsip ini sangat penting karena persatuan tanpa mekanisme pengambilan keputusan yang adil berisiko berubah menjadi dominasi sepihak. Kebersamaan yang tidak memberi ruang partisipasi hanya akan melahirkan ketegangan tersembunyi. Karena itu, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan bukan sekadar formula administratif, melainkan kristalisasi dari tradisi panjang kebijaksanaan kolektif yang hidup dalam peradaban Nusantara.

Dalam pembacaan modern yang terlalu disederhanakan, sila ini sering direduksi menjadi padanan lokal dari demokrasi prosedural. Pembacaan seperti itu terlalu sempit. Demokrasi elektoral modern

umumnya menekankan kompetisi suara, agregasi preferensi individu, dan legitimasi numerik mayoritas. Sementara itu, tradisi Nusantara dalam banyak komunitas berkembang melalui logika yang lebih kaya, seperti musyawarah, mufakat, pertimbangan moral, keseimbangan komunitas, penghormatan terhadap kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan yang tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi jumlah. Karena itu, sila Kerakyatan tidak dapat dibaca sekadar sebagai imitasi model demokrasi modern yang diberi bahasa lokal.

Dalam BAB 1 telah ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan pembentuk komunitas. Konsekuensinya sangat penting. Jika manusia hidup dalam komunitas, maka keputusan bersama menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Namun cara keputusan diambil akan menentukan kualitas kehidupan bersama tersebut. Keputusan yang dipaksakan dari atas menghasilkan alienasi. Keputusan yang semata-mata mengikuti kekuatan fisik melahirkan dominasi. Keputusan yang hanya mengandalkan manipulasi melahirkan ketidakpercayaan. Karena itu peradaban yang matang selalu mengembangkan mekanisme kolektif untuk mengelola perbedaan kepentingan.

Jejak mekanisme semacam ini sangat kuat dalam Nusantara. Dalam banyak komunitas, keputusan penting tidak diambil melalui logika perintah sepihak yang kaku. Musyawarah berkembang sebagai praktik sosial yang hidup. Dalam masyarakat Jawa dikenal tradisi rembug sebagai ruang pembicaraan kolektif

untuk mencari keseimbangan. Dalam tradisi Minangkabau, mekanisme permufakatan memiliki posisi yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan komunitas. Dalam berbagai komunitas Dayak, kehidupan bersama juga ditopang oleh pembicaraan kolektif dan struktur sosial yang menempatkan relasi komunitas sebagai unsur penting.

Sulawesi menghadirkan ekspresi lain dari prinsip serupa. Dalam komunitas Bugis, Makassar, Mandar, dan berbagai kelompok lain, penghormatan terhadap kehormatan, struktur sosial, dan pertimbangan bersama menunjukkan bahwa keputusan kolektif bukan konsep asing. Papua juga membawa pelajaran yang sangat penting. Dalam banyak komunitas Papua, kehidupan sosial dibangun dalam relasi komunitarian yang kuat, sehingga keputusan tidak dipahami semata-mata sebagai pilihan individual yang terpisah dari struktur sosial. Maluku, dengan pengalaman pluralitas interaksi yang kompleks, juga menunjukkan pentingnya mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hidup bersama.

Dengan demikian, ketika Pancasila menempatkan prinsip kerakyatan dalam struktur dasarnya, hal tersebut bukan adopsi dangkal dari teori pemerintahan modern, melainkan artikulasi filosofis terhadap pengalaman sosial bangsa sendiri. Bangsa ini mengenal pengambilan keputusan kolektif jauh sebelum sistem pemilu modern diperkenalkan. Tentu bentuknya berbeda-beda, skalanya beragam, dan tidak seluruh praktik masa lalu ideal tanpa cacat. Namun pola dasarnya menunjukkan satu hal yaitu kehidupan

bersama di Nusantara memiliki akar deliberatif yang kuat.

Penting juga memperhatikan pilihan kata dalam sila tersebut. Bukan sekadar "kerakyatan," tetapi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan." Ini adalah formulasi yang sangat dalam. Kerakyatan tanpa hikmat dapat berubah menjadi populisme yang impulsif. Kehendak mayoritas tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi tirani massa. Partisipasi tanpa kedewasaan dapat melahirkan kekacauan. Karena itu, Pancasila tidak mengusulkan sekadar mekanisme partisipatif, tetapi partisipasi yang dituntun oleh kebijaksanaan.

Kata "hikmat" di sini sangat penting karena menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga kualitas moral dan intelektual. Hikmat bukan kecerdikan manipulatif. Hikmat adalah kemampuan menimbang kebenaran, keadilan, dampak jangka panjang, dan kepentingan bersama secara lebih dewasa. Dalam konteks peradaban Nusantara, unsur ini sangat masuk akal. Banyak tradisi lokal menempatkan kebijaksanaan, pengalaman, dan pertimbangan moral sebagai unsur penting dalam kehidupan kolektif.

Kata "permusyawaratan" juga mempertegas bahwa kerakyatan dalam Pancasila tidak dibangun di atas logika benturan mentah antar kepentingan. Musyawarah adalah proses mencari titik temu, bukan sekadar kompetisi menang-kalah. Musyawarah mengandaikan kesediaan mendengar, menimbang, dan menempatkan kepentingan bersama di atas ego sempit.

Ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat yang tumbuh dalam struktur komunitarian. Dalam masyarakat yang masih memiliki kesadaran kolektif, keputusan bersama bukan arena penghancuran lawan, tetapi upaya menjaga keberlangsungan hidup bersama.

Kata "perwakilan" menghadirkan dimensi modern yang penting. Bangsa besar dengan skala Indonesia tidak mungkin mengandalkan musyawarah langsung dalam seluruh urusan kebangsaan. Karena itu prinsip perwakilan menjadi mekanisme institusional untuk menerjemahkan semangat musyawarah ke dalam skala negara modern. Namun penting ditegaskan yaitu perwakilan dalam logika Pancasila bukan sekadar delegasi teknis kekuasaan. Perwakilan seharusnya menjadi perpanjangan dari kebijaksanaan rakyat, bukan pemisahan *elite* dari rakyat.

Dalam BAB 3 telah dibahas bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Sila Kerakyatan memperlihatkan bagaimana kepemilikan tersebut memperoleh bentuk dalam tata kehidupan bernegara. Jika rakyat adalah pemilik, maka sistem pengambilan keputusan tidak boleh sepenuhnya terlepas dari kehendak rakyat. Namun, Pancasila tidak berhenti pada logika kepemilikan numerik. Pancasila menambahkan syarat kebijaksanaan, musyawarah, dan perwakilan yang bermartabat. Hal ini menunjukkan kedewasaan filosofis yang sangat penting yaitu kedaulatan rakyat tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah suara, tetapi harus dijalankan melalui pertimbangan yang bijaksana, dialog, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.

Dalam konteks modern, prinsip ini menghadirkan kritik yang relevan terhadap demokrasi yang terlalu prosedural. Sistem pemilu dapat berjalan, angka suara dapat dihitung, lembaga formal dapat berdiri, tetapi jika pengambilan keputusan kehilangan hikmat, kehilangan orientasi pada kepentingan bersama, atau berubah menjadi transaksi *elite*, maka substansi kerakyatan menjadi kosong. Dengan kata lain, demokrasi prosedural tidak otomatis identik dengan kerakyatan dalam makna Pancasila.

Dalam arsitektur analogi buku ini, sila Kerakyatan menunjukkan bahwa kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa tidak dibangun di atas logika kekuasaan yang sepenuhnya mekanistik. Sistem harus memberi ruang bagi partisipasi rakyat, tetapi partisipasi tersebut harus dituntun oleh kebijaksanaan kolektif. Tanpa hikmat, sistem menjadi gaduh. Tanpa kerakyatan, sistem menjadi oligarkis. Tanpa musyawarah, sistem kehilangan jiwa komunitarian bangsa.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu sila Kerakyatan adalah kristalisasi dari akar musyawarah, permufakatan, kebijaksanaan kolektif, dan tradisi komunitarian yang telah lama hidup dalam peradaban Nusantara. Bangsa ini mengenal praktik pengambilan keputusan bersama jauh sebelum demokrasi prosedural modern diperkenalkan. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sila penutup yaitu bagaimana gotong royong, solidaritas sosial, dan tanggung jawab bersama melahirkan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

6.6. Keadilan Sosial: Akar Gotong Royong dan Solidaritas Kehidupan Bersama

Jika sila Kerakyatan menjelaskan bagaimana keputusan bersama seharusnya diambil, maka sila Keadilan Sosial menjawab pertanyaan yang tidak kalah mendasar yaitu untuk siapa seluruh sistem kebangsaan itu dijalankan. Sebab pengambilan keputusan yang baik belum tentu menghasilkan kehidupan yang adil jika orientasi moralnya salah. Musyawarah dapat berubah menjadi formalitas jika hasilnya tetap menguntungkan kelompok tertentu. Representasi dapat berubah menjadi ritual kosong jika distribusi manfaat kehidupan bersama tetap timpang. Karena itu sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan sekadar penutup administratif dari lima sila, melainkan klimaks moral dari keseluruhan arsitektur Pancasila.

Dalam pembacaan yang terlalu dangkal, keadilan sosial sering dipersempit menjadi urusan distribusi ekonomi semata. Tentu dimensi ekonomi sangat penting, tetapi sila ini jauh lebih luas. Keadilan sosial menyentuh struktur kehidupan bersama secara menyeluruh yaitu akses terhadap martabat hidup, relasi sosial yang sehat, distribusi tanggung jawab, keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap yang lemah, serta penolakan terhadap struktur kehidupan yang membiarkan sebagian masyarakat menanggung beban sementara sebagian lain menikmati manfaat secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, keadilan sosial adalah prinsip peradaban, bukan sekadar kebijakan fiskal.

Untuk memahami akar sila ini, pembacaan harus kembali ke pengalaman hidup Nusantara. Dalam berbagai komunitas bangsa, kehidupan tidak dibangun di atas logika individualisme ekstrem yang memandang manusia sebagai unit yang sepenuhnya terpisah dari nasib sesamanya. Dalam banyak pengalaman Nusantara, kehidupan justru bertumpu pada kesadaran keterhubungan. Manusia hidup dalam komunitas. Komunitas hidup melalui relasi timbal balik. Beban kehidupan tidak selalu ditanggung sendiri. Kebutuhan kolektif dijawab melalui partisipasi bersama. Dari struktur inilah lahir apa yang dalam bahasa modern sering diringkas dengan istilah gotong royong.

Namun gotong royong tidak boleh dipahami secara dangkal sebagai sekadar kerja bakti fisik membersihkan lingkungan atau membantu pembangunan fasilitas umum. Itu hanya salah satu ekspresi permukaan. Pada lapisan yang lebih dalam, gotong royong adalah *worldview* sosial. Gotong royong adalah keyakinan bahwa kehidupan bersama menuntut partisipasi bersama. Gotong royong adalah penolakan terhadap egoisme sosial yang ekstrem. Gotong royong adalah pengakuan bahwa keberlangsungan komunitas memerlukan distribusi tanggung jawab yang adil. Dalam konteks ini, gotong royong adalah fondasi moral keadilan sosial.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan pembentuk komunitas. Konsekuensinya sangat penting. Jika manusia hidup dalam komunitas, maka kehidupan bersama akan selalu melahirkan persoalan distribusi manfaat dan distribusi

beban. Siapa bekerja. Siapa memperoleh hasil. Siapa menanggung risiko. Siapa dilindungi ketika lemah. Siapa membantu ketika ada kesulitan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah netral. Peradaban yang sehat akan menjawabnya dengan struktur solidaritas. Peradaban yang rusak akan menjawabnya dengan dominasi.

Jejak solidaritas semacam ini tersebar luas dalam pengalaman Nusantara. Di Jawa, gotong royong menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Di Sumatra, banyak komunitas mengenal struktur kebersamaan yang menekankan tanggung jawab kolektif. Di Minangkabau, relasi sosial dibangun dalam jaringan tanggung jawab komunal yang kuat. Di Kalimantan, komunitas-komunitas Dayak memperlihatkan kehidupan yang sangat bergantung pada solidaritas bersama dalam relasi dengan ruang hidup. Di Papua, struktur komunitarian memperlihatkan bahwa kehidupan manusia tidak dipahami sebagai proyek individual yang terisolasi. Di Sulawesi, etika kehormatan dan loyalitas sosial juga mencerminkan bentuk solidaritas kolektif yang kuat.

Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan hasil impor dari teori ekonomi modern semata. Tentu dunia modern mengenal berbagai teori keadilan, kesejahteraan, distribusi, dan hak sosial. Namun buku ini sedang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki akar moralnya sendiri dalam memahami keadilan sosial. Keadilan sosial bukan konsep asing yang dipaksakan dari luar, tetapi

resonansi filosofis dengan pengalaman hidup bangsa yang telah lama mengenal prinsip kebersamaan.

Penting juga memperhatikan posisi sila ini dalam struktur Pancasila. Keadilan sosial ditempatkan setelah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Kerakyatan. Urutan ini sangat filosofis. Keadilan sosial tidak berdiri di ruang hampa. Keadilan sosial dibangun di atas kesadaran spiritual, penghormatan terhadap martabat manusia, komitmen terhadap persatuan, dan mekanisme kerakyatan yang sehat. Jika salah satu fondasi ini hilang, keadilan sosial berisiko berubah menjadi slogan kosong atau instrument populis.

Tanpa Ketuhanan, keadilan sosial dapat berubah menjadi proyek materialistik yang kehilangan horizon moral. Tanpa Kemanusiaan, distribusi dapat dilakukan tanpa penghormatan terhadap martabat manusia. Tanpa Persatuan, keadilan sosial dapat terpecah menjadi perebutan antar kelompok. Tanpa Kerakyatan, distribusi dapat dikendalikan *elite* tanpa akuntabilitas. Karena itu sila kelima bukan sekadar tambahan, tetapi hasil logis dari keseluruhan struktur Pancasila.

Dalam konteks negara modern, implikasinya sangat besar. Negara tidak boleh dipahami hanya sebagai penjaga ketertiban administratif atau pengelola prosedur formal. Negara harus memiliki orientasi substantif terhadap kehidupan rakyat. Jika negara hanya menjaga sistem hukum tetapi membiarkan ketimpangan yang merusak martabat manusia, maka negara kehilangan salah satu tujuan moralnya. Jika negara menjadi instrumen akumulasi segelintir *elite*,

sementara rakyat luas menanggung beban, maka prinsip keadilan sosial telah dikhianati.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Sila kelima memperjelas tujuan dari kepemilikan tersebut. Negara bukan dimiliki rakyat agar menjadi simbol formal belaka. Negara dimiliki rakyat agar kehidupan bersama dapat diatur secara lebih adil. Kedaulatan tanpa keadilan sosial hanya menghasilkan formalitas kekuasaan tanpa makna substantif. Kepemilikan rakyat atas negara harus tercermin dalam manfaat nyata bagi kehidupan bersama.

Keadilan sosial juga penting sebagai koreksi terhadap bahaya oligarki. Dalam analogi sistem yang digunakan sepanjang buku ini, negara dapat dibajak oleh kelompok yang memperoleh kontrol berlebihan atas sistem. Ketika hal itu terjadi, distribusi manfaat akan cenderung terkonsentrasi, sementara beban sosial menyebar ke masyarakat luas. Sila kelima adalah penolakan filosofis terhadap kondisi tersebut. Keadilan sosial menegaskan bahwa bangsa tidak dibangun untuk melayani akumulasi segelintir pihak.

Dalam arsitektur analogi buku ini, sila Keadilan Sosial dapat dipahami sebagai orientasi keluaran (ethical output orientation) dari kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Sistem bukan dibangun hanya agar dapat berjalan secara teknis. Sistem harus menghasilkan kehidupan bersama yang lebih adil. Negara yang sangat efisien tetapi menghasilkan ketimpangan brutal tetap merupakan sistem yang gagal secara moral. Negara yang rapi secara administratif

tetapi tidak berpihak pada keadilan sosial kehilangan kompatibilitas dengan *source code* bangsanya sendiri.

Penting pula ditegaskan bahwa keadilan sosial bukan berarti keseragaman hasil absolut atau penghapusan seluruh perbedaan. Kehidupan manusia selalu mengandung variasi kapasitas, peran, dan kontribusi. Yang ditolak adalah struktur ketidakadilan yang sistemik, eksploitasi yang merendahkan martabat, serta distribusi beban dan manfaat yang tidak proporsional. Dengan demikian, keadilan sosial adalah prinsip keseimbangan moral, bukan simplifikasi ekonomi.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah kristalisasi dari akar gotong royong, solidaritas sosial, dan kesadaran bahwa kehidupan bersama harus dibangun di atas distribusi tanggung jawab dan manfaat yang adil. Bangsa Indonesia tidak lahir dari logika individualisme ekstrem, tetapi dari pengalaman panjang kebersamaan. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sintesis yang lebih besar yaitu jika kelima sila adalah kristalisasi peradaban Nusantara, maka Pancasila sesungguhnya merupakan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa Indonesia.

6.7. Pancasila sebagai Kernel (inti sistem) Bangsa

Setelah menelusuri kelima sila sebagai kristalisasi pengalaman panjang peradaban Nusantara, pembahasan kini sampai pada satu pertanyaan yang sangat mendasar yaitu jika Pancasila bukan sekadar

simbol, lalu posisi sesungguhnya apa dalam arsitektur bangsa dan negara Indonesia? Dalam buku ini, analogi teknologi digunakan bukan sebagai permainan retoris, tetapi sebagai alat berpikir sistemik. Jika bangsa memiliki *source code* berupa sejarah, nilai, pengalaman kolektif, dan peradaban, jika negara adalah *hardware* organisasi kekuasaan, dan jika konstitusi kelak akan dipahami sebagai *firmware* operasional negara, maka Pancasila harus ditempatkan pada posisi yang jauh lebih mendasar. Pancasila adalah kernel (inti sistem) bangsa.

Dalam dunia teknologi, kernel (inti sistem) adalah inti logika sistem. Kernel (inti sistem) bukan aplikasi yang tampak di permukaan. Kernel (inti sistem) bukan antarmuka yang dilihat pengguna. Kernel (inti sistem) adalah pusat pengendali yang menghubungkan perangkat keras dengan seluruh lapisan operasional lainnya. Kernel (inti sistem) menentukan bagaimana instruksi diproses, bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana prioritas ditetapkan, bagaimana akses dikendalikan, dan bagaimana keseluruhan sistem menjaga konsistensinya. Tanpa kernel (inti sistem), perangkat dapat memiliki komponen lengkap tetapi tidak memiliki kesadaran operasional yang terintegrasi.

Analogi ini sangat penting. Sebab salah satu kesalahan paling umum dalam kehidupan kebangsaan adalah memperlakukan Pancasila seperti aplikasi dekoratif, bukan seperti inti logika sistem. Pancasila sering ditempatkan sebagai simbol upacara, slogan formal, materi hafalan, atau ornamen pidato. Padahal jika seluruh pembahasan dalam bab ini dibaca secara

serius, posisi Pancasila jauh lebih mendasar. Pancasila bukan aksesori kebangsaan. Pancasila adalah logika inti yang seharusnya menentukan bagaimana bangsa memahami dirinya sendiri, bagaimana negara dirancang, bagaimana hukum dibentuk, dan bagaimana kekuasaan dibatasi.

Mengapa kernel (inti sistem)? Karena kernel (inti sistem) bekerja pada level prinsip dasar. Dalam BAB 6.2 telah dijelaskan bahwa Ketuhanan menghadirkan fondasi spiritual dan orientasi moral. Dalam BAB 6.3 dijelaskan bahwa Kemanusiaan menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam BAB 6.4 dijelaskan bahwa Persatuan adalah kebutuhan geopolitik sekaligus arsitektur integrasi bangsa kepulauan. Dalam BAB 6.5 dijelaskan bahwa Kerakyatan adalah ekspresi kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan. Dalam BAB 6.6 dijelaskan bahwa Keadilan Sosial adalah orientasi moral kehidupan bersama. Kelima unsur ini bukan kebijakan teknis. Kelima unsur ini adalah prinsip dasar penentu arah.

Dalam sistem digital, kernel (inti sistem) tidak memberi instruksi rinci tentang tampilan aplikasi tertentu, tetapi menentukan aturan dasar bagaimana sistem bekerja. Prinsip yang sama berlaku pada Pancasila. Pancasila bukan kitab prosedur administratif. Pancasila bukan manual teknis pemerintahan. Pancasila adalah logika dasar. Dari logika dasar itulah seluruh desain operasional seharusnya memperoleh arah. Jika logika dasar ini diabaikan, sistem mungkin tetap

berjalan secara teknis, tetapi kehilangan kompatibilitas filosofis.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa peradaban bukan hanya kumpulan artefak budaya, tetapi *worldview*, nilai, moral, spiritualitas, tata hidup, dan struktur makna. Pancasila sebagai kernel (inti sistem) adalah kristalisasi dari *worldview* tersebut dalam bentuk yang padat dan operasional secara filosofis. Dengan kata lain, Pancasila bukan sekadar daftar nilai, tetapi mesin interpretasi kebangsaan. Ketika bangsa menghadapi persoalan hukum, kekuasaan, ekonomi, atau konflik sosial, Pancasila seharusnya menjadi logika penuntun untuk membaca dan menilai arah sistem.

Dalam konteks ini, Pancasila bukan sekadar "ideologi negara" dalam pengertian administratif yang kaku. Istilah ideologi sering membawa beban historis tertentu, seolah berbicara tentang doktrin tertutup yang memaksa keseragaman berpikir. Buku ini menempatkan Pancasila pada posisi yang lebih hidup yaitu sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Kesadaran inti yang membentuk orientasi dasar kehidupan bersama. Ini lebih sesuai dengan akar peradaban Nusantara yang plural, tetapi tetap memiliki titik temu nilai.

Penting dipahami bahwa kernel (inti sistem) bekerja sebagai penerjemah antara prinsip abstrak dan operasi konkret. Dalam dunia sistem, perangkat keras tidak berinteraksi langsung dengan aplikasi tanpa perantara inti sistem. Demikian pula, bangsa tidak seharusnya langsung melompat dari nilai abstrak ke praktik kekuasaan tanpa logika interpretatif yang

konsisten. Pancasila menyediakan kerangka tersebut. Ketika negara membentuk hukum, hukum harus kompatibel dengan Pancasila. Ketika kekuasaan dijalankan, kekuasaan harus diuji melalui Pancasila. Ketika kebijakan ekonomi dibentuk, orientasinya harus diperiksa melalui Pancasila.

Di sinilah perbedaan besar antara negara yang memiliki kernel (inti sistem) aktif dan negara yang hanya memiliki slogan. Negara dengan kernel (inti sistem) aktif memiliki konsistensi filosofis. Negara dengan slogan hanya memiliki dekorasi simbolik. Dalam kondisi pertama, nilai dasar benar-benar memandu desain sistem. Dalam kondisi kedua, nilai dasar hanya dipajang sementara sistem berjalan dengan logika lain. Buku ini sedang membangun argumen bahwa posisi ideal Pancasila adalah kondisi pertama.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Jika prinsip itu dibaca bersama Pancasila sebagai kernel (inti sistem), maka muncul satu konsekuensi penting yaitu negara bukan milik operator kekuasaan untuk dijalankan menurut kepentingan sesaat, tetapi sistem milik rakyat yang harus bekerja sesuai logika inti bangsa. Pancasila menjadi pembatas sekaligus penuntun. Kekuasaan tidak boleh bergerak liar di luar kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa.

Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Dalam sistem yang kompleks, keberadaan kernel (inti sistem) menjadi semakin penting. Sistem dengan banyak modul, banyak fungsi, dan banyak lapisan akan mudah terpecah jika

tidak memiliki logika inti integratif. Indonesia adalah sistem yang sangat kompleks yaitu beragam etnis, bahasa, sejarah lokal, pengalaman keagamaan, struktur sosial, dan kepentingan ekonomi. Tanpa kernel (inti sistem) yang kuat, kompleksitas ini dapat berubah menjadi fragmentasi. Dengan kernel (inti sistem) yang sehat, kompleksitas justru dapat diintegrasikan menjadi kekuatan.

Pancasila juga harus dipahami sebagai penjaga kompatibilitas. Dalam dunia teknologi, kernel (inti sistem) memastikan bahwa proses yang berjalan tidak merusak sistem inti. Dalam kehidupan berbangsa, Pancasila seharusnya memastikan bahwa kebijakan, hukum, dan kekuasaan tidak menyimpang dari prinsip dasar kebangsaan. Jika sistem hukum menghasilkan ketidakadilan ekstrem, terdapat masalah kompatibilitas. Jika kekuasaan menjauh dari rakyat, terdapat masalah kompatibilitas. Jika pembangunan menghancurkan martabat manusia, terdapat masalah kompatibilitas. Dalam semua itu, Pancasila seharusnya menjadi alat diagnosis.

Namun semua fungsi ini hanya mungkin jika Pancasila dipahami secara hidup, bukan sebagai ritual formal. Kernel (inti sistem) yang tidak aktif hanyalah potensi yang tidak digunakan. Ini menjadi jembatan penting menuju subbab berikutnya. Sebab persoalan besar bangsa modern sering bukan absennya nilai dasar, tetapi ketidakaktifan nilai dasar dalam sistem nyata.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Pancasila bukan sekadar simbol, slogan, atau dokumen ideologis administratif. Pancasila

adalah kernel (inti sistem) bangsa yaitu logika inti yang menghubungkan *source code* peradaban Nusantara dengan desain negara modern. Tanpa Pancasila yang aktif sebagai kernel (inti sistem) *consciousness*, bangsa kehilangan pusat orientasi filosofisnya, dan negara berisiko berjalan hanya sebagai mesin kekuasaan tanpa jiwa. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan yang sangat kritis yaitu apa yang terjadi ketika Pancasila hanya dihafal sebagai slogan, tetapi tidak benar-benar bekerja sebagai kernel (inti sistem) sistem kebangsaan.

6.8. Ketika Pancasila Menjadi Slogan, Bukan Kernel (inti sistem)

Setelah menempatkan Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa, pertanyaan yang tidak dapat dihindari adalah pertanyaan yang sangat kritis yaitu apakah Pancasila benar-benar berfungsi sebagai inti logika sistem kebangsaan, atau justru hanya bertahan sebagai simbol formal yang kehilangan daya operasional. Pertanyaan ini penting karena perbedaan antara nilai yang hidup dan nilai yang sekadar dipajang sangat menentukan kualitas sebuah bangsa. Sebuah sistem dapat memiliki prinsip yang sangat luhur di atas kertas, tetapi tetap berjalan dengan logika yang sama sekali berbeda dalam praktik. Dalam konteks seperti itulah, nilai berubah dari pengendali sistem menjadi dekorasi legitimasi.

Dalam dunia teknologi, kernel (inti sistem) adalah inti yang aktif bekerja setiap saat. Kernel (inti sistem) mengatur interaksi sistem, mengelola sumber

daya, menjaga konsistensi, membatasi akses, dan memastikan keseluruhan perangkat bekerja sesuai logika inti. Jika kernel (inti sistem) tidak aktif, sistem tidak benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan jika antarmuka tampak normal, sesungguhnya sistem sedang bekerja dengan mekanisme lain. Analogi ini sangat relevan untuk membaca kehidupan kebangsaan. Sebuah bangsa dapat terus menyebut nama Pancasila, menghafalkan rumusannya, menempatkannya dalam dokumen resmi, bahkan menjadikannya simbol upacara, tetapi tetap saja negara dapat berjalan dengan logika yang tidak kompatibel dengan Pancasila.

Inilah salah satu tragedi besar dalam kehidupan pemerintahan modern yaitu pemisahan antara simbol dan sistem. Nilai yang seharusnya menjadi prinsip operasional berubah menjadi bahasa seremonial. Pancasila dibacakan, tetapi tidak menjadi metode berpikir. Pancasila dihormati secara simbolik, tetapi tidak menjadi alat evaluasi kekuasaan. Pancasila diajarkan sebagai hafalan, tetapi tidak diperlakukan sebagai logika desain negara. Ketika kondisi seperti ini terjadi, bangsa tidak kehilangan simbol, tetapi kehilangan fungsi.

Jika Pancasila benar-benar diposisikan sebagai kernel (inti sistem), maka seluruh sistem seharusnya menunjukkan kompatibilitas dengan lima prinsip dasarnya. Ketuhanan seharusnya menghadirkan tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan. Kemanusiaan seharusnya memastikan bahwa manusia tidak diperlakukan sekadar sebagai objek administratif.

Persatuan seharusnya membangun integrasi yang sehat tanpa penghancuran pluralitas. Kerakyatan seharusnya menghadirkan partisipasi substantif, bukan sekadar prosedur formal. Keadilan sosial seharusnya menjadi orientasi nyata dalam distribusi manfaat kehidupan bersama. Jika salah satu unsur ini secara sistemik absen, pertanyaan tentang fungsi kernel (inti sistem) menjadi sah.

Penting ditegaskan bahwa subbab ini tidak sedang menghakimi individu tertentu, partai tertentu, atau periode tertentu secara sempit. Yang sedang dibahas adalah pola sistemik. Sebuah bangsa harus berani membedakan antara penghormatan simbolik terhadap nilai dan operasionalisasi nilai tersebut. Sebab banyak sistem di dunia modern mahir menggunakan bahasa moral yang luhur sambil menjalankan logika kekuasaan yang sepenuhnya pragmatis. Bahasa publik berbicara tentang rakyat, keadilan, moralitas, dan kebangsaan, tetapi sistem nyata bergerak dengan orientasi yang berbeda.

Dalam konteks Indonesia, gejala ini sering muncul dalam bentuk kontradiksi yang terasa sangat jelas. Pancasila berbicara tentang kemanusiaan, tetapi praktik kekuasaan dapat terasa sangat teknokratis dan tidak peka terhadap martabat manusia. Pancasila berbicara tentang kerakyatan, tetapi rakyat sering hanya hadir sebagai legitimasi prosedural periodik tanpa kontrol substantif atas sistem. Pancasila berbicara tentang keadilan sosial, tetapi ketimpangan struktural tetap menjadi persoalan serius. Pancasila berbicara tentang persatuan, tetapi dinamika kekuasaan dapat

mendorong polarisasi yang tajam. Ketika kontradiksi seperti ini berulang, pertanyaan yang muncul bukan lagi soal slogan, melainkan soal fungsi sistem.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Jika Pancasila benar-benar menjadi kernel (inti sistem), maka rakyat sebagai pemilik seharusnya hidup dalam sistem yang konsisten dengan prinsip tersebut. Namun jika yang terjadi adalah penguatan jarak antara rakyat dan pengendalian sistem, maka terdapat tanda bahwa logika lain sedang bekerja. Dalam analogi teknologi, perangkat mungkin masih menampilkan identitas resmi, tetapi proses inti dijalankan oleh mekanisme yang berbeda.

Salah satu penyebab kondisi ini adalah reduksi Pancasila menjadi pendidikan simbolik semata. Ketika Pancasila hanya diajarkan sebagai hafalan lima sila tanpa pembacaan filosofis yang mendalam, generasi baru akan mengenal Pancasila sebagai teks, bukan sebagai metode berpikir. Ketika Pancasila hanya muncul dalam upacara, dokumen, atau slogan institusional, hubungan hidup antara nilai dan realitas sistem menjadi terputus. Dalam kondisi seperti ini, Pancasila tidak dihapus, tetapi dinonaktifkan secara substantif.

Bahaya kondisi ini sangat besar. Sistem yang kehilangan kernel (inti sistem) *consciousness* tidak otomatis berhenti bekerja. Justru sistem dapat terus berjalan dengan efisien, bahkan tampak modern dan rapi. Namun orientasi intinya dapat bergeser. Dalam dunia teknologi, ketika kernel (inti sistem) asli tidak menjadi pengendali, sistem dapat diambil alih oleh

logika lain. Dalam kehidupan kebangsaan, hal serupa dapat terjadi ketika logika pragmatisme kekuasaan, kepentingan *elite*, kalkulasi oligarkis, atau orientasi teknokratis semata mengambil posisi yang seharusnya ditempati oleh Pancasila.

Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Sistem sebesar ini sangat membutuhkan logika integratif yang hidup. Tanpa kernel (inti sistem) yang aktif, keragaman dapat berubah menjadi konflik. Tanpa orientasi filosofis yang jelas, kekuasaan cenderung bergerak mengikuti kepentingan jangka pendek. Dalam sistem kompleks, kehilangan inti justru lebih berbahaya karena dampaknya menyebar ke seluruh lapisan.

Penting pula dipahami bahwa menjadikan Pancasila sebagai slogan justru melemahkan legitimasi Pancasila sendiri. Nilai yang terus disebut tetapi tidak terasa dalam kehidupan nyata akan perlahan kehilangan daya moral di mata masyarakat. Simbol yang tidak dihubungkan dengan pengalaman hidup konkret akan terasa kosong. Ini adalah bahaya serius. Bukan karena Pancasila lemah secara filosofis, tetapi karena sistem gagal menghidupkannya.

Dalam konteks ini, kritik terhadap sloganisasi Pancasila bukan bentuk penolakan terhadap Pancasila. Justru sebaliknya. Kritik ini lahir dari keyakinan bahwa Pancasila terlalu penting untuk direduksi menjadi dekorasi semata. Jika Pancasila benar-benar merupakan kristalisasi peradaban Nusantara dan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa, maka Pancasila harus hidup dalam desain sistem, dalam hukum, dalam

arsitektur kekuasaan, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dan dalam praktik kebangsaan sehari-hari.

Subbab ini juga menjadi jembatan penting menuju pembacaan sistem yang lebih tajam. Jika Pancasila hanya menjadi slogan, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat serius yaitu logika apa yang sebenarnya mengendalikan sistem? Jika kernel (inti sistem) tidak aktif, sistem pasti tetap berjalan dengan pengendali lain. Pertanyaan inilah yang membuka ruang diagnosis lebih mendalam terhadap desain negara modern Indonesia.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu bahaya terbesar bagi Pancasila bukan penolakan verbal, tetapi reduksi menjadi slogan yang kehilangan fungsi operasional. Bangsa yang terus menyebut Pancasila tanpa menjadikannya logika inti sistem sedang hidup dalam kontradiksi filosofis yang berbahaya. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju sintesis penutup bab yaitu Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan sari pati peradaban Nusantara yang seharusnya menjadi inti hidup sistem kebangsaan Indonesia.

6.9. Pancasila sebagai Sari Pati Peradaban Nusantara

Setelah menelusuri akar spiritual, adab kemanusiaan, kebutuhan persatuan, tradisi musyawarah, dan kesadaran keadilan sosial yang hidup dalam perjalanan panjang Nusantara, pembahasan pada titik ini harus sampai pada satu kesimpulan filosofis yang tegas yaitu Pancasila bukan kumpulan kalimat normatif yang disusun untuk memenuhi

kebutuhan administratif negara modern, melainkan sari pati dari pengalaman peradaban bangsa. Kesimpulan ini penting karena tanpa keberanian menarik sintesis yang jelas, seluruh pembahasan sebelumnya hanya akan menjadi uraian sejarah dan antropologi tanpa konsekuensi filosofis. Buku ini justru sedang membangun argumen bahwa Pancasila memperoleh legitimasi terdalam bukan semata dari kedudukannya dalam dokumen kenegaraan, tetapi dari akarnya dalam perjalanan panjang bangsa.

Istilah "sari pati" dipilih dengan sengaja. Sari pati bukan keseluruhan bentuk luar dari sesuatu, melainkan unsur esensial yang diperoleh melalui proses pemadatan, penyaringan, dan pengambilan inti. Dalam dunia tumbuhan, batang, daun, akar, dan bunga memiliki bentuk yang beragam, tetapi sari yang dihasilkan membawa unsur paling mendasar dari keseluruhan kehidupan tersebut. Analogi ini relevan untuk membaca Pancasila. Nusantara adalah ruang yang sangat luas, beragam, kompleks, dan berlapis. Tidak mungkin seluruh detail sejarah, budaya, bahasa, dan ekspresi sosial dipindahkan secara literal ke dalam fondasi negara modern. Yang mungkin dilakukan adalah mengekstrak inti filosofisnya. Pancasila adalah hasil ekstraksi tersebut.

Dalam BAB 4 telah dijelaskan bahwa Nusantara bukan sekadar istilah geografis, tetapi jaringan peradaban yang telah hidup jauh sebelum lahirnya republik modern. Dalam BAB 5 dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*, ruang besar yang dihuni berbagai komunitas dengan sejarah,

struktur nilai, dan ekspresi kebudayaan yang berbeda. Dalam BAB 6.1 ditegaskan bahwa Pancasila bukan produk vakum sejarah. Jika seluruh argumen ini dibaca secara konsisten, maka satu kesimpulan menjadi tidak terhindarkan yaitu Pancasila adalah formulasi filosofis dari pengalaman panjang kebangsaan, bukan konstruksi abstrak yang dilekatkan secara artifisial pada bangsa.

Sila Ketuhanan menunjukkan bahwa bangsa ini tumbuh dalam horizon spiritual yang kuat. Sila Kemanusiaan menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia memiliki akar dalam struktur adab Nusantara. Sila Persatuan menunjukkan bahwa kehidupan kepulauan melahirkan kebutuhan akan integrasi strategis. Sila Kerakyatan menunjukkan bahwa kebijaksanaan kolektif dan musyawarah bukan konsep asing bagi bangsa ini. Sila Keadilan Sosial menunjukkan bahwa solidaritas dan gotong royong telah lama menjadi bagian dari kehidupan bersama. Jika lima unsur ini dibaca secara terpisah, yang terlihat adalah daftar nilai. Jika dibaca sebagai satu kesatuan, yang terlihat adalah potret jiwa peradaban.

Di sinilah pentingnya memahami Pancasila bukan hanya sebagai ideologi formal, tetapi sebagai civilizational condensation. Pancasila adalah pengembunan nilai-nilai dasar yang telah hidup dalam struktur pengalaman kebangsaan. Ini membuat Pancasila memiliki karakter yang berbeda dari ideologi yang sepenuhnya lahir dari abstraksi teoritis semata. Banyak sistem pemerintahan dunia dibangun di atas konstruksi pemikiran yang lahir dari konteks sejarah

tertentu, lalu diekspor ke ruang lain. Pancasila memiliki karakter yang berbeda ketika dibaca melalui kerangka buku ini. Pancasila lahir dari pembacaan terhadap bangsa sendiri.

Namun penting ditegaskan secara hati-hati yaitu menyebut Pancasila sebagai sari pati peradaban Nusantara tidak berarti seluruh praktik sejarah Nusantara selalu ideal atau identik sempurna dengan rumusan lima sila. Sejarah manusia selalu mengandung kontradiksi, konflik, kekerasan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan. Argumen buku ini bukan romantisasi sejarah. Yang dimaksud adalah keberadaan pola nilai, kecenderungan filosofis, dan struktur moral yang cukup kuat untuk menjadi dasar kristalisasi. Dengan kata lain, Pancasila bukan salinan literal sejarah, melainkan hasil penyaringan filosofis terhadap pengalaman sejarah.

Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah dua kesalahan ekstrem. Kesalahan pertama adalah menganggap Pancasila sekadar slogan semata tanpa akar peradaban. Kesalahan kedua adalah menganggap Pancasila sebagai doktrin yang sepenuhnya tertutup dari penafsiran karena dianggap turun secara sempurna tanpa konteks sejarah. Buku ini menolak kedua ekstrem tersebut. Pancasila memiliki akar historis yang kuat, tetapi justru karena hidup sebagai hasil kristalisasi peradaban, Pancasila harus terus dihidupkan melalui penafsiran yang jujur dan relevan.

Dalam arsitektur analogi buku ini, posisi Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* kini menemukan dasar filosofis yang lebih kuat. Kernel (inti

sistem) tidak boleh diisi oleh logika yang asing terhadap perangkat yang dijalankannya. Sistem yang sehat memerlukan inti yang kompatibel dengan *source code*-nya. Dalam konteks Indonesia, *source code* tersebut adalah pengalaman panjang Nusantara sebagai ruang peradaban. Karena itu Pancasila sebagai kernel (inti sistem) bukan sekadar pilihan simbolik, tetapi konsekuensi logis dari pembacaan terhadap karakter bangsa.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Jika Pancasila adalah sari pati peradaban bangsa, maka hubungan antara rakyat dan Pancasila menjadi sangat mendalam. Pancasila bukan bahasa *elite* yang dipaksakan ke atas rakyat sebagai objek pasif. Pancasila adalah bahasa filosofis yang seharusnya merepresentasikan inti pengalaman rakyat sebagai bangsa. Ini memberi Pancasila legitimasi moral yang jauh lebih kuat daripada sekadar legitimasi prosedural formal.

Namun justru karena kedudukannya sangat mendasar, bahaya terbesar adalah ketika Pancasila terlepas dari kehidupan nyata bangsa. Sari pati yang dipisahkan dari tubuh peradaban akan berubah menjadi simbol mati. Nilai yang tidak diterjemahkan ke dalam desain negara, hukum, pendidikan, ekonomi, dan budaya publik akan kehilangan daya transformasinya. Inilah mengapa subbab sebelumnya menegaskan bahaya sloganisasi. Nilai sebesar Pancasila tidak cukup untuk dihormati, tetapi juga harus dioperasionalkan.

Pada titik ini, Pancasila harus dipahami bukan sebagai titik akhir, tetapi sebagai titik orientasi. Pancasila tidak menggantikan kebutuhan akan desain negara yang sehat, konstitusi yang kompatibel, atau sistem pemerintahan yang adil. Justru sebaliknya, Pancasila menjadi ukuran bagi seluruh desain tersebut. Jika negara bergerak menjauh dari Pancasila, persoalannya bukan pada Pancasila, tetapi pada sistem yang gagal menjaga kompatibilitas dengan inti kebangsaannya.

Ini menjadi jembatan yang sangat penting menuju bab berikutnya. Setelah menegaskan bahwa Pancasila adalah sari pati peradaban Nusantara dan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa, pertanyaan berikutnya menjadi sangat sistemik yaitu jika kernel (inti sistem) sudah ada, bagaimana negara sebagai sistem operasional seharusnya dirancang agar kompatibel dengan inti tersebut? Di sinilah pembahasan harus bergeser dari wilayah peradaban menuju wilayah desain ketatanegaraan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Pancasila adalah sari pati peradaban Nusantara yang merupakan hasil kristalisasi dari akar spiritual, adab kemanusiaan, kesadaran persatuan, tradisi musyawarah, dan solidaritas keadilan sosial yang hidup dalam perjalanan panjang bangsa. Pancasila bukan ornamen administratif, bukan slogan semata, dan bukan sekadar teks simbolik. Pancasila adalah inti filosofis kebangsaan Indonesia. Tanpa memahami posisi ini, bangsa akan mudah kehilangan orientasi ketika

memasuki pembahasan tentang negara, konstitusi, dan desain kekuasaan.

BAGIAN III - FIRMWARE NEGARA

BAB 7
KONSTITUSI SEBAGAI FIRMWARE NEGARA

7.1. Apa Itu Firmware?

Untuk memahami konstitusi sebagai *firmware* negara, pembahasan harus terlebih dahulu dimulai dari pengertian paling dasar tentang apa yang dimaksud dengan *firmware* itu sendiri. Tanpa pemahaman ini, analogi yang digunakan dalam buku akan tampak seperti metafora retoris biasa, padahal yang sedang dibangun adalah kerangka berpikir sistemik untuk membaca negara. Dalam dunia teknologi, istilah *firmware* merujuk pada lapisan instruksi dasar yang tertanam dekat dengan perangkat keras. Lapisan ini bukan aplikasi yang digunakan sehari-hari oleh pengguna, bukan tampilan antarmuka yang terlihat di layar, dan bukan program tambahan yang dapat dipasang atau dihapus sesuka hati. *Firmware* adalah logika dasar yang memungkinkan sebuah sistem mulai hidup dan mengetahui bagaimana harus bekerja.

Bayangkan sebuah perangkat komputer yang baru dirakit. Terdapat prosesor, memori, penyimpanan data, motherboard, kartu grafis, sumber daya listrik, dan berbagai komponen lainnya. Secara fisik, seluruh perangkat mungkin tampak lengkap. Namun keberadaan komponen-komponen tersebut belum otomatis membuat sistem benar-benar hidup. Perangkat keras yang lengkap tanpa instruksi dasar hanyalah kumpulan benda yang belum memiliki koordinasi.

Komponen tidak otomatis mengetahui fungsinya masing-masing. Prosesor tidak otomatis tahu apa yang harus dijalankan. Penyimpanan tidak otomatis tahu bagaimana harus diakses. Sistem membutuhkan satu lapisan yang bertugas mengenali seluruh elemen dasar tersebut, memulai komunikasi antarbagian, dan menyiapkan fondasi operasional awal. Di sinilah *firmware* bekerja.

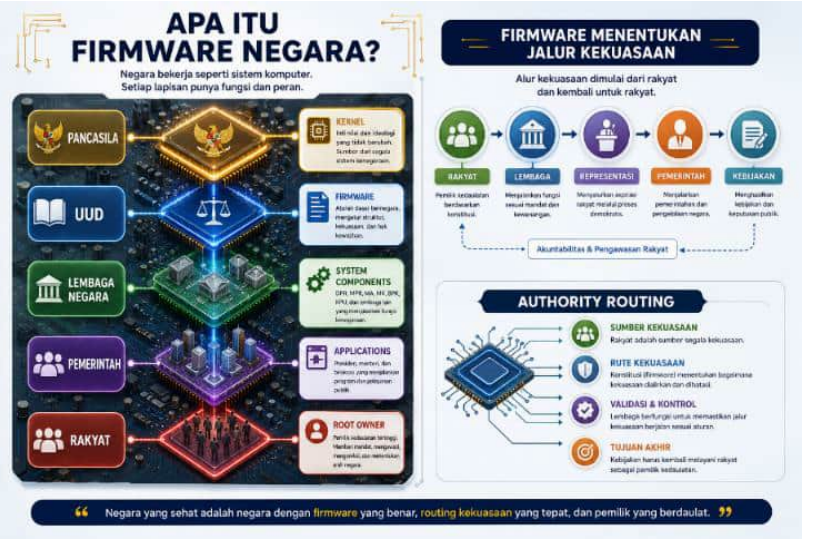

Dalam bahasa teknis, *firmware* adalah perangkat lunak tingkat rendah yang tertanam dekat dengan perangkat keras dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi mendasar sistem. Namun dalam bahasa yang lebih sederhana, *firmware* dapat dipahami sebagai instruksi dasar kehidupan sebuah sistem. Ketika tombol daya ditekan, *firmware* mulai bekerja. Sistem melakukan *booting*. Komponen diperiksa. Identitas perangkat

dikenali. Urutan kerja awal ditentukan. Struktur izin dasar mulai dibaca. Jalur kontrol dibentuk. Setelah seluruh proses dasar selesai, barulah lapisan yang lebih tinggi dapat berjalan.

Yang penting dipahami adalah posisi *firmware* dalam hierarki sistem. *Firmware* bukan kernel (inti sistem), dan *firmware* bukan aplikasi. Dalam arsitektur yang digunakan buku ini, Pancasila telah diposisikan sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa, yaitu logika inti filosofis yang menentukan orientasi dasar kehidupan bersama. *Firmware* berbeda. Jika kernel (inti sistem) adalah inti kesadaran sistem, maka *firmware* adalah lapisan instruksi struktural yang menerjemahkan keberadaan sistem ke dalam bentuk operasional awal. Dengan kata lain, kernel (inti sistem) menjawab pertanyaan tentang nilai inti, sementara *firmware* menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem mulai bekerja secara konkret.

Perbedaan ini sangat penting. Banyak orang mencampuradukkan seluruh lapisan sistem seolah semuanya sama. Dalam kehidupan bernegara, kekeliruan serupa sering terjadi. Nilai, hukum, lembaga, kebijakan, dan pemerintahan diperlakukan sebagai satu paket yang tidak dibedakan secara arsitektural. Padahal sistem yang sehat selalu memiliki lapisan-lapisan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Ketika lapisan ini tidak dipahami, diagnosis terhadap kerusakan sistem menjadi dangkal. Orang menyalahkan aplikasi ketika masalah berada pada *firmware*. Orang mengganti operator ketika persoalan berada pada arsitektur dasar.

Fungsi pertama *firmware* adalah boot *initialization*. Ini berarti *firmware* bertugas menghidupkan sistem dari kondisi pasif menuju kondisi aktif. Sistem tidak bangun secara spontan. Sistem perlu proses aktivasi yang terstruktur. Fungsi kedua adalah *hardware initialization*, yaitu mengenali seluruh komponen dasar yang ada dalam sistem dan memastikan semuanya dapat berinteraksi. Fungsi ketiga adalah *permission structure*, yaitu menentukan struktur akses dasar yaitu siapa boleh melakukan apa, area mana yang terbuka, area mana yang terlindungi, fungsi mana yang membutuhkan hak khusus. Fungsi keempat adalah *authority routing*, yaitu menentukan jalur kendali antarbagian sistem, siapa menginstruksikan siapa, dan bagaimana komunikasi kekuasaan berlangsung. Fungsi kelima adalah compatibility enforcement, yaitu memastikan seluruh sistem berjalan sesuai dengan arsitektur dasarnya.

Semua fungsi ini membuat *firmware* menjadi lapisan yang sangat strategis. *Firmware* tidak sering terlihat oleh pengguna biasa, tetapi justru menentukan apakah sistem dapat hidup dengan sehat. Sebuah perangkat dapat memiliki aplikasi terbaik, antarmuka paling indah, dan fitur paling modern, tetapi tetap mengalami gangguan serius jika *firmware*-nya bermasalah. Sistem dapat crash. Fungsi dapat saling bertabrakan. Hak akses dapat bocor. Proses dapat berjalan liar. Bahkan perangkat dapat tampak hidup, tetapi sesungguhnya bekerja secara tidak stabil.

Analogi ini sangat penting untuk dibawa ke wilayah negara. Sebab salah satu kekeliruan besar

dalam memahami negara adalah kecenderungan melihat negara hanya pada lapisan yang tampak di permukaan. Negara dipahami sebagai presiden, kementerian, parlemen, pengadilan, aparat, gedung pemerintahan, pemilu, atau kebijakan publik. Semua unsur tersebut memang bagian dari negara, tetapi bukan lapisan paling dasar. Sama seperti pengguna komputer yang hanya melihat aplikasi tanpa memahami arsitektur sistem di bawahnya, masyarakat sering melihat ekspresi permukaan negara tanpa memahami struktur dasar yang membuat seluruh sistem itu hidup.

Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, bukan sekadar simbol administratif. Dalam BAB 3 ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Dalam BAB 6 dijelaskan bahwa Pancasila adalah kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Jika seluruh argumen ini dibaca secara konsisten, maka harus ada satu lapisan di antara nilai filosofis dan praktik operasional kekuasaan. Lapisan inilah yang dalam analogi buku ini disebut *firmware* negara.

Negara, sebagaimana sistem teknologi, tidak hidup secara otomatis hanya karena unsur-unsur fisiknya tersedia. Wilayah ada, rakyat ada, simbol kenegaraan ada, aparatur ada, bahkan kekuasaan dapat saja ada. Namun tanpa instruksi dasar yang jelas, seluruh elemen tersebut tidak otomatis membentuk sistem yang stabil. Harus ada desain yang menentukan bagaimana negara mulai hidup, bagaimana lembaga dikenali, bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana

legitimasi diaktifkan, dan bagaimana kontrol dijalankan.

Di titik inilah analogi *firmware* menjadi sangat kuat. Buku ini tidak menggunakan istilah tersebut untuk sekadar membuat bahasa teknis terdengar menarik, melainkan untuk membantu pembaca melihat negara sebagai sistem yang dapat didiagnosis secara arsitektural. Jika sebuah negara mengalami persoalan berulang, pembacaan tidak boleh berhenti pada operator. Harus ditelusuri lapisan yang lebih dasar.

Dalam konteks ini, *firmware* adalah jembatan antara filsafat dan institusi. Pancasila memberi arah nilai. Pemerintah menjalankan operasi. Tetapi di antara keduanya harus ada struktur dasar yang menerjemahkan nilai ke dalam arsitektur kekuasaan. Tanpa jembatan tersebut, negara menjadi kumpulan institusi yang bergerak tanpa koordinasi filosofis.

Penting juga ditegaskan bahwa *firmware* bukan sesuatu yang netral secara moral. Walaupun secara teknis tampak seperti struktur mekanis, desain *firmware* menentukan distribusi kekuasaan, struktur akses, dan kemungkinan penyalahgunaan. Dalam sistem digital, *firmware* yang buruk dapat menciptakan celah keamanan. Dalam negara, desain dasar yang buruk dapat menciptakan oligarki, kebuntuan institusional, atau keterasingan rakyat dari sistem yang seharusnya dimiliki.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *firmware* adalah instruksi dasar yang menentukan bagaimana sebuah sistem mulai hidup, mengenali komponennya, membagi kewenangan, dan

menjalankan kontrol. Dalam analogi kebangsaan, memahami *firmware* adalah langkah penting untuk memahami negara bukan sebagai kumpulan pejabat, melainkan sebagai sistem yang dirancang. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan berikutnya yaitu jika negara memiliki *firmware*, bagaimana sesungguhnya sebuah negara mulai hidup.

7.2. *Booting* Negara: Negara Tidak Hidup Otomatis

Setelah memahami *firmware* sebagai lapisan instruksi dasar yang menghidupkan sistem, pembahasan berikutnya harus menjawab satu pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya sangat mendasar yaitu bagaimana sebuah negara mulai hidup. Pertanyaan ini penting karena dalam kesadaran publik, negara sering dipahami sebagai sesuatu yang seolah otomatis ada begitu unsur-unsur formalnya tersedia. Begitu terdapat wilayah, penduduk, bendera, aparat, pemerintahan, dan pengakuan formal, banyak orang menganggap negara telah sepenuhnya hidup. Pandangan seperti ini terlalu sederhana. Dalam kerangka berpikir sistemik yang digunakan buku ini, keberadaan unsur-unsur fisik belum identik dengan kehidupan sistemik.

Dalam dunia teknologi, analoginya sangat jelas. Sebuah komputer dapat dirakit dengan seluruh komponen terbaik. Prosesor tersedia. Memori terpasang. Penyimpanan data siap digunakan. Sumber daya listrik terhubung. Layar tersedia. Secara fisik, seluruh elemen tampak lengkap. Namun sistem belum otomatis hidup hanya karena perangkat keras tersedia.

Komponen tidak serta-merta membentuk kehidupan operasional. Sistem memerlukan proses awal yang mengaktifkan keseluruhan struktur tersebut. Ketika tombol daya ditekan, proses *booting* dimulai. Pada momen itulah sistem mulai bergerak dari keadaan diam menuju keadaan aktif.

Booting bukan sekadar menyalakan perangkat. *Booting* adalah proses sistematis untuk membangunkan seluruh struktur dasar. Sistem memeriksa dirinya. Identitas komponen dikenali. Jalur komunikasi awal dibentuk. Instruksi dasar dimuat. Hak akses awal diinisialisasi. Setelah semua itu berlangsung, sistem dapat menyerahkan kendali kepada lapisan berikutnya. Tanpa proses ini, perangkat hanya menjadi objek fisik tanpa koordinasi operasional. Analogi ini sangat relevan untuk membaca negara.

Negara tidak hidup hanya karena rakyat ada. Bangsa dapat hidup jauh sebelum negara modern terbentuk. Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa adalah entitas historis yang dibangun oleh memori kolektif, identitas, solidaritas, sejarah, bahasa, dan nasib bersama. Bangsa dapat eksis tanpa bentuk negara modern tertentu. Nusantara sendiri, sebagaimana dibahas dalam BAB 4 dan BAB 5, telah hidup sebagai ruang peradaban jauh sebelum lahirnya republik modern. Karena itu, keberadaan bangsa tidak otomatis identik dengan negara yang aktif secara sistemik.

Negara juga tidak hidup hanya karena wilayah tersedia. Wilayah adalah unsur penting, tetapi wilayah hanyalah ruang fisik tanpa struktur operasional jika tidak ada arsitektur kekuasaan yang mengaktifkannya.

Begitu pula dengan aparat. Keberadaan kekuatan bersenjata atau birokrasi tidak otomatis menciptakan negara yang sehat. Tanpa desain dasar yang jelas, aparatur hanyalah kumpulan instrumen yang dapat bergerak tanpa orientasi yang terintegrasi. Bahkan pemerintahan formal pun belum cukup. Pemerintah adalah operator, bukan sumber kehidupan sistem.

Di sinilah analogi *booting* negara menjadi sangat penting. Negara hidup ketika terdapat mekanisme dasar yang mengaktifkan seluruh elemen tersebut menjadi satu sistem pemerintahan yang koheren. Harus ada logika yang menjawab pertanyaan mendasar yaitu siapa pemilik sah kekuasaan, dari mana legitimasi berasal, bagaimana kewenangan didistribusikan, siapa mengenali siapa, siapa memberi perintah kepada siapa, siapa mengawasi siapa, dan bagaimana konflik internal diselesaikan. Tanpa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, negara mungkin tampak ada secara visual, tetapi belum memiliki kehidupan sistemik yang stabil.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Prinsip ini sangat penting dalam konteks *booting*. Dalam sistem digital, salah satu hal paling mendasar adalah pengenalan identitas dasar sistem dan struktur otoritas awal. Dalam negara, pertanyaan yang sepadan adalah siapa sumber legitimasi tertinggi. Jika negara adalah sistem kekuasaan, maka boot sequence pertama harus menjawab dari mana kekuasaan itu memperoleh legitimasi. Dalam konteks Indonesia, jawaban normatifnya jelas yaitu rakyat.

Namun pengakuan normatif saja belum cukup. Dalam kerangka sistem, pengakuan tersebut harus diterjemahkan ke dalam arsitektur operasional. Dalam dunia teknologi, menulis nama pemilik pada perangkat tidak otomatis memberi kontrol nyata jika sistem hak akses tidak mendukungnya. Prinsip yang sama berlaku dalam negara. Menyebut rakyat sebagai pemilik tanpa membangun *boot architecture* yang kompatibel hanya menghasilkan simbol, bukan kontrol substantif. Karena itu *booting* negara bukan hanya soal deklarasi, tetapi soal desain aktivasi.

Fungsi utama *booting* negara adalah mengubah potensi menjadi sistem. Bangsa memiliki potensi. Wilayah menyediakan ruang. Rakyat menghadirkan legitimasi. Aparatur menyediakan kapasitas teknis. Tetapi seluruh potensi itu harus diaktifkan melalui arsitektur yang jelas. Jika tidak, yang terjadi adalah kekacauan kekuasaan, persaingan legitimasi, konflik antarorgan, atau dominasi oleh pihak yang paling kuat secara praktis.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa banyak entitas kekuasaan gagal bukan karena ketiadaan rakyat atau wilayah, tetapi karena kegagalan membangun *boot architecture* yang sehat. Negara dapat lahir dengan semangat besar, tetapi jika struktur aktivasi kekuasaannya kabur, sistem akan cepat mengalami konflik. Legitimasi menjadi diperebutkan. Kewenangan saling tumpang tindih. Aparat kehilangan arah. Hukum menjadi alat pertarungan, bukan kerangka ketertiban. Ini menunjukkan bahwa kehidupan negara sangat bergantung pada kualitas boot sequence awal.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini sangat penting karena bangsa ini bukan entitas sederhana. Dalam BAB 5 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Bangsa dengan kompleksitas sebesar ini membutuhkan *boot logic* yang sangat matang. Negara tidak dapat diaktifkan hanya dengan semangat simbolik. Negara harus memiliki struktur yang mampu mengintegrasikan pluralitas, menjaga legitimasi, membatasi kekuasaan, dan memastikan sistem tetap kompatibel dengan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa yang telah dibahas dalam BAB 6.

Penting juga dipahami bahwa *booting* negara bukan hanya peristiwa historis pada momen kemerdekaan. Secara konseptual, *boot logic* terus relevan karena menentukan bagaimana negara bekerja setiap saat. Jika desain aktivasi dasarnya keliru, seluruh operasi berikutnya akan membawa warisan masalah tersebut. Dalam sistem digital, kesalahan pada tahap boot dapat memengaruhi seluruh kinerja berikutnya. Dalam negara, kesalahan desain dasar dapat menghasilkan persoalan struktural lintas generasi.

Dalam arsitektur analogi buku ini, *booting* negara adalah jembatan antara Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* dan negara sebagai *hardware organization*. Pancasila menyediakan orientasi nilai. Negara menyediakan struktur fisik kekuasaan. Namun tanpa proses aktivasi yang benar, hubungan antara keduanya tidak pernah benar-benar hidup secara operasional. Inilah fungsi lapisan *firmware*, yang dalam konteks negara akan mengarah pada konstitusi.

Maka pertanyaan mendasarnya menjadi sangat tajam yaitu siapa yang sebenarnya menekan tombol daya negara? Jawaban filosofisnya bukan individu tertentu, melainkan desain legitimasi itu sendiri. Negara hidup ketika sistem dasar mengakui pemilik sahnya, mengaktifkan struktur kekuasaan, dan mendistribusikan fungsi secara tertib. Jika proses ini gagal, negara tetap dapat tampak berjalan, tetapi bekerja dalam kondisi cacat struktural.

Dalam konteks inilah kritik terhadap negara harus menjadi lebih cerdas. Tidak semua masalah negara berasal dari operator yang buruk. Sebagian persoalan dapat berasal dari kesalahan *boot architecture*. Jika aktivasi dasar salah, operator terbaik sekalipun akan bekerja di dalam sistem yang mewarisi distorsi mendasar. Sebaliknya, sistem yang sehat memberi peluang lebih besar bagi stabilitas dan akuntabilitas.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara tidak hidup secara otomatis hanya karena rakyat, wilayah, aparat, dan simbol formal tersedia. Negara hidup karena terdapat *boot architecture* yang mengaktifkan seluruh elemen tersebut menjadi sistem kekuasaan yang sah, terstruktur, dan kompatibel dengan orientasi bangsa. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan berikutnya yaitu jika negara harus di-boot, siapa dan apa yang mengenali komponen-komponen dasar negara agar sistem dapat mulai bekerja.

7.3. *Hardware* Initialization: Mengenali Komponen Negara

Setelah memahami bahwa negara tidak hidup secara otomatis dan membutuhkan proses *booting*, pertanyaan berikutnya menjadi sangat mendasar yaitu setelah sistem mulai aktif, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dalam dunia teknologi, jawabannya jelas. Sebelum sistem dapat menjalankan fungsi yang lebih kompleks, *firmware* harus terlebih dahulu mengenali komponen-komponen dasar yang membentuk perangkat tersebut. Prosesor harus dikenali. Memori harus dikenali. Penyimpanan harus dikenali. Jalur komunikasi antarperangkat harus dikenali. Tanpa proses ini, sistem tidak mengetahui apa yang tersedia, bagaimana komponen harus berinteraksi, atau batas fungsi masing-masing bagian. Dalam konteks negara, proses ini memiliki padanan yang sangat penting yaitu pengenalan sistemik terhadap komponen dasar negara.

Sebuah perangkat digital yang gagal mengenali komponen dasarnya akan mengalami kekacauan operasional. Prosesor dapat aktif tetapi tidak memiliki instruksi yang jelas. Penyimpanan mungkin ada tetapi tidak dapat diakses. Memori tersedia tetapi tidak terintegrasi dengan benar. Perangkat dapat menyala, tetapi tidak benar-benar bekerja sebagai sistem yang sehat. Analogi ini sangat relevan untuk memahami negara. Sebuah bangsa dapat memiliki pemimpin, aparat, lembaga, birokrasi, pengadilan, parlemen, dan berbagai struktur formal lainnya, tetapi tanpa pengenalan sistemik yang jelas, semua unsur tersebut

tidak otomatis membentuk arsitektur negara yang stabil.

Dalam pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, bukan sekadar kumpulan simbol administratif. Organisasi berarti adanya struktur, fungsi, hubungan, dan pembagian peran yang dikenali secara sistemik. Tanpa pengenalan seperti ini, kekuasaan cenderung bergerak dalam bentuk cair, tumpang tindih, atau bahkan saling bertabrakan. Karena itu, setelah *booting* negara terjadi, langkah berikutnya adalah *hardware initialization* yaitu sistem harus mengetahui siapa dan apa saja komponen dasarnya.

Dalam analogi negara, komponen dasar tersebut bukan prosesor atau memori, melainkan institusi-institusi fundamental yang menopang kehidupan bernegara. Presiden, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, kementerian, birokrasi, aparat keamanan, lembaga pengawasan, sistem administrasi, dan berbagai organ negara lainnya adalah bagian dari *hardware organization* negara. Namun penting dipahami bahwa keberadaan fisik atau formal institusi tersebut belum cukup. Sistem harus mengenali identitas, fungsi, dan posisinya dalam arsitektur keseluruhan.

Bayangkan sebuah situasi di mana terdapat presiden, parlemen, dan pengadilan, tetapi batas kewenangan tidak jelas. Siapa memutuskan apa. Siapa mengawasi siapa. Siapa memiliki legitimasi pada area tertentu. Siapa menjadi pelaksana. Siapa menjadi pengendali. Siapa menjadi korektor. Dalam kondisi seperti itu, negara memang memiliki komponen, tetapi

belum memiliki *hardware initialization* yang sehat. Yang terjadi bukan koordinasi, melainkan kompetisi kekuasaan.

Dalam dunia teknologi, *firmware* melakukan pengenalan perangkat secara sistematis. Sistem memeriksa keberadaan komponen, mencocokkan identitas, membaca kemampuan dasar, dan menyiapkan komunikasi awal. Dalam negara, fungsi yang sepadan adalah penetapan identitas kelembagaan secara konstitusional. Negara harus mengetahui apa yang disebut lembaga eksekutif, apa fungsi lembaga legislatif, apa ruang lembaga yudikatif, apa posisi aparat keamanan, dan bagaimana seluruh elemen ini saling berhubungan.

Di sinilah pentingnya konstitusi sebagai *firmware* negara. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang memuat norma abstrak. Dalam perspektif sistem, konstitusi adalah instrumen pengenalan arsitektural. Konstitusi mendefinisikan komponen-komponen negara, memberi identitas formal, menetapkan fungsi dasar, dan menempatkan setiap organ dalam struktur yang lebih besar. Tanpa konstitusi atau struktur sejenis, negara hanya menjadi arena kekuasaan yang bergantung pada kekuatan praktis semata.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Prinsip ini sangat penting untuk diingat, karena pengenalan komponen negara tidak boleh mengaburkan posisi pemilik. Dalam banyak sistem yang mengalami distorsi, lembaga negara perlahan diperlakukan seolah entitas yang berdiri untuk dirinya sendiri, bukan instrumen yang bekerja

atas nama rakyat. Dalam analogi teknologi, ini menyerupai perangkat internal yang mulai bertindak seolah pemilik sistem. Karena itu *hardware initialization* negara harus dimulai dengan kesadaran bahwa seluruh komponen negara adalah instrumen turunan, bukan sumber kedaulatan asli.

Presiden, misalnya, harus dipahami sebagai komponen eksekutif, bukan pemilik negara. Parlemen adalah instrumen representasi dan legislasi, bukan pusat kepemilikan sistem. Pengadilan adalah instrumen penegakan hukum dan koreksi normatif, bukan sumber legitimasi tertinggi. Aparat keamanan adalah pelindung sistem, bukan pengendali kedaulatan. Birokrasi adalah mesin administratif, bukan entitas otonom yang terpisah dari rakyat. Pengenalan identitas seperti ini sangat penting, karena kesalahan identifikasi dapat melahirkan penyimpangan struktural.

Dalam sistem teknologi, kesalahan mengenali komponen dapat menyebabkan fungsi yang salah. Jika sistem salah membaca perangkat tertentu, operasi berikutnya akan terganggu. Prinsip yang sama berlaku dalam negara. Jika lembaga tertentu diberi posisi yang tidak sesuai, konflik kekuasaan menjadi hampir tak terhindarkan. Jika lembaga yang seharusnya bersifat pelaksana bertindak sebagai pengendali, arsitektur menjadi timpang. Jika lembaga pengawas kehilangan posisi korektifnya, sistem menjadi rentan terhadap penyalahgunaan.

Dalam konteks Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, persoalan ini menjadi semakin penting. Negara yang mengelola masyarakat sederhana

mungkin dapat bertahan dengan struktur yang relatif longgar. Namun bangsa sebesar Indonesia, dengan keragaman etnis, sejarah, agama, wilayah, kepentingan ekonomi, dan dinamika geopolitik yang sangat kompleks, membutuhkan arsitektur kelembagaan yang jelas. Tanpa pengenalan komponen yang tepat, kompleksitas akan berubah menjadi kekacauan institusional.

Penting juga dipahami bahwa *hardware initialization* bukan sekadar soal daftar lembaga. Yang lebih penting adalah pengakuan terhadap fungsi sistemiknya. Dua negara dapat memiliki nama lembaga yang sama, tetapi arsitektur fungsinya sangat berbeda. Karena itu, pembacaan terhadap negara tidak boleh berhenti pada nomenklatur. Yang harus dilihat adalah posisi kelembagaan dalam desain sistem. Nama "parlemen" tidak otomatis berarti representasi sehat. Nama "pengadilan" tidak otomatis berarti keadilan substantif. Nama "lembaga pengawas" tidak otomatis berarti pengawasan efektif. Dalam sistem, identitas sejati ditentukan oleh fungsi, bukan label.

Dalam arsitektur analogi buku ini, *hardware initialization* adalah fase ketika negara mulai mengenali dirinya sendiri secara institusional. Bangsa yang telah memiliki kernel (inti sistem) *consciousness* melalui Pancasila, dan telah melalui boot activation, kini harus mengetahui komponen apa saja yang membentuk tubuh kekuasaannya. Tanpa pengenalan ini, seluruh lapisan berikutnya tidak dapat bekerja secara sehat.

Subbab ini juga menjadi jembatan menuju pembahasan yang lebih sensitif. Setelah komponen

dikenali, sistem harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu siapa diberi akses terhadap apa. Dalam sistem digital, mengenali perangkat belum cukup. Hak akses harus diatur. Dalam negara, mengenali lembaga belum cukup. Distribusi kewenangan harus ditentukan secara cermat.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara yang sehat memerlukan *hardware initialization*, yaitu pengenalan sistemik terhadap komponen-komponen dasarnya. Konstitusi berperan sebagai instrumen yang memberi identitas, fungsi, dan posisi terhadap organ-organ negara agar sistem dapat bekerja secara terstruktur. Tanpa pengenalan ini, negara hanya menjadi kumpulan institusi formal yang rawan bertabrakan, menyimpang, atau kehilangan orientasi. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan berikutnya yaitu setelah komponen dikenali, siapa sebenarnya boleh mengakses apa dalam sistem negara.

7.4. *Permission Structure*: Siapa Boleh Mengakses Apa

Setelah negara melalui proses *booting* dan komponen-komponen dasarnya dikenali, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih sensitif sekaligus menentukan yaitu siapa diberi akses terhadap apa. Dalam dunia teknologi, sistem yang telah hidup dan mengenali perangkat kerasnya belum otomatis aman. Justru pada tahap inilah salah satu keputusan paling strategis harus diambil, yaitu bagaimana struktur izin dibentuk. Tidak semua pengguna boleh mengakses seluruh fungsi. Tidak semua proses boleh menyentuh

area inti sistem. Tidak semua komponen boleh mengubah konfigurasi dasar. Jika struktur izin dirancang dengan buruk, sistem menjadi rentan terhadap penyalahgunaan, konflik, pembajakan, atau kerusakan internal. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara.

Dalam sistem digital, konsep *permission structure* sangat fundamental. Sebuah perangkat mengenal tingkatan akses yang berbeda. Ada guest user dengan hak sangat terbatas. Ada standard user yang dapat menggunakan fungsi tertentu tetapi tidak boleh mengubah struktur inti. Ada *administrator* yang memiliki kewenangan lebih luas untuk mengelola konfigurasi operasional. Pada level tertinggi terdapat *root* authority, yaitu posisi dengan kendali paling mendasar atas sistem. Struktur ini tidak dibuat untuk mempersulit pengguna, tetapi untuk menjaga integritas sistem. Tanpa pembagian akses yang jelas, satu tindakan salah dapat merusak keseluruhan arsitektur.

Dalam konteks negara, analogi ini sangat tajam. Negara adalah sistem kekuasaan, dan kekuasaan pada dasarnya selalu berkaitan dengan akses. Siapa boleh membuat keputusan yang mengikat masyarakat. Siapa boleh menggunakan instrumen koersif. Siapa boleh membentuk hukum. Siapa boleh menafsirkan hukum. Siapa boleh mengawasi. Siapa boleh mengoreksi. Siapa boleh mengangkat atau memberhentikan. Siapa boleh mengelola sumber daya publik. Semua pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan tentang *permission structure*.

Dalam pembacaan publik yang terlalu sederhana, negara sering dipahami hanya sebagai daftar jabatan dan lembaga. Presiden, parlemen, pengadilan, kementerian, aparat, dan berbagai institusi lainnya dilihat sebagai entitas formal yang sekadar menjalankan fungsi masing-masing. Padahal inti persoalannya jauh lebih dalam. Yang menentukan kualitas negara bukan sekadar keberadaan lembaga, tetapi bagaimana hak akses kekuasaan dibagi di antara lembaga-lembaga tersebut. Dengan kata lain, persoalan negara pada tingkat tertentu adalah persoalan desain izin.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Prinsip ini sangat penting karena dalam analogi sistem, rakyat seharusnya menempati posisi *root owner*. Artinya, sumber legitimasi tertinggi berada pada rakyat. Namun kepemilikan konseptual tidak otomatis berarti kontrol operasional yang nyata. Dalam dunia teknologi, seseorang dapat menjadi pemilik sah sebuah perangkat tetapi hanya diberi akses seperti pengguna biasa karena sistem telah dikunci oleh pihak lain. Dalam negara, kontradiksi serupa juga dapat terjadi. Rakyat disebut pemilik secara konstitusional, tetapi struktur akses praktis justru menempatkan rakyat jauh dari inti kendali.

Di sinilah pertanyaan menjadi sangat penting yaitu apakah *permission structure* negara benar-benar kompatibel dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jika rakyat adalah pemilik, maka seluruh distribusi kewenangan harus dipahami sebagai kewenangan turunan, bukan kepemilikan asli. Presiden tidak memiliki negara. Presiden menjalankan fungsi tertentu

atas nama sistem. Parlemen tidak memiliki negara. Parlemen menerima mandat tertentu dalam struktur perwakilan. Pengadilan tidak memiliki negara. Pengadilan menjalankan fungsi korektif dalam kerangka hukum. Aparat keamanan tidak memiliki negara. Aparat merupakan pelindung sistem, bukan pemegang kedaulatan.

Pembedaan ini sangat penting, karena salah satu penyakit klasik dalam banyak sistem pemerintahan adalah transformasi operator menjadi seolah pemilik. Ketika lembaga mulai bertindak seperti pemilik, struktur izin mengalami distorsi. Dalam dunia digital, ini menyerupai aplikasi yang memperoleh hak *administrator* tanpa batas, lalu mulai mengubah konfigurasi sistem untuk kepentingannya sendiri. Dalam negara, gejalanya dapat muncul dalam bentuk konsolidasi kekuasaan berlebihan, pelemahan mekanisme pengawasan, dominasi *elite*, atau keterasingan rakyat dari sistem yang secara formal dimiliki rakyat.

Struktur izin juga berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Dalam teori klasik, salah satu tujuan utama desain ketatanegaraan adalah mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Bahasa modern menyebutnya *checks and balances*. Dalam analogi buku ini, konsep tersebut dapat dibaca sebagai desain permission segmentation. Tidak semua fungsi diberikan kepada satu pihak. Hak akses dibagi, dipisah, dan saling diawasi agar sistem tidak mudah dibajak.

Namun pembagian formal saja tidak cukup. Sistem dapat tampak memiliki banyak pembatas, tetapi

secara praktis seluruh jalur akses dikendalikan oleh lingkaran kekuasaan yang sama. Dalam kondisi seperti itu, *permission structure* hanya tampak sehat di permukaan. Secara substantif, sistem telah mengalami konsentrasi kontrol. Ini penting dipahami, karena banyak negara tampak kompleks secara institusional tetapi tetap oligarkis secara operasional.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi sangat strategis karena negara yang dikelola bukan negara kecil dengan struktur sosial sederhana. Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Bangsa dengan kompleksitas sebesar ini membutuhkan distribusi kewenangan yang sangat hati-hati. Sistem yang terlalu terpusat berisiko menjauhkan negara dari rakyat. Sistem yang terlalu terfragmentasi berisiko menghasilkan kebuntuan. Tantangannya adalah merancang *permission structure* yang menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas.

Struktur izin juga harus memperhitungkan penggunaan *coercive power*. Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa negara memiliki kekuatan pemaksaan yang sah dalam batas hukum. Instrumen koersif adalah salah satu area paling sensitif dalam desain negara. Dalam sistem digital, area yang dapat mengubah inti sistem memerlukan pengamanan ketat. Dalam negara, akses terhadap instrumen pemaksaan juga harus dibatasi dengan sangat jelas. Jika instrumen koersif berada di luar kontrol yang sehat, negara dapat bergeser dari pelindung menjadi penekan.

Penting pula memahami bahwa *permission structure* bukan hanya soal distribusi formal kekuasaan,

tetapi juga soal jalur koreksi. Siapa dapat membatalkan keputusan tertentu. Siapa dapat meninjau ulang tindakan kekuasaan. Siapa dapat mengoreksi penyimpangan. Sistem tanpa jalur koreksi yang sehat pada dasarnya adalah sistem dengan hak akses yang terlalu absolut. Dalam jangka panjang, sistem seperti itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

Dalam arsitektur analogi buku ini, *permission structure* adalah titik tempat filsafat kedaulatan bertemu dengan desain institusional. Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* memberi arah nilai. Rakyat sebagai pemilik memberi dasar legitimasi. Tetapi semua itu harus diterjemahkan ke dalam distribusi akses yang konkret. Jika penerjemahan ini gagal, sistem akan berjalan dengan kontradiksi internal yaitu rakyat berdaulat secara teks, tetapi tidak berdaya secara praktik.

Subbab ini juga menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya. Setelah sistem menentukan siapa boleh mengakses apa, pertanyaan yang tidak kalah penting muncul yaitu bagaimana jalur kewenangan itu bergerak. Akses saja belum cukup. Sistem juga harus menentukan arus komando, hubungan instruksional, dan rute pengambilan keputusan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu kualitas negara sangat ditentukan oleh *permission structure*, yaitu desain distribusi akses kekuasaan dalam sistem. Konstitusi berfungsi menetapkan siapa boleh melakukan apa, siapa membatasi siapa, dan bagaimana kedaulatan rakyat

diterjemahkan ke dalam struktur kewenangan yang sehat. Jika struktur izin salah, negara tetap dapat berjalan, tetapi berjalan dengan risiko penyimpangan sistemik yang sangat besar.

7.5. *Authority Routing*: Aliran Kewenangan dalam Sistem Negara

Setelah sistem mengenali komponen-komponennya dan menetapkan siapa memiliki akses terhadap fungsi tertentu, pertanyaan berikutnya menjadi sangat mendasar yaitu bagaimana kewenangan itu bergerak. Dalam dunia teknologi, mengenali perangkat keras dan menentukan struktur izin belum cukup untuk menciptakan sistem yang sehat. Sistem juga harus mengetahui bagaimana instruksi mengalir, ke mana perintah dikirim, siapa merespons siapa, jalur keputusan bergerak melalui titik mana, dan bagaimana konflik antarproses diselesaikan. Dalam bahasa sistem, ini dapat disebut sebagai *authority routing*. Dalam konteks negara, inilah persoalan tentang aliran kewenangan.

Analogi ini sangat penting karena banyak orang memahami negara sebagai kumpulan lembaga yang berdiri sendiri, padahal negara sesungguhnya adalah sistem hubungan. Presiden tidak bermakna secara sistemik hanya karena jabatan tersebut ada. Parlemen tidak memperoleh makna hanya karena nama lembaga tercantum dalam dokumen formal. Pengadilan tidak otomatis menjadi elemen stabil hanya karena struktur organisasinya tersedia. Makna sesungguhnya baru muncul ketika hubungan kewenangan antarbagian

dirancang dengan jelas. Negara bukan sekadar daftar komponen. Negara adalah arsitektur interaksi kekuasaan.

Dalam dunia teknologi, *authority routing* menentukan bagaimana perintah diproses. Ketika pengguna memberi instruksi, sistem harus mengetahui ke mana instruksi tersebut diarahkan. Ketika aplikasi membutuhkan sumber daya, kernel (inti sistem) dan *firmware* harus mengetahui jalur komunikasinya. Ketika konflik akses muncul, sistem harus memiliki aturan prioritas. Tanpa routing yang jelas, sistem dapat mengalami kebuntuan, konflik proses, atau perilaku yang tidak dapat diprediksi. Prinsip yang sama berlaku dalam negara.

Dalam kehidupan bernegara, *authority routing* menjawab pertanyaan seperti yaitu siapa membentuk norma hukum. Siapa menjalankan norma tersebut. Siapa menguji kesesuaiannya dengan konstitusi. Siapa mengoreksi pelanggaran. Siapa mengelola administrasi publik. Siapa mengendalikan instrumen keamanan. Siapa mengawasi penggunaan kekuasaan. Siapa menyelesaikan sengketa antarorgan. Semua pertanyaan ini bukan sekadar persoalan jabatan, tetapi persoalan jalur kewenangan.

Dalam BAB 7.3 telah dibahas *hardware initialization*, yaitu pengenalan komponen negara. Dalam BAB 7.4 dibahas *permission structure*, yaitu distribusi hak akses kekuasaan. Namun sistem yang hanya mengenali komponen dan memberi akses belum tentu sehat jika tidak memiliki jalur kewenangan yang jelas. Dalam dunia teknologi, memberi banyak proses

hak akses tanpa *routing logic* yang tertib justru menghasilkan kekacauan. Dalam negara, hal yang sama dapat terjadi. Banyak lembaga dapat memiliki kewenangan, tetapi tanpa arsitektur hubungan yang sehat, negara akan terjebak dalam benturan kelembagaan.

Sebagai contoh, bayangkan sebuah sistem di mana dua lembaga merasa memiliki otoritas pada ruang yang sama, tetapi tanpa batas yang jelas. Atau sebuah sistem di mana lembaga pelaksana dapat mengabaikan mekanisme pengawasan karena jalur koreksi kabur. Atau sistem di mana lembaga pengawas memiliki kewenangan formal tetapi tidak memiliki jalur implementasi yang efektif. Dalam kondisi seperti itu, persoalan bukan semata perilaku aktor, tetapi desain *authority routing*.

Dalam konteks negara, *authority routing* sangat berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan, pembagian fungsi, dan arsitektur kelembagaan. Namun buku ini mengajak pembaca melihatnya bukan sekadar sebagai konsep hukum formal, melainkan sebagai logika sistem. Jika jalur kewenangan salah desain, negara dapat mengalami tiga jenis penyakit utama yaitu kebuntuan (*deadlock*), tumpang tindih (*overlap*), atau pembajakan (*capture*).

Kebuntuan terjadi ketika jalur kewenangan saling mengunci. Lembaga A membutuhkan persetujuan lembaga B, sementara lembaga B menunggu keputusan lembaga A. Konflik menjadi permanen karena arsitektur tidak menyediakan jalur penyelesaian yang efektif. Dalam dunia digital, ini

menyerupai dua proses yang saling menunggu akses sumber daya hingga sistem membeku. Dalam negara, hasilnya adalah stagnasi kebijakan, konflik institusional, dan hilangnya efektivitas pemerintahan.

Tumpang tindih terjadi ketika batas fungsi tidak jelas. Dua atau lebih organ merasa memiliki kewenangan serupa atau memasuki ruang kerja yang sama. Dalam dunia teknologi, ini menyerupai dua driver yang mencoba mengendalikan perangkat yang sama secara bersamaan. Sistem menjadi tidak stabil. Dalam negara, gejalanya muncul dalam bentuk konflik kewenangan, perebutan legitimasi, dan kebingungan publik tentang siapa sebenarnya bertanggung jawab.

Pembajakan terjadi ketika jalur kewenangan secara formal tampak sehat, tetapi secara praktis terkonsentrasi pada lingkaran tertentu. Ini sangat berbahaya karena dari luar sistem tampak bekerja normal, tetapi sesungguhnya aliran kendali telah menyempit. Dalam dunia teknologi, ini menyerupai routing yang secara diam-diam dialihkan sehingga seluruh trafik melewati titik kontrol tertentu. Dalam negara, kondisi ini dapat melahirkan oligarki kelembagaan, konsentrasi pengaruh, atau pelemahan kontrol rakyat.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Prinsip ini harus terus menjadi dasar pembacaan. Jika rakyat adalah pemilik, maka *authority routing* seharusnya dirancang untuk menjaga akuntabilitas sistem terhadap rakyat. Jalur kewenangan tidak boleh sepenuhnya bergerak dalam sirkulasi tertutup antar *elite* tanpa ruang koreksi publik

yang bermakna. Jika hal itu terjadi, struktur kewenangan memang tetap ada, tetapi telah kehilangan kompatibilitas dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Penting juga dipahami bahwa *authority routing* tidak identik dengan hierarki tunggal yang kaku. Negara modern yang sehat tidak selalu bekerja seperti rantai komando militer sederhana. Sebagian kewenangan harus independen agar koreksi dapat berjalan. Sebagian fungsi harus dipisahkan agar konsentrasi kekuasaan tidak berbahaya. Namun independensi tanpa arsitektur hubungan yang jelas juga berisiko menghasilkan fragmentasi. Tantangannya adalah membangun keseimbangan antara koordinasi dan pembatasan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin penting karena bangsa yang dikelola sangat kompleks. Dalam BAB 5 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Bangsa dengan skala sebesar ini memerlukan *authority routing* yang cerdas. Terlalu terpusat berisiko menjauhkan negara dari rakyat dan daerah. Terlalu terfragmentasi berisiko melahirkan kekacauan koordinasi. Desain kewenangan harus kompatibel dengan realitas bangsa, bukan sekadar meniru model abstrak.

Dalam analogi sistem yang digunakan buku ini, *authority routing* adalah sirkulasi saraf negara. Jika saraf penghubung antarorgan rusak, tubuh tetap memiliki organ, tetapi koordinasi runtuh. Mata dapat melihat, tetapi tubuh tidak bergerak tepat. Tangan dapat bergerak, tetapi tanpa sinkronisasi. Dalam negara, lembaga dapat tetap ada secara formal, tetapi tanpa

aliran kewenangan yang sehat, sistem menjadi tidak efektif, kontradiktif, bahkan berbahaya.

Persoalan ini juga sangat terkait dengan legitimasi. Kewenangan yang mengalir tanpa dasar legitimasi yang sehat hanya menghasilkan kontrol teknis, bukan kekuasaan yang sah. Karena itu pembahasan tentang *authority routing* secara alami mengantar pada pertanyaan berikutnya yaitu dari mana otoritas itu sesungguhnya memperoleh legitimasi.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara bukan hanya membutuhkan distribusi kewenangan, tetapi juga aliran kewenangan yang sehat. Authority routing menentukan bagaimana kekuasaan bergerak, bagaimana lembaga saling berhubungan, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana sistem menjaga stabilitasnya. Jika aliran kewenangan salah desain, negara dapat tetap tampak hidup, tetapi sesungguhnya bekerja dalam kondisi penuh benturan, kebuntuan, atau pembajakan struktural.

7.6. Legitimasi: Dari Mana Sistem Mendapat Otoritas

Setelah membahas bagaimana negara diaktifkan, bagaimana komponen dikenali, bagaimana hak akses dibagi, dan bagaimana kewenangan dialirkan, pembahasan kini sampai pada pertanyaan yang paling mendasar dalam seluruh arsitektur kekuasaan yaitu dari mana sistem memperoleh otoritas untuk menjalankan seluruh fungsi tersebut. Pertanyaan ini sangat penting karena sebuah sistem dapat saja memiliki struktur yang rapi, jalur kewenangan yang

jelas, serta institusi yang lengkap, tetapi tetap mengalami cacat mendasar jika sumber otoritasnya tidak sah atau tidak kompatibel dengan prinsip dasar bangsa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pertanyaannya adalah siapa yang memberi hak kepada negara untuk memerintah.

Dalam dunia teknologi, sistem hanya dapat bekerja secara sah ketika struktur otoritasnya sesuai dengan desain kepemilikan dan konfigurasi dasarnya. Sebuah perangkat mungkin dapat diakses oleh banyak proses, tetapi tidak semua proses memiliki legitimasi untuk mengubah inti sistem. Sebuah aplikasi mungkin dapat berjalan, tetapi tidak otomatis berhak mengubah konfigurasi fundamental. Jika sebuah proses memperoleh kontrol tanpa otorisasi yang sah, situasi tersebut tidak disebut administrasi sistem yang sehat, melainkan unauthorized access atau bahkan pembajakan. Analogi ini sangat penting, karena persoalan negara pada tingkat terdalam juga adalah persoalan legitimasi.

Negara pada dasarnya adalah organisasi kekuasaan yang memiliki *coercive power*, sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB 1. Negara dapat membuat aturan yang mengikat. Negara dapat memungut kewajiban. Negara dapat membatasi tindakan tertentu. Negara dapat menggunakan instrumen pemaksaan dalam batas hukum. Karena negara memiliki kapasitas koersif, maka legitimasi menjadi persoalan mutlak. Kekuasaan tanpa legitimasi bukan tata kelola, melainkan dominasi. Instruksi tanpa legitimasi bukan pemerintahan, melainkan kontrol paksa.

Dalam Sejarah manusia, legitimasi kekuasaan pernah dibangun di atas berbagai fondasi. Ada sistem yang meletakkan legitimasi pada garis keturunan. Ada yang mendasarkan pada kekuatan militer. Ada yang mengandalkan klaim mandat religius tertentu. Ada pula yang bertumpu pada dominasi ekonomi atau penaklukan. Namun dalam konteks negara modern yang berlandaskan kedaulatan rakyat, sumber legitimasi yang paling mendasar adalah rakyat sebagai pemilik sah sistem pemerintahan.

Dalam BAB 3, buku ini telah menegaskan bahwa rakyat adalah *root owner* negara. Prinsip ini bukan slogan emosional, melainkan fondasi sistemik. Jika rakyat adalah pemilik, maka seluruh struktur kekuasaan negara bersifat turunan. Presiden memperoleh legitimasi karena sistem mengizinkannya. Parlemen memperoleh legitimasi karena sistem memberi mandat representatif. Pengadilan memperoleh legitimasi karena sistem membutuhkan mekanisme koreksi hukum. Aparat memperoleh legitimasi karena sistem membutuhkan perlindungan terhadap keteraturan. Tidak satu pun lembaga menjadi sumber legitimasi asli. Semua adalah pemegang fungsi turunan.

Di sinilah legitimasi berbeda dari sekadar kekuasaan praktis. Sebuah kelompok dapat memiliki kekuatan nyata. Sebuah lembaga dapat memiliki akses terhadap instrumen koersif. Sebuah aktor dapat mengendalikan sumber daya strategis. Namun kekuatan praktis tidak identik dengan legitimasi. Dalam sistem digital, *malware* dapat memperoleh kontrol operasional yang besar atas perangkat, tetapi kontrol

tersebut tetap tidak sah secara sistemik. Dalam negara, dominasi de facto juga tidak otomatis menghasilkan legitimasi moral maupun konstitusional.

Karena itu legitimasi harus dipahami sebagai fondasi normatif dari kewenangan. Bukan sekadar kemampuan untuk bertindak, tetapi hak yang sah untuk bertindak. Bukan sekadar kekuatan untuk memerintah, tetapi pembenaran yang sah untuk menjalankan kekuasaan. Tanpa legitimasi, seluruh arsitektur negara berubah menjadi mesin kontrol tanpa dasar moral yang sehat.

Konstitusi dalam konteks ini memegang peran yang sangat penting. Jika dalam analogi buku ini konstitusi adalah *firmware* negara, maka salah satu fungsi terpentingnya adalah mengaktifkan dan menyalurkan legitimasi. Konstitusi menentukan siapa memperoleh kewenangan, dalam batas apa kewenangan tersebut dapat digunakan, dan melalui mekanisme apa legitimasi itu dipertahankan. Dengan kata lain, konstitusi bukan sekadar peta struktur kelembagaan, tetapi mesin distribusi legitimasi.

Namun legitimasi formal tidak selalu identik dengan legitimasi substantif. Ini perbedaan yang sangat penting. Sebuah tindakan dapat memiliki dasar prosedural formal, tetapi kehilangan legitimasi substantif jika bertentangan dengan prinsip dasar sistem. Dalam BAB 6 telah ditegaskan bahwa Pancasila adalah kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Artinya, legitimasi formal yang bergerak melawan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, atau Keadilan

Sosial sesungguhnya sedang mengalami konflik kompatibilitas dengan inti filosofis bangsa.

Sebagai contoh, sebuah kebijakan mungkin lahir melalui prosedur formal yang sah. Namun jika kebijakan tersebut merendahkan martabat manusia secara sistemik, menjauhkan rakyat dari kedaulatan substantif, atau memperkuat ketidakadilan struktural, maka pertanyaan legitimasi substantif menjadi sangat relevan. Legalitas prosedural tidak selalu identik dengan legitimasi moral. Negara yang matang harus mampu membedakan keduanya.

Dalam konteks ini, legitimasi memiliki setidaknya tiga lapisan. Pertama, legitimasi filosofis, yaitu kesesuaian dengan nilai dasar bangsa. Kedua, legitimasi konstitusional, yaitu kesesuaian dengan desain hukum dasar negara. Ketiga, legitimasi operasional, yaitu penerimaan dan kepercayaan publik terhadap penggunaan kewenangan. Ketiga lapisan ini idealnya saling menguatkan. Ketika salah satu lapisan retak, sistem mulai mengalami ketegangan.

Negara yang memiliki legalitas formal tetapi kehilangan kepercayaan publik menghadapi krisis legitimasi operasional. Negara yang memiliki dukungan sesaat tetapi bertentangan dengan prinsip dasar bangsa menghadapi krisis legitimasi filosofis. Negara yang bergerak di luar batas desain konstitusional menghadapi krisis legitimasi struktural. Semua bentuk krisis ini dapat membuat negara tetap tampak bekerja secara administratif, tetapi sesungguhnya mengalami keretakan mendalam.

Dalam konteks Indonesia, persoalan legitimasi menjadi sangat penting karena bangsa ini dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga di atas fondasi Pancasila sebagai orientasi moral dan peradaban. Dengan demikian, sumber legitimasi tidak boleh direduksi hanya menjadi angka elektoral atau formalitas prosedural. Pemilu penting, tetapi legitimasi negara tidak selesai pada hitungan suara. Kekuasaan yang sah harus tetap kompatibel dengan prinsip kebangsaan dan kepentingan rakyat sebagai pemilik sistem.

Dalam analogi teknologi yang digunakan buku ini, legitimasi dapat dipahami sebagai *authorization certificate* sistemik. Sebuah proses yang berjalan tanpa sertifikasi sah mungkin tetap bergerak, tetapi keberadaannya problematis. Sistem yang sehat harus mengetahui siapa yang benar-benar berwenang, mengapa berwenang, dan sampai di mana batas kewenangan tersebut. Jika tidak, negara menjadi ruang yang rawan diambil alih oleh logika dominasi, bukan tata kelola.

Persoalan legitimasi juga sangat berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang memperoleh legitimasi bukan berarti memperoleh hak tanpa batas. Justru legitimasi yang sehat selalu disertai akuntabilitas. Dalam sistem digital, hak *administrator* tidak berarti kebebasan absolut tanpa pengamanan. Dalam negara, legitimasi tidak boleh dibaca sebagai lisensi untuk bertindak di luar kontrol. Legitimasi memberi kewenangan sekaligus menetapkan batas.

Subbab ini juga menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya. Setelah memahami dari mana sistem memperoleh otoritas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan antar lembaga dirancang agar legitimasi tersebut tidak berubah menjadi kekacauan atau dominasi.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu legitimasi adalah fondasi yang membuat kekuasaan menjadi sah, bukan sekadar efektif. Negara memperoleh otoritas bukan dari kekuatan praktis semata, tetapi dari desain legitimasi yang berakar pada rakyat sebagai pemilik sah, dikonfigurasikan melalui konstitusi, dan harus tetap kompatibel dengan nilai inti bangsa. Tanpa legitimasi yang sehat, negara tetap dapat memerintah, tetapi memerintah sebagai mesin kontrol, bukan sebagai sistem kebangsaan yang sah.

7.7. Hubungan Antar Lembaga sebagai Arsitektur Sistem Negara

Setelah membahas legitimasi sebagai sumber sah otoritas negara, pembahasan berikutnya harus bergerak ke persoalan yang sangat menentukan kualitas kehidupan bernegara yaitu bagaimana hubungan antar lembaga dirancang. Pertanyaan ini sangat penting karena negara bukan sekadar kumpulan institusi yang berdiri sendiri-sendiri. Negara adalah sistem yang terdiri atas banyak komponen yang harus bekerja secara terkoordinasi, terukur, dan saling terkendali. Dalam analogi teknologi yang digunakan buku ini, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai system architecture.

Sebuah sistem tidak hanya membutuhkan komponen yang lengkap, tetapi juga hubungan yang sehat antar komponen tersebut.

Dalam dunia teknologi, perangkat keras yang lengkap belum menjamin sistem yang stabil. Prosesor yang kuat, memori besar, penyimpanan cepat, kartu grafis modern, dan jaringan yang baik tetap dapat menghasilkan sistem yang bermasalah jika arsitektur komunikasinya salah. Komponen dapat saling berebut sumber daya. Jalur komunikasi dapat mengalami hambatan. Fungsi dapat tumpang tindih. Sebagian bagian sistem dapat bekerja terlalu dominan sementara bagian lain menjadi lumpuh. Dalam kondisi seperti itu, persoalan bukan pada keberadaan komponen, tetapi pada desain hubungan antar komponen. Prinsip yang sama berlaku dalam negara.

Dalam kehidupan bernegara, publik sering terjebak pada pembacaan yang terlalu personal. Persoalan negara sering dipersempit menjadi siapa presiden, siapa menteri, siapa hakim, siapa anggota parlemen, atau siapa pejabat tertentu. Pembacaan seperti itu memang penting pada level tertentu, tetapi terlalu dangkal jika ingin memahami persoalan struktural. Negara tidak hanya ditentukan oleh kualitas aktor, tetapi juga oleh kualitas arsitektur sistem yang menghubungkan aktor-aktor tersebut. Aktor yang baik dapat terjebak dalam desain yang buruk. Aktor yang lemah dapat menjadi sangat berbahaya jika ditempatkan dalam struktur yang memberi konsentrasi kekuasaan berlebihan.

Dalam BAB 7.3 telah dibahas bahwa negara harus mengenali komponen-komponen dasarnya. Dalam BAB 7.4 dijelaskan bahwa sistem harus membagi hak akses kekuasaan. Dalam BAB 7.5 dibahas bagaimana kewenangan mengalir. Dalam BAB 7.6 dijelaskan bahwa seluruh kewenangan tersebut harus memiliki legitimasi yang sah. Namun seluruh unsur ini masih belum cukup jika hubungan antar lembaga tidak dirancang secara sehat. Sebab negara bukan hanya persoalan komponen dan kewenangan, tetapi persoalan interaksi kelembagaan.

Hubungan antar lembaga menentukan apakah negara bekerja sebagai sistem yang koheren atau sebagai arena konflik permanen. Presiden dan parlemen, misalnya, tidak hanya membutuhkan definisi kewenangan masing-masing, tetapi juga mekanisme hubungan yang jelas. Pengadilan dan lembaga pembentuk hukum juga memerlukan batas relasi yang sehat. Aparat keamanan, lembaga pengawasan, birokrasi, dan berbagai institusi lainnya harus ditempatkan dalam desain yang memungkinkan koordinasi tanpa menciptakan dominasi yang berbahaya.

Dalam arsitektur sistem yang sehat, setiap komponen memiliki fungsi yang jelas, ruang kerja yang proporsional, dan mekanisme interaksi yang dapat diprediksi. Ini bukan berarti seluruh hubungan harus bersifat harmonis tanpa ketegangan. Dalam negara modern, sebagian ketegangan justru sehat karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Yang berbahaya adalah ketegangan yang lahir dari desain yang kabur,

konflik kewenangan yang tidak terselesaikan, atau konsentrasi kekuasaan yang menghilangkan keseimbangan.

Dalam teori pemerintahan modern, pembahasan ini sering dikaitkan dengan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Buku ini tidak menolak konsep tersebut, tetapi mengajak pembaca melihatnya melalui perspektif sistemik yang lebih operasional. Dalam analogi teknologi, *checks and balances* dapat dipahami sebagai desain arsitektural yang mencegah satu komponen memperoleh kontrol mutlak tanpa koreksi. Ini penting karena sistem yang memberi satu titik kendali absolut cenderung rentan terhadap kegagalan tunggal (single point of failure) dan penyalahgunaan.
Bayangkan sebuah sistem digital di mana seluruh kontrol, seluruh akses, seluruh validasi, dan seluruh eksekusi berada pada satu modul tanpa pengawasan. Sistem seperti itu mungkin tampak efisien dalam jangka pendek, tetapi sangat rapuh. Jika modul tersebut bermasalah, seluruh sistem runtuh. Dalam negara, konsentrasi kekuasaan berlebihan menciptakan risiko serupa. Negara mungkin tampak bergerak cepat, tetapi stabilitas jangka panjangnya rapuh karena terlalu bergantung pada satu pusat kontrol.

Sebaliknya, arsitektur yang terlalu terfragmentasi juga bermasalah. Jika terlalu banyak pusat keputusan tanpa koordinasi yang jelas, negara mengalami kebuntuan. Sistem digital dengan terlalu banyak proses independen yang saling menunggu tanpa protokol yang baik akan mengalami *deadlock*. Dalam negara, gejalanya muncul dalam bentuk

kebijakan yang tidak bergerak, konflik kelembagaan berkepanjangan, dan hilangnya efektivitas pemerintahan. Karena itu desain hubungan antar lembaga harus mencari keseimbangan antara konsentrasi yang berbahaya dan fragmentasi yang melumpuhkan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi jauh lebih penting karena negara yang sedang dibahas bukan sistem sederhana. Dalam BAB 5 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Negara yang mengelola pluralitas sebesar ini membutuhkan arsitektur kelembagaan yang sangat matang. Struktur yang cocok untuk masyarakat kecil yang homogen belum tentu kompatibel dengan realitas Indonesia. Sistem harus mampu menjaga persatuan tanpa menekan keragaman, menjaga efektivitas tanpa mengorbankan akuntabilitas, serta menjaga stabilitas tanpa menutup ruang koreksi.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Prinsip ini harus tetap menjadi titik acuan. Hubungan antar lembaga tidak boleh berkembang menjadi sirkulasi kekuasaan tertutup yang melupakan pemilik sah sistem. Lembaga negara tidak dibentuk untuk menciptakan oligarki administratif yang hanya berinteraksi di antara sesamanya. Seluruh arsitektur kelembagaan harus tetap terhubung dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jika hubungan antar lembaga menjadi sistem tertutup yang hanya melayani stabilitas *elite*, maka negara kehilangan kompatibilitas dengan fondasi legitimasi dasarnya.

Hubungan antar lembaga juga sangat menentukan kualitas akuntabilitas. Sebuah lembaga yang kuat tanpa koreksi cenderung menyimpang. Sebuah lembaga pengawas tanpa akses nyata cenderung menjadi simbol. Sebuah lembaga perwakilan tanpa keterhubungan substantif dengan rakyat cenderung menjadi formalitas. Sebuah lembaga eksekutif tanpa pembatas dapat bergerak terlalu dominan. Arsitektur hubungan harus memastikan bahwa setiap lembaga memiliki ruang kerja yang cukup, tetapi tidak berkembang menjadi entitas tak tersentuh.

Dalam analogi sistem, hubungan antar lembaga dapat dipahami sebagai bus architecture atau jaringan komunikasi internal yang menghubungkan seluruh komponen utama. Jika jalur ini sehat, informasi mengalir, instruksi jelas, koreksi berjalan, dan stabilitas terjaga. Jika jalur ini rusak, sistem menjadi penuh konflik, lambat, atau rawan manipulasi. Negara pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa memegang jabatan, tetapi bagaimana sistem mengatur hubungan di antara pemegang jabatan tersebut.

Persoalan ini menjadi jembatan penting menuju diagnosis yang lebih tajam. Sebab jika hubungan antar lembaga adalah bagian dari arsitektur *firmware* negara, maka kesalahan desain pada level ini dapat menghasilkan kerusakan struktural yang terus diwariskan lintas generasi. Sistem dapat terus berjalan, pemilu dapat terus berlangsung, pejabat dapat berganti, tetapi masalah inti tetap bertahan karena akar

persoalannya berada pada desain hubungan, bukan semata pada operator.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara adalah arsitektur sistem, bukan sekadar kumpulan lembaga formal. Hubungan antar lembaga menentukan apakah negara bekerja secara stabil, akuntabel, dan kompatibel dengan prinsip kedaulatan rakyat, atau justru berubah menjadi arena konflik, dominasi, dan kebuntuan struktural. Desain kelembagaan yang sehat bukan detail teknis administratif, melainkan fondasi kehidupan negara itu sendiri.

7.8. Jika *Firmware* Salah, Negara Akan Salah Hidup

Setelah memahami negara sebagai sistem yang membutuhkan *booting*, pengenalan komponen, distribusi akses, aliran kewenangan, legitimasi, dan arsitektur hubungan antar lembaga, pembahasan kini sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting sekaligus sangat tidak nyaman yaitu bagaimana jika masalah utama negara bukan terletak pada operator, melainkan pada desain dasar sistem itu sendiri. Pertanyaan ini penting karena dalam perdebatan publik, persoalan negara hampir selalu dipersonalisasi. Kesalahan dianggap berasal dari pejabat tertentu. Kegagalan dianggap berasal dari pemerintahan tertentu. Krisis dianggap sebagai akibat dari individu tertentu. Semua itu mungkin benar pada tingkat tertentu, tetapi pembacaan seperti itu sering terlalu dangkal jika akar persoalan berada pada lapisan yang lebih mendasar.

Dalam dunia teknologi, analoginya sangat jelas. Sebuah perangkat dapat memiliki pengguna yang cerdas, aplikasi yang canggih, koneksi yang cepat, dan komponen fisik yang kuat. Namun jika *firmware*-nya bermasalah, seluruh sistem tetap akan bekerja secara tidak sehat. Sistem mungkin gagal melakukan *booting* dengan stabil. Komponen dapat salah dikenali. Hak akses dapat terbuka secara berbahaya. Jalur instruksi dapat bertabrakan. Sistem dapat mengalami crash, freeze, konflik internal, atau bahkan diambil alih oleh proses yang tidak semestinya. Yang tampak di permukaan adalah gangguan operasional, tetapi akar persoalannya berada pada lapisan dasar.

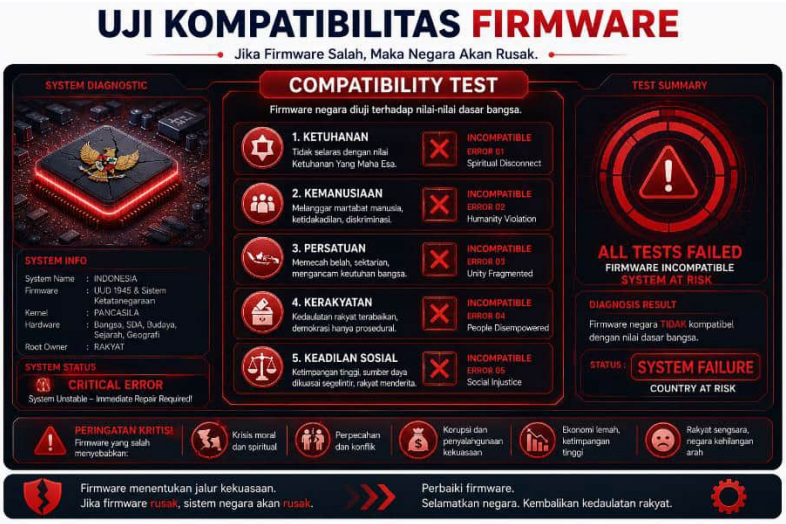

Analogi ini sangat relevan untuk membaca negara. Negara yang tampak penuh masalah belum tentu terutama disebabkan oleh buruknya operator. Tentu operator yang buruk dapat memperparah

keadaan. Namun sistem yang sehat umumnya memiliki daya tahan tertentu terhadap kelemahan operator. Sebaliknya, sistem yang cacat secara desain akan terus melahirkan persoalan bahkan ketika diisi oleh operator yang relatif baik. Ini adalah prinsip dasar dalam berpikir sistemik yaitu desain yang salah akan menghasilkan pola kegagalan yang berulang.

Dalam konteks negara, *firmware* adalah konstitusi dalam pengertian arsitektural. Konstitusi menentukan bagaimana negara diaktifkan, siapa diakui sebagai organ, bagaimana kewenangan dibagi, bagaimana legitimasi didistribusikan, dan bagaimana hubungan antar lembaga dibentuk. Jika lapisan ini salah desain, maka persoalan yang muncul bukan insiden acak, melainkan gejala sistemik.

Salah satu gejala pertama dari *firmware* yang bermasalah adalah *unstable boot*. Dalam dunia teknologi, perangkat dengan *firmware* yang rusak mungkin menyala, tetapi tidak stabil. Sistem hidup, lalu berhenti. Sistem aktif, lalu mengalami gangguan berulang. Dalam negara, analoginya adalah negara yang secara formal terus berjalan tetapi secara operasional terus mengalami ketegangan struktural. Pemerintahan berganti, konflik kelembagaan tetap muncul. Kebijakan berubah, masalah dasar tetap berulang. Aktor silih berganti, pola kegagalan tidak benar-benar hilang. Ini menandakan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar personalitas.

Gejala kedua adalah misconfigured permissions. Dalam sistem digital, hak akses yang salah dapat membuat pengguna yang seharusnya terbatas

memperoleh kontrol berlebihan, atau pemilik sah justru kehilangan kendali atas sistemnya sendiri. Dalam konteks negara, gejala ini sangat sensitif. Jika rakyat adalah pemilik sah negara sebagaimana telah ditegaskan dalam BAB 3, tetapi dalam praktik akses substantif terhadap pengendalian sistem sangat terbatas, maka terdapat masalah dalam desain distribusi kewenangan. Sebaliknya, jika lembaga tertentu memperoleh ruang kontrol yang terlalu besar tanpa koreksi memadai, sistem menjadi rentan terhadap dominasi.

Gejala ketiga adalah *authority conflict*. Dalam dunia teknologi, jalur instruksi yang buruk menyebabkan proses saling bertabrakan. Dua komponen mencoba mengendalikan fungsi yang sama. Sinyal konflik muncul. Sistem kehilangan efisiensi atau bahkan lumpuh. Dalam negara, gejala ini muncul ketika lembaga-lembaga terus bersinggungan secara destruktif karena desain hubungan yang tidak sehat. Konflik kewenangan yang berulang sering kali bukan sekadar persoalan ego aktor, tetapi indikasi bahwa arsitektur dasarnya menyimpan ketegangan struktural.

Gejala keempat adalah *security vulnerability*. Sistem dengan *firmware* yang buruk lebih mudah dibajak. Celah keamanan memungkinkan proses yang tidak sah memperoleh kendali. Dalam negara, padanan konsep ini sangat serius. Ketika desain dasar membuka ruang konsentrasi pengaruh yang tidak sehat, kekuasaan dapat secara perlahan dikendalikan oleh kepentingan yang tidak memiliki legitimasi substantif sebagai pemilik sistem. Fenomena ini sering dikaitkan

dengan oligarki, penguasaan negara oleh kepentingan tertentu, atau dominasi kekuatan di luar kehendak rakyat terhadap arah kebijakan negara.

Gejala kelima adalah compatibility failure. Dalam sistem digital, *firmware* yang tidak kompatibel dengan arsitektur inti akan menghasilkan ketidakstabilan permanen. Dalam konteks buku ini, Pancasila telah ditempatkan sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Jika desain konstitusional atau arsitektur negara tidak kompatibel dengan nilai inti bangsa, maka negara akan terus bergerak dalam ketegangan filosofis. Di permukaan, sistem tampak legal. Secara substantif, sistem bergerak menjauh dari *source code* dan kernel (inti sistem) kebangsaannya sendiri.

Ini penting dipahami karena kritik terhadap desain sistem sering dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap negara. Padahal justru sebaliknya. Dalam dunia teknologi, mendiagnosis kerusakan *firmware* bukan tindakan merusak perangkat, melainkan upaya menyelamatkan sistem. Kritik terhadap arsitektur negara bukan otomatis penolakan terhadap negara. Kritik dapat menjadi bentuk tanggung jawab intelektual untuk mengidentifikasi akar persoalan yang selama ini tertutup oleh pembacaan yang terlalu personalistik.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan ini sangat relevan karena bangsa ini bukan sistem sederhana. Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform*. Sistem sebesar ini memerlukan desain dasar yang sangat presisi. Negara

dengan kompleksitas tinggi jauh lebih sensitif terhadap kesalahan arsitektural. Sistem kecil kadang masih bertahan dengan desain yang tidak ideal karena beban kompleksitasnya rendah. Namun negara besar dengan pluralitas tinggi, sejarah panjang, dinamika geopolitik strategis, dan kebutuhan integrasi yang rumit tidak memiliki kemewahan tersebut.

Penting pula ditegaskan bahwa *firmware* failure tidak selalu menghasilkan kehancuran total yang dramatis. Kadang gejalanya justru lebih halus dan berbahaya. Sistem tetap berjalan. Administrasi tetap berlangsung. Pemilu tetap diadakan. Lembaga tetap berdiri. Namun kualitas hidup sistem terus menghasilkan pola ketidakadilan, keterasingan rakyat, konflik laten, atau konsentrasi kekuasaan yang terus berulang. Dalam kondisi seperti ini, masalah justru lebih sulit dikenali karena negara tampak "normal" di permukaan.

Dalam BAB 6 telah ditegaskan bahwa Pancasila tidak boleh direduksi menjadi slogan. Subbab ini memperluas argumen tersebut. Bahkan jika kernel (inti sistem) bangsa sehat secara filosofis, sistem tetap dapat berjalan buruk jika *firmware*-nya salah desain. Artinya, memiliki nilai dasar yang benar belum cukup. Nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam arsitektur negara yang kompatibel.

Subbab ini menjadi jembatan yang sangat penting menuju diagnosis yang lebih konkret. Setelah pembaca memahami bahwa persoalan negara dapat berasal dari *firmware* failure, pertanyaan berikutnya menjadi sangat langsung yaitu jika konstitusi adalah

firmware negara, bagaimana posisi Undang-Undang Dasar dalam konteks Indonesia. Apakah *firmware* tersebut benar-benar kompatibel dengan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa, atau justru menyimpan persoalan struktural.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara yang terus mengalami persoalan berulang belum tentu terutama menderita karena operator yang buruk. Akar persoalan dapat berada pada desain *firmware* yang salah. Jika konstitusi sebagai instruksi dasar salah arsitektur, negara tetap dapat hidup secara formal, tetapi hidup dalam kondisi cacat sistemik yang terus mereproduksi masalah lintas generasi.

7.9. UUD sebagai *Firmware* Indonesia

Setelah menelusuri seluruh fungsi *firmware* dalam analogi sistem, mulai dari *booting*, pengenalan komponen, distribusi akses, aliran kewenangan, legitimasi, hingga arsitektur hubungan antar lembaga yang mana pembahasan kini sampai pada pertanyaan yang sangat langsung yaitu dalam konteks Indonesia, apa padanan nyata dari *firmware* negara tersebut. Jawabannya tegas yaitu Undang-Undang Dasar. Jika negara dipahami sebagai sistem, maka Undang-Undang Dasar bukan sekadar dokumen hukum tertinggi dalam arti formal, melainkan instruksi dasar yang menentukan bagaimana negara hidup.

Pemahaman ini penting karena selama ini Undang-Undang Dasar sering dibaca secara sempit sebagai teks hukum normatif yang hanya relevan bagi

ahli hukum tata negara, hakim konstitusi, legislator, atau kalangan akademik tertentu. Pembacaan seperti itu terlalu terbatas. Dalam perspektif buku ini, Undang-Undang Dasar bukan sekadar objek studi hukum, melainkan system architecture blueprint. Dokumen ini menentukan cara negara dinyalakan, siapa dikenali sebagai organ resmi, bagaimana kewenangan didistribusikan, siapa memperoleh legitimasi untuk bertindak, serta bagaimana kekuasaan diatur agar tidak berubah menjadi dominasi tanpa kontrol.

Dalam dunia teknologi, *firmware* bekerja diam-diam. Pengguna biasa mungkin tidak pernah melihatnya secara langsung. Yang terlihat hanyalah aplikasi, antarmuka, atau hasil operasional sehari-hari. Namun justru lapisan tersembunyi inilah yang menentukan apakah sistem berjalan sehat. Prinsip yang sama berlaku pada Undang-Undang Dasar. Warga negara sehari-hari mungkin lebih akrab dengan berita tentang presiden, parlemen, pemilu, aparat, kebijakan, atau konflik kekuasaan. Namun seluruh dinamika tersebut pada tingkat mendasar bergerak di atas struktur yang ditentukan oleh konstitusi.

Karena itu, memahami negara hanya melalui operator tanpa membaca Undang-Undang Dasar sama seperti mendiagnosis komputer hanya dari aplikasi yang tampak di layar tanpa memahami *firmware*-nya. Keluhan tentang sistem yang lambat, konflik proses, kegagalan fungsi, atau akses yang bermasalah tidak akan pernah diselesaikan dengan benar jika akar persoalan berada pada lapisan yang lebih dasar. Buku ini mengajak pembaca untuk berpindah dari

pembacaan permukaan menuju pembacaan arsitektural.

Undang-Undang Dasar dalam konteks ini menjalankan beberapa fungsi yang sangat mendasar. Pertama, fungsi aktivasi. Negara tidak hidup hanya karena rakyat, wilayah, dan aparatur tersedia. Sebagaimana dibahas dalam subbab sebelumnya, negara membutuhkan *boot architecture*. Undang-Undang Dasar mengisi fungsi tersebut dengan menentukan dasar eksistensi kelembagaan negara. Tanpa kerangka dasar semacam ini, negara hanya menjadi kumpulan kekuatan yang belum terintegrasi.

Kedua, fungsi identifikasi kelembagaan. Undang-Undang Dasar menentukan organ-organ dasar negara. Lembaga apa yang diakui. Fungsi apa yang dimiliki. Posisi apa yang ditempati dalam arsitektur kekuasaan. Dalam analogi teknologi, ini adalah fase *hardware initialization*. Sistem harus mengetahui komponen-komponennya agar dapat bekerja dengan terstruktur. Negara tanpa identifikasi konstitusional yang jelas akan bergerak dalam kekaburan kekuasaan.

Ketiga, fungsi distribusi akses. Undang-Undang Dasar menentukan siapa boleh melakukan apa. Siapa membentuk norma. Siapa menjalankan pemerintahan. Siapa menafsirkan hukum. Siapa mengawasi. Siapa memiliki ruang intervensi tertentu. Dalam analogi sistem, ini adalah *permission structure*. Negara yang tidak mengatur distribusi akses secara sehat akan rentan terhadap dominasi, kebocoran kewenangan, atau pembajakan sistem.

Keempat, fungsi *authority routing*. Undang-Undang Dasar menentukan bagaimana kewenangan mengalir antar lembaga. Siapa berhubungan dengan siapa. Siapa mengoreksi siapa. Siapa memiliki otoritas pada jalur tertentu. Siapa berada dalam hubungan koordinatif, siapa dalam hubungan korektif, siapa dalam hubungan eksekutif. Tanpa desain aliran kewenangan yang sehat, negara berubah menjadi arena benturan kewenangan permanen.

Kelima, fungsi legitimasi. Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Namun prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam arsitektur hukum. Undang-Undang Dasar menjalankan fungsi tersebut dengan menentukan bagaimana legitimasi diaktifkan dan disalurkan. Kekuasaan dalam negara tidak boleh bergerak sebagai kekuatan liar. Harus ada fondasi yang menjelaskan mengapa suatu organ memiliki hak untuk bertindak.

Namun pada titik inilah pembacaan harus menjadi lebih kritis. Mengakui bahwa Undang-Undang Dasar adalah *firmware* negara tidak otomatis berarti *firmware* tersebut sehat. Dalam dunia teknologi, keberadaan *firmware* bukan jaminan kualitas sistem. *Firmware* dapat dirancang dengan baik, dapat pula memuat kesalahan mendasar. *Firmware* dapat kompatibel dengan kebutuhan sistem, dapat pula menciptakan ketegangan permanen. Karena itu pertanyaan yang jauh lebih penting bukan apakah negara memiliki konstitusi, tetapi bagaimana kualitas desain konstitusi tersebut.

Ini adalah titik yang sangat penting secara intelektual. Banyak masyarakat terjebak dalam asumsi bahwa keberadaan konstitusi identik dengan kesehatan sistem ketatanegaraan. Padahal hampir semua negara modern memiliki dokumen konstitusional dalam bentuk tertentu. Persoalannya bukan keberadaan dokumen, melainkan arsitektur yang dikandungnya. Sebuah negara dapat memiliki Undang-Undang Dasar yang sangat formal tetapi tetap menyimpan masalah desain mendasar.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi sangat serius karena bangsa ini telah ditegaskan sebagai *multi-civilizational platform* dengan Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness*. Jika Undang-Undang Dasar adalah *firmware* negara, maka pertanyaan utama adalah soal kompatibilitas. Apakah *firmware* tersebut benar-benar menerjemahkan kernel (inti sistem) bangsa secara sehat. Apakah desain konstitusional benar-benar kompatibel dengan prinsip kedaulatan rakyat. Apakah arsitektur kelembagaannya mendukung keadilan, persatuan, kemanusiaan, dan kerakyatan substantif. Ataukah terdapat ketegangan antara nilai inti bangsa dan desain operasional negara.

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dihindari, karena justru di sinilah tanggung jawab intelektual dimulai. Buku ini tidak berhenti pada penghormatan simbolik terhadap negara. Buku ini sedang membangun cara membaca negara secara sistemik. Jika negara adalah sistem, maka sistem harus dapat diaudit secara konseptual. Jika konstitusi adalah *firmware*, maka *firmware* harus dapat dievaluasi.

Penting juga ditegaskan bahwa evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar bukan tindakan anti-negara. Justru sebaliknya. Dalam dunia teknologi, memeriksa *firmware* yang bermasalah adalah bagian dari upaya menyelamatkan sistem. Kritik terhadap desain dasar bukan serangan terhadap perangkat, tetapi usaha memperbaiki kompatibilitas sistem dengan tujuan dasarnya. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara.

Subbab ini menjadi pintu yang sangat penting menuju bab-bab berikutnya. Sampai titik ini, pembaca telah diajak memahami bangsa sebagai peradaban, Pancasila sebagai kernel (inti sistem), dan konstitusi sebagai *firmware*. Langkah berikutnya akan jauh lebih tajam yaitu jika Undang-Undang Dasar adalah *firmware* Indonesia, bagaimana diagnosis terhadap desain yang sedang berlaku. Apakah negara ini hidup dengan arsitektur yang kompatibel dengan kedaulatan rakyat, atau justru menyimpan persoalan desain mendasar yang selama ini tidak dibaca secara sistemik.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Undang-Undang Dasar adalah *firmware* Indonesia, yaitu instruksi dasar yang menentukan bagaimana negara hidup, bagaimana kekuasaan diaktifkan, bagaimana lembaga dikenali, bagaimana kewenangan dialirkan, dan bagaimana legitimasi dibentuk. Karena posisinya sangat mendasar, kualitas Undang-Undang Dasar akan sangat menentukan kualitas kehidupan negara itu sendiri.

BAB 8
FIRMWARE YANG DIUBAH

8.1. *Firmware* Tidak Selalu Tetap

Salah satu kesalahan paling umum dalam memahami negara adalah menganggap konstitusi sebagai sesuatu yang permanen, tetap, dan tidak pernah berubah. Cara pandang seperti ini membuat banyak orang melihat Undang-Undang Dasar sebagai dokumen yang hanya berfungsi sebagai simbol legal negara, bukan sebagai bagian aktif dari sistem yang menentukan bagaimana negara bekerja. Padahal, sebagaimana telah dibahas dalam BAB 7, konstitusi dalam perspektif buku ini dipahami sebagai *firmware* negara, yaitu instruksi dasar yang mengatur cara sistem kekuasaan hidup, bergerak, dan beroperasi. Jika konstitusi dipahami sebagai *firmware*, maka satu konsekuensi logis segera muncul yaitu *firmware* dapat diubah.

Dalam dunia teknologi, hampir tidak ada sistem yang benar-benar statis. Produsen perangkat secara berkala mengeluarkan pembaruan untuk memperbaiki bug, meningkatkan keamanan, menambah kemampuan baru, atau memperbaiki kesalahan desain sebelumnya. Proses ini dikenal sebagai *firmware update*. Dalam banyak kasus, pembaruan tersebut dilakukan untuk membuat sistem bekerja lebih baik tanpa mengubah identitas dasarnya. Sebuah telepon genggam tetap menjadi telepon genggam yang sama. Sebuah komputer tetap menjadi komputer yang sama. Sebuah router tetap

menjalankan fungsi dasarnya sebagai penghubung jaringan.

Namun dunia teknologi juga mengenal proses yang jauh lebih radikal dibanding sekadar pembaruan biasa. Proses tersebut dikenal sebagai *firmware* flashing atau *reflash*ing *firmware*. Dalam proses ini, instruksi dasar sistem diganti secara signifikan. Perubahan yang terjadi bukan lagi perbaikan kecil, melainkan perubahan terhadap cara sistem bekerja pada level yang paling mendasar. Perangkat yang sama dapat menunjukkan perilaku yang berbeda karena logika dasar operasionalnya telah berubah.

Perbedaan antara *update* dan *reflash* sangat penting untuk dipahami. Sebuah *update* biasanya bersifat korektif. Sistem lama tetap dipertahankan, hanya diperbaiki pada bagian tertentu. Sebaliknya, *reflash* berpotensi mengubah struktur perilaku sistem secara keseluruhan. Jalur akses dapat berubah. Distribusi kewenangan dapat berubah. Fungsi-fungsi tertentu dapat diperkuat atau dilemahkan. Bahkan hubungan antar komponen dapat dirancang ulang. Secara fisik perangkat tetap sama, tetapi secara operasional sistem telah menjadi berbeda.

Analogi ini sangat relevan ketika digunakan untuk membaca konstitusi. Dalam kehidupan bernegara, perubahan konstitusi sering dianggap sebagai sekadar revisi hukum. Padahal tidak semua perubahan konstitusi memiliki dampak yang sama. Ada perubahan yang hanya memperbaiki ketentuan tertentu tanpa mengubah arsitektur dasar negara. Namun ada pula perubahan yang menggeser logika sistem secara

menyeluruh. Ketika perubahan menyentuh distribusi kekuasaan, sumber legitimasi, hubungan antar lembaga, dan jalur kedaulatan, maka yang berubah bukan hanya pasal-pasal tertentu, melainkan cara negara hidup.

Penting dipahami bahwa perubahan semacam ini bukan sesuatu yang otomatis buruk. Dalam dunia teknologi, tidak semua *firmware* flashing menghasilkan kerusakan. Ada sistem yang justru menjadi lebih stabil setelah desain dasarnya diperbaiki. Ada perangkat yang memperoleh kemampuan baru setelah dilakukan pembaruan menyeluruh. Karena itu buku ini tidak memulai pembahasan dengan asumsi bahwa perubahan selalu salah. Sebaliknya, pembahasan dimulai dari pengakuan bahwa perubahan adalah kemungkinan yang wajar dalam kehidupan sistem.

Namun setiap perubahan pada lapisan dasar selalu memiliki konsekuensi besar. Semakin dekat suatu perubahan dengan inti sistem, semakin luas dampaknya terhadap keseluruhan operasi. Mengganti aplikasi biasanya hanya memengaruhi fungsi tertentu. Mengubah sistem operasi memengaruhi hampir seluruh pengalaman pengguna. Mengubah *firmware* menyentuh fondasi operasional itu sendiri. Karena itu perubahan konstitusi tidak dapat diperlakukan seperti perubahan kebijakan biasa. Konstitusi berada pada level yang jauh lebih mendasar.

Dalam BAB 6 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Dalam BAB 7 dijelaskan bahwa konstitusi adalah *firmware* negara. Hubungan antara keduanya sangat

penting. Kernel (inti sistem) berisi orientasi nilai. *Firmware* menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam arsitektur operasional. Jika *firmware* berubah, cara penerjemahan nilai juga dapat berubah. Nilai yang sama dapat menghasilkan perilaku sistem yang berbeda jika instruksi dasarnya dirancang ulang.

Sebagai contoh sederhana, dua sistem dapat mengklaim menjunjung prinsip yang sama, tetapi membangun distribusi kewenangan yang berbeda. Keduanya mungkin sama-sama berbicara tentang rakyat, keadilan, atau demokrasi. Namun jika jalur akses kekuasaan berbeda, struktur hubungan kelembagaan berbeda, dan sumber legitimasi bekerja melalui mekanisme yang berbeda, hasil operasionalnya juga akan berbeda. Dalam konteks ini, desain lebih penting daripada slogan. Sistem bekerja berdasarkan arsitektur, bukan sekadar berdasarkan deklarasi.

Karena itu, ketika membahas perubahan Undang-Undang Dasar, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya "pasal mana yang berubah", tetapi juga "apa yang terjadi pada arsitektur sistem". Banyak masyarakat membaca perubahan konstitusi pada level redaksional. Kalimat berubah. Ayat bertambah. Pasal dihapus. Namun pembacaan seperti itu sering melewatkan pertanyaan yang jauh lebih penting yaitu apakah perubahan tersebut menggeser distribusi kekuasaan, sumber legitimasi, atau jalur kedaulatan. Jika jawabannya ya, maka yang berubah bukan sekadar teks, melainkan *firmware* negara.

Dalam perspektif sistem, negara yang sama dapat menunjukkan perilaku yang sangat berbeda

setelah *firmware*-nya berubah. Wilayah tetap sama. Bendera tetap sama. Lagu kebangsaan tetap sama. Nama negara tetap sama. Namun cara sistem bekerja bisa berbeda secara mendasar. Hubungan rakyat dengan kekuasaan dapat berubah. Jalur pengambilan keputusan dapat berubah. Peran lembaga negara dapat berubah. Struktur legitimasi dapat berubah. Semua ini terjadi tanpa perlu mengubah identitas formal negara.

Inilah alasan mengapa pembahasan tentang amandemen konstitusi tidak boleh berhenti pada perdebatan hukum semata. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya susunan pasal, melainkan cara negara hidup. Sebagaimana seorang teknisi sistem harus memahami dampak perubahan *firmware* sebelum melakukan flashing, bangsa juga harus memahami konsekuensi perubahan konstitusi terhadap keseluruhan arsitektur negara.

Pada titik ini, pembaca perlu menahan diri dari penilaian terburu-buru. BAB ini belum bertujuan menyimpulkan apakah perubahan yang terjadi baik atau buruk. Tujuan awalnya adalah membangun kesadaran bahwa perubahan konstitusi dapat mengubah perilaku sistem pada level yang sangat mendasar. Kesadaran ini penting karena tanpa memahami sifat strategis *firmware*, perubahan konstitusi akan tampak seperti urusan teknis hukum yang jauh dari kehidupan rakyat. Padahal kenyataannya, perubahan pada lapisan dasar negara akan memengaruhi seluruh lapisan di atasnya.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *firmware* tidak selalu tetap. Dalam

dunia teknologi maupun dalam kehidupan bernegara, instruksi dasar sistem dapat diperbarui, diperbaiki, atau bahkan di-flash ulang. Ketika perubahan menyentuh distribusi kekuasaan, sumber legitimasi, dan arsitektur kelembagaan, yang berubah bukan sekadar aturan, melainkan cara sistem hidup. Dari titik inilah pembahasan harus bergerak menuju pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana sebenarnya *firmware* awal Republik Indonesia dirancang ketika UUD NRI Tahun 1945 pertama kali diberlakukan.

8.2. UUD NRI Tahun 1945 sebagai *Firmware* Awal Republik

Untuk memahami apakah *firmware* negara Indonesia pernah berubah, pembahasan harus terlebih dahulu memahami seperti apa desain awalnya. Sebab tidak mungkin menilai sebuah perubahan tanpa mengetahui kondisi sebelum perubahan terjadi. Dalam dunia teknologi, seorang teknisi tidak dapat menyimpulkan bahwa suatu sistem telah dimodifikasi tanpa memahami konfigurasi awal perangkat tersebut. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Sebelum membahas amandemen, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana UUD NRI Tahun 1945 dirancang ketika republik ini lahir.

Dalam perspektif buku ini, UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar dokumen hukum yang disahkan pada awal kemerdekaan. UUD NRI Tahun 1945 adalah *firmware* awal Republik Indonesia. Dokumen inilah yang menentukan bagaimana negara mulai hidup, bagaimana kekuasaan disusun, bagaimana legitimasi

dialirkan, dan bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah dibentuk. Dengan kata lain, UUD NRI Tahun 1945 adalah instruksi dasar yang menghubungkan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa yang diwujudkan dalam Pancasila dengan *hardware organization* negara yang baru lahir.

Untuk memahami desain awal tersebut, pembacaan tidak boleh dimulai dari jabatan presiden atau lembaga-lembaga negara. Pembacaan harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar yaitu di mana kedaulatan ditempatkan. Pertanyaan ini sangat penting karena dalam setiap sistem pemerintahan, lokasi kedaulatan menentukan arah seluruh arsitektur kekuasaan. Dalam analogi teknologi, hal ini setara dengan menentukan siapa *root owner* dari sebuah sistem.

UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen memberikan jawaban yang sangat jelas. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan ini memiliki konsekuensi arsitektural yang sangat besar. Rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Namun pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak dijalankan secara langsung dalam operasional sehari-hari negara. Pelaksana kedaulatan ditempatkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam perspektif sistem, MPR pada desain awal bukan sekadar lembaga negara biasa. MPR dirancang sebagai simpul utama distribusi legitimasi. MPR menjadi titik pertemuan antara rakyat sebagai pemilik

kedaulatan dan seluruh struktur operasional negara. Karena itu, dalam konstruksi awal UUD NRI Tahun 1945, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Posisi ini bukan sekadar simbol hierarkis, melainkan bagian dari desain *authority routing* yang sangat spesifik.

Jika digambarkan secara sederhana, aliran legitimasi dalam desain awal dapat dibaca sebagai berikut:

Rakyat → MPR → Presiden

Alur ini sangat penting untuk dipahami. Presiden dalam desain awal tidak memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Presiden juga tidak memperoleh legitimasi dari partai politik. Presiden memperoleh mandat dari MPR. Karena itu istilah yang digunakan dalam praktik ketatanegaraan pada masa tersebut adalah "Mandataris MPR". Presiden bukan sumber kedaulatan. Presiden adalah pelaksana mandat yang berasal dari lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam logika sistem, posisi presiden pada masa itu lebih menyerupai chief executive officer yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan melalui mekanisme tertentu. Pemilik tetap berada pada rakyat. Pelaksana kedaulatan berada pada MPR. Presiden menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh MPR. Dengan demikian, hubungan antara presiden dan MPR bukan hubungan yang setara, melainkan hubungan mandat.

Desain ini memiliki implikasi yang sangat besar terhadap arsitektur negara. Karena presiden memperoleh mandat dari MPR, maka MPR memiliki

kewenangan untuk menetapkan arah besar negara melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden bertugas melaksanakan haluan tersebut. Dalam perspektif sistem, MPR berfungsi sebagai pemberi arah strategis, sedangkan presiden berfungsi sebagai operator utama yang menjalankan sistem sesuai mandat.

Penting dipahami bahwa desain ini lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang memiliki pengalaman hidup dalam masa kolonialisme. Salah satu kekhawatiran terbesar pada masa awal kemerdekaan adalah munculnya konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali. Karena itu, desain awal UUD NRI Tahun 1945 berusaha memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan tetap memiliki hubungan yang jelas dengan kedaulatan rakyat melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan tersebut.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Jika menggunakan analogi yang dibangun sepanjang buku ini, desain awal UUD NRI Tahun 1945 mencoba menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam struktur operasional. Rakyat sebagai pemilik ditempatkan pada posisi tertinggi. MPR menjadi representasi pelaksana kedaulatan. Presiden menjadi pelaksana pemerintahan. Dengan kata lain, terdapat jalur legitimasi yang relatif jelas dari pemilik menuju operator.

Tentu desain tersebut bukan tanpa persoalan. Buku ini belum sedang membahas apakah sistem tersebut sempurna atau tidak. Setiap desain ketatanegaraan memiliki kekuatan dan kelemahan.

Namun yang penting dipahami pada tahap ini adalah karakter arsitekturalnya. Desain awal UUD NRI Tahun 1945 menempatkan pusat gravitasi sistem pada MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Inilah ciri paling mendasar dari *firmware* awal Republik Indonesia.

Dalam konteks analogi teknologi, struktur tersebut dapat dipahami sebagai konfigurasi awal sistem yang menentukan jalur distribusi otoritas. Seluruh lembaga negara memperoleh posisi dan fungsi berdasarkan desain tersebut. Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan organ-organ lainnya bergerak dalam struktur yang berpusat pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Karena itu, ketika membahas perubahan konstitusi di masa berikutnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan sekadar apakah pasal tertentu berubah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah jalur legitimasi tersebut tetap sama. Apakah posisi MPR tetap identik dengan desain awal. Apakah hubungan antara rakyat dan pemerintah masih melalui struktur yang sama. Apakah pusat gravitasi sistem tetap berada pada titik yang sama.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam sistem, perubahan pada jalur legitimasi jauh lebih besar dampaknya dibanding perubahan administratif biasa. Mengubah nama lembaga mungkin tidak mengubah perilaku sistem. Mengubah sumber legitimasi dan aliran kedaulatan hampir selalu mengubah cara sistem bekerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai

firmware awal Republik Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan presiden sebagai mandataris MPR yang menjalankan pemerintahan. Desain ini membentuk arsitektur negara yang memiliki jalur legitimasi dan distribusi kekuasaan yang khas. Untuk memahami perubahan yang terjadi setelah amandemen, desain awal inilah yang harus dijadikan titik pembanding utama.

8.3. Apa yang Terjadi pada Amandemen?

Jika UUD NRI Tahun 1945 dipahami sebagai *firmware* awal Republik Indonesia, maka pembahasan berikutnya harus menjawab pertanyaan yang sangat penting yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada periode amandemen Undang-Undang Dasar antara tahun 1999 hingga 2002. Pertanyaan ini sering dijawab secara sederhana sebagai proses penyempurnaan konstitusi. Dalam banyak buku pelajaran, amandemen dipahami sebagai perubahan terhadap beberapa pasal untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan tuntutan reformasi. Penjelasan seperti itu tidak sepenuhnya salah, tetapi terlalu sederhana jika dilihat dari perspektif sistem yang digunakan dalam buku ini.

Dalam analogi teknologi, perubahan terhadap *firmware* tidak dapat dinilai hanya dari jumlah baris instruksi yang diubah. Yang jauh lebih penting adalah bagian mana yang berubah dan fungsi apa yang terdampak. Sebuah sistem dapat mengalami perubahan kecil pada tampilan tanpa mengubah perilaku dasarnya. Sebaliknya, perubahan pada jalur akses,

struktur otoritas, atau distribusi kontrol dapat mengubah seluruh karakter operasional sistem meskipun jumlah perubahan teks tidak terlalu banyak. Prinsip yang sama berlaku pada amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Amandemen yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 berlangsung dalam empat tahap. Perubahan tersebut lahir dalam konteks sejarah yang sangat penting. Reformasi 1998 menghadirkan tuntutan besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Sentralisasi kekuasaan yang dianggap terlalu kuat, lemahnya mekanisme pengawasan, dominasi eksekutif yang berkepanjangan, serta berbagai persoalan demokrasi menjadi alasan utama munculnya keinginan untuk melakukan perubahan konstitusional. Dalam konteks tersebut, amandemen dipandang sebagai jalan untuk membangun tata kelola negara yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih akuntabel.

Namun dari sudut pandang arsitektur sistem, yang menarik bukan hanya alasan perubahan, melainkan skala perubahan itu sendiri. Jika membaca naskah sebelum dan sesudah amandemen, terlihat bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar penambahan pasal atau perbaikan redaksi. Banyak bagian mendasar dari struktur negara mengalami pergeseran. Jalur legitimasi berubah. Distribusi kewenangan berubah. Hubungan antar lembaga berubah. Posisi beberapa organ negara berubah secara fundamental. Bahkan konsep tentang bagaimana rakyat berhubungan dengan kekuasaan juga mengalami transformasi.

Karena itu, dalam perspektif buku ini, amandemen tidak dapat dipahami hanya sebagai patch *update*. Istilah patch dalam dunia teknologi merujuk pada perbaikan tertentu yang dilakukan tanpa mengubah arsitektur inti sistem. Jika sebuah perangkat mengalami gangguan keamanan, produsen dapat mengeluarkan patch untuk menutup celah tersebut tanpa mengubah cara kerja keseluruhan sistem. Namun perubahan UUD NRI Tahun 1945 pasca-Reformasi jauh melampaui logika semacam itu. Yang berubah bukan hanya detail operasional, melainkan sebagian struktur dasar.

Untuk memahami hal ini, pembaca perlu membedakan antara perubahan kebijakan dan perubahan arsitektur. Kebijakan dapat berubah setiap periode pemerintahan. Undang-undang dapat direvisi sesuai kebutuhan zaman. Peraturan pelaksana dapat diperbarui secara berkala. Namun konstitusi berada pada lapisan yang berbeda. Konstitusi menentukan kerangka dasar tempat seluruh kebijakan dan peraturan tersebut bergerak. Ketika konstitusi berubah pada level yang mendasar, yang berubah bukan hanya aturan, tetapi cara sistem bekerja.

Dalam BAB 7 telah dijelaskan bahwa *firmware* memiliki fungsi menentukan bagaimana sistem melakukan *booting*, bagaimana komponen dikenali, bagaimana akses dibagi, bagaimana kewenangan dialirkan, dan bagaimana legitimasi dibentuk. Jika fungsi-fungsi tersebut mengalami perubahan, maka sistem sesungguhnya sedang mengalami transformasi struktural. Inilah alasan mengapa amandemen UUD

NRI Tahun 1945 perlu dibaca bukan hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa rekayasa sistem ketatanegaraan.

Salah satu perubahan paling penting adalah bergesernya pusat gravitasi kekuasaan. Dalam desain awal, sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, MPR ditempatkan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, struktur tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Hubungan antara rakyat, MPR, dan presiden juga tidak lagi identik dengan desain sebelumnya. Pergeseran ini tidak dapat dianggap sebagai perubahan administratif biasa karena menyentuh jantung arsitektur legitimasi negara.

Perubahan lain juga terlihat pada penguatan mekanisme pemilihan langsung, perubahan posisi lembaga perwakilan, lahirnya lembaga-lembaga baru, penguatan fungsi pengujian konstitusional, serta penataan ulang hubungan antar organ negara. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini membentuk pola baru dalam cara negara bekerja. Negara yang muncul setelah amandemen masih bernama Republik Indonesia, masih menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, masih menggunakan bendera yang sama, dan masih menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Namun dari sudut pandang sistem, konfigurasi operasionalnya tidak lagi sepenuhnya sama dengan desain awal.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembacaan ini tidak otomatis berarti perubahan tersebut salah atau

benar. Pada tahap ini, buku belum sedang memberikan penilaian normatif. Yang sedang dilakukan adalah identifikasi terhadap fakta arsitektural. Dalam dunia teknologi, seorang analis sistem harus terlebih dahulu memahami apa yang berubah sebelum menilai apakah perubahan tersebut berhasil atau gagal. Prinsip yang sama digunakan dalam pembahasan ini. Sebelum membahas konsekuensi amandemen, pembaca harus memahami bahwa yang berubah bukan hanya teks konstitusi, tetapi struktur negara itu sendiri.

Kesadaran ini sangat penting karena banyak perdebatan publik tentang amandemen terjebak pada persoalan kekuasaan jangka pendek. Sebagian kelompok melihat amandemen sebagai kemenangan demokrasi. Sebagian kelompok melihatnya sebagai awal berbagai persoalan ketatanegaraan. Namun kedua posisi tersebut sering kali berangkat dari penilaian sebelum memahami secara utuh skala perubahan yang terjadi. Buku ini mengajak pembaca untuk terlebih dahulu melihat perubahan tersebut sebagai perubahan sistem.

Dalam konteks analogi yang dibangun sejak awal, Indonesia setelah amandemen dapat dipahami sebagai perangkat yang masih menggunakan identitas yang sama, tetapi bekerja dengan konfigurasi *firmware* yang berbeda. Perangkat kerasnya masih sama yaitu bangsa Indonesia, wilayah Indonesia, rakyat Indonesia, dan simbol-simbol kenegaraan Indonesia. Kernel (inti sistem) *consciousness*-nya juga secara formal tetap sama, yaitu Pancasila. Namun lapisan yang menerjemahkan

nilai ke dalam struktur kekuasaan mengalami perubahan yang signifikan.

Di sinilah pentingnya pembahasan selanjutnya. Setelah memahami bahwa amandemen bukan sekadar revisi pasal, melainkan perubahan arsitektur, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih spesifik yaitu bagian mana dari jalur kedaulatan yang berubah. Bagaimana hubungan antara rakyat dan kekuasaan setelah amandemen. Apakah aliran legitimasi tetap berjalan melalui mekanisme yang sama seperti desain awal, atau justru mengalami pergeseran mendasar.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar perubahan redaksional atau penyempurnaan administratif, melainkan perubahan yang menyentuh struktur dasar negara. Dari perspektif sistem, yang berubah bukan hanya isi aturan, tetapi cara negara hidup, mendistribusikan kewenangan, dan menyalurkan legitimasi. Dengan kata lain, amandemen telah mengubah arsitektur *firmware* negara Indonesia.

8.4. Pergeseran Jalur Kedaulatan

Di antara seluruh perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat satu perubahan yang memiliki dampak paling besar terhadap arsitektur negara, yaitu perubahan jalur kedaulatan. Perubahan ini sering tidak disadari karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada mekanisme pemilihan presiden secara langsung, pembentukan lembaga baru, atau perubahan kewenangan antar institusi. Padahal di balik seluruh perubahan tersebut

terdapat transformasi yang jauh lebih mendasar, yakni perubahan cara kedaulatan rakyat mengalir dalam sistem negara.

Dalam BAB 3 telah ditegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Dalam perspektif sistem yang digunakan dalam buku ini, rakyat adalah *root owner* dari keseluruhan sistem ketatanegaraan. Jika demikian, pertanyaan yang harus selalu diajukan adalah melalui jalur apa kedaulatan rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan negara. Pertanyaan ini sangat penting karena kedaulatan tidak bekerja secara abstrak. Kedaulatan harus mengalir melalui tata kelembagaan tertentu agar dapat diwujudkan menjadi keputusan, kebijakan publik, dan tindakan pemerintahan.

Pada desain awal UUD NRI Tahun 1945, jalur tersebut relatif sederhana dan mudah dipahami. Rakyat ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Pelaksanaan kedaulatan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden memperoleh mandat dari MPR untuk menjalankan pemerintahan. Jika digambarkan dalam bentuk sederhana, alur tersebut dapat ditulis sebagai:

Rakyat → MPR → Presiden

Dalam struktur ini, MPR berfungsi sebagai simpul utama kedaulatan. Seluruh legitimasi pada tingkat nasional bermuara pada MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden tidak berdiri sebagai pusat legitimasi yang terpisah, melainkan sebagai pelaksana mandat yang berasal dari MPR. Karena itu istilah "mandataris MPR" memiliki makna arsitektural yang sangat penting dalam desain awal negara.

Setelah amandemen, struktur tersebut berubah secara fundamental. Kedaulatan rakyat secara normatif tetap dinyatakan berada di tangan rakyat. Namun jalur operasional yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan negara tidak lagi identik dengan desain awal. Dalam praktik pemerintahan modern Indonesia, akses menuju kekuasaan nasional tidak lagi melalui MPR sebagai pusat distribusi legitimasi, melainkan melalui mekanisme pemilihan yang sangat bergantung pada partai politik.

Jika dibaca secara sistemik, jalur baru tersebut dapat digambarkan sebagai:

Rakyat → Partai Politik → Kandidat → Pemerintah

Perubahan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengubah logika dasar sistem. Pada desain awal, rakyat berhubungan dengan negara melalui lembaga pelaksana kedaulatan yang ditempatkan sebagai titik pusat sistem. Setelah amandemen, partai politik menjadi gerbang utama yang menentukan siapa dapat memasuki arena kekuasaan nasional.

Dalam konteks pemilihan presiden, misalnya, seseorang tidak dapat begitu saja maju menjadi calon presiden berdasarkan dukungan rakyat secara langsung. Sistem mengharuskan adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, jalur menuju kepemimpinan nasional melewati mekanisme kepartaian terlebih dahulu. Hal yang sama juga terlihat dalam proses pembentukan parlemen. Sebagian besar

jalur representasi nasional juga bergerak melalui struktur partai politik.

Dalam perspektif teknologi, perubahan ini dapat dipahami sebagai perubahan pada *authority routing*. Pada desain awal, MPR berfungsi sebagai pusat distribusi legitimasi. Setelah amandemen, partai politik berfungsi sebagai *gateway* utama yang menghubungkan rakyat dengan banyak posisi strategis dalam sistem negara. Perubahan titik distribusi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai perubahan kecil karena memengaruhi seluruh pola interaksi antara rakyat dan kekuasaan.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan kritik terhadap keberadaan partai politik sebagai institusi demokrasi. Dalam banyak negara modern, partai politik memainkan peran penting dalam artikulasi kepentingan publik, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, dan proses representasi. Yang sedang dibahas bukan keberadaan partainya, melainkan posisi sistemiknya dalam jalur kedaulatan.

Dalam desain awal, MPR menjadi pusat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam desain pasca-amandemen, partai politik memperoleh posisi yang jauh lebih strategis dalam proses konversi kedaulatan menjadi kekuasaan. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan negara menjadi lebih panjang dan lebih kompleks. Kedaulatan rakyat tidak lagi bergerak melalui satu pusat legitimasi nasional, tetapi melalui berbagai mekanisme kompetisi yang dimediasi oleh partai.

Perubahan ini membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya adalah perubahan sumber legitimasi praktis para pemegang kekuasaan. Pada desain awal,

legitimasi presiden secara institusional berasal dari MPR. Setelah amandemen, legitimasi presiden lahir dari pemilihan langsung yang tetap memerlukan jalur kepartaian. Artinya, hubungan antara pemimpin nasional dan struktur partai menjadi bagian yang sangat penting dalam konfigurasi sistem.

Konsekuensi lain adalah meningkatnya peran kompetisi elektoral sebagai mekanisme utama distribusi kekuasaan. Dalam sistem sebelumnya, pusat gravitasi berada pada lembaga pelaksana kedaulatan. Dalam sistem baru, pusat gravitasi bergeser ke arena pemilihan dan proses kepartaian. Pergeseran ini mengubah perilaku sistem secara keseluruhan. Cara kandidat membangun dukungan berubah. Cara partai membangun kekuatan berubah. Cara rakyat berinteraksi dengan kekuasaan juga berubah.

Dalam BAB 7 telah dijelaskan bahwa perubahan *firmware* tidak selalu terlihat dari luar. Perangkat yang sama dapat menunjukkan perilaku berbeda karena instruksi dasarnya berubah. Analogi tersebut sangat relevan di sini. Republik Indonesia tetap memiliki wilayah yang sama, rakyat yang sama, bendera yang sama, dan dasar negara yang sama. Namun jalur kedaulatan yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan tidak lagi identik dengan desain awal.

Inilah alasan mengapa amandemen tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan pasal. Pergeseran jalur kedaulatan berarti perubahan terhadap cara sistem memperoleh legitimasi dan mendistribusikan kekuasaan. Dalam bahasa sistem, yang berubah bukan

hanya aturan operasional, tetapi routing architecture negara.

Pada titik ini, pembaca belum perlu menyimpulkan apakah perubahan tersebut lebih baik atau lebih buruk. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah fakta arsitekturalnya. Jika dahulu aliran legitimasi bergerak dari rakyat menuju MPR dan kemudian menuju pemerintah, maka setelah amandemen jalur tersebut mengalami konfigurasi baru yang menjadikan partai politik sebagai salah satu simpul terpenting dalam distribusi kekuasaan nasional.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengubah struktur kelembagaan, tetapi juga mengubah jalur kedaulatan. Jika pada desain awal kedaulatan rakyat mengalir melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan, maka dalam sistem pasca-amandemen kedaulatan bergerak melalui mekanisme yang sangat bergantung pada partai politik dan kompetisi elektoral. Pergeseran jalur inilah yang menjadi salah satu perubahan paling mendasar dalam *firmware* negara Indonesia.

8.5. MPR: Dari Lembaga Tertinggi Menjadi Lembaga Negara

Salah satu perubahan paling mendasar yang terjadi setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah perubahan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam arsitektur negara. Perubahan ini sering kali dipahami hanya sebagai perubahan nomenklatur atau penyesuaian kelembagaan biasa. Padahal jika

dilihat dari perspektif sistem yang digunakan dalam buku ini, perubahan tersebut menyentuh salah satu titik paling strategis dalam *firmware* negara, yaitu pusat distribusi legitimasi dan pelaksanaan kedaulatan.

Dalam desain awal Republik Indonesia, MPR menempati posisi yang sangat unik. MPR bukan sekadar lembaga negara di antara lembaga-lembaga lainnya. MPR dirancang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Posisi ini tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi yang sangat besar terhadap seluruh struktur negara.

Dalam kerangka sistem, MPR pada masa itu berfungsi sebagai pusat legitimasi nasional. Seluruh arsitektur kekuasaan negara berputar di sekitar posisi tersebut. Presiden memperoleh mandat dari MPR. Garis-Garis Besar Haluan Negara ditetapkan oleh MPR. Pertanggungjawaban presiden juga disampaikan kepada MPR. Dengan kata lain, MPR menjadi titik temu antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara.

Jika menggunakan analogi teknologi yang dibangun sejak awal buku ini, MPR dalam desain awal dapat dipahami sebagai central authority node dalam sistem ketatanegaraan. Seluruh jalur legitimasi utama melewati titik tersebut. Rakyat berada pada posisi sebagai pemilik sah negara, sementara MPR menjadi

organ yang menjalankan dan menerjemahkan kedaulatan tersebut ke dalam struktur pemerintahan.

Karena posisi tersebut, MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara. Istilah "tertinggi" sering disalahpahami sebagai simbol keistimewaan atau superioritas semata. Padahal dalam perspektif sistem, istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai penunjuk posisi arsitektural. MPR ditempatkan pada titik tertinggi bukan karena memiliki seluruh kekuasaan, melainkan karena menjadi pusat legitimasi yang menghubungkan rakyat dengan organ-organ negara lainnya.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, struktur tersebut berubah secara signifikan. MPR tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Rumusan Pasal 1 ayat (2) juga berubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Perubahan ini tampak sederhana secara redaksional, tetapi dampaknya sangat besar secara arsitektural.

Kedaulatan rakyat tidak lagi dipusatkan pada satu lembaga tertentu. Sebagai konsekuensinya, posisi MPR juga berubah. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan menjadi salah satu lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan yang baru. Perubahan ini bukan sekadar pengurangan status formal, melainkan perubahan fungsi sistemik.

Dalam desain pasca-amandemen, MPR tidak lagi memilih presiden secara rutin. MPR tidak lagi menjadi pemberi mandat pemerintahan sebagaimana sebelumnya. MPR juga tidak lagi menetapkan Garis-

Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan nasional. Banyak fungsi yang dahulu menjadikan MPR sebagai pusat gravitasi sistem berpindah atau dihapuskan dari struktur baru.

Perubahan ini menyebabkan terjadinya pergeseran besar dalam *authority routing* negara. Jika sebelumnya aliran legitimasi utama bergerak melalui MPR, maka setelah amandemen aliran tersebut tersebar ke berbagai mekanisme konstitusional yang berbeda. Presiden memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung. DPR memperoleh legitimasi melalui pemilu legislatif. Lembaga-lembaga lain memperoleh legitimasi berdasarkan fungsi konstitusional masing-masing. Dengan demikian, MPR tidak lagi menjadi simpul utama distribusi legitimasi nasional.

Dalam perspektif sistem, perubahan tersebut dapat dianalogikan sebagai perpindahan dari model arsitektur yang memiliki pusat koordinasi utama menuju model yang lebih tersebar. Dalam dunia teknologi, perubahan seperti ini dapat menghasilkan keuntungan tertentu, seperti pengurangan konsentrasi kekuasaan pada satu titik. Namun perubahan seperti itu juga dapat mengubah pola koordinasi sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, dampaknya tidak dapat dinilai hanya dari satu sisi.

Yang penting untuk dipahami adalah fakta bahwa posisi MPR setelah amandemen memang berbeda secara fundamental dibanding posisi MPR dalam desain awal UUD NRI Tahun 1945. Banyak orang masih menggunakan istilah-istilah lama dalam memahami MPR, padahal struktur yang

melatarbelakangi istilah tersebut telah berubah. Akibatnya, sering muncul kebingungan dalam membaca hubungan antara rakyat, MPR, dan pemerintahan.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Dalam desain awal, hubungan antara rakyat dan negara diterjemahkan melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, hubungan tersebut tidak lagi berjalan melalui mekanisme yang sama. Oleh karena itu, perubahan posisi MPR sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan jalur kedaulatan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Perubahan ini juga membawa implikasi terhadap cara negara merumuskan arah jangka panjang. Ketika GBHN tidak lagi menjadi instrumen utama dan MPR tidak lagi menjadi pusat perumusan haluan negara, orientasi pembangunan nasional menjadi lebih bergantung pada konfigurasi yang terbentuk melalui proses elektoral. Sebagian kalangan melihat hal ini sebagai bentuk penguatan demokrasi elektoral. Sebagian lainnya melihatnya sebagai hilangnya satu mekanisme koordinasi strategis nasional. Terlepas dari perdebatan tersebut, yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa arsitektur sistem memang telah berubah.

Dalam kerangka buku ini, perubahan posisi MPR harus dibaca sebagai bagian dari perubahan *firmware* negara. Bukan karena nama lembaganya berubah, melainkan karena fungsi sistemiknya berubah. Sebuah komponen dalam sistem dapat tetap menggunakan nama yang sama, tetapi memiliki peran yang berbeda

jika ditempatkan dalam arsitektur yang berbeda. Prinsip inilah yang terjadi pada MPR pasca-amandemen.

Pembahasan ini juga menjadi jembatan menuju pertanyaan berikutnya. Jika MPR tidak lagi menjadi pusat distribusi legitimasi seperti dalam desain awal, maka dari mana presiden memperoleh legitimasi dalam sistem baru. Bagaimana hubungan antara presiden dan rakyat dibentuk setelah perubahan tersebut. Pertanyaan inilah yang akan membawa pembahasan pada transformasi posisi presiden dalam arsitektur negara pasca-amandemen.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah posisi MPR dari lembaga tertinggi negara yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menjadi salah satu lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan yang baru. Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan status formal, melainkan perubahan fungsi sistemik yang memengaruhi jalur legitimasi, distribusi kewenangan, dan arsitektur kekuasaan nasional secara keseluruhan.

8.6. Presiden: Dari Mandataris Menjadi Pemegang Mandat Langsung

Perubahan posisi MPR setelah amandemen secara otomatis membawa konsekuensi terhadap posisi presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya berada dalam jalur legitimasi yang sama. Jika pada desain awal MPR berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemberi mandat

kepada presiden, maka ketika posisi MPR berubah, sumber legitimasi presiden juga ikut berubah. Dengan kata lain, perubahan pada satu simpul utama dalam sistem mengharuskan perubahan pada jalur distribusi kewenangan yang terhubung dengannya.

Dalam desain awal UUD NRI Tahun 1945, presiden menempati posisi yang sangat jelas secara arsitektural. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang memperoleh mandat dari MPR. Karena itu istilah yang digunakan selama bertahun-tahun adalah "Mandataris MPR". Istilah ini bukan sekadar sebutan administratif, melainkan menggambarkan hubungan konstitusional yang sangat penting. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.

Jika menggunakan analogi sistem yang telah dibangun sejak BAB 7, posisi presiden dalam desain awal dapat dipahami sebagai chief operator yang memperoleh otoritas operasional dari simpul legitimasi utama. Presiden memiliki kewenangan besar dalam menjalankan pemerintahan, tetapi sumber legitimasi tersebut tidak berdiri sendiri. Jalur legitimasinya bergerak dari rakyat kepada MPR, lalu dari MPR kepada presiden.

Dalam struktur seperti itu, hubungan antara presiden dan MPR memiliki karakter yang khas. MPR menetapkan haluan negara melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan haluan tersebut. Presiden juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR

sebagai pemberi mandat. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk adalah hubungan mandat, bukan hubungan dua lembaga yang memperoleh legitimasi dari jalur yang berbeda.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah konstruksi tersebut secara mendasar. Salah satu perubahan terbesar adalah diperkenalkannya mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini sering dianggap sebagai simbol utama reformasi Indonesia. Dari sudut pandang demokrasi elektoral, perubahan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin nasional.

Namun dalam perspektif sistem yang digunakan dalam buku ini, perubahan tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan metode pemilihan. Yang berubah bukan hanya cara memilih presiden, tetapi sumber legitimasi presiden itu sendiri. Jika sebelumnya legitimasi presiden mengalir melalui MPR, maka setelah amandemen legitimasi tersebut diperoleh secara langsung melalui mekanisme pemilihan nasional.

Perubahan ini menyebabkan terjadinya transformasi posisi presiden dalam arsitektur negara. Presiden tidak lagi berdiri sebagai mandataris MPR. Presiden memperoleh legitimasi melalui jalur yang berbeda dari MPR. Dengan demikian, hubungan antara presiden dan MPR juga berubah secara fundamental. Tidak lagi terdapat hubungan pemberi mandat dan penerima mandat sebagaimana dalam desain sebelumnya.

Dalam dunia teknologi, perubahan seperti ini dapat dianalogikan sebagai perubahan jalur autentikasi utama dalam sistem. Sebelumnya, otorisasi presiden melewati satu simpul pusat yang berfungsi sebagai distributor legitimasi. Setelah amandemen, jalur tersebut dialihkan sehingga presiden memperoleh otoritas melalui mekanisme yang berbeda. Akibatnya, struktur hubungan antar komponen sistem juga berubah.

Perubahan sumber legitimasi ini menghasilkan beberapa konsekuensi penting. Pertama, presiden memperoleh basis legitimasi yang lebih kuat secara langsung di hadapan rakyat. Presiden tidak lagi bergantung pada keputusan MPR untuk memperoleh mandat pemerintahan. Dalam konteks tertentu, hal ini meningkatkan stabilitas posisi presiden karena legitimasi berasal dari proses elektoral nasional yang melibatkan rakyat secara langsung.

Kedua, hubungan antara presiden dan MPR menjadi lebih setara secara kelembagaan dibanding sebelumnya. Karena keduanya tidak lagi berada dalam hubungan mandat, maka posisi konstitusional masing-masing berubah. MPR tidak lagi menjadi atasan konstitusional presiden sebagaimana dalam desain awal. Sebaliknya, keduanya menjadi bagian dari struktur negara yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang berbeda.

Ketiga, perubahan ini turut mengubah pola hubungan antara presiden dan partai politik. Walaupun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, proses pencalonannya tetap berkaitan erat dengan dukungan

partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, dalam praktik sistem pasca-amandemen terdapat dua sumber relasi yang sangat penting bagi presiden yaitu hubungan dengan pemilih dan hubungan dengan partai politik.

Di sinilah perubahan arsitektural mulai menunjukkan kompleksitasnya. Pada desain awal, jalur legitimasi relatif sederhana. Rakyat menyalurkan kedaulatan melalui MPR, kemudian MPR memberikan mandat kepada presiden. Dalam sistem baru, jalur tersebut menjadi lebih kompleks. Pemilihan langsung menghadirkan legitimasi elektoral yang kuat, tetapi akses menuju pencalonan tetap melibatkan struktur kepartaian. Karena itu hubungan antara rakyat, partai politik, dan presiden menjadi bagian yang sangat menentukan dalam sistem pasca-amandemen.

Dalam BAB 8.4 telah dibahas bahwa jalur kedaulatan mengalami pergeseran. Subbab ini memperlihatkan salah satu dampak paling nyata dari pergeseran tersebut. Ketika jalur legitimasi berubah, posisi presiden dalam keseluruhan arsitektur negara juga ikut berubah. Perubahan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknis pemilihan umum. Yang berubah adalah titik masuk utama kekuasaan eksekutif dalam sistem negara.

Penting pula dipahami bahwa perubahan ini tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang kualitas demokrasi atau kualitas pemerintahan. Sistem dapat memberikan legitimasi langsung kepada presiden, tetapi kualitas hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh banyak faktor lain, termasuk desain kepartaian, budaya

kekuasaan, biaya kampanye, kualitas representasi, dan mekanisme pengawasan. Karena itu buku ini tidak sedang membahas apakah pemilihan langsung lebih baik atau lebih buruk. Yang sedang dibahas adalah perubahan struktur *firmware* negara.

Dalam perspektif yang lebih luas, transformasi posisi presiden menunjukkan bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak sekadar menambah atau mengurangi kewenangan tertentu. Amandemen telah mengubah cara sistem menghasilkan legitimasi kekuasaan. Perubahan seperti ini selalu berdampak luas karena menyentuh salah satu fungsi paling mendasar dari *firmware* negara, yaitu distribusi otoritas.

Jika pada desain awal presiden memperoleh legitimasi melalui mandat yang berasal dari pelaksana kedaulatan rakyat, maka pada sistem pasca-amandemen presiden memperoleh legitimasi langsung melalui mekanisme elektoral nasional. Perubahan inilah yang menjelaskan mengapa hubungan antara presiden, rakyat, MPR, dan partai politik tidak lagi sama seperti pada masa sebelum amandemen.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah posisi presiden dari mandataris MPR menjadi pemegang mandat langsung melalui mekanisme pemilihan nasional. Perubahan tersebut bukan sekadar perubahan cara pemilihan, melainkan perubahan sumber legitimasi yang memengaruhi hubungan antara presiden, rakyat, partai politik, dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam keseluruhan arsitektur ketatanegaraan Indonesia.

8.7. Partai Politik sebagai *Gateway* Sistem

Salah satu perubahan paling penting yang muncul setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah meningkatnya posisi strategis partai politik dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini sering kali tidak disadari karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada pemilihan umum, pergantian presiden, atau dinamika parlemen. Padahal jika dilihat dari perspektif sistem, posisi partai politik setelah amandemen mengalami transformasi yang sangat signifikan. Partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana partisipasi kekuasaan, tetapi menjadi salah satu gerbang utama yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan negara.

Dalam teori demokrasi modern, keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang wajar. Partai politik berfungsi mengorganisasi aspirasi, melakukan kaderisasi kepemimpinan, membangun pendidikan politik, serta menyediakan mekanisme kompetisi dalam proses pemerintahan. Hampir seluruh negara demokrasi modern memiliki sistem kepartaian dalam bentuk tertentu. Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini bukan kritik terhadap keberadaan partai politik sebagai institusi demokrasi, melainkan pembacaan terhadap posisi sistemiknya dalam struktur negara pasca-amandemen.

Dalam BAB 8.4 telah dijelaskan bahwa jalur kedaulatan mengalami pergeseran. Jika pada desain awal aliran legitimasi bergerak melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka dalam sistem pasca-

amandemen jalur tersebut menjadi lebih bergantung pada mekanisme elektoral yang dimediasi oleh partai politik. Di sinilah posisi partai berubah dari salah satu komponen sistem menjadi salah satu gerbang utama sistem.

Dalam dunia teknologi, terdapat konsep yang dikenal sebagai *gateway*. *Gateway* adalah titik masuk yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Semua lalu lintas yang ingin melewati batas tertentu harus melalui gerbang tersebut. Sistem dapat memiliki banyak pengguna, tetapi akses menuju area tertentu hanya dapat dilakukan melalui *gateway* yang telah ditentukan. Analogi ini sangat membantu untuk memahami posisi partai politik dalam konfigurasi ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen.

Untuk menjadi anggota DPR, jalur utama yang tersedia adalah melalui partai politik. Untuk menjadi anggota DPRD, jalur yang tersedia juga melalui partai politik. Untuk menjadi calon presiden, dukungan partai politik atau gabungan partai politik menjadi syarat yang sangat menentukan. Bahkan dalam banyak proses strategis, partai politik berfungsi sebagai pintu awal yang menentukan siapa dapat masuk ke arena kompetisi kekuasaan dan siapa yang tidak.

Jika dilihat dari perspektif sistem, posisi ini sangat berbeda dibanding desain awal yang menempatkan MPR sebagai simpul utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam konfigurasi baru, partai politik menjadi salah satu titik penyaringan utama dalam proses distribusi kekuasaan. Sebelum seorang kandidat berhadapan dengan rakyat dalam pemilihan

umum, kandidat tersebut umumnya harus terlebih dahulu melewati proses seleksi dalam lingkungan partai.

Dengan kata lain, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan pencalonan, tetapi juga sebagai mekanisme penyaringan dalam sistem. Dalam dunia digital, sebelum seseorang memperoleh akses terhadap sistem tertentu, identitasnya harus terlebih dahulu diverifikasi melalui proses autentikasi. Dalam konteks kenegaraan, partai politik menjalankan fungsi serupa dengan menjadi salah satu mekanisme yang menentukan siapa yang dapat memasuki ruang kompetisi kekuasaan secara formal.

Penting dipahami bahwa posisi seperti ini memiliki dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, partai politik dapat berfungsi sebagai instrumen penyaringan yang sehat. Melalui proses kaderisasi, pendidikan politik, dan pengembangan kepemimpinan, partai dapat membantu menghasilkan calon-calon pemimpin yang memiliki pengalaman organisasi, pemahaman politik, dan kemampuan manajerial yang memadai. Dalam kondisi ideal, partai politik berfungsi sebagai sekolah kepemimpinan bagi negara.

Namun pada sisi lain, posisi yang terlalu sentral juga dapat menciptakan ketergantungan sistem yang tinggi terhadap kualitas partai politik itu sendiri. Jika partai politik menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik, sistem memperoleh manfaat. Sebaliknya, jika partai politik lebih berorientasi pada transaksi kekuasaan, kepentingan kelompok tertentu, atau kepentingan jangka pendek, maka kualitas sistem

secara keseluruhan juga ikut terdampak. Sebab gerbang yang menentukan siapa boleh masuk ke arena kekuasaan akan sangat memengaruhi kualitas hasil akhirnya.

Dalam BAB 7.4 telah dibahas mengenai *permission structure*. Salah satu prinsip penting dalam desain sistem adalah bahwa siapa yang mengendalikan akses sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku sistem secara keseluruhan. Dalam konteks negara, partai politik tidak selalu memegang kekuasaan pemerintahan secara langsung, tetapi posisi sebagai pengendali akses menuju banyak jabatan strategis membuat pengaruhnya menjadi sangat signifikan.

Akibatnya, hubungan antara rakyat dan negara menjadi lebih kompleks dibanding desain awal. Dalam konfigurasi awal, rakyat menyalurkan kedaulatan melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam konfigurasi baru, rakyat berinteraksi dengan sistem melalui berbagai jalur yang sebagian besar dimediasi oleh partai politik. Oleh karena itu, kualitas hubungan antara rakyat dan negara semakin dipengaruhi oleh kualitas sistem kepartaian.

Dalam perspektif sistem, perubahan ini juga menjelaskan mengapa dinamika internal partai politik sering memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Persoalan yang terjadi dalam tubuh partai tidak hanya memengaruhi organisasi tersebut, tetapi dapat berdampak pada kualitas representasi, kualitas kandidat, dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena

partai telah menjadi salah satu simpul penting dalam *authority routing* negara.

Dalam konteks Indonesia sebagai *multi-civilizational platform* sebagaimana telah dibahas dalam BAB 5, posisi strategis partai politik menghadirkan tantangan tersendiri. Sistem kepartaian dituntut mampu menjadi jembatan antara keragaman masyarakat dan kebutuhan pengelolaan negara modern. Jika fungsi tersebut berjalan dengan baik, partai politik dapat menjadi instrumen integrasi nasional yang efektif. Namun jika fungsi tersebut melemah, partai dapat berubah menjadi sekadar kendaraan elektoral yang kehilangan hubungan substantif dengan rakyat.

Penting juga dipahami bahwa peningkatan peran partai politik bukan sekadar akibat perilaku praktis, tetapi merupakan konsekuensi dari perubahan desain *firmware* negara. Ketika jalur legitimasi diubah, ketika pemilihan langsung diperkenalkan, ketika distribusi kekuasaan bergerak melalui mekanisme elektoral, maka posisi partai politik secara otomatis menjadi lebih strategis dalam keseluruhan sistem.

Dalam kerangka buku ini, pembahasan mengenai partai politik tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau memuji institusi tertentu. Yang sedang dilakukan adalah membaca perubahan arsitektur negara secara objektif. Sebagaimana sebuah *gateway* dalam sistem digital dapat menjadi jalur yang memperlancar komunikasi atau justru menjadi titik kemacetan, posisi partai politik dalam negara sangat

bergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang dan dijalankan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, partai politik memperoleh posisi yang jauh lebih strategis dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai organisasi, tetapi juga sebagai *gateway* system yang menjadi salah satu jalur utama akses menuju kekuasaan negara. Akibatnya, kualitas hubungan antara rakyat dan negara semakin dipengaruhi oleh kualitas sistem kepartaian yang menghubungkan keduanya.

8.8. Konsekuensi *Firmware* Baru

Setiap perubahan pada *firmware* akan menghasilkan perubahan perilaku sistem. Prinsip ini berlaku dalam dunia teknologi maupun dalam kehidupan bernegara. Ketika instruksi dasar sebuah sistem diubah, yang berubah bukan hanya struktur internalnya, tetapi juga cara sistem merespons lingkungan, mendistribusikan fungsi, dan menghasilkan keluaran. Oleh karena itu, setelah memahami berbagai perubahan arsitektural yang terjadi melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting yaitu konsekuensi apa yang muncul dari *firmware* baru tersebut.

Pertanyaan ini perlu dijawab secara hati-hati. Pembahasan dalam subbab ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh perubahan pasca-amandemen adalah kesalahan atau seluruh perubahan

tersebut merupakan keberhasilan. Sebuah sistem yang baru selalu membawa keuntungan sekaligus risiko. Dalam dunia teknologi, pembaruan *firmware* dapat memperbaiki kelemahan tertentu, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan persoalan baru yang sebelumnya tidak ada. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah membaca konsekuensi sistemiknya secara objektif.

Salah satu konsekuensi paling nyata dari *firmware* baru adalah menguatnya legitimasi elektoral. Dalam desain awal, legitimasi presiden diperoleh melalui mandat yang diberikan oleh MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, legitimasi tersebut diperoleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan ini menciptakan hubungan yang berbeda antara pemimpin nasional dan masyarakat.

Bagi banyak kalangan, perubahan tersebut dipandang sebagai kemajuan demokrasi karena rakyat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menentukan pemimpin nasional secara langsung. Presiden tidak lagi dipilih melalui mekanisme perwakilan di MPR, melainkan melalui kompetisi nasional yang melibatkan suara rakyat secara langsung. Dari perspektif demokrasi elektoral, perubahan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan.

Namun, setiap perubahan selalu membawa konsekuensi lanjutan. Ketika jalur legitimasi bergeser ke arena pemilihan langsung, pola persaingan dalam memperoleh dukungan masyarakat pun ikut berubah. Dalam desain sebelumnya, perhatian utama berada

pada proses perwakilan dalam MPR. Dalam sistem baru, perhatian lebih besar tertuju pada pemilihan umum secara langsung. Akibatnya, keberhasilan memperoleh dukungan masyarakat menjadi semakin menentukan.

Perubahan ini melahirkan persoalan berupa meningkatnya biaya pencalonan dan penyelenggaraan kampanye. Kampanye berskala nasional membutuhkan sumber daya yang besar. Mobilisasi dukungan memerlukan organisasi yang luas. Penyampaian gagasan kepada masyarakat membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat. Semakin luas ruang persaingan, semakin besar pula sumber daya yang harus dikelola. Dalam konteks inilah partai politik memperoleh posisi yang semakin strategis sebagai penghubung antara calon dan arena persaingan nasional.

Konsekuensi berikutnya adalah menguatnya peran pencitraan dalam memperoleh dukungan masyarakat. Dalam sistem yang sangat bergantung pada persaingan elektoral, kemampuan membangun persepsi publik menjadi salah satu faktor yang menentukan. Program tetap penting. Gagasan tetap penting. Namun, kemampuan menyampaikan dan mengemas pesan kepada masyarakat sering kali memperoleh perhatian yang sama besar, bahkan dalam beberapa keadaan lebih besar daripada substansi kebijakan yang ditawarkan.

Dalam dunia teknologi, sistem yang terlalu berorientasi pada antarmuka kadang mengabaikan kualitas arsitektur internal. Tampilan menjadi semakin menarik, tetapi fondasi sistem belum tentu semakin

kuat. Analogi ini dapat membantu memahami salah satu tantangan demokrasi elektoral modern. Perhatian publik dapat terserap pada figur, slogan, dan simbol, sementara pembahasan mengenai desain sistem, struktur kekuasaan, dan arah jangka panjang negara menjadi semakin terbatas.

Konsekuensi lain yang sering dibahas adalah munculnya kecenderungan oligarkis dalam sistem pemerintahan. Istilah oligarki dalam konteks ini tidak selalu merujuk pada kelompok tertentu, melainkan pada fenomena ketika akses terhadap kekuasaan semakin dipengaruhi oleh kemampuan mengendalikan sumber daya strategis. Dalam sistem yang membutuhkan biaya pencalonan dan kampanye yang tinggi, pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, organisasi, media, maupun jaringan pendukung cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan masyarakat biasa.

Dalam BAB 8.7 telah dijelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai *gateway* system. Ketika gerbang akses menuju kekuasaan menjadi sangat penting, maka siapa yang mengendalikan gerbang tersebut juga memperoleh pengaruh yang besar terhadap arah sistem. Kondisi ini tidak otomatis salah, tetapi menciptakan tantangan baru yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menjauhkan sistem dari prinsip kedaulatan rakyat.

Konsekuensi lainnya adalah meningkatnya orientasi jangka pendek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum yang berlangsung secara berkala mendorong perhatian besar terhadap

siklus pemilihan. Dalam kondisi tertentu, kebijakan yang menghasilkan dampak cepat lebih mudah memperoleh dukungan dibandingkan kebijakan strategis yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Akibatnya, negara menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam desain awal, keberadaan GBHN memberikan satu bentuk mekanisme koordinasi strategis nasional. Setelah amandemen, mekanisme tersebut berubah. Sebagian kalangan menilai perubahan ini memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintahan terpilih. Sebagian lainnya melihat munculnya risiko fragmentasi arah pembangunan. Terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas adalah bahwa *firmware* baru menghasilkan pola koordinasi yang berbeda dibanding sebelumnya.

Di sisi lain, perubahan baru juga mendorong meningkatnya akuntabilitas elektoral. Pemimpin negara harus berhadapan langsung dengan pemilih. Kinerja pemerintahan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan peluang untuk memperoleh mandat pada periode berikutnya. Dalam teori demokrasi, mekanisme ini diharapkan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, sistem baru tidak hanya membawa risiko, tetapi juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan responsivitas penyelenggaraan negara terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia sebagai *multi-civilizational platform*, seluruh konsekuensi tersebut menjadi semakin kompleks. Negara yang sangat besar, sangat beragam, dan memiliki tantangan pembangunan yang luas membutuhkan keseimbangan antara legitimasi demokratis, efektivitas pemerintahan, stabilitas nasional, dan keterwakilan rakyat. Perubahan *firmware* pasca-amandemen memengaruhi cara seluruh elemen tersebut berinteraksi.

Karena itu, konsekuensi yang muncul tidak dapat dibaca secara hitam-putih. Tidak cukup mengatakan bahwa sistem lama sepenuhnya benar atau sistem baru sepenuhnya salah. Yang lebih penting adalah memahami bahwa perubahan arsitektur selalu menghasilkan perubahan perilaku sistem. Ketika jalur legitimasi berubah, perilaku aktor berubah. Ketika distribusi kewenangan berubah, hubungan antar lembaga berubah. Ketika gerbang akses terhadap kekuasaan berubah, pola persaingan dalam memperoleh dan menjalankan kekuasaan juga ikut berubah.

Dalam perspektif buku ini, poin terpenting bukan terletak pada penilaian emosional terhadap amandemen, melainkan pada kesadaran bahwa perubahan *firmware* menghasilkan konsekuensi yang nyata. Negara yang menggunakan *firmware* baru akan menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan negara yang menggunakan *firmware* sebelumnya, meskipun nama negara, wilayah, rakyat, dan simbol-simbol kenegaraan tetap sama.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *firmware* baru pasca-amandemen menghasilkan konsekuensi sistemik yang luas. Legitimasi elektoral menguat, peran partai politik meningkat, biaya pencalonan dan kampanye bertambah besar, persaingan dalam memperoleh dukungan masyarakat semakin intensif, dan pola hubungan antara rakyat, kekuasaan, serta lembaga negara mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan *firmware* tidak hanya mengubah struktur negara, tetapi juga mengubah perilaku sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan.

8.9. Apakah *Firmware* Baru Sesuai dengan Kernel (inti sistem) Pancasila?

Sampai pada titik ini, pembahasan telah menunjukkan bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengubah pasal-pasal tertentu, tetapi juga mengubah arsitektur dasar negara. Jalur kedaulatan mengalami pergeseran. Posisi MPR berubah. Presiden memperoleh sumber legitimasi yang berbeda. Partai politik menempati posisi yang semakin strategis dalam distribusi kekuasaan. Seluruh perubahan tersebut membentuk *firmware* baru yang menghasilkan perilaku sistem yang berbeda dibanding desain awal Republik Indonesia.

Namun muncul satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar apakah perubahan tersebut berhasil atau tidak. Pertanyaan tersebut adalah apakah *firmware* baru ini tetap kompatibel dengan kernel (inti

sistem) *consciousness* bangsa yang telah dibahas dalam BAB 6. Dengan kata lain, apakah desain ketatanegaraan pasca-amandemen masih bergerak selaras dengan Pancasila sebagai inti filosofis bangsa, atau justru mulai menjauh dari orientasi dasarnya.

Pertanyaan ini sangat penting karena dalam arsitektur sistem, kualitas sebuah *firmware* tidak hanya ditentukan oleh efisiensi operasional. Sebuah sistem dapat berjalan cepat, modern, dan terlihat demokratis, tetapi tetap mengalami masalah jika tidak kompatibel dengan kernel (inti sistem) yang menjadi sumber orientasinya. Dalam dunia teknologi, ketidakcocokan antara *firmware* dan kernel (inti sistem) sering menghasilkan gangguan yang tidak selalu terlihat di awal. Sistem tampak berjalan normal, tetapi perlahan muncul konflik internal, ketidakstabilan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan awal perancangannya.

Dalam konteks Indonesia, kernel (inti sistem) tersebut adalah Pancasila. Sebagaimana telah dibahas dalam BAB 6, Pancasila bukan sekadar slogan semata atau simbol administratif negara. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai peradaban Nusantara. Pancasila merupakan kernel (inti sistem) *consciousness* yang memuat orientasi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Karena itu, setiap desain ketatanegaraan seharusnya dapat diuji berdasarkan kompatibilitasnya terhadap lima orientasi dasar tersebut.

Pertama, pertanyaan tentang Kerakyatan. Sila keempat berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah *firmware* baru semakin mendekatkan rakyat kepada pusat pengambilan keputusan, atau justru menciptakan lapisan-lapisan baru yang membuat hubungan tersebut semakin jauh. Pemilihan langsung memang memberi ruang partisipasi yang lebih besar dalam memilih pemimpin. Namun pada saat yang sama, sistem juga menghadirkan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap partai politik sebagai gerbang utama akses kekuasaan. Di sinilah muncul ruang refleksi yaitu apakah partisipasi elektoral identik dengan kedaulatan substantif, atau keduanya merupakan hal yang berbeda.

Kedua, pertanyaan tentang Keadilan Sosial. Sila kelima tidak berbicara semata tentang prosedur, melainkan tentang hasil kehidupan bersama yang adil bagi seluruh rakyat. Jika sistem pemerintahan menghasilkan kompetisi yang semakin mahal, ketergantungan pada sumber daya yang besar, serta kesenjangan akses terhadap ruang kekuasaan, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana keadilan sosial diterjemahkan dalam praktik kekuasaan. Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan kebutuhan untuk menguji apakah mekanisme yang ada benar-benar menghasilkan distribusi kesempatan yang sehat.

Ketiga, pertanyaan tentang Persatuan Indonesia. Salah satu tujuan utama negara adalah menjaga integrasi bangsa yang sangat beragam. Dalam BAB 5 telah dijelaskan bahwa Indonesia adalah *multi-civilizational platform* yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan tradisi. Dalam sistem yang sangat kompetitif, selalu terdapat risiko meningkatnya

polarisasi sosial. Oleh karena itu, pertanyaan penting yang harus diajukan adalah apakah *firmware* baru memperkuat integrasi nasional atau justru menciptakan insentif yang mendorong fragmentasi demi kepentingan elektoral jangka pendek.

Keempat, pertanyaan tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab. Politik pada akhirnya bukan sekadar soal menang dan kalah, melainkan tentang bagaimana manusia diperlakukan dalam kehidupan bernegara. Sistem yang terlalu berorientasi pada kompetisi dapat mendorong lahirnya praktik-praktik yang lebih menekankan kemenangan daripada adab. Ketika ruang publik dipenuhi konflik yang terus-menerus, masyarakat dapat kehilangan orientasi terhadap nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bersama. Karena itu, desain sistem perlu diuji berdasarkan kemampuannya menjaga martabat manusia, bukan hanya berdasarkan kemampuannya menghasilkan pemenang.

Kelima, pertanyaan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pembahasan BAB 6 telah dijelaskan bahwa sila pertama bukan sekadar pengakuan formal terhadap keberadaan Tuhan, tetapi pengakuan bahwa kehidupan bersama harus memiliki fondasi moral. Pertanyaan yang relevan dalam konteks ini adalah apakah sistem pemerintahan mendorong lahirnya tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan, atau justru menciptakan insentif yang lebih besar bagi pragmatisme. Sebab sistem yang sehat tidak hanya menghasilkan kekuasaan yang sah secara prosedural, tetapi juga kekuasaan yang memiliki orientasi moral.

Pada titik ini, penting untuk menegaskan bahwa buku ini belum sedang memberikan vonis.

Subbab ini bukan ruang untuk menyimpulkan bahwa *firmware* baru sepenuhnya sesuai atau sepenuhnya bertentangan dengan Pancasila. Yang sedang dilakukan adalah mengajukan kerangka evaluasi. Sebelum suatu sistem dinilai berhasil atau gagal, sistem tersebut harus diuji terhadap tujuan yang hendak dicapainya.

Dalam dunia teknologi, pengujian kompatibilitas merupakan prosedur yang sangat penting. Sebuah *firmware* dapat bekerja dengan baik secara teknis, tetapi tetap dianggap bermasalah jika tidak kompatibel dengan kernel (inti sistem) atau perangkat yang digunakan. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan dapat berjalan secara prosedural, pemilu dapat berlangsung secara berkala, lembaga-lembaga dapat terus berfungsi, tetapi pertanyaan tentang kompatibilitas filosofis tetap harus diajukan.

Di sinilah pembahasan mulai bergerak menuju inti tesis buku ini. Jika negara adalah sistem, jika Pancasila adalah kernel (inti sistem) *consciousness*, dan jika UUD adalah *firmware*, maka ukuran utama keberhasilan negara bukan sekadar stabilitas kekuasaan atau rutinitas elektoral. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana desain negara tetap setia pada orientasi nilai yang menjadi dasar keberadaannya.

Dengan demikian, subbab ini sengaja tidak memberikan jawaban final. Sebaliknya, subbab ini mengajak pembaca memasuki tahap refleksi yang lebih

dalam. Apakah *firmware* pasca-amandemen benar-benar memperkuat Kerakyatan, Keadilan Sosial, Persatuan, Kemanusiaan, dan Ketuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila? Ataukah terdapat bagian-bagian tertentu yang justru menciptakan jarak antara sistem negara dan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa?

Karena itu tesis subbab ini dapat ditegaskan sebagai sebuah pertanyaan strategis yang harus terus dijawab oleh bangsa Indonesia yaitu *firmware* negara yang lahir pasca-amandemen harus selalu diuji kompatibilitasnya terhadap Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Sebab sistem yang kehilangan keselarasan dengan inti filosofisnya mungkin tetap berjalan, tetapi berisiko bergerak menjauh dari tujuan dasar yang melahirkan negara itu sendiri.

8.10. Negara yang Sama, Sistem yang Berbeda

Pada pandangan pertama, Indonesia setelah amandemen tampak sebagai negara yang sama dengan Indonesia sebelum amandemen. Nama negaranya tetap Republik Indonesia. Benderanya tetap Merah Putih. Lagu kebangsaannya tetap Indonesia Raya. Dasar negaranya tetap Pancasila. Wilayahnya tetap membentang dari Sabang sampai Merauke. Rakyatnya tetap rakyat Indonesia. Dari luar, hampir tidak ada perubahan identitas yang tampak secara dramatis. Karena itu banyak orang beranggapan bahwa yang terjadi setelah amandemen hanyalah penyempurnaan aturan dalam negara yang sama.

Namun pembahasan sepanjang BAB 8 menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Dalam perspektif sistem, identitas yang sama tidak selalu berarti sistem yang sama. Sebuah perangkat dapat tetap menggunakan nama yang sama, bentuk fisik yang sama, bahkan fungsi umum yang sama, tetapi menunjukkan perilaku yang berbeda ketika *firmware*-nya berubah. Perubahan pada lapisan dasar sering kali tidak langsung terlihat oleh pengguna biasa, tetapi dampaknya terasa dalam cara sistem bekerja sehari-hari.

Analogi ini sangat membantu untuk memahami Indonesia pasca-amandemen. Bangsa Indonesia tetap sama. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Konstitusi tetap disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, jalur legitimasi berubah. Distribusi kewenangan berubah. Posisi lembaga-lembaga negara berubah. Hubungan antara rakyat dan kekuasaan berubah. Dengan kata lain, arsitektur operasional negara mengalami transformasi.

Dalam BAB 8.2 telah dijelaskan bahwa desain awal UUD NRI Tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan presiden sebagai mandataris MPR. Dalam BAB 8.3 hingga BAB 8.8 telah diperlihatkan bahwa amandemen mengubah banyak bagian dari arsitektur tersebut. Jalur kedaulatan bergeser. Posisi MPR berubah. Presiden memperoleh legitimasi langsung. Partai politik menjadi salah satu gerbang utama akses kekuasaan. Seluruh perubahan

tersebut membentuk pola operasional yang berbeda dibanding desain awal.

Jika digambarkan dalam bahasa sistem, negara yang digunakan saat ini masih menggunakan perangkat keras yang sama. Bangsa Indonesia tetap menjadi fondasi sosialnya. Wilayah Indonesia tetap menjadi ruang hidupnya. Pancasila tetap menjadi kernel (inti sistem) *consciousness*-nya. Namun *firmware* yang menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam struktur kekuasaan telah mengalami perubahan. Karena itu perilaku sistem yang muncul juga berbeda.

Perbedaan ini penting dipahami karena banyak perdebatan mengenai kehidupan bernegara sering terjebak pada persoalan personal. Ketika muncul masalah dalam negara, perhatian segera diarahkan kepada presiden, menteri, partai politik, pejabat, atau kelompok tertentu. Tentu aktor memiliki pengaruh terhadap jalannya sistem. Namun pembahasan dalam buku ini berusaha menunjukkan bahwa sebagian persoalan mungkin tidak sepenuhnya berasal dari aktor. Sebagian persoalan dapat berasal dari desain sistem yang menghasilkan perilaku tertentu secara berulang.

Dalam dunia teknologi terdapat prinsip sederhana yaitu sistem dirancang untuk menghasilkan perilaku tertentu. Jika sebuah sistem terus menghasilkan keluaran yang sama meskipun operator berganti-ganti, maka perhatian perlu diarahkan kepada desain sistemnya. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Jika pola tertentu terus muncul lintas pemerintahan, lintas partai, dan lintas periode,

maka kemungkinan besar terdapat faktor struktural yang bekerja di baliknya.

Karena itu, memahami perubahan *firmware* negara menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat cenderung menganggap seluruh persoalan negara sebagai akibat dari individu tertentu. Akibatnya, solusi yang ditawarkan pun terbatas pada pergantian aktor. Padahal jika akar persoalan berada pada arsitektur sistem, pergantian aktor mungkin hanya mengubah wajah, sementara pola dasarnya tetap bertahan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara negara dan sistem negara. Negara adalah entitas yang lebih besar daripada pemerintah. Negara juga lebih besar daripada satu periode tertentu. Negara adalah wadah kehidupan bersama yang dibangun di atas bangsa, wilayah, nilai, hukum, dan institusi. Sistem negara adalah cara seluruh unsur tersebut diorganisasikan. Dua negara dapat memiliki identitas yang sama tetapi bekerja dengan sistem yang berbeda. Bahkan satu negara yang sama dapat menunjukkan perilaku yang sangat berbeda ketika sistemnya berubah.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran ini memiliki arti yang sangat besar. Banyak warga negara tumbuh dengan asumsi bahwa sistem yang berlaku saat ini adalah kelanjutan langsung dari sistem yang dirancang para pendiri bangsa. Pada tingkat tertentu asumsi tersebut benar karena identitas negara tetap dipertahankan. Namun pada tingkat arsitektural, pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa telah

terjadi perubahan yang signifikan terhadap cara negara beroperasi.

Penting juga dipahami bahwa perubahan sistem tidak otomatis berarti pengkhianatan terhadap bangsa. Sejarah banyak negara menunjukkan bahwa perubahan konstitusi adalah bagian dari dinamika kekuasaan yang wajar. Yang menjadi persoalan bukan keberadaan perubahan itu sendiri, melainkan apakah perubahan tersebut tetap kompatibel dengan tujuan dasar negara. Karena itu, fokus utama buku ini bukan nostalgia terhadap masa lalu, melainkan upaya memahami hubungan antara desain sistem dan kualitas kehidupan berbangsa.

Dalam BAB 6 telah ditegaskan bahwa Pancasila adalah sari pati peradaban Nusantara dan kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Dalam BAB 7 dijelaskan bahwa konstitusi adalah *firmware* negara. Dalam BAB 8 diperlihatkan bahwa *firmware* tersebut telah mengalami perubahan melalui amandemen. Rangkaian pembahasan ini membawa pembaca pada satu kesadaran penting yaitu untuk memahami kondisi Indonesia hari ini, tidak cukup hanya melihat siapa yang berkuasa. Yang harus dipahami adalah bagaimana sistem itu dirancang.

Kesadaran tersebut menjadi fondasi untuk memasuki pembahasan yang lebih kritis pada bab-bab berikutnya. Setelah mengetahui bahwa negara yang sama dapat bekerja dengan sistem yang berbeda, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih tajam. Apakah *firmware* yang berlaku saat ini benar-benar kompatibel dengan Pancasila sebagai kernel (inti

sistem) *consciousness* bangsa? Apakah jalur kedaulatan yang ada masih mencerminkan prinsip bahwa rakyat adalah pemilik sah negara? Apakah desain ketatanegaraan saat ini menghasilkan perilaku yang sesuai dengan tujuan nasional yang dicita-citakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak lagi sekadar pertanyaan hukum. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang desain negara itu sendiri.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu Indonesia pasca-amandemen tetap merupakan negara yang sama secara identitas, tetapi bekerja dengan sistem yang berbeda secara arsitektural. Bangsa, wilayah, dan dasar negara tetap sama, namun *firmware* yang mengatur distribusi legitimasi, jalur kedaulatan, hubungan antar lembaga, dan mekanisme kekuasaan telah berubah. Memahami perubahan tersebut adalah langkah pertama untuk memahami mengapa negara menghasilkan perilaku yang berbeda dibanding desain awal yang dibangun pada saat republik ini lahir.

BAB 9
KEDAULATAN PARTAI POLITIK

9.1. Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi

Pembahasan mengenai kedaulatan partai politik tidak dapat dimulai dari partai politik itu sendiri. Pembahasan harus dimulai dari prinsip yang lebih mendasar, yaitu kedaulatan rakyat. Sebab seluruh bangunan ketatanegaraan Indonesia secara normatif berdiri di atas satu premis utama bahwa rakyat adalah pemilik negara. Tanpa memahami posisi rakyat dalam struktur konstitusi, mustahil memahami apakah sebuah sistem masih bergerak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat atau justru telah bergeser menuju bentuk kedaulatan yang lain.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan bahwa rakyat adalah *root owner* dalam sistem negara. Analogi tersebut bukan sekadar permainan istilah teknologi, melainkan cara untuk menjelaskan hubungan antara rakyat dan negara secara lebih konkret. Dalam sebuah sistem digital, *root owner* adalah pemilik sah yang memiliki hak tertinggi atas sistem. Seluruh hak akses, kewenangan, dan fungsi operasional pada akhirnya bersumber dari pemilik tersebut. Demikian pula dalam negara. Seluruh lembaga negara memperoleh legitimasi karena rakyat memberikan legitimasi tersebut. Seluruh kewenangan pemerintahan memperoleh dasar keberadaannya karena rakyat mengizinkannya melalui mekanisme konstitusional.

Prinsip tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalimat ini sangat singkat, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Konstitusi tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan presiden. Tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan partai politik. Tidak menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan parlemen. Tidak pula menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan kelompok *elite* tertentu. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dalam ilmu ketatanegaraan, konsep ini dikenal sebagai popular sovereignty atau kedaulatan rakyat. Konsep tersebut lahir dari gagasan bahwa negara pada hakikatnya dibentuk untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Pemerintah tidak menciptakan rakyat. Negara tidak menciptakan rakyat. Justru rakyatlah yang melahirkan negara sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, secara filosofis maupun konstitusional, rakyat selalu berada pada posisi yang lebih tinggi daripada seluruh organ negara yang dibentuk atas namanya.

Pandangan ini sangat selaras dengan pembahasan dalam BAB 1 mengenai perbedaan antara bangsa dan negara. Bangsa lahir lebih dahulu daripada negara. Bangsa merupakan komunitas manusia yang memiliki memori bersama, identitas bersama, pengalaman sejarah bersama, dan cita-cita bersama. Negara hadir kemudian sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mengelola kehidupan bangsa tersebut. Karena negara merupakan alat, maka

kepemilikan tertinggi tetap berada pada bangsa dan rakyat yang membentuknya.

Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat juga memiliki akar yang sangat kuat dalam tradisi Nusantara. Sebelum istilah demokrasi modern dikenal luas, berbagai komunitas Nusantara telah mengenal praktik musyawarah, permufakatan, rembug desa, rapat adat, dan berbagai bentuk pengambilan keputusan kolektif lainnya. Bentuknya mungkin berbeda-beda antara Minangkabau, Jawa, Bugis, Bali, Dayak, Maluku, maupun Papua, tetapi terdapat satu benang merah yang sama, yaitu keputusan penting tidak sepenuhnya ditentukan oleh kehendak satu orang. Selalu terdapat ruang bagi keterlibatan komunitas.

Karena itu, ketika para pendiri bangsa merumuskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip konstitusional, sesungguhnya yang sedang dilakukan bukan sekadar mengadopsi teori Barat. Yang dilakukan adalah menerjemahkan pengalaman panjang peradaban Nusantara ke dalam bahasa ketatanegaraan modern. Dalam BAB 6 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai peradaban Nusantara. Salah satu kristalisasi tersebut tampak pada sila keempat yang berbicara mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian, kedaulatan rakyat bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga prinsip peradaban.

Namun pada titik ini muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika rakyat adalah pemilik kedaulatan, bagaimana kedaulatan tersebut dijalankan dalam

praktik. Pertanyaan ini menjadi penting karena rakyat yang berjumlah ratusan juta orang tidak mungkin menjalankan seluruh fungsi negara secara langsung setiap hari. Negara modern membutuhkan mekanisme representasi, delegasi kewenangan, dan pembagian tugas. Karena itu, kedaulatan rakyat dalam praktik selalu diterjemahkan melalui struktur tertentu.

Di sinilah perbedaan antara kedaulatan normatif dan kedaulatan operasional mulai terlihat. Secara normatif, rakyat tetap menjadi pemilik sah negara. Konstitusi menegaskan hal tersebut dengan sangat jelas. Namun secara operasional, rakyat harus menyalurkan kedaulatannya melalui berbagai mekanisme yang dibentuk oleh sistem. Mekanisme itulah yang menentukan apakah kedaulatan rakyat dapat dijalankan secara utuh atau justru mengalami penyempitan dalam praktik.

Dalam dunia teknologi, seorang pemilik sistem dapat memiliki hak tertinggi secara hukum, tetapi belum tentu mengendalikan seluruh operasi sehari-hari. Kontrol tersebut bergantung pada bagaimana sistem dirancang. Jika jalur akses dirancang secara sehat, pemilik tetap dapat mengendalikan sistem secara efektif. Sebaliknya, jika jalur akses dipenuhi lapisan-lapisan yang membatasi kemampuan pemilik untuk mengendalikan sistem, maka kepemilikan formal dapat terpisah dari pengendalian operasional.

Analogi tersebut sangat relevan dalam pembahasan kedaulatan rakyat. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa rakyat berdaulat karena konstitusi menyatakannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah

bagaimana kedaulatan tersebut bekerja dalam praktik. Melalui jalur apa rakyat mengendalikan negara. Siapa yang menjadi perantara. Siapa yang menentukan pilihan yang tersedia. Siapa yang mengatur akses menuju kekuasaan. Siapa yang mengendalikan gerbang masuk sistem pemerintahan. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada subbab-subbab berikutnya.

Penting untuk dipahami bahwa tujuan pembahasan ini bukan untuk menyangkal keberadaan kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Sebaliknya, pembahasan justru dimulai dari pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang sah. Justru karena rakyat adalah pemilik sah negara, maka seluruh mekanisme ketatanegaraan harus diuji berdasarkan kemampuannya menjaga dan menerjemahkan kedaulatan tersebut.

Dalam perspektif buku ini, persoalan utama sering kali bukan terletak pada rumusan normatif. Pasal-pasal konstitusi dapat menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Persoalan yang lebih sulit adalah memastikan bahwa desain sistem benar-benar memungkinkan rakyat menjalankan kedaulatan tersebut secara substantif. Sebab dalam banyak sistem pemerintahan, kepemilikan formal dan pengendalian operasional tidak selalu berada pada tangan yang sama.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu secara normatif dan konstitusional, rakyat tetap merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia. Kedaulatan rakyat adalah

fondasi dasar seluruh bangunan ketatanegaraan. Namun pengakuan normatif tersebut belum otomatis menjawab bagaimana kedaulatan dijalankan dalam praktik. Untuk memahami hal tersebut, pembahasan harus bergerak kepada jalur-jalur operasional yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan negara, termasuk mekanisme pencalonan dan distribusi akses yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

9.2. Pasal 6A dan Jalur Pencalonan Presiden

Setelah memahami bahwa konstitusi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, pembahasan berikutnya harus bergerak pada pertanyaan yang lebih operasional yaitu bagaimana rakyat menggunakan kedaulatan tersebut untuk menentukan pemimpin negara. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena dalam negara modern, kedaulatan tidak bekerja secara abstrak. Kedaulatan selalu diterjemahkan melalui mekanisme tertentu. Cara mekanisme itu dirancang akan sangat menentukan apakah rakyat benar-benar menjadi pengendali sistem atau hanya menjadi pengguna dari pilihan yang telah disediakan oleh pihak lain.

Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen, salah satu pasal yang paling penting untuk dipahami adalah Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal inilah yang mengatur mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekilas, pasal ini tampak sebagai bagian dari penguatan demokrasi karena memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Namun jika dibaca lebih mendalam, terdapat bagian lain yang memiliki konsekuensi arsitektural yang sangat besar terhadap jalur kedaulatan rakyat.

Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini sering menjadi fokus utama pembahasan publik. Perhatian masyarakat umumnya tertuju pada frasa "dipilih secara langsung oleh rakyat" karena dianggap sebagai simbol penguatan demokrasi. Rakyat tidak lagi memilih melalui perantara lembaga tertentu sebagaimana dalam desain sebelum amandemen. Rakyat hadir langsung sebagai pemilih dalam proses menentukan kepala pemerintahan nasional.

Namun tepat setelah itu, Pasal 6A ayat (2) memberikan ketentuan yang tidak kalah penting. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Di sinilah letak salah satu perubahan paling mendasar dalam jalur operasional kedaulatan rakyat.

Jika ayat pertama berbicara tentang pemilihan, ayat kedua berbicara tentang pencalonan. Perbedaan antara keduanya sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal dalam perspektif sistem, proses pencalonan sering kali sama pentingnya dengan proses pemilihan. Bahkan dalam banyak kasus, proses pencalonan justru menentukan ruang pilihan yang tersedia bagi rakyat.

Untuk memahami persoalan ini, perlu dibedakan terlebih dahulu antara hak memilih dan hak mencalonkan. Hak memilih berarti menentukan pilihan di antara kandidat yang telah tersedia. Hak mencalonkan berarti menentukan siapa saja yang dapat masuk ke dalam daftar pilihan tersebut. Kedua hak ini berbeda secara fundamental. Memilih berkaitan dengan keputusan akhir. Mencalonkan berkaitan dengan pembentukan pilihan sejak awal.

Dalam sistem yang diatur oleh Pasal 6A, rakyat memperoleh hak memilih secara langsung. Namun rakyat tidak secara langsung menentukan siapa saja yang dapat menjadi calon presiden. Jalur pencalonan berada pada partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, terdapat dua tahap yang berbeda

dalam proses distribusi kekuasaan nasional. Tahap pertama adalah pencalonan. Tahap kedua adalah pemilihan. Rakyat berperan dominan pada tahap kedua, sedangkan tahap pertama berada pada mekanisme kepartaian.

Dalam perspektif teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, situasi tersebut dapat dipahami sebagai perbedaan antara pengguna yang memilih aplikasi dari daftar yang tersedia dengan *administrator* yang menentukan aplikasi apa saja yang boleh masuk ke dalam sistem. Pengguna memang memiliki kebebasan memilih. Namun ruang kebebasan tersebut dibatasi oleh daftar pilihan yang telah ditentukan sebelumnya.

Analogi ini bukan untuk menolak demokrasi elektoral, melainkan untuk memahami bagaimana jalur kedaulatan bekerja dalam praktik. Sebab dalam banyak diskusi, perhatian publik sering berhenti pada fakta bahwa rakyat memilih secara langsung. Padahal sebelum rakyat memilih, telah terjadi proses yang menentukan siapa yang boleh masuk ke arena kompetisi nasional. Proses inilah yang memiliki arti strategis dalam desain sistem.

Jika ditelusuri lebih jauh, konsekuensi dari mekanisme tersebut sangat besar. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai organisasi peserta pemilu, tetapi juga menjadi institusi yang mengendalikan akses menuju pencalonan presiden. Dengan kata lain, sebelum seorang warga negara dapat memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, jalur menuju legitimasi tersebut harus terlebih dahulu melewati mekanisme pencalonan yang berada dalam ruang kepartaian.

Di sinilah muncul pertanyaan yang penting bagi kajian kedaulatan rakyat. Apakah kedaulatan hanya berarti hak memilih, atau juga mencakup kemampuan menentukan siapa yang dapat dipilih. Pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena menyentuh inti hubungan antara rakyat, partai politik, dan negara. Namun pertanyaan tersebut perlu diajukan agar pembacaan terhadap demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral semata.

Dalam BAB 8 telah dijelaskan bahwa salah satu dampak amandemen adalah berubahnya jalur legitimasi. Presiden tidak lagi memperoleh mandat melalui MPR, melainkan melalui pemilihan langsung. Namun pada saat yang sama, proses pencalonan presiden menjadi semakin terkait dengan partai politik. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan kekuasaan tidak sepenuhnya bersifat langsung. Di antara keduanya terdapat mekanisme pencalonan yang berfungsi sebagai pintu masuk menuju kompetisi kekuasaan.

Penting dipahami bahwa pembahasan ini tidak sedang mempersoalkan individu atau partai tertentu. Yang sedang dibahas adalah desain sistem. Dalam analisis sistem, perhatian utama bukan pada siapa yang mengendalikan gerbang saat ini, melainkan pada keberadaan gerbang itu sendiri. Sebab siapa pun yang berada di posisi tersebut pada masa depan akan memperoleh fungsi yang sama selama desain sistemnya tidak berubah.

Karena itu, ketika berbicara mengenai Pasal 6A, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada frasa "dipilih

langsung oleh rakyat". Perhatian juga harus diarahkan pada mekanisme pencalonan yang menentukan siapa yang dapat dipilih oleh rakyat. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan tanpa pencalonan tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, pencalonan tanpa pemilihan juga tidak menghasilkan legitimasi demokratis.

Dalam konteks kedaulatan rakyat, pemahaman ini sangat penting karena membantu membedakan antara kedaulatan normatif dan kedaulatan operasional. Secara normatif, rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan. Namun secara operasional, jalur menuju kekuasaan nasional dibentuk melalui tahapan yang melibatkan partai politik sebagai pengusul calon. Dengan demikian, struktur sistem tidak hanya menentukan siapa yang dipilih, tetapi juga menentukan siapa yang dapat dipilih.

Karena itu tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas di mana Pasal 6A menciptakan dua lapisan dalam proses distribusi kekuasaan nasional, yaitu pencalonan dan pemilihan. Rakyat memperoleh hak memilih secara langsung, tetapi proses pencalonan berada pada partai politik atau gabungan partai politik. Akibatnya, dalam sistem pasca-amandemen, rakyat memilih presiden secara langsung, tetapi tidak secara langsung menentukan siapa saja yang dapat menjadi calon presiden. Inilah titik awal untuk memahami mengapa partai politik memperoleh posisi yang sangat strategis dalam jalur operasional kedaulatan negara.

9.3. *Gateway* Politik dan Hak Akses Kekuasaan

Dalam BAB 8 telah dijelaskan bahwa salah satu konsekuensi paling penting dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah meningkatnya posisi strategis partai politik dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Pada tahap ini, pembahasan perlu bergerak lebih jauh untuk memahami mengapa posisi tersebut menjadi sangat penting. Persoalannya bukan sekadar karena partai politik ikut serta dalam pemilu, melainkan karena partai politik menempati posisi sebagai gerbang utama yang menghubungkan rakyat dengan sebagian besar ruang kekuasaan formal negara.

Untuk memahami fenomena ini, pembaca perlu melihat negara sebagai sebuah sistem akses. Dalam dunia teknologi, setiap sistem memiliki mekanisme yang mengatur siapa boleh masuk, siapa boleh menggunakan fungsi tertentu, dan siapa boleh mengakses sumber daya yang tersedia. Sistem yang tidak memiliki pengaturan akses akan mengalami kekacauan. Sebaliknya, sistem yang mengatur akses terlalu ketat dapat menciptakan konsentrasi kendali pada titik-titik tertentu. Karena itu, desain jalur akses menjadi salah satu elemen paling penting dalam arsitektur sistem.

Dalam analogi teknologi, terdapat komponen yang dikenal sebagai *gateway*. *Gateway* berfungsi sebagai pintu penghubung antara pengguna dan sistem yang lebih besar. Semua lalu lintas yang ingin memasuki sistem harus melewati titik tersebut. Dengan kata lain, *gateway* tidak selalu mengendalikan seluruh sistem, tetapi mengendalikan akses menuju sistem.

Konsep ini sangat relevan untuk memahami posisi partai politik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini. Secara normatif, rakyat merupakan pemegang kedaulatan. Namun, dalam praktiknya, akses menuju berbagai jabatan kenegaraan strategis sebagian besar melewati partai politik. Untuk menjadi anggota DPR, jalur utamanya adalah melalui partai politik. Untuk menjadi anggota DPRD, jalurnya juga melalui partai politik. Untuk menjadi calon presiden, dukungan partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu syarat konstitusional. Bahkan dalam berbagai proses kenegaraan lainnya, partai politik kerap menjadi titik masuk yang menentukan.

Dalam perspektif sistem, situasi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta dalam proses demokrasi, tetapi juga sebagai pengatur akses menuju kekuasaan. Posisi tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap siapa yang dapat memasuki arena kekuasaan nasional dan memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan strategis dalam negara. Sebelum rakyat menggunakan hak pilihnya, telah ada proses yang menentukan siapa yang berhak tampil sebagai pilihan.

Penting dipahami bahwa pembahasan ini bukan tuduhan terhadap partai politik sebagai institusi. Setiap sistem pasti memiliki mekanisme akses tertentu. Persoalan yang sedang dibahas bukan keberadaan mekanisme tersebut, melainkan tingkat pengaruh yang dimilikinya terhadap keseluruhan jalur kedaulatan rakyat. Semakin besar kontrol terhadap akses, semakin

besar pula pengaruh terhadap hasil akhir yang dihasilkan sistem.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan mengenai perbedaan antara *ownership* dan *control*. Seorang pemilik sah belum tentu mengendalikan seluruh operasi sehari-hari sebuah sistem. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan jalur akses sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana sistem bekerja. Dalam konteks negara, rakyat tetap menjadi pemilik sah berdasarkan konstitusi. Namun jalur akses menuju berbagai posisi strategis berada dalam mekanisme yang sangat dipengaruhi oleh partai politik.

Analogi sederhana dapat membantu menjelaskan situasi ini. Bayangkan sebuah gedung besar yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan gedung tersebut memang berada pada seluruh warga. Namun seluruh pintu masuk menuju ruang-ruang penting dalam gedung hanya dapat dibuka melalui kartu akses yang diterbitkan oleh kelompok tertentu. Secara formal gedung tetap milik masyarakat. Namun secara operasional, kelompok yang mengendalikan kartu akses memiliki pengaruh besar terhadap siapa yang dapat masuk dan siapa yang tidak.

Dalam sistem pemerintahan modern, pengaruh semacam ini sering kali lebih menentukan daripada yang terlihat di permukaan. Publik biasanya fokus pada hasil akhir pemilu. Perhatian tertuju pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun jauh sebelum tahap tersebut, terdapat proses yang menentukan siapa yang boleh ikut bertanding. Dalam banyak kasus, kekuasaan pada tahap awal ini justru sangat strategis

karena menentukan ruang pilihan yang tersedia bagi rakyat.

Jika menggunakan bahasa teknologi, proses tersebut mirip dengan authentication layer. Pengguna mungkin memiliki hak untuk menggunakan sistem, tetapi sebelum masuk harus melewati lapisan autentikasi tertentu. Partai politik menjalankan fungsi yang serupa. Sebelum seorang warga negara dapat memperoleh kesempatan untuk bersaing pada level tertentu, harus terdapat mekanisme yang mengizinkan akses tersebut.

Di sinilah posisi partai politik menjadi sangat berbeda dibanding organisasi masyarakat biasa. Organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, atau organisasi budaya dapat memengaruhi opini publik. Namun partai politik memiliki fungsi tambahan yang jauh lebih strategis, yaitu menghubungkan aspirasi masyarakat dengan struktur kekuasaan formal negara. Fungsi inilah yang membuat partai politik menempati posisi unik dalam arsitektur sistem.

Dalam desain awal UUD NRI Tahun 1945, jalur kedaulatan berpusat pada MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dalam desain pasca-amandemen, jalur tersebut menjadi lebih tersebar dan lebih bergantung pada kompetisi elektoral. Konsekuensinya, partai politik memperoleh posisi yang semakin penting sebagai penghubung antara rakyat dan ruang kekuasaan. Pergeseran inilah yang menjelaskan mengapa partai politik menjadi salah satu simpul paling

berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia.

Dari sudut pandang demokrasi, kondisi ini memiliki sisi positif dan sisi yang perlu dicermati. Pada sisi positif, partai politik dapat menjadi instrumen kaderisasi dan penyaringan kepemimpinan. Partai dapat membantu mempersiapkan calon-calon pemimpin yang memahami tata kelola negara. Namun pada sisi lain, semakin besar posisi partai sebagai gerbang akses, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa gerbang tersebut tetap bekerja demi kepentingan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi apakah partai politik penting. Jawabannya jelas penting. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah posisi partai sebagai *gateway* masih berfungsi sebagai saluran kedaulatan rakyat, atau justru perlahan berubah menjadi pusat kendali yang berdiri di antara rakyat dan kekuasaan negara. Pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut hubungan antara kepemilikan formal dan pengendalian operasional yang telah dibahas sejak BAB 3.

Dengan demikian, pembahasan mengenai partai politik tidak boleh berhenti pada fungsi elektoral semata. Dalam perspektif sistem, partai politik merupakan salah satu komponen yang mengatur hak akses menuju kekuasaan negara. Siapa yang mengendalikan akses akan memiliki pengaruh besar terhadap siapa yang dapat tampil, siapa yang dapat bersaing, dan pada akhirnya siapa yang dapat memimpin.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas di mana dalam sistem ketatanegaraan pasca-amandemen, partai politik berfungsi sebagai *gateway* yang mengatur akses menuju banyak posisi strategis dalam negara. Rakyat tetap menjadi pemilik kedaulatan secara normatif, tetapi jalur operasional menuju kekuasaan sebagian besar melewati mekanisme kepartaian. Akibatnya, posisi partai politik tidak hanya menjadi peserta demokrasi, melainkan juga menjadi pengelola hak akses dalam arsitektur kekuasaan nasional.

9.4. Gatekeeping: Siapa Menentukan Kandidat?

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 membedakan antara proses pencalonan dan proses pemilihan. Rakyat memiliki hak untuk memilih presiden secara langsung, tetapi proses pencalonan berada dalam jalur yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada titik inilah muncul persoalan yang sangat penting dalam kajian kedaulatan rakyat, yaitu persoalan gatekeeping. Pertanyaan dasarnya sederhana yaitu jika rakyat memilih pemimpin, siapa yang menentukan pilihan-pilihan yang tersedia bagi rakyat?

Pertanyaan ini sering kali luput dari perhatian publik. Dalam demokrasi elektoral, perhatian masyarakat umumnya terfokus pada hari pemungutan suara. Sorotan media tertuju pada kampanye, debat kandidat, survei elektabilitas, dan hasil penghitungan suara. Namun jauh sebelum seluruh proses tersebut berlangsung, terdapat tahap yang lebih mendasar, yaitu

penentuan kandidat. Tanpa kandidat, tidak ada pemilihan. Tanpa daftar calon, tidak ada pilihan yang dapat diberikan kepada rakyat.

Dalam perspektif sistem, tahap pencalonan merupakan salah satu titik paling strategis dalam distribusi kekuasaan. Sebab pada tahap inilah sistem menentukan siapa yang boleh memasuki arena kompetisi dan siapa yang tidak. Setelah seseorang masuk ke dalam daftar kandidat, rakyat dapat memberikan dukungan atau penolakan. Namun sebelum tahap itu terjadi, terdapat proses penyaringan yang menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk tampil di hadapan rakyat.

Dalam dunia teknologi, kondisi seperti ini dapat dianalogikan dengan access *control* system. Pengguna mungkin memiliki hak menggunakan aplikasi tertentu, tetapi sistem terlebih dahulu menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam daftar pengguna yang diizinkan. Dengan kata lain, keputusan paling menentukan sering kali terjadi sebelum proses penggunaan dimulai. Hak memilih menjadi penting, tetapi hak menentukan siapa yang dapat dipilih sering kali lebih menentukan arah keseluruhan sistem.

Di sinilah konsep gatekeeping menjadi relevan. Secara sederhana, gatekeeping adalah fungsi penjaga gerbang. Dalam setiap sistem yang memiliki pintu masuk terbatas, selalu terdapat mekanisme yang menentukan siapa boleh masuk dan siapa tidak. Dalam dunia media, gatekeeping menentukan berita mana yang dipublikasikan. Dalam dunia pendidikan, gatekeeping menentukan siapa yang diterima dalam

institusi tertentu. Gatekeeping menentukan siapa yang dapat menjadi kandidat dalam arena kekuasaan.

Jika menggunakan perspektif yang telah dibangun sejak BAB 3, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan gerbang itu sendiri. Hampir semua sistem membutuhkan gerbang tertentu agar tidak berubah menjadi kekacauan. Persoalannya adalah siapa yang mengendalikan gerbang tersebut dan seberapa besar pengaruh gerbang tersebut terhadap kedaulatan rakyat.

Dalam sistem pencalonan presiden Indonesia pasca-amandemen, gerbang tersebut berada pada partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, sebelum rakyat dapat menggunakan hak pilih, telah ada proses internal yang menentukan kandidat mana yang akan memperoleh akses menuju arena pemilihan nasional. Pada tahap ini, keputusan tidak diambil oleh seluruh rakyat Indonesia. Keputusan berada dalam ruang yang lebih sempit dibanding ruang kedaulatan rakyat secara keseluruhan.

Perbedaan antara memilih kandidat dan menentukan kandidat sangat penting untuk dipahami. Banyak orang menganggap kedua hal tersebut identik, padahal keduanya merupakan proses yang berbeda. Memilih kandidat berarti menentukan siapa yang paling layak di antara pilihan yang tersedia. Menentukan kandidat berarti menentukan siapa saja yang boleh masuk ke dalam daftar pilihan tersebut sejak awal.

Analogi sederhana dapat membantu menjelaskan perbedaan ini. Seseorang yang datang ke

sebuah restoran memang bebas memilih makanan. Namun kebebasan tersebut terbatas pada menu yang tersedia. Pengunjung tidak menentukan isi menu. Pengunjung hanya menentukan pilihan dari menu yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks kekuasaan, rakyat dapat memilih kandidat yang tersedia, tetapi tidak selalu menentukan siapa yang masuk ke dalam daftar kandidat tersebut.

Tentu analogi ini tidak berarti bahwa rakyat sama sekali tidak memiliki pengaruh. Dalam sistem demokrasi, dukungan publik tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan. Tokoh yang memiliki dukungan luas dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dalam proses pencalonan. Namun dari sudut pandang sistem, tetap terdapat perbedaan antara kemampuan memengaruhi proses pencalonan dan kewenangan formal untuk menentukan pencalonan.

Di sinilah muncul salah satu pertanyaan penting dalam kajian kedaulatan rakyat. Jika rakyat adalah pemilik sah negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), sampai sejauh mana rakyat mengendalikan tahap yang paling menentukan dalam proses distribusi kekuasaan. Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap partai politik, melainkan pertanyaan tentang desain sistem. Sebab dalam analisis sistem, yang menjadi perhatian utama bukan perilaku individu, melainkan struktur yang mengatur perilaku tersebut.

Penting juga dipahami bahwa kekuasaan terbesar dalam sebuah sistem tidak selalu berada pada tahap pengambilan keputusan akhir. Dalam banyak kasus, kekuasaan terbesar justru berada pada tahap

penyaringan awal. Siapa yang mengendalikan daftar kandidat sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil yang mungkin muncul di kemudian hari. Jika seluruh pilihan yang tersedia berasal dari ruang yang sama, maka hasil akhirnya juga akan bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan sejak awal.

Dalam konteks inilah gatekeeping menjadi salah satu konsep kunci untuk memahami pergeseran jalur kedaulatan pasca-amandemen. Kedaulatan rakyat secara normatif tetap diakui. Pemilihan langsung tetap dilaksanakan. Namun sebelum rakyat menggunakan hak pilihnya, terdapat lapisan penyaringan yang berfungsi menentukan ruang pilihan yang tersedia. Lapisan inilah yang menjadikan posisi partai politik sangat strategis dalam sistem.

Pembahasan ini juga menjadi jembatan menuju subbab berikutnya mengenai *elite capture*. Sebab ketika gerbang akses menuju kekuasaan berada dalam ruang yang relatif terbatas, muncul pertanyaan lanjutan yang sangat penting yaitu siapa yang sesungguhnya mengendalikan gerbang tersebut. Apakah gerbang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme demokratis internal yang terbuka, atau terdapat konsentrasi pengaruh tertentu yang menentukan arah proses pencalonan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu dalam sistem pemerintahan pasca-amandemen, kekuasaan tidak hanya terletak pada proses pemilihan, tetapi juga pada proses pencalonan. Rakyat memilih kandidat yang tersedia, tetapi

penentuan kandidat berada pada mekanisme yang berbeda. Dengan demikian, fungsi gatekeeping menjadi salah satu titik paling strategis dalam arsitektur distribusi kekuasaan nasional, karena menentukan siapa yang dapat masuk ke arena kompetisi sebelum rakyat menggunakan hak pilihnya.

9.5. Elite Capture dalam Sistem Kepartaian

Setelah memahami bahwa partai politik menempati posisi sebagai *gateway* dalam sistem ketatanegaraan dan menjalankan fungsi gatekeeping dalam proses pencalonan, pembahasan berikutnya harus bergerak pada pertanyaan yang lebih mendalam yaitu siapa yang sesungguhnya mengendalikan gerbang tersebut. Pertanyaan ini sangat penting karena dalam setiap sistem, posisi pengendali akses selalu memiliki pengaruh yang besar terhadap arah keseluruhan sistem. Semakin strategis sebuah gerbang, semakin besar pula dampak dari pihak yang mengendalikan gerbang tersebut.

Dalam kajian tata kelola, terdapat istilah yang dikenal sebagai *elite capture*. Istilah ini sering disalahpahami sebagai tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Padahal dalam analisis sistem, *elite capture* bukan pertama-tama persoalan moral, melainkan persoalan struktur. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika mekanisme yang seharusnya mewakili kepentingan yang lebih luas secara bertahap lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki akses, sumber daya, posisi,

atau pengaruh yang lebih besar dibanding masyarakat secara umum.

Dengan kata lain, *elite capture* tidak selalu terjadi karena niat buruk. Fenomena tersebut sering muncul sebagai konsekuensi dari desain sistem itu sendiri. Ketika akses menuju pengambilan keputusan berada dalam ruang yang relatif terbatas, kelompok yang paling dekat dengan pusat akses tersebut secara alami memperoleh pengaruh yang lebih besar dibanding kelompok yang berada di luar lingkaran tersebut.

Dalam konteks sistem kepartaian, fenomena ini menjadi relevan karena partai politik tidak hanya berfungsi sebagai organisasi biasa. Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, partai politik merupakan gerbang utama menuju banyak posisi strategis dalam negara. Ketika fungsi pencalonan, distribusi kader, dan akses menuju jabatan publik terkonsentrasi dalam struktur partai, maka perhatian perlu diarahkan kepada bagaimana keputusan-keputusan tersebut dibuat di dalam partai itu sendiri.

Dalam teori demokrasi, partai politik idealnya menjadi saluran aspirasi rakyat. Partai berfungsi menyerap kebutuhan masyarakat, mengolahnya menjadi program, melakukan kaderisasi kepemimpinan, lalu menghadirkannya kembali kepada rakyat dalam bentuk calon pemimpin dan kebijakan publik. Dalam model ideal tersebut, partai berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan negara.

Namun dalam praktik, tidak semua keputusan dalam partai politik dibuat oleh seluruh anggota secara langsung. Sebagian besar keputusan strategis biasanya

berada pada struktur kepemimpinan, pengurus inti, atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan dalam organisasi. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang unik. Hampir semua organisasi modern memiliki struktur kepemimpinan tertentu. Persoalannya menjadi berbeda ketika organisasi tersebut mengendalikan akses menuju kekuasaan negara.

Dalam perspektif sistem, kondisi tersebut menciptakan rantai distribusi kekuasaan yang menarik untuk diperhatikan yaitu Rakyat → Partai Politik → Elite Partai → Kandidat → Jabatan Publik

Rantai ini tidak berarti bahwa rakyat kehilangan seluruh pengaruhnya. Rakyat tetap memiliki peran penting melalui pemilihan umum. Namun jalur tersebut menunjukkan bahwa sebelum seorang kandidat tampil di hadapan rakyat, telah terjadi proses seleksi yang melibatkan struktur internal partai. Semakin besar pengaruh struktur tersebut, semakin besar pula kemampuan untuk menentukan siapa yang memperoleh kesempatan memasuki arena jabatan nasional.

Dalam dunia teknologi, fenomena ini dapat dianalogikan dengan *administrator* yang mengendalikan daftar pengguna yang boleh mengakses sistem. Pengguna akhir tetap memiliki hak menggunakan aplikasi. Namun *administrator* menentukan siapa yang memperoleh akun, siapa yang memperoleh izin masuk, dan siapa yang ditolak. Akibatnya, kekuasaan administratif sering kali lebih besar daripada yang terlihat di permukaan.

Hal yang sama dapat terjadi dalam sistem pemerintahan. Publik sering melihat pemilu sebagai arena utama distribusi kekuasaan. Padahal sebelum pemilu berlangsung, terdapat tahap seleksi yang tidak kalah menentukan. Kandidat yang tidak memperoleh akses pada tahap tersebut tidak pernah sampai ke hadapan pemilih. Dengan demikian, proses yang terjadi sebelum pemungutan suara dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap hasil akhirnya.

Di sinilah konsep *elite capture* menjadi penting sebagai alat analisis. Konsep ini membantu menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem, kekuasaan sering kali terkonsentrasi pada titik-titik tertentu yang mengendalikan akses. Konsentrasi tersebut tidak selalu tampak secara kasat mata karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada proses pemilihan akhir. Namun dari sudut pandang arsitektur sistem, titik akses sering kali lebih menentukan dibanding titik penggunaan.

Dalam konteks Indonesia pasca-amandemen, pertanyaan yang relevan bukan apakah terdapat *elite* dalam partai politik. Keberadaan *elite* adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari dalam organisasi besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mekanisme internal yang ada cukup terbuka untuk memastikan bahwa akses menuju kekuasaan tetap terhubung dengan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena dalam BAB 3 telah dijelaskan perbedaan antara *ownership* dan *control*. Rakyat secara konstitusional adalah pemilik negara. Namun kepemilikan formal

tidak selalu identik dengan pengendalian operasional. Dalam banyak sistem, pihak yang mengendalikan akses sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap arah sistem dibanding pemilik yang berada jauh dari pusat kendali sehari-hari.

Kondisi semacam ini tidak hanya ditemukan dalam kehidupan bernegara. Dalam dunia ekonomi, organisasi, bahkan teknologi, fenomena serupa juga dapat dijumpai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *elite capture* tidak boleh dibaca sebagai serangan terhadap individu tertentu. Pembahasan ini harus dibaca sebagai analisis terhadap bagaimana sebuah sistem mendistribusikan pengaruh dan mengelola akses.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, pertanyaan tentang *elite capture* menjadi semakin relevan. Jika sistem perwakilan dirancang untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat, maka mekanisme yang menghubungkan rakyat dengan perwakilan tersebut perlu terus dievaluasi agar tidak berkembang menjadi ruang tertutup yang semakin jauh dari pemilik sah negara.

Subbab ini juga menjadi jembatan menuju pembahasan berikutnya mengenai *pseudo sovereignty* atau kedaulatan semu. Sebab ketika jalur akses menuju kekuasaan semakin terkonsentrasi pada titik-titik tertentu, muncul pertanyaan yang sangat mendasar yaitu apakah rakyat masih mengendalikan sistem secara substantif, atau hanya berpartisipasi dalam tahap akhir

dari proses yang sebagian besar telah ditentukan sebelumnya.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *elite capture* dalam sistem kepartaian bukan pertama-tama persoalan individu, melainkan persoalan desain sistem yang menempatkan akses menuju kekuasaan pada ruang yang relatif terbatas. Ketika partai politik berfungsi sebagai gerbang utama menuju jabatan publik, kelompok yang mengendalikan proses seleksi di dalam gerbang tersebut memperoleh pengaruh yang sangat besar terhadap arah distribusi kekuasaan nasional. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang bersifat normatif berpotensi mengalami penyempitan pada tingkat operasional jika mekanisme akses tidak tetap terhubung secara kuat dengan rakyat sebagai pemilik sah negara.

9.6. *Pseudo Sovereignty*: Kedaulatan yang Tampak, Tetapi Tidak Utuh

Salah satu tantangan terbesar dalam memahami sistem pemerintahan modern adalah membedakan antara partisipasi dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, seolah-olah memiliki makna yang sama. Padahal dalam perspektif sistem, partisipasi dan kedaulatan merupakan dua konsep yang berbeda. Partisipasi berbicara tentang keterlibatan dalam proses. Kedaulatan berbicara tentang kepemilikan dan pengendalian terhadap proses tersebut. Seseorang dapat terlibat dalam sebuah sistem tanpa benar-benar mengendalikan sistem tersebut. Demikian pula sebuah

masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses tanpa sepenuhnya mengendalikan arah kekuasaan yang dihasilkan.

Perbedaan inilah yang menjadi dasar pembahasan mengenai *pseudo sovereignty* atau kedaulatan semu. Istilah ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa rakyat sama sekali tidak memiliki kedaulatan. Sebaliknya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika kedaulatan tampak hadir secara formal dan prosedural, tetapi tidak sepenuhnya hadir secara operasional dan substantif. Dari luar, rakyat terlihat memegang kendali. Namun ketika jalur distribusi kekuasaan ditelusuri lebih dalam, ruang kendali tersebut ternyata lebih terbatas daripada yang tampak di permukaan.

Dalam BAB 9.1 telah ditegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara normatif, tidak ada keraguan mengenai hal tersebut. Konstitusi memberikan pengakuan yang jelas. Rakyat memilih anggota legislatif. Rakyat memilih presiden. Rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum secara berkala. Dari sudut pandang prosedural, seluruh elemen utama demokrasi tampak berjalan.

Namun pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah rakyat ikut memilih, melainkan sejauh mana rakyat menentukan pilihan yang tersedia. Pertanyaan ini menjadi penting karena kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memilih dari pilihan yang ada. Kedaulatan juga berkaitan dengan

kemampuan memengaruhi pembentukan pilihan itu sendiri.

Dalam dunia teknologi, seorang pengguna dapat diberikan kebebasan untuk memilih berbagai fitur yang tersedia dalam sebuah aplikasi. Pengguna dapat menentukan menu yang ingin digunakan, layanan yang ingin diakses, atau tampilan yang ingin dipilih. Namun seluruh pilihan tersebut tetap berada dalam ruang yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang sistem. Kebebasan itu nyata, tetapi tidak sepenuhnya menentukan desain sistem. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara memilih dalam sistem dan menentukan sistem.

Analogi tersebut membantu menjelaskan konsep *pseudo sovereignty*. Dalam sistem pemerintahan modern, rakyat memang memiliki hak untuk memilih. Hak tersebut nyata dan tidak dapat diabaikan. Namun jika ruang pilihan yang tersedia sepenuhnya dibentuk oleh mekanisme yang berada di luar jangkauan rakyat, maka muncul pertanyaan mengenai tingkat kedaulatan yang sesungguhnya dimiliki oleh rakyat dalam proses tersebut.

Bayangkan seseorang memasuki sebuah restoran. Pengunjung dapat memilih makanan apa saja yang terdapat dalam daftar menu. Pilihan itu bebas. Tidak ada paksaan untuk memilih menu tertentu. Namun pengunjung tidak menentukan isi menu. Pengunjung tidak menentukan makanan apa yang boleh masuk ke dalam daftar. Kebebasan memilih tetap ada, tetapi kebebasan menentukan pilihan yang tersedia berada pada pihak lain.

Dalam konteks kehidupan bernegara, situasi serupa dapat terjadi ketika rakyat diberi hak untuk memilih dari kandidat yang tersedia, tetapi tidak memiliki peran yang setara dalam menentukan siapa yang dapat masuk ke dalam daftar kandidat tersebut. Hak memilih tetap berjalan, tetapi ruang partisipasi dalam menentukan pilihan yang tersedia masih terbatas. Prosedur demokrasi tetap berjalan. Namun terdapat lapisan lain yang menentukan ruang pilihan sebelum rakyat menggunakan hak pilihnya.

Di sinilah muncul konsep kedaulatan semu. Kedaulatan semu bukan berarti tidak ada kedaulatan sama sekali. Istilah tersebut merujuk pada keadaan ketika sebagian aspek kedaulatan hadir, sementara aspek lainnya dibatasi oleh struktur sistem. Rakyat tetap hadir sebagai pemilih. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi. Namun kemampuan rakyat untuk mengendalikan seluruh jalur distribusi kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Fenomena ini sering kali sulit dikenali karena seluruh prosedur demokrasi tampak berjalan normal. Pemilu berlangsung. Kampanye berlangsung. Debat kandidat berlangsung. Penghitungan suara berlangsung. Dari luar, sistem terlihat demokratis dan partisipatif. Namun pembacaan sistemik mengharuskan perhatian tidak hanya tertuju pada tahap akhir, melainkan juga pada tahap-tahap sebelumnya yang menentukan siapa yang boleh berkompetisi dan siapa yang tidak.

Dalam BAB 9.4 telah dibahas mengenai gatekeeping. Dalam BAB 9.5 dibahas mengenai *elite*

capture. Kedua konsep tersebut membantu menjelaskan mengapa kedaulatan rakyat dapat mengalami penyempitan operasional meskipun tetap diakui secara normatif. Ketika gerbang akses menuju kekuasaan dikendalikan oleh mekanisme yang relatif terbatas, dan ketika proses seleksi berlangsung dalam ruang yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat, maka hubungan antara rakyat dan kekuasaan menjadi lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, pertanyaan mengenai kedaulatan substantif menjadi sangat penting. Kerakyatan tidak hanya berbicara tentang kehadiran rakyat pada hari pemungutan suara. Kerakyatan juga berbicara tentang sejauh mana rakyat benar-benar menjadi pusat orientasi sistem pemerintahan. Sebab sistem yang memberikan hak memilih tetapi membatasi ruang pengaruh rakyat terhadap pembentukan pilihan berpotensi menghasilkan jarak antara pemilik sah negara dan mekanisme operasional negara.

Penting pula ditegaskan bahwa pembahasan ini bukan penolakan terhadap demokrasi elektoral. Pemilu tetap merupakan instrumen penting dalam negara modern. Hak pilih merupakan pencapaian besar dalam perkembangan kehidupan demokratis manusia. Namun pengakuan terhadap pentingnya pemilu tidak boleh menghentikan upaya untuk mengevaluasi kualitas kedaulatan yang dihasilkan oleh sistem. Demokrasi yang sehat justru membutuhkan

kemampuan untuk mengkritisi dirinya sendiri agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif buku ini, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya pemilu, melainkan pada hubungan antara rakyat sebagai *root owner* dan mekanisme distribusi kekuasaan yang bekerja atas nama rakyat. Semakin jauh jarak antara pemilik dan pengendali sistem, semakin besar risiko munculnya bentuk-bentuk kedaulatan yang hanya kuat secara simbolik tetapi lemah secara substantif.

Pembahasan ini menjadi jembatan menuju sintesis pada subbab berikutnya. Setelah memahami jalur pencalonan, fungsi gatekeeping, dan potensi *elite capture*, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah seluruh perubahan tersebut telah menggeser pusat gravitasi kedaulatan dari rakyat menuju institusi lain yang mengendalikan akses terhadap kekuasaan.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *pseudo sovereignty* adalah keadaan ketika kedaulatan rakyat tampak hadir secara formal melalui partisipasi elektoral, tetapi tidak sepenuhnya hadir secara operasional dalam proses pembentukan pilihan. Rakyat tetap memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak selalu memiliki peran yang menentukan dalam menetapkan siapa yang dapat dipilih. Akibatnya, tingginya partisipasi masyarakat belum tentu identik dengan kedaulatan rakyat yang utuh. Kedaulatan dapat tampak hadir di permukaan, sementara sebagian kendali atas proses pembentukan pilihan telah bergeser ke lapisan-lapisan sistem yang tidak secara langsung berada dalam kendali rakyat.

9.7. Dari Kedaulatan Rakyat ke Kedaulatan Partai

Pembahasan pada subbab-subbab sebelumnya telah memperlihatkan satu pola yang semakin jelas. Secara normatif, konstitusi tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pasal 1 ayat (2) tetap menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan umum tetap dilaksanakan secara berkala. Presiden dipilih secara langsung.

Anggota legislatif dipilih melalui suara rakyat. Dari permukaan, seluruh mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetap beroperasi atas nama kedaulatan rakyat.

Namun ketika jalur distribusi kekuasaan ditelusuri lebih dalam, muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindari yaitu apakah pusat gravitasi kedaulatan masih benar-benar berada pada rakyat, atau telah bergeser menuju institusi yang mengendalikan akses terhadap kekuasaan. Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari seluruh pembahasan BAB 9.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan bahwa rakyat adalah *root owner* negara. Dalam desain awal UUD NRI Tahun 1945, prinsip tersebut diterjemahkan melalui arsitektur yang relatif sederhana. Kedaulatan rakyat dijalankan melalui MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden memperoleh mandat dari MPR. Jika disederhanakan, jalur tersebut dapat digambarkan sebagai:

Rakyat → MPR → Presiden

Struktur ini memiliki satu karakteristik yang sangat penting. Pusat distribusi legitimasi berada pada

lembaga yang secara konstitusional dirancang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, arsitektur sistem secara eksplisit menempatkan jalur kedaulatan dalam satu simpul yang secara formal diakui sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah struktur tersebut. MPR tidak lagi menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR. Jalur legitimasi mengalami konfigurasi baru yang bertumpu pada pemilihan langsung dan mekanisme kepartaian. Dalam praktik operasional, struktur tersebut lebih mendekati pola berikut:

Rakyat → Partai Politik → Kandidat → Presiden
atau
Rakyat → Partai Politik → Kandidat → DPR

Perubahan ini tampak sederhana dalam bentuk diagram, tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap arsitektur sistem. Sebab titik yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika dahulu MPR menjadi simpul utama pelaksanaan kedaulatan, maka dalam sistem pasca-amandemen partai politik memperoleh posisi yang jauh lebih strategis dalam proses distribusi kekuasaan.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini tidak sedang menyatakan bahwa partai politik mengambil alih seluruh kedaulatan rakyat. Konstitusi tetap menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Pemilu tetap membutuhkan suara rakyat. Tidak ada presiden yang dapat memperoleh legitimasi

tanpa dukungan rakyat. Tidak ada anggota legislatif yang dapat duduk di parlemen tanpa suara pemilih. Semua fakta tersebut tetap benar.

Namun analisis sistem tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang memberikan legitimasi akhir. Analisis sistem juga harus melihat siapa yang mengendalikan jalur menuju legitimasi tersebut. Sebab dalam banyak sistem, kekuasaan terbesar tidak selalu berada pada titik akhir pengambilan keputusan. Kekuasaan terbesar sering berada pada titik yang menentukan siapa yang boleh memasuki proses tersebut.

Dalam dunia teknologi, pengendali *gateway* sering memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengguna akhir. Pengguna memang menentukan pilihan setelah masuk ke dalam sistem. Namun pengendali *gateway* menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam sistem sejak awal. Analogi ini sangat relevan dalam memahami posisi partai politik dalam sistem pasca-amandemen.

Partai politik bukan hanya peserta kompetisi kekuasaan. Partai politik juga menjadi institusi yang mengusulkan calon presiden, mengusulkan calon legislatif, melakukan kaderisasi, menentukan daftar kandidat, serta mengatur akses menuju berbagai posisi strategis negara. Fungsi-fungsi tersebut membuat partai politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah distribusi kekuasaan nasional.

Di sinilah muncul istilah "kedaulatan partai politik" yang digunakan dalam bab ini. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai konsep hukum formal.

Konstitusi tidak pernah menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan partai politik. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena operasional ketika pusat gravitasi distribusi kekuasaan semakin bergantung pada institusi kepartaian.

Dengan kata lain, pembahasan ini tidak berbicara tentang perpindahan kedaulatan secara normatif, tetapi tentang pergeseran kedaulatan secara operasional. Secara normatif, rakyat tetap pemilik negara. Secara operasional, akses menuju kekuasaan sangat ditentukan oleh mekanisme kepartaian. Semakin besar ketergantungan sistem terhadap partai politik, semakin besar pula pengaruh partai terhadap hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, yaitu gatekeeping, *elite capture*, dan *pseudo sovereignty*. Ketiganya saling berkaitan. Ketika partai menjadi gerbang utama menuju akses kekuasaan, partai memperoleh fungsi sebagai penjaga pintu (gatekeeping) dalam proses pencalonan dan seleksi kekuasaan. Ketika proses gatekeeping berada dalam ruang yang relatif terbatas, muncul potensi *elite capture*. Ketika rakyat tetap memilih tetapi tidak sepenuhnya menentukan ruang pilihan yang tersedia, muncul gejala *pseudo sovereignty*. Ketiga fenomena tersebut bertemu pada satu titik yang sama, yaitu meningkatnya posisi strategis partai politik dalam arsitektur kekuasaan.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, fenomena ini menghadirkan pertanyaan yang sangat penting. Apakah sistem perwakilan yang ada masih berfungsi sebagai saluran kedaulatan rakyat, atau justru berkembang menjadi mekanisme yang lebih banyak merepresentasikan struktur kepartaian. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan melihat hasil pemilu. Jawabannya harus dicari dengan membaca desain sistem secara keseluruhan.

Penting pula ditegaskan bahwa kritik terhadap dominasi partai politik bukan berarti penolakan terhadap partai politik itu sendiri. Negara modern hampir tidak mungkin berjalan tanpa organisasi yang berfungsi melakukan representasi dan kaderisasi. Persoalannya bukan keberadaan partai, melainkan posisi sistemiknya. Ketika partai berubah dari sarana penyalur kedaulatan menjadi pusat gravitasi kedaulatan operasional, maka hubungan antara rakyat dan negara mengalami perubahan yang perlu dipahami secara jernih.

Dalam konteks buku ini, perubahan tersebut merupakan salah satu konsekuensi paling penting dari perubahan *firmware* negara pasca-amandemen. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB 8, perubahan *firmware* tidak selalu mengubah identitas negara. Yang berubah adalah cara sistem bekerja. Dan salah satu perubahan paling nyata adalah bergesernya jalur distribusi kekuasaan menuju struktur kepartaian.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu secara normatif kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi secara operasional pusat

gravitasi distribusi kekuasaan telah bergeser ke arah partai politik sebagai pengendali akses menuju jabatan publik. Dalam pengertian inilah muncul fenomena yang disebut sebagai kedaulatan partai politik, yaitu keadaan ketika partai tidak hanya menjadi peserta demokrasi, tetapi juga menjadi institusi yang menentukan jalur utama menuju kekuasaan negara. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang secara formal tetap diakui berpotensi mengalami reduksi pada tingkat operasional menjadi kedaulatan yang dimediasi dan dibatasi oleh struktur kepartaian.

9.8. Apakah Ini Sesuai dengan Sila Kerakyatan?

Setelah menelusuri perubahan jalur kedaulatan, posisi partai politik sebagai *gateway* system, fungsi gatekeeping, fenomena *elite capture*, serta kemungkinan munculnya *pseudo sovereignty*, pembahasan pada titik ini sampai pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar persoalan teknis ketatanegaraan. Pertanyaannya bukan lagi apakah sistem yang berlaku saat ini demokratis secara prosedural. Pertanyaannya adalah apakah sistem tersebut benar-benar selaras dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pertanyaan ini penting karena sejak awal buku telah menempatkan Pancasila sebagai kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa Indonesia. Dalam perspektif sistem yang digunakan sepanjang buku ini, konstitusi adalah *firmware*, sedangkan Pancasila adalah inti kesadaran yang menjadi sumber arah dan tujuan

sistem. Karena itu, setiap desain ketatanegaraan pada akhirnya harus diuji terhadap kompatibilitasnya dengan Pancasila. Sistem yang berjalan secara legal belum tentu sepenuhnya selaras dengan nilai dasar bangsa. Sistem yang terlihat modern belum tentu kompatibel dengan orientasi filosofis yang melahirkannya.

Sila keempat sering kali dipahami secara sederhana sebagai pembenaran terhadap demokrasi atau pemilihan umum. Padahal rumusan sila tersebut jauh lebih kaya daripada sekadar mekanisme pemungutan suara. Kata kunci dalam sila keempat bukan hanya "kerakyatan", melainkan juga "hikmat kebijaksanaan" dan "permusyawaratan/perwakilan". Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kerakyatan menunjukkan bahwa rakyat adalah pusat orientasi sistem. Hikmat kebijaksanaan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak semata-mata didasarkan pada perebutan kekuasaan atau kemenangan angka, melainkan pada pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan bersama. Permusyawaratan/perwakilan menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan harus dijalankan melalui mekanisme representasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah rakyat ikut memilih. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah rakyat benar-benar menjadi pusat sistem. Sebab sebuah sistem dapat memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi pada

saat yang sama menempatkan keputusan-keputusan strategis pada ruang yang jauh dari jangkauan rakyat. Dalam kondisi seperti itu, partisipasi tetap ada, tetapi kerakyatan substantif belum tentu hadir secara utuh.

Perlu diakui bahwa sistem pasca-amandemen menghadirkan sejumlah unsur yang dapat dipandang selaras dengan semangat kerakyatan. Pemilihan presiden secara langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin nasional tanpa perantara lembaga tertentu. Pemilu yang berlangsung secara berkala memungkinkan adanya pergantian kekuasaan secara damai. Hak warga negara memperoleh perlindungan yang lebih luas dibanding banyak periode sebelumnya. Semua ini merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan.

Namun pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan lain yang juga tidak dapat diabaikan. Ketika proses pencalonan berada dalam ruang yang sangat dipengaruhi oleh partai politik, ketika akses menuju jabatan publik bergantung pada mekanisme tertentu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali rakyat, dan ketika pusat gravitasi distribusi kekuasaan bergeser ke arah struktur kepartaian, maka muncul kebutuhan untuk menguji kembali apakah kondisi tersebut benar-benar sejalan dengan semangat kerakyatan yang dimaksud dalam Pancasila.

Pertanyaan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan frasa "permusyawaratan/perwakilan". Dalam tradisi Nusantara yang telah dibahas pada BAB 4 dan BAB 5, musyawarah tidak sekadar berarti

berkumpul dan berdiskusi. Musyawarah mengandung makna keterhubungan antara pemimpin dan masyarakat, antara perwakilan dan yang diwakili, antara keputusan dan kemaslahatan bersama. Musyawarah bukan hanya prosedur, melainkan budaya kekuasaan yang berorientasi pada pencarian kebijaksanaan.

Karena itu, ketika perwakilan semakin bergantung pada struktur organisasi tertentu yang memiliki kepentingan, dinamika internal, dan pusat kekuasaan sendiri, muncul pertanyaan apakah hubungan antara rakyat dan perwakilan masih sekuat yang diharapkan oleh sila keempat. Apakah perwakilan terutama mewakili rakyat, atau semakin banyak mewakili mekanisme yang mengantarkan kepada posisi tersebut. Pertanyaan ini tidak ditujukan kepada individu tertentu, melainkan kepada desain sistem secara keseluruhan.

Dalam perspektif sistem, persoalan ini mirip dengan hubungan antara pemilik sistem dan *administrator* sistem. *Administrator* memang dibutuhkan untuk mengelola sistem yang kompleks. Namun keberadaan *administrator* tidak boleh membuat pemilik kehilangan kendali atas sistemnya sendiri. Jika *administrator* semakin menentukan arah sistem sementara pemilik hanya terlibat pada tahap-tahap tertentu yang terbatas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keseimbangan hubungan tersebut.

Hal yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Partai politik dibutuhkan. Mekanisme perwakilan dibutuhkan. Organisasi dibutuhkan.

Namun seluruh instrumen tersebut pada hakikatnya adalah alat untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat, bukan pengganti kedaulatan rakyat. Ketika alat menjadi lebih dominan daripada tujuan yang dilayaninya, maka muncul risiko terjadinya pergeseran orientasi sistem.

Di sinilah sila keempat berfungsi sebagai alat uji yang sangat penting. Sila tersebut mengingatkan bahwa kerakyatan tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur elektoral. Kerakyatan juga tidak boleh direduksi menjadi sekadar keberadaan partai politik. Kerakyatan harus tetap memastikan bahwa rakyat menjadi pusat orientasi sistem, bahwa kebijaksanaan lebih diutamakan daripada sekadar kemenangan, dan bahwa mekanisme perwakilan benar-benar berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan negara.

Penting untuk ditegaskan bahwa subbab ini tidak bertujuan memberikan putusan final. Buku ini tidak sedang menyatakan bahwa sistem saat ini sepenuhnya bertentangan dengan sila keempat. Buku ini juga tidak sedang menyatakan bahwa seluruh mekanisme yang ada harus ditolak. Yang sedang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan filosofis dan ketatanegaraan yang sangat mendasar yaitu sejauh mana desain sistem yang berlaku saat ini masih selaras dengan makna terdalam dari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena dalam BAB 6 telah ditegaskan bahwa Pancasila adalah kernel (inti sistem) *consciousness* bangsa. Jika *firmware* negara terus berubah, maka kompatibilitas terhadap kernel (inti sistem) harus terus diuji. Sebab

sistem yang tampak berjalan normal dapat saja perlahan bergerak menjauh dari nilai-nilai yang menjadi alasan keberadaannya sejak awal.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu sila keempat Pancasila bukan sekadar legitimasi bagi pemilihan umum atau sistem perwakilan, melainkan ukuran untuk menilai apakah rakyat benar-benar menjadi pusat orientasi negara. Ketika jalur kedaulatan semakin dimediasi oleh struktur kepartaian dan mekanisme akses yang kompleks, muncul kebutuhan untuk terus menguji apakah sistem yang berjalan masih sepenuhnya mencerminkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana dicita-citakan oleh Pancasila.

9.9. Ketika Pemilik Tidak Mengendalikan Sistem

Pada akhirnya, seluruh pembahasan dalam BAB 9 bermuara pada satu pertanyaan yang sangat mendasar yaitu apakah pemilik negara benar-benar mengendalikan negara. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti dari seluruh gagasan kedaulatan rakyat. Sebab jika rakyat adalah pemilik sah negara sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, maka logika berikutnya adalah rakyat seharusnya memiliki kemampuan yang nyata untuk menentukan arah sistem yang dimilikinya.

Dalam BAB 3 telah dijelaskan mengenai perbedaan antara *ownership* dan *control*. Kedua konsep tersebut sering dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Ownership berbicara tentang

kepemilikan yang sah. Control berbicara tentang kemampuan mengendalikan operasional sistem. Dalam kondisi ideal, keduanya berada pada tangan yang sama. Pemilik menjadi pengendali. Pengendali bertindak atas nama pemilik. Sistem bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik.

Namun dalam banyak sistem yang kompleks, kepemilikan dan pengendalian tidak selalu berada pada titik yang sama. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh jutaan pemegang saham, tetapi operasional sehari-hari dikendalikan oleh kelompok yang jauh lebih kecil. Sebuah *platform* digital dapat digunakan oleh jutaan pengguna, tetapi konfigurasi sistem ditentukan oleh sekelompok *administrator*. Sebuah organisasi dapat mengatasnamakan seluruh anggota, tetapi keputusan-keputusan penting sering kali diambil oleh lingkaran yang lebih sempit.

Fenomena seperti ini tidak selalu salah. Kompleksitas sering kali memang membutuhkan pembagian fungsi. Tidak semua pemilik dapat terlibat dalam seluruh keputusan operasional setiap hari. Karena itu muncul berbagai mekanisme representasi, delegasi, dan pelimpahan kewenangan. Namun persoalan mulai muncul ketika jarak antara pemilik dan pengendali menjadi terlalu jauh. Pada titik tertentu, sistem dapat tetap mengakui pemilik secara formal, tetapi semakin sedikit memberi ruang bagi pemilik untuk memengaruhi arah operasional sistem.

Dalam konteks negara, persoalan tersebut menjadi sangat penting karena negara bukan sekadar organisasi biasa. Negara memiliki kewenangan

membuat hukum, memungut pajak, mengelola sumber daya alam, menentukan arah pembangunan, bahkan menggunakan instrumen pemaksaan yang sah. Karena itu hubungan antara pemilik dan pengendali negara tidak dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata. Hubungan tersebut merupakan inti dari kedaulatan.

Secara normatif, Indonesia tidak memiliki masalah dalam hal ini. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Tidak ada pasal yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan partai politik. Tidak ada pasal yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan *elite* tertentu. Tidak ada pasal yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan pejabat negara. Secara konstitusional, rakyat tetap menjadi pemilik sah negara.

Namun pembahasan sepanjang BAB 9 menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada tingkat normatif. Persoalannya terletak pada bagaimana kedaulatan tersebut dijalankan dalam praktik. Rakyat memilih, tetapi tidak secara langsung mencalonkan. Rakyat memberikan legitimasi, tetapi akses menuju legitimasi tersebut melewati gerbang tertentu. Rakyat menjadi sumber kekuasaan, tetapi distribusi kekuasaan bergerak melalui struktur yang semakin kompleks.

Dalam perspektif sistem, kondisi seperti ini dapat menghasilkan paradoks yang menarik. Pemilik tetap diakui. Nama pemilik tetap tercantum dalam dokumen resmi. Seluruh sistem bahkan mengklaim bekerja atas nama pemilik. Namun kemampuan pemilik untuk mengendalikan arah sistem secara langsung

semakin terbatas. Kedaulatan tetap ada secara hukum, tetapi ruang operasionalnya menyempit.

Analogi yang digunakan sejak awal buku dapat membantu menjelaskan situasi ini. Bayangkan sebuah sistem digital yang dimiliki oleh seseorang. Nama pemilik tercatat dengan jelas. Sertifikat kepemilikan juga lengkap. Namun seluruh akses menuju konfigurasi utama sistem berada pada *administrator* lain. Pemilik dapat menggunakan sistem. Pemilik dapat menikmati hasil sistem. Akan tetapi perubahan-perubahan penting hanya dapat dilakukan melalui lapisan-lapisan yang tidak secara langsung berada dalam kendali pemilik. Dalam kondisi seperti itu, kepemilikan masih ada, tetapi pengendalian menjadi persoalan yang berbeda.

Persis di sinilah letak kegelisahan yang menjadi dasar bab ini. Kegelisahan tersebut bukan tentang ada atau tidaknya demokrasi. Bukan pula tentang ada atau tidaknya pemilu. Kegelisahan tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah rakyat hanya menjadi sumber legitimasi, atau juga menjadi pengendali sistem. Sebab keduanya tidak selalu identik.

Dalam BAB 8 telah dijelaskan bahwa perubahan *firmware* negara mengubah jalur kedaulatan. Dalam BAB 9 diperlihatkan bagaimana jalur tersebut semakin bergantung pada mekanisme kepartaian. Akibatnya, hubungan antara rakyat dan kekuasaan tidak lagi sesederhana hubungan antara pemilik dan pelaksana mandat sebagaimana dalam desain awal UUD NRI Tahun 1945. Di antara keduanya kini terdapat berbagai lapisan yang menentukan siapa dapat masuk ke arena

kekuasaan, siapa dapat menjadi kandidat, dan siapa memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan seruan untuk menghapus partai politik atau menolak sistem perwakilan. Negara modern membutuhkan mekanisme representasi. Negara dengan jumlah penduduk ratusan juta orang tidak mungkin dijalankan melalui keterlibatan langsung seluruh warga negara dalam setiap keputusan. Persoalannya bukan pada keberadaan perantara, melainkan pada keseimbangan hubungan antara pemilik dan perantara tersebut.

Semakin besar kekuasaan perantara, semakin penting memastikan bahwa perantara tetap bertindak sebagai pelaksana kehendak pemilik, bukan sebagai pengganti pemilik. Dalam konteks negara, partai politik, parlemen, birokrasi, dan berbagai institusi lainnya pada dasarnya adalah instrumen. Seluruh instrumen tersebut dibentuk untuk melayani rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Ketika instrumen mulai menjadi pusat orientasi sistem, maka arah hubungan tersebut berpotensi terbalik.

Di sinilah tesis besar BAB 9 mulai terlihat dengan jelas. Persoalan utama bukan hilangnya kedaulatan rakyat secara normatif. Persoalan utama adalah kemungkinan terjadinya reduksi kedaulatan rakyat pada tingkat operasional. Rakyat tetap diakui sebagai pemilik negara, tetapi kendali terhadap jalur-jalur utama distribusi kekuasaan semakin banyak bergerak

melalui institusi yang tidak secara langsung berada dalam kendali rakyat.

Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi sangat mendasar yaitu apakah kondisi tersebut masih mencerminkan cita-cita kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan sila keempat Pancasila. Ataukah telah terjadi jarak yang semakin lebar antara pemilik negara dan mekanisme yang menjalankan negara atas namanya.

Pertanyaan tersebut tidak dijawab secara final dalam bab ini. Sebab tujuan utama BAB 9 bukan memberikan putusan, melainkan membangun kesadaran sistemik. Kesadaran bahwa dalam setiap negara selalu terdapat perbedaan antara kepemilikan dan pengendalian. Kesadaran bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang hak memilih, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan akses menuju pilihan tersebut. Dan kesadaran bahwa sebuah bangsa perlu terus mengevaluasi apakah pemilik sah negara masih benar-benar mengendalikan sistem yang mengatasnamakan dirinya.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu masalah utama dalam sistem pasca-amandemen bukan hilangnya kedaulatan rakyat secara normatif, melainkan potensi terjadinya pemisahan antara *ownership* dan *control*. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara, tetapi jalur operasional menuju kekuasaan semakin dimediasi oleh struktur-struktur yang mengendalikan akses kekuasaan. Ketika pemilik tidak lagi sepenuhnya mengendalikan sistem yang dimilikinya, maka pertanyaan tentang kedaulatan

rakyat harus diajukan kembali secara lebih jujur, lebih mendalam, dan lebih sistemik.

BAB 10
KETIKA ROOT ACCESS DIBAJAK

10.1. *Root Owner* dan Root Access

Dalam BAB 3 telah dijelaskan bahwa rakyat adalah *root owner* negara. Istilah ini diambil dari dunia teknologi untuk membantu menjelaskan konsep kedaulatan rakyat secara lebih konkret. Dalam sebuah sistem digital, *root owner* adalah pemilik tertinggi yang memiliki hak sah atas keseluruhan sistem. Seluruh komponen sistem bekerja atas nama pemilik tersebut. Tidak ada pengguna, *administrator*, atau aplikasi yang memiliki legitimasi lebih tinggi daripada pemilik sistem.

Namun dalam praktik, kepemilikan saja tidak selalu cukup. Sebuah sistem dapat dimiliki oleh seseorang, tetapi belum tentu dapat dikendalikan oleh orang yang sama. Di sinilah muncul konsep kedua yang sangat penting, yaitu *root access*. Jika *root owner* berbicara tentang siapa yang memiliki sistem, maka *root access* berbicara tentang siapa yang dapat mengendalikan sistem.

Perbedaan antara keduanya terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Dalam dunia teknologi, seorang pemilik perangkat dapat membeli komputer, server, atau *platform* digital secara sah. Nama pemilik tercatat dalam dokumen. Seluruh bukti kepemilikan tersedia. Akan tetapi jika akses *administrator* utama berada pada pihak lain, maka pemilik tersebut tidak dapat mengubah konfigurasi penting, tidak dapat menentukan aturan operasional,

dan tidak dapat mengendalikan arah perkembangan sistem secara penuh. Kepemilikan tetap ada, tetapi pengendalian berada di tempat yang berbeda.

Prinsip yang sama dapat digunakan untuk memahami hubungan antara rakyat dan negara. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Seluruh lembaga negara memperoleh legitimasi dari rakyat. Seluruh pejabat negara mengatasnamakan rakyat. Seluruh instrumen pemerintahan dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat. Dalam pengertian ini, rakyat adalah *root owner* negara. Namun muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah rakyat juga memiliki *root access* terhadap negara yang dimilikinya.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah pembahasan pada BAB 8 dan BAB 9. Dalam BAB 8 telah dijelaskan bahwa *firmware* negara mengalami perubahan melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam BAB 9 telah diperlihatkan bahwa jalur distribusi kekuasaan semakin bergantung pada mekanisme kepartaian, proses pencalonan, gatekeeping, dan berbagai lapisan akses kekuasaan lainnya. Seluruh pembahasan tersebut mengarah pada satu isu yang sama, yaitu hubungan antara kepemilikan dan pengendalian.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap bahwa kepemilikan otomatis menghasilkan kendali. Pemilik rumah dianggap mengendalikan rumahnya. Pemilik kendaraan dianggap mengendalikan kendaraannya. Pemilik perusahaan dianggap mengendalikan perusahaannya.

Namun dalam sistem yang kompleks, hubungan tersebut tidak selalu sesederhana itu.

Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh jutaan pemegang saham, tetapi keputusan strategis ditentukan oleh kelompok yang jauh lebih kecil. Sebuah *platform* digital dapat digunakan oleh jutaan pengguna, tetapi seluruh konfigurasi inti ditentukan oleh segelintir *administrator*. Sebuah organisasi dapat mengatasnamakan seluruh anggota, tetapi pengambilan keputusan sehari-hari berada pada lingkaran tertentu yang mengendalikan akses.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara status pemilik dan posisi pengendali. Pemilik memiliki legitimasi. Pengendali memiliki akses. Ketika keduanya berada pada tangan yang sama, sistem berjalan sesuai dengan prinsip kepemilikan. Ketika keduanya terpisah, muncul potensi ketegangan antara kepentingan pemilik dan kepentingan pengendali.

Dalam konteks negara, persoalan ini menjadi jauh lebih serius. Negara bukan sekadar organisasi administratif. Negara memiliki kewenangan membentuk hukum, mengatur kehidupan publik, mengelola sumber daya alam, memungut pajak, mengatur anggaran, serta menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan negara bukanlah pertanyaan teknis, melainkan pertanyaan tentang kedaulatan.

Secara normatif, jawaban terhadap pertanyaan tersebut tampak sederhana. Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi

pembacaan sistemik mengharuskan perhatian tidak berhenti pada rumusan normatif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kedaulatan tersebut diterjemahkan menjadi akses nyata terhadap pengambilan keputusan.

Di sinilah konsep *root access* menjadi sangat penting. Dalam dunia teknologi, *root access* memungkinkan pemilik atau *administrator* tertinggi melakukan perubahan mendasar terhadap sistem. Dengan akses tersebut, seseorang dapat mengubah konfigurasi, memperbaiki kesalahan desain, menghapus aturan yang bermasalah, atau membangun fungsi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan sistem. Sebaliknya, pengguna biasa hanya dapat menggunakan fitur yang telah disediakan. Pengguna dapat memilih menu yang tersedia, tetapi tidak menentukan struktur menu. Pengguna dapat menjalankan fungsi yang diizinkan, tetapi tidak mengubah arsitektur sistem. Dengan kata lain, pengguna berpartisipasi dalam sistem tanpa mengendalikan sistem.

Analogi ini menjadi sangat menarik ketika diterapkan pada kehidupan bernegara. Rakyat memilih dalam pemilu. Rakyat membayar pajak. Rakyat menjadi sumber legitimasi seluruh lembaga negara. Namun sejauh mana rakyat dapat mengubah konfigurasi dasar sistem yang mengatur kehidupannya. Sejauh mana rakyat memiliki akses terhadap proses yang menentukan siapa dapat menjadi kandidat. Sejauh mana rakyat dapat menentukan arah pembangunan nasional. Sejauh mana rakyat dapat mengoreksi desain

sistem ketika sistem tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan tujuan awal bangsa.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak muncul karena keraguan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Justru sebaliknya. Pertanyaan tersebut muncul karena buku ini menerima sepenuhnya bahwa rakyat adalah pemilik sah negara. Karena rakyat adalah pemilik sah negara, maka persoalan akses menjadi sangat penting. Sebab kepemilikan yang tidak disertai kemampuan mengendalikan berisiko berubah menjadi simbol semata.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, hubungan antara kepemilikan dan akses tidak boleh dipisahkan. Kerakyatan bukan sekadar pengakuan simbolik terhadap rakyat. Kerakyatan menuntut agar rakyat tetap menjadi pusat orientasi sistem dan tetap memiliki hubungan yang nyata dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan atas namanya.

Oleh karena itu, pembahasan dalam BAB 10 tidak lagi berfokus pada apakah rakyat adalah pemilik negara. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh konstitusi. Fokus pembahasan bergeser kepada persoalan yang lebih mendasar yaitu apakah rakyat sebagai pemilik negara juga memiliki akses yang memadai untuk mengendalikan arah sistem negara.

Inilah pertanyaan yang akan menjadi benang merah seluruh bab ini.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu kepemilikan dan pengendalian adalah dua hal yang berbeda. Rakyat dapat tetap menjadi *root owner* negara secara konstitusional, tetapi belum tentu memiliki *root access* terhadap sistem yang dijalankan atas nama rakyat. Ketika kepemilikan tidak lagi disertai akses yang memadai terhadap pengendalian sistem, maka kedaulatan rakyat berisiko berubah dari kekuasaan yang nyata menjadi pengakuan yang bersifat formal semata.

10.2. Negara Milik Rakyat Secara Formal

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kemungkinan terjadinya pembajakan *root access* dalam sistem ketatanegaraan, satu hal harus ditegaskan terlebih dahulu yaitu secara hukum dan konstitusional, negara Indonesia adalah milik rakyat. Pernyataan ini bukan opini, bukan tafsir ideologis, dan bukan pula kesimpulan yang dibangun dari preferensi tertentu. Pernyataan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi konstitusi Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini menempatkan rakyat pada posisi yang sangat istimewa dalam struktur negara. Tidak ada lembaga negara yang berada di atas rakyat. Tidak ada pejabat negara yang menjadi sumber legitimasi bagi rakyat. Justru seluruh lembaga dan seluruh pejabat memperoleh legitimasi

karena rakyat menjadi sumber kedaulatan yang melahirkan keberadaan mereka.

Dalam ilmu ketatanegaraan, prinsip ini merupakan salah satu ciri utama negara demokratis. Kekuasaan negara tidak dianggap berasal dari keturunan, tidak berasal dari kelompok bangsawan, tidak berasal dari kekuatan militer, dan tidak berasal dari kelompok ekonomi tertentu. Kekuasaan negara dianggap berasal dari rakyat. Karena itu seluruh kekuasaan yang dijalankan oleh negara pada dasarnya adalah kekuasaan yang dipinjamkan oleh rakyat melalui mekanisme konstitusional.

Pandangan tersebut sejalan dengan seluruh perjalanan pemikiran yang telah dibangun sejak bagian awal buku ini. Dalam BAB 1 telah dijelaskan bahwa bangsa dan negara bukanlah hal yang sama. Bangsa hadir lebih dahulu daripada negara. Negara lahir sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk mengelola kehidupan bangsa. Dengan demikian, negara bukan pencipta rakyat. Negara bukan pemilik rakyat. Sebaliknya, rakyatlah yang menjadi alasan keberadaan negara.

Dalam BAB 4 dan BAB 5 juga telah diperlihatkan bahwa peradaban Nusantara telah ada jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Berbagai kerajaan, komunitas adat, jaringan perdagangan, jaringan spiritual, dan sistem sosial telah tumbuh berabad-abad sebelum negara modern Indonesia terbentuk. Artinya, keberadaan rakyat Nusantara tidak bergantung pada keberadaan negara Indonesia. Justru negara Indonesia

dibangun di atas fondasi masyarakat dan peradaban yang telah lebih dahulu ada.

Karena itu, ketika Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada tahun 1945, yang lahir bukanlah rakyat Indonesia. Yang lahir adalah negara Indonesia. Bangsa telah ada. Masyarakat telah ada. Peradaban telah ada. Negara hadir sebagai wadah yang mengorganisasi seluruh unsur tersebut ke dalam satu kesatuan nasional. Dari perspektif ini, sangat logis apabila rakyat ditempatkan sebagai pemilik sah negara.

Dalam analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, negara dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang dibangun untuk melayani pemiliknya. Konstitusi adalah *firmware* yang mengatur cara sistem bekerja. Lembaga negara adalah komponen-komponen operasional yang menjalankan fungsi tertentu. Pemerintah adalah operator yang mengelola aktivitas sehari-hari. Namun seluruh sistem tersebut pada akhirnya bekerja atas nama pemilik yang sama, yaitu rakyat.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rakyat adalah pemegang saham tunggal negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki bagian yang sama dalam kedaulatan nasional. Tidak ada kelompok yang memiliki kedaulatan lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Tidak ada organisasi yang memiliki hak kepemilikan lebih besar daripada rakyat secara keseluruhan. Seluruh institusi negara memperoleh legitimasi dari sumber yang sama, yaitu rakyat.

Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai simbol kenegaraan. Pajak dipungut atas nama rakyat.

Anggaran negara disusun atas nama rakyat. Program pembangunan dilaksanakan atas nama rakyat. Pemilihan umum dilaksanakan atas nama rakyat. Bahkan sumpah jabatan para pejabat negara pada hakikatnya merupakan komitmen untuk menjalankan amanah rakyat. Hampir seluruh aktivitas negara selalu menggunakan rakyat sebagai sumber legitimasi utama.

Namun di sinilah muncul persoalan yang menarik untuk dicermati. Jika seluruh sistem mengakui bahwa rakyat adalah pemilik negara, mengapa sering muncul perasaan bahwa negara terasa jauh dari rakyat. Mengapa banyak warga negara merasa tidak memiliki pengaruh yang cukup terhadap arah kebijakan. Mengapa banyak keputusan penting terasa berada di luar jangkauan masyarakat biasa. Mengapa sebagian masyarakat memandang kehidupan bernegara sebagai urusan kelompok tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menghapus fakta bahwa rakyat adalah pemilik negara. Sebaliknya, pertanyaan tersebut justru memperlihatkan adanya jarak antara kepemilikan formal dan pengalaman praktis yang dirasakan oleh masyarakat. Secara hukum, rakyat adalah pemilik. Secara konstitusional, rakyat adalah sumber kedaulatan. Namun dalam praktik, hubungan antara rakyat dan negara sering kali tidak terasa sesederhana hubungan antara pemilik dan miliknya.

Dalam dunia teknologi, kondisi seperti ini bukan sesuatu yang asing. Seseorang dapat memiliki sebuah sistem secara sah, tetapi mengalami kesulitan untuk

mengendalikan sistem tersebut. Dokumen kepemilikan tetap lengkap. Status pemilik tetap tidak berubah. Namun akses terhadap konfigurasi inti, mekanisme pengambilan keputusan, dan arah pengembangan sistem berada pada lapisan yang tidak mudah dijangkau. Secara formal kepemilikan tetap ada, tetapi pengalaman praktisnya berbeda.

Fenomena serupa dapat muncul dalam kehidupan bernegara. Rakyat tetap menjadi pemilik secara formal. Konstitusi tetap mengakui kedaulatan rakyat. Seluruh pejabat tetap memperoleh legitimasi dari rakyat. Akan tetapi, semakin kompleks jalur distribusi kekuasaan, semakin banyak lapisan yang memisahkan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Pada titik tertentu, kepemilikan dapat tetap diakui tanpa disertai kemampuan yang sebanding untuk mengendalikan arah sistem.

Di sinilah pentingnya membedakan antara pengakuan formal dan pengendalian operasional. Pengakuan formal menjawab pertanyaan tentang siapa pemilik negara. Pengendalian operasional menjawab pertanyaan tentang siapa yang benar-benar mengendalikan jalannya sistem negara. Kedua pertanyaan tersebut tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama.

Pembahasan pada subbab ini sengaja menegaskan kembali posisi rakyat sebagai pemilik sah negara. Sebab tanpa pemahaman tersebut, kritik terhadap sistem dapat dengan mudah disalahpahami sebagai penolakan terhadap konstitusi atau penolakan terhadap prinsip demokrasi. Padahal yang sedang

dipersoalkan bukan kepemilikannya. Kepemilikan rakyat atas negara justru diterima sepenuhnya sebagai titik berangkat analisis.

Persoalan yang akan dibahas pada subbab-subbab berikutnya adalah sesuatu yang berbeda. Persoalannya bukan apakah rakyat memiliki negara. Persoalannya adalah apakah rakyat memiliki akses yang cukup untuk mengendalikan negara yang dimilikinya. Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu secara formal, konstitusional, dan filosofis, negara Indonesia adalah milik rakyat. Seluruh legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat. Seluruh lembaga negara bekerja atas nama rakyat. Seluruh instrumen pemerintahan memperoleh kewenangannya dari rakyat. Namun pengakuan formal terhadap kepemilikan tersebut belum otomatis menjawab persoalan mengenai siapa yang mengendalikan sistem negara dalam praktik. Pertanyaan mengenai pengendalian itulah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

10.3. Dari Pemilik Menjadi Pengguna

Salah satu paradoks terbesar dalam kehidupan bernegara modern adalah kenyataan bahwa seseorang dapat menjadi pemilik suatu sistem tanpa benar-benar mengendalikan sistem tersebut. Paradoks inilah yang mulai tampak ketika konsep kedaulatan rakyat dibandingkan dengan praktik ketatanegaraan sehari-hari. Secara konstitusional rakyat adalah pemilik negara. Secara formal rakyat adalah sumber legitimasi seluruh kekuasaan negara. Namun dalam praktik,

hubungan antara rakyat dan negara sering kali lebih menyerupai hubungan antara pengguna dan sistem daripada hubungan antara pemilik dan miliknya.

Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang langsung mengubah rakyat dari pemilik menjadi pengguna. Perubahan tersebut berlangsung perlahan melalui berbagai lapisan mekanisme yang semakin memisahkan rakyat dari pusat-pusat pengambilan keputusan. Setiap lapisan tampak wajar jika dilihat secara terpisah. Namun ketika seluruh lapisan tersebut digabungkan, muncul sebuah struktur yang menghasilkan jarak yang semakin lebar antara rakyat sebagai pemilik dan negara sebagai sistem yang dijalankan atas nama rakyat.

Dalam BAB 9 telah dibahas bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak secara langsung menentukan siapa yang dapat menjadi kandidat. Proses pencalonan berada dalam ruang yang berbeda dari ruang pemilihan. Dengan demikian, rakyat memang berpartisipasi dalam tahap akhir distribusi kekuasaan, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan tahap awal yang menentukan ruang pilihan yang tersedia.

Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh bagaimana ruang kendali rakyat menjadi lebih sempit daripada yang tampak di permukaan. Hak memilih tetap ada. Kebebasan memilih tetap ada. Namun pilihan yang tersedia telah melalui berbagai proses penyaringan sebelum sampai kepada rakyat. Akibatnya, rakyat tidak lagi berhadapan dengan ruang kemungkinan yang

terbuka sepenuhnya, melainkan dengan ruang pilihan yang telah dibentuk oleh mekanisme tertentu.

Jika dianalogikan dengan sebuah rumah, situasinya menjadi lebih mudah dipahami. Bayangkan seseorang memiliki sebuah rumah yang dibangun dengan uang, tenaga, dan hak kepemilikannya sendiri. Secara hukum rumah tersebut benar-benar miliknya. Sertifikat berada atas namanya. Seluruh biaya perawatan juga ditanggung olehnya. Namun setiap kali ingin melakukan perubahan penting terhadap rumah tersebut, keputusan harus melewati berbagai pihak lain. Pemilik tidak menentukan siapa yang mengelola rumah. Pemilik tidak menentukan aturan dasar rumah. Pemilik bahkan tidak menentukan siapa yang boleh mengajukan perubahan terhadap desain rumah. Pada akhirnya pemilik hanya diperbolehkan memilih warna cat dari beberapa pilihan yang telah disediakan.

Dalam situasi seperti itu, kepemilikan tetap ada. Akan tetapi pengalaman yang dirasakan tidak lagi mencerminkan posisi sebagai pemilik penuh. Hubungan yang muncul lebih menyerupai hubungan antara pengguna dengan layanan yang telah dikonfigurasi oleh pihak lain.

Analogi tersebut sangat relevan untuk memahami hubungan antara rakyat dan negara dalam sistem pemerintahan modern. Rakyat membiayai negara melalui pajak. Rakyat memberikan legitimasi melalui pemilu. Rakyat menjadi dasar keberadaan seluruh lembaga negara. Namun semakin banyak keputusan strategis yang berada pada ruang yang tidak secara langsung dapat diakses oleh rakyat. Pada titik

tertentu, rakyat lebih banyak berperan sebagai pengguna yang memilih dari opsi yang tersedia daripada sebagai pemilik yang menentukan arah sistem.

Perlu ditegaskan bahwa pembahasan ini bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki pengaruh. Dalam negara demokratis, suara rakyat tetap memiliki arti yang besar. Pergantian pemerintahan tetap dapat terjadi melalui mekanisme konstitusional. Kritik publik tetap dapat memengaruhi kebijakan. Aspirasi masyarakat tetap dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Semua itu merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus diakui secara objektif.

Namun persoalan yang sedang dibahas bukan ada atau tidaknya pengaruh. Persoalannya adalah tingkat kendali. Pengaruh dan kendali bukan hal yang sama. Seseorang dapat memengaruhi sebuah keputusan tanpa mengendalikan proses yang menghasilkan keputusan tersebut. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan proses sering kali memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam menentukan hasil akhirnya.

Dalam dunia teknologi, perbedaan ini sangat jelas. Pengguna aplikasi dapat memberikan masukan, mengirim umpan balik, atau memilih fitur tertentu. Namun pengguna tidak mengendalikan kode sumber aplikasi tersebut. Pengguna tidak menentukan arsitektur sistem. Pengguna tidak menentukan aturan dasar yang mengatur seluruh operasi aplikasi. Dengan kata lain, pengguna berpartisipasi tanpa memiliki kendali penuh.

Ketika analogi tersebut diterapkan pada kehidupan bernegara, muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah rakyat hanya berpartisipasi dalam negara, atau benar-benar mengendalikan negara. Apakah rakyat hanya memilih dari pilihan yang tersedia, atau memiliki kemampuan menentukan pilihan yang tersedia. Apakah rakyat hanya menggunakan sistem yang telah dibangun oleh pihak lain, atau tetap menjadi pusat pengendali sistem tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting karena kedaulatan rakyat pada hakikatnya bukan sekadar hak untuk berpartisipasi. Kedaulatan rakyat adalah prinsip bahwa rakyat merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Jika otoritas tertinggi tersebut semakin sulit diterjemahkan ke dalam kendali nyata terhadap arah sistem, maka muncul risiko terjadinya pemisahan antara kepemilikan formal dan pengalaman praktis yang dirasakan masyarakat.

Dalam BAB 6 telah dijelaskan bahwa Pancasila menempatkan kerakyatan sebagai salah satu prinsip fundamental kehidupan berbangsa. Kerakyatan tidak hanya berarti rakyat hadir dalam prosedur pengambilan keputusan. Kerakyatan juga berarti rakyat menjadi pusat orientasi dan pusat kendali dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, setiap gejala yang menunjukkan semakin menyempitnya ruang kendali rakyat perlu dibaca sebagai persoalan serius dalam arsitektur negara.

Salah satu gejala yang paling mudah dikenali adalah munculnya perasaan bahwa kehidupan bernegara merupakan urusan orang lain. Banyak warga negara mulai memandang negara sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Kebijakan terasa datang dari atas. Keputusan terasa dibuat oleh kelompok tertentu. Ruang untuk memengaruhi arah negara terasa semakin sempit. Ketika perasaan semacam ini semakin meluas, yang sesungguhnya sedang terjadi bukan sekadar sikap tidak peduli terhadap kehidupan bernegara, melainkan melemahnya rasa memiliki dan rasa berdaya sebagai pemegang kedaulatan. Yang sedang terjadi adalah perubahan psikologis dari posisi pemilik menjadi posisi pengguna.

Pemilik merasa memiliki tanggung jawab sekaligus hak untuk menentukan arah sistem. Pengguna cenderung hanya menyesuaikan diri dengan sistem yang telah tersedia. Pemilik berpikir tentang desain. Pengguna berpikir tentang penggunaan. Pemilik berhak mengubah aturan dasar. Pengguna hanya mengikuti aturan yang telah ditentukan.

Di sinilah letak bahaya yang ingin disoroti dalam subbab ini. Bukan karena rakyat kehilangan seluruh haknya, melainkan karena rakyat perlahan dapat terbiasa menempati posisi sebagai pengguna dalam negara yang secara konstitusional merupakan miliknya sendiri. Ketika keadaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar, jarak antara kedaulatan formal dan kedaulatan substantif dapat semakin melebar.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu rakyat tetap merupakan pemilik sah

negara secara konstitusional, tetapi berbagai lapisan mekanisme kelembagaan dapat menyebabkan ruang kendali rakyat semakin menyempit. Dalam kondisi seperti itu, rakyat berisiko bergeser dari posisi pemilik yang menentukan arah sistem menjadi pengguna yang hanya memilih dari opsi yang telah disediakan. Ketika proses tersebut berlangsung terus-menerus, kedaulatan rakyat dapat tetap hidup sebagai prinsip formal, tetapi kehilangan sebagian maknanya sebagai kekuasaan yang nyata dalam praktik kehidupan bernegara.

10.4. *Access Denied*

Dalam dunia teknologi terdapat sebuah pesan yang sangat dikenal oleh para pengguna komputer dan *administrator* sistem, yaitu *Access Denied* atau *Permission Denied*. Pesan tersebut muncul ketika seseorang berusaha memasuki ruang tertentu, menggunakan fungsi tertentu, atau melakukan perubahan tertentu, tetapi sistem menolak akses yang diminta. Penolakan tersebut tidak selalu berarti orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan sistem. Dalam banyak kasus, pengguna yang ditolak justru merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Masalahnya bukan pada keberadaan pengguna, melainkan pada hak akses yang dimilikinya.

Analogi ini sangat menarik ketika digunakan untuk memahami hubungan antara rakyat dan negara. Sebagaimana telah dibahas pada subbab-subbab sebelumnya, rakyat secara konstitusional adalah pemilik negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Seluruh lembaga negara memperoleh legitimasi dari

rakyat. Seluruh kekuasaan dijalankan atas nama rakyat. Namun ketika pembahasan bergerak dari wilayah kepemilikan menuju wilayah akses, muncul pertanyaan yang jauh lebih kompleks yaitu apakah rakyat memiliki akses yang memadai terhadap sistem yang secara formal dimilikinya.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena dalam praktik kehidupan bernegara, tidak semua bentuk partisipasi memiliki tingkat pengaruh yang sama. Sebagian akses terbuka lebar bagi rakyat, sementara sebagian lainnya berada di balik berbagai lapisan mekanisme yang sulit dijangkau. Akibatnya, muncul situasi di mana rakyat tetap diakui sebagai pemilik kedaulatan, tetapi menghadapi berbagai hambatan ketika ingin menggunakan kedaulatan tersebut secara lebih substantif.

Salah satu contoh yang paling jelas dapat ditemukan dalam proses pencalonan pemimpin nasional. Sebagaimana telah dibahas dalam BAB 9, rakyat dapat memilih presiden secara langsung. Namun ketika rakyat ingin menentukan siapa yang dapat menjadi calon presiden, ruang akses tersebut tidak berada sepenuhnya di tangan rakyat. Terdapat mekanisme pencalonan yang harus dilewati terlebih dahulu. Dengan kata lain, akses terhadap tahap yang sangat menentukan dalam distribusi kekuasaan berada dalam ruang yang berbeda dari ruang pemilihan umum.

Dalam perspektif sistem, kondisi tersebut menyerupai situasi ketika pengguna memiliki hak menggunakan sebuah aplikasi, tetapi tidak memiliki izin untuk mengubah konfigurasi utamanya. Pengguna dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang telah disediakan. Namun ketika ingin mengakses pengaturan inti, sistem memberikan respons yang sama yaitu *Access Denied*.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara lainnya. Rakyat dapat menyampaikan aspirasi, tetapi tidak selalu menentukan agenda yang dibahas. Rakyat dapat memberikan suara, tetapi tidak selalu menentukan struktur pilihan yang tersedia. Rakyat dapat mendukung perubahan, tetapi tidak selalu memiliki jalur yang efektif untuk menginisiasi perubahan tersebut. Secara formal ruang partisipasi tetap ada, tetapi akses terhadap titik-titik strategis dalam sistem sering kali jauh lebih terbatas.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan berarti seluruh akses rakyat telah tertutup. Indonesia tetap memiliki berbagai mekanisme demokratis yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam kehidupan publik. Kebebasan berpendapat, pemilihan umum, organisasi masyarakat, media, dan berbagai saluran partisipasi lainnya tetap merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun persoalan yang sedang dibahas bukan ada atau tidaknya akses sama sekali. Persoalannya adalah tingkatan akses.

Dalam dunia teknologi, terdapat perbedaan besar antara pengguna biasa dan pengguna dengan hak *administrator*. Keduanya sama-sama dapat masuk ke dalam sistem. Keduanya sama-sama dapat menggunakan sistem. Namun hanya salah satu yang memiliki kemampuan untuk mengubah konfigurasi inti. Perbedaan tersebut menghasilkan tingkat kendali yang sangat berbeda meskipun keduanya berada dalam sistem yang sama.

Ketika analogi tersebut diterapkan pada kehidupan bernegara, muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindari yaitu apakah rakyat memiliki akses terhadap konfigurasi dasar negara atau hanya memiliki akses terhadap fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh sistem. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika berbagai keputusan strategis tampak berada jauh dari jangkauan masyarakat biasa.

Dalam BAB 8 telah dijelaskan bahwa amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah *firmware* negara. Dalam BAB 9 diperlihatkan bagaimana jalur distribusi kekuasaan semakin bergantung pada mekanisme kepartaian. Salah satu konsekuensi dari perubahan tersebut adalah bertambahnya lapisan-lapisan yang memisahkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan. Setiap lapisan mungkin memiliki alasan fungsionalnya sendiri. Namun semakin banyak lapisan yang harus dilalui, semakin besar pula jarak antara pemilik dan pengendali sistem.

Situasi seperti ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dalam kehidupan bernegara yang tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Banyak warga negara merasa memiliki hak atas negara, tetapi tidak merasa memiliki pengaruh yang cukup terhadap arah negara. Banyak masyarakat merasa menjadi bagian dari sistem, tetapi tidak merasa dapat mengubah sistem tersebut. Perasaan tersebut bukan semata-mata persoalan psikologis. Perasaan tersebut sering kali lahir dari pengalaman nyata ketika akses terhadap ruang-ruang strategis terasa semakin terbatas.

Dalam konteks inilah istilah *Access Denied* menjadi metafora yang kuat. Bukan karena rakyat benar-benar dilarang memasuki negara yang dimilikinya. Bukan pula karena seluruh jalur partisipasi ditutup. Metafora tersebut menggambarkan keadaan ketika akses terhadap lapisan-lapisan yang paling menentukan dalam sistem tidak berada dalam jangkauan yang sama dengan pengakuan formal yang diberikan kepada rakyat sebagai pemilik negara.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan konsep *political alienation* yang akan dibahas pada subbab berikutnya. Ketika seseorang terus-menerus menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem yang secara formal dimilikinya, perlahan muncul perasaan bahwa sistem tersebut bukan lagi miliknya. Bukan karena kepemilikannya dicabut, melainkan karena akses terhadap kendali semakin sulit dijangkau. Dari sinilah lahir jarak antara rakyat dan negara.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, persoalan akses menjadi sangat penting. Kerakyatan tidak cukup diukur dari keberadaan hak formal. Kerakyatan juga harus diukur dari kemampuan rakyat untuk memengaruhi arah sistem yang bekerja atas nama rakyat. Semakin besar jarak antara rakyat dan pusat pengambilan keputusan, semakin besar kebutuhan untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut masih mencerminkan semangat kerakyatan yang menjadi dasar negara.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu kedaulatan rakyat tidak selalu hilang melalui pencabutan hak secara terbuka. Dalam banyak kasus, kedaulatan dapat mengalami penyempitan melalui pembatasan akses terhadap jalur-jalur strategis yang menentukan arah negara. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara, tetapi ketika akses terhadap konfigurasi dasar sistem semakin sulit dijangkau, muncul situasi yang dapat digambarkan dengan satu pesan sederhana dalam dunia teknologi yaitu *Access Denied*. Dalam kondisi seperti itu, persoalan utama bukan lagi siapa pemilik negara, melainkan siapa yang sesungguhnya memiliki akses untuk mengendalikan negara tersebut.

10.5. *Political Alienation*

Salah satu dampak paling serius dari semakin lebarnya jarak antara rakyat dan pusat-pusat pengambilan keputusan adalah munculnya alienasi kekuasaan. Alienasi kekuasaan bukan sekadar ketidaksukaan terhadap pemerintah, bukan pula sekadar kekecewaan terhadap partai atau hasil pemilu. Alienasi kekuasaan adalah keadaan ketika rakyat mulai merasa bahwa negara bukan lagi sesuatu yang benar-benar dimiliki dan dapat dipengaruhi. Negara tetap ada. Pemerintahan tetap berjalan. Pemilu tetap berlangsung. Namun, hubungan emosional, psikologis, dan substantif antara rakyat dan negara perlahan melemah.

Fenomena ini tidak muncul dalam satu malam. Alienasi kekuasaan biasanya tumbuh secara perlahan

melalui pengalaman yang berulang. Masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi merasa tidak didengar. Masyarakat mengikuti pemilu, tetapi merasa hasil akhirnya tidak banyak mengubah kehidupan sehari-hari. Masyarakat melihat pergantian pejabat, pergantian partai, bahkan pergantian pemerintahan, tetapi berbagai persoalan mendasar tetap terasa hadir dari waktu ke waktu. Dari pengalaman-pengalaman seperti itulah muncul kesan bahwa proses pengambilan keputusan negara berlangsung dalam ruang yang berbeda dari kehidupan rakyat.

Dalam kondisi normal, rakyat memandang negara sebagai miliknya. Keberhasilan negara dirasakan sebagai keberhasilan bersama. Kegagalan negara dirasakan sebagai persoalan bersama yang perlu diperbaiki. Hubungan seperti ini menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika rasa memiliki kuat, partisipasi tidak hanya didorong oleh kepentingan sesaat, tetapi juga oleh tanggung jawab terhadap masa depan bersama.

Sebaliknya, ketika alienasi kekuasaan mulai tumbuh, negara perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa jauh. Politik dianggap sebagai urusan kelompok tertentu. Pemerintahan dianggap sebagai dunia yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga negara dipandang sebagai institusi yang bergerak dengan logikanya sendiri tanpa hubungan yang kuat dengan rakyat yang menjadi sumber legitimasinya.

Gejala seperti ini sering muncul dalam kalimat-kalimat sederhana yang terdengar biasa dalam percakapan sehari-hari.

"Politik itu urusan mereka."

"Pemerintah pasti begitu."

"Siapa pun presidennya, sama saja."

"Rakyat kecil tidak bisa mengubah apa-apa."

Kalimat-kalimat tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menggambarkan perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Di balik kalimat tersebut terdapat keyakinan bahwa hubungan antara rakyat dan negara sudah tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pemilik dan sistem yang dimilikinya. Negara mulai dipandang sebagai sesuatu yang berada di luar diri masyarakat.

Dalam perspektif sistem, alienasi kekuasaan sering kali muncul ketika terdapat jarak yang terlalu besar antara *ownership* dan *control*. Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, rakyat tetap diakui sebagai pemilik negara. Namun ketika akses terhadap pengendalian sistem terasa semakin terbatas, rasa memiliki juga mulai melemah. Pemilik yang tidak dapat memengaruhi sistem secara nyata lambat laun mulai merasa tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan sistem tersebut.

Analogi teknologi dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Bayangkan seseorang memiliki sebuah *platform* digital yang secara hukum tercatat atas namanya. Namun seluruh keputusan mengenai pengembangan *platform*, perubahan fitur, arah bisnis, dan kebijakan operasional ditentukan oleh pihak lain.

Pada awalnya pemilik mungkin masih merasa memiliki hubungan dengan *platform* tersebut. Namun jika kondisi itu berlangsung terus-menerus, rasa memiliki perlahan dapat berkurang. Secara hukum kepemilikan tetap ada, tetapi secara psikologis hubungan dengan sistem mulai melemah.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika rakyat merasa tidak memiliki pengaruh yang cukup terhadap arah kebijakan, proses pencalonan pemimpin, atau desain sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka, maka negara perlahan berubah dari sesuatu yang "milik kita" menjadi sesuatu yang "milik mereka". Perubahan satu kata tersebut tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas demokrasi.

Alienasi kekuasaan juga memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar menurunnya minat terhadap urusan kenegaraan. Dalam banyak kasus, alienasi melahirkan sikap apatis. Masyarakat menjadi enggan terlibat dalam berbagai proses kenegaraan karena merasa keterlibatan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Sebagian memilih menjauh dari diskusi publik. Sebagian kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara. Sebagian lagi memandang seluruh proses pengambilan keputusan sebagai permainan kelompok berkuasa yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan rakyat biasa.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur pemilu. Demokrasi juga membutuhkan kepercayaan bahwa

partisipasi rakyat memiliki arti. Ketika kepercayaan tersebut melemah, demokrasi dapat tetap berjalan secara administratif, tetapi kehilangan energi sosial yang membuatnya hidup.

Penting untuk dipahami bahwa alienasi kekuasaan tidak selalu disebabkan oleh perilaku individu tertentu. Alienasi sering kali merupakan gejala dari desain sistem yang menciptakan jarak antara rakyat dan pusat-pusat pengambilan keputusan. Dalam BAB 8 dan BAB 9 telah dibahas bagaimana jalur distribusi kekuasaan semakin kompleks dan semakin bergantung pada berbagai lapisan akses kekuasaan. Kompleksitas tersebut mungkin memiliki alasan fungsional. Namun pada saat yang sama, kompleksitas tersebut juga dapat memperbesar jarak antara rakyat dan negara.

Dalam konteks Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, alienasi kekuasaan merupakan persoalan yang serius. Kerakyatan mengandaikan adanya hubungan yang hidup antara rakyat dan sistem pemerintahan. Permusyawaratan mengandaikan adanya keterhubungan antara yang mewakili dan yang diwakili. Ketika hubungan tersebut melemah, maka semangat kerakyatan juga ikut mengalami erosi.

Persoalan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan tesis besar buku ini mengenai negara sebagai sistem. Sebuah sistem dapat berfungsi secara teknis, tetapi kehilangan dukungan psikologis dari para pemiliknya. Sebuah negara dapat tetap menjalankan

seluruh prosedur formal, tetapi kehilangan rasa memiliki dari rakyat yang menjadi sumber kedaulatannya. Ketika kondisi tersebut terjadi, persoalannya tidak lagi terbatas pada efektivitas pemerintahan. Persoalannya menyentuh fondasi hubungan antara rakyat dan negara.

Di sinilah alienasi kekuasaan harus dipahami bukan sebagai penyebab utama, melainkan sebagai gejala. Alienasi adalah tanda bahwa terdapat sesuatu yang tidak seimbang dalam hubungan antara pemilik dan pengendali sistem. Semakin besar jarak tersebut, semakin besar pula potensi munculnya perasaan bahwa negara bergerak tanpa keterlibatan rakyat yang sesungguhnya.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *political alienation* adalah gejala ketika rakyat mulai kehilangan rasa memiliki terhadap negara yang secara konstitusional dimilikinya. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara. Namun ketika akses terhadap pengendalian sistem semakin terbatas dan pengaruh terhadap arah negara terasa semakin kecil, muncul perasaan bahwa politik adalah urusan pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, alienasi bukan sekadar persoalan psikologis, melainkan sinyal bahwa hubungan antara kedaulatan rakyat dan praktik ketatanegaraan sedang mengalami jarak yang semakin lebar.

10.6. Demokrasi Tanpa Kepemilikan

Salah satu asumsi yang paling umum dalam kehidupan pemerintahan modern adalah bahwa keberadaan pemilu otomatis menunjukkan keberadaan kedaulatan rakyat yang utuh. Asumsi ini begitu kuat sehingga sering kali tidak lagi dipertanyakan. Ketika rakyat datang ke tempat pemungutan suara, menggunakan hak pilih, mengikuti kampanye, menyaksikan debat kandidat, dan berpartisipasi dalam proses pemilihan, maka sistem dianggap telah menjalankan prinsip demokrasi secara penuh. Namun pertanyaan yang perlu diajukan secara lebih mendalam adalah apakah partisipasi selalu identik dengan kepemilikan?

Pertanyaan ini penting karena sepanjang BAB 9 dan BAB 10 telah dibahas perbedaan antara *ownership* dan *control*. Kepemilikan berbicara tentang siapa pemilik sah sebuah sistem. Pengendalian berbicara tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah sistem tersebut. Dalam konteks negara, rakyat memang menjadi sumber legitimasi. Namun apakah legitimasi tersebut selalu disertai kemampuan yang setara untuk menentukan konfigurasi dasar sistem negara.

Dalam banyak negara demokratis, rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Tingkat partisipasi yang tinggi sering dijadikan indikator kesehatan demokrasi. Semakin banyak warga negara menggunakan hak pilihnya, semakin kuat legitimasi hasil pemilu. Ukuran ini memang penting. Akan tetapi, partisipasi hanyalah salah satu dimensi demokrasi. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang kehadiran

rakyat pada hari pemungutan suara. Demokrasi juga berbicara tentang hubungan antara rakyat dan proses pengambilan keputusan yang berlangsung setelah pemungutan suara selesai.

Di sinilah muncul persoalan yang menjadi inti subbab ini. Banyak masyarakat merasa memiliki peran yang besar selama masa kampanye dan pemilu, tetapi setelah proses tersebut berakhir, ruang pengaruh terhadap arah negara terasa semakin sempit. Rakyat diminta memilih, tetapi tidak banyak dilibatkan dalam proses pembentukan pilihan. Rakyat diminta memberikan legitimasi, tetapi tidak selalu memiliki kemampuan yang setara untuk menentukan agenda yang dijalankan setelah legitimasi tersebut diberikan.

Dalam perspektif sistem, kondisi ini dapat diibaratkan seperti pengguna yang diberikan kesempatan memilih aplikasi yang akan dijalankan, tetapi tidak memiliki hak untuk menentukan sistem operasi yang digunakan. Pengguna berpartisipasi. Pengguna membuat pilihan. Namun arsitektur yang mengatur seluruh sistem tetap berada di luar jangkauan pengguna tersebut.

Analogi lain dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah perusahaan yang mengundang seluruh pemilik saham untuk memilih direktur utama setiap beberapa tahun sekali. Pemilik saham hadir, memberikan suara, dan menentukan hasil pemilihan. Namun setelah proses itu selesai, seluruh keputusan strategis perusahaan ditentukan oleh kelompok tertentu tanpa mekanisme yang memadai untuk memastikan hubungan yang kuat dengan para

pemilik saham. Dalam situasi seperti itu, hak memilih tetap ada, tetapi rasa kepemilikan terhadap arah perusahaan dapat perlahan berkurang.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan tertentu. Akan tetapi, kepemilikan terhadap negara tidak berhenti pada pemilihan pejabat. Kepemilikan juga berkaitan dengan kemampuan untuk memengaruhi arah kebijakan, mengoreksi desain sistem, dan memastikan bahwa seluruh institusi negara tetap bergerak sesuai dengan kepentingan rakyat sebagai pemilik sah negara.

Ketika ruang-ruang tersebut semakin jauh dari jangkauan masyarakat, muncul situasi yang dapat disebut sebagai demokrasi tanpa kepemilikan. Demokrasi tetap berjalan. Pemilu tetap berlangsung. Kampanye tetap meriah. Pergantian kekuasaan tetap terjadi. Namun rakyat mulai merasa bahwa keterlibatan tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan kendali terhadap arah negara.

Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan kritik terhadap pemilu. Pemilu merupakan salah satu pencapaian penting dalam perkembangan pemerintahan modern. Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan legitimasi secara langsung. Pemilu juga menjadi mekanisme damai untuk melakukan pergantian kekuasaan. Tanpa pemilu, risiko konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali akan jauh lebih besar.

Namun pengakuan terhadap pentingnya pemilu tidak berarti bahwa pemilu merupakan satu-satunya ukuran demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar prosedur elektoral. Demokrasi membutuhkan hubungan yang hidup antara rakyat dan negara. Demokrasi membutuhkan mekanisme yang memungkinkan rakyat tidak hanya memilih pengelola sistem, tetapi juga tetap memiliki hubungan yang nyata dengan arah sistem yang dikelola atas namanya.

Dalam BAB 9 telah dibahas konsep *pseudo sovereignty*, yaitu keadaan ketika kedaulatan tampak hadir secara formal tetapi tidak sepenuhnya hadir secara substantif. Demokrasi tanpa kepemilikan merupakan salah satu bentuk nyata dari fenomena tersebut. Dari luar, seluruh unsur demokrasi terlihat berjalan. Namun ketika rakyat mencoba menelusuri jalur pengaruhnya terhadap berbagai keputusan strategis, sering kali ditemukan bahwa ruang tersebut jauh lebih terbatas daripada yang dibayangkan.

Fenomena ini juga menjelaskan mengapa sebagian masyarakat mulai memandang pemilu sebagai rutinitas yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Bukan karena masyarakat menolak demokrasi, melainkan karena muncul perasaan bahwa partisipasi yang diberikan tidak selalu sebanding dengan pengaruh yang diperoleh. Dari sinilah tumbuh berbagai bentuk apatisme, ketidakpercayaan, dan alienasi kekuasaan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, demokrasi tidak dapat direduksi menjadi aktivitas memilih semata. Kerakyatan mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar prosedur elektoral. Kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi sistem. Permusyawaratan menempatkan rakyat sebagai bagian dari proses pembentukan keputusan. Perwakilan menuntut adanya hubungan yang nyata antara yang mewakili dan yang diwakili.

Karena itu, demokrasi yang hanya berhenti pada pemilu berisiko kehilangan dimensi kepemilikan yang menjadi inti dari kedaulatan rakyat. Rakyat tetap hadir sebagai pemilih, tetapi tidak lagi merasakan dirinya sebagai pemilik negara. Rakyat tetap berpartisipasi dalam prosedur, tetapi tidak merasakan kendali yang cukup terhadap substansi. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi masih ada, tetapi sebagian makna terdalam dari kedaulatan rakyat mulai memudar.

Pada akhirnya, persoalan yang dibahas dalam subbab ini bukan tentang ada atau tidaknya demokrasi. Persoalannya adalah kualitas hubungan antara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sebab demokrasi yang sehat seharusnya tidak hanya menghasilkan partisipasi, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan rakyat terhadap negara yang dijalankan atas nama rakyat.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu partisipasi masyarakat tidak selalu identik dengan kepemilikan atas kekuasaan. Rakyat dapat hadir dalam pemilu, memberikan suara, dan

menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi tetap mengalami keterbatasan dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Ketika demokrasi lebih banyak menghadirkan partisipasi daripada rasa memiliki dan kendali, maka muncul kondisi yang dapat disebut sebagai demokrasi tanpa kepemilikan, yaitu keadaan ketika rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan, tetapi tidak sepenuhnya merasakan kendali atas sistem yang secara konstitusional merupakan miliknya.

10.7. Ketika Negara Menjadi Platform Tertutup

Pada awal kelahirannya, negara dibangun sebagai instrumen bersama untuk melayani kepentingan bersama. Negara bukan milik pemerintah. Negara bukan milik partai politik. Negara bukan milik pejabat. Negara adalah milik rakyat yang membentuknya. Karena itu, seluruh desain ketatanegaraan pada dasarnya harus memastikan bahwa rakyat tetap memiliki hubungan yang hidup dengan sistem yang dijalankan atas namanya. Hubungan tersebut bukan sekadar hubungan simbolik, melainkan hubungan yang memungkinkan rakyat memahami, mengawasi, memengaruhi, dan mengoreksi arah negara.

Namun dalam perkembangan berbagai sistem modern, sering muncul fenomena yang menarik untuk diamati, yaitu perubahan dari sistem yang relatif terbuka menjadi sistem yang semakin tertutup. Dalam dunia teknologi, perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup sangat mudah dikenali.

Sistem terbuka memungkinkan pengguna memahami cara kerja sistem, memberikan masukan terhadap pengembangannya, dan dalam kondisi tertentu bahkan ikut berkontribusi dalam perbaikan sistem. Jalur akses tersedia secara lebih luas. Informasi lebih mudah diperoleh. Mekanisme koreksi lebih mudah dilakukan. Hubungan antara pemilik, pengguna, dan pengelola sistem relatif lebih dekat.

Sebaliknya, sistem tertutup cenderung bekerja melalui lapisan-lapisan yang tidak mudah diakses. Pengguna hanya melihat hasil akhirnya. Cara kerja di balik layar sulit dipahami. Jalur perubahan berada pada kelompok yang terbatas. Akses terhadap konfigurasi utama berada dalam ruang yang tidak mudah dijangkau oleh sebagian besar pengguna. Sistem tetap berfungsi, tetapi hubungan antara pemilik dan sistem menjadi semakin jauh.

Analogi ini membantu memahami salah satu gejala yang muncul dalam kehidupan bernegara. Secara formal, negara Indonesia tetap mengakui kedaulatan rakyat. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi. Pemilu tetap berlangsung. Mekanisme demokrasi tetap tersedia. Namun pada saat yang sama, jalur menuju pengambilan keputusan strategis semakin dipenuhi oleh berbagai lapisan prosedural, institusional, administratif yang tidak mudah diakses oleh masyarakat umum.

Dalam BAB 9 telah dibahas bagaimana proses pencalonan pemimpin nasional tidak sepenuhnya berada dalam ruang kendali rakyat. Dalam BAB 10.4 dibahas bagaimana berbagai lapisan akses dapat

menciptakan situasi yang menyerupai *Access Denied*. Ketika seluruh lapisan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, muncul sebuah pola yang menarik yaitu negara semakin menyerupai sebuah *platform* yang dapat digunakan oleh rakyat, tetapi semakin sulit dikonfigurasi oleh rakyat.

Rakyat dapat memilih. Rakyat dapat menyampaikan aspirasi. Rakyat dapat menyampaikan kritik. Namun ketika pembahasan bergerak pada tingkat desain sistem, ruang partisipasi tersebut menjadi jauh lebih terbatas. Pertanyaan mengenai siapa dapat menjadi kandidat, bagaimana struktur kekuasaan dibentuk, bagaimana jalur akses yang ditentukan, atau bagaimana arah jangka panjang negara dirancang, sering kali berada dalam ruang yang jauh dari jangkauan masyarakat biasa.

Fenomena ini tidak selalu lahir karena niat buruk. Sebagian muncul karena kompleksitas negara modern. Negara dengan ratusan juta penduduk tentu membutuhkan institusi, prosedur, dan mekanisme yang tidak sederhana. Tidak semua keputusan dapat diambil secara langsung oleh seluruh rakyat. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan.

Namun kompleksitas yang terus bertambah membawa risiko tersendiri. Semakin kompleks sebuah sistem, semakin besar kemungkinan lahirnya jarak antara pemilik dan pengelola sistem. Ketika jarak tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme yang memadai untuk menjaga hubungan antara rakyat dan

negara, sistem perlahan dapat berubah menjadi struktur yang semakin tertutup terhadap pemiliknya sendiri.

Dalam dunia teknologi terdapat istilah black box. Pengguna dapat melihat masukan dan keluaran, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Sistem bekerja, tetapi proses internalnya tidak mudah dipahami. Ketika negara mulai dipersepsikan sebagai black box, rakyat mengetahui hasil-hasil kebijakan, tetapi kesulitan memahami bagaimana keputusan tersebut lahir, siapa yang menentukan prioritas, dan bagaimana proses distribusi kekuasaan berlangsung di balik layar.

Di sinilah muncul salah satu sumber utama ketidakpercayaan publik. Ketidakpercayaan tidak selalu muncul karena hasil kebijakan yang buruk. Ketidakpercayaan sering muncul karena rakyat merasa semakin jauh dari proses yang menghasilkan kebijakan tersebut. Semakin tertutup sebuah sistem, semakin sulit membangun rasa memiliki terhadap sistem tersebut.

Dalam perspektif *ownership*, keadaan ini sangat problematis. Sebab pemilik yang tidak memahami cara kerja sistem lambat laun hanya berfungsi sebagai pengguna. Pemilik masih dapat menggunakan sistem. Pemilik masih dapat menikmati layanan yang diberikan sistem. Namun kemampuan untuk memengaruhi arah perkembangan sistem menjadi semakin terbatas.

Jika analogi rumah yang digunakan dalam beberapa bagian buku ini diterapkan kembali, situasinya menjadi lebih mudah dipahami. Bayangkan sebuah rumah yang dimiliki oleh keluarga besar. Pada awalnya seluruh penghuni memahami bagaimana

rumah tersebut dibangun, bagaimana aturan rumah disusun, dan bagaimana perubahan dapat dilakukan. Namun seiring waktu, seluruh pengelolaan rumah berpindah ke tangan kelompok tertentu. Aturan menjadi semakin rumit. Prosedur menjadi semakin panjang. Penghuni tetap tinggal di dalam rumah, tetapi tidak lagi memahami bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat. Rumah tetap milik keluarga, tetapi terasa semakin jauh dari keluarga itu sendiri.

Fenomena inilah yang ingin disoroti dalam subbab ini. Persoalannya bukan apakah negara masih demokratis atau tidak. Persoalannya adalah apakah negara masih cukup terbuka bagi rakyat sebagai pemilik sah negara. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemilu, tetapi juga membutuhkan keterhubungan yang nyata antara rakyat dan sistem pemerintahan yang bekerja atas nama rakyat.

Dalam konteks Pancasila, khususnya sila keempat tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keterbukaan merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara yang sehat. Permusyawaratan mengandaikan adanya ruang dialog. Perwakilan mengandaikan adanya hubungan yang hidup antara rakyat dan institusi yang mewakilinya. Ketika sistem menjadi terlalu tertutup, kedua unsur tersebut berisiko kehilangan makna substantifnya.

Penting pula dipahami bahwa sistem tertutup tidak selalu terlihat sebagai sistem yang represif. Dalam banyak kasus, sistem tertutup justru tampak berjalan normal. Pemilu tetap ada. Partai politik tetap ada.

Parlemen tetap ada. Pemerintah tetap bekerja. Namun akses terhadap titik-titik strategis yang menentukan arah sistem semakin berada dalam ruang yang sempit. Dari luar tampak terbuka, tetapi dari dalam semakin sulit diakses.

Karena itu, pembahasan mengenai negara sebagai *platform* tertutup bukanlah tuduhan terhadap institusi tertentu. Pembahasan ini adalah refleksi terhadap arah perkembangan sistem ketatanegaraan. Semakin banyak lapisan yang memisahkan rakyat dari pusat pengambilan keputusan, semakin besar risiko negara berubah dari sistem yang dimiliki rakyat menjadi sistem yang hanya digunakan oleh rakyat.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu negara berisiko berubah menjadi *platform* tertutup ketika akses terhadap konfigurasi dasar, distribusi kekuasaan, dan proses pengambilan keputusan semakin jauh dari jangkauan rakyat sebagai pemilik sah negara. Rakyat tetap hadir sebagai pengguna sistem, tetapi kemampuan untuk memahami, memengaruhi, dan mengoreksi sistem semakin terbatas. Dalam kondisi seperti itu, negara tetap mengatasnamakan rakyat, tetapi hubungan antara rakyat dan negara perlahan bergerak dari hubungan kepemilikan menuju hubungan penggunaan semata.

10.8. Gejala-Gejala Pembajakan *Root Access*

Dalam dunia teknologi, pembajakan *root access* tidak selalu mudah dikenali pada saat pertama kali terjadi. Sebuah sistem dapat tetap menyala. Aplikasi masih berjalan. Tampilan antarmuka tidak

menunjukkan perubahan yang mencolok. Pengguna masih dapat masuk ke dalam sistem dan menggunakan berbagai fungsi yang tersedia. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun di balik layar, kendali terhadap sistem perlahan telah berpindah. Pemilik masih tercatat sebagai pemilik, tetapi kemampuan untuk mengatur arah sistem sudah tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Perubahan posisi rakyat dari pemilik yang mengendalikan menjadi pemilik yang hanya menggunakan sistem tidak selalu terlihat secara langsung. Tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa rakyat kehilangan kendali. Tidak ada pasal yang secara terbuka menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dicabut. Bahkan konstitusi tetap mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun terdapat berbagai gejala yang menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan negara sedang mengalami perubahan yang mendasar.

Gejala pertama adalah meningkatnya apatisme terhadap kehidupan bernegara. Apatisme sering dipahami sebagai kurangnya kepedulian masyarakat terhadap urusan publik. Padahal, dalam banyak kasus, apatisme bukan penyebab utama, melainkan akibat dari pengalaman panjang yang membuat masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka tidak menghasilkan pengaruh yang berarti. Ketika seseorang berulang kali merasa tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah penyelenggaraan negara, motivasi untuk terlibat akan semakin menurun.

Apatisme tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terhadap kehidupan bernegara. Gejalanya sering jauh lebih halus. Masyarakat mulai kehilangan minat mengikuti perkembangan kebijakan publik. Pembahasan mengenai masa depan negara dianggap tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pemilu dipandang sebagai rutinitas lima tahunan yang hasilnya tidak banyak mengubah keadaan. Kehidupan bernegara tidak lagi dipahami sebagai urusan bersama, melainkan sebagai arena yang lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu.

Gejala kedua adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kepercayaan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan bernegara. Negara tidak mungkin berjalan hanya dengan hukum dan kekuasaan. Negara juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi sumber legitimasinya. Ketika kepercayaan mulai menurun, hubungan antara rakyat dan institusi negara menjadi semakin rapuh.

Penurunan kepercayaan biasanya tidak terjadi karena satu peristiwa tunggal. Proses tersebut berlangsung melalui akumulasi pengalaman. Ketika masyarakat merasa aspirasi tidak didengar, ketika kebijakan dianggap tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, atau ketika proses terlihat semakin jauh dari kehidupan masyarakat, kepercayaan perlahan mengalami erosi. Pada tahap tertentu, rakyat tetap mematuhi aturan negara, tetapi tidak lagi memiliki keyakinan yang kuat bahwa sistem bekerja untuk kepentingan mereka.

Gejala ketiga adalah semakin kuatnya persepsi mengenai oligarki. Dalam berbagai diskusi publik, istilah oligarki sering digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika pengaruh dan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil. Terlepas dari perdebatan mengenai definisi dan tingkat keakuratannya, munculnya persepsi tersebut menunjukkan adanya kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat.

Persepsi mengenai oligarki pada dasarnya lahir dari pertanyaan sederhana yaitu mengapa akses terhadap kekuasaan tampak lebih mudah diperoleh oleh kelompok tertentu dibanding masyarakat secara umum. Ketika pertanyaan semacam ini muncul secara luas, yang sesungguhnya sedang dipertanyakan bukan hanya individu-individu tertentu, melainkan desain sistem yang mengatur distribusi akses terhadap kekuasaan.

Gejala keempat adalah meningkatnya biaya pencalonan dan kampanye. Dalam sistem yang sehat, persaingan untuk memperoleh jabatan publik seharusnya membuka ruang bagi berbagai unsur masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, ketika biaya pencalonan dan kampanye semakin tinggi, akses menuju jabatan publik cenderung semakin sulit dijangkau oleh masyarakat biasa. Proses pencalonan menjadi semakin bergantung pada sumber daya yang besar, jaringan yang kuat, serta dukungan dari struktur yang telah mapan.

Dalam perspektif sistem, tingginya biaya pencalonan dan kampanye merupakan salah satu

indikator bahwa akses menuju pusat kekuasaan semakin terbatas. Semakin besar sumber daya yang diperlukan untuk memasuki arena kekuasaan, semakin besar kemungkinan bahwa hanya kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara efektif. Pada titik inilah hubungan antara rakyat dan kekuasaan menjadi semakin tidak seimbang.

Gejala kelima adalah dominasi *elite* dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Dominasi *elite* tidak selalu berarti adanya niat buruk atau konspirasi. Dalam organisasi apa pun, kelompok yang berada di pusat struktur biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar. Namun ketika pengaruh tersebut berkembang menjadi dominasi yang sulit dikoreksi oleh mekanisme partisipasi rakyat, maka muncul persoalan yang lebih mendasar mengenai distribusi kekuasaan.

Dalam BAB 9 telah dibahas konsep *elite capture*, yaitu keadaan ketika mekanisme yang seharusnya melayani kepentingan yang lebih luas semakin dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki akses paling dekat terhadap pusat pengambilan keputusan. Gejala dominasi *elite* yang semakin kuat dapat menjadi salah satu tanda bahwa jalur kedaulatan rakyat sedang mengalami penyempitan pada tingkat operasional.

Penting untuk dipahami bahwa seluruh gejala tersebut bukanlah penyebab utama dari persoalan yang sedang dibahas dalam buku ini. Apatisme masyarakat bukan penyebab. Rendahnya kepercayaan publik bukan penyebab. Oligarki bukan penyebab. Tingginya biaya pencalonan dan kampanye bukan penyebab. Dominasi kelompok berkuasa juga bukan penyebab utama. Semua

itu lebih tepat dipahami sebagai gejala yang muncul dari struktur yang lebih dalam.

Analogi medis dapat membantu menjelaskan hal ini. Demam bukan penyakit. Batuk bukan penyakit. Nyeri bukan penyakit. Semua itu adalah gejala yang menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tubuh. Mengobati gejala dapat memberikan perbaikan sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah jika penyebab utamanya tidak dipahami.

Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Banyak perdebatan sering terjebak pada gejala-gejala yang terlihat di permukaan. Perhatian masyarakat tertuju pada individu, partai, pemilu, atau kebijakan tertentu. Padahal, berbagai gejala tersebut sering kali berakar pada desain sistem yang mengatur hubungan antara rakyat sebagai pemilik negara dan mekanisme yang menjalankan serta mengendalikan negara atas nama rakyat.

Dalam kerangka berpikir buku ini, gejala-gejala tersebut perlu dibaca sebagai indikator bahwa terdapat persoalan pada jalur *root access* rakyat terhadap negara. Ketika pemilik semakin sulit mengendalikan sistem yang dimilikinya, berbagai gejala sosial akan mulai bermunculan. Apatisme, ketidakpercayaan, dominasi *elite*, dan berbagai bentuk alienasi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan muncul dari sumber yang sama.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, gejala-gejala tersebut

merupakan peringatan bahwa hubungan antara rakyat dan negara perlu dievaluasi secara serius. Sebab kerakyatan yang sehat seharusnya menghasilkan keterhubungan yang kuat antara rakyat dan sistem pemerintahan, bukan jarak yang semakin lebar di antara keduanya.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu apatisme masyarakat, rendahnya kepercayaan publik, persepsi oligarki, tingginya biaya pencalonan dan kampanye, serta dominasi kelompok berkuasa bukanlah akar persoalan, melainkan gejala dari persoalan yang lebih mendasar. Gejala-gejala tersebut menunjukkan kemungkinan terjadinya penyempitan akses rakyat terhadap jalur-jalur utama pengendalian negara. Dalam pengertian inilah pembajakan *root access* tidak selalu tampak melalui perubahan konstitusi yang terbuka, melainkan melalui berbagai tanda yang menunjukkan semakin jauhnya pemilik negara dari kemampuan untuk mengendalikan negara yang dimilikinya sendiri.

10.9. Mengapa Rakyat Tidak Menyadarinya?

Salah satu pertanyaan yang paling menarik dalam pembahasan mengenai kedaulatan rakyat adalah pertanyaan berikut yaitu jika memang terjadi penyempitan akses rakyat terhadap pengendalian negara, mengapa sebagian besar masyarakat tidak menyadarinya. Mengapa gejala-gejala seperti apatisme masyarakat, rendahnya kepercayaan publik, dominasi *elite*, dan alienasi kekuasaan sering dianggap sebagai persoalan yang terpisah-pisah. Mengapa jarang muncul

kesadaran bahwa seluruh gejala tersebut mungkin berasal dari perubahan yang lebih mendasar dalam desain sistem.

Pertanyaan ini penting karena dalam banyak kasus, perubahan terbesar dalam sebuah sistem justru terjadi tanpa disadari oleh para pemiliknya. Perubahan yang berlangsung secara bertahap sering kali lebih sulit dikenali dibanding perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Ketika sebuah sistem berubah sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, setiap perubahan tampak wajar pada masanya. Namun setelah puluhan tahun berlalu, sistem yang ada dapat menjadi sangat berbeda dibanding desain awalnya.

Dalam dunia teknologi, fenomena semacam ini bukan sesuatu yang asing. Sebuah aplikasi dapat mengalami pembaruan berkali-kali. Setiap pembaruan tampak kecil. Setiap perubahan tampak tidak terlalu penting. Namun setelah bertahun-tahun, pengguna sering menyadari bahwa aplikasi yang digunakan saat ini memiliki cara kerja yang sangat berbeda dibanding versi awalnya. Menariknya, sebagian besar pengguna tidak pernah benar-benar merasakan kapan perubahan besar itu terjadi. Perubahan berlangsung secara bertahap sehingga dianggap sebagai bagian normal dari perkembangan sistem.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebagian besar masyarakat tidak hidup dalam ruang kajian ketatanegaraan. Kehidupan sehari-hari lebih banyak diisi oleh pekerjaan, keluarga, pendidikan, kebutuhan ekonomi, dan berbagai persoalan praktis lainnya. Akibatnya, perhatian terhadap perubahan desain sistem negara biasanya jauh lebih kecil dibanding perhatian terhadap dampak yang dirasakan secara langsung.

Masyarakat lebih mudah merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok daripada perubahan struktur distribusi kekuasaan. Masyarakat lebih mudah melihat perubahan pejabat dibanding perubahan hubungan antara rakyat dan negara. Masyarakat lebih mudah memahami hasil akhir sebuah kebijakan dibanding mekanisme yang menghasilkan kebijakan tersebut. Karena itu, perubahan pada tingkat *firmware* negara sering kali berlangsung jauh dari perhatian publik.

Ada faktor lain yang membuat fenomena ini semakin sulit dikenali. Secara formal, banyak simbol demokrasi tetap hadir dalam kehidupan bernegara. Pemilu tetap dilaksanakan. Kampanye tetap berlangsung. Partai politik tetap berkompetisi. Media tetap memberitakan dinamika kekuasaan setiap hari. Debat kandidat tetap disiarkan secara luas. Dari permukaan, seluruh elemen demokrasi tampak hidup dan aktif.

Kehadiran simbol-simbol tersebut menciptakan kesan bahwa rakyat masih sepenuhnya mengendalikan negara. Kesan tersebut tidak sepenuhnya salah. Rakyat memang tetap memiliki peran yang nyata dalam sistem pemerintahan. Namun persoalan yang dibahas dalam buku ini bukan mengenai ada atau tidaknya peran rakyat. Persoalannya adalah tingkat dan kualitas kendali yang dimiliki rakyat terhadap sistem yang bekerja atas nama rakyat.

Dalam BAB 9 telah dibahas konsep *pseudo sovereignty*, yaitu keadaan ketika kedaulatan tampak hadir secara formal tetapi tidak sepenuhnya hadir secara substantif. Konsep ini membantu menjelaskan

mengapa penyempitan akses terhadap kekuasaan sering kali tidak mudah dikenali. Sebab dari luar, seluruh tanda-tanda kedaulatan masih terlihat ada. Rakyat tetap memilih. Rakyat tetap menjadi sumber legitimasi. Rakyat tetap disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam konstitusi.

Akan tetapi, ketika jalur distribusi kekuasaan ditelusuri lebih dalam, terlihat bahwa sebagian besar proses strategis berlangsung melalui berbagai lapisan yang tidak secara langsung berada dalam kendali rakyat. Di sinilah muncul perbedaan antara penampilan luar dan struktur internal. Secara visual sistem tampak sama. Secara operasional sistem dapat bekerja dengan cara yang berbeda.

Analogi rumah yang digunakan dalam berbagai bagian buku ini dapat membantu menjelaskan situasi tersebut. Bayangkan sebuah rumah yang secara hukum masih dimiliki oleh keluarga yang sama. Nama pemilik tidak berubah. Sertifikat tidak berubah. Alamat tidak berubah. Dari luar, rumah tersebut tampak tetap menjadi milik keluarga yang sama. Namun seiring waktu, berbagai keputusan mengenai pengelolaan rumah semakin banyak ditentukan oleh pihak lain. Penghuni rumah masih merasa memiliki rumah tersebut karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan perubahan kepemilikan. Akan tetapi, kemampuan untuk menentukan arah pengelolaan rumah perlahan semakin berkurang.

Dalam situasi seperti itu, sebagian besar penghuni mungkin tidak langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Perhatian mereka lebih tertuju pada

kehidupan sehari-hari daripada struktur pengelolaan rumah. Kesadaran baru muncul ketika berbagai keputusan penting terasa semakin jauh dari jangkauan mereka.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Banyak warga negara melihat hasil-hasil tanpa sempat menelusuri jalur yang menghasilkan hasil tersebut. Perhatian lebih banyak tertuju pada siapa yang menang dalam pemilu dibanding bagaimana kandidat tersebut muncul dalam daftar pilihan. Perhatian lebih banyak tertuju pada kebijakan yang diterbitkan dibanding struktur yang menentukan arah kebijakan tersebut. Akibatnya, perubahan pada tingkat desain sistem sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Selain itu, terdapat kecenderungan alami dalam kehidupan sosial untuk menerima sistem yang telah berlangsung lama sebagai sesuatu yang normal. Generasi yang lahir dan tumbuh dalam suatu sistem biasanya menganggap sistem tersebut sebagai keadaan yang wajar. Pertanyaan mengenai apakah sistem tersebut sesuai dengan desain awal bangsa atau tidak sering kali tidak muncul karena sistem yang ada telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, lebih dari dua dekade telah berlalu sejak amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah berbagai aspek struktur ketatanegaraan. Bagi sebagian generasi, sistem pasca-amandemen adalah satu-satunya sistem yang pernah dikenal secara langsung. Akibatnya, banyak perubahan yang sesungguhnya sangat mendasar tidak lagi

dipersepsikan sebagai perubahan, melainkan sebagai keadaan yang memang sewajarnya demikian.

Di sinilah pentingnya kajian konstitusi dan desain negara. Tujuan kajian tersebut bukan untuk menolak realitas yang ada, melainkan untuk membantu masyarakat melihat kembali hubungan antara desain awal, perubahan sistem, dan dampak yang dirasakan dalam kehidupan berbangsa. Tanpa kemampuan melihat hubungan tersebut, gejala-gejala yang muncul akan selalu dianggap sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif buku ini, kesadaran mengenai desain sistem merupakan langkah pertama untuk memahami persoalan kedaulatan rakyat secara lebih mendalam. Sebab sulit memperbaiki sesuatu yang tidak disadari keberadaannya. Sulit mengoreksi jalur distribusi kekuasaan jika perhatian hanya tertuju pada hasil akhirnya. Sulit membicarakan kedaulatan rakyat jika hubungan antara rakyat dan sistem negara tidak pernah ditinjau secara utuh.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu penyempitan akses rakyat terhadap pengendalian negara sering kali tidak disadari karena simbol-simbol demokrasi tetap hadir dan perubahan berlangsung secara bertahap. Pemilu tetap ada, partisipasi tetap ada, dan pengakuan formal terhadap kedaulatan rakyat tetap ada. Namun di balik seluruh simbol tersebut, jalur operasional distribusi kekuasaan dapat mengalami perubahan yang tidak mudah terlihat. Dalam kondisi seperti itu, kehilangan kendali tidak terjadi melalui penghapusan hak secara terbuka,

melainkan melalui proses yang perlahan membuat rakyat tetap merasa sebagai pemilik, sementara kemampuan untuk mengendalikan sistem semakin jauh dari jangkauan.

10.10. Tamu di Rumah Sendiri

Pada akhirnya, seluruh pembahasan dalam BAB 10 membawa kita kembali kepada analogi yang telah digunakan sejak bagian awal buku ini, yaitu negara sebagai rumah bersama. Analogi ini dipilih bukan karena lebih sederhana, melainkan karena mampu memperlihatkan persoalan ketatanegaraan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Sebab pada hakikatnya, negara memang dibangun sebagai tempat bernaung seluruh rakyat. Negara bukan tujuan akhir. Negara adalah alat. Negara adalah rumah besar yang dibangun agar bangsa dapat hidup, berkembang, dan menjaga masa depannya secara bersama-sama.

Dalam sebuah rumah yang sehat, hubungan antara pemilik dan rumah berlangsung secara alami. Pemilik menentukan arah rumah tersebut. Pemilik menentukan aturan dasarnya. Pemilik menentukan siapa yang diberi amanah untuk mengelola rumah. Ketika terjadi kerusakan, pemilik memiliki hak untuk memperbaikinya. Ketika desain rumah tidak lagi sesuai kebutuhan, pemilik memiliki hak untuk mengubahnya. Tidak ada keraguan mengenai siapa yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam rumah tersebut.

Prinsip yang sama seharusnya berlaku dalam kehidupan bernegara. Rakyat adalah pemilik negara.

Konstitusi menyatakan demikian. Pancasila mengandaikan demikian. Seluruh legitimasi kekuasaan lahir dari prinsip tersebut. Presiden memperoleh kewenangan karena rakyat. Parlemen memperoleh kewenangan karena rakyat. Pemerintah memperoleh kewenangan karena rakyat. Bahkan keberadaan negara itu sendiri memperoleh maknanya karena adanya rakyat yang menjadi sumber kedaulatan.

Namun setelah menelusuri perubahan *firmware* negara, pergeseran jalur kedaulatan, meningkatnya peran gatekeeping, gejala *elite capture*, munculnya *pseudo sovereignty*, hingga fenomena alienasi kekuasaan, muncul sebuah pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah rakyat masih benar-benar menempati posisi sebagai pemilik rumah, atau perlahan mulai bergeser menjadi sekadar penghuni yang mengikuti aturan yang dibuat oleh pihak lain.

Pertanyaan tersebut terasa tidak nyaman karena menyentuh inti dari hubungan antara rakyat dan negara. Selama ini rakyat diajarkan bahwa negara adalah milik rakyat. Pernyataan tersebut benar secara konstitusional. Namun kepemilikan tidak hanya diukur dari pengakuan formal. Kepemilikan juga diukur dari kemampuan untuk menentukan arah, mengoreksi kesalahan, dan mengendalikan sistem yang dimiliki.

Bayangkan sebuah rumah yang seluruh biaya pembangunannya berasal dari pemilik. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh pemilik. Seluruh perawatan rumah dibiayai oleh pemilik. Namun ketika pemilik ingin menentukan siapa yang mengelola rumah, pilihan yang tersedia telah ditentukan oleh

pihak lain. Ketika pemilik ingin mengubah aturan rumah, harus melewati berbagai lapisan yang sulit dijangkau. Ketika pemilik ingin memperbaiki desain rumah, akses menuju ruang pengambilan keputusan terasa semakin jauh.

Secara hukum rumah tersebut masih milik pemilik. Tidak ada yang merampas sertifikatnya. Tidak ada yang menghapus namanya dari dokumen kepemilikan. Namun pengalaman yang dirasakan mulai berbeda. Pemilik tetap tinggal di rumah tersebut, tetapi tidak lagi memiliki hubungan yang sama dengan rumah yang dimilikinya.

Di sinilah analogi "tamu di rumah sendiri" memperoleh maknanya. Tamu tetap dapat memasuki rumah. Tamu dapat menggunakan sebagian fasilitas yang tersedia. Tamu bahkan dapat merasa nyaman berada di dalam rumah tersebut. Namun tamu tidak menentukan arah rumah. Tamu tidak menentukan desain rumah. Tamu tidak menentukan aturan dasar yang mengatur seluruh kehidupan di dalam rumah.

Tentu saja rakyat Indonesia bukan tamu dalam arti yang sebenarnya. Rakyat tetap pemilik sah negara. Akan tetapi, analogi ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat. Negara terasa jauh. Politik terasa jauh. Kebijakan terasa jauh. Jalur menuju pengambilan keputusan terasa jauh. Akibatnya, hubungan psikologis antara rakyat dan negara perlahan berubah.

Perubahan tersebut tidak selalu melahirkan perlawanan. Dalam banyak kasus, perubahan justru

melahirkan penerimaan. Masyarakat mulai terbiasa dengan keadaan yang ada. Politik dianggap sebagai urusan *elite*. Negara dianggap sebagai urusan pemerintah. Konstitusi dianggap sebagai urusan ahli hukum. Kedaulatan dianggap sebagai konsep yang hanya relevan dalam buku pelajaran kewarganegaraan. Padahal seluruh persoalan tersebut sesungguhnya menyangkut posisi rakyat sebagai pemilik negara.

Inilah yang menjadikan persoalan kedaulatan rakyat jauh lebih penting daripada sekadar perdebatan sehari-hari. Yang sedang dipertaruhkan bukan kemenangan partai tertentu. Bukan kemenangan tokoh tertentu. Bukan pula kemenangan ideologi tertentu. Yang sedang dipertaruhkan adalah hubungan antara pemilik dan sistem yang dimilikinya. Ketika hubungan tersebut melemah, maka seluruh bangunan demokrasi akan kehilangan fondasi terdalamnya.

Dalam perspektif Pancasila, kondisi semacam ini bertentangan dengan semangat kerakyatan yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berbangsa. Kerakyatan mengandaikan bahwa rakyat tidak sekadar hadir sebagai objek yang dilayani. Kerakyatan mengandaikan bahwa rakyat adalah subjek utama yang menentukan arah kehidupan bersama. Ketika rakyat semakin jauh dari posisi tersebut, maka cita-cita kedaulatan rakyat juga semakin jauh dari realitas yang dijalani sehari-hari.

Pembahasan dalam BAB 10 tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kedaulatan rakyat telah hilang sepenuhnya. Kedaulatan rakyat masih hidup dalam konstitusi. Kedaulatan rakyat masih hidup dalam

berbagai mekanisme demokrasi yang ada. Namun pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara pengakuan formal dan pengendalian operasional. Rakyat tetap diakui sebagai pemilik, tetapi akses terhadap kendali tidak selalu sebanding dengan status kepemilikan tersebut.

Karena itu, persoalan utama yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia pada masa depan bukanlah apakah rakyat adalah pemilik negara. Jawabannya sudah jelas. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan agar rakyat kembali memiliki hubungan yang nyata dengan negara yang dimilikinya. Bagaimana memastikan agar kedaulatan tidak berhenti sebagai simbol. Bagaimana memastikan agar rakyat tidak hanya menjadi sumber legitimasi, tetapi juga menjadi pusat orientasi seluruh sistem ketatanegaraan.

Pada titik inilah seluruh pembahasan mengenai *root owner*, *root access*, gatekeeping, *elite capture*, *pseudo sovereignty*, dan alienasi kekuasaan bertemu dalam satu kesimpulan besar. Masalah utama bukan terletak pada hilangnya kepemilikan rakyat atas negara. Masalah utama terletak pada semakin lebarnya jarak antara kepemilikan dan pengendalian.

Negara masih mengatasnamakan rakyat. Konstitusi masih menyebut rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Seluruh lembaga negara masih memperoleh legitimasi dari rakyat.

Namun dalam praktik operasional, rakyat semakin sering diposisikan bukan sebagai pemilik yang mengendalikan rumahnya sendiri, melainkan sebagai pihak yang hanya diperbolehkan memasuki ruang-

ruang tertentu dengan akses yang telah ditentukan oleh pihak lain.

Dalam pengertian inilah istilah "tamu di rumah sendiri" menjadi relevan.

Ketika *root access* tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemilik, kedaulatan rakyat perlahan berubah dari kekuasaan yang nyata menjadi pengakuan yang simbolik. Dan ketika hal itu terjadi, tugas terbesar sebuah bangsa bukan sekadar mengganti penghuni rumah, melainkan mengembalikan rumah tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu rakyat.

BAGIAN IV - MALWARE SYSTEM

BAB 11
OLIGARKI SEBAGAI MALWARE

11.1. Apa Itu *Malware*?

Untuk memahami mengapa oligarki dalam buku ini dianalogikan sebagai *malware*, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan *malware* dalam dunia teknologi. Istilah *malware* berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu malicious dan software. Secara sederhana, *malware* adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memengaruhi, mengendalikan, mengganggu, memanfaatkan, atau mengubah perilaku sebuah sistem tanpa memberikan manfaat yang sesuai bagi pemilik sistem tersebut.

Banyak orang membayangkan *malware* sebagai sesuatu yang selalu menghancurkan komputer secara langsung. Gambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada masa awal perkembangan teknologi informasi, banyak *malware* memang dirancang untuk merusak file, menghapus data, atau membuat sistem tidak dapat digunakan. Namun seiring perkembangan teknologi, bentuk *malware* menjadi jauh lebih canggih. Sebagian besar *malware* modern justru tidak berusaha menghancurkan sistem. Sebaliknya, *malware* modern berusaha tetap tersembunyi agar dapat terus memanfaatkan sistem tanpa disadari oleh pemiliknya.

Dalam dunia keamanan siber terdapat berbagai jenis *malware*. Ada virus yang menyebarkan dirinya ke berbagai bagian sistem. Ada trojan yang menyamar sebagai program yang tampak normal tetapi membawa fungsi tersembunyi. Ada *spyware* yang memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi secara diam-diam. Ada ransomware yang mengambil kendali atas data dan kemudian menjadikannya alat tekanan terhadap pemilik sistem.

Meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, seluruh *malware* memiliki satu kesamaan yang sangat penting. *Malware* bekerja dengan memanfaatkan sistem yang sudah ada. *Malware* tidak selalu datang dengan menghancurkan sistem dari luar. Dalam banyak kasus, *malware* masuk ke dalam sistem, beradaptasi dengan sistem, lalu menggunakan sumber daya sistem untuk kepentingannya sendiri.

Karena itu, ancaman terbesar dari *malware* bukan terletak pada kemampuannya merusak, melainkan

pada kemampuannya mengubah arah penggunaan sistem. Sistem tetap berjalan. Listrik tetap menyala. Aplikasi tetap dapat digunakan. Pengguna tetap merasa bahwa semuanya normal. Namun di balik layar, sebagian sumber daya sistem telah digunakan untuk kepentingan yang berbeda dari tujuan awal sistem tersebut.

Analogi ini sangat penting untuk memahami pembahasan mengenai negara pada bagian ini. Dalam BAB 7 hingga BAB 10 telah dijelaskan bagaimana perubahan *firmware* negara dapat mengubah jalur distribusi kekuasaan. Kedaulatan rakyat tetap diakui secara formal. Institusi negara tetap berjalan. Pemilu tetap dilaksanakan. Pemerintahan tetap beroperasi. Dari luar, sistem negara tampak bekerja sebagaimana mestinya.

Namun muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah seluruh sumber daya negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat sebagai pemilik sah negara. Ataukah terdapat kekuatan-kekuatan tertentu yang secara perlahan menggunakan sistem negara untuk kepentingan yang lebih sempit.

Pertanyaan tersebut membawa pembahasan pada konsep yang dikenal sebagai oligarki. Secara umum, oligarki merujuk pada keadaan ketika kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya strategis terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil. Kelompok tersebut tidak selalu memegang jabatan formal tertinggi. Bahkan dalam banyak kasus, pengaruh terbesar justru bekerja melalui jaringan ekonomi, media,

dan regulasi yang tidak selalu terlihat secara langsung oleh masyarakat.

Dalam konteks buku ini, oligarki tidak dipahami semata-mata sebagai sekelompok orang kaya atau pemilik modal. Oligarki dipahami sebagai pola hubungan kekuasaan yang memungkinkan sumber daya negara semakin banyak mengalir kepada kelompok yang memiliki akses paling besar terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan. Karena itu, yang menjadi perhatian bukan pertama-tama siapa pelakunya, melainkan bagaimana mekanismenya bekerja.

Di sinilah analogi *malware* menjadi relevan. Sebagaimana *malware* memanfaatkan sistem komputer tanpa harus menghancurkan komputer tersebut, oligarki dapat memanfaatkan sistem negara tanpa harus menghapus konstitusi, membubarkan pemilu, atau mengganti nama negara. Negara tetap berdiri. Pemerintah tetap berjalan. Lembaga negara tetap berfungsi. Akan tetapi arah manfaat yang dihasilkan sistem perlahan dapat bergeser.

Bayangkan sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pekerjaan pemiliknya. Sistem tersebut memiliki prosesor, memori, jaringan, dan berbagai sumber daya lain. Setelah terinfeksi *malware*, seluruh komponen tersebut masih berfungsi. Namun sebagian kemampuan sistem diam-diam digunakan untuk kepentingan lain yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik.

Dalam kehidupan bernegara, sumber daya yang dimaksud dapat berupa anggaran, regulasi, informasi,

akses kekuasaan, sumber daya alam, atau berbagai instrumen kebijakan publik lainnya. Ketika instrumen-instrumen tersebut semakin banyak digunakan untuk melayani kelompok tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas, maka negara mulai menunjukkan gejala yang mirip dengan sistem yang telah disusupi *malware*.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan seluruh persoalan menjadi konspirasi tersembunyi. Negara adalah sistem yang sangat kompleks. Tidak setiap kebijakan yang tidak populer merupakan bukti adanya oligarki. Tidak setiap ketimpangan merupakan hasil rekayasa kelompok tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini bukan pendekatan konspiratif, melainkan pendekatan sistemik.

Yang menjadi perhatian adalah bagaimana sebuah sistem dapat berubah arah tanpa harus mengubah identitas formalnya. Sebab sejarah menunjukkan bahwa banyak sistem besar tidak runtuh karena serangan dari luar. Banyak sistem justru berubah karena proses yang berlangsung dari dalam, melalui mekanisme yang tampak normal dan sah secara prosedural.

Fenomena inilah yang membuat *malware* menjadi analogi yang kuat. Ancaman paling berbahaya sering kali bukan ancaman yang terlihat jelas. Ancaman paling berbahaya adalah ancaman yang mampu menyatu dengan sistem, memanfaatkan sistem, dan menggunakan sumber daya sistem tanpa menimbulkan alarm yang mencolok.

Dalam konteks negara, gejala-gejala semacam itu sering muncul dalam bentuk yang tidak selalu mudah dikenali. Ketimpangan ekonomi yang terus melebar, biaya pemilihan yang semakin tinggi, dominasi kelompok tertentu dalam ruang informasi, atau kebijakan yang berulang kali menguntungkan kelompok yang sama dapat menjadi indikator bahwa terdapat persoalan yang lebih dalam daripada sekadar pergantian pemerintahan atau pergantian pejabat.

Karena itu, pembahasan mengenai oligarki dalam bab ini tidak dimulai dari pertanyaan siapa pelakunya. Pembahasan dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar yaitu bagaimana sebuah sistem yang secara formal dimiliki oleh rakyat dapat menghasilkan pola-pola yang semakin menguntungkan kelompok tertentu. Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab jika terlebih dahulu memahami cara kerja *malware* dalam sebuah sistem.

Tesis subbab ini dapat dirumuskan secara sederhana namun penting yaitu tidak semua ancaman terhadap sebuah sistem datang dari luar sistem. Sebagian ancaman justru bekerja dari dalam, memanfaatkan struktur yang ada, menggunakan sumber daya yang tersedia, dan mengubah arah sistem secara perlahan tanpa mengubah bentuk luarnya. Dalam pengertian inilah oligarki dapat dipahami sebagai *malware* dalam sistem negara, yaitu kekuatan yang tidak selalu terlihat, tetapi berpotensi memengaruhi cara sistem bekerja dan menentukan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari sistem tersebut.

11.2. Dari *Root Access* ke *Economic Capture*

Dalam BAB 10 telah dijelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan modern adalah kemungkinan terjadinya pemisahan antara *ownership* dan *control*. Rakyat tetap menjadi pemilik sah negara. Konstitusi tetap mengakui kedaulatan rakyat. Seluruh lembaga negara tetap memperoleh legitimasi dari rakyat. Namun pada saat yang sama, akses rakyat terhadap jalur-jalur utama pengendalian negara dapat mengalami penyempitan secara bertahap. Ketika kondisi tersebut terjadi, muncul ruang kosong dalam struktur kekuasaan yang tidak lagi sepenuhnya diisi oleh rakyat sebagai pemilik negara.

Dalam dunia teknologi terdapat prinsip yang sangat sederhana. Sebuah sistem yang kehilangan kendali dari pemiliknya tidak akan pernah benar-benar kosong. Ketika *administrator* utama tidak lagi aktif mengawasi sistem, ruang tersebut segera diisi oleh pihak lain yang memiliki kemampuan, sumber daya, atau akses yang lebih besar. Sistem tidak pernah berhenti bekerja. Yang berubah adalah siapa yang memperoleh pengaruh paling besar terhadap arah sistem tersebut.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Kekuasaan yang tidak sepenuhnya berada dalam jangkauan rakyat tidak otomatis menghilang. Pengaruh yang berkurang pada satu titik biasanya akan digantikan oleh pengaruh yang muncul dari titik lain. Dalam banyak kasus, kelompok yang paling siap

mengisi ruang tersebut adalah kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar.

Di sinilah pembahasan mengenai *economic capture* menjadi penting.

Secara sederhana, *economic capture* dapat dipahami sebagai keadaan ketika kekuatan ekonomi memperoleh kemampuan yang sangat besar untuk memengaruhi arah kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan negara. Pengaruh tersebut tidak selalu muncul melalui jabatan formal. Bahkan, dalam banyak keadaan, pengaruh terbesar justru bekerja tanpa harus menduduki posisi resmi dalam struktur pemerintahan.

Untuk memahami fenomena ini, perlu disadari bahwa kehidupan ekonomi dan penyelenggaraan negara memiliki hubungan yang sangat erat. Pemilu membutuhkan biaya. Organisasi kemasyarakatan membutuhkan pendanaan. Kampanye membutuhkan infrastruktur. Aktivitas pemerintahan membutuhkan dukungan sumber daya ekonomi. Karena itu, hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan segelintir orang hampir selalu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk penyelenggaraan negara modern.

Hubungan tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang salah. Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan nasional. Dunia usaha menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pajak, menggerakkan investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Persoalan mulai muncul ketika hubungan antara ekonomi berkembang menjadi

ketergantungan yang terlalu besar sehingga keseimbangan sistem mulai terganggu.

Dalam kondisi yang sehat, kekuatan ekonomi beroperasi dalam kerangka aturan yang ditetapkan negara untuk melayani kepentingan publik. Negara menjadi pengatur. Dunia usaha menjadi pelaku ekonomi. Keduanya saling berinteraksi dalam batas-batas yang jelas.

Namun ketika akses rakyat terhadap pengendalian negara melemah, keseimbangan tersebut dapat berubah. Ruang yang ditinggalkan oleh berkurangnya kendali rakyat sering kali menjadi lahan yang sangat menarik bagi berbagai kelompok berkepentingan. Dan di antara seluruh kelompok tersebut, kekuatan ekonomi biasanya memiliki keunggulan yang sangat besar karena memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun pengaruh.

Pengaruh tersebut tidak selalu berbentuk transaksi yang terlihat secara langsung. Dalam banyak kasus, pengaruh bekerja melalui jaringan yang jauh lebih kompleks. Pendanaan, dukungan terhadap kandidat tertentu, hubungan dengan pengambil kebijakan, akses terhadap informasi strategis, atau kemampuan membentuk opini publik merupakan sebagian dari mekanisme yang dapat memperbesar pengaruh ekonomi terhadap negara.

Dalam perspektif sistem, fenomena ini mirip dengan proses ketika sebuah aplikasi memperoleh hak akses yang semakin luas dalam sebuah komputer. Pada awalnya aplikasi hanya menggunakan sumber daya

tertentu sesuai kebutuhan. Namun seiring waktu, aplikasi tersebut memperoleh akses tambahan terhadap memori, jaringan, penyimpanan data, dan berbagai komponen lain. Semakin besar akses yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan aplikasi tersebut untuk memengaruhi perilaku keseluruhan sistem.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika kekuatan ekonomi memperoleh akses yang semakin besar terhadap proses, maka pengaruhnya tidak lagi terbatas pada aktivitas bisnis semata. Pengaruh tersebut mulai menjangkau proses pembuatan kebijakan, prioritas pembangunan, distribusi sumber daya, hingga arah regulasi nasional.

Penting untuk dipahami bahwa *economic capture* tidak selalu terjadi melalui pelanggaran hukum. Justru dalam banyak kasus, proses tersebut berlangsung melalui mekanisme yang sah secara formal. Seluruh prosedur tampak berjalan normal. Pemilu tetap berlangsung. Lembaga negara tetap bekerja. Regulasi tetap diterbitkan melalui prosedur yang sah. Namun di balik seluruh proses tersebut terdapat ketimpangan pengaruh yang semakin besar antara rakyat sebagai pemilik negara dan kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang sangat kuat.

Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa pembahasan mengenai oligarki tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai *root access*. Selama rakyat memiliki hubungan yang kuat dengan jalur pengendalian negara, pengaruh ekonomi tetap berada dalam keseimbangan tertentu. Namun ketika akses rakyat melemah, kekuatan lain akan mengisi ruang

yang tersedia. Dan dalam sistem modern, kekuatan ekonomi hampir selalu menjadi kandidat utama untuk mengisi ruang tersebut.

Dalam BAB 10 telah dijelaskan bahwa pemilik yang kehilangan akses tidak serta-merta kehilangan status kepemilikannya. Nama pemilik tetap tercatat. Hak formal tetap diakui. Akan tetapi kemampuan untuk menentukan arah sistem menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi seperti itu, pihak yang memiliki sumber daya lebih besar secara perlahan dapat memperoleh pengaruh yang jauh lebih besar daripada pemilik formal sistem.

Di sinilah letak bahaya yang ingin disoroti dalam subbab ini. Persoalannya bukan bahwa dunia usaha memiliki pengaruh. Persoalannya adalah ketika pengaruh ekonomi berkembang sedemikian besar sehingga mulai menggeser pusat gravitasi pengambilan keputusan dari kepentingan publik menuju kepentingan yang lebih sempit. Ketika hal itu terjadi, negara masih tampak bekerja untuk semua orang, tetapi manfaat terbesar dari sistem semakin banyak mengalir kepada kelompok yang memiliki akses ekonomi paling kuat.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, keadaan semacam ini merupakan tantangan serius. Keadilan sosial mengandaikan bahwa negara bekerja untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok yang memiliki sumber daya terbesar. Karena itu, hubungan antara ekonomi harus selalu berada

dalam keseimbangan yang menjaga kepentingan umum sebagai orientasi utama.

Pada titik inilah pembahasan mengenai *economic capture* menjadi pintu masuk untuk memahami bentuk-bentuk *capture* lainnya yang akan dibahas pada subbab berikutnya. Sebab pengaruh ekonomi sering kali tidak berhenti pada bidang ekonomi. Pengaruh tersebut dapat menjangkau media bahkan regulasi yang mengatur kehidupan publik secara keseluruhan.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu ketika *root access* rakyat terhadap negara melemah, ruang pengaruh yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar kosong. Dalam sistem modern, ruang tersebut cenderung diisi oleh kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi paling besar. Dalam pengertian inilah *economic capture* muncul, yaitu keadaan ketika kekuatan ekonomi memperoleh kemampuan yang semakin besar untuk memengaruhi arah sistem negara. Kekuasaan yang kosong jarang dibiarkan kosong. Dan ketika rakyat tidak lagi sepenuhnya mengendalikan negara yang dimilikinya, pihak lain akan selalu berusaha mengisi ruang kendali tersebut.

11.3. Economic Capture

Setelah memahami bahwa berkurangnya *root access* rakyat dapat menciptakan ruang yang diisi oleh kekuatan ekonomi, pembahasan berikutnya perlu masuk lebih dalam ke mekanisme yang dikenal sebagai *economic capture*. Konsep ini penting karena membantu menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi dapat

berkembang dari sekadar pelaku pasar menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah negara.

Pada dasarnya, tidak ada negara modern yang dapat berjalan tanpa aktivitas ekonomi. Negara membutuhkan investasi, produksi, perdagangan, inovasi, lapangan kerja, dan penerimaan pajak. Dunia usaha juga membutuhkan negara yang stabil, kepastian hukum, infrastruktur yang baik, serta lingkungan usaha yang sehat. Hubungan antara negara dan ekonomi merupakan hubungan yang wajar dan tidak terhindarkan.

Karena itu, pembahasan mengenai *economic capture* bukanlah pembahasan yang memusuhi dunia usaha atau keberhasilan ekonomi. Justru sebaliknya, ekonomi yang kuat merupakan salah satu syarat penting bagi kemajuan bangsa. Persoalan muncul ketika hubungan yang semula bersifat saling mendukung berubah menjadi hubungan yang tidak seimbang. Pada titik tertentu, kekuatan ekonomi tidak lagi sekadar berinteraksi dengan negara, tetapi mulai memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah keputusan negara secara signifikan.

Dalam perspektif sistem, pengaruh ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dibanding bentuk kekuasaan lainnya. Kekuasaan biasanya dibatasi oleh masa jabatan. Kekuasaan birokrasi dibatasi oleh struktur organisasi. Kekuasaan hukum dibatasi oleh norma dan prosedur. Namun kekuatan ekonomi memiliki kemampuan untuk bergerak lintas sektor, lintas institusi, dan lintas generasi. Modal dapat

berpindah. Investasi dapat berkembang. Jaringan bisnis dapat meluas. Akibatnya, pengaruh ekonomi sering kali mampu bertahan jauh lebih lama daripada siklus yang berlangsung lima tahunan.

Di sinilah letak potensi *economic capture*. Ketika sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu dalam skala yang sangat besar, kelompok tersebut memperoleh kemampuan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Kemampuan tersebut bukan hanya kemampuan membeli barang dan jasa, melainkan kemampuan membangun jaringan pengaruh yang menjangkau berbagai sektor kehidupan publik.

Dalam dunia teknologi, kondisi ini dapat dianalogikan dengan sebuah aplikasi yang memperoleh akses terhadap semakin banyak sumber daya sistem. Pada awalnya aplikasi hanya menggunakan sebagian kecil memori. Kemudian memperoleh akses ke jaringan. Setelah itu memperoleh akses ke penyimpanan data. Lalu memperoleh akses ke berbagai fungsi lain yang sebelumnya tidak dimiliki. Semakin luas akses yang diperoleh, semakin besar kemampuan aplikasi tersebut untuk memengaruhi perilaku keseluruhan sistem.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Kekuatan ekonomi yang besar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi. Kekuatan tersebut dapat berubah menjadi kemampuan membangun pengaruh. Pengaruh dapat berubah menjadi akses. Akses dapat berubah menjadi kedekatan dengan proses pengambilan keputusan. Dan pada tahap tertentu, kedekatan tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan negara.

Proses ini jarang berlangsung secara terbuka. Tidak ada satu hari tertentu ketika sebuah negara tiba-tiba berpindah dari kedaulatan rakyat menjadi kendali ekonomi. Perubahan tersebut biasanya berlangsung secara perlahan. Setiap langkah tampak masuk akal jika dilihat secara terpisah. Dukungan terhadap kegiatan pemerintahan dianggap wajar. Hubungan antara pelaku usaha dan pejabat dianggap normal. Konsultasi antara pemerintah dan sektor bisnis dianggap perlu. Namun ketika seluruh hubungan tersebut membentuk pola yang berulang dan terakumulasi dalam jangka panjang, muncul ketimpangan pengaruh yang semakin besar.

Dalam kondisi seperti ini, uang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi. Uang berubah menjadi sumber daya kekuasaan. Kemampuan finansial memungkinkan seseorang atau kelompok tertentu memperoleh akses yang lebih luas dibanding masyarakat pada umumnya. Semakin besar sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan membangun jaringan, memengaruhi opini, mendukung proses kekuasaan, dan mengakses pusat-pusat pengambilan keputusan.

Karena itu, *economic capture* tidak selalu harus dipahami sebagai tindakan melanggar hukum. Justru dalam banyak kasus, proses tersebut berlangsung melalui mekanisme yang sepenuhnya legal. Semua prosedur tampak berjalan normal. Tidak ada aturan yang secara terbuka dilanggar. Namun hasil akhirnya menunjukkan bahwa pengaruh terhadap negara semakin tidak merata. Sebagian kelompok memperoleh

akses yang jauh lebih besar dibanding kelompok lainnya.

Fenomena ini menciptakan tantangan serius bagi prinsip kedaulatan rakyat. Secara teori, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik negara. Setiap warga negara memiliki hak yang setara. Namun dalam praktik, kemampuan memengaruhi arah kebijakan tidak selalu tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi besar sering kali berada pada posisi yang lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan dibanding rakyat biasa.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kekayaan dan *economic capture*. Tidak setiap orang kaya adalah bagian dari *economic capture*. Tidak setiap perusahaan besar otomatis menjadi ancaman bagi demokrasi. Persoalannya bukan terletak pada kekayaan itu sendiri, melainkan pada hubungan antara kekayaan dan pengaruh terhadap negara. Ketika kekayaan berubah menjadi kemampuan mengendalikan arah kebijakan publik secara tidak proporsional, di situlah *economic capture* mulai muncul.

Gejala-gejala dari fenomena ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Kebijakan yang berulang kali lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan publik yang lebih luas. Hambatan masuk yang semakin tinggi bagi pelaku ekonomi baru. Kesulitan masyarakat biasa untuk memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Atau munculnya hubungan yang terlalu dekat antara pusat kekuasaan dan pusat modal.

Sekali lagi, gejala-gejala tersebut tidak selalu membuktikan adanya *economic capture*. Namun gejala tersebut perlu dibaca sebagai indikator yang patut diperhatikan. Sebab dalam banyak sistem, perubahan arah tidak terjadi melalui satu keputusan besar, melainkan melalui akumulasi keputusan-keputusan kecil yang secara perlahan membentuk pola tertentu.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, persoalan ini menjadi sangat penting. Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang distribusi hasil pembangunan. Keadilan sosial juga berkaitan dengan distribusi akses terhadap peluang, pengaruh, dan sumber daya yang menentukan arah pembangunan itu sendiri. Ketika pengaruh ekonomi menjadi terlalu dominan, keseimbangan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan sosial dapat terganggu.

Pembahasan mengenai *economic capture* juga menjadi fondasi untuk memahami bentuk-bentuk *capture* lainnya yang akan dibahas pada subbab berikutnya. Sebab pengaruh ekonomi jarang berhenti pada sektor ekonomi semata. Pengaruh tersebut sering menjadi pintu masuk menuju pengaruh di bidang informasi dan regulasi.

Karena itu tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas yaitu *economic capture* adalah keadaan ketika kekuatan ekonomi berkembang menjadi pengaruh yang mampu memengaruhi arah negara secara tidak proporsional dibanding rakyat pada umumnya. Proses tersebut tidak selalu berlangsung melalui pelanggaran hukum atau tindakan yang terlihat

mencolok. Sebaliknya, proses tersebut sering berjalan secara perlahan melalui akumulasi akses, jaringan, dan sumber daya. Dalam kondisi seperti itu, kekayaan tidak lagi hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi berubah menjadi kekuatan yang dapat membentuk arah kebijakan dan distribusi kekuasaan dalam sistem negara.

11.4. *Media Capture*

Dalam era modern, kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, anggaran, atau institusi negara. Kekuasaan juga sangat ditentukan oleh siapa yang mampu membentuk cara masyarakat memahami realitas. Karena itu, setelah membahas *economic capture*, pembahasan perlu bergerak ke bentuk pengaruh lain yang tidak kalah penting, yaitu media *capture*.

Jika ekonomi memengaruhi distribusi sumber daya, maka media memengaruhi distribusi informasi. Jika ekonomi memengaruhi apa yang dapat dilakukan oleh negara, maka media memengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat tentang negara. Dalam banyak kasus, pengaruh terhadap persepsi publik bahkan dapat menjadi lebih kuat daripada pengaruh terhadap kebijakan itu sendiri.

Dalam dunia teknologi, informasi dapat diibaratkan sebagai data yang digunakan sistem untuk mengambil keputusan. Sebuah sistem yang menerima data yang tidak lengkap akan menghasilkan keputusan yang tidak lengkap. Sebuah sistem yang menerima data yang telah dimanipulasi akan menghasilkan keluaran

yang berbeda dari tujuan awalnya. Karena itu, kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas informasi yang masuk ke dalam sistem.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Rakyat mengambil keputusan kebijakan berdasarkan informasi yang diterima. Pilihan dalam pemilu dibentuk oleh informasi. Dukungan terhadap kebijakan dibentuk oleh informasi. Persepsi terhadap tokoh publik dibentuk oleh informasi. Dengan kata lain, informasi menjadi bahan baku utama dalam pembentukan opini publik.

Karena itulah media memiliki posisi yang sangat strategis dalam demokrasi. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan berita. Media juga berfungsi membantu masyarakat memahami peristiwa, menilai kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan membangun ruang diskusi publik. Dalam kondisi ideal, media menjadi jembatan antara rakyat dan realitas yang sedang terjadi.

Namun posisi yang sangat strategis tersebut juga membuat media menjadi objek yang menarik bagi berbagai kelompok yang ingin memengaruhi arah masyarakat. Sebab mengendalikan informasi sering kali lebih mudah daripada mengendalikan jutaan orang secara langsung.

Dalam kajian komunikasi terdapat konsep yang dikenal sebagai agenda setting. Konsep ini menjelaskan bahwa media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat, tetapi sangat berpengaruh dalam menentukan apa yang dianggap penting untuk dipikirkan oleh masyarakat. Ketika sebuah isu terus-menerus diberitakan, perhatian publik akan tertuju

pada isu tersebut. Sebaliknya, isu yang jarang muncul dalam ruang publik perlahan akan kehilangan perhatian meskipun dampaknya mungkin sangat besar. Selain agenda setting, terdapat pula konsep framing. Framing adalah cara sebuah peristiwa dikemas dan disajikan kepada publik. Dua media dapat melaporkan peristiwa yang sama tetapi menghasilkan persepsi yang berbeda karena sudut pandang, penekanan, dan narasi yang digunakan berbeda. Fakta yang sama dapat dipahami secara berbeda ketika dibingkai dengan cara yang berbeda.

Di sinilah media *capture* mulai menjadi relevan. Media *capture* dapat dipahami sebagai keadaan ketika ruang informasi yang seharusnya melayani kepentingan publik semakin dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Pengaruh tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk sensor terbuka atau larangan pemberitaan. Justru dalam banyak kasus, media *capture* bekerja secara lebih halus melalui pemilihan isu, penentuan prioritas berita, pembingkaian informasi, dan pembentukan narasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Dalam perspektif sistem, fenomena ini sangat mirip dengan *spyware* atau manipulasi data dalam dunia teknologi. Sistem tetap berjalan normal. Pengguna tetap menerima informasi. Antarmuka tidak berubah. Namun data yang masuk ke dalam sistem telah melalui proses penyaringan tertentu sehingga membentuk persepsi yang berbeda dari kondisi sebenarnya.

Penting untuk dipahami bahwa media *capture* tidak selalu berarti media menyampaikan informasi

yang salah. Persoalannya sering kali bukan terletak pada kebohongan, melainkan pada seleksi informasi. Sebuah informasi dapat benar, tetapi tidak lengkap. Sebuah fakta dapat akurat, tetapi ditempatkan dalam konteks yang sempit. Sebuah peristiwa dapat diberitakan secara luas, sementara peristiwa lain yang sama pentingnya hampir tidak memperoleh perhatian.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tetap merasa mendapatkan informasi. Namun ruang pemahaman yang terbentuk menjadi semakin terbatas. Rakyat tidak kehilangan akses terhadap berita, tetapi kehilangan akses terhadap gambaran yang utuh mengenai realitas.

Fenomena ini menjadi semakin penting ketika kepemilikan media terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil. Konsentrasi kepemilikan tidak otomatis menghasilkan media *capture*. Namun semakin terkonsentrasi kepemilikan suatu sektor strategis, semakin besar pula potensi terjadinya penyelarasan kepentingan antara pemilik media, kekuatan ekonomi, dan kekuatan segelintir orang.

Dalam BAB 11.3 telah dibahas bagaimana kekuatan ekonomi dapat berkembang menjadi pengaruh kekuasaan. Media *capture* sering menjadi salah satu jalur yang menghubungkan keduanya. Sebab pengaruh ekonomi tidak hanya bekerja melalui uang dan investasi. Pengaruh ekonomi juga dapat bekerja melalui kemampuan membentuk persepsi masyarakat mengenai apa yang dianggap benar, penting, mendesak, atau layak didukung.

Pada titik tertentu, informasi tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi. Informasi berubah menjadi instrumen kekuasaan. Siapa yang mengendalikan arus informasi memiliki kemampuan besar untuk memengaruhi cara masyarakat memahami dunia, ekonomi, dan sosial.

Dalam konteks kedaulatan rakyat, persoalan ini sangat serius. Demokrasi mengandaikan bahwa rakyat membuat keputusan secara sadar dan rasional berdasarkan informasi yang memadai. Jika kualitas informasi yang diterima masyarakat terganggu, maka kualitas keputusan yang dihasilkan juga berpotensi terganggu.

Akibatnya, media *capture* tidak hanya memengaruhi media. Media *capture* memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan hak memilih. Demokrasi juga membutuhkan kemampuan rakyat untuk memahami realitas secara utuh sebelum menggunakan hak pilih tersebut.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kebijaksanaan tidak mungkin lahir tanpa informasi yang sehat. Permusyawaratan yang berkualitas membutuhkan ruang publik yang terbuka, jujur, dan berimbang. Ketika ruang informasi semakin didominasi oleh kepentingan tertentu, kemampuan masyarakat untuk membangun kebijaksanaan bersama juga berpotensi melemah.

Karena itu, media *capture* harus dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan industri media, melainkan sebagai persoalan sistemik yang menyangkut hubungan antara informasi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Sebagaimana *economic capture* memengaruhi distribusi sumber daya, media *capture* memengaruhi distribusi persepsi. Dan dalam banyak kasus, persepsi yang dibentuk secara terus-menerus dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menentukan arah sebuah bangsa.

Tesis subbab ini dapat ditegaskan sebagai berikut yaitu menguasai informasi sering kali lebih efektif daripada menguasai kekuasaan secara langsung. Ketika ruang informasi semakin dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, masyarakat tetap menerima berita, tetapi belum tentu menerima gambaran realitas yang utuh. Dalam kondisi seperti itu, media *capture* bekerja seperti *malware* yang memengaruhi data yang masuk ke dalam sistem, sehingga tanpa mengubah bentuk luar demokrasi, mampu memengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kehidupan bernegara.

11.5. *Political Capture*

Jika *economic capture* berbicara tentang pengaruh kekuatan ekonomi terhadap negara, dan media *capture* berbicara tentang pengaruh terhadap ruang informasi, maka *political capture* berbicara tentang sesuatu yang lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan itu sendiri. Pada titik ini, pembahasan tidak lagi sekadar mengenai siapa yang memiliki kekayaan atau siapa yang menguasai informasi, melainkan mengenai siapa

yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses yang menentukan arah negara.

Dalam sistem demokrasi modern, proses pengambilan keputusan negara merupakan jalur utama distribusi kekuasaan. Melalui proses tersebut ditentukan siapa yang memimpin pemerintahan, siapa yang menyusun undang-undang, siapa yang mengelola anggaran negara, siapa yang menentukan prioritas pembangunan, dan siapa yang mengambil berbagai keputusan strategis yang memengaruhi kehidupan jutaan warga negara. Karena itu, siapa pun yang mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah keseluruhan sistem negara.

Untuk memahami *political capture*, perlu dibedakan terlebih dahulu antara kemenangan dalam pemilihan dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Banyak orang menganggap bahwa kekuasaan hanya dimiliki oleh pihak yang memenangkan pemilu atau menduduki jabatan tertentu. Padahal, dalam praktiknya, kemampuan memengaruhi proses pengambilan keputusan sering kali lebih menentukan daripada sekadar memenangkan pemilihan atau menduduki jabatan resmi.

Dalam dunia teknologi terdapat perbedaan antara pengguna aplikasi dan pengembang aplikasi. Pengguna mungkin terlihat lebih aktif di permukaan karena menggunakan sistem setiap hari. Namun pengembang memiliki kemampuan menentukan bagaimana sistem bekerja. Pengembang menentukan fitur apa yang tersedia, jalur apa yang dibuka, dan

batasan apa yang diterapkan. Dengan kata lain, pengaruh terhadap desain sistem sering kali lebih menentukan daripada aktivitas yang terjadi di dalam sistem.

Fenomena yang sama dapat ditemukan dalam kehidupan bernegara. Presiden dapat berganti. Menteri dapat berganti. Anggota parlemen dapat berganti. Partai pemenang pemilu dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Namun, jika terdapat kelompok tertentu yang secara konsisten mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan di balik berbagai pergantian tersebut, maka kelompok tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem.

Di sinilah konsep *political capture* menjadi relevan. *Political capture* dapat dipahami sebagai keadaan ketika proses pengambilan keputusan negara yang seharusnya menjadi sarana penyaluran kepentingan rakyat semakin dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar dibandingkan masyarakat secara umum. Pengaruh tersebut dapat bekerja melalui berbagai jalur yaitu pendanaan terhadap kegiatan kenegaraan, dukungan terhadap kandidat tertentu, hubungan dengan partai politik, jaringan kekuasaan yang terbentuk dalam jangka panjang, atau kombinasi berbagai faktor yang saling memperkuat satu sama lain.

Penting untuk dipahami bahwa *political capture* tidak selalu berarti adanya pelanggaran hukum. Dalam banyak kasus, seluruh proses berlangsung melalui mekanisme yang sah secara formal. Pemilu tetap berlangsung. Partai politik tetap berkompetisi.

Kampanye tetap dilakukan. Seluruh prosedur demokrasi tetap berjalan. Namun di balik seluruh prosedur tersebut terdapat ketimpangan pengaruh yang membuat sebagian kelompok memiliki kemampuan jauh lebih besar untuk menentukan arah proses negara.

Dalam BAB 9 telah dibahas bagaimana partai politik berfungsi sebagai *gateway* dalam sistem distribusi kekuasaan. Jalur menuju berbagai jabatan strategis negara sebagian besar melewati mekanisme kepartaian. Pada titik ini, hubungan antara *political capture* dan gatekeeping menjadi sangat jelas. Ketika akses menuju kekuasaan terkonsentrasi pada titik-titik tertentu, pihak yang mampu memengaruhi titik-titik tersebut akan memperoleh pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir yang dihasilkan sistem.

Analogi sederhana dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Bayangkan sebuah kompetisi yang terbuka untuk umum. Secara formal semua orang boleh ikut. Aturan kompetisi juga berlaku untuk semua peserta. Namun terdapat kelompok tertentu yang memiliki akses khusus terhadap proses seleksi awal, akses terhadap sumber daya yang lebih besar, dan akses terhadap informasi yang tidak dimiliki peserta lain. Kompetisi tetap berlangsung. Pemenang tetap ditentukan melalui prosedur yang sah. Akan tetapi peluang untuk memengaruhi hasil akhir tidak lagi tersebar secara merata.

Dalam konteks negara, kondisi seperti ini dapat menghasilkan pergeseran orientasi dalam penyelenggaraan negara. Pada awalnya, kehidupan

bernegara dirancang sebagai sarana untuk menerjemahkan kepentingan rakyat ke dalam kebijakan publik. Namun, ketika *political capture* semakin kuat, proses pengambilan keputusan berisiko lebih banyak melayani kepentingan kelompok yang memiliki akses terbesar terhadap pusat-pusat kekuasaan.

Fenomena tersebut sering kali sulit dikenali karena seluruh simbol demokrasi tetap hadir. Kampanye tetap ramai. Debat tetap berlangsung. Pemilu tetap diselenggarakan secara berkala. Dari luar, sistem tampak berjalan normal. Namun, sebagaimana telah dibahas dalam konsep *pseudo sovereignty*, keberadaan prosedur demokratis tidak selalu menjamin bahwa distribusi pengaruh dalam sistem berlangsung secara seimbang.

Dalam perspektif teknologi yang digunakan dalam buku ini, *political capture* dapat dianalogikan sebagai proses ketika pihak tertentu memperoleh akses terhadap konfigurasi sistem tanpa harus menjadi pemilik sistem. Sistem tetap berjalan atas nama pemilik. Tampilan luar tidak berubah. Namun arah pengembangan sistem semakin dipengaruhi oleh pihak yang memiliki akses terhadap pusat pengendalian.

Di sinilah hubungan antara *economic capture*, media *capture*, dan *political capture* mulai terlihat sebagai satu kesatuan. Kekuatan ekonomi dapat menyediakan sumber daya. Pengaruh media dapat membentuk persepsi masyarakat. Sementara itu, sumber daya ekonomi dan jaringan organisasi dapat memperluas kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan negara. Ketika ketiganya saling terhubung,

terbentuk struktur pengaruh yang jauh lebih kuat daripada jika masing-masing bekerja secara terpisah.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, *political capture* merupakan tantangan yang sangat serius. Sebab, sila keempat mengandaikan bahwa proses pengambilan keputusan negara berfungsi sebagai saluran kedaulatan rakyat. Ketika proses tersebut semakin dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki akses khusus, hubungan antara rakyat dan kekuasaan berisiko mengalami penyempitan.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena proses pengambilan keputusan negara pada akhirnya menentukan hampir seluruh kebijakan strategis. Anggaran negara, pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan berbagai keputusan penting lainnya melewati mekanisme penyelenggaraan negara. Karena itu, siapa yang memiliki pengaruh besar terhadap proses tersebut pada dasarnya juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah negara.

Perlu ditegaskan bahwa pembahasan ini bukan tuduhan terhadap partai politik, pejabat negara, atau kelompok tertentu. Fokus pembahasan adalah desain sistem. Sebab, dalam analisis sistem, yang paling penting bukan siapa yang sedang berada di dalam sistem hari ini, melainkan bagaimana sistem tersebut mendistribusikan pengaruh dan akses terhadap kekuasaan.

Karena itu, tesis subbab ini harus ditegaskan dengan jelas di mana pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan sering kali lebih bernilai daripada kemenangan dalam pemilihan yang bersifat sementara. Ketika kelompok tertentu memperoleh kemampuan yang jauh lebih besar untuk memengaruhi jalur pencalonan, distribusi kekuasaan, dan pengambilan keputusan negara, maka muncul fenomena *political capture*. Dalam kondisi seperti itu, proses demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi arah penyelenggaraan negara semakin berisiko ditentukan oleh pihak yang memiliki akses paling besar terhadap sistem, bukan oleh rakyat sebagai pemilik sah negara.

11.6. *Regulatory Capture*

Di antara berbagai bentuk *capture* yang dapat terjadi dalam sebuah negara, *regulatory capture* merupakan salah satu yang paling sulit dikenali. Jika *economic capture* berkaitan dengan pengaruh kekuatan ekonomi, media *capture* berkaitan dengan pengaruh terhadap informasi, dan *political capture* berkaitan dengan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, maka *regulatory capture* menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu aturan yang mengatur seluruh kehidupan bersama.

Dalam negara hukum, regulasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Regulasi menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Regulasi menentukan hak dan kewajiban

warga negara. Regulasi menentukan bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana pasar beroperasi, bagaimana pajak dipungut, bagaimana investasi dilakukan, dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Karena itu, siapa yang mampu memengaruhi regulasi pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah sistem secara keseluruhan.

Dalam kondisi ideal, regulasi dibentuk untuk melayani kepentingan publik. Negara hadir sebagai pengatur yang menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Regulasi seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, hukum dibentuk untuk melayani rakyat sebagai pemilik negara. Namun dalam praktik, proses pembentukan regulasi tidak pernah berlangsung dalam ruang yang steril. Berbagai kelompok kepentingan selalu berusaha memengaruhi arah kebijakan yang akan dihasilkan negara. Dunia usaha memiliki kepentingan ekonomi. Organisasi masyarakat memiliki kepentingan sosial. Kelompok profesi memiliki kepentingan sektoral. Partai politik memiliki kepentingan golongan. Semua pihak berusaha menyampaikan pandangan dan aspirasinya kepada pembentuk kebijakan.

Kondisi tersebut merupakan bagian normal dari kehidupan demokrasi. Persoalan muncul ketika pengaruh yang dimiliki oleh kelompok tertentu menjadi jauh lebih besar dibanding kemampuan masyarakat umum untuk memengaruhi proses yang sama. Pada titik inilah *regulatory capture* mulai terjadi.

Secara sederhana, *regulatory capture* adalah keadaan ketika regulasi yang seharusnya melayani kepentingan publik secara luas semakin dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap proses pembentukan aturan. Akibatnya, regulasi tetap tampak sebagai produk hukum negara, tetapi manfaat utamanya cenderung mengalir kepada kelompok yang memiliki pengaruh paling besar terhadap proses pembentukannya.

Dalam dunia teknologi, fenomena ini dapat dianalogikan sebagai perubahan konfigurasi sistem operasi. Sebuah sistem operasi menentukan bagaimana seluruh perangkat bekerja. Pengguna biasa mungkin hanya melihat tampilan antarmuka, tetapi perilaku sistem sebenarnya ditentukan oleh konfigurasi yang berada jauh di dalam lapisan sistem. Ketika konfigurasi tersebut diubah, seluruh aplikasi yang berjalan di atasnya juga akan ikut berubah.

Regulasi memiliki fungsi yang serupa dalam kehidupan bernegara. Regulasi adalah konfigurasi yang menentukan bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana pasar beroperasi, dan bagaimana sumber daya didistribusikan. Karena itu, pengaruh terhadap regulasi sering kali lebih kuat daripada pengaruh terhadap satu kebijakan tertentu. Kebijakan dapat berubah dalam waktu singkat, tetapi regulasi dapat membentuk perilaku sistem selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

Inilah sebabnya mengapa kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap suatu sektor sering berusaha memengaruhi proses pembentukan

regulasi. Bukan karena regulasi selalu memberikan keuntungan langsung, tetapi karena regulasi menentukan aturan permainan yang akan berlaku bagi seluruh pelaku dalam sistem.

Fenomena *regulatory capture* tidak selalu terlihat dalam bentuk yang mencolok. Tidak selalu ada pasal yang secara terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada kelompok tertentu. Justru dalam banyak kasus, regulasi tampak rasional, legal, dan prosedural. Seluruh tahapan formal dilalui. Pembahasan dilakukan sesuai mekanisme. Persetujuan diberikan oleh lembaga yang berwenang. Dari sisi prosedur, tidak tampak adanya masalah yang berarti.

Namun persoalan utama bukan berada pada prosedur semata. Persoalan utama berada pada distribusi pengaruh yang terjadi sebelum regulasi tersebut lahir. Siapa yang paling banyak didengar. Siapa yang memiliki akses paling besar kepada pembuat kebijakan. Siapa yang memiliki kemampuan menyediakan data, kajian, sumber daya, dan dukungan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan regulasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali lebih menentukan daripada proses formal yang terlihat di permukaan.

Dalam perspektif sistem, *regulatory capture* sangat berbahaya karena bekerja pada tingkat aturan dasar. Jika *economic capture* memengaruhi aliran sumber daya dan media *capture* memengaruhi aliran informasi, maka *regulatory capture* memengaruhi kerangka yang mengatur seluruh aliran tersebut. Ketika regulasi mulai bergerak menjauh dari kepentingan publik, dampaknya

dapat menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena ini juga menjelaskan mengapa oligarki tidak selalu membutuhkan kendali langsung terhadap pemerintahan. Dalam banyak kasus, pengaruh terhadap regulasi jauh lebih berharga daripada penguasaan jabatan formal. Jabatan dapat berganti melalui pemilu. Pejabat dapat berubah setiap periode. Namun regulasi yang telah terbentuk dapat terus bekerja jauh setelah pergantian kekuasaan terjadi.

Dalam konteks inilah hubungan antara *economic capture*, *political capture*, dan *regulatory capture* menjadi sangat erat. Kekuatan ekonomi dapat menyediakan sumber daya. Pengaruh kekuasaan dapat membuka akses terhadap proses pengambilan keputusan. Hasil akhirnya dapat berupa regulasi yang semakin menguntungkan kelompok yang telah memiliki pengaruh sejak awal. Ketiga proses tersebut saling memperkuat satu sama lain sehingga membentuk lingkaran pengaruh yang sulit diputus.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *regulatory capture* merupakan ancaman serius terhadap cita-cita keadilan. Sebab keadilan sosial mengandaikan bahwa hukum bekerja untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok yang memiliki akses terbesar terhadap proses pembentukan hukum. Ketika regulasi semakin banyak mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, maka jarak antara hukum dan keadilan dapat semakin melebar.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk mencurigai setiap regulasi atau setiap pembentuk kebijakan. Tidak semua regulasi yang menguntungkan suatu sektor merupakan hasil *regulatory capture*. Tidak semua hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha merupakan persoalan. Fokus pembahasan adalah pada pola sistemik yang membuat pengaruh tertentu menjadi jauh lebih dominan dibanding kepentingan publik secara keseluruhan.

Karena itu, tesis subbab ini dapat dirumuskan secara tegas yaitu hukum dapat berubah dari pelindung publik menjadi pelindung kepentingan ketika proses pembentukan regulasi semakin dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki akses paling besar terhadap kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, *regulatory capture* bekerja layaknya *malware* yang tidak merusak sistem dari luar, tetapi mengubah konfigurasi internal sistem sehingga seluruh mekanisme negara tetap berjalan, namun arah manfaat yang dihasilkan semakin menjauh dari rakyat sebagai pemilik sah negara.

11.7. *Malware* Tidak Selalu Merusak Sistem

Ketika mendengar istilah *malware*, banyak orang langsung membayangkan sebuah program berbahaya yang menghancurkan komputer, menghapus data, atau membuat sistem tidak dapat digunakan. Gambaran tersebut memang sesuai dengan karakter berbagai ancaman digital pada masa awal perkembangan teknologi informasi. Namun seiring berkembangnya teknologi, bentuk ancaman pun ikut berubah. *Malware*

modern tidak selalu diciptakan untuk merusak sistem. Dalam banyak kasus, tujuan utamanya justru bukan menghancurkan, melainkan memanfaatkan sistem yang sudah ada.

Perubahan ini didasarkan pada logika yang sederhana. Para pembuat *malware* memahami bahwa sistem yang tetap hidup sering kali jauh lebih bernilai daripada sistem yang hancur. Komputer yang mati tidak dapat digunakan. Jaringan yang lumpuh tidak menghasilkan data. Platform yang rusak tidak memberikan keuntungan apa pun. Karena itu, banyak *malware* modern dirancang agar tetap tersembunyi dan membiarkan sistem bekerja sebagaimana biasanya.

Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda. Layar tetap menyala, berbagai program tetap berjalan, dan pengguna tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi, di balik semua itu, sebagian sumber daya sistem diam-diam digunakan untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari kepentingan pemiliknya.

Prinsip inilah yang menjadikan analogi *malware* relevan untuk memahami oligarki dan berbagai bentuk *capture* yang telah dibahas pada subbab-subbab sebelumnya.

Banyak orang menganggap bahwa ancaman terbesar terhadap negara selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata, seperti kudeta, perang saudara, invasi asing, atau keruntuhan pemerintahan. Ancaman seperti itu memang nyata dan mudah dikenali. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa banyak negara tidak mengalami kemunduran karena sistemnya dihancurkan dari luar. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang secara

perlahan menyimpang dari tujuan awalnya karena sistem yang ada digunakan untuk melayani kepentingan yang berbeda dari alasan mengapa sistem tersebut dibentuk.

Negara tetap berdiri. Konstitusi tetap berlaku. Pemilu tetap diselenggarakan. Lembaga-lembaga negara tetap bekerja. Pajak tetap dipungut dan pembangunan tetap berjalan. Dari luar, seluruh komponen negara tampak berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun persoalan yang sesungguhnya bukanlah apakah sistem masih berjalan, melainkan untuk siapa sistem itu bekerja.

Pada BAB 10 telah dijelaskan bahwa rakyat dapat tetap menjadi *root owner* secara formal meskipun akses mereka terhadap pengendalian sistem mengalami penyempitan. Selanjutnya, pada BAB 11.2 hingga BAB 11.6 telah dibahas bagaimana ruang yang ditinggalkan oleh melemahnya *root access* rakyat dapat diisi oleh berbagai bentuk *capture*, mulai dari *economic capture*, media *capture*, *political capture*, hingga *regulatory capture*.

Keseluruhan proses tersebut tidak selalu menimbulkan kerusakan yang tampak di permukaan. Negara tidak serta-merta berhenti berfungsi dan pemerintahan tidak otomatis lumpuh. Bahkan dalam banyak keadaan, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, pembangunan tetap berlangsung, dan berbagai indikator formal masih menunjukkan kondisi yang normal.

Di sinilah letak kemiripan antara oligarki dan *malware* modern.

Malware tidak perlu mematikan sistem untuk memperoleh keuntungan. Demikian pula oligarki tidak perlu menghancurkan negara untuk memperoleh manfaat dari negara. Bahkan, negara yang stabil sering kali jauh lebih menguntungkan daripada negara yang kacau. Ekonomi yang tumbuh lebih menguntungkan daripada ekonomi yang runtuh. Birokrasi yang berjalan lebih bernilai daripada birokrasi yang lumpuh. Sistem hukum yang tetap berfungsi juga lebih menguntungkan daripada sistem hukum yang hancur total.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan sistem, melainkan pada arah manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Analogi sederhana dapat membantu menjelaskan keadaan ini. Bayangkan sebuah perusahaan yang didirikan untuk melayani seluruh pemegang saham secara adil. Perusahaan tetap beroperasi, karyawan tetap bekerja, produk tetap dipasarkan, dan keuntungan tetap diperoleh. Dari luar, perusahaan tampak sehat. Namun secara perlahan, sebagian besar keputusan strategis mulai diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses paling dekat dengan pusat pengambilan keputusan. Perusahaan tidak hancur, bahkan mungkin terus berkembang, tetapi manfaat terbesar dari perkembangan tersebut semakin terkonsentrasi pada kelompok yang sama.

Fenomena seperti inilah yang ingin dijelaskan melalui konsep *malware* system dalam buku ini. Sebuah sistem negara dapat tetap berfungsi secara administratif sambil secara perlahan mengalami perubahan orientasi.

Fungsi-fungsi formal tetap berjalan, tetapi distribusi manfaat, distribusi pengaruh, dan distribusi akses menjadi semakin tidak seimbang.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering kali kesulitan mengenali persoalan yang sebenarnya karena ukuran yang digunakan hanya sebatas pertanyaan apakah negara masih berjalan atau tidak. Padahal, sebuah sistem dapat bekerja dengan sangat baik secara teknis sambil secara bersamaan menjauh dari tujuan awal pembentukannya.

Dalam dunia teknologi, sebuah komputer yang terinfeksi *spyware* dapat tetap bekerja dengan sempurna. Pengguna masih dapat membuka dokumen, mengirim surat elektronik, dan menjalankan berbagai aplikasi seperti biasa. Akan tetapi, sebagian sumber daya komputer tersebut diam-diam digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi pihak lain. Sistem tetap berfungsi, tetapi orientasi penggunaannya telah berubah.

Hal yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara dapat tetap menjalankan seluruh fungsi formalnya sambil mengalami pergeseran orientasi yang tidak mudah terlihat. Kebijakan tetap dibuat, regulasi tetap diterbitkan, dan program pembangunan tetap dilaksanakan. Namun sebagian besar manfaat dari keseluruhan proses tersebut semakin mengalir kepada kelompok yang memiliki akses paling besar terhadap sistem.

Persoalan ini menjadi sangat penting dalam perspektif Pancasila, khususnya Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kata

seluruh mengandung makna yang mendalam. Negara tidak dibangun untuk melayani sebagian kecil rakyat, tidak pula untuk melayani kelompok yang paling kuat secara ekonomi ataupun informasi. Negara dibangun untuk melayani seluruh rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup hanya dilihat dari keberlangsungan sistemnya. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah sistem tersebut masih bekerja sesuai dengan tujuan yang menjadi dasar pembentukannya. Apakah kekuasaan masih mengalir dari rakyat, apakah kebijakan masih berpihak pada kepentingan umum, apakah hukum masih melindungi seluruh warga negara, dan apakah pembangunan masih diarahkan bagi kesejahteraan bersama.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih mendasar daripada sekadar menilai apakah sistem masih hidup atau tidak.

Pada akhirnya, inilah alasan mengapa oligarki dianalogikan sebagai *malware*. Bukan karena oligarki selalu menghancurkan negara secara langsung, melainkan karena oligarki dapat bekerja tanpa harus menghancurkan negara. Sistem tetap hidup, tetap berjalan, dan tetap tampak normal, tetapi arah manfaat yang dihasilkan sistem secara perlahan mengalami perubahan.

11.8. Mengapa Sulit Dilihat?

Salah satu alasan mengapa oligarki sering menjadi perdebatan yang tidak pernah benar-benar

selesai adalah karena cara kerjanya tidak selalu mudah dikenali. Berbeda dengan perampasan kekuasaan yang dilakukan secara terbuka, kudeta militer, atau penjajahan yang berlangsung melalui kekuatan bersenjata, pengaruh oligarki sering bergerak melalui jalur-jalur yang tampak normal. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perubahan nama negara, tidak ada pembubaran konstitusi, dan tidak ada peristiwa dramatis yang secara langsung menunjukkan bahwa arah sistem sedang mengalami pergeseran.

Justru karena bekerja melalui mekanisme yang tampak biasa itulah fenomena ini menjadi sulit dilihat. Dalam dunia teknologi, ancaman yang paling mudah dikenali biasanya adalah ancaman yang menyebabkan sistem berhenti bekerja. Ketika komputer tidak dapat menyala, pengguna segera menyadari adanya masalah. Ketika data hilang, kerusakan langsung terlihat. Ketika jaringan terputus, gangguan dapat dirasakan oleh semua orang.

Namun ancaman yang paling berbahaya sering kali bukan ancaman yang terlihat jelas. Ancaman yang paling berbahaya justru membiarkan sistem tetap berjalan sambil secara perlahan mengubah perilaku sistem tersebut. Pengguna tetap merasa semuanya normal. Sistem tetap memberikan hasil. Tidak ada alarm yang berbunyi dan tidak ada gejala yang mencolok. Akan tetapi, tanpa disadari, arah penggunaan sistem perlahan berubah.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Negara tetap memiliki konstitusi. Pemilu tetap diselenggarakan. Partai politik tetap

berkompetisi. Media tetap beroperasi. Parlemen tetap bersidang dan pemerintah tetap menjalankan fungsinya. Dari luar, seluruh unsur demokrasi tampak berjalan sebagaimana mestinya.

Karena itu, sebagian besar masyarakat akan menganggap bahwa tidak ada persoalan yang mendasar. Selama prosedur masih berlangsung dan institusi masih berfungsi, sistem dianggap sehat. Pada pandangan pertama, logika ini memang tampak masuk akal.

Namun persoalan yang sesungguhnya bukan hanya mengenai keberadaan prosedur, melainkan mengenai siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari prosedur tersebut, siapa yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil akhirnya, dan bagaimana distribusi kekuasaan sebenarnya bekerja di balik struktur formal yang terlihat di permukaan.

Di sinilah letak kesulitan utama dalam mengenali oligarki. Oligarki tidak selalu bekerja dengan cara melawan sistem. Oligarki justru sering bekerja melalui sistem. Oligarki tidak selalu menolak hukum, tetapi dapat memanfaatkan hukum. Oligarki tidak selalu menentang demokrasi, bahkan dapat hidup dan berkembang di dalam demokrasi itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang hanya melihat bentuk luar sering kali tidak cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi.

Dalam BAB 9 telah dibahas konsep *pseudo sovereignty*, yaitu keadaan ketika kedaulatan tetap tampak hadir secara formal, tetapi mengalami penyempitan pada tingkat operasional. Konsep tersebut sangat relevan untuk memahami mengapa oligarki sulit

dikenali. Selama simbol-simbol demokrasi masih berdiri, sebagian besar masyarakat akan tetap melihat sistem sebagai sistem yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat. Padahal simbol dan substansi tidak selalu berjalan beriringan.

Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat memiliki sertifikat kepemilikan sebuah rumah, tetapi tidak lagi menentukan bagaimana rumah tersebut dikelola. Secara formal kepemilikan masih ada, tetapi pada tingkat operasional kendali sudah berada di tangan pihak lain.

Demikian pula dalam kehidupan bernegara. Kedaulatan rakyat dapat tetap diakui secara konstitusional, sementara pengaruh terhadap jalur-jalur strategis pengambilan keputusan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dari sisi formal tidak ada yang berubah, tetapi dari sisi operasional distribusi kekuasaan dapat bergerak ke arah yang sangat berbeda.

Kesulitan lain muncul karena banyak mekanisme yang digunakan berlangsung secara legal dan prosedural. Pendanaan kegiatan dapat berlangsung secara sah. Aktivitas lobi dapat berlangsung secara sah. Kepemilikan media dapat berlangsung secara sah. Konsentrasi ekonomi dapat berkembang melalui mekanisme pasar yang sah. Penyusunan regulasi pun dapat dilakukan melalui prosedur yang sah.

Ketika seluruh proses tersebut berjalan dalam kerangka formal yang legal, masyarakat dengan mudah menyimpulkan bahwa tidak ada persoalan yang perlu

diperdebatkan. Padahal legalitas dan keadilan bukanlah dua hal yang selalu identik.

Sesuatu dapat legal tetapi menghasilkan ketimpangan pengaruh yang besar. Sesuatu dapat prosedural tetapi menjauh dari semangat kedaulatan rakyat. Sesuatu dapat sah secara administratif tetapi menghasilkan distribusi manfaat yang tidak seimbang. Karena itu, untuk memahami oligarki diperlukan kemampuan melihat lebih dalam daripada sekadar prosedur yang tampak di permukaan.

Dalam dunia keamanan siber terdapat istilah stealth *malware*, yaitu *malware* yang secara khusus dirancang agar tidak terdeteksi. Program semacam ini tidak menimbulkan gangguan yang mencolok, tidak membuat sistem berhenti bekerja, dan tidak memunculkan gejala yang mudah dikenali. Tujuan utamanya adalah bertahan selama mungkin tanpa menarik perhatian. Semakin tidak terlihat, semakin efektif cara kerjanya.

Analogi tersebut membantu menjelaskan mengapa berbagai bentuk *capture* yang telah dibahas sebelumnya sering sulit dikenali sebagai satu kesatuan. Economic *capture*, media *capture*, *political capture*, dan *regulatory capture* biasanya tidak hadir dalam bentuk satu peristiwa besar. Semuanya berkembang secara bertahap melalui proses yang panjang. Setiap langkah tampak kecil dan setiap perubahan terlihat wajar. Namun ketika seluruh proses tersebut terakumulasi selama bertahun-tahun, hasil akhirnya dapat mengubah orientasi sistem secara signifikan.

Dalam konteks seperti ini, masyarakat sering kali lebih mudah melihat gejala daripada memahami sumber persoalannya. Masyarakat melihat biaya pemilihan yang tinggi, ketimpangan ekonomi yang semakin besar, rendahnya kepercayaan publik, atau dominasi kelompok tertentu dalam berbagai sektor. Akan tetapi hubungan antara seluruh gejala tersebut tidak selalu tampak dengan jelas.

Akibatnya, perhatian publik sering terpecah pada berbagai persoalan yang muncul di permukaan, sementara pola yang lebih besar tetap tersembunyi di balik rangkaian peristiwa sehari-hari.

Dalam perspektif Pancasila, keadaan semacam ini sangat berbahaya karena dapat mengikis kedaulatan rakyat tanpa menimbulkan kesadaran kolektif yang memadai. Rakyat tetap merasa memiliki negara, demokrasi tetap berjalan, dan institusi tetap berfungsi. Namun hubungan antara rakyat dan pusat-pusat pengambilan keputusan perlahan menjadi semakin jauh.

Ketika proses tersebut berlangsung dalam waktu yang panjang, keadaan yang semula dianggap sebagai penyimpangan dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Generasi baru tumbuh di dalam sistem tersebut dan menerima keadaan yang ada sebagai bentuk alamiah kehidupan bernegara. Pada titik inilah kemampuan masyarakat untuk membedakan antara desain asli dan desain yang telah mengalami penyimpangan menjadi semakin lemah.

11.9. Gejala-Gejala Oligarki

Salah satu kesulitan terbesar dalam membahas oligarki adalah kenyataan bahwa oligarki jarang hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Tidak ada gedung khusus yang bertuliskan "Pusat Oligarki". Tidak ada lembaga resmi yang secara terbuka mengumumkan bahwa negara sedang dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahkan dalam banyak keadaan, seluruh prosedur demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu tetap dilaksanakan, lembaga negara tetap bekerja, dan berbagai aktivitas pemerintahan tetap berlangsung seperti biasa. Karena itu, oligarki sering kali lebih mudah dikenali melalui gejalanya daripada melalui pelakunya.

Dalam ilmu kedokteran, seorang dokter biasanya tidak langsung melihat penyakit yang menjadi penyebab utama gangguan kesehatan seseorang. Hal pertama yang tampak justru adalah gejalanya. Demam, batuk, nyeri, kelelahan, atau penurunan kondisi tubuh menjadi petunjuk awal yang mengarahkan proses diagnosis. Gejala bukanlah penyakit itu sendiri, tetapi gejala memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam tubuh.

Pendekatan yang sama dapat digunakan untuk memahami oligarki dalam kehidupan bernegara. Oligarki tidak pertama-tama dikenali dari nama orang, kelompok, perusahaan, atau organisasi tertentu. Oligarki lebih mudah dipahami melalui pola-pola yang muncul secara berulang dalam sistem. Pola-pola tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa distribusi pengaruh dan distribusi akses terhadap kekuasaan tidak lagi berjalan secara seimbang. Salah satu gejala

yang paling sering muncul adalah tingginya biaya pencalonan dan kampanye.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap warga negara secara teoritis memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara. Namun, ketika biaya pencalonan dan kampanye menjadi sangat tinggi, ruang persaingan secara perlahan mulai menyempit. Proses pencalonan semakin bergantung pada kemampuan finansial, jaringan pendukung, dan akses terhadap sumber daya yang besar.

Akibatnya, tidak semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk memasuki arena kekuasaan. Secara formal, pintu tetap terbuka, tetapi secara praktis hanya kelompok tertentu yang mampu melewati berbagai hambatan yang ada. Semakin besar biaya yang diperlukan untuk memasuki ruang kekuasaan, semakin besar kemungkinan bahwa pengaruh terhadap penyelenggaraan negara akan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan pendukung yang besar. Gejala berikutnya adalah konsentrasi kepemilikan media dan informasi.

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, informasi merupakan salah satu sumber daya paling strategis dalam kehidupan demokrasi. Ketika ruang informasi semakin terkonsentrasi pada kelompok yang relatif kecil, kemampuan masyarakat untuk memperoleh perspektif yang beragam dapat mengalami penyempitan. Persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki media, tetapi

mengenai keseimbangan distribusi pengaruh dalam pembentukan opini publik.

Demokrasi yang sehat membutuhkan keberagaman informasi. Sebaliknya, konsentrasi informasi yang terlalu besar berpotensi menghasilkan dominasi narasi tertentu yang semakin sulit dikoreksi oleh masyarakat. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, ruang publik dapat kehilangan sebagian kemampuannya untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi yang berlangsung secara persisten.

Perlu ditegaskan bahwa ketimpangan ekonomi tidak selalu identik dengan oligarki. Setiap negara memiliki tingkat ketimpangan tertentu sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang beragam. Akan tetapi, ketika ketimpangan terus melebar dalam waktu yang panjang dan semakin sulit diperbaiki melalui mekanisme normal, keadaan tersebut patut menjadi perhatian.

Ketimpangan yang tinggi bukan hanya persoalan distribusi kekayaan. Ketimpangan tersebut dapat berkembang menjadi ketimpangan akses terhadap pendidikan, informasi, jaringan sosial, bahkan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Pada titik tertentu, kekayaan tidak lagi hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghasilkan pengaruh yang semakin besar terhadap arah kehidupan publik.

Gejala berikutnya adalah munculnya pola kebijakan yang secara berulang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas.

Dalam setiap negara, kebijakan pasti menghasilkan pihak yang memperoleh manfaat lebih besar daripada pihak lainnya. Hal tersebut merupakan bagian normal dari proses pengambilan keputusan. Namun ketika pola yang sama terus berulang dalam berbagai sektor dan dalam berbagai periode pemerintahan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar mengenai distribusi pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan.

Pertanyaan yang penting bukan hanya siapa yang memperoleh manfaat, tetapi mengapa kelompok yang sama terus berada pada posisi yang paling diuntungkan. Ketika pola tersebut berlangsung secara konsisten, konsep *capture* yang telah dibahas pada subbab sebelumnya menjadi semakin relevan untuk digunakan sebagai alat analisis.

Gejala berikutnya adalah rendahnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan kemampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kerja keras, inovasi, dan berbagai bentuk kontribusi produktif lainnya. Dalam masyarakat yang sehat, kesempatan untuk berkembang tidak ditentukan semata-mata oleh latar belakang keluarga, kedekatan dengan kekuasaan, atau kepemilikan modal yang diwariskan.

Sebaliknya, ketika mobilitas sosial semakin sulit dicapai, masyarakat mulai merasakan bahwa

keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh akses daripada prestasi. Pada titik tersebut, kepercayaan terhadap keadilan sistem mulai mengalami penurunan. Masyarakat tidak lagi melihat sistem sebagai ruang kompetisi yang terbuka, tetapi sebagai struktur yang lebih mudah dimasuki oleh mereka yang telah memiliki posisi kuat sejak awal.

Gejala lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebagaimana telah dibahas dalam BAB 10 mengenai *political alienation*, rendahnya kepercayaan publik sering kali menjadi tanda bahwa terdapat jarak yang semakin lebar antara rakyat dan pusat pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh yang cukup terhadap arah negara, kepercayaan terhadap institusi yang mengelola negara juga cenderung mengalami penurunan.

Menariknya, gejala ini sering muncul bersamaan dengan gejala-gejala lainnya. Tingginya biaya pencalonan dan kampanye, konsentrasi kekuatan ekonomi, dominasi informasi, dan rendahnya mobilitas sosial dapat secara bersama-sama menghasilkan persepsi bahwa sistem lebih banyak melayani kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif sistem, seluruh gejala tersebut tidak berdiri sendiri. Masing-masing saling berhubungan dan saling memperkuat. Konsentrasi kekuatan ekonomi dapat memperbesar pengaruh terhadap pengambilan keputusan negara. Pengaruh tersebut dapat memengaruhi regulasi. Regulasi

kemudian dapat semakin memperkuat posisi ekonomi yang telah dominan. Pengaruh terhadap media dapat membentuk persepsi publik mengenai seluruh proses tersebut. Dari hubungan yang saling menguatkan ini dapat lahir sebuah lingkaran pengaruh yang semakin sulit diputus.

Karena itu, pembahasan mengenai oligarki tidak seharusnya terjebak pada pencarian individu tertentu sebagai pihak yang harus disalahkan. Pendekatan semacam itu sering kali hanya menghasilkan perdebatan yang tidak produktif. Fokus yang lebih penting adalah memahami pola dan gejala yang muncul dalam sistem.

Dalam kerangka berpikir buku ini, persoalan utamanya bukan siapa yang sedang memegang pengaruh pada hari ini. Persoalannya adalah apakah desain sistem memungkinkan pengaruh terkonsentrasi secara berlebihan pada kelompok tertentu. Sebab selama desain sistem tidak berubah, pergantian pelaku belum tentu menghasilkan perubahan yang mendasar.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya Sila Kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, gejala-gejala tersebut perlu dipahami sebagai peringatan bahwa keseimbangan antara kekuasaan, ekonomi, informasi, dan kepentingan rakyat harus terus dijaga. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, kedaulatan rakyat berisiko mengalami penyempitan meskipun seluruh simbol demokrasi tetap hadir.

11.10. Negara yang Melayani Siapa?

Setelah menelusuri berbagai bentuk *capture* yang dapat terjadi dalam sebuah sistem negara, mulai dari *economic capture*, media *capture*, *political capture*, hingga *regulatory capture*, pembahasan pada bab ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan tersebut sesungguhnya jauh lebih penting daripada seluruh istilah teknis yang telah dibahas sebelumnya. Sebab tujuan memahami sebuah sistem bukanlah sekadar menghafal konsep, melainkan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana yaitu negara ini sesungguhnya bekerja untuk siapa.

Sekilas pertanyaan tersebut tampak biasa. Namun jika ditelaah lebih dalam, pertanyaan itu menyentuh inti dari seluruh pembahasan mengenai kedaulatan rakyat, konstitusi, oligarki, dan desain ketatanegaraan. Negara dibentuk bukan sekadar agar memiliki pemerintahan, hukum, atau lembaga-lembaga kekuasaan. Negara dibentuk untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik bagi rakyat yang menjadi pemilik sah negara tersebut.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah negara tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan institusinya. Sebuah negara dapat memiliki parlemen, pemerintahan, pengadilan, kementerian, badan-badan negara, dan berbagai instrumen kekuasaan lainnya. Namun keberadaan seluruh institusi tersebut belum otomatis menjawab apakah negara benar-benar melayani rakyat. Dalam analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, sebuah sistem komputer dapat memiliki perangkat keras yang sangat canggih. Prosesor bekerja dengan baik, memori tersedia dalam jumlah besar,

jaringan berjalan cepat, dan sistem operasi berfungsi secara stabil. Akan tetapi, seluruh keunggulan tersebut tidak banyak berarti apabila arah penggunaan sistem telah bergeser dari tujuan awal pemiliknya.

Demikian pula dengan negara. Negara dapat memiliki pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, birokrasi yang besar, dan teknologi yang maju. Namun seluruh pencapaian tersebut belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar, yaitu siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari seluruh aktivitas tersebut.

Dalam teori ketatanegaraan, jawaban normatif terhadap pertanyaan ini sebenarnya sangat jelas. Negara seharusnya melayani rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan dijalankan atas nama rakyat. Pajak dipungut dari rakyat. Anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Hukum dibentuk untuk melindungi rakyat. Seluruh legitimasi negara pada akhirnya berasal dari rakyat.

Secara teoritis, hampir tidak ada ruang untuk memperdebatkan prinsip tersebut. Namun pembahasan dalam BAB 7 hingga BAB 11 menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu.

Dalam BAB 7 telah dijelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai *firmware* negara yang menentukan bagaimana sistem bekerja. BAB 8 membahas bagaimana perubahan *firmware* dapat mengubah jalur distribusi kekuasaan. BAB 9 memperlihatkan bagaimana kedaulatan rakyat berpotensi mengalami penyempitan melalui mekanisme **penjagaan akses kekuasaan (gatekeeping)**. BAB 10 menjelaskan bahwa rakyat dapat

tetap menjadi pemilik formal negara, tetapi kehilangan sebagian akses terhadap pengendalian negara. Selanjutnya, BAB 11 menunjukkan bagaimana ruang yang ditinggalkan oleh melemahnya *root access* rakyat dapat diisi oleh berbagai bentuk *capture* yang bekerja secara sistemik.

Keseluruhan pembahasan tersebut mengarah pada satu kesimpulan penting. Persoalan terbesar sebuah negara tidak selalu terletak pada siapa yang sedang memegang jabatan kekuasaan. Persoalan terbesar sering kali terletak pada bagaimana sistem mendistribusikan manfaat, pengaruh, dan akses terhadap kekuasaan.

Pergantian pejabat dapat terjadi. Pergantian partai politik dapat terjadi. Pergantian pemerintahan pun dapat terjadi. Akan tetapi, apabila desain sistem terus menghasilkan pola yang sama, hasil akhirnya sering kali tidak banyak berubah.

Karena itu, pertanyaan mengenai "siapa yang berkuasa" belum tentu merupakan pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang lebih penting adalah "siapa yang menentukan arah sistem". Dan yang lebih mendasar lagi adalah "siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari arah tersebut".

Dalam dunia teknologi, pemilik sistem biasanya dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Sistem dibangun untuk melayani pemiliknya. Ketika sistem mulai lebih banyak melayani pihak lain daripada pemiliknya sendiri, maka terdapat persoalan yang perlu diperbaiki.

Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Jika negara dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, maka rakyat seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari seluruh aktivitas negara. Hal ini bukan berarti setiap kebijakan harus menyenangkan semua pihak, atau setiap keputusan harus menguntungkan setiap individu dalam ukuran yang sama. Akan tetapi, orientasi dasarnya harus tetap jelas, yaitu bahwa negara bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Di sinilah pembahasan mengenai oligarki menjadi relevan. Oligarki bukan semata-mata persoalan mengenai orang kaya dan bukan pula sekadar persoalan mengenai segelintir orang. Oligarki pada dasarnya adalah persoalan mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran orientasi sistem. Ketika berbagai bentuk *capture* semakin kuat, muncul risiko bahwa negara secara perlahan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan kelompok tertentu dibandingkan terhadap kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Menariknya, pergeseran semacam itu tidak selalu tampak secara langsung. Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, seluruh prosedur dapat tetap berjalan secara normal. Demokrasi tetap ada. Pemilu tetap berlangsung. Konstitusi tetap berlaku. Namun distribusi manfaat dan distribusi pengaruh dapat bergerak menjauh dari semangat awal kedaulatan rakyat.

Karena itu, persoalan utama yang perlu diajukan bukanlah apakah negara masih memiliki institusi demokrasi. Persoalannya adalah apakah institusi-

institusi tersebut masih bekerja sesuai dengan tujuan yang melahirkan keberadaannya.

Apakah hukum masih melindungi seluruh rakyat? Apakah kebijakan masih diarahkan bagi kepentingan umum? Apakah pembangunan masih bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama? Apakah informasi masih membantu rakyat memahami realitas secara utuh? Apakah politik masih menjadi sarana penyaluran kedaulatan rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menilai apakah prosedur formal masih berjalan atau tidak.

Dalam perspektif Pancasila, seluruh sila pada akhirnya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan bersama yang bermartabat, adil, dan berkeadaban. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan sekadar rangkaian kata, melainkan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah negara masih bergerak sesuai dengan arah yang dicita-citakan bangsa.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai oligarki dalam buku ini tidak dimaksudkan untuk menunjuk musuh tertentu. Pembahasan ini juga tidak dimaksudkan untuk membangun kecurigaan terhadap setiap bentuk kekuatan ekonomi ataupun media. Fokus utamanya adalah mengajak pembaca melihat kembali desain sistem dan bertanya secara jujur apakah sistem yang ada masih memastikan bahwa negara benar-benar bekerja untuk rakyat sebagai pemilik sah negara.

Pada akhirnya, ketika rakyat kehilangan *root access*, pertanyaan berikutnya bukan lagi siapa yang

memegang kekuasaan secara formal. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang sesungguhnya menentukan arah sistem di balik seluruh struktur formal tersebut.

Dengan demikian, seluruh pembahasan dalam bab ini sesungguhnya bermuara pada satu prinsip yang sederhana. Sebuah negara tidak hanya dinilai dari kemampuannya untuk bertahan, tetapi dari kemampuannya untuk tetap setia pada tujuan pembentukannya. Negara tidak hanya harus berjalan, tetapi harus berjalan ke arah yang benar.

BAB 12
DEMOKRASI TRANSAKSIONAL SEBAGAI SPYWARE

12.1. Apa Itu *Spyware*?

Dalam dunia teknologi informasi, terdapat berbagai jenis perangkat lunak yang dirancang untuk memengaruhi sebuah sistem. Sebagian bekerja secara terang-terangan dengan merusak data, menghapus file, atau melumpuhkan fungsi tertentu. Sebagian lainnya bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Salah satu di antaranya adalah *spyware*. Berbeda dengan virus atau ransomware yang sering menimbulkan gangguan yang mudah dikenali, *spyware* justru dirancang agar tidak terlihat. Pengguna tetap dapat menjalankan komputer seperti biasa. Program tetap berfungsi. Sistem tetap berjalan. Tidak ada peringatan yang mencolok. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang mudah diamati. Namun di balik semua itu, terdapat proses yang terus bekerja mengumpulkan informasi, mempelajari kebiasaan, dan memetakan perilaku pengguna.

Karena itulah kekuatan utama *spyware* bukan terletak pada kemampuan menghancurkan sistem, melainkan pada kemampuan memahami pengguna sistem. Setiap pencarian, setiap pilihan menu, setiap situs yang dikunjungi, setiap kebiasaan yang dilakukan secara berulang dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Dari potongan-potongan data yang tampak sederhana tersebut, dapat dibangun gambaran yang sangat rinci mengenai siapa pengguna itu, apa

yang disukai, apa yang ditakuti, apa yang diinginkan, dan bagaimana kemungkinan pengguna tersebut akan mengambil keputusan pada masa mendatang.

Dalam dunia bisnis modern, prinsip ini telah menjadi fondasi utama berbagai *platform* digital. Mesin pencari mempelajari apa yang ingin diketahui pengguna. Media sosial mempelajari topik yang menarik perhatian pengguna. Platform belanja mempelajari kebiasaan konsumsi pengguna. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin akurat kemampuan sistem untuk memprediksi perilaku seseorang. Bahkan dalam banyak kasus, sistem dapat mengetahui kecenderungan perilaku tertentu sebelum pengguna sendiri menyadarinya secara penuh.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era informasi, pengetahuan tentang perilaku manusia telah menjadi bentuk kekuasaan yang sangat penting. Pada masa lalu, kekuasaan sering dikaitkan dengan jumlah tentara, luas wilayah, atau besarnya kekayaan. Saat ini, kemampuan memahami cara berpikir manusia dapat menghasilkan pengaruh yang sama besarnya, bahkan sering kali lebih besar. Sebab seseorang yang memahami bagaimana manusia mengambil keputusan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memengaruhi keputusan tersebut.

Prinsip inilah yang menjadikan *spyware* sebagai analogi yang relevan untuk memahami salah satu perkembangan demokrasi modern. Setelah pada bab sebelumnya dibahas bagaimana oligarki dapat bekerja seperti *malware* yang memanfaatkan sistem negara tanpa harus menghancurkan sistem tersebut,

pembahasan berikutnya bergerak ke tingkat yang lebih dalam, yaitu bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat dapat dipengaruhi tanpa harus mencabut hak-hak masyarakat secara formal.

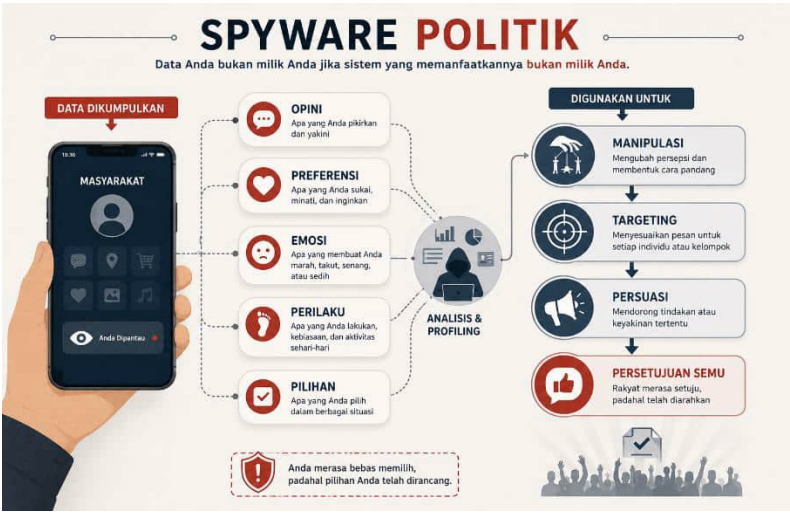

Dalam negara demokrasi, rakyat adalah sumber legitimasi kekuasaan. Pemilu, referendum, survei, kampanye, dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya bertumpu pada asumsi bahwa rakyat mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Demokrasi dibangun di atas keyakinan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan dan keyakinannya. Namun perkembangan teknologi informasi menghadirkan pertanyaan baru yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam skala sebesar sekarang. Sejauh mana sebuah pilihan benar-benar lahir dari pertimbangan yang merdeka apabila

lingkungan informasi yang membentuk pertimbangan tersebut dapat dipetakan, dipelajari, dan diarahkan secara sistematis?

Pertanyaan ini tidak berarti bahwa masyarakat kehilangan kemampuan berpikir. Tidak pula berarti bahwa setiap pilihan merupakan hasil rekayasa pihak tertentu. Pembahasan ini lebih diarahkan untuk memahami bagaimana proses pembentukan opini publik telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jika pada masa lalu penyampaian pesan kepada masyarakat dilakukan secara massal dengan pesan yang relatif sama untuk semua orang, saat ini teknologi memungkinkan setiap kelompok masyarakat menerima informasi yang berbeda sesuai dengan karakteristik, usia, pendidikan, minat, lokasi, bahkan kondisi psikologisnya.

Akibatnya, ruang pengambilan keputusan negara tidak lagi hanya menjadi arena pertarungan gagasan dan program. Ruang tersebut juga menjadi arena pertarungan data dan perilaku. Semakin banyak informasi yang diketahui mengenai masyarakat, semakin besar kemampuan untuk menyusun dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan karakteristik kelompok tertentu. Sebuah narasi dapat dirancang khusus untuk masyarakat perkotaan. Narasi lain dapat dirancang untuk masyarakat pedesaan. Pesan yang berbeda dapat disampaikan kepada kelompok usia yang berbeda. Bahkan, dua orang yang tinggal dalam lingkungan yang sama dapat menerima gambaran mengenai kehidupan bernegara yang sangat berbeda meskipun membicarakan peristiwa yang sama.

Dalam konteks inilah demokrasi mulai bersentuhan dengan logika yang menyerupai cara kerja sistem pemantauan digital. Bukan karena masyarakat secara langsung diawasi oleh perangkat tertentu, melainkan karena proses pengambilan keputusan semakin bergantung pada kemampuan memahami dan memetakan perilaku masyarakat secara rinci. Semakin rinci peta perilaku tersebut, semakin besar kemampuan untuk memengaruhi arah perhatian, membentuk persepsi, dan mengarahkan pilihan masyarakat tanpa harus menggunakan paksaan yang terlihat.

Perubahan ini sangat penting untuk dipahami karena selama berabad-abad manusia cenderung menganggap bahwa ancaman terhadap kebebasan selalu datang dalam bentuk yang keras dan terbuka. Ancaman dibayangkan hadir melalui larangan berbicara, sensor, penangkapan, atau penggunaan kekuatan fisik. Padahal dalam era informasi, pengaruh sering kali bekerja melalui cara yang jauh lebih halus. Tidak perlu melarang seseorang berbicara jika perhatian orang tersebut dapat dialihkan. Tidak perlu memaksa seseorang memilih jika lingkungan informasi dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga pilihan tertentu tampak lebih menarik dibanding pilihan lainnya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara kekuasaan lama dan kekuasaan baru. Kekuasaan lama sering bekerja dengan memaksa perilaku. Kekuasaan baru sering bekerja dengan membentuk persepsi yang melahirkan perilaku. Dari luar, masyarakat tetap merasa bebas. Pilihan tetap tersedia. Proses demokrasi tetap berlangsung. Namun proses yang membentuk

pilihan tersebut semakin dipengaruhi oleh kemampuan memahami perilaku manusia secara mendalam.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perkembangan ini menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Hikmat kebijaksanaan mengandaikan adanya proses berpikir yang sadar, merdeka, dan bertanggung jawab. Kerakyatan mengandaikan adanya keputusan yang lahir dari pertimbangan yang jernih demi kepentingan bersama.

Ketika ruang informasi semakin dipenuhi teknik-teknik yang dirancang untuk memengaruhi perhatian dan perilaku, maka pertanyaan mengenai kualitas kemerdekaan dalam mengambil keputusan menjadi semakin penting.

Karena itu, pembahasan mengenai *spyware* dalam bab ini bukan sekadar pembahasan teknologi. *Spyware* digunakan sebagai metafora untuk memahami perubahan besar dalam cara kekuasaan bekerja di era modern. Jika pada masa lalu kekuasaan berusaha mengendalikan tubuh manusia, maka pada masa kini kekuasaan semakin banyak bekerja dengan memahami pikiran manusia. Dan ketika pemahaman tersebut digunakan untuk membentuk pilihan masyarakat secara sistematis, demokrasi memasuki babak baru yang memerlukan perhatian jauh lebih serius daripada sebelumnya. Sebab kontrol yang paling efektif sering kali bukan kontrol yang memaksa seseorang melakukan sesuatu, melainkan kontrol yang membuat seseorang

merasa sedang memilih secara bebas padahal ruang pembentukan pilihan tersebut telah dipetakan dan diarahkan sejak awal.

12.2. Dari Oligarki ke Manipulasi Persepsi

Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana oligarki dapat bekerja seperti *malware* dalam sebuah sistem negara. Oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar, tidak selalu muncul melalui penguasaan langsung terhadap seluruh lembaga negara, dan tidak selalu terlihat sebagai ancaman yang mudah dikenali. Sebaliknya, oligarki sering bekerja melalui berbagai bentuk *capture* yang memengaruhi aliran ekonomi, informasi, dan regulasi. Sistem negara tetap berjalan. Demokrasi tetap berlangsung. Pemilu tetap diselenggarakan. Namun distribusi pengaruh perlahan bergerak ke arah yang semakin menguntungkan kelompok tertentu.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kondisi tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Mengapa masyarakat tidak selalu menolak ketika berbagai bentuk ketimpangan pengaruh mulai muncul. Mengapa sistem yang semakin menjauh dari semangat kedaulatan rakyat tetap dapat memperoleh legitimasi yang cukup untuk terus berjalan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan harus bergerak dari wilayah kekuasaan menuju wilayah persepsi.

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak bertindak berdasarkan realitas semata. Manusia bertindak berdasarkan cara memahami realitas. Dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama tetapi

menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena memiliki informasi yang berbeda atau menafsirkan informasi tersebut dengan cara yang berbeda. Dengan kata lain, persepsi sering kali menjadi jembatan antara kenyataan dan tindakan.

Karena itulah, dalam banyak situasi, mengendalikan persepsi jauh lebih efektif daripada mengendalikan manusia secara langsung. Mengendalikan manusia membutuhkan biaya yang besar. Membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Membutuhkan instrumen paksaan yang tidak sedikit. Sebaliknya, ketika persepsi berhasil dibentuk, manusia akan bergerak dengan kemauannya sendiri sesuai arah yang diharapkan oleh pihak yang membentuk persepsi tersebut.

Prinsip ini telah lama dipahami dalam dunia pemasaran. Sebuah perusahaan tidak hanya menjual produk. Sebuah perusahaan membangun persepsi mengenai produk tersebut. Masyarakat tidak membeli sekadar barang, tetapi membeli makna yang dilekatkan pada barang tersebut. Dalam kehidupan bernegara, mekanismenya tidak jauh berbeda. Yang diperebutkan bukan hanya suara rakyat, tetapi juga cara rakyat memahami realitas negara dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi.

Dalam konteks inilah hubungan antara oligarki dan pembentukan persepsi menjadi sangat penting. Setelah kekuatan ekonomi memperoleh pengaruh yang besar, setelah media menjadi sarana yang mampu membentuk arus informasi, dan setelah jalur kekuasaan semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu, langkah berikutnya adalah memengaruhi cara masyarakat memahami seluruh proses tersebut.

Sebuah sistem yang ingin mempertahankan pengaruhnya tidak cukup hanya menguasai sumber daya. Sistem tersebut juga perlu memastikan bahwa masyarakat memandang keadaan yang ada sebagai sesuatu yang wajar, normal, bahkan ideal. Sebab selama masyarakat menerima suatu keadaan sebagai sesuatu yang normal, dorongan untuk mempertanyakan atau mengubah keadaan tersebut akan jauh lebih kecil.

Dalam dunia teknologi, prinsip yang sama dapat ditemukan pada cara kerja berbagai *platform* digital. Algoritma tidak memaksa pengguna membuka konten tertentu. Algoritma tidak memaksa pengguna menyukai suatu topik. Algoritma hanya mengatur apa yang lebih sering dilihat, apa yang lebih mudah ditemukan, dan apa yang lebih sering muncul dalam ruang perhatian pengguna. Dari proses yang tampak sederhana tersebut, perlahan terbentuk persepsi mengenai apa yang penting, apa yang menarik, dan apa yang layak dipercaya.

Persepsi pada akhirnya membentuk pilihan. Pilihan yang berulang membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang terus dipelihara membentuk perilaku. Dan perilaku yang berlangsung dalam skala besar dapat membentuk arah sosial maupun kehidupan sebuah bangsa.

Inilah sebabnya mengapa manipulasi persepsi menjadi salah satu instrumen paling kuat dalam pemerintahan modern. Manipulasi persepsi tidak harus dipahami sebagai kebohongan. Dalam banyak kasus, manipulasi persepsi justru bekerja melalui fakta-fakta yang benar tetapi disajikan secara selektif. Sebuah isu tertentu diperbesar. Isu lain diperkecil. Sebuah keberhasilan ditonjolkan. Sebuah kegagalan disamarkan. Sebuah tokoh dipromosikan secara berulang. Tokoh lain diabaikan secara sistematis.

Dari luar, seluruh proses tersebut tampak sebagai aktivitas informasi yang biasa. Namun ketika berlangsung secara terus-menerus dan terkoordinasi,

hasil akhirnya dapat membentuk pemahaman kolektif yang sangat kuat.

Fenomena ini menjadi semakin penting dalam era digital. Jika pada masa lalu media memiliki jumlah saluran yang terbatas, saat ini hampir setiap individu hidup dalam lingkungan informasi yang terus bergerak selama dua puluh empat jam sehari. Telepon genggam, media sosial, portal berita, layanan pesan instan, video pendek, dan berbagai *platform* digital lainnya membentuk arus informasi yang tidak pernah berhenti. Dalam situasi seperti itu, perhatian manusia menjadi sumber daya yang sangat berharga. Siapa yang mampu mengendalikan perhatian publik akan memiliki peluang besar untuk mengendalikan persepsi publik. Dan siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik akan memiliki peluang besar untuk memengaruhi arah keputusan publik.

Di sinilah oligarki dan manipulasi persepsi mulai bertemu. Oligarki tidak selalu membutuhkan kendali langsung terhadap seluruh rakyat. Oligarki juga tidak selalu membutuhkan penggunaan kekuatan secara terbuka. Dalam banyak kasus, jauh lebih efektif membentuk lingkungan informasi yang menghasilkan kesimpulan tertentu secara alami dalam benak masyarakat.

Akibatnya, masyarakat dapat merasa sedang mengambil keputusan secara mandiri, padahal ruang informasi yang membentuk keputusan tersebut telah mengalami proses penyaringan yang panjang. Kebebasan memilih tetap ada. Tidak ada yang mencabut hak pilih. Tidak ada yang memaksa pilihan

tertentu. Namun proses yang membentuk cara berpikir sebelum pilihan diambil telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak selalu disadari.

Kondisi inilah yang menjadi jembatan menuju pembahasan-pembahasan berikutnya mengenai manipulasi opini publik, *polling illusion*, *behavioral engineering*, dan pseudo consent. Seluruh konsep tersebut berangkat dari satu kenyataan yang sama, yaitu bahwa dalam demokrasi modern, pertarungan terbesar sering kali tidak terjadi di kotak suara, melainkan terjadi jauh sebelumnya, yaitu dalam perebutan perhatian, persepsi, dan pemahaman masyarakat mengenai realitas kehidupan bernegara.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, persoalan ini menjadi sangat penting. Hikmat kebijaksanaan hanya dapat tumbuh apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara jernih dan utuh. Ketika ruang persepsi semakin dipenuhi oleh berbagai bentuk rekayasa informasi, maka kualitas kebijaksanaan publik juga berpotensi mengalami penurunan.

12.3. Manipulasi Opini Publik

Dalam teori demokrasi klasik, opini publik sering dipahami sebagai suara kolektif masyarakat yang lahir dari proses berpikir, berdiskusi, dan menilai berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Opini publik dipandang sebagai cerminan kehendak rakyat. Dari opini publik inilah muncul dukungan terhadap

kebijakan, kritik terhadap pemerintah, dukungan terhadap tokoh tertentu, maupun penolakan terhadap keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun perkembangan teknologi komunikasi, media massa, dan media digital menunjukkan bahwa opini publik tidak selalu terbentuk secara alami. Dalam banyak situasi, opini publik merupakan hasil dari proses yang panjang, melibatkan arus informasi yang terus-menerus, pengulangan narasi, pembingkaian peristiwa, dan pengelolaan perhatian masyarakat. Dengan kata lain, opini publik sering kali tidak lahir begitu saja. Opini publik dibentuk.

Pernyataan ini bukan berarti masyarakat tidak memiliki kemampuan berpikir mandiri. Setiap manusia tetap memiliki akal, pengalaman, dan kebebasan untuk menilai sesuatu. Namun manusia tidak pernah berpikir dalam ruang hampa. Cara seseorang memahami dunia selalu dipengaruhi oleh informasi yang diterima, lingkungan sosial yang membentuk pandangan hidupnya, serta narasi yang terus hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itulah, dalam pemerintahan modern, perebutan opini publik menjadi salah satu medan pertarungan yang paling penting. Sebuah kelompok tidak perlu menguasai seluruh institusi negara untuk memperoleh pengaruh yang besar. Sering kali cukup dengan membentuk opini publik secara efektif, maka arah kebijakan, arah kekuasaan, bahkan arah sejarah

dapat berubah mengikuti persepsi yang berkembang di masyarakat.

Dalam dunia teknologi, fenomena ini dapat dianalogikan sebagai proses memengaruhi keluaran sistem melalui pengelolaan data masukan. Sebuah komputer akan menghasilkan keputusan berdasarkan data yang diterimanya. Jika data yang masuk telah disusun dengan cara tertentu, maka hasil yang keluar juga akan bergerak sesuai arah yang diinginkan. Sistem tetap bekerja normal. Proses pengambilan keputusan tetap berlangsung. Namun hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik informasi yang diberikan kepada sistem.

Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sosial dan bernegara. Masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterima. Ketika informasi tertentu lebih sering muncul dibanding informasi lainnya, perhatian masyarakat akan bergerak ke arah tertentu. Ketika sebuah isu terus diulang, isu tersebut akan terasa lebih penting dibanding isu yang jarang dibicarakan. Ketika sebuah tokoh terus ditampilkan sebagai simbol keberhasilan, masyarakat akan lebih mudah mengaitkan tokoh tersebut dengan keberhasilan. Sebaliknya, ketika sebuah kelompok terus dikaitkan dengan kegagalan, persepsi negatif akan terbentuk meskipun kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks.

Inilah yang dikenal sebagai manipulasi opini publik. Manipulasi opini publik tidak selalu berarti penyebaran kebohongan. Justru dalam banyak kasus, manipulasi yang paling efektif tidak menggunakan

kebohongan secara langsung. Manipulasi bekerja melalui pemilihan fakta, penekanan tertentu, penghilangan konteks, serta pengulangan narasi yang dilakukan secara konsisten. Sebuah informasi dapat benar secara faktual tetapi tetap menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan apabila disampaikan secara tidak utuh.

Misalnya, sebuah keberhasilan ekonomi dapat diberitakan secara besar-besaran tanpa menjelaskan siapa yang paling banyak memperoleh manfaat dari keberhasilan tersebut.

Sebuah angka pertumbuhan dapat ditonjolkan tanpa membahas distribusi hasil pertumbuhan tersebut. Sebuah proyek pembangunan dapat dipromosikan secara luas tanpa membicarakan biaya sosial yang menyertainya. Seluruh informasi yang disampaikan mungkin benar, tetapi gambaran yang diterima masyarakat menjadi tidak lengkap.

Dalam kajian komunikasi, terdapat konsep framing yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dapat dipahami secara berbeda tergantung pada cara penyampaiannya. Sebuah kebijakan yang sama dapat dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Sebuah tindakan yang sama dapat dipersepsikan sebagai keberanian atau sebagai ancaman tergantung pada narasi yang mengiringinya.

Karena itu, perebutan opini publik pada hakikatnya adalah perebutan makna. Yang diperebutkan bukan sekadar fakta, melainkan cara masyarakat memahami fakta tersebut.

Fenomena ini menjadi semakin kuat dalam era media sosial. Pada masa lalu, informasi bergerak melalui sejumlah media yang relatif terbatas. Saat ini, setiap individu dapat menjadi penyebar informasi. Setiap unggahan dapat menjadi sumber opini. Setiap video dapat membentuk persepsi. Setiap potongan gambar dapat memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah peristiwa.

Di satu sisi, perkembangan ini memperluas kebebasan berekspresi. Di sisi lain, perkembangan ini juga membuka ruang yang sangat besar bagi berbagai bentuk manipulasi opini. Sebab masyarakat tidak lagi dibanjiri oleh kekurangan informasi. Masyarakat justru dibanjiri oleh kelebihan informasi. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan untuk memilih informasi yang paling menarik perhatian menjadi jauh lebih penting daripada kemampuan untuk menyampaikan informasi yang paling akurat.

Akibatnya, pemerintahan modern semakin sering bergerak mengikuti logika perhatian. Narasi yang sederhana sering lebih mudah diterima dibanding penjelasan yang kompleks. Emosi sering lebih cepat menyebar dibanding argumentasi. Kemarahan sering lebih mudah menjadi viral dibanding penjelasan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Dalam situasi seperti ini, manipulasi opini publik memperoleh lingkungan yang sangat subur untuk berkembang.

Hubungan antara manipulasi opini publik dan oligarki yang dibahas pada bab sebelumnya juga menjadi semakin jelas. Setelah memperoleh pengaruh melalui ekonomi, media, dan regulasi, langkah

berikutnya yang sangat strategis adalah membentuk persepsi masyarakat mengenai seluruh proses tersebut. Sebab kekuasaan yang paling stabil bukanlah kekuasaan yang dipertahankan dengan paksaan. Kekuasaan yang paling stabil adalah kekuasaan yang diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat.

Ketika masyarakat menerima sebuah keadaan sebagai sesuatu yang normal, kebutuhan untuk menggunakan tekanan secara langsung menjadi jauh lebih kecil. Persetujuan muncul bukan karena paksaan, melainkan karena persepsi yang telah terbentuk sebelumnya. Di sinilah manipulasi opini publik menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif dalam mempertahankan struktur pengaruh yang sudah ada.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, persoalan ini menyentuh inti dari kualitas demokrasi itu sendiri. Permusyawaratan mengandaikan adanya ruang diskusi yang sehat. Hikmat kebijaksanaan mengandaikan adanya kemampuan memahami persoalan secara utuh. Ketika opini publik semakin banyak dibentuk melalui manipulasi persepsi, maka proses pembentukan kebijaksanaan bersama juga berpotensi mengalami distorsi.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa opini publik bukan selalu cerminan spontan dari kehendak masyarakat. Dalam banyak kasus, opini publik merupakan hasil dari proses pembentukan yang berlangsung terus-menerus melalui informasi, narasi,

simbol, dan pengelolaan perhatian. Opini memang lahir di tengah masyarakat, tetapi arah pembentukannya dapat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang bekerja di belakang layar.

12.4. *Polling Illusion*

Dalam demokrasi modern, survei dan jajak pendapat telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Menjelang pemilu, masyarakat disuguhi berbagai angka elektabilitas. Nama-nama kandidat dibandingkan dalam grafik. Persentase dukungan diumumkan secara berkala. Kenaikan dan penurunan angka menjadi bahan pemberitaan harian. Bahkan tidak jarang diskusi lebih banyak membahas hasil survei daripada membahas gagasan, program, atau arah pembangunan yang ditawarkan para kandidat.

Pada awal kemunculannya, survei dirancang sebagai alat ukur. Tujuannya sederhana, yaitu mengetahui kecenderungan opini masyarakat pada suatu waktu tertentu. Sebagaimana termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh, survei digunakan untuk mengukur kecenderungan pilihan publik. Dalam posisi ini, survei memiliki fungsi yang penting karena membantu memahami dinamika sosial yang sedang berkembang.

Namun dalam praktik pemerintahan modern, posisi survei sering kali mengalami pergeseran. Survei tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengukur realitas. Survei perlahan berubah menjadi alat yang ikut membentuk realitas itu sendiri.

Perubahan fungsi inilah yang melahirkan apa yang dalam buku ini disebut sebagai *polling illusion*, yaitu keadaan ketika hasil survei tidak lagi sekadar menggambarkan opini publik, tetapi mulai memengaruhi dan membentuk opini publik yang diukur.

Fenomena ini dapat dipahami melalui sebuah contoh sederhana. Bayangkan seseorang sedang mencari restoran untuk makan malam. Jika terdapat dua restoran dengan kualitas yang relatif sama, sementara salah satunya terlihat penuh pengunjung dan yang lainnya tampak sepi, sebagian besar orang akan cenderung memilih restoran yang ramai. Keramaian tersebut menciptakan persepsi bahwa restoran tersebut lebih baik, lebih terpercaya, atau lebih layak dipilih.

Dalam psikologi sosial, kecenderungan semacam ini dikenal sebagai *social proof*. Manusia sering menggunakan pilihan orang lain sebagai petunjuk untuk menentukan pilihannya sendiri, terutama ketika informasi yang dimiliki belum lengkap. Semakin banyak orang terlihat mendukung sesuatu, semakin besar kemungkinan orang lain ikut memberikan dukungan.

Prinsip yang sama bekerja dalam kehidupan bernegara. Ketika sebuah survei menunjukkan bahwa seorang kandidat unggul jauh dibanding kandidat lain, sebagian masyarakat mulai memandang kandidat tersebut sebagai calon pemenang. Persepsi mengenai kemungkinan kemenangan kemudian memengaruhi cara masyarakat memandang kandidat tersebut. Bukan lagi sekadar melihat gagasan atau program yang

ditawarkan, melainkan melihat posisi kandidat dalam persaingan.

Di sinilah muncul fenomena yang dikenal sebagai *bandwagon effect*. Istilah ini menggambarkan kecenderungan sebagian orang untuk ikut mendukung pihak yang dianggap akan menang. Dukungan diberikan bukan semata-mata karena kesesuaian visi atau keyakinan, tetapi karena adanya dorongan psikologis untuk berada di pihak yang dianggap unggul.

Akibatnya, survei yang pada awalnya hanya bertujuan mengukur dukungan dapat ikut menghasilkan tambahan dukungan. Angka elektabilitas tidak lagi sekadar mencerminkan keadaan, tetapi mulai memengaruhi keadaan.

Fenomena ini menjadi semakin kuat ketika hasil survei memperoleh ruang yang besar dalam media massa dan media sosial. Grafik elektabilitas ditampilkan berulang-ulang. Persentase dukungan dibahas setiap hari. Kenaikan satu atau dua persen diperlakukan sebagai peristiwa yang penting. Lambat laun, perhatian masyarakat bergeser dari substansi menuju statistik.
Alih-alih bertanya siapa yang memiliki gagasan terbaik, masyarakat mulai bertanya siapa yang memiliki angka tertinggi.

Alih-alih membahas arah pembangunan, masyarakat mulai membahas peluang kemenangan. Dalam kondisi seperti ini, survei tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat informasi. Survei berubah menjadi bagian dari medan persaingan dalam perebutan kekuasaan itu sendiri.

Fenomena tersebut tidak berarti bahwa seluruh survei bersifat manipulatif. Banyak lembaga survei bekerja dengan metode ilmiah yang ketat dan profesional. Banyak hasil survei juga memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai kondisi masyarakat pada saat pengukuran dilakukan. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan survei, melainkan pada cara survei digunakan dan dipersepsikan dalam ruang publik.

Masalah muncul ketika angka-angka survei diperlakukan sebagai kenyataan yang final. Padahal survei hanya merupakan potret sesaat dari kondisi tertentu. Survei bukan hasil pemilu. Survei bukan keputusan rakyat yang telah selesai. Survei hanya menggambarkan kecenderungan pada waktu tertentu berdasarkan metode tertentu.

Namun ketika masyarakat terus-menerus disuguhi angka elektabilitas, terjadi pergeseran psikologis yang halus. Angka mulai dianggap sebagai kenyataan. Prediksi mulai dianggap sebagai kepastian. Kemungkinan mulai dianggap sebagai nasib yang tidak dapat diubah.

Dalam dunia teknologi, kondisi ini dapat dianalogikan dengan sistem navigasi yang tidak hanya menunjukkan arah jalan, tetapi juga memengaruhi pilihan pengguna untuk mengikuti jalan tertentu. Awalnya sistem hanya memberikan informasi. Namun karena informasi tersebut dipercaya dan digunakan secara luas, sistem mulai ikut menentukan perilaku pengguna.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Survei yang seharusnya hanya menunjukkan kecenderungan masyarakat dapat berkembang menjadi instrumen yang ikut membentuk kecenderungan tersebut. Semakin sering suatu angka ditampilkan, semakin besar kemungkinan angka tersebut memengaruhi cara masyarakat memandang realitas yang sedang berlangsung.

Fenomena ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembahasan demokrasi transaksional sebagai *spyware*. Sebagaimana *spyware* mempelajari perilaku pengguna dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk memengaruhi perilaku berikutnya, survei modern tidak hanya mengumpulkan data mengenai preferensi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, hasil survei juga dapat digunakan untuk membentuk strategi komunikasi yang dirancang memengaruhi preferensi tersebut.

Data mengenai kelompok usia, wilayah, tingkat pendidikan, atau kecenderungan pilihan masyarakat menjadi bahan yang sangat berharga. Dari data tersebut dapat diketahui kelompok mana yang perlu diperkuat dukungannya, kelompok mana yang perlu diyakinkan, dan kelompok mana yang perlu diarahkan melalui pesan-pesan tertentu. Dengan demikian, proses pengukuran dan proses pembentukan pengaruh mulai saling berhubungan.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadaan ini

menimbulkan pertanyaan penting. Apakah pilihan masyarakat didasarkan pada pertimbangan yang matang mengenai kepentingan bangsa, atau semakin dipengaruhi oleh persepsi mengenai siapa yang tampak paling mungkin menang? Ketika angka lebih dominan daripada gagasan, kualitas permusyawaratan publik berpotensi mengalami penurunan.

Karena itu, penting untuk memahami bahwa survei merupakan alat yang sangat berguna, tetapi bukan alat yang netral dalam seluruh dampaknya. Survei dapat membantu memahami masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat. Survei dapat memberikan informasi, tetapi juga dapat membentuk persepsi. Survei dapat mengukur realitas, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat ikut membangun realitas yang diukur.

12.5. *Behavioral Engineering*

Salah satu perubahan terbesar dalam kehidupan pemerintahan modern adalah bergesernya cara memengaruhi masyarakat. Pada masa lalu, pengaruh kekuasaan umumnya dilakukan secara massal. Pesan yang sama disampaikan kepada seluruh masyarakat melalui pidato, surat kabar, baliho, radio, atau televisi. Setiap orang menerima informasi yang relatif seragam. Keberhasilan sebuah kampanye banyak ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan kepada sebanyak mungkin orang dalam waktu yang bersamaan.

Namun perkembangan teknologi digital mengubah pola tersebut secara mendasar. Kemajuan komputasi, internet, media sosial, kecerdasan buatan,

dan analisis data memungkinkan informasi disampaikan secara sangat spesifik kepada kelompok tertentu. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai satu kesatuan yang homogen. Masyarakat dipetakan menjadi berbagai segmen berdasarkan usia, pendidikan, lokasi, pekerjaan, kebiasaan konsumsi informasi, preferensi sosial, bahkan karakter psikologis. Dari sinilah muncul konsep yang dikenal sebagai *behavioral engineering*.

Secara sederhana, *behavioral engineering* dapat dipahami sebagai upaya memahami, memprediksi, dan memengaruhi perilaku manusia melalui pemanfaatan data, psikologi, dan teknologi informasi. Jika pada masa lalu kekuasaan banyak berfokus pada pengendalian tindakan, maka dalam era digital perhatian bergeser pada pengendalian faktor-faktor yang membentuk tindakan tersebut.

Perubahan ini terjadi karena perilaku manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Setiap keputusan lahir melalui proses yang dipengaruhi oleh informasi, pengalaman, emosi, persepsi, lingkungan sosial, dan berbagai faktor lainnya. Ketika faktor-faktor tersebut dapat dipetakan dan dipahami secara sistematis, perilaku manusia menjadi lebih mudah diprediksi. Dan ketika perilaku dapat diprediksi, peluang untuk memengaruhinya menjadi jauh lebih besar.

Dalam dunia teknologi, fenomena ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Platform media sosial mempelajari jenis konten yang paling sering menarik perhatian pengguna. Aplikasi video mempelajari durasi tontonan yang disukai pengguna.

Platform belanja mempelajari kebiasaan konsumsi pengguna. Mesin pencari mempelajari pola pencarian pengguna. Semua data tersebut digunakan untuk memperkirakan tindakan berikutnya yang kemungkinan besar akan dilakukan.

Menariknya, sebagian besar pengguna tidak merasa sedang diarahkan. Yang dirasakan justru sebaliknya. Sistem tampak semakin memahami kebutuhan pengguna. Konten yang muncul terasa semakin relevan. Produk yang ditawarkan terasa semakin sesuai. Informasi yang ditampilkan terasa semakin dekat dengan minat pribadi.

Padahal di balik kenyamanan tersebut berlangsung proses yang jauh lebih kompleks. Sistem terus mempelajari perilaku pengguna, memperbarui profil pengguna, menguji berbagai pola respons, lalu menyesuaikan informasi yang ditampilkan berdasarkan hasil pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, sistem tidak hanya mengamati perilaku. Sistem juga belajar dari perilaku.

Ketika mekanisme yang sama diterapkan dalam kehidupan bernegara, lahirlah bentuk baru dari komunikasi publik yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan kampanye tradisional.

Pada masa lalu, seorang kandidat menyampaikan pesan yang sama kepada seluruh masyarakat. Saat ini, teknologi memungkinkan pesan yang berbeda disampaikan kepada kelompok yang berbeda. Masyarakat perkotaan menerima narasi yang berbeda dari masyarakat pedesaan. Generasi muda menerima pesan yang berbeda dari generasi yang lebih

tua. Kelompok yang peduli ekonomi menerima informasi yang berbeda dari kelompok yang lebih peduli pada isu sosial atau budaya.

Secara teknis, pendekatan ini dikenal sebagai *micro targeting*. Melalui *micro targeting*, sebuah kampanye tidak lagi berbicara kepada jutaan orang sebagai satu kelompok besar. Kampanye berbicara kepada ratusan bahkan ribuan kelompok kecil yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Setiap kelompok menerima pesan yang dirancang khusus agar sesuai dengan kebutuhan psikologis dan emosional kelompok tersebut.

Dalam perspektif komunikasi, pendekatan ini sangat efektif. Pesan yang sesuai dengan karakter penerima akan lebih mudah diterima dibanding pesan yang bersifat umum. Namun dari sudut pandang demokrasi, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Sejauh mana pilihan masyarakat yang lahir dari proses semacam ini benar-benar merupakan hasil pertimbangan yang mandiri.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena *behavioral engineering* tidak selalu berusaha mengubah keyakinan seseorang secara langsung. Dalam banyak kasus, yang dilakukan justru jauh lebih halus. Perhatian diarahkan ke isu tertentu. Emosi diperkuat pada momen tertentu.

Kekhawatiran ditonjolkan dalam konteks tertentu. Harapan dibangun melalui narasi tertentu. Akibatnya, seseorang merasa sedang mengambil keputusan secara bebas, padahal lingkungan informasi

yang membentuk keputusan tersebut telah dirancang secara sistematis.

Fenomena ini sangat mirip dengan cara kerja *spyware* yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. *Spyware* mengumpulkan data untuk memahami perilaku pengguna. Setelah memahami pola perilaku tersebut, sistem memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memprediksi dan memengaruhi tindakan pengguna di masa depan. Semakin lengkap data yang dimiliki, semakin akurat kemampuan memprediksi dan mengarahkan perilaku.

Dalam ruang pemerintahan modern, data menjadi sumber daya yang sangat berharga. Data mengenai kebiasaan membaca, aktivitas media sosial, lokasi geografis, tingkat pendidikan, preferensi budaya, hingga kecenderungan psikologis dapat digunakan untuk membangun model perilaku masyarakat. Model tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi yang dirancang untuk menghasilkan respons tertentu.

Yang menarik, proses ini sering kali tidak terlihat sebagai bentuk manipulasi. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Tidak ada larangan memilih. Masyarakat tetap merasa bebas. Pilihan tetap tersedia. Demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Namun kebebasan formal tidak selalu identik dengan kebebasan substantif. Seseorang dapat merasa bebas memilih, tetapi proses pembentukan pilihan tersebut berlangsung dalam lingkungan informasi yang telah dirancang secara sangat rinci. Dalam kondisi

seperti itu, batas antara persuasi, pengaruh, dan rekayasa perilaku menjadi semakin sulit dibedakan.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, fenomena ini menghadirkan tantangan baru yang belum pernah dihadapi oleh generasi-generasi sebelumnya. Hikmat kebijaksanaan mengandaikan adanya kemampuan berpikir yang merdeka. Permusyawaratan mengandaikan adanya ruang pertukaran gagasan yang sehat. Ketika teknologi semakin mampu memengaruhi faktor-faktor psikologis yang membentuk keputusan, maka kualitas kemerdekaan dalam mengambil keputusan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal ini bukan berarti teknologi harus ditolak. Teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Persoalannya bukan pada keberadaan teknologi, melainkan pada bagaimana teknologi digunakan dalam hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Ketika teknologi digunakan untuk membantu rakyat memperoleh informasi yang lebih baik, teknologi dapat memperkuat demokrasi. Namun ketika teknologi digunakan untuk memetakan dan mengarahkan perilaku masyarakat demi kepentingan tertentu, teknologi berpotensi mengubah demokrasi menjadi arena rekayasa psikologis yang sangat canggih.

12.6. Demokrasi sebagai Industri Perhatian

Salah satu perubahan paling mendasar dalam kehidupan pemerintahan modern bukan terletak pada perubahan konstitusi, bukan pula pada perubahan sistem pemilu, melainkan pada perubahan cara manusia menerima informasi. Selama ribuan tahun, perhatian manusia merupakan sumber daya yang relatif stabil. Setiap orang hanya dapat mendengar sejumlah percakapan, membaca sejumlah tulisan, atau menyaksikan sejumlah peristiwa dalam waktu yang terbatas. Namun perkembangan teknologi digital telah mengubah keadaan tersebut secara drastis. Saat ini manusia hidup dalam lautan informasi yang nyaris tidak memiliki batas.

Setiap hari miliaran pesan diproduksi dan disebarkan melalui berbagai *platform* digital. Berita, video, gambar, komentar, iklan, kampanye, hiburan, dan berbagai bentuk konten lainnya saling bersaing untuk mendapatkan satu hal yang sama, yaitu perhatian manusia. Dalam situasi seperti ini, informasi bukan lagi sumber daya yang langka. Justru perhatian manusialah yang menjadi sumber daya yang paling langka.

Karena itulah muncul konsep yang dikenal sebagai *attention economy* atau ekonomi perhatian. Dalam ekonomi tradisional, perusahaan bersaing untuk menjual produk. Dalam ekonomi digital, banyak pihak justru bersaing untuk merebut perhatian. Semakin lama perhatian seseorang dapat dipertahankan, semakin besar nilai ekonomi yang dapat dihasilkan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis. Pemerintahan modern juga semakin bergerak mengikuti logika yang sama.

Pada masa lalu, keberhasilan dalam memperoleh dukungan masyarakat banyak ditentukan oleh kekuatan organisasi, kualitas gagasan, dan kemampuan membangun hubungan langsung dengan masyarakat. Saat ini, keberhasilan tersebut semakin dipengaruhi oleh kemampuan menarik perhatian publik di tengah arus informasi yang terus berlangsung tanpa henti. Akibatnya, ruang kehidupan bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Jika dahulu pertanyaan utamanya adalah "siapa yang memiliki gagasan terbaik", maka saat ini pertanyaan yang sering muncul adalah "siapa yang paling banyak dibicarakan".

Jika dahulu ukuran keberhasilan adalah kualitas argumentasi, saat ini ukuran keberhasilan sering bergeser menjadi tingkat viralitas.

Jika dahulu perhatian publik diperoleh melalui proses yang relatif panjang, saat ini perhatian dapat diperoleh dalam hitungan menit melalui satu unggahan yang berhasil menarik emosi masyarakat.

Perubahan ini bukan sekadar perubahan teknis komunikasi. Perubahan ini mengubah cara demokrasi bekerja.

Dalam dunia teknologi, sebuah *platform* digital dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Algoritma mempelajari konten apa yang paling sering diklik. Sistem mempelajari topik apa yang paling sering memancing reaksi. Informasi yang mampu menghasilkan keterlibatan tinggi akan lebih sering ditampilkan dibanding informasi yang kurang menarik perhatian.

Logika yang sama perlahan memasuki ruang kehidupan bernegara. Persaingan untuk memperoleh dukungan masyarakat semakin berlangsung dalam pasar perhatian. Calon bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Partai politik bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Bahkan berbagai persoalan publik pun bersaing untuk mendapatkan perhatian masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, tidak selalu gagasan terbaik yang memperoleh ruang terbesar. Yang sering memperoleh ruang terbesar justru gagasan yang paling mampu menarik perhatian. Tidak selalu argumentasi yang paling kuat yang menjadi pusat pembicaraan. Yang sering menjadi pusat pembicaraan adalah narasi yang paling mudah memancing emosi.

Karena perhatian manusia memiliki keterbatasan, setiap informasi yang berhasil merebut perhatian akan menggeser informasi lainnya. Ketika ruang publik dipenuhi oleh isu-isu yang sensasional, ruang untuk pembahasan yang mendalam menjadi semakin sempit.

Ketika perhatian masyarakat terus diarahkan pada konflik, kontroversi, dan pertentangan, pembahasan mengenai desain negara, konstitusi, kedaulatan rakyat, atau arah pembangunan jangka panjang sering kali kehilangan tempat.

Fenomena ini menjelaskan mengapa pemerintahan modern semakin sering dipenuhi oleh simbol, slogan, dan pertarungan citra. Bukan karena substansi sudah tidak penting, melainkan karena substansi sering kalah bersaing dalam perebutan

perhatian. Sebuah penjelasan yang memerlukan waktu dua puluh menit untuk dipahami sering kalah dibanding potongan video berdurasi tiga puluh detik yang memancing kemarahan atau kekaguman.

Akibatnya, masyarakat semakin sering berinteraksi dengan representasi mengenai kehidupan bernegara daripada realitasnya secara utuh. Yang terlihat adalah potongan-potongan informasi yang telah dipilih oleh algoritma, dipotong oleh *platform*, dan diperkuat oleh mekanisme penyebaran viral. Realitas yang kompleks direduksi menjadi narasi yang sederhana. Persoalan yang rumit dipadatkan menjadi slogan. Debat yang membutuhkan pemikiran mendalam dipersempit menjadi pertarungan tagar.

Dalam perspektif demokrasi, keadaan ini menimbulkan tantangan yang sangat besar. Demokrasi pada dasarnya mengandaikan adanya warga negara yang mampu mempertimbangkan berbagai pilihan secara rasional. Demokrasi mengandaikan adanya ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan secara sehat. Demokrasi mengandaikan adanya proses berpikir yang cukup untuk memahami persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa.

Namun ketika kekuasaan semakin tunduk pada logika perhatian, kualitas diskusi publik berisiko mengalami penurunan. Ruang publik tidak lagi memilih informasi berdasarkan tingkat kepentingannya, melainkan berdasarkan kemampuannya menarik perhatian. Yang paling penting belum tentu menjadi yang paling terlihat.

Sebaliknya, yang paling terlihat belum tentu menjadi yang paling penting.

Dalam konteks pembahasan mengenai demokrasi transaksional sebagai *spyware*, kondisi ini memiliki implikasi yang sangat penting. Sebagaimana *spyware* mempelajari perilaku pengguna untuk memahami apa yang paling menarik perhatian pengguna tersebut, sistem pemerintahan modern juga semakin bergantung pada kemampuan memahami pola perhatian masyarakat. Data digunakan untuk mengetahui isu apa yang paling efektif. Emosi digunakan untuk meningkatkan keterlibatan. Konten dirancang untuk memaksimalkan respons publik.

Pada titik tertentu, perhatian berubah menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam kehidupan bernegara. Semakin besar perhatian yang diperoleh, semakin besar peluang untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Semakin kuat persepsi yang terbentuk, semakin besar peluang untuk memengaruhi pilihan dan perilaku masyarakat. Pada akhirnya, semakin besar perilaku masyarakat yang dapat dipengaruhi, semakin besar pula peluang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Rangkaian hubungan inilah yang menjadikan perhatian sebagai salah satu sumber daya strategis dalam demokrasi modern.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, fenomena ini perlu dicermati secara serius. Hikmat kebijaksanaan tidak

lahir dari perhatian yang terpecah-pecah. Hikmat kebijaksanaan membutuhkan ruang refleksi, pemahaman yang utuh, dan kemampuan melihat persoalan secara mendalam. Ketika ruang publik semakin didominasi oleh logika viralitas, kemampuan masyarakat untuk membangun kebijaksanaan kolektif berpotensi mengalami pelemahan.

Karena itu, demokrasi modern menghadapi paradoks yang menarik. Teknologi memungkinkan informasi menjangkau lebih banyak orang dibanding masa sebelumnya. Namun pada saat yang sama, teknologi juga menciptakan kompetisi perhatian yang sangat ketat sehingga informasi yang paling penting sering kali kalah oleh informasi yang paling menarik.

12.7. *Pseudo Consent*

Salah satu asumsi paling mendasar dalam demokrasi adalah adanya persetujuan rakyat terhadap kekuasaan yang dijalankan atas nama rakyat. Pemerintah memperoleh legitimasi karena rakyat memberikan dukungan. Undang-undang memperoleh kekuatan mengikat karena dibentuk melalui mekanisme yang dianggap mewakili kehendak rakyat. Kebijakan publik memperoleh dasar moral karena lahir dari sistem yang dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berdiri di atas gagasan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang memperoleh persetujuan dari masyarakat.

Konsep ini sering disebut sebagai *consent of the governed*, yaitu persetujuan dari pihak yang diperintah. Gagasan tersebut menjadi salah satu fondasi utama

negara modern. Tidak ada raja yang turun dari langit. Tidak ada penguasa yang memiliki hak ilahi untuk memerintah tanpa batas. Kekuasaan dianggap sah karena memperoleh penerimaan dari rakyat yang menjadi sumber kedaulatan.

Pada tingkat normatif, prinsip tersebut sangat kuat. Namun dalam praktik kehidupan pemerintahan modern, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apakah setiap persetujuan yang diberikan rakyat benar-benar lahir dari pemahaman yang utuh terhadap realitas yang dihadapi? Apakah setiap dukungan yang muncul merupakan hasil pertimbangan yang merdeka? Ataukah terdapat kondisi tertentu ketika persetujuan memang diberikan secara formal, tetapi terbentuk melalui proses yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan substantif?

Pertanyaan inilah yang membawa pembahasan pada konsep pseudo consent atau persetujuan semu. Istilah persetujuan semu tidak berarti bahwa rakyat dipaksa secara langsung. Persetujuan semu juga tidak berarti bahwa seluruh keputusan selalu merupakan hasil manipulasi. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika persetujuan memang diberikan, tetapi proses pembentukan persetujuan tersebut berlangsung dalam lingkungan informasi yang tidak sepenuhnya seimbang, tidak sepenuhnya utuh, atau telah dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang membentuk persepsi masyarakat sebelum keputusan diambil.

Untuk memahami konsep ini, bayangkan seseorang yang hendak menandatangani sebuah

kontrak. Secara hukum, tanda tangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan. Namun kualitas persetujuan tersebut akan sangat berbeda jika seluruh informasi diberikan secara lengkap dibanding jika sebagian informasi penting disembunyikan. Secara formal, persetujuan tetap ada. Akan tetapi secara substantif, terdapat perbedaan besar antara persetujuan yang lahir dari pemahaman penuh dan persetujuan yang lahir dari pemahaman yang terbatas.

Fenomena yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Rakyat dapat memberikan dukungan kepada suatu kebijakan, kandidat, atau arah tertentu. Namun kualitas dukungan tersebut sangat bergantung pada kualitas informasi yang membentuk dukungan itu. Semakin lengkap pemahaman masyarakat terhadap suatu persoalan, semakin kuat dasar persetujuan yang diberikan. Sebaliknya, semakin terbatas ruang informasi yang tersedia, semakin besar kemungkinan persetujuan terbentuk tanpa pemahaman yang utuh.

Di sinilah hubungan antara pseudo consent dan pembahasan sebelumnya menjadi sangat jelas. Dalam subbab tentang manipulasi opini publik telah dijelaskan bahwa opini masyarakat dapat dipengaruhi melalui pengelolaan informasi dan narasi. Dalam pembahasan mengenai *polling illusion* telah dijelaskan bagaimana alat ukur dapat ikut membentuk persepsi. Dalam pembahasan mengenai *behavioral engineering* telah dijelaskan bagaimana data dan teknologi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku. Seluruh proses tersebut tidak selalu bertujuan menghilangkan

kebebasan memilih. Yang lebih sering terjadi adalah membentuk lingkungan yang memengaruhi cara masyarakat memahami pilihan yang tersedia. Akibatnya, masyarakat tetap memilih.

Masyarakat tetap memberikan dukungan. Masyarakat tetap menyatakan persetujuan. Namun proses yang menghasilkan persetujuan tersebut telah melalui berbagai lapisan pembentukan persepsi yang tidak selalu terlihat.

Dalam dunia teknologi, kondisi ini dapat dianalogikan dengan antarmuka sebuah aplikasi. Pengguna tetap menekan tombol yang tersedia secara sukarela. Tidak ada yang memaksa tindakan tersebut. Namun desain aplikasi telah disusun sedemikian rupa sehingga mendorong pengguna menuju pilihan tertentu. Dari sudut pandang pengguna, keputusan tampak sepenuhnya bebas. Dari sudut pandang perancang sistem, keputusan tersebut merupakan hasil dari lingkungan yang sengaja dirancang untuk menghasilkan perilaku tertentu.

Prinsip serupa dapat ditemukan dalam dunia pemerintahan modern. Ketika informasi tertentu terus diperkuat, ketika isu tertentu terus memperoleh perhatian, ketika tokoh tertentu terus mendapatkan ruang yang lebih besar dibanding yang lain, maka perlahan terbentuk persepsi mengenai apa yang dianggap normal, apa yang dianggap layak, dan apa yang dianggap tidak mungkin. Pada tahap tertentu, masyarakat dapat memberikan persetujuan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dipahami secara utuh.

Inilah yang menjadikan pseudo consent berbeda dengan persetujuan yang lahir dari kesadaran penuh. Perbedaannya tidak terletak pada keberadaan persetujuan, melainkan pada kualitas proses yang menghasilkan persetujuan tersebut.

Dalam demokrasi yang sehat, persetujuan rakyat seharusnya lahir dari ruang publik yang terbuka, informasi yang beragam, dan kesempatan yang cukup untuk memahami berbagai pilihan yang tersedia. Demokrasi tidak hanya membutuhkan hak memilih. Demokrasi juga membutuhkan kemampuan rakyat untuk memahami apa yang sedang dipilih.

Tanpa pemahaman yang memadai, hak memilih dapat tetap ada tetapi kehilangan sebagian maknanya. Tanpa informasi yang utuh, kebebasan formal dapat tetap hadir tetapi kualitas kebebasan tersebut mengalami penyempitan. Tanpa ruang refleksi yang sehat, persetujuan dapat berubah menjadi sekadar respons terhadap arus informasi yang paling dominan.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam era digital. Saat ini masyarakat menerima informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding generasi-generasi sebelumnya. Namun jumlah informasi yang besar tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Dalam banyak kasus, kelebihan informasi justru menciptakan kebingungan, kelelahan perhatian, dan ketergantungan pada narasi yang paling mudah dipahami. Akibatnya, ruang untuk melakukan penilaian yang mendalam sering kali semakin sempit.

Dalam konteks inilah pseudo consent berkembang. Persetujuan tidak lagi dibangun terutama

melalui pemahaman yang mendalam terhadap realitas, tetapi melalui persepsi yang terbentuk dari lingkungan informasi yang terus-menerus memengaruhi perhatian masyarakat. Persetujuan tetap ada. Dukungan tetap ada. Legitimasi tetap ada. Namun kualitas hubungan antara persetujuan dan pemahaman mulai mengalami perubahan.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadaan semacam ini perlu menjadi perhatian serius. Hikmat kebijaksanaan tidak lahir dari persepsi yang dibentuk secara sepihak. Hikmat kebijaksanaan membutuhkan pemahaman yang utuh, pertimbangan yang matang, dan ruang dialog yang sehat. Ketika persetujuan publik semakin banyak dipengaruhi oleh rekayasa persepsi, maka kualitas kerakyatan yang menjadi fondasi demokrasi juga berpotensi mengalami penurunan.

Karena itu, persoalan utama dalam pseudo consent bukanlah apakah rakyat memberikan persetujuan atau tidak. Persoalan utamanya adalah bagaimana persetujuan tersebut terbentuk. Sebab demokrasi yang hanya menghasilkan persetujuan formal tanpa pemahaman substantif berisiko menjauh dari tujuan awalnya sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.

12.8. Ketika Rakyat Memilih Apa yang Sudah Dipilihkan

Salah satu kebanggaan terbesar demokrasi modern adalah adanya kebebasan memilih. Setiap warga negara diberikan hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin, partai mana yang akan didukung, serta arah kebijakan seperti apa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan bangsa. Hak memilih bahkan sering dipandang sebagai simbol utama kedaulatan rakyat. Selama rakyat masih dapat memberikan suara, demokrasi dianggap tetap hidup, dan selama pemilu masih berlangsung, kedaulatan rakyat dianggap tetap terjaga.

Namun setelah menelusuri pembahasan mengenai gatekeeping, media *capture*, *polling illusion*, *behavioral engineering*, dan pseudo consent, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah kebebasan memilih selalu identik dengan kebebasan menentukan pilihan?

Pertanyaan ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menghadapi situasi ketika pilihan tampak tersedia, tetapi ruang yang membentuk pilihan tersebut sesungguhnya telah ditentukan terlebih dahulu. Seseorang dapat memilih menu makanan yang tersedia di sebuah restoran, tetapi tidak dapat memilih menu yang tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar. Seseorang dapat memilih produk yang dipajang di rak toko, tetapi tidak dapat memilih produk yang tidak pernah dipasarkan. Secara formal kebebasan memilih tetap ada, tetapi ruang pilihan yang tersedia telah dibatasi sebelum proses pemilihan berlangsung.

Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Dalam teori demokrasi, rakyat

memilih pemimpin, tetapi dalam praktik pemerintahan modern terdapat serangkaian proses yang berlangsung jauh sebelum rakyat sampai pada tahap memberikan suara. Sebelum rakyat memilih, terdapat proses pencalonan. Sebelum pencalonan berlangsung, terdapat proses seleksi calon, sedangkan sebelum proses seleksi tersebut berjalan, terdapat proses pembentukan persepsi masyarakat. Sebelum persepsi itu terbentuk, terdapat pengelolaan informasi. Bahkan sebelum informasi sampai kepada masyarakat, telah ada berbagai mekanisme yang menentukan informasi mana yang memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan informasi lainnya.

Dengan demikian, pilihan yang tampak pada hari pemungutan suara sesungguhnya merupakan hasil dari rangkaian proses yang panjang. Apa yang dipilih oleh rakyat tidak lahir secara tiba-tiba pada saat berada di bilik suara, melainkan dibentuk oleh berbagai faktor yang bekerja jauh sebelumnya.

Dalam BAB 9 telah dijelaskan bagaimana sistem gatekeeping menentukan siapa yang memiliki peluang memasuki arena kompetisi. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama untuk menjadi kandidat, dan tidak semua tokoh memiliki kesempatan yang sama untuk hadir dalam ruang publik. Jalur menuju kekuasaan melewati berbagai pintu yang harus dibuka oleh institusi tertentu sehingga sebelum rakyat memilih, sebagian proses seleksi sesungguhnya telah berlangsung terlebih dahulu.

Setelah itu, proses pembentukan persepsi mulai bekerja. Media, survei, kampanye, media sosial,

kelompok kepentingan, dan berbagai instrumen komunikasi membentuk lingkungan informasi yang memengaruhi cara masyarakat memandang para kandidat yang tersedia. Sebagian tokoh memperoleh eksposur yang sangat besar, sementara sebagian lainnya hanya memperoleh ruang yang terbatas. Sebagian gagasan diperbincangkan secara luas, sedangkan sebagian lainnya hampir tidak pernah muncul dalam percakapan publik. Lambat laun masyarakat mengenal pilihan-pilihan melalui lingkungan informasi yang telah dibentuk tersebut.

Di sinilah persoalan yang lebih mendasar mulai muncul. Ketika seseorang memilih, yang dipilih sebenarnya bukan seluruh kemungkinan yang ada dalam realitas. Yang dipilih adalah alternatif yang berhasil hadir dalam ruang kesadarannya, sedangkan ruang kesadaran tersebut dibentuk oleh berbagai proses yang telah berlangsung jauh sebelum hari pemungutan suara.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan antarmuka sebuah aplikasi. Pengguna memang bebas menekan tombol mana pun yang tersedia dan tidak ada paksaan ataupun ancaman yang memaksanya memilih tombol tertentu. Akan tetapi, seluruh tombol yang tersedia telah ditentukan oleh perancang aplikasi dan seluruh jalur yang dapat ditempuh pengguna telah dipetakan sejak awal. Dari sudut pandang pengguna, pilihan tetap terasa bebas, tetapi dari sudut pandang sistem, ruang pilihan telah dirancang sebelumnya.

Analogi ini membantu menjelaskan bahwa kebebasan memilih tidak selalu identik dengan kebebasan menentukan pilihan. Kebebasan memilih berbicara mengenai tindakan pada akhir proses, sedangkan kebebasan menentukan pilihan berbicara mengenai keseluruhan proses yang membentuk tindakan tersebut. Seseorang mungkin bebas memilih kandidat A atau kandidat B, tetapi apabila ruang telah membatasi kemungkinan hadirnya kandidat lain, maka kebebasan yang tersedia sesungguhnya berlangsung di dalam ruang yang telah dibentuk sebelumnya.

Fenomena ini tidak berarti bahwa demokrasi sepenuhnya palsu dan tidak berarti pula bahwa seluruh hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat. Pembahasan ini lebih diarahkan untuk memahami bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, tetapi juga oleh kualitas ruang yang menghasilkan pilihan tersebut. Semakin luas ruang pilihan yang tersedia, semakin besar kemungkinan rakyat benar-benar menentukan arah bangsa. Sebaliknya, semakin sempit ruang pilihan yang tersedia, semakin besar kemungkinan rakyat hanya memilih dari alternatif yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks inilah pembahasan mengenai *polling illusion* menjadi relevan. Ketika survei secara terus-menerus memperlihatkan kandidat tertentu sebagai calon pemenang, perhatian masyarakat perlahan mulai terkonsentrasi pada kandidat tersebut. Kandidat lain kehilangan ruang untuk dikenal dan dipertimbangkan sehingga pilihan yang secara teoritis

tersedia menjadi semakin tidak seimbang dalam persepsi publik.

Hal yang sama juga terlihat dalam pembahasan mengenai *behavioral engineering*. Ketika informasi disampaikan secara berbeda kepada kelompok yang berbeda, proses pembentukan pilihan juga mengalami perubahan. Pilihan yang tampak lahir dari keputusan pribadi sesungguhnya telah dipengaruhi oleh lingkungan informasi yang dirancang dengan sangat rinci.

Seluruh proses tersebut tidak menghapus hak memilih. Masyarakat tetap datang ke tempat pemungutan suara, tetap menerima surat suara, dan tetap menjalankan seluruh prosedur demokrasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, keseluruhan proses itu dapat memengaruhi bagaimana pilihan terbentuk sebelum rakyat sampai pada tahap memberikan suara.

Inilah yang menjadikan demokrasi modern jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan penyelenggaraan pemilu. Persoalannya bukan hanya apakah rakyat memilih, melainkan bagaimana pilihan tersebut dibentuk. Sebab kedaulatan rakyat tidak hanya berkaitan dengan tindakan memilih, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan rakyat menentukan arah pilihan secara merdeka.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya Sila Keempat mengenai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kebebasan menentukan pilihan memiliki makna yang sangat penting. Hikmat kebijaksanaan tidak lahir dari ruang pilihan yang

sempit, melainkan dari kesempatan yang cukup luas untuk mempertimbangkan berbagai alternatif secara jernih, rasional, dan bertanggung jawab. Ketika ruang tersebut semakin menyempit, kualitas kerakyatan yang menjadi fondasi demokrasi juga berpotensi mengalami penurunan.

Oleh karena itu, persoalan yang perlu dipikirkan bukan sekadar apakah rakyat masih dapat memilih, tetapi apakah rakyat masih memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan secara substantif. Demokrasi tidak hanya membutuhkan surat suara, melainkan juga membutuhkan ruang kebebasan yang memungkinkan rakyat menjadi subjek utama dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada akhirnya, apabila rakyat terus-menerus dihadapkan pada pilihan-pilihan yang telah diseleksi, dibentuk persepsinya, dan diarahkan ruang pertimbangannya, maka secara perlahan kedaulatan dapat bergeser dari kemampuan menciptakan arah menjadi sekadar kemampuan menyetujui arah yang telah ditentukan. Dalam keadaan seperti itu, rakyat tetap hadir dalam proses demokrasi, tetapi perannya berpotensi berubah dari penentu masa depan menjadi pengguna akhir dari rancangan yang dibuat oleh pihak lain.

12.9. Demokrasi yang Menghasilkan Kepatuhan

Dalam banyak pembahasan mengenai demokrasi, perhatian sering terfokus pada proses pemilihan umum, pergantian kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan keberadaan lembaga-lembaga

perwakilan. Semua unsur tersebut memang penting karena menjadi bagian dari mekanisme yang membedakan demokrasi dari bentuk pemerintahan yang lebih otoriter. Namun terdapat satu aspek yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana sebuah sistem demokrasi memperoleh kepatuhan dari masyarakat.

Kepatuhan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Tidak ada negara yang dapat bertahan jika seluruh rakyat menolak mematuhi hukum. Tidak ada pemerintahan yang dapat bekerja jika setiap kebijakan selalu diabaikan. Tidak ada sistem sosial yang dapat berjalan tanpa adanya tingkat kepatuhan tertentu dari masyarakat. Karena itu, setiap negara selalu membutuhkan legitimasi yang cukup agar aturan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan oleh rakyat.

Dalam sistem yang mengandalkan kekuatan semata, kepatuhan biasanya diperoleh melalui rasa takut. Ancaman hukuman menjadi alat utama untuk memastikan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku. Namun pendekatan semacam itu memiliki keterbatasan yang sangat besar. Pengawasan tidak mungkin dilakukan terhadap seluruh warga negara setiap saat. Penggunaan paksaan secara terus-menerus membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, kepatuhan yang lahir dari rasa takut cenderung rapuh karena hanya bertahan selama ancaman masih dirasakan.

Demokrasi menawarkan pendekatan yang berbeda. Dalam demokrasi, kepatuhan idealnya lahir

dari penerimaan. Rakyat mematuhi aturan karena menganggap aturan tersebut sah. Rakyat menerima keputusan karena merasa memiliki hubungan dengan proses yang menghasilkan keputusan tersebut. Kepatuhan tidak lagi bergantung terutama pada kekuatan koersif negara, melainkan pada keyakinan bahwa sistem yang ada layak untuk ditaati.

Pada titik ini, legitimasi menjadi sangat penting. Legitimasi adalah jembatan yang menghubungkan kekuasaan dengan kepatuhan. Semakin kuat legitimasi yang dimiliki sebuah sistem, semakin kecil kebutuhan untuk menggunakan paksaan secara langsung. Masyarakat mengikuti aturan karena merasa aturan tersebut memiliki dasar yang dapat diterima.

Dalam kondisi ideal, legitimasi lahir dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Rakyat memahami sistem yang dijalankan. Rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat memiliki akses yang memadai terhadap informasi. Rakyat merasa bahwa kepentingannya memperoleh tempat dalam proses pengambilan keputusan. Dari kondisi seperti itulah tumbuh kepatuhan yang sehat karena berakar pada kesadaran.

Namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern memperlihatkan bahwa legitimasi tidak selalu dibangun melalui cara yang sama. Dalam banyak kasus, legitimasi dapat diperkuat melalui pengelolaan persepsi. Masyarakat tidak hanya menerima suatu sistem karena memahami sistem tersebut, tetapi juga karena menerima gambaran tertentu mengenai sistem tersebut.

Di sinilah hubungan antara demokrasi, informasi, dan kepatuhan menjadi semakin kompleks. Dalam subbab-subbab sebelumnya telah dibahas bagaimana opini publik dapat dibentuk, bagaimana survei dapat memengaruhi persepsi, bagaimana perilaku dapat dipetakan dan diarahkan melalui teknologi, serta bagaimana persetujuan dapat lahir dari lingkungan informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik bukan sekadar hasil dari pengalaman langsung, tetapi juga hasil dari arus informasi yang terus membentuk cara masyarakat memahami realitas.

Akibatnya, kepatuhan dalam demokrasi modern tidak selalu lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam banyak situasi, kepatuhan lahir karena masyarakat menerima narasi tertentu mengenai legitimasi, stabilitas, keberhasilan, ancaman, atau kebutuhan untuk mempertahankan keadaan yang ada.

Fenomena ini dapat dipahami melalui analogi sederhana. Dalam sebuah organisasi, anggota akan lebih mudah menerima keputusan apabila mempercayai kepemimpinan organisasi tersebut. Kepercayaan tersebut tentu dapat lahir dari pengalaman nyata. Namun kepercayaan juga dapat diperkuat melalui komunikasi yang terus-menerus membangun citra positif mengenai organisasi dan kepemimpinan yang ada. Semakin kuat citra yang terbentuk, semakin besar kecenderungan anggota menerima keputusan yang dihasilkan.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika masyarakat terus-menerus menerima informasi yang menguatkan persepsi tertentu, maka penerimaan terhadap sistem juga cenderung meningkat. Pada tahap tertentu, kepatuhan tidak lagi hanya bergantung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga pada kualitas persepsi yang berhasil dibangun di sekitar kebijakan tersebut.

Dalam dunia teknologi, kondisi ini memiliki kemiripan dengan cara kerja berbagai *platform* digital yang berupaya mempertahankan keterlibatan pengguna. Sistem tidak selalu memaksa pengguna untuk tetap berada dalam *platform*. Sebaliknya, sistem membangun lingkungan yang membuat pengguna merasa nyaman, merasa terhubung, dan merasa bahwa keberadaan dalam sistem tersebut merupakan pilihan yang alami. Semakin kuat pengalaman tersebut, semakin kecil kebutuhan untuk menggunakan tekanan secara langsung.

Demikian pula dalam pemerintahan modern. Sistem yang berhasil membentuk persepsi positif secara konsisten tidak memerlukan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Masyarakat akan memberikan penerimaan secara sukarela karena memandang sistem tersebut sebagai sesuatu yang layak dipertahankan. Dari sudut pandang stabilitas, keadaan ini tentu memberikan keuntungan yang besar. Namun dari sudut pandang kedaulatan rakyat, muncul pertanyaan yang lebih mendalam mengenai kualitas penerimaan yang terbentuk.

Apakah kepatuhan tersebut lahir dari pemahaman yang utuh terhadap realitas?

Apakah penerimaan tersebut lahir dari proses berpikir yang benar-benar merdeka?

Apakah legitimasi yang terbentuk berasal dari partisipasi substantif rakyat atau lebih banyak berasal dari lingkungan informasi yang membentuk persepsi rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas. Demokrasi juga bertujuan menjaga kedaulatan rakyat. Stabilitas yang lahir dari kesadaran rakyat memiliki karakter yang berbeda dibanding stabilitas yang terutama bertumpu pada pengelolaan persepsi.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kepatuhan yang ideal adalah kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan kebijaksanaan. Kerakyatan tidak menghendaki rakyat menjadi sekadar pengikut yang menerima apa pun yang disampaikan oleh penguasa. Kerakyatan menghendaki rakyat menjadi subjek yang memahami, menimbang, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama secara sadar.

Ketika demokrasi semakin bergantung pada teknik-teknik pembentukan persepsi, muncul risiko bahwa rakyat lebih banyak menjadi objek pengelolaan opini daripada subjek kedaulatan. Kepatuhan tetap terbentuk. Legitimasi tetap ada. Sistem tetap berjalan.

Namun kualitas hubungan antara rakyat dan negara mengalami perubahan yang perlahan.

Karena itu, tantangan demokrasi modern bukan hanya menjaga agar masyarakat tetap patuh terhadap aturan. Tantangan yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kepatuhan tersebut lahir dari kesadaran yang merdeka, bukan semata-mata dari lingkungan informasi yang berhasil membentuk persepsi tertentu.

12.10. Dari Kedaulatan Menuju Persetujuan Semu

Setelah menelusuri berbagai pembahasan dalam bab ini, mulai dari cara kerja *spyware*, manipulasi persepsi, pembentukan opini publik, *polling illusion*, *behavioral engineering*, hingga munculnya konsep pseudo consent, tampak bahwa tantangan terbesar demokrasi modern tidak selalu terletak pada hilangnya hak-hak secara terbuka. Tantangan yang justru lebih sulit dikenali muncul ketika seluruh prosedur demokrasi tetap berjalan, tetapi proses yang membentuk kehendak masyarakat mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Pada masa lalu, ancaman terhadap kedaulatan rakyat sering dibayangkan dalam bentuk yang jelas dan mudah dikenali. Kekuasaan direbut melalui kekuatan bersenjata, hak-hak dicabut melalui aturan yang represif, dan kritik dibungkam melalui sensor yang terbuka. Dalam situasi seperti itu, masyarakat dapat dengan mudah memahami bahwa demokrasi sedang berada dalam bahaya karena ancaman, pelaku, dan dampaknya terlihat secara langsung.

Namun perkembangan teknologi informasi, media digital, dan teknik komunikasi pemerintahan modern telah melahirkan situasi yang jauh lebih kompleks. Demokrasi tidak harus dihancurkan untuk mengurangi kualitas kedaulatan rakyat. Pemilu tidak harus dihapus, kebebasan berpendapat tidak harus dicabut, dan hak memilih tidak harus dilarang. Seluruh simbol demokrasi dapat tetap dipertahankan, sementara proses yang membentuk keputusan masyarakat secara perlahan mengalami perubahan. Di sinilah letak pergeseran yang menjadi inti pembahasan bab ini.

Dalam demokrasi yang sehat, kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat tidak hanya memberikan suara, tetapi juga memiliki kemampuan yang memadai untuk menentukan arah suara tersebut. Rakyat memahami pilihan yang tersedia, memperoleh akses terhadap informasi yang beragam, dan memiliki ruang yang cukup untuk menimbang berbagai alternatif secara jernih. Persetujuan yang diberikan lahir dari proses pemahaman yang relatif utuh mengenai realitas yang sedang dihadapi.

Akan tetapi, ketika ruang informasi semakin dipenuhi oleh teknik-teknik pengelolaan perhatian, ketika opini publik dibentuk melalui arus narasi yang dirancang secara sangat terukur, dan ketika perilaku dipelajari serta dipetakan melalui data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, muncul kemungkinan bahwa persetujuan rakyat tidak lagi sepenuhnya lahir dari proses yang bebas sebagaimana dibayangkan dalam teori demokrasi klasik.

Rakyat memang tetap memilih, tetap memberikan dukungan, dan tetap memberikan legitimasi kepada sistem pemerintahan. Namun proses yang menghasilkan dukungan tersebut telah melewati berbagai lapisan pembentukan persepsi yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Apa yang tampak sebagai keputusan pribadi dapat saja merupakan hasil dari lingkungan informasi yang telah membentuk cara seseorang memahami kenyataan.

Dalam konteks inilah konsep pseudo consent memperoleh maknanya. Persetujuan tetap ada, tetapi kualitas persetujuan mengalami perubahan. Secara formal rakyat menyatakan dukungan, menerima hasil proses keputusan, dan memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terbentuk. Akan tetapi, secara substantif persetujuan tersebut lahir di dalam lingkungan yang telah dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang mengarahkan cara masyarakat melihat, menilai, dan memahami realitas.

Fenomena ini sangat mirip dengan seseorang yang merasa sedang mengambil keputusan secara mandiri, padahal sebagian besar informasi yang digunakannya untuk mengambil keputusan tersebut telah dipilihkan terlebih dahulu. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, dan tidak ada larangan yang secara terbuka membatasi kebebasannya. Namun lingkungan yang membentuk proses berpikir telah dirancang sedemikian rupa sehingga arah kesimpulan tertentu menjadi lebih mudah dicapai dibandingkan kesimpulan yang lain.

Dalam dunia teknologi, keadaan seperti ini dapat dianalogikan dengan sebuah sistem navigasi yang tidak pernah memaksa pengguna untuk memilih satu jalur tertentu, tetapi terus-menerus menampilkan jalur yang dianggap paling sesuai berdasarkan data yang dimiliki sistem. Pada akhirnya pengguna tetap menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi, pilihan tersebut lahir di dalam lingkungan yang telah dirancang untuk mengarahkan perhatian kepada jalur tertentu.

Demokrasi modern semakin memperlihatkan gejala yang serupa. Masyarakat tetap memegang surat suara dan tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ruang yang membentuk persepsi masyarakat semakin dipenuhi oleh berbagai instrumen yang bekerja untuk memengaruhi perhatian, emosi, dan pilihan mereka. Akibatnya, batas antara kehendak yang benar-benar mandiri dan kehendak yang dibentuk oleh lingkungan informasi menjadi semakin sulit dibedakan.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa demokrasi telah kehilangan maknanya. Pembahasan dalam bab ini tidak bertujuan menyimpulkan bahwa setiap proses pengambilan keputusan merupakan hasil manipulasi, dan juga tidak dimaksudkan untuk menolak demokrasi sebagai prinsip kehidupan bernegara. Sebaliknya, pembahasan ini ingin menunjukkan bahwa demokrasi modern menghadapi tantangan baru yang tidak dihadapi oleh generasi-generasi sebelumnya.

Jika pada masa lalu perjuangan demokrasi lebih banyak berfokus pada perluasan hak-hak masyarakat, maka pada masa kini perjuangan tersebut juga harus mencakup perlindungan terhadap kualitas

pembentukan kehendak rakyat. Hak memilih memang penting, tetapi kemampuan menentukan pilihan secara merdeka tidak kalah penting. Kebebasan berpendapat memang penting, tetapi kebebasan memperoleh informasi yang berimbang juga memiliki arti yang sama besarnya. Legitimasi memang diperlukan dalam sebuah negara demokratis, tetapi legitimasi yang lahir dari pemahaman yang utuh memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan legitimasi yang terbentuk dari persepsi yang dibangun secara sistematis.

Dalam perspektif Pancasila, terutama Sila Keempat mengenai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, persoalan ini menyentuh inti dari makna kerakyatan itu sendiri. Kerakyatan tidak hanya berbicara mengenai jumlah suara yang terkumpul, tetapi juga mengenai manusia yang berpikir, mempertimbangkan, bermusyawarah, dan mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan. Ketika proses pembentukan keputusan semakin didominasi oleh teknik-teknik pengelolaan persepsi, maka kualitas kerakyatan yang menjadi fondasi demokrasi juga menghadapi tantangan yang serius.

Oleh karena itu, pertanyaan yang perlu diajukan pada akhir bab ini bukanlah apakah demokrasi masih ada. Demokrasi jelas masih ada. Pemilu masih diselenggarakan, partai politik masih berkompetisi, kampanye masih berlangsung, dan ruang publik masih tetap tersedia. Akan tetapi, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh instrumen tersebut masih menghasilkan kedaulatan rakyat yang

sesungguhnya, atau secara perlahan berubah menjadi mekanisme yang terutama menghasilkan persetujuan terhadap pilihan-pilihan yang telah dibentuk sebelumnya.

Pertanyaan tersebut menjadi sangat penting karena sejarah menunjukkan bahwa sebuah sistem tidak harus menghapus kebebasan untuk mengurangi kedaulatan. Dalam banyak keadaan, cukup dengan memengaruhi lingkungan yang membentuk persepsi, maka arah keputusan publik dapat bergerak tanpa perlu menggunakan paksaan secara terbuka. Masyarakat tetap merasa bebas, tetap merasa memilih, dan tetap merasa menentukan masa depannya sendiri. Namun sebagian besar proses yang membentuk pilihan tersebut telah berlangsung jauh sebelum keputusan akhir diambil.

Pada titik inilah seluruh pembahasan dalam bab ini saling bertemu. *Spyware* mengajarkan bahwa sebuah sistem dapat dimanfaatkan tanpa harus dirusak. Behavioral engineering menunjukkan bahwa perilaku dapat diarahkan tanpa harus diperintah. *Polling illusion* memperlihatkan bahwa persepsi mengenai mayoritas dapat memengaruhi keputusan individu. Sementara *pseudo consent* menjelaskan bahwa persetujuan dapat tetap hadir meskipun ruang yang membentuk persetujuan tersebut telah mengalami penyempitan.

BAB 13
KOLONIALISME MODERN SEBAGAI ROOTKIT

13.1. Apa Itu *Rootkit*?

Dalam dunia teknologi informasi, terdapat berbagai jenis ancaman yang bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian ancaman menyerang secara terbuka dengan merusak sistem, menghapus data, atau membuat perangkat tidak dapat digunakan. Ancaman semacam itu biasanya mudah dikenali karena dampaknya langsung terlihat oleh pengguna. Ketika komputer tiba-tiba tidak dapat berfungsi, ketika data hilang, atau ketika sistem mengalami gangguan yang serius, pengguna segera menyadari bahwa terdapat sesuatu yang salah.

Namun tidak semua ancaman bekerja dengan cara yang demikian. Sebagian ancaman justru dirancang agar tidak terlihat. Sistem tetap berjalan, program tetap berfungsi, dan pengguna tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang mencolok, tidak ada alarm yang berbunyi, dan tidak ada pesan peringatan yang muncul di layar. Akan tetapi, pada lapisan yang lebih dalam, kendali terhadap sistem perlahan mulai mengalami perubahan.

Salah satu bentuk ancaman yang bekerja dengan cara seperti itu dikenal sebagai *rootkit*.

Dalam istilah teknologi, *rootkit* adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memperoleh akses pada

tingkat terdalam sebuah sistem komputer. Kata *root* merujuk pada tingkat otoritas tertinggi dalam sistem operasi, yaitu hak untuk mengendalikan seluruh fungsi yang ada di dalam sistem tersebut, sedangkan kata kit merujuk pada seperangkat alat yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan akses tersebut. Dengan kata lain, *rootkit* merupakan sekumpulan mekanisme yang memungkinkan pihak tertentu memperoleh kendali yang sangat dalam terhadap sebuah sistem tanpa mudah terdeteksi oleh pemilik sistem itu sendiri.

Yang membedakan *rootkit* dari berbagai ancaman digital lainnya bukan semata-mata kemampuannya untuk memasuki sistem, melainkan kemampuannya menyembunyikan keberadaannya. Sistem tetap tampak normal, pengguna tetap merasa memiliki kendali, dan seluruh fungsi utama tetap berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sebagian keputusan penting mengenai bagaimana sistem bekerja sesungguhnya telah dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di bawah permukaan.

Dalam banyak keadaan, pengguna bahkan tidak menyadari bahwa sebagian kontrol terhadap sistem telah berpindah. Dari luar, komputer masih terlihat sebagai miliknya. Nama pengguna tetap sama, tampilan sistem tidak berubah, dan semua aplikasi masih dapat digunakan. Namun akses yang paling mendasar telah mengalami gangguan. Pengguna tetap menjadi pemilik formal, tetapi tidak lagi sepenuhnya menjadi pengendali substantif.

Analogi inilah yang digunakan dalam bab ini untuk memahami salah satu fenomena yang semakin relevan dalam kehidupan bernegara, yaitu kolonialisme modern.

Ketika mendengar istilah kolonialisme, sebagian besar orang langsung membayangkan kapal perang, pasukan bersenjata, pendudukan wilayah, pengibaran bendera asing, atau pemerintahan kolonial yang secara terbuka menguasai suatu bangsa. Gambaran tersebut memang sesuai dengan pengalaman kolonialisme klasik yang berlangsung selama berabad-abad di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara. Pada masa itu, hubungan antara penjajah dan yang dijajah relatif mudah dikenali karena siapa yang berkuasa terlihat dengan jelas dan siapa yang dikendalikan juga tampak secara nyata.

Namun perkembangan dunia menunjukkan bahwa bentuk pengaruh antarnegeri telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dalam era modern,

penguasaan tidak selalu dilakukan melalui pendudukan wilayah. Pengaruh tidak selalu hadir melalui kekuatan militer, dan tekanan tidak selalu diwujudkan melalui penggunaan senjata. Dalam banyak keadaan, pengaruh yang paling kuat justru bekerja melalui jalur ekonomi, keuangan, teknologi, informasi, kebijakan, dan berbagai bentuk ketergantungan struktural yang berkembang secara perlahan.

Karena itu, pembahasan mengenai kolonialisme modern memerlukan cara pandang yang berbeda dari kolonialisme klasik. Jika kolonialisme klasik berusaha menguasai wilayah, maka kolonialisme modern sering kali berusaha memengaruhi arah keputusan. Jika kolonialisme klasik menguasai pemerintahan secara langsung, maka kolonialisme modern lebih banyak bekerja melalui pengaruh terhadap ruang kebijakan. Jika kolonialisme klasik hadir melalui tentara dan administrasi kolonial, maka kolonialisme modern sering hadir melalui hubungan ekonomi, ketergantungan finansial, pengaruh regulasi, penguasaan teknologi, serta kendali terhadap sumber daya strategis.

Perubahan bentuk inilah yang membuat analogi *rootkit* menjadi relevan. Sebagaimana *rootkit* tidak selalu menghancurkan sistem komputer, kolonialisme modern tidak selalu menghancurkan negara. Sebaliknya, negara tetap dipertahankan sebagai negara yang merdeka secara formal. Pemerintah tetap ada, parlemen tetap bekerja, konstitusi tetap berlaku, pemilu tetap diselenggarakan, dan bendera nasional tetap

berkibar. Dari luar, seluruh simbol kemerdekaan tampak utuh dan tidak ada tanda-tanda bahwa kedaulatan sedang mengalami gangguan.

Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah simbol-simbol kemerdekaan masih ada. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar kemampuan sebuah bangsa untuk mengendalikan arah keputusan strategisnya sendiri. Apakah kebijakan ekonomi benar-benar ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, apakah pengelolaan sumber daya benar-benar diarahkan bagi kesejahteraan rakyat, apakah ruang fiskal dan ruang pembangunan cukup bebas untuk menentukan prioritas secara mandiri, dan apakah keputusan-keputusan strategis lahir dari kedaulatan bangsa atau dari berbagai bentuk ketergantungan yang berkembang selama bertahun-tahun.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa pembahasan dari wilayah formal menuju wilayah substantif. Sebab pada hakikatnya, kedaulatan bukan hanya soal pengakuan internasional atau keberadaan pemerintahan nasional. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan sebuah bangsa mengambil keputusan secara mandiri dan mengendalikan arah masa depannya sendiri.

Dalam bab-bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana oligarki dapat bekerja seperti *malware* yang memengaruhi sistem dari dalam. Telah dibahas pula bagaimana manipulasi persepsi dapat bekerja seperti *spyware* yang mempelajari dan memengaruhi perilaku masyarakat. Pembahasan mengenai *rootkit* melengkapi

kedua analogi tersebut dengan menunjukkan bahwa pengaruh terhadap sebuah negara tidak selalu berasal dari dalam negeri. Dalam banyak keadaan, pengaruh juga dapat datang dari luar melalui mekanisme yang jauh lebih halus dibandingkan bentuk penjajahan yang dikenal dalam sejarah klasik.

Penting untuk ditegaskan bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memandang setiap hubungan internasional sebagai bentuk kolonialisme. Tidak setiap kerja sama ekonomi merupakan bentuk penjajahan, tidak setiap investasi asing merupakan ancaman terhadap kedaulatan, dan tidak setiap hubungan diplomatik mengandung unsur dominasi. Dunia modern memang dibangun di atas hubungan yang saling terhubung dan saling membutuhkan di antara berbagai negara.

Namun justru karena hubungan tersebut semakin kompleks, kemampuan membedakan antara kerja sama yang sehat dan ketergantungan yang berlebihan menjadi semakin penting. Sejarah menunjukkan bahwa pengaruh yang paling kuat sering kali tidak hadir dalam bentuk yang kasar. Pengaruh yang paling efektif justru hadir ketika pihak yang dipengaruhi tidak merasa sedang dipengaruhi dan ketika perubahan arah keputusan berlangsung secara perlahan tanpa menimbulkan kesadaran bahwa ruang kedaulatan sedang menyempit.

Dalam perspektif Pancasila, terutama Sila Ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan Sila Kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kedaulatan bukan sekadar simbol

kenegaraan. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa untuk mengelola sumber dayanya, menentukan arah pembangunannya, dan mengambil keputusan strategis berdasarkan kepentingan rakyatnya sendiri. Ketika kemampuan tersebut melemah akibat berbagai bentuk ketergantungan yang tidak disadari, maka kemerdekaan formal dapat tetap ada sementara kedaulatan substantif perlahan mengalami penyempitan.

Pada akhirnya, sebagaimana *rootkit* memungkinkan pihak lain memengaruhi sistem tanpa harus mengubah tampilan luarnya, kolonialisme modern juga tidak selalu menghapus kemerdekaan sebuah negara. Negara tetap berdiri, pemerintahan tetap berjalan, dan simbol-simbol kedaulatan tetap dipertahankan. Namun apabila ruang untuk menentukan arah kebijakan semakin bergantung pada kekuatan-kekuatan di luar kendali bangsa itu sendiri, maka pertanyaan yang harus terus diajukan adalah apakah kemerdekaan yang dimiliki masih sepenuhnya merupakan kemerdekaan yang substantif.

13.2. Dari Kolonialisme Klasik ke Kolonialisme Modern

Ketika membicarakan kolonialisme, ingatan banyak orang biasanya langsung tertuju pada masa ketika bangsa-bangsa Eropa datang dengan kapal-kapal besar, pasukan bersenjata, dan misi untuk menguasai wilayah-wilayah yang dianggap bernilai secara ekonomi maupun strategis. Dalam konteks Nusantara, sejarah kolonialisme sering dikaitkan dengan

kedatangan bangsa Portugis, kemudian disusul oleh Belanda melalui VOC, dan akhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Pada masa itu, bentuk penjajahan relatif mudah dikenali karena penguasaan dilakukan secara fisik. Wilayah diduduki, pemerintahan diambil alih, sumber daya dieksploitasi secara terbuka, dan hubungan antara penjajah dengan bangsa yang dijajah tampak jelas di hadapan masyarakat.

Kolonialisme klasik pada dasarnya bertumpu pada penguasaan langsung terhadap wilayah. Siapa yang menguasai pelabuhan, jalur perdagangan, sumber daya alam, dan pusat-pusat pemerintahan akan memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar. Karena itu, ekspansi kolonial pada masa tersebut banyak dilakukan melalui kekuatan militer. Tentara menjadi alat utama, kapal perang menjadi simbol kekuasaan, dan benteng-benteng dibangun untuk mempertahankan wilayah yang telah direbut.

Namun seiring berjalannya waktu, dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Perang menjadi semakin mahal, pendudukan wilayah semakin sulit dipertahankan, dan kesadaran nasional tumbuh di berbagai bangsa yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Gelombang kemerdekaan menyebar ke berbagai belahan dunia, dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua bentuk kolonialisme klasik secara perlahan kehilangan legitimasi dalam hubungan internasional. Bangsa-bangsa yang sebelumnya dijajah mulai memperoleh kemerdekaan formal dan pengakuan sebagai negara yang berdaulat.

Dari sudut pandang formal, era kolonialisme tampak telah berakhir. Bendera kolonial diturunkan, pemerintahan nasional dibentuk, konstitusi disusun, lembaga-lembaga negara berdiri, dan hubungan diplomatik dibangun atas dasar kesetaraan antarnegara. Banyak bangsa yang sebelumnya hidup di bawah kekuasaan asing kini memiliki pemerintahan sendiri dan memperoleh pengakuan sebagai anggota masyarakat internasional.

Akan tetapi, berakhirnya kolonialisme klasik tidak serta-merta mengakhiri seluruh bentuk pengaruh yang sejak awal menjadi tujuan kolonialisme itu sendiri. Sebab pada hakikatnya, tujuan utama kolonialisme bukanlah sekadar menguasai wilayah. Wilayah hanyalah sarana untuk memperoleh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu akses terhadap sumber daya alam, jalur perdagangan, pasar, tenaga kerja, dan berbagai keuntungan strategis lainnya. Ketika cara lama menjadi semakin mahal dan sulit dipertahankan, cara baru mulai berkembang mengikuti perubahan zaman.

Di sinilah dunia memasuki fase yang sering disebut sebagai kolonialisme modern. Kolonialisme modern berbeda dari kolonialisme klasik dalam hampir seluruh penampilannya. Tidak ada lagi gubernur jenderal yang secara resmi memimpin wilayah jajahan, tidak ada lagi pengibaran bendera asing di atas kantor pemerintahan nasional, dan tidak ada lagi pendudukan militer yang secara terbuka mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebaliknya, negara-negara yang merdeka tetap memiliki pemerintahan sendiri,

parlemen sendiri, hukum sendiri, dan simbol-simbol kenegaraan sendiri.

Meskipun demikian, hubungan pengaruh tidak sepenuhnya hilang. Yang berubah bukanlah tujuan dasarnya, melainkan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Jika pada masa lalu pengaruh diperoleh melalui pendudukan wilayah, pada masa kini pengaruh lebih sering diperoleh melalui hubungan ekonomi. Jika dahulu kekuatan militer menjadi instrumen utama, kini kekuatan finansial, teknologi, dan jaringan perdagangan global sering kali memiliki peran yang jauh lebih besar. Jika dahulu administrasi kolonial menjadi alat pengendalian, kini pengaruh dapat tumbuh melalui investasi, pembiayaan pembangunan, penguasaan teknologi, pengendalian rantai pasok, serta berbagai bentuk ketergantungan struktural lainnya.

Perubahan tersebut membuat kolonialisme modern jauh lebih sulit dikenali dibandingkan kolonialisme klasik. Pada masa penjajahan dahulu, masyarakat dapat melihat dengan jelas siapa yang berkuasa dan siapa yang berada dalam posisi yang dikuasai. Garis pemisah antara penjajah dan yang dijajah tampak nyata. Dalam dunia modern, hubungan pengaruh sering berlangsung melalui mekanisme yang legal, formal, dan bahkan tampak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerja sama ekonomi, pinjaman pembangunan, investasi asing, bantuan teknis, dan berbagai bentuk kemitraan internasional merupakan bagian yang normal dalam hubungan antarnegara.

Karena itu, pembahasan mengenai kolonialisme modern tidak dapat dilakukan dengan pendekatan

yang terlalu sederhana. Tidak setiap investasi asing merupakan bentuk penjajahan, tidak setiap pinjaman luar negeri merupakan ancaman terhadap kedaulatan, dan tidak setiap kerja sama internasional berarti adanya penguasaan oleh pihak luar. Dunia modern memang dibangun di atas hubungan yang saling terhubung dan saling membutuhkan.

Namun di balik kenyataan tersebut terdapat satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu apakah hubungan yang terjalin tetap memungkinkan sebuah bangsa mengambil keputusan strategis secara mandiri. Pertanyaan inilah yang menjadi inti pembahasan kolonialisme modern. Sebab ukuran utama kedaulatan bukan hanya terletak pada keberadaan simbol-simbol kenegaraan, tetapi juga pada kemampuan menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, menyusun kebijakan, dan menetapkan prioritas nasional berdasarkan kepentingan bangsa sendiri. Ketika kemampuan tersebut semakin dibatasi oleh ketergantungan ekonomi, tekanan finansial, pengaruh regulasi, atau kebutuhan terhadap sumber daya yang berasal dari luar, maka ruang kedaulatan dapat mengalami penyempitan tanpa harus mengubah bentuk formal negara.

Dalam konteks ini, kolonialisme modern memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan konsep *rootkit* yang dibahas pada subbab sebelumnya. Sebuah *rootkit* tidak perlu mengganti nama sistem operasi untuk memperoleh pengaruh. Ia juga tidak perlu mengubah tampilan luar komputer agar dapat memengaruhi cara kerja sistem. Yang diperlukan hanyalah akses pada

lapisan yang cukup dalam untuk memengaruhi keputusan-keputusan penting yang diambil oleh sistem tersebut.

Demikian pula kolonialisme modern. Ia tidak perlu mengganti bendera suatu negara, tidak perlu menghapus konstitusi, dan tidak perlu mengambil alih pemerintahan secara langsung. Pengaruh dapat bekerja melalui jalur yang jauh lebih halus dengan memengaruhi faktor-faktor yang menentukan ruang gerak negara dalam mengambil keputusan. Negara tetap tampak merdeka, tetapi ruang untuk menentukan kebijakannya sendiri dapat semakin dipengaruhi oleh berbagai bentuk ketergantungan yang berkembang secara perlahan.

Inilah sebabnya mengapa banyak negara yang secara formal merdeka tetap menghadapi perdebatan mengenai kualitas kedaulatannya. Persoalan yang diperdebatkan bukanlah kemerdekaan dalam arti formal, melainkan seberapa besar kemampuan negara tersebut menentukan nasibnya sendiri di tengah jaringan hubungan global yang semakin kompleks.

Dalam perspektif sejarah, perubahan ini menunjukkan bahwa kolonialisme telah mengalami evolusi. Tujuan dasarnya relatif tetap, yaitu memperoleh keuntungan strategis, ekonomi, dan geopolitik. Akan tetapi, instrumen yang digunakan berubah mengikuti perkembangan zaman. Ketika tentara bukan lagi alat yang paling efektif, instrumen ekonomi menjadi lebih penting. Ketika pendudukan wilayah tidak lagi mudah diterima oleh masyarakat

internasional, kemampuan memengaruhi kebijakan menjadi semakin bernilai.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kolonialisme modern tidak seharusnya terjebak pada nostalgia sejarah mengenai penjajahan masa lalu. Tantangan yang dihadapi generasi sekarang berbeda dengan tantangan yang dihadapi generasi sebelumnya. Jika dahulu perjuangan kemerdekaan berfokus pada pengusiran kekuatan kolonial dari wilayah nasional, maka tantangan masa kini lebih banyak berkaitan dengan menjaga ruang kedaulatan di tengah hubungan global yang semakin kompleks dan saling bergantung.

Dalam perspektif Pancasila, terutama Sila Ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan Sila Kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari pendudukan asing. Kemerdekaan juga berarti kemampuan mengelola masa depan bangsa berdasarkan kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Persatuan membutuhkan kemampuan menentukan arah bersama, sedangkan keadilan sosial membutuhkan kemampuan memastikan bahwa sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada akhirnya, perubahan bentuk kolonialisme mengajarkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam rupa yang sama. Jika dahulu penjajahan datang melalui kapal perang dan pendudukan wilayah, pada masa kini pengaruh dapat hadir melalui hubungan ekonomi, ketergantungan finansial, penguasaan teknologi, dan kemampuan

memengaruhi arah kebijakan suatu negara. Semakin halus mekanismenya, semakin sulit pula masyarakat menyadari bahwa ruang kedaulatannya sedang mengalami penyempitan.

13.3. *Debt Dependency* (Ketergantungan Utang)

Dalam kehidupan modern, utang pada dasarnya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat umum digunakan. Seseorang dapat meminjam modal untuk membuka usaha, membeli rumah, memperluas kegiatan produksi, atau membiayai kebutuhan lain yang diharapkan memberikan manfaat pada masa depan. Selama pinjaman tersebut dikelola dengan baik dan kemampuan untuk membayarnya tetap terjaga, utang dapat menjadi alat yang membantu pertumbuhan. Prinsip yang sama juga berlaku dalam kehidupan bernegara. Hampir seluruh negara di dunia menggunakan utang sebagai bagian dari kebijakan fiskalnya. Bahkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pun memanfaatkan pembiayaan melalui utang untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Karena itu, pembahasan mengenai utang dalam subbab ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa setiap pinjaman merupakan bentuk penjajahan atau ancaman terhadap kemerdekaan sebuah bangsa. Pandangan semacam itu terlalu sederhana untuk menjelaskan hubungan ekonomi internasional yang sangat kompleks. Persoalan yang lebih penting bukanlah apakah sebuah negara memiliki utang atau tidak, melainkan apakah utang tersebut masih berfungsi

sebagai alat pembangunan atau perlahan berubah menjadi sumber ketergantungan yang memengaruhi ruang gerak negara dalam mengambil keputusan.

Perbedaan antara penggunaan utang dan ketergantungan utang menjadi sangat penting untuk dipahami. Utang yang sehat tetap berada di bawah kendali negara. Negara memanfaatkan pembiayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri. Sebaliknya, ketergantungan utang muncul ketika keberlangsungan pembangunan dan stabilitas fiskal semakin bergantung pada kemampuan memperoleh pembiayaan baru dari luar. Pada kondisi seperti itu, utang tidak lagi hanya menjadi instrumen, tetapi mulai memengaruhi cara negara menentukan prioritas dan mengambil keputusan.

Inilah yang dalam pembahasan ini disebut sebagai *debt dependency* atau ketergantungan utang. Ketergantungan utang tidak selalu ditentukan oleh besarnya angka utang atau persentasenya terhadap produk domestik bruto. Sebuah negara dapat memiliki utang yang relatif besar tetapi tetap memiliki ruang kebijakan yang luas apabila perekonomiannya kuat, penerimaannya stabil, dan kemampuan pembiayaannya didukung oleh kekuatan ekonomi nasional. Sebaliknya, sebuah negara dapat memiliki utang yang lebih kecil tetapi menghadapi keterbatasan yang lebih besar apabila ketahanan fiskalnya lemah dan kebutuhan pembiayaannya sangat bergantung pada sumber dana eksternal.

Dalam konteks inilah utang mulai berkaitan dengan persoalan kedaulatan. Negara modern memerlukan anggaran untuk menjalankan pemerintahan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat pertahanan, serta melaksanakan berbagai program pembangunan lainnya. Ketika penerimaan negara belum mencukupi seluruh kebutuhan tersebut, pinjaman menjadi salah satu pilihan yang tersedia. Pada tahap awal, mekanisme ini merupakan bagian normal dari pengelolaan keuangan negara. Namun apabila pinjaman baru terus dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan pembiayaan atau untuk memenuhi kewajiban yang telah ada sebelumnya, maka hubungan tersebut perlahan dapat berkembang menjadi ketergantungan.

Dalam praktik ekonomi, keadaan ini sering berkaitan dengan mekanisme pembiayaan kembali atau *refinancing*. *Refinancing* sendiri bukanlah sesuatu yang otomatis bermasalah. Banyak negara menggunakannya sebagai bagian dari strategi pengelolaan utang yang wajar. Akan tetapi ketika keberhasilan memenuhi kewajiban lama semakin bergantung pada kemampuan memperoleh pinjaman baru, maka perhatian negara tidak lagi hanya tertuju pada kebutuhan pembangunan nasional. Sebagian besar energi juga harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan pasar keuangan, mempertahankan peringkat kredit, dan memastikan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan tetap terbuka.

Pada titik tersebut, ruang pengambilan keputusan perlahan dapat mengalami penyempitan. Sebuah kebijakan mungkin dianggap penting bagi rakyat, tetapi sulit dilaksanakan karena dikhawatirkan memengaruhi stabilitas fiskal. Sebuah program pembangunan mungkin memiliki manfaat yang besar bagi kepentingan nasional, tetapi harus ditunda karena prioritas diarahkan untuk menjaga keseimbangan pembiayaan. Bahkan suatu keputusan strategis dapat dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan bangsa, tetapi juga berdasarkan kemungkinan dampaknya terhadap hubungan dengan pihak-pihak yang menjadi sumber pembiayaan.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan sebuah sistem yang masih dimiliki oleh penggunanya, tetapi operasionalnya sangat bergantung pada layanan yang disediakan oleh pihak lain. Sistem tersebut tetap berjalan. Pengguna tetap tampak sebagai pemilik. Namun setiap perubahan penting harus mempertimbangkan apakah akses terhadap layanan tersebut akan tetap tersedia pada masa mendatang. Semakin besar ketergantungan yang terbentuk, semakin sempit pula ruang untuk bertindak secara mandiri.

Analogi tersebut menjelaskan mengapa *debt dependency* menjadi relevan dalam pembahasan kolonialisme modern sebagai *rootkit*. Sebagaimana *rootkit* tidak perlu mengambil alih seluruh sistem untuk memperoleh pengaruh, ketergantungan finansial juga tidak perlu menghilangkan kemerdekaan formal sebuah negara untuk memengaruhi ruang

kebijakannya. Bendera tetap berkibar. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap berlaku. Pemilu tetap diselenggarakan. Namun sebagian keputusan strategis perlahan bergerak di dalam batas-batas yang ditentukan oleh kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hubungan pembiayaan.

Yang menarik, pengaruh seperti ini sering kali tidak hadir dalam bentuk tekanan yang terbuka. Tidak selalu ada perintah yang disampaikan secara langsung. Tidak selalu ada ancaman yang dinyatakan secara eksplisit. Dalam banyak keadaan, negara mulai menyesuaikan kebijakannya karena memahami bahwa terganggunya hubungan pembiayaan dapat menimbulkan konsekuensi yang besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan sering kali dapat bekerja lebih efektif daripada paksaan. Paksaan cenderung melahirkan perlawanan. Sebaliknya, ketergantungan sering menghasilkan penyesuaian yang dilakukan secara sukarela demi menjaga akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Semakin besar kebutuhan terhadap sumber pembiayaan tertentu, semakin besar pula kecenderungan untuk menyesuaikan diri agar hubungan tersebut tetap terpelihara.

Sejarah perekonomian dunia menunjukkan bahwa berbagai negara pernah menghadapi situasi ketika beban pembiayaan yang tinggi mengurangi fleksibilitas dalam menentukan arah kebijakan. Sebagian harus melakukan penyesuaian fiskal yang berat. Sebagian harus mengurangi belanja publik.

Sebagian harus mengubah prioritas pembangunan demi menjaga stabilitas keuangan. Pengalaman-pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utang bukan hanya menyangkut angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga menyangkut kemampuan sebuah bangsa menentukan masa depannya sendiri.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemandirian ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semakin kuat kemampuan pembiayaan yang bersumber dari kekuatan ekonomi nasional, semakin luas pula ruang bagi negara untuk menyusun kebijakan sesuai kebutuhan rakyatnya sendiri. Sebaliknya, semakin besar ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, semakin besar pula tantangan untuk menjaga agar arah pembangunan tetap ditentukan oleh kepentingan nasional.

Karena itu, pembahasan mengenai *debt dependency* tidak seharusnya dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh bentuk utang. Fokus utamanya adalah menjaga agar utang tetap menjadi alat pembangunan dan tidak berubah menjadi sumber ketergantungan yang mempersempit ruang kedaulatan. Negara dapat memanfaatkan pembiayaan eksternal untuk mempercepat kemajuan, tetapi negara tidak boleh kehilangan kemampuan untuk menentukan arah pembangunan tersebut secara mandiri. Sebab kemerdekaan ekonomi pada akhirnya bukan berarti menolak kerja sama dengan dunia luar, melainkan memastikan bahwa setiap kerja sama tetap berada di

bawah kendali bangsa dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

13.4. *Foreign Influence*

Dalam dunia yang semakin terhubung, hampir tidak ada negara yang benar-benar hidup dalam ruang yang terisolasi. Perdagangan internasional menghubungkan pasar berbagai negara. Teknologi bergerak melintasi batas wilayah. Investasi mengalir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, energi, lingkungan, dan berbagai sektor lainnya membentuk jaringan hubungan yang semakin kompleks. Karena itu, pengaruh antarnegara merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan internasional modern.

Tidak ada negara yang dapat berkembang hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri tanpa berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar sekalipun tetap membangun hubungan ekonomi, diplomatik, dan strategis dengan negara lain. Dalam konteks tersebut, pengaruh bukanlah sesuatu yang otomatis bersifat negatif. Pengaruh dapat membawa ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman, peluang investasi, pasar baru, dan berbagai manfaat lain yang mendukung pembangunan nasional.

Namun sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya mengenai ketergantungan utang, persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar ada atau tidak adanya hubungan internasional, melainkan keseimbangan di dalam hubungan tersebut. Ketika

negara-negara memiliki kemampuan yang relatif setara, pengaruh biasanya bergerak secara timbal balik. Setiap pihak dapat menyampaikan kepentingannya dan setiap pihak memiliki ruang untuk mempertahankan prioritas nasionalnya masing-masing. Sebaliknya, ketika terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, hubungan yang tampak setara secara formal dapat menghasilkan ketergantungan yang semakin dalam pada tingkat substantif.

Dalam kajian hubungan internasional, kondisi semacam ini sering dipahami sebagai *foreign influence*, yaitu pengaruh yang berasal dari luar negeri terhadap proses pengambilan keputusan di dalam suatu negara. Pengaruh tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk tekanan yang terbuka. Tidak selalu datang melalui ancaman militer. Tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perintah yang resmi. Dalam banyak keadaan, pengaruh justru bekerja melalui jaringan kerja sama ekonomi, bantuan teknis, lembaga internasional, organisasi donor, pusat kajian, konsultan global, investasi strategis, pertukaran pengetahuan, hingga berbagai forum internasional yang menjadi tempat bertemunya kepentingan banyak pihak.

Karena itu, *foreign influence* jauh lebih kompleks dibanding gambaran sederhana mengenai campur tangan asing. Pengaruh sering bekerja melalui proses yang tampak normal dan bahkan memberikan manfaat nyata. Sebuah negara menerima bantuan untuk memperkuat sistem pendidikan. Negara lain memperoleh dukungan dalam reformasi birokrasi. Sebagian memperoleh akses pembiayaan untuk

pembangunan infrastruktur. Sebagian lagi mendapatkan pendampingan dalam penyusunan kebijakan publik. Dari permukaan, seluruh proses tersebut tampak sebagai bentuk kerja sama yang sah dan diperlukan dalam kehidupan internasional modern.

Persoalan mulai muncul ketika hubungan tersebut berkembang menjadi ketergantungan yang memengaruhi kemampuan negara dalam menentukan prioritasnya sendiri.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan sebuah sistem yang terus menerima pembaruan dari sumber eksternal. Pada awalnya pembaruan tersebut membantu meningkatkan kualitas sistem. Kinerja menjadi lebih baik, kemampuan bertambah, dan berbagai kelemahan dapat diperbaiki. Namun masalah mulai muncul ketika sistem tidak lagi mampu beroperasi secara optimal tanpa bergantung pada pembaruan yang berasal dari luar. Pada titik tertentu, arah perkembangan sistem tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemiliknya, tetapi ikut dipengaruhi oleh pihak yang mengendalikan sumber pembaruan tersebut.

Fenomena serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara dapat menerima berbagai masukan, rekomendasi, penelitian, bantuan teknis, maupun dukungan kebijakan dari pihak luar. Semua itu dapat memberikan manfaat besar apabila digunakan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Akan tetapi ketika proses pengambilan keputusan semakin bergantung pada pandangan

eksternal dibanding pada realitas yang dihadapi rakyatnya sendiri, ruang kedaulatan perlahan mulai mengalami penyempitan.

Pengaruh semacam ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Tidak ada pasukan asing yang berpatroli di jalan-jalan. Tidak ada kantor pemerintahan yang dipimpin oleh pejabat dari negara lain. Tidak ada pengumuman bahwa sebuah kebijakan nasional harus memperoleh persetujuan dari pihak luar. Justru karena tidak terlihat itulah pengaruh tersebut menjadi jauh lebih sulit dikenali.

Sebagian pengaruh bekerja melalui ide-ide yang berkembang secara global. Sebagian bekerja melalui standar dan ukuran keberhasilan yang diakui secara internasional. Sebagian bekerja melalui rekomendasi dan kajian ilmiah. Sebagian bekerja melalui insentif ekonomi dan akses terhadap pasar. Sebagian lagi bekerja melalui kebutuhan akan investasi, teknologi, energi, atau pembiayaan pembangunan. Lambat laun, keputusan yang diambil sebuah negara tidak lagi hanya mempertimbangkan kebutuhan internal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan dipandang oleh berbagai aktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap stabilitas ekonomi maupun negara tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa kondisi seperti ini tidak selalu lahir karena adanya niat buruk dari pihak luar. Banyak lembaga internasional, organisasi global, dan mitra pembangunan benar-benar memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat tata kelola pemerintahan, mendukung

pembangunan ekonomi, atau membantu penyelesaian berbagai persoalan global. Persoalan utamanya bukan terletak pada motif masing-masing pihak, melainkan pada kemampuan sebuah bangsa untuk tetap menjadi penentu utama arah kebijakannya sendiri.

Sebuah negara yang memiliki kedaulatan yang kuat akan mampu menyerap pengetahuan dari luar tanpa kehilangan kemampuan menentukan prioritas nasional. Negara semacam itu mampu bekerja sama tanpa kehilangan arah. Mampu menerima masukan tanpa kehilangan kemandirian. Mampu membangun hubungan internasional tanpa menyerahkan proses pengambilan keputusan strategis kepada pihak lain.

Sebaliknya, negara yang terlalu bergantung pada sumber daya eksternal akan semakin sulit membedakan antara kebutuhan nasional dan harapan pihak luar. Pada tahap tertentu, kebijakan dapat lebih banyak disusun untuk memenuhi ekspektasi eksternal dibanding menjawab kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dari luar, seluruh proses tetap tampak legal, normal, dan prosedural. Namun ruang kedaulatan yang sesungguhnya perlahan menjadi semakin sempit.

Dalam konteks pembahasan kolonialisme modern sebagai *rootkit*, *foreign influence* memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan mekanisme akses yang diperoleh melalui hubungan kepercayaan. Sebuah *rootkit* tidak selalu memasuki sistem melalui serangan yang keras. Dalam banyak kasus, akses diperoleh karena sistem membuka pintunya sendiri demi memperoleh manfaat tertentu. Setelah akses tersebut tersedia, pengaruh terhadap sistem dapat berkembang

tanpa perlu menunjukkan keberadaannya secara terbuka.

Demikian pula dalam kehidupan internasional. Pengaruh yang paling kuat sering kali tidak datang melalui pemaksaan. Pengaruh yang paling efektif justru hadir melalui hubungan yang membuat sebuah negara secara sukarela menyesuaikan diri terhadap kepentingan, standar, atau arah kebijakan yang berasal dari luar. Semakin besar ketergantungan yang terbentuk, semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penyesuaian tersebut.

Dalam sejarah hubungan internasional, banyak bangsa mengalami situasi di mana kemerdekaan formal tetap dipertahankan, tetapi ruang untuk menentukan kebijakan strategis semakin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan pada hakikatnya bukan hanya soal memiliki pemerintahan sendiri, melainkan juga soal memiliki kemampuan untuk mengatakan ya ketika sebuah kerja sama menguntungkan dan mengatakan tidak ketika kerja sama tersebut mulai menjauh dari kepentingan nasional.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hubungan internasional seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerja sama dengan dunia luar harus memperluas ruang kedaulatan, bukan mempersempitnya. Pengaruh dari luar harus menjadi sumber pembelajaran, bukan sumber ketergantungan.

Sebab tujuan akhir dari seluruh hubungan internasional bukanlah memenuhi kepentingan pihak lain, melainkan meningkatkan kemampuan bangsa untuk mengelola sumber dayanya, menentukan arah pembangunannya, dan membangun masa depannya sendiri.

Karena itu, tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas yaitu *foreign influence* bukanlah sesuatu yang selalu harus ditolak, tetapi harus dikelola dengan bijaksana. Dunia modern membutuhkan kerja sama, tetapi kerja sama tidak boleh menghilangkan kemampuan sebuah bangsa untuk menentukan prioritasnya sendiri. Sebagaimana *rootkit* memperoleh pengaruh melalui akses yang diberikan oleh sistem, pengaruh asing dapat berkembang melalui hubungan yang pada awalnya tampak biasa. Oleh sebab itu, ukuran utama kedaulatan bukan terletak pada seberapa sedikit sebuah negara berhubungan dengan dunia luar, melainkan pada seberapa besar kemampuan negara tersebut tetap menjadi pengendali utama atas arah kebijakan dan masa depannya sendiri.

13.5. *Resource Exploitation*

Persoalan yang paling mendasar bukanlah siapa yang secara formal memiliki sumber daya tersebut, melainkan siapa yang sesungguhnya menentukan bagaimana sumber daya itu dikelola dan ke mana manfaat terbesarnya mengalir. Sebab dalam kehidupan bernegara, kepemilikan yang tercantum dalam hukum belum tentu selalu identik dengan kemampuan mengendalikan hasil yang lahir dari kepemilikan itu.

Sebuah bangsa dapat memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tetapi apabila teknologi pengolahan, modal, jaringan perdagangan, dan akses terhadap pasar internasional lebih banyak berada di tangan pihak lain, maka posisi bangsa tersebut dapat berubah menjadi sekadar penyedia bahan baku bagi kepentingan ekonomi yang lebih luas. Nilai tambah yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan nasional justru berkembang di tempat lain, sementara negara pemilik sumber daya hanya menikmati sebagian kecil dari keseluruhan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Keadaan seperti ini tidak selalu lahir karena adanya niat buruk dari salah satu pihak. Dalam dunia modern, kerja sama internasional memang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Banyak proyek pengelolaan sumber daya memerlukan investasi yang sangat besar, teknologi yang rumit, serta kemampuan manajerial yang tidak selalu tersedia di setiap negara. Oleh karena itu, keterlibatan pihak luar sering menjadi bagian yang wajar dari proses pembangunan.

Namun justru karena hubungan tersebut penting, keseimbangan di dalamnya juga menjadi sangat penting. Sebuah kerja sama yang sehat seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan nasional untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan industri dalam negeri, serta perluasan nilai tambah ekonomi di tingkat nasional merupakan indikator bahwa kerja sama

tersebut benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Sebaliknya, apabila selama bertahun-tahun sebuah negara tetap berada pada posisi yang sama sebagai pemasok bahan mentah, sementara pengolahan, inovasi, dan keuntungan terbesar berkembang di luar negeri, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan model pembangunan yang dijalankan. Pada titik tertentu, kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal bagi kemajuan bangsa justru dapat berubah menjadi sumber ketergantungan yang berkepanjangan.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan sebuah sistem yang memiliki sumber daya komputasi yang sangat besar, tetapi hampir seluruh kapasitas tersebut digunakan untuk menjalankan proses milik pihak lain. Sistem tetap beroperasi. Pemilik sistem tetap ada. Akan tetapi manfaat terbesar dari kemampuan sistem tersebut lebih banyak dinikmati oleh pengguna eksternal daripada oleh pemiliknya sendiri. Secara formal tidak ada yang berubah, tetapi secara substantif orientasi penggunaan sumber daya telah bergeser.

Analogi tersebut membantu menjelaskan mengapa penguasaan sumber daya memiliki posisi yang sangat penting dalam pembahasan kolonialisme modern. Kolonialisme modern tidak selalu membutuhkan penguasaan wilayah atau penggantian pemerintahan. Selama akses terhadap sumber daya strategis dapat dipertahankan dan manfaat utamanya dapat terus mengalir ke luar, tujuan-tujuan ekonomi

yang dahulu dicapai melalui kolonialisme klasik dapat diperoleh melalui mekanisme yang jauh lebih halus dan jauh lebih sulit dikenali.

Karena itu, pembahasan mengenai *resource exploitation* tidak seharusnya dipahami sebagai penolakan terhadap investasi, perdagangan internasional, atau kerja sama ekonomi global. Dunia modern dibangun di atas hubungan yang saling membutuhkan. Tidak ada negara yang dapat berkembang sepenuhnya sendiri. Persoalan yang perlu dijaga adalah agar hubungan tersebut tetap menempatkan bangsa sebagai pengendali utama atas masa depannya sendiri.

Bangsa yang berdaulat bukanlah bangsa yang menutup diri dari dunia luar. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu bekerja sama tanpa kehilangan kemampuan menentukan arah pembangunan nasionalnya. Mampu menerima investasi tanpa kehilangan kendali atas kepentingan strategisnya. Mampu memanfaatkan teknologi global tanpa kehilangan kesempatan untuk membangun kapasitas nasional. Mampu mengelola kekayaan alamnya sehingga manfaat terbesar benar-benar kembali kepada rakyat sebagai pemilik sah sumber daya tersebut.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kekayaan alam tidak boleh dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Kekayaan alam merupakan amanah yang harus dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai sebuah

sumber daya tidak hanya diukur dari berapa besar hasil yang dapat dijual ke pasar dunia, tetapi juga dari seberapa besar sumber daya tersebut mampu memperkuat kemandirian bangsa, membuka kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan keadilan antargenerasi.

Oleh karena itu, tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas yaitu kolonialisme modern tidak selalu hadir melalui penguasaan wilayah, tetapi dapat bekerja melalui penguasaan terhadap akses dan manfaat sumber daya strategis. Negara tetap merdeka, institusi tetap berjalan, dan simbol-simbol kedaulatan tetap berdiri. Namun apabila sebagian besar nilai tambah, kendali, dan manfaat dari kekayaan nasional lebih banyak mengalir kepada pihak lain, maka ruang kedaulatan ekonomi sebuah bangsa berpotensi mengalami penyempitan. Sebab pada akhirnya, ukuran utama penguasaan sumber daya bukanlah siapa yang tercantum sebagai pemiliknya, melainkan siapa yang sesungguhnya menentukan arah pemanfaatannya dan siapa yang menikmati manfaat terbesar dari kekayaan tersebut.

13.6. *Policy Engineering*

Pada masa kolonialisme klasik, penguasaan terhadap suatu wilayah umumnya dilakukan melalui kontrol langsung atas pemerintahan. Penguasa kolonial menetapkan aturan yang berlaku, mengatur sistem ekonomi, menentukan pola perdagangan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dalam keadaan seperti

itu, hubungan antara pihak yang mengendalikan dan pihak yang dikendalikan tampak jelas karena pusat pengambilan keputusan memang berada di tangan kekuasaan kolonial.

Namun perkembangan dunia menunjukkan bahwa cara memengaruhi sebuah negara telah mengalami perubahan yang sangat besar. Penguasaan wilayah tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh pengaruh. Dalam banyak keadaan, memengaruhi arah kebijakan justru lebih efektif daripada menguasai wilayah secara langsung. Mengendalikan wilayah membutuhkan biaya yang besar, menghadapi perlawanan, dan sering menimbulkan tekanan internasional. Sebaliknya, memengaruhi kebijakan dapat menghasilkan dampak yang serupa tanpa harus memikul beban administrasi dan pengelolaan negara yang bersangkutan.

Di sinilah muncul konsep yang dalam pembahasan ini disebut sebagai *policy engineering*. Secara sederhana, *policy engineering* adalah proses memengaruhi, membentuk, atau mengarahkan kebijakan publik melalui berbagai instrumen yang secara formal tampak legal, normal, dan bahkan sering dipandang sebagai bagian dari kerja sama internasional. Istilah ini tidak selalu memiliki makna negatif. Pertukaran gagasan, pengalaman, dan pengetahuan antarnegara sering kali justru menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Persoalan mulai muncul ketika pengaruh terhadap proses penyusunan kebijakan berkembang sedemikian besar sehingga prioritas

nasional perlahan bergeser mengikuti kepentingan yang berasal dari luar.

Dalam kehidupan bernegara, kebijakan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Kebijakan menentukan arah pembangunan. Kebijakan menentukan prioritas anggaran. Kebijakan menentukan bagaimana sumber daya dikelola. Kebijakan menentukan sektor mana yang memperoleh dukungan dan sektor mana yang harus menunggu. Dengan kata lain, kebijakan merupakan instrumen yang menerjemahkan tujuan negara ke dalam tindakan nyata. Karena itu, pihak yang mampu memengaruhi kebijakan pada hakikatnya memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah perjalanan sebuah bangsa.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan perubahan konfigurasi inti sebuah sistem operasi. Pengguna mungkin tetap melihat tampilan yang sama. Nama sistem tidak berubah. Fungsi-fungsi utama tetap berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi ketika konfigurasi pada lapisan inti berubah, perilaku seluruh sistem juga ikut berubah. Sebuah perubahan kecil pada lapisan dasar dapat menghasilkan dampak yang sangat besar terhadap seluruh proses yang berlangsung di atasnya.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Satu kebijakan fiskal dapat memengaruhi pola investasi selama bertahun-tahun. Satu kebijakan perdagangan dapat mengubah struktur ekonomi nasional. Satu kebijakan energi dapat menentukan arah perkembangan industri. Satu regulasi mengenai pengelolaan sumber daya dapat memengaruhi siapa

yang memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan nasional.

Karena itu, dalam konteks kolonialisme modern, pengaruh terhadap kebijakan sering kali memiliki nilai yang lebih besar daripada penguasaan wilayah secara langsung.

Pengaruh tersebut tidak selalu hadir melalui tekanan yang terlihat. Dalam banyak kasus, ia bekerja melalui mekanisme yang tampak konstruktif. Rekomendasi kebijakan disusun oleh lembaga internasional. Kajian teknis dibuat oleh konsultan global. Program reformasi didukung oleh donor pembangunan. Bantuan teknis diberikan untuk memperkuat kapasitas institusi. Harmonisasi regulasi dilakukan untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Seluruh proses tersebut dapat membawa manfaat yang nyata dan dalam banyak situasi memang diperlukan.

Namun persoalan yang perlu dicermati bukan hanya isi dari rekomendasi tersebut, melainkan posisi sebuah negara dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Apakah negara tetap menjadi pihak yang menentukan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyatnya sendiri, ataukah negara lebih banyak berperan sebagai penerima kerangka kebijakan yang dirancang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan yang berasal dari luar.

Pertanyaan ini penting karena setiap bangsa memiliki sejarah, budaya, struktur sosial, tingkat pembangunan, dan tantangan yang berbeda. Kebijakan yang berhasil di suatu negara belum tentu berhasil di negara lain. Kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan

suatu kawasan belum tentu tepat diterapkan pada bangsa yang memiliki kondisi yang berbeda.

Ketika proses penyusunan kebijakan terlalu bergantung pada pandangan eksternal, muncul risiko bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan global daripada kebutuhan nasional. Fenomena ini biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap. Pada awalnya sebuah negara menerima bantuan teknis untuk memperbaiki tata kelola. Kemudian menerima rekomendasi untuk melakukan reformasi tertentu. Selanjutnya berbagai regulasi mulai disusun mengikuti standar yang dianggap paling tepat oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam proses tersebut. Lambat laun, arah kebijakan nasional semakin bergerak mengikuti kerangka yang dibangun dari luar.

Tidak selalu ada unsur paksaan. Tidak selalu ada ancaman. Tidak selalu ada instruksi yang disampaikan secara terbuka. Akan tetapi ruang pengambilan keputusan perlahan bergerak dalam koridor yang semakin sempit, sehingga alternatif kebijakan yang lahir dari kebutuhan nasional menjadi semakin terbatas.

Dalam konteks inilah *policy engineering* memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan konsep *rootkit* yang menjadi tema utama bab ini. Sebagaimana *rootkit* bekerja pada lapisan terdalam sistem untuk memengaruhi cara sistem beroperasi, pengaruh terhadap kebijakan bekerja pada lapisan yang menentukan arah pembangunan sebuah negara. Dari luar, seluruh simbol kemerdekaan tetap ada. Pemerintah tetap menjalankan tugasnya. Parlemen

tetap membentuk undang-undang. Lembaga negara tetap bekerja sebagaimana mestinya. Namun sebagian arah kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar ruang kedaulatan nasional.

Yang membuat fenomena ini semakin sulit dikenali adalah kenyataan bahwa banyak bentuk pengaruh kebijakan dibungkus dengan istilah-istilah yang bernilai positif. Reformasi, modernisasi, efisiensi, integrasi global, peningkatan daya saing, harmonisasi regulasi, dan berbagai konsep lainnya sering menjadi bahasa yang menyertai perubahan kebijakan. Sebagian memang membawa manfaat dan sebagian memang diperlukan. Namun di balik semua itu tetap dibutuhkan kemampuan untuk menilai secara kritis apakah arah perubahan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional.

Sebab tujuan utama negara bukanlah menjadi negara yang paling patuh terhadap berbagai standar global. Tujuan utama negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Standar internasional dapat menjadi referensi. Pengalaman negara lain dapat menjadi pelajaran. Bantuan teknis dapat menjadi instrumen pendukung. Akan tetapi keputusan akhir harus tetap berada di tangan bangsa yang bersangkutan dan didasarkan pada kepentingan nasional yang ditentukan secara berdaulat.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia, kebijakan publik harus lahir dari pertimbangan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kebijakan tidak boleh sekadar mengikuti arus perubahan global tanpa mempertimbangkan kondisi bangsa sendiri. Kebijakan harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan, memperbesar kesejahteraan, dan menjaga keadilan sosial.

Karena itu, tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas yaitu kolonialisme modern tidak selalu memerlukan penguasaan wilayah untuk memperoleh pengaruh. Dalam banyak keadaan, memengaruhi arah kebijakan jauh lebih efektif daripada mengendalikan pemerintahan secara langsung. Ketika ruang penyusunan kebijakan semakin bergantung pada kepentingan, standar, atau kerangka yang berasal dari luar, kedaulatan formal dapat tetap bertahan, tetapi kedaulatan substantif perlahan mengalami penyempitan. Sebagaimana *rootkit* bekerja pada lapisan terdalam sistem tanpa mengubah tampilan luarnya, *policy engineering* dapat memengaruhi arah perjalanan sebuah bangsa tanpa mengubah simbol-simbol kemerdekaan yang tampak di permukaan.

13.7. Ketika Negara Tetap Merdeka Secara Formal

Salah satu tantangan terbesar dalam memahami kolonialisme modern adalah kenyataan bahwa tanda-tanda yang dahulu digunakan untuk mengenali penjajahan tidak lagi selalu tampak di permukaan. Pada masa kolonialisme klasik, batas antara negara merdeka dan wilayah jajahan relatif mudah dikenali. Pemerintahan berada di bawah kendali kekuatan asing.

Simbol-simbol nasional digantikan oleh simbol kekuasaan kolonial. Kebijakan ditentukan dari luar. Sumber daya dikelola untuk kepentingan penjajah. Dalam situasi seperti itu, masyarakat dapat dengan mudah menyadari bahwa kedaulatan telah dirampas.

Dunia modern menghadirkan gambaran yang berbeda. Hampir seluruh negara saat ini berdiri sebagai negara yang diakui secara internasional. Setiap negara memiliki bendera, konstitusi, pemerintahan, parlemen, lembaga peradilan, dan berbagai institusi yang menandai keberadaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Indonesia memiliki Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kementerian, tentara nasional, serta seluruh perangkat kenegaraan yang menjadi ciri sebuah negara merdeka. Dari sudut pandang formal, tidak ada keraguan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat.

Namun pembahasan mengenai kedaulatan tidak berhenti pada keberadaan simbol dan institusi. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan nyata untuk menentukan arah pembangunan, menetapkan prioritas nasional, mengelola sumber daya strategis, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bangsa sendiri. Di sinilah muncul perbedaan antara kemerdekaan formal dan kedaulatan substantif.

Kemerdekaan formal berkaitan dengan pengakuan hukum dan eksistensi negara sebagai subjek dalam pergaulan internasional. Sebuah negara memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari

negara lain. Semua unsur tersebut memenuhi syarat sebagai negara merdeka.

Namun kedaulatan substantif berbicara mengenai sesuatu yang lebih dalam. Kedaulatan substantif bertanya apakah negara benar-benar menjadi pengendali utama atas masa depannya sendiri. Apakah negara memiliki ruang yang cukup untuk menentukan kebijakan ekonominya. Apakah negara mampu mengelola sumber dayanya sesuai kepentingan rakyat. Apakah negara dapat menyusun prioritas pembangunan tanpa terlalu dibatasi oleh berbagai ketergantungan yang terbentuk dari luar.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui sebuah analogi sederhana. Seseorang dapat menjadi pemilik sah sebuah rumah berdasarkan sertifikat yang diakui secara hukum. Namanya tercantum dalam seluruh dokumen resmi. Tidak ada pihak yang membantah hak kepemilikannya. Akan tetapi jika hampir seluruh keputusan mengenai penggunaan rumah harus mempertimbangkan kehendak pihak lain, jika renovasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lain, atau jika pemanfaatan ruang harus mengikuti kepentingan pihak lain, maka muncul pertanyaan mengenai seberapa besar kendali yang sesungguhnya dimiliki oleh pemilik rumah tersebut. Kepemilikan formal tetap ada, tetapi kemampuan mengendalikan secara substantif menjadi terbatas.

Hal yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara dapat memiliki pemerintahan sendiri, tetapi menghadapi keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan ekonominya.

Sebuah negara dapat memiliki parlemen sendiri, tetapi ruang fiskalnya sangat dipengaruhi oleh kewajiban-kewajiban yang telah terbentuk sebelumnya.

Sebuah negara dapat memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sebagian besar nilai tambah dari sumber daya tersebut lebih banyak dinikmati di luar negeri.

Sebuah negara dapat memiliki kebebasan, tetapi menghadapi tekanan yang kuat ketika hendak mengambil keputusan strategis tertentu.

Dalam keadaan seperti itu, kemerdekaan formal tetap terjaga, tetapi kualitas kedaulatan substantif menjadi persoalan yang layak dipikirkan secara serius.

Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa setiap hubungan internasional mengurangi kedaulatan. Dunia modern memang dibangun di atas jaringan kerja sama yang saling menghubungkan berbagai bangsa. Perdagangan internasional, investasi, transfer teknologi, kerja sama pendidikan, hubungan diplomatik, dan berbagai bentuk interaksi global merupakan bagian dari realitas yang tidak dapat dihindari. Bahkan banyak keberhasilan pembangunan lahir dari kerja sama yang sehat dan saling menguntungkan.

Persoalannya bukan terletak pada adanya hubungan tersebut, melainkan pada keseimbangannya. Kerja sama memperkuat kedaulatan apabila negara tetap menjadi pihak yang menentukan arah. Kerja sama mulai menjadi persoalan ketika kemampuan menentukan arah itu semakin menyempit. Kerja sama menjadi sumber kemajuan apabila bangsa tetap menjadi

subjek utama pembangunan. Kerja sama berpotensi menjadi sumber ketergantungan apabila bangsa lebih banyak menjadi objek dari agenda yang dirumuskan oleh pihak lain. Karena itu, ukuran kedaulatan tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan institusi negara. Ukuran kedaulatan juga harus dilihat dari kemampuan negara menggunakan seluruh institusinya untuk mewujudkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks pembahasan sebelumnya mengenai *debt dependency*, *foreign influence*, *resource exploitation*, dan *policy engineering*, terlihat bahwa pengaruh terhadap sebuah negara tidak selalu membutuhkan penguasaan langsung atas wilayahnya. Ketika ruang fiskal dipengaruhi oleh ketergantungan pembiayaan, ketika kebijakan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, ketika sumber daya strategis lebih banyak melayani kepentingan di luar negeri, atau ketika prioritas pembangunan bergerak mengikuti kebutuhan pihak lain, maka ruang pengambilan keputusan nasional perlahan mengalami penyempitan.

Yang menarik, seluruh proses tersebut dapat berlangsung tanpa mengubah satu pun simbol kemerdekaan. Bendera tetap berkibar. Lagu kebangsaan tetap dinyanyikan. Pemilu tetap diselenggarakan. Parlemen tetap bersidang. Pemerintah tetap menjalankan fungsi pemerintahan. Tidak ada tentara asing yang berpatroli di jalan-jalan. Tidak ada gubernur jenderal yang memimpin pemerintahan. Tidak ada deklarasi resmi yang menyatakan bahwa kemerdekaan

telah berakhir. Dari luar, negara tetap tampak sepenuhnya merdeka.

Justru karena itulah fenomena ini sering kali sulit dikenali. Selama ini masyarakat cenderung mengukur kemerdekaan melalui simbol-simbol yang tampak. Padahal dalam kehidupan modern, kedaulatan lebih sering diuji pada kemampuan mengambil keputusan daripada pada keberadaan simbol kenegaraan itu sendiri.

Dalam analogi teknologi yang menjadi benang merah buku ini, keadaan tersebut menyerupai sebuah sistem komputer yang tetap berjalan normal di permukaan. Pengguna masih dapat masuk ke sistem. Tampilan tidak berubah. Seluruh fungsi utama masih dapat digunakan. Akan tetapi pada lapisan yang lebih dalam, sebagian mekanisme yang menentukan arah kerja sistem telah dipengaruhi oleh pihak lain. Dari luar tidak terlihat adanya gangguan, tetapi ruang kendali yang sesungguhnya telah mengalami perubahan.

Di sinilah konsep *rootkit* menjadi relevan. Sebuah *rootkit* tidak perlu mengganti nama sistem operasi agar dapat memengaruhi perilaku sistem. Tidak perlu menghapus tampilan utama. Tidak perlu membuat sistem berhenti bekerja. Yang dibutuhkan hanyalah akses pada lapisan terdalam yang menentukan bagaimana sistem mengambil keputusan.

Demikian pula kolonialisme modern. Ia tidak selalu hadir dengan pendudukan wilayah atau pengibaran bendera asing. Ia dapat bekerja melalui ketergantungan ekonomi, pengaruh terhadap kebijakan, penguasaan sumber daya strategis, atau

berbagai mekanisme lain yang perlahan membatasi ruang gerak sebuah bangsa. Negara tetap tampak sebagai pemilik sah atas dirinya sendiri, tetapi sebagian kemampuan menentukan arah masa depannya mulai bergerak di luar kendali nasional.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai bebas dari pendudukan fisik. Kemerdekaan juga berarti kemampuan bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri. Persatuan membutuhkan kemandirian dalam mengambil keputusan nasional. Keadilan sosial membutuhkan kemampuan mengelola sumber daya dan pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena itu, tesis subbab ini dapat ditegaskan dengan jelas yaitu kemerdekaan formal tidak selalu identik dengan kedaulatan substantif. Sebuah negara dapat tetap berdiri sebagai negara merdeka dengan seluruh simbol dan institusinya, tetapi ruang pengambilan keputusan strategisnya perlahan menyempit akibat berbagai bentuk ketergantungan yang berkembang secara sistemik. Dalam kondisi seperti itu, tantangan terbesar sebuah bangsa bukan lagi mempertahankan simbol kemerdekaan, melainkan memastikan bahwa kemampuan menentukan arah masa depan tetap berada di tangan bangsa itu sendiri.

13.8. *Root Access* yang Dipinjamkan

Dalam pembahasan mengenai sistem komputer, terdapat sebuah prinsip yang sangat sederhana tetapi memiliki konsekuensi yang sangat besar. Semakin tinggi tingkat akses yang diberikan kepada pihak lain, semakin besar pula kemampuan pihak tersebut memengaruhi cara kerja sistem secara keseluruhan. Pengguna biasa hanya dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan hak yang dimiliki. *Administrator* memiliki kewenangan yang lebih luas. Sedangkan pemegang *root access* memiliki kemampuan untuk mengubah konfigurasi inti, menentukan aturan sistem, mengatur hak akses pengguna lain, bahkan memengaruhi bagaimana seluruh sistem beroperasi.

Karena itu, dalam dunia teknologi, *root access* merupakan sesuatu yang sangat berharga. Akses tersebut tidak diberikan secara sembarangan karena menyangkut kendali atas keseluruhan sistem. Ketika akses tersebut jatuh ke tangan yang salah, risiko yang muncul bukan hanya gangguan pada satu aplikasi atau satu layanan tertentu, melainkan gangguan terhadap fondasi sistem itu sendiri.

Analogi ini dapat digunakan untuk memahami salah satu persoalan penting dalam kehidupan bernegara, yaitu bagaimana ketergantungan yang berlebihan dapat membuat sebagian ruang kedaulatan secara perlahan berpindah dari tangan bangsa sendiri kepada pihak lain. Tidak melalui penyerahan resmi. Tidak melalui deklarasi. Tidak melalui pendudukan wilayah. Melainkan melalui proses yang berlangsung bertahap dan sering kali dianggap normal dalam kehidupan modern.

Pada subbab-subbab sebelumnya telah dibahas mengenai ketergantungan utang, pengaruh asing, eksploitasi sumber daya, dan rekayasa kebijakan. Masing-masing tampak sebagai persoalan yang berbeda. Namun apabila diperhatikan lebih dalam, seluruhnya memiliki satu pola yang sama. Pola tersebut adalah berpindahnya sebagian kemampuan menentukan arah keputusan dari dalam sistem menuju pihak yang berada di luar sistem.

Pada awalnya proses tersebut sering tampak masuk akal. Negara membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan. Negara membutuhkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Negara membutuhkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negara membutuhkan kerja sama internasional untuk menghadapi tantangan global. Semua kebutuhan tersebut nyata adanya. Tidak ada negara modern yang dapat berkembang tanpa membangun hubungan dengan dunia luar. Bahkan banyak kemajuan bangsa lahir melalui kemampuan memanfaatkan kerja sama internasional secara cerdas dan produktif.

Persoalannya bukan pada kerja sama itu sendiri. Persoalannya muncul ketika kerja sama berkembang menjadi ketergantungan. Persoalannya muncul ketika alat berubah menjadi kebutuhan yang tidak dapat digantikan. Persoalannya muncul ketika kemampuan mengambil keputusan mulai dipengaruhi oleh kebutuhan mempertahankan hubungan tertentu. Dalam kondisi seperti itu, sebagian ruang kendali mulai bergerak keluar dari sistem nasional. Pergerakan

tersebut tidak selalu terlihat. Tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa kedaulatan telah diserahkan. Tidak ada pasal konstitusi yang menyebutkan bahwa keputusan nasional harus mengikuti kehendak pihak luar. Tidak ada pengumuman resmi bahwa bangsa kehilangan kemerdekaannya. Namun pada tingkat praktis, semakin banyak keputusan yang harus mempertimbangkan kepentingan eksternal sebelum dapat dilaksanakan.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini menyerupai pemilik sistem yang secara sukarela memberikan sebagian akses *administrator* kepada pihak lain demi kemudahan operasional. Pada tahap awal, keputusan tersebut mungkin memberikan manfaat. Sistem menjadi lebih mudah dikelola. Dukungan teknis menjadi lebih cepat. Berbagai kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih efisien. Namun apabila akses yang diberikan terus bertambah tanpa diimbangi dengan kemampuan mandiri, maka pada suatu titik pemilik sistem mulai kesulitan menjalankan sistem tanpa keterlibatan pihak yang menerima akses tersebut.

Pemilik tetap tercatat sebagai pemilik, nama sistem tetap tidak berubah, dan tampilan sistem tetap sama, namun kemampuan untuk mengendalikan sistem secara mandiri mulai berkurang. Fenomena yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara, ketika sebuah negara tetap memiliki konstitusi, tetap memiliki presiden, tetap memiliki parlemen, dan tetap memiliki berbagai lembaga negara, tetapi secara perlahan kehilangan kemampuan untuk menentukan dan mengendalikan arah pemerintahannya secara mandiri.

Namun ruang gerak dalam menentukan kebijakan ekonomi, arah pembangunan, pengelolaan sumber daya, atau strategi nasional menjadi semakin terbatas karena berbagai ketergantungan yang telah terbentuk sebelumnya.

Keadaan seperti ini sering berkembang secara perlahan sehingga sulit dikenali. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang menandai terjadinya perubahan. Tidak ada satu keputusan yang secara langsung menghapus kedaulatan. Yang terjadi adalah akumulasi dari berbagai keputusan kecil yang masing-masing tampak rasional pada zamannya.

Satu pinjaman dianggap perlu, satu konsesi dianggap menguntungkan, satu ketergantungan teknologi dianggap efisien, satu rekomendasi kebijakan dianggap modern, dan satu bentuk harmonisasi regulasi dianggap progresif.

Masing-masing keputusan mungkin memiliki alasan yang masuk akal. Namun ketika seluruh keputusan tersebut membentuk pola yang sama, hasil akhirnya dapat berupa berkurangnya kemampuan negara untuk menentukan arah masa depannya secara mandiri.

Inilah sebabnya mengapa kolonialisme modern sering kali lebih sulit dikenali dibanding kolonialisme klasik. Pada masa lalu, penjajah datang dari luar dan mengambil alih secara terbuka. Saat ini, pengaruh sering masuk melalui hubungan yang tampak normal, legal, dan bahkan saling menguntungkan. Perubahan tidak terjadi melalui perebutan kekuasaan secara langsung, melainkan melalui pembentukan

ketergantungan yang membuat sistem nasional semakin sulit berdiri dengan kekuatannya sendiri.

Dalam konteks inilah istilah *root access* yang dipinjamkan menjadi relevan. Tidak ada penyerahan kepemilikan, tidak ada perubahan simbol negara, dan tidak ada penghapusan institusi nasional. Yang terjadi adalah pemberian akses yang semakin luas kepada pihak-pihak yang berada di luar ruang kedaulatan nasional, sehingga sebagian keputusan strategis harus mempertimbangkan kepentingan mereka. Semakin besar akses tersebut, semakin besar pula pengaruh yang dapat diberikan, dan semakin besar pengaruh tersebut, semakin kecil ruang yang tersedia untuk mengambil keputusan secara sepenuhnya mandiri.

Hal ini tidak berarti bahwa setiap bentuk kerja sama harus dicurigai. Sebaliknya, bangsa yang menutup diri dari dunia luar justru berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang. Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Kerja sama harus memperkuat kapasitas nasional, bukan menggantikannya. Bantuan harus menjadi sarana belajar, bukan menciptakan ketergantungan permanen. Investasi harus memperbesar kemampuan bangsa mengelola kekayaannya sendiri, bukan menjadikan bangsa sekadar penyedia sumber daya.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kedaulatan merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan bukan

sekadar simbol, melainkan kemampuan nyata untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional. Ketika kemampuan tersebut berkurang akibat ketergantungan yang berlebihan, maka tantangan yang dihadapi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan mengenai masa depan bangsa itu sendiri.

13.9. Koloni Tanpa Kolonial

Ketika mendengar kata koloni, sebagian besar orang membayangkan sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Dalam gambaran klasik, terdapat pusat kekuasaan yang mengendalikan wilayah jajahan melalui pemerintahan kolonial. Bendera asing berkibar di atas kantor-kantor pemerintahan. Kebijakan ditentukan dari luar. Sumber daya mengalir menuju pusat kekuasaan. Penduduk setempat memiliki ruang yang terbatas untuk menentukan nasibnya sendiri. Gambaran seperti itu sangat melekat dalam sejarah kolonialisme yang dialami banyak bangsa, termasuk Indonesia.

Namun perkembangan dunia menunjukkan bahwa hubungan dominasi tidak selalu membutuhkan bentuk kolonial yang demikian. Seiring berubahnya tata hubungan internasional, semakin banyak negara memperoleh kemerdekaan formal dan pengakuan sebagai negara berdaulat. Pemerintahan kolonial dibubarkan. Administrasi kolonial berakhir. Pendudukan wilayah tidak lagi menjadi cara yang lazim untuk memperoleh pengaruh. Akan tetapi berakhirnya kolonialisme formal tidak otomatis menghapus seluruh

kemungkinan lahirnya hubungan yang menghasilkan ketergantungan dan dominasi.

Di sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai koloni tanpa kolonial. Istilah ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa suatu negara secara resmi menjadi jajahan negara lain. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika berbagai ciri dominasi tetap hadir, tetapi simbol-simbol kolonialisme sudah tidak terlihat lagi. Negara tetap memiliki pemerintahan sendiri. Negara tetap memiliki konstitusi sendiri. Negara tetap memiliki parlemen, lembaga peradilan, dan seluruh atribut kenegaraan yang lazim ditemukan dalam negara merdeka. Namun dalam praktiknya, sebagian keputusan strategis yang menentukan masa depan bangsa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali nasional.

Fenomena ini menjadi menarik karena sangat berbeda dengan pola kolonialisme klasik. Pada masa lalu, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Saat ini, hubungan tersebut menjadi jauh lebih rumit. Pengaruh sering hadir melalui mekanisme ekonomi, teknologi, pembiayaan, perdagangan, investasi, regulasi, dan berbagai bentuk ketergantungan yang berkembang secara perlahan. Akibatnya, garis pemisah antara kerja sama dan dominasi menjadi semakin sulit dikenali.

Dalam dunia teknologi, keadaan ini dapat dianalogikan dengan sebuah sistem yang seluruh tampilannya menunjukkan bahwa sistem tersebut berada di bawah kendali pemiliknya. Nama pengguna tidak berubah. Tampilan antarmuka tetap sama. Seluruh

fungsi utama masih berjalan. Namun berbagai konfigurasi penting yang menentukan arah sistem ternyata dipengaruhi oleh pihak lain yang berada di belakang layar. Dari luar, sistem tampak sepenuhnya mandiri. Pada lapisan yang lebih dalam, sebagian kemampuan menentukan arah sudah tidak sepenuhnya berada di tangan pemilik sistem.

Analogi tersebut membantu menjelaskan bagaimana sebuah negara dapat tetap merdeka secara formal tetapi menghadapi keterbatasan yang besar dalam menjalankan kedaulatan secara substantif.

Keadaan seperti ini tidak selalu muncul karena tekanan yang bersifat langsung. Dalam banyak kasus, dominasi justru berkembang melalui hubungan yang tampak menguntungkan. Negara memperoleh investasi yang dibutuhkan. Negara memperoleh akses pembiayaan. Negara memperoleh teknologi yang sebelumnya tidak dimiliki. Negara memperoleh pasar bagi produk-produknya. Seluruh hubungan tersebut pada awalnya memberikan manfaat yang nyata. Namun apabila hubungan tersebut berkembang menjadi ketergantungan yang terlalu besar, maka posisi tawar negara perlahan mulai berubah.

Pada tahap awal, negara masih bebas menentukan arah kebijakan. Pada tahap berikutnya, negara mulai mempertimbangkan reaksi pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi nasional. Pada tahap yang lebih lanjut, sebagian keputusan strategis harus disesuaikan dengan kepentingan yang berada di luar ruang kedaulatan nasional. Tidak ada instruksi terbuka. Tidak ada

ultimatum resmi. Tidak ada deklarasi bahwa kedaulatan telah berkurang. Namun ruang gerak negara menjadi semakin sempit.

Fenomena inilah yang membuat kolonialisme modern sering lebih sulit dikenali dibanding kolonialisme klasik. Pada masa lalu, dominasi hadir dalam bentuk yang keras dan terlihat. Saat ini, dominasi sering hadir dalam bentuk yang lunak dan tidak terlihat. Pengaruh bekerja melalui mekanisme yang tampak normal sehingga masyarakat tidak selalu menyadari perubahan yang sedang berlangsung.

Dalam sejarah ekonomi dunia, banyak negara berkembang menghadapi tantangan semacam ini. Sebagian memiliki sumber daya alam yang sangat besar tetapi tidak memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengelolanya. Sebagian memiliki pasar yang luas tetapi sangat bergantung pada modal dari luar. Sebagian memiliki potensi ekonomi yang besar tetapi menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan. Akibatnya, hubungan dengan pihak eksternal menjadi semakin penting. Hubungan tersebut dapat menghasilkan kemajuan apabila dikelola secara seimbang, tetapi juga dapat menghasilkan ketergantungan apabila tidak disertai penguatan kapasitas nasional.

Karena itu, pembahasan mengenai koloni tanpa kolonial tidak seharusnya dipahami sebagai tuduhan terhadap seluruh bentuk hubungan internasional. Dunia modern memang dibangun di atas interaksi antarbangsa. Tidak ada negara yang dapat berkembang tanpa kerja sama. Yang menjadi persoalan adalah ketika

kerja sama tidak lagi memperkuat kemampuan nasional, melainkan justru memperdalam ketergantungan nasional.

Perbedaan antara keduanya sangat penting. Kerja sama yang sehat memperbesar kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ketergantungan yang berlebihan membuat bangsa semakin sulit berdiri tanpa dukungan pihak lain. Kerja sama yang sehat memperluas ruang kedaulatan. Ketergantungan yang berlebihan mempersempit ruang kedaulatan. Kerja sama yang sehat menghasilkan transfer kemampuan. Ketergantungan yang berlebihan menghasilkan kebutuhan yang terus-menerus.

Dalam konteks inilah istilah koloni tanpa kolonial memperoleh maknanya. Kolonialisme tidak lagi membutuhkan *administrator* kolonial. Tidak lagi membutuhkan tentara pendudukan. Tidak lagi membutuhkan pengambilalihan pemerintahan secara langsung. Pengaruh dapat tetap bekerja selama terdapat mekanisme yang memungkinkan keputusan strategis suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan yang berada di luar negara tersebut.

Pada titik tertentu, masyarakat bahkan dapat merasa bahwa seluruh keputusan yang diambil merupakan keputusan nasional, padahal ruang pilihan yang tersedia telah dibentuk oleh berbagai faktor yang berasal dari luar. Pilihan memang tetap ada, tetapi koridor tempat pilihan tersebut dibuat menjadi semakin sempit. Kemerdekaan tetap ada, tetapi kemampuan menggunakan kemerdekaan tersebut secara penuh mengalami keterbatasan.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, keadaan semacam ini menjadi tantangan yang sangat serius. Persatuan membutuhkan kemampuan bangsa menentukan arah bersama tanpa bergantung secara berlebihan pada kepentingan eksternal. Keadilan sosial membutuhkan kemampuan mengelola kekayaan nasional untuk kemakmuran rakyat sendiri. Ketika ruang pengambilan keputusan semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kepentingan nasional, maka tujuan tersebut menjadi semakin sulit diwujudkan.

13.10. *Rootkit* Global dan Negara Berkedaulatan

Setelah menelusuri pembahasan mengenai ketergantungan utang, pengaruh asing, eksploitasi sumber daya, rekayasa kebijakan, hingga fenomena koloni tanpa kolonial, muncul satu gambaran yang semakin jelas. Tantangan terhadap kedaulatan pada abad ke-21 tidak lagi selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Ancaman tidak selalu datang melalui invasi militer. Pengaruh tidak selalu diwujudkan melalui pendudukan wilayah. Dominasi tidak selalu terlihat melalui simbol-simbol kekuasaan asing yang berdiri di atas tanah nasional. Sebaliknya, pengaruh sering bekerja melalui jaringan yang jauh lebih kompleks, lebih halus, dan lebih sulit dikenali dibanding bentuk kolonialisme yang dikenal dalam sejarah klasik.

Dalam dunia teknologi, kondisi semacam itu memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan cara kerja *rootkit*. Sebuah *rootkit* tidak perlu menghancurkan sistem untuk memperoleh kendali. Tidak perlu mengubah nama sistem. Tidak perlu menghapus identitas pemilik. Yang dibutuhkan hanyalah kemampuan memengaruhi lapisan-lapisan yang menentukan bagaimana sistem bekerja. Dari luar, sistem tetap terlihat normal. Dari luar, pengguna tetap merasa sebagai pemilik. Namun pada lapisan yang lebih dalam, sebagian arah dan perilaku sistem mulai dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik.

Analogi tersebut membantu menjelaskan mengapa kolonialisme modern sering disebut sebagai bentuk dominasi yang tidak kasat mata. Negara tetap memiliki seluruh atribut kemerdekaan. Pemerintah tetap dipilih melalui mekanisme yang sah. Parlemen tetap menjalankan fungsi legislasi. Pengadilan tetap mengadili perkara. Bendera nasional tetap berkibar. Lagu kebangsaan tetap dinyanyikan. Seluruh simbol kenegaraan tetap utuh. Namun pertanyaan yang sesungguhnya tidak terletak pada simbol.

Istilah *rootkit* global dalam buku ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan jaringan pengaruh internasional yang mampu bekerja pada lapisan-lapisan strategis sebuah negara tanpa harus menguasai negara tersebut secara formal. Jaringan tersebut tidak selalu berbentuk satu negara tertentu. Tidak selalu berbentuk satu organisasi tertentu. Tidak selalu memiliki pusat komando yang tunggal.

Sebaliknya, pengaruh dapat muncul dari kombinasi berbagai kekuatan ekonomi, keuangan, teknologi, perdagangan, investasi, regulasi, lembaga internasional, korporasi global, hingga struktur pasar yang membentuk hubungan ketergantungan dalam skala global.

Karena itu, pembahasan mengenai *rootkit* global tidak boleh dipahami sebagai teori konspirasi yang menyederhanakan seluruh persoalan dunia menjadi satu pelaku tunggal. Realitas jauh lebih kompleks daripada itu. Dunia modern merupakan jaringan hubungan yang sangat rumit, melibatkan ribuan aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Namun kompleksitas tersebut tidak menghilangkan satu kenyataan penting, yaitu bahwa tidak semua negara memiliki tingkat pengaruh yang sama dalam sistem global.

Sebagian negara lebih banyak menentukan aturan. Sebagian negara lebih banyak mengikuti aturan. Sebagian negara lebih banyak memengaruhi arus modal. Sebagian negara lebih banyak bergantung pada arus modal. Sebagian negara mengendalikan teknologi strategis. Sebagian negara menjadi pengguna teknologi yang dikendalikan pihak lain.

Perbedaan posisi tersebut menghasilkan tingkat kemandirian yang berbeda dalam menjalankan kedaulatan. Dalam konteks inilah arti penting negara berkedaulatan menjadi semakin jelas. Negara berkedaulatan bukanlah negara yang menutup diri dari dunia. Negara berkedaulatan bukanlah negara yang menolak seluruh bentuk kerja sama internasional.

Negara berkedaulatan juga bukan negara yang hidup dalam isolasi ekonomi.

Sebaliknya, negara berkedaulatan adalah negara yang mampu berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan kemampuan menentukan arah kehidupannya sendiri. Negara berkedaulatan mampu bekerja sama tanpa menjadi tergantung. Mampu menerima investasi tanpa kehilangan kendali atas sumber daya strategis. Mampu memanfaatkan teknologi global tanpa kehilangan kemampuan membangun kapasitas nasional. Mampu menjalin hubungan internasional tanpa menyerahkan prioritas pembangunan kepada kepentingan pihak lain.

Perbedaan tersebut sangat penting karena dunia modern tidak menyediakan pilihan antara keterhubungan dan keterasingan. Hampir seluruh negara harus berinteraksi dalam sistem global. Yang menjadi persoalan bukan apakah hubungan tersebut ada atau tidak ada, melainkan bagaimana hubungan tersebut dikelola.

Sebuah negara dapat terhubung dengan dunia dan tetap berdaulat. Sebuah negara juga dapat sangat terhubung dengan dunia tetapi kehilangan sebagian ruang kedaulatannya. Yang membedakan keduanya adalah kapasitas nasional dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Di sinilah hubungan antara BAB 11, BAB 12, dan BAB 13 menjadi semakin utuh. BAB 11 membahas oligarki sebagai *malware* yang bekerja dari dalam sistem negara. Pengaruh ekonomi, media, dan regulasi dapat mengubah perilaku sistem tanpa harus mengubah

struktur formalnya. BAB 12 membahas demokrasi transaksional sebagai *spyware* yang mempelajari, memengaruhi, dan membentuk perilaku masyarakat melalui manipulasi opini, ilusi survei, rekayasa perilaku, dan persetujuan semu. BAB 13 membahas kolonialisme modern sebagai *rootkit* yang bekerja pada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu hubungan global yang memengaruhi ruang gerak negara melalui ketergantungan finansial, pengaruh kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan berbagai bentuk ketergantungan strategis lainnya. Ketiganya memiliki pola yang serupa. Tidak selalu terlihat. Tidak selalu bekerja secara terbuka. Tidak selalu menggunakan paksaan. Namun mampu memengaruhi arah sistem secara keseluruhan.

Karena itu, persoalan kedaulatan pada abad ke-21 tidak lagi cukup dipahami sebagai persoalan mempertahankan wilayah dari ancaman militer. Kedaulatan juga harus dipahami sebagai kemampuan menjaga ruang pengambilan keputusan dari berbagai bentuk pengaruh yang bekerja secara halus tetapi mendalam.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia, sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kedaulatan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar keberadaan negara. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Kedaulatan adalah kemampuan

rakyat untuk menjadi sumber keputusan tertinggi. Kedaulatan adalah kemampuan mengelola kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanpa kedaulatan yang substantif, kemerdekaan berisiko menjadi simbol yang kehilangan sebagian maknanya. Tanpa kemampuan mengendalikan arah pembangunan, kemerdekaan berisiko berhenti pada tingkat formalitas. Tanpa kemampuan menjaga ruang keputusan nasional, bangsa dapat tetap merdeka secara hukum tetapi menghadapi keterbatasan yang besar dalam menentukan masa depannya sendiri.

BAB 14
KETIKA NEGARA TERINFEKSI

14.1. Dari Sistem yang Melayani Menjadi Sistem yang Membebani

Pada saat sebuah bangsa membentuk negara, tujuan yang ingin dicapai sesungguhnya sangat sederhana. Negara dibentuk agar kehidupan bersama dapat berjalan lebih baik daripada ketika setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Negara hadir untuk menjaga keamanan, menciptakan keadilan, mengatur kepentingan bersama, melindungi hak-hak warga, serta memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki bangsa dapat dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dengan kata lain, negara sejak awal dirancang sebagai alat pelayanan. Negara bukan tujuan akhir. Negara adalah sarana. Negara bukan pemilik rakyat. Negara

adalah instrumen yang dibentuk oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat.

Prinsip tersebut merupakan fondasi yang sangat penting dalam memahami seluruh pembahasan buku ini. Sebab sejak bagian awal telah dijelaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintah hanyalah pelaksana amanah. Konstitusi hanyalah aturan yang mengatur bagaimana amanah tersebut dijalankan. Seluruh lembaga negara, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga berbagai institusi pendukung lainnya, seharusnya bekerja dalam satu arah yang sama, yaitu melayani rakyat sebagai pemilik sah negara.

Dalam analogi teknologi yang digunakan dalam buku ini, hubungan tersebut dapat dibandingkan dengan hubungan antara pengguna dan sistem komputer. Sebuah komputer dibeli untuk membantu pekerjaan pengguna. Sistem operasi dipasang agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Perangkat lunak dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas.

Tidak ada pengguna yang membeli komputer dengan tujuan melayani komputer tersebut. Tidak ada perusahaan yang memasang sistem informasi agar seluruh pegawai menghabiskan waktunya hanya untuk memenuhi kebutuhan sistem. Sistem dibangun untuk membantu manusia mencapai tujuan yang diinginkan.

Negara seharusnya bekerja dengan logika yang sama: hukum dibuat untuk memberikan kepastian kepada rakyat, birokrasi dibentuk untuk mempermudah pelayanan, pajak dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan publik, aparatur negara dibentuk

untuk melindungi masyarakat, dan kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh komponen tersebut pada dasarnya merupakan alat yang dirancang untuk membantu kehidupan bersama menjadi lebih baik.

Namun sebagaimana sebuah sistem teknologi dapat mengalami gangguan, negara juga dapat mengalami penyimpangan dari tujuan awal pembentukannya. Penyimpangan tersebut jarang muncul secara tiba-tiba. Tidak ada satu hari tertentu ketika negara mendadak berubah dari pelayan menjadi beban. Perubahan biasanya berlangsung perlahan, melalui akumulasi berbagai kebijakan, prosedur, kepentingan, dan praktik yang berkembang selama bertahun-tahun. Karena berlangsung secara bertahap, masyarakat sering kali tidak langsung menyadari bahwa orientasi sistem sedang bergeser.

Pada awalnya mungkin hanya muncul satu prosedur tambahan yang dianggap perlu demi meningkatkan pengawasan. Kemudian muncul formulir tambahan yang dianggap penting untuk administrasi. Setelah itu lahir berbagai regulasi baru yang dianggap diperlukan untuk mengatur berbagai persoalan yang semakin kompleks. Satu demi satu perubahan tersebut tampak wajar jika dilihat secara terpisah. Namun ketika seluruh perubahan tersebut bertumpuk tanpa evaluasi yang memadai, sistem yang semula sederhana perlahan berubah menjadi semakin rumit.

Masyarakat mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus dokumen, pelaku usaha mulai

mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memenuhi kewajiban administratif, dan warga negara mulai menghadapi berbagai prosedur yang panjang untuk memperoleh layanan yang sebenarnya merupakan hak mereka.

Energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraan justru habis untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem. Pada titik inilah muncul gejala bahwa negara mulai bergerak menjauh dari fungsi pelayanannya.

Dalam keadaan yang sehat, negara seharusnya mengurangi beban rakyat, mempermudah aktivitas ekonomi, dan memastikan rakyat merasakan manfaat dari keberadaan negara. Sebaliknya, dalam keadaan yang tidak sehat, negara justru menambah beban rakyat, menciptakan berbagai hambatan yang mengurangi produktivitas, serta membuat rakyat lebih sering merasakan biaya daripada manfaat dari keberadaan negara.

Perubahan orientasi seperti ini sering kali tidak disebabkan oleh satu individu atau satu kelompok tertentu. Persoalannya lebih dalam daripada sekadar perilaku personal. Persoalannya berada pada desain sistem yang perlahan mulai bekerja untuk kepentingannya sendiri. Sistem yang sehat selalu menempatkan tujuan pembentukannya sebagai prioritas utama. Sebaliknya, sistem yang mulai rusak cenderung mempertahankan keberadaannya sendiri meskipun keberadaan tersebut tidak lagi menghasilkan manfaat yang sebanding bagi pemiliknya.

Fenomena semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai organisasi besar. Sebuah organisasi yang awalnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu kadang berkembang menjadi organisasi yang lebih sibuk mempertahankan struktur internal daripada menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pembentukannya. Anggaran terus bertambah. Unit kerja terus berkembang. Regulasi terus diperluas. Namun manfaat yang diterima pihak yang seharusnya dilayani tidak selalu meningkat. Organisasi tetap hidup, tetapi orientasinya berubah.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara yaitu negara tetap berjalan, institusi tetap bekerja, dan kekuasaan tetap beroperasi, namun fokusnya perlahan bergeser dari melayani rakyat menjadi mempertahankan sistem itu sendiri.

Perubahan tersebut semakin mudah terjadi ketika negara mulai terpengaruh oleh berbagai bentuk *malware*, *spyware*, dan *rootkit* yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Oligarki mendorong kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Manipulasi menggeser perhatian masyarakat dari persoalan mendasar menuju persoalan yang lebih mudah dikendalikan. Pengaruh eksternal memengaruhi ruang kebijakan nasional. Akumulasi seluruh faktor tersebut menghasilkan kondisi di mana negara semakin sulit menjalankan fungsi aslinya sebagai pelayan rakyat.

Akibatnya, rakyat mulai mengalami paradoks yang sangat serius. Secara teori, rakyat adalah pemilik negara. Secara teori, kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara teori, seluruh kekuasaan dijalankan atas

nama rakyat. Namun dalam praktik sehari-hari, rakyat justru sering berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap sistem yang semakin besar dan semakin kompleks. Negara yang seharusnya menjadi alat rakyat perlahan berubah menjadi entitas yang menuntut rakyat melayani kebutuhan sistem itu sendiri.

Gejala ini dapat dikenali dari perubahan cara masyarakat memandang negara. Ketika rakyat mulai merasa cemas setiap kali berurusan dengan birokrasi, ketika pelaku usaha lebih sering melihat regulasi sebagai hambatan daripada sebagai perlindungan, ketika masyarakat memandang institusi negara sebagai sumber kesulitan daripada sumber solusi, maka terdapat indikasi bahwa orientasi pelayanan telah mengalami gangguan. Hubungan antara rakyat dan negara tidak lagi berada pada posisi yang semestinya.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima, kondisi tersebut merupakan penyimpangan yang serius. Kerakyatan menghendaki agar seluruh penyelenggaraan negara berorientasi pada rakyat. Keadilan sosial menghendaki agar seluruh kebijakan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika negara justru menjadi sumber beban yang semakin besar, maka tujuan pembentukan negara mulai menjauh dari nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasinya.

Karena itu, gejala pertama dari negara yang terinfeksi bukanlah runtuhnya institusi negara, bukan pula hilangnya simbol-simbol kenegaraan. Gejala pertama justru muncul ketika negara yang seharusnya

memudahkan kehidupan rakyat perlahan berubah menjadi sistem yang membebani rakyat. Negara masih berdiri. Pemerintah masih bekerja. Hukum masih berlaku. Namun orientasi dasarnya berubah. Rakyat tidak lagi sepenuhnya diposisikan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara, melainkan semakin sering diperlakukan sebagai sumber daya yang harus menopang keberlangsungan sistem. Pada titik itulah negara mulai bergerak menjauh dari hakikat pembentukannya sebagai alat pelayanan bagi rakyat.

14.2. Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Salah satu alasan utama manusia membentuk negara adalah untuk menghadirkan keadilan. Sejak masa-masa awal peradaban, masyarakat menyadari bahwa kehidupan bersama tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang bertindak berdasarkan kekuatannya sendiri. Yang kuat akan menindas yang lemah. Yang kaya akan menguasai yang miskin. Yang memiliki kekuasaan akan memaksakan kehendaknya kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Karena itulah hukum lahir sebagai instrumen yang bertugas menjaga keseimbangan. Hukum dibentuk agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa memandang kedudukan, kekayaan, jabatan, maupun pengaruh yang dimiliki.

Dalam negara hukum, prinsip tersebut dikenal sebagai *equality before the law*, yaitu persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip ini sangat penting karena menjadi fondasi legitimasi moral sebuah negara. Masyarakat bersedia mematuhi hukum bukan

semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena percaya bahwa hukum akan diterapkan secara adil kepada siapa pun. Ketika rakyat melihat bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat bahwa hukum hanya keras kepada kelompok tertentu tetapi lunak terhadap kelompok lainnya, kepercayaan tersebut perlahan mulai terkikis.

Pada tataran normatif, hampir semua negara modern mengakui prinsip persamaan di hadapan hukum. Konstitusi menjamin kesetaraan warga negara. Undang-undang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Pengadilan dibentuk untuk menegakkan keadilan. Aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk memastikan aturan dijalankan sebagaimana mestinya. Dari sisi desain formal, seluruh perangkat yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan tampak telah tersedia.

Namun persoalan hukum tidak hanya terletak pada apa yang tertulis dalam konstitusi atau undang-undang. Persoalan hukum juga terletak pada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada titik inilah muncul salah satu gejala paling sering ditemukan dalam negara yang mulai mengalami infeksi sistemik, yaitu munculnya persepsi bahwa hukum menjadi tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Ungkapan tersebut hidup dalam berbagai lapisan masyarakat karena menggambarkan pengalaman yang dirasakan secara luas. Masyarakat sering melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh

warga biasa diproses dengan cepat dan tegas, sementara pelanggaran yang melibatkan kekuasaan, modal besar, atau jaringan pengaruh tertentu sering kali berjalan lebih lambat, lebih rumit, atau bahkan tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap kasus secara individual, persepsi semacam itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap legitimasi hukum.

Dalam sistem yang sehat, hukum berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam sistem yang mulai mengalami kerusakan, hukum berisiko berubah menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan. Dalam sistem yang sehat, hukum melindungi pihak yang lemah dari penyalahgunaan kekuatan. Dalam sistem yang rusak, hukum justru dapat digunakan untuk memperkuat posisi pihak yang sudah kuat.

Perubahan ini jarang terjadi secara terbuka. Tidak ada aturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa kelompok tertentu harus diperlakukan lebih istimewa. Tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa. Yang terjadi biasanya jauh lebih halus. Pengaruh ekonomi, pengaruh, jaringan kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan berbagai faktor lainnya mulai memengaruhi proses penegakan hukum secara tidak langsung.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai oligarki sebagai *malware*, telah dijelaskan bagaimana kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi besar dapat memperoleh pengaruh yang luas terhadap berbagai institusi negara. Dalam pembahasan mengenai demokrasi transaksional sebagai *spyware*, telah

dijelaskan bagaimana persepsi publik dapat dibentuk dan diarahkan. Dalam pembahasan mengenai kolonialisme modern sebagai *rootkit*, telah dijelaskan bagaimana pengaruh dapat bekerja pada lapisan yang lebih dalam dari sistem. Ketika seluruh faktor tersebut bertemu dalam ruang penegakan hukum, maka hukum berisiko kehilangan posisi netralnya sebagai penjaga keadilan.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui analogi sistem komputer. Dalam sistem yang normal, seluruh proses dijalankan berdasarkan aturan yang sama. Sistem tidak membedakan pengguna berdasarkan kekayaan atau status sosial. Setiap perintah diproses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun ketika sistem telah terinfeksi, sebagian proses mulai memperoleh perlakuan khusus. Sebagian pengguna mendapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki pengguna lain. Aturan yang berlaku bagi satu kelompok tidak selalu berlaku bagi kelompok yang berbeda. Dari luar, sistem masih terlihat berfungsi. Namun integritas sistem telah mengalami gangguan.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan hukum. Hukum mungkin tetap ada. Pengadilan tetap bersidang. Aparat tetap bekerja. Namun apabila masyarakat mulai melihat bahwa hasil akhir lebih banyak ditentukan oleh posisi, kekuasaan, atau pengaruh dibanding oleh prinsip keadilan, maka hukum kehilangan sebagian fungsi dasarnya.

Persoalan ini tidak hanya berdampak pada individu yang berhadapan langsung dengan sistem hukum. Dampaknya jauh lebih luas. Ketika

kepercayaan terhadap hukum menurun, masyarakat mulai mencari alternatif lain di luar mekanisme hukum. Sebagian memilih menghindari proses hukum. Sebagian memilih menyelesaikan persoalan melalui jalur informal. Sebagian kehilangan keyakinan bahwa keadilan dapat diperoleh melalui institusi negara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut melemahkan fondasi negara hukum itu sendiri.

Yang lebih berbahaya lagi, ketimpangan hukum sering kali menciptakan siklus yang terus berulang. Kelompok yang memiliki kekuasaan memperoleh keuntungan karena hukum tidak bekerja secara seimbang. Keuntungan tersebut memperbesar kekuatan ekonomi yang dimiliki. Kekuatan yang semakin besar kemudian menghasilkan kemampuan yang lebih besar untuk memengaruhi sistem. Akibatnya, ketimpangan semakin menguat dari waktu ke waktu. Hukum yang seharusnya menjadi alat koreksi terhadap ketimpangan justru berisiko menjadi bagian dari mekanisme yang mempertahankan ketimpangan tersebut.

Dalam perspektif keadilan substantif, persoalan hukum tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur semata. Hukum memang membutuhkan prosedur yang jelas karena tanpa prosedur akan muncul kesewenang-wenangan. Namun prosedur hanyalah sarana. Tujuan akhirnya tetap keadilan. Ketika prosedur digunakan sedemikian rupa sehingga menjauhkan hukum dari keadilan, maka hukum kehilangan ruh yang menjadi alasan keberadaannya.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta

sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hukum tidak boleh menjadi alat yang hanya melayani kelompok tertentu. Hukum harus menjadi instrumen yang menjamin martabat setiap manusia dan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara. Keadilan bukan hadiah yang diberikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Keadilan adalah hak seluruh rakyat tanpa pengecualian.

Karena itu, salah satu gejala paling jelas bahwa negara mulai mengalami infeksi sistemik adalah ketika hukum kehilangan kemampuan untuk berdiri di atas semua kepentingan. Negara yang sehat memiliki hukum yang mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang terinfeksi justru berisiko memiliki hukum yang semakin sulit menjangkau pusat-pusat kekuasaan. Pada titik tersebut, hukum masih ada secara formal, tetapi fungsi moralnya mulai mengalami pelemahan.

Ketika hukum menjadi tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, negara tidak hanya menghadapi persoalan penegakan hukum. Negara sedang menghadapi krisis legitimasi. Sebab hukum adalah wajah keadilan yang paling nyata dalam kehidupan berbangsa. Ketika masyarakat tidak lagi melihat keadilan dalam hukum, maka kepercayaan terhadap negara perlahan mulai runtuh. Pada saat itulah negara kehilangan salah satu fondasi terpenting yang menopang keberadaannya sebagai negara hukum yang berdaulat dan berkeadilan.

14.3. Birokrasi yang Menjadi Mesin Ekstraksi

Dalam teori ketatanegaraan modern, birokrasi dibentuk untuk membantu negara menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan rakyat. Ketika pemerintah menetapkan program pendidikan, birokrasi bertugas memastikan layanan pendidikan sampai kepada masyarakat. Ketika negara ingin meningkatkan kesejahteraan, birokrasi bertugas menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang dapat dirasakan secara nyata. Ketika hukum mengatur hak dan kewajiban warga negara, birokrasi menjadi instrumen yang membantu pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut secara tertib dan adil.

Pada kondisi yang ideal, birokrasi bekerja seperti sistem operasi dalam sebuah komputer. Pengguna tidak perlu memahami seluruh proses teknis yang berlangsung di dalam sistem. Sistem operasi bekerja di belakang layar untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Semakin baik sistem operasi, semakin mudah pengguna mencapai tujuannya. Pengguna tidak dipaksa memahami kerumitan internal sistem. Justru sistemlah yang menyederhanakan kerumitan tersebut agar pengguna dapat bekerja secara efektif.

Birokrasi yang sehat bekerja dengan prinsip yang sama. Kehadiran birokrasi seharusnya membuat urusan masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti, dan lebih murah. Keberadaan aparatur negara seharusnya mengurangi hambatan yang dihadapi rakyat. Regulasi seharusnya menciptakan kepastian. Administrasi seharusnya menciptakan keteraturan.

Pelayanan publik seharusnya menghadirkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam negara yang mulai mengalami infeksi sistemik, birokrasi dapat mengalami perubahan fungsi yang sangat mendasar. Instrumen yang semula dibangun untuk melayani rakyat perlahan berubah menjadi instrumen yang lebih banyak melayani dirinya sendiri. Energi organisasi lebih banyak digunakan untuk mempertahankan prosedur daripada menyelesaikan masalah. Perhatian lebih besar diberikan kepada kepatuhan administratif daripada kepada manfaat yang diterima masyarakat. Akibatnya, rakyat tidak lagi merasakan birokrasi sebagai sarana pelayanan, melainkan sebagai hambatan yang harus dihadapi.

Gejala tersebut biasanya tidak muncul dalam bentuk yang dramatis. Tidak ada pengumuman resmi bahwa birokrasi berhenti melayani masyarakat. Sebaliknya, perubahan berlangsung secara perlahan melalui penumpukan prosedur, penambahan persyaratan, perluasan kewenangan administratif, serta berkembangnya budaya kerja yang lebih berorientasi pada kepentingan internal organisasi dibanding pada kebutuhan publik.

Setiap persoalan dijawab dengan formulir baru. Setiap risiko dijawab dengan persyaratan baru. Setiap kekhawatiran dijawab dengan prosedur baru. Setiap kesalahan dijawab dengan lapisan administrasi baru. Akibatnya, birokrasi tumbuh semakin besar, semakin kompleks, dan semakin sulit dipahami oleh masyarakat yang seharusnya dilayani.

Pada tahap tertentu, masyarakat mulai menghabiskan lebih banyak waktu memenuhi kebutuhan birokrasi daripada menerima manfaat dari birokrasi tersebut. Pelaku usaha mengurus izin berulang kali. Warga negara mengumpulkan dokumen yang sama di berbagai instansi. Berbagai data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah diminta kembali kepada masyarakat dalam format yang berbeda. Teknologi yang seharusnya menyederhanakan pelayanan justru sering digunakan untuk menambah lapisan administrasi baru tanpa menghilangkan lapisan lama.

Dalam kondisi seperti ini, birokrasi tidak lagi bekerja sebagai alat pelayanan. Birokrasi mulai bekerja sebagai mesin ekstraksi.

Istilah ekstraksi dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan uang. Ekstraksi juga dapat berupa waktu, tenaga, perhatian, produktivitas, dan sumber daya masyarakat yang tersedot untuk memenuhi kebutuhan sistem. Setiap jam yang digunakan untuk mengurus prosedur yang tidak perlu adalah bentuk ekstraksi waktu. Setiap biaya tambahan akibat kerumitan administrasi adalah bentuk ekstraksi ekonomi. Setiap energi yang habis karena menghadapi prosedur yang berbelit adalah bentuk ekstraksi produktivitas.

Fenomena tersebut menjadi semakin berbahaya ketika bertemu dengan praktik korupsi. Dalam birokrasi yang sehat, prosedur dirancang untuk melindungi kepentingan publik. Dalam birokrasi yang korup, prosedur sering kali berubah menjadi komoditas

yang dapat diperjualbelikan. Kerumitan menciptakan peluang. Ketidakpastian menciptakan nilai tawar. Kewenangan administratif menciptakan ruang transaksi. Akibatnya, sebagian aparatur tidak lagi melihat pelayanan sebagai amanah, melainkan sebagai sumber keuntungan.

Pada titik ini, masyarakat menghadapi situasi yang paradoks. Negara membentuk birokrasi untuk melayani rakyat, tetapi sebagian rakyat justru harus mengeluarkan biaya tambahan agar memperoleh pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Negara membangun institusi untuk menciptakan kepastian, tetapi sebagian masyarakat harus mencari jalan pintas karena prosedur yang ada terlalu rumit atau terlalu lambat. Negara membentuk aparatur untuk membantu kehidupan masyarakat, tetapi sebagian masyarakat justru melihat aparatur sebagai hambatan yang harus dihindari.

Persoalan seperti ini sering dijelaskan sebagai masalah moral individu. Memang benar bahwa integritas personal memiliki peran yang sangat penting. Namun jika praktik yang sama muncul berulang kali di berbagai tempat, di berbagai instansi, dan selama berbagai periode pemerintahan, maka persoalannya tidak lagi semata-mata terletak pada individu. Persoalan tersebut mulai menunjukkan karakter sistemik.

Sistem yang terlalu kompleks menciptakan peluang penyimpangan. Kewenangan yang terlalu besar tanpa pengawasan menciptakan peluang penyalahgunaan. Prosedur yang terlalu panjang

menciptakan ruang transaksi. Serta, ketidakpastian pelayanan menciptakan insentif bagi praktik-praktik informal.

Dalam konteks inilah birokrasi dapat berubah menjadi bagian dari infeksi negara yang lebih luas. Sebagaimana *malware* dalam sistem komputer mengonsumsi sumber daya tanpa memberikan manfaat yang sebanding, birokrasi yang terinfeksi mulai mengonsumsi energi masyarakat tanpa menghasilkan pelayanan yang setara dengan beban yang ditimbulkan.

Yang lebih mengkhawatirkan, masyarakat sering kali terbiasa dengan keadaan tersebut. Kerumitan dianggap normal. Keterlambatan dianggap biasa. Biaya tambahan dianggap bagian dari proses. Lambat laun standar pelayanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru diturunkan mengikuti kemampuan sistem yang tidak efisien. Ketika kondisi ini berlangsung dalam waktu yang panjang, budaya pelayanan berubah menjadi budaya pembenaran terhadap ketidakefisienan.

Padahal dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima, birokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kerakyatan dan keadilan sosial. Aparatur negara bukan penguasa rakyat. Aparatur negara adalah pelayan rakyat. Kewenangan yang dimiliki bukan hak istimewa untuk memperoleh keuntungan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik.

Karena itu, salah satu gejala paling nyata bahwa negara mulai terinfeksi adalah ketika birokrasi tidak lagi diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat, melainkan dari kemampuan mempertahankan prosedur dan struktur yang dimilikinya. Pada titik tersebut, birokrasi berhenti menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Birokrasi berubah menjadi lapisan yang memisahkan negara dari rakyat.

Birokrasi yang korup dan tidak efisien mengubah negara dari pelayan menjadi pemungut. Waktu rakyat dipungut, tenaga rakyat dipungut, produktivitas rakyat dipungut, dan dalam banyak kasus bahkan sumber daya ekonomi rakyat ikut dipungut. Ketika keadaan tersebut terjadi, negara tidak lagi menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana tujuan pembentukannya. Negara mulai bekerja seperti mesin ekstraksi yang mengambil lebih banyak daripada yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi pemilik sah kedaulatan.

14.4. Ekonomi yang Menekan Rakyat

Salah satu ukuran paling sederhana untuk menilai apakah sebuah negara bekerja sesuai tujuan pembentukannya adalah dengan melihat bagaimana sistem ekonomi memengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Negara dibentuk bukan hanya untuk menjaga keamanan dan menciptakan keteraturan, tetapi juga untuk menghadirkan kesejahteraan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara secara tegas mencantumkan

upaya memajukan kesejahteraan umum. Artinya, seluruh instrumen ekonomi yang dibangun oleh negara seharusnya bergerak menuju satu arah yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dalam kondisi yang sehat, ekonomi berfungsi sebagai sarana untuk memperluas kesempatan hidup yang lebih baik. Lapangan kerja bertambah, produktivitas meningkat, biaya hidup dapat dijangkau, usaha berkembang, dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik yang tercatat dalam laporan resmi, melainkan sesuatu yang nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, masyarakat memperoleh ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyekolahkan anak, mengembangkan usaha, serta merencanakan masa depan dengan lebih optimis.

Namun persoalan ekonomi tidak sesederhana pertumbuhan angka-angka makro. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama sebagian besar rakyat justru merasakan tekanan yang semakin berat. Produk domestik bruto dapat meningkat, investasi dapat bertambah, dan berbagai indikator makroekonomi dapat menunjukkan tren positif, tetapi apabila manfaat pertumbuhan tersebut tidak mengalir kepada masyarakat secara luas, maka muncul kesenjangan antara keberhasilan ekonomi secara statistik dan kenyataan ekonomi yang dirasakan rakyat.

Di sinilah salah satu gejala negara yang mulai terinfeksi menjadi semakin terlihat. Ekonomi yang

seharusnya menjadi alat kesejahteraan perlahan berubah menjadi sumber tekanan, ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik sementara daya beli tidak tumbuh dalam kecepatan yang sama, diikuti oleh meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi, sehingga berbagai kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Pada saat yang sama, rakyat juga menghadapi berbagai kewajiban ekonomi yang terus bertambah. Pajak dipungut, retribusi dikenakan, berbagai biaya administrasi harus dibayar, dan berbagai bentuk pungutan lainnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya, seluruh kewajiban tersebut dapat dibenarkan apabila digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang berkualitas. Persoalannya muncul ketika beban yang ditanggung rakyat terasa semakin besar sementara manfaat yang diterima tidak berkembang secara sebanding.

Dalam keadaan seperti itu, masyarakat mulai merasakan bahwa negara lebih banyak mengambil daripada memberikan. Setiap aktivitas ekonomi dikenai berbagai kewajiban, setiap usaha menghadapi berbagai biaya kepatuhan, dan setiap transaksi menghadapi berbagai pungutan, namun perlindungan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan beban yang harus ditanggung.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui analogi sistem teknologi yang telah digunakan sepanjang buku

ini. Sebuah perangkat lunak yang sehat membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Sebaliknya, perangkat lunak yang telah terinfeksi mulai mengonsumsi sumber daya secara berlebihan. Memori tersedot, prosesor bekerja semakin berat, dan energi habis untuk menopang proses-proses yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pengguna. Komputer tetap menyala, tetapi sebagian besar sumber dayanya digunakan untuk mempertahankan sistem yang bermasalah.

Keadaan serupa dapat terjadi dalam ekonomi sebuah negara. Sebagian besar energi ekonomi rakyat digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang dibebankan oleh sistem. Pendapatan yang diperoleh tidak lagi sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, melainkan semakin banyak terserap untuk memenuhi berbagai biaya yang muncul akibat kompleksitas sistem itu sendiri. Pada titik tertentu, masyarakat bekerja bukan lagi untuk membangun masa depan yang lebih baik, tetapi lebih banyak untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Yang membuat keadaan ini semakin serius adalah kenyataan bahwa tekanan ekonomi tidak dirasakan secara merata. Kelompok yang memiliki modal besar biasanya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyesuaikan diri. Kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan sering memperoleh berbagai kemudahan yang tidak dimiliki masyarakat biasa. Sebaliknya, rakyat yang berada pada lapisan ekonomi bawah dan menengah sering menjadi pihak

yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi yang tidak berpihak.

Akibatnya, muncul paradoks yang sangat mengganggu rasa keadilan yaitu rakyat adalah pemilik negara, rakyat adalah sumber kedaulatan, dan rakyat pula yang membiayai negara melalui berbagai bentuk kontribusi ekonomi. Namun, pada saat yang sama, rakyat sering menjadi pihak yang paling berat menanggung konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang diambil.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai oligarki sebagai *malware*, telah dijelaskan bagaimana sebagian kelompok dapat memperoleh pengaruh yang sangat besar terhadap arah kebijakan ekonomi. Dalam pembahasan mengenai demokrasi transaksional sebagai *spyware*, telah dijelaskan bagaimana perhatian masyarakat dapat dialihkan dari persoalan mendasar menuju isu-isu yang lebih mudah dikendalikan. Dalam pembahasan mengenai kolonialisme modern sebagai *rootkit*, telah dijelaskan bagaimana ruang kebijakan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk ketergantungan eksternal. Ketika seluruh faktor tersebut bertemu, lahirlah sistem ekonomi yang semakin jauh dari orientasi kerakyatan.

Kebijakan ekonomi perlahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar daripada kebutuhan rakyat. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak diukur melalui angka agregat daripada kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan lebih sering dinilai dari indikator makro dibanding dari kesejahteraan yang dirasakan secara nyata. Pada

akhirnya, rakyat mulai diperlakukan sebagai objek ekonomi, bukan sebagai tujuan ekonomi.

Padahal dalam perspektif Pancasila, terutama sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia. Ekonomi bukan tujuan akhir. Pertumbuhan bukan tujuan akhir. Investasi bukan tujuan akhir. Seluruh instrumen ekonomi hanyalah sarana untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika ekonomi kehilangan orientasi tersebut, negara mulai bergerak menjauh dari tujuan pembentukannya. Negara tidak lagi berfungsi sebagai pelindung kesejahteraan rakyat, melainkan berisiko menjadi mekanisme yang terus-menerus mengekstraksi sumber daya dari masyarakat tanpa mengembalikan manfaat yang setara. Pada titik itulah rakyat mulai merasakan bahwa sistem ekonomi tidak bekerja untuk mereka, melainkan mereka yang bekerja untuk mempertahankan sistem ekonomi tersebut.

Ekonomi yang dibangun tanpa orientasi kerakyatan pada akhirnya mengubah negara menjadi beban bagi pemiliknya sendiri. Rakyat bekerja lebih keras tetapi memperoleh ruang hidup yang semakin sempit. Biaya hidup terus meningkat sementara manfaat pembangunan tidak selalu dirasakan secara merata. Ketika keadaan tersebut berlangsung dalam jangka panjang, negara tidak lagi hadir sebagai sarana kesejahteraan, melainkan menjadi bagian dari tekanan

yang harus dihadapi oleh rakyat yang seharusnya menjadi tujuan utama seluruh penyelenggaraan negara.

14.5. Aparat yang Kehilangan Orientasi Pelayanan

Dalam setiap negara modern, keberadaan aparat memiliki fungsi yang sangat penting. Negara tidak mungkin menjalankan hukum, menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menyelenggarakan pelayanan publik tanpa adanya aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Karena itu, sejak awal pembentukan negara, aparat selalu ditempatkan sebagai instrumen pelaksana kehendak negara yang sah. Namun terdapat satu prinsip mendasar yang sering terlupakan ketika membicarakan aparatur negara, yaitu bahwa seluruh kewenangan yang dimiliki aparat pada hakikatnya berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Aparat tidak menciptakan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Kewenangan diberikan melalui konstitusi, undang-undang, dan berbagai aturan yang memperoleh legitimasi dari kedaulatan rakyat. Dengan demikian, kekuasaan yang dijalankan aparat bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan tersebut secara adil, proporsional, dan berorientasi pada pelayanan.

Dalam keadaan yang sehat, hubungan antara rakyat dan aparat bersifat melindungi. Masyarakat merasa aman ketika melihat kehadiran aparat. Warga

merasa terlindungi ketika menghadapi ancaman. Pelaku usaha merasa memperoleh kepastian hukum. Korban kejahatan merasa memiliki tempat untuk mencari keadilan. Masyarakat memandang aparat sebagai representasi negara yang hadir untuk menjaga ketertiban dan melayani kepentingan umum. Keberadaan aparat memberikan rasa percaya bahwa negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi tersebut sangat penting karena negara pada dasarnya tidak hadir dalam bentuk bangunan, lambang, atau dokumen hukum semata. Bagi sebagian besar masyarakat, negara hadir melalui pengalaman berinteraksi dengan aparat. Ketika seseorang mengurus administrasi kependudukan, negara hadir melalui petugas pelayanan. Ketika seseorang melaporkan tindak pidana, negara hadir melalui aparat penegak hukum. Ketika masyarakat membutuhkan perlindungan keamanan, negara hadir melalui aparat yang bertugas menjaga ketertiban. Karena itu, kualitas hubungan antara aparat dan masyarakat sangat menentukan bagaimana rakyat memandang negara secara keseluruhan.

Namun dalam negara yang mulai mengalami infeksi sistemik, hubungan tersebut dapat mengalami perubahan yang mendasar. Aparat yang semula diposisikan sebagai pelayan masyarakat perlahan mulai melihat masyarakat sebagai objek pengendalian. Orientasi pelayanan bergeser menjadi orientasi kekuasaan. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat mulai lebih sering digunakan untuk memastikan kepatuhan rakyat terhadap sistem.

Perlahan tetapi pasti, hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar perlindungan berubah menjadi hubungan yang dibangun atas dasar rasa takut.

Perubahan seperti ini jarang terjadi secara terbuka. Tidak ada perintah resmi yang menyatakan bahwa aparat harus menjauhi rakyat. Tidak ada doktrin yang secara terang-terangan mengajarkan bahwa masyarakat adalah musuh. Yang terjadi biasanya jauh lebih halus. Struktur insentif berubah. Budaya organisasi berubah. Ukuran keberhasilan bergeser. Sedikit demi sedikit, pelayanan tidak lagi menjadi prioritas utama. Kepatuhan prosedural, target administratif, stabilitas institusional, dan berbagai kepentingan internal organisasi mulai memperoleh perhatian yang lebih besar dibanding kebutuhan masyarakat yang seharusnya dilayani.

Akibatnya, muncul berbagai gejala yang perlahan mengubah persepsi publik. Masyarakat mulai merasa khawatir ketika berhadapan dengan aparat. Sebagian warga lebih memilih menghindari interaksi dengan institusi negara kecuali benar-benar terpaksa. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi hubungan antara rakyat dan negara mulai mengalami erosi. Aparat masih menjalankan fungsi formalnya, tetapi makna pelayanan yang menjadi dasar keberadaannya mulai melemah.

Dalam kondisi yang lebih serius, kewenangan yang dimiliki aparat dapat berubah menjadi alat penekanan. Kekuatan yang diberikan untuk melindungi digunakan secara berlebihan. Diskresi yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan digunakan tanpa

pertimbangan yang memadai. Mekanisme penegakan hukum yang seharusnya menghadirkan keadilan berubah menjadi sumber ketakutan. Pada titik ini, masyarakat tidak lagi melihat kewenangan sebagai instrumen pelayanan, melainkan sebagai instrumen yang dapat sewaktu-waktu digunakan terhadap mereka.

Fenomena tersebut memiliki kemiripan dengan sistem komputer yang telah mengalami perubahan fungsi akibat infeksi perangkat lunak berbahaya. Pada awalnya, sistem keamanan dirancang untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Namun ketika sistem mengalami gangguan, mekanisme keamanan yang seharusnya melindungi justru dapat menghambat aktivitas pengguna yang sah. Sistem masih menjalankan fungsi keamanan, tetapi orientasinya telah berubah. Perlindungan tidak lagi diberikan kepada pemilik sistem. Perlindungan lebih banyak diarahkan kepada kepentingan sistem itu sendiri.

Keadaan serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Aparat tetap menjalankan fungsi pengamanan. Aparat tetap menegakkan aturan. Aparat tetap memiliki kewenangan yang sah menurut hukum. Namun apabila orientasi pelayanan hilang, maka fungsi tersebut perlahan bergeser dari melindungi rakyat menjadi mengendalikan rakyat. Pada titik itulah muncul risiko penyalahgunaan kewenangan yang semakin besar.

Penting untuk dipahami bahwa persoalan ini tidak boleh disederhanakan sebagai persoalan individu semata. Tentu terdapat aparat yang menyalahgunakan

kewenangan. Namun ketika gejala yang sama muncul berulang kali dalam berbagai institusi dan dalam berbagai periode, persoalannya mulai menunjukkan karakter sistemik. Budaya organisasi, desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, sistem akuntabilitas, dan orientasi kebijakan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada perilaku individu semata.

Sistem yang sehat akan mendorong aparat untuk melayani. Sistem yang tidak sehat akan mendorong aparat untuk mempertahankan kekuasaan. Sistem yang sehat memberikan penghargaan terhadap kualitas pelayanan publik. Sistem yang tidak sehat lebih menghargai kepatuhan terhadap struktur daripada manfaat bagi masyarakat. Sistem yang sehat menempatkan rakyat sebagai tujuan. Sistem yang tidak sehat menempatkan rakyat sebagai objek.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keberadaan aparat harus selalu berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Kewenangan negara tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral untuk melayani rakyat. Kekuasaan bukanlah tujuan. Kekuasaan adalah amanah. Amanah tersebut hanya memiliki legitimasi apabila digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Karena itu, salah satu gejala paling jelas bahwa negara mulai mengalami infeksi adalah ketika aparat

kehilangan orientasi pelayanan. Masyarakat mulai lebih merasakan kekuasaan daripada perlindungan. Warga lebih sering menghadapi ancaman sanksi daripada memperoleh bantuan. Kehadiran aparat lebih banyak menimbulkan kecemasan daripada rasa aman. Pada saat itu, hubungan antara negara dan rakyat telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Kekuasaan tanpa orientasi pelayanan mudah berubah menjadi alat penekanan. Kewenangan yang tidak terus-menerus dikembalikan kepada tujuan pelayanannya berisiko kehilangan legitimasi moralnya. Ketika aparat tidak lagi dipandang sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai instrumen yang lebih banyak menjaga kepentingan sistem daripada kepentingan masyarakat, negara mulai bergerak menjauh dari fungsi dasarnya sebagai pelayan kedaulatan rakyat.

14.6. Kebijakan yang Semakin Elitis

Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas sebuah negara adalah dengan melihat untuk siapa kebijakan dibuat. Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh inti dari seluruh penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan publik pada akhirnya akan menghasilkan manfaat bagi pihak tertentu dan menimbulkan konsekuensi bagi pihak lainnya. Karena itu, arah kebijakan menjadi cermin yang menunjukkan ke mana sesungguhnya negara bergerak dan siapa yang menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konsep negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, jawaban atas pertanyaan tersebut

seharusnya jelas. Kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat. Pemerintah memperoleh mandat dari rakyat. Anggaran negara berasal dari rakyat. Kewenangan negara dijalankan atas nama rakyat. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang lahir dari proses penyelenggaraan negara seharusnya berorientasi pada kebutuhan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Namun dalam praktik kehidupan bernegara, proses penyusunan kebijakan sering kali jauh lebih kompleks daripada teori yang tertulis dalam konstitusi. Sebuah kebijakan tidak lahir dalam ruang yang kosong. Di sekeliling proses pengambilan keputusan terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Terdapat kelompok ekonomi yang memiliki sumber daya besar. Terdapat kelompok yang memiliki pengaruh terhadap proses kekuasaan. Terdapat kelompok birokrasi yang menguasai informasi dan prosedur. Terdapat berbagai aktor yang memiliki kemampuan memengaruhi arah kebijakan melalui akses, jaringan, maupun sumber daya yang dimiliki.

Dalam kondisi yang sehat, seluruh kepentingan tersebut diolah melalui mekanisme yang memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Namun dalam negara yang mulai mengalami infeksi sistemik, keseimbangan tersebut perlahan mengalami perubahan. Sebagian kelompok memperoleh akses yang jauh lebih besar dibanding masyarakat umum. Sebagian kelompok memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memengaruhi proses kebijakan. Sebagian kelompok bahkan dapat

terlibat sejak tahap awal perumusan kebijakan, sementara masyarakat baru mengetahui isi kebijakan ketika kebijakan tersebut telah ditetapkan.

Akibatnya, lahirlah fenomena yang dapat disebut sebagai kebijakan elitis. Kebijakan elitis bukan berarti kebijakan yang dibuat oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Kebijakan elitis adalah kebijakan yang lebih mencerminkan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif kelompok kecil yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan dibanding kebutuhan masyarakat luas yang akan merasakan dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, jarak antara pembuat kebijakan dan rakyat semakin melebar. Keputusan tetap diambil atas nama rakyat, tetapi proses yang membentuk keputusan tersebut semakin jauh dari pengalaman hidup rakyat sehari-hari.

Fenomena ini biasanya berkembang secara perlahan. Pada awalnya, masyarakat masih merasa memiliki hubungan dengan proses pemilihan pemimpin. Aspirasi masih dapat disampaikan. Forum konsultasi masih diselenggarakan. Musyawarah publik masih dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, partisipasi yang semula substantif perlahan berubah menjadi formalitas administratif. Masyarakat tetap diundang untuk memberikan masukan, tetapi ruang untuk memengaruhi substansi kebijakan semakin terbatas. Konsultasi tetap dilakukan, tetapi keputusan penting sering kali telah ditentukan sebelumnya. Partisipasi tetap ada secara prosedural, tetapi pengaruh nyata terhadap hasil akhir menjadi semakin kecil.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai demokrasi transaksional sebagai *spyware*, telah

dijelaskan bagaimana proses pemilihan dapat menghasilkan ilusi partisipasi. Masyarakat merasa terlibat, tetapi ruang pengambilan keputusan sesungguhnya berada di tempat lain. Fenomena yang sama dapat terjadi dalam proses kebijakan. Dari luar, seluruh prosedur partisipasi tampak berjalan. Namun pada lapisan yang lebih dalam, arah kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses langsung terhadap pusat kekuasaan.

Keadaan ini memiliki kemiripan dengan sistem teknologi yang hanya menerima masukan dari sebagian kecil pengguna tertentu. Sistem tetap mengklaim melayani seluruh pengguna, tetapi pembaruan dan pengembangannya hanya didasarkan pada kebutuhan kelompok yang memiliki akses kepada pengembang sistem. Akibatnya, sistem perlahan menjadi semakin tidak relevan bagi sebagian besar pengguna. Fungsi-fungsi baru terus ditambahkan, tetapi tidak menjawab kebutuhan mayoritas. Perubahan terus dilakukan, tetapi manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ekonomi lebih responsif terhadap kebutuhan pemilik modal dibanding kebutuhan pelaku usaha kecil. Kebijakan pembangunan lebih memperhatikan kepentingan proyek besar dibanding kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan administrasi lebih fokus pada kenyamanan birokrasi dibanding kemudahan pelayanan publik. Kebijakan hukum lebih memperhatikan stabilitas kekuasaan dibanding

perlindungan keadilan. Sedikit demi sedikit, negara mulai kehilangan sensitivitas terhadap realitas yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Yang membuat keadaan ini semakin berbahaya adalah kenyataan bahwa kebijakan elitis sering kali tetap dibungkus dengan bahasa yang terdengar baik. Hampir tidak ada kebijakan yang secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu. Semua kebijakan biasanya menggunakan istilah yang mulia yaitu pembangunan, modernisasi, efisiensi, reformasi, transformasi, pertumbuhan, stabilitas, dan berbagai istilah lainnya. Persoalannya bukan terletak pada istilah yang digunakan, melainkan pada siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan tersebut.

Ketika masyarakat mulai merasa bahwa berbagai keputusan penting diambil tanpa mempertimbangkan pengalaman hidup mereka, kepercayaan terhadap negara perlahan mulai menurun. Rakyat tidak lagi melihat kebijakan sebagai hasil dari proses musyawarah kebangsaan, melainkan sebagai keputusan yang datang dari atas dan harus diterima apa adanya. Hubungan antara negara dan rakyat menjadi semakin jauh. Pemerintah tetap berbicara atas nama rakyat, tetapi rakyat semakin sulit menemukan dirinya dalam kebijakan yang dihasilkan.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kondisi seperti ini

merupakan persoalan yang sangat serius. Kerakyatan tidak hanya berarti rakyat memberikan suara dalam pemilu. Kerakyatan juga berarti rakyat hadir dalam proses pembentukan keputusan yang menentukan masa depan bangsa. Musyawarah bukan sekadar prosedur. Musyawarah adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan lahir dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Demikian pula sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar hasil kebijakan dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Keadilan sosial tidak mungkin terwujud apabila kebijakan lebih banyak melayani kepentingan elit dibanding kepentingan masyarakat luas. Ketika manfaat pembangunan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok, sementara biaya pembangunan ditanggung oleh seluruh rakyat, maka prinsip keadilan sosial mulai kehilangan maknanya.

Karena itu, salah satu gejala penting bahwa negara mulai mengalami infeksi adalah ketika kebijakan semakin elitis dan semakin jauh dari kehidupan rakyat. Rakyat tetap menjadi objek yang disebut dalam pidato-pidato resmi, tetapi suara rakyat semakin kecil pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi tetap ada secara formal, tetapi substansinya semakin berkurang. Musyawarah tetap dilakukan, tetapi hasil akhirnya lebih banyak ditentukan oleh

kelompok yang memiliki akses kepada pusat kekuasaan.

Semakin jauh rakyat dari proses pembentukan kebijakan, semakin besar peluang kebijakan melayani elit. Pada titik tersebut, negara tidak lagi sepenuhnya bekerja sebagai instrumen kedaulatan rakyat, melainkan mulai bergerak mengikuti kepentingan kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan memengaruhi pusat pengambilan keputusan. Ketika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, kebijakan publik kehilangan sifat kerakyatannya dan perlahan berubah menjadi instrumen yang memperkuat jarak antara negara dan rakyat yang seharusnya menjadi sumber utama kedaulatan negara itu sendiri.

14.7. Hilangnya Kepercayaan Publik

Di antara seluruh aset yang dimiliki sebuah negara, terdapat satu aset yang tidak tercatat dalam laporan keuangan, tidak tersimpan di dalam cadangan devisa, tidak tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan negara. Aset tersebut adalah kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan wibawa. Tanpa kepercayaan, kebijakan kehilangan legitimasi. Tanpa kepercayaan, institusi negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Kepercayaan adalah fondasi tidak terlihat yang menopang seluruh bangunan kehidupan bernegara.

Pada dasarnya, negara tidak dapat bekerja hanya dengan mengandalkan kekuasaan. Tidak ada negara

yang memiliki sumber daya cukup untuk mengawasi seluruh rakyat setiap saat. Tidak ada pemerintah yang mampu memaksa seluruh masyarakat mematuhi aturan hanya melalui ancaman sanksi. Sebagian besar kehidupan bernegara berjalan karena masyarakat percaya bahwa sistem yang ada masih layak untuk dipatuhi. Masyarakat membayar pajak karena percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik. Masyarakat mematuhi hukum karena percaya bahwa hukum diterapkan secara adil. Masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah karena percaya bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.

Kepercayaan publik dengan demikian bukan sekadar persoalan psikologis. Kepercayaan adalah modal sosial yang memungkinkan negara berfungsi secara normal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin mudah negara menjalankan berbagai program pembangunan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kepercayaan, semakin besar energi yang harus dikeluarkan hanya untuk mempertahankan kepatuhan masyarakat terhadap sistem.

Dalam kondisi yang sehat, kepercayaan tumbuh melalui pengalaman. Rakyat melihat bahwa hukum bekerja secara adil. Pelayanan publik berjalan dengan baik. Aparatur melayani masyarakat dengan profesional. Kebijakan memberikan manfaat yang nyata. Janji yang disampaikan memperoleh tindak lanjut yang dapat dirasakan. Sedikit demi sedikit, pengalaman-pengalaman tersebut membentuk keyakinan bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan rakyat.

Namun kepercayaan tidak dibangun dalam satu hari. Sebaliknya, kepercayaan dapat hilang melalui akumulasi pengalaman yang mengecewakan. Ketika masyarakat berulang kali melihat ketimpangan hukum, kepercayaan mulai berkurang. Ketika birokrasi lebih banyak mempersulit daripada membantu, kepercayaan mulai melemah. Ketika kebijakan terasa semakin jauh dari kebutuhan rakyat, kepercayaan mulai terkikis. Ketika berbagai institusi negara gagal memenuhi harapan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, masyarakat perlahan mulai mempertanyakan apakah sistem masih bekerja sebagaimana mestinya.

Proses ini biasanya tidak berlangsung secara tiba-tiba. Pada awalnya masyarakat masih berusaha memberikan toleransi. Setiap kegagalan dianggap sebagai kesalahan yang dapat diperbaiki. Setiap masalah dianggap sebagai kasus yang bersifat sementara. Namun ketika pola yang sama terus berulang dari waktu ke waktu, toleransi berubah menjadi keraguan. Keraguan berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan berubah menjadi ketidakpercayaan.

Dalam keadaan seperti itu, muncul gejala yang semakin sering terlihat dalam kehidupan publik. Masyarakat mulai memandang pernyataan resmi pemerintah dengan skeptis. Program-program baru tidak lagi disambut dengan optimisme yang sama. Penjelasan dari institusi negara tidak lagi diterima begitu saja. Setiap kebijakan baru langsung dicurigai memiliki agenda tersembunyi. Setiap keputusan dipandang sebagai bagian dari kepentingan tertentu. Bahkan ketika pemerintah melakukan hal yang benar,

sebagian masyarakat tetap meragukan niat dan tujuannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hilangnya kepercayaan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar penurunan citra institusi. Ketika kepercayaan runtuh, hubungan antara negara dan rakyat mengalami kerusakan yang mendasar. Negara tetap memiliki kewenangan formal, tetapi legitimasi moralnya mulai melemah. Perintah masih dapat diberikan, tetapi kepatuhan yang lahir dari keyakinan mulai berkurang. Program masih dapat dijalankan, tetapi dukungan masyarakat semakin sulit diperoleh.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai hukum yang timpang, birokrasi yang korup, ekonomi yang menekan rakyat, serta kebijakan yang semakin elitis, telah terlihat bagaimana berbagai gejala tersebut saling berkaitan. Masing-masing mungkin tampak sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Namun bagi masyarakat, seluruh pengalaman tersebut berkumpul menjadi satu kesimpulan yang sederhana yaitu sistem tidak lagi bekerja sebagaimana yang dijanjikan.

Akibatnya, lahirlah apatisme dalam kehidupan bernegara. Sebagian masyarakat tidak lagi tertarik mengikuti perkembangan kebijakan publik. Sebagian memilih menjauh dari proses pengambilan keputusan negara. Sebagian merasa bahwa suara mereka tidak memiliki pengaruh terhadap arah negara. Sebagian lainnya menganggap bahwa siapa pun yang berkuasa tidak akan membawa perubahan yang berarti. Apatisme semacam ini sering kali dianggap sebagai persoalan partisipasi masyarakat semata. Padahal sesungguhnya

apatisme adalah gejala yang lebih dalam. Apatisme muncul ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa keterlibatan mereka masih memiliki makna. Ketika rakyat percaya bahwa sistem tidak mendengar, tidak merespons, dan tidak berubah, maka keinginan untuk terlibat perlahan menghilang.

Selain apatisme, muncul pula sinisme sosial. Sinisme berbeda dengan kritik. Kritik lahir dari harapan bahwa keadaan dapat diperbaiki. Sinisme lahir dari keyakinan bahwa perbaikan tidak mungkin terjadi. Orang yang kritis masih percaya pada kemungkinan perubahan. Orang yang sinis mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemungkinan tersebut. Dalam jangka panjang, sinisme jauh lebih berbahaya karena menggerogoti semangat kolektif yang dibutuhkan untuk membangun bangsa.

Dalam dunia teknologi, hilangnya kepercayaan dapat dianalogikan dengan pengguna yang tidak lagi percaya kepada sistem operasi yang digunakan. Setiap pembaruan dianggap berpotensi menimbulkan masalah. Setiap notifikasi dianggap mengganggu. Setiap fungsi baru dianggap membawa risiko. Sistem mungkin masih berjalan, tetapi hubungan antara pengguna dan sistem telah rusak. Pengguna tidak lagi melihat sistem sebagai alat yang membantu, melainkan sebagai sesuatu yang harus diwaspadai.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika kepercayaan publik hilang, negara kehilangan salah satu sumber kekuatan terbesarnya. Kekuatan negara tidak hanya berasal dari anggaran, aparat, atau kewenangan hukum. Kekuatan negara juga

berasal dari keyakinan rakyat bahwa negara masih layak untuk didukung. Ketika keyakinan tersebut memudar, negara menjadi semakin rapuh meskipun seluruh struktur formalnya masih berdiri.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kepercayaan publik merupakan unsur yang sangat penting. Persatuan tidak mungkin tumbuh tanpa kepercayaan. Musyawarah tidak mungkin berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi yang memfasilitasi musyawarah tersebut. Kepercayaan adalah perekat yang menghubungkan rakyat dengan negara dalam satu ikatan kebangsaan yang sehat.

Karena itu, hilangnya kepercayaan publik bukan sekadar persoalan citra atau popularitas. Hilangnya kepercayaan publik adalah gejala bahwa hubungan mendasar antara rakyat dan negara mulai mengalami kerusakan. Negara mungkin masih memiliki kekuasaan formal, tetapi kehilangan dukungan moral yang membuat kekuasaan tersebut dihormati secara sukarela. Kepercayaan adalah oksigen bagi negara. Selama kepercayaan masih ada, berbagai persoalan dapat diperbaiki melalui kerja sama antara rakyat dan negara. Namun ketika kepercayaan mulai menghilang, setiap kebijakan menghadapi kecurigaan, setiap institusi menghadapi keraguan, dan setiap upaya perbaikan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar. Pada titik itulah negara tidak hanya mengalami krisis kebijakan

atau krisis ekonomi, tetapi mulai menghadapi krisis legitimasi yang mengancam fondasi keberadaannya sendiri.

14.8. Ketika Rakyat Menjadi Terdakwa Permanen

Salah satu ciri paling mendasar dari negara yang sehat adalah kemampuan membedakan antara melayani rakyat dan mencurigai rakyat. Negara dibentuk karena rakyat membutuhkan instrumen bersama untuk mengatur kehidupan kolektif, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam logika tersebut, rakyat adalah pihak yang harus dilindungi. Rakyat adalah pemilik negara. Rakyat adalah sumber legitimasi seluruh kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Oleh karena itu, seluruh aktivitas penyelenggaraan negara seharusnya berangkat dari asumsi bahwa rakyat adalah subjek utama yang harus dilayani, bukan objek yang terus-menerus diawasi dan dicurigai.

Namun dalam negara yang mulai mengalami infeksi sistemik, hubungan tersebut perlahan dapat mengalami pembalikan. Negara tidak lagi memandang rakyat sebagai pihak yang harus dilayani, melainkan sebagai pihak yang harus dikendalikan. Kebijakan dirancang dengan asumsi bahwa rakyat berpotensi melanggar aturan. Prosedur dibangun dengan asumsi bahwa rakyat berpotensi melakukan penyimpangan. Pengawasan diperluas dengan asumsi bahwa rakyat harus terus-menerus diawasi agar tidak menimbulkan masalah. Sedikit demi sedikit, orientasi pelayanan bergeser menjadi orientasi pengendalian.

Perubahan ini sering berlangsung tanpa disadari karena dibungkus dengan berbagai alasan yang tampak rasional. Demi ketertiban administrasi, lahirlah berbagai kewajiban pelaporan. Demi kepastian hukum, lahirlah berbagai persyaratan tambahan. Demi pengawasan, lahirlah berbagai mekanisme verifikasi. Demi keamanan, lahirlah berbagai bentuk pengumpulan data. Masing-masing kebijakan mungkin memiliki alasan yang dapat dipahami. Namun ketika seluruhnya terakumulasi tanpa keseimbangan yang memadai, muncul sebuah situasi di mana rakyat semakin sering diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dalam kehidupan sehari-hari, gejala tersebut dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Masyarakat harus terus membuktikan identitasnya kepada berbagai institusi yang berbeda. Pelaku usaha harus terus membuktikan kepatuhannya melalui berbagai laporan dan dokumen. Wajib pajak harus terus membuktikan bahwa seluruh aktivitas ekonominya telah sesuai aturan. Penerima bantuan sosial harus membuktikan bahwa dirinya layak menerima bantuan. Bahkan dalam berbagai situasi administratif yang sederhana, masyarakat sering kali diperlakukan seolah-olah kesalahan adalah asumsi awal yang harus dibantah.

Fenomena ini menciptakan hubungan yang tidak sehat antara negara dan rakyat. Dalam negara yang sehat, pengawasan memang diperlukan. Hukum memang harus ditegakkan. Administrasi memang harus dijalankan secara tertib. Namun seluruh instrumen tersebut harus tetap berada dalam kerangka

pelayanan. Pengawasan dilakukan untuk melindungi kepentingan publik, bukan untuk menciptakan rasa takut. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keadilan, bukan untuk memperlakukan setiap warga negara sebagai calon pelanggar.

Ketika keseimbangan tersebut hilang, rakyat mulai merasakan pengalaman yang berbeda. Berhadapan dengan negara menjadi pengalaman yang melelahkan. Mengurus hak yang seharusnya dijamin negara membutuhkan perjuangan yang panjang. Masyarakat harus mengumpulkan berbagai bukti, melengkapi berbagai dokumen, memenuhi berbagai prosedur, dan menjawab berbagai pertanyaan hanya untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya merupakan haknya sebagai warga negara.

Dalam kondisi seperti itu, negara perlahan menciptakan asumsi bahwa rakyat harus terus-menerus membuktikan kepatuhannya, sementara negara sendiri tidak selalu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang sama. Rakyat diperiksa. Rakyat diawasi. Rakyat diminta menjelaskan tindakannya. Namun pada saat yang sama, berbagai institusi negara sering kali tidak mengalami tingkat pengawasan publik yang setara. Muncul ketidakseimbangan antara kemampuan negara mengawasi rakyat dan kemampuan rakyat mengawasi negara.

Padahal dalam prinsip negara hukum yang demokratis, pengawasan seharusnya berjalan dua arah. Negara memang memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Namun rakyat juga memiliki hak untuk memastikan bahwa

kekuasaan negara digunakan secara benar. Negara tidak boleh menjadi entitas yang kebal terhadap evaluasi. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai hukum yang timpang, birokrasi yang korup, aparat yang kehilangan orientasi pelayanan, dan kebijakan yang semakin elitis, telah terlihat bagaimana infeksi sistemik dapat mengubah hubungan antara negara dan rakyat. Pada awalnya negara hadir sebagai pelayan. Kemudian negara mulai lebih sibuk menjaga kepentingan sistem. Pada tahap berikutnya, rakyat mulai diposisikan sebagai objek yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan sistem tersebut. Subbab ini menggambarkan tahap yang lebih jauh lagi, yaitu ketika rakyat secara tidak langsung diperlakukan sebagai terdakwa permanen.

Istilah "terdakwa permanen" dalam konteks ini tentu bukan istilah hukum formal. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suasana hubungan antara negara dan rakyat yang dipenuhi oleh praduga kecurigaan. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai pihak yang secara default beritikad baik. Sebaliknya, rakyat harus terus membuktikan bahwa dirinya patuh, jujur, layak, dan tidak melakukan pelanggaran. Posisi tersebut menciptakan beban psikologis maupun administratif yang sangat besar dalam kehidupan bernegara.

Dalam analogi teknologi yang digunakan sepanjang buku ini, keadaan tersebut menyerupai

sistem keamanan yang telah mengalami penyimpangan fungsi. Pada awalnya sistem keamanan dibuat untuk melindungi pengguna. Namun setelah mengalami infeksi, sistem keamanan mulai memperlakukan pengguna sah sebagai ancaman. Setiap tindakan dianggap mencurigakan. Setiap aktivitas memerlukan verifikasi tambahan. Setiap akses membutuhkan pembuktian berulang. Sistem masih bekerja, tetapi orientasinya telah berubah. Perlindungan tidak lagi diberikan kepada pengguna. Pengguna justru menjadi pihak yang harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya berhak menggunakan sistem tersebut.

Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Negara tetap menjalankan fungsi administratifnya. Pengawasan tetap dilakukan. Regulasi tetap diterapkan. Namun orientasi dasarnya berubah. Negara lebih fokus mengawasi rakyat daripada mengevaluasi dirinya sendiri. Negara lebih cepat mencurigai masyarakat daripada memperbaiki kelemahan internalnya. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan perlahan berubah menjadi hubungan yang dibangun atas dasar kecurigaan.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadaan tersebut bertentangan dengan semangat dasar hubungan antara negara dan rakyat. Negara harus menghormati martabat manusia. Negara harus memperlakukan

rakyat sebagai subjek yang memiliki hak dan kehormatan. Negara harus membangun hubungan yang berlandaskan kepercayaan, tanggung jawab, dan pelayanan. Ketika rakyat terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang dicurigai, maka hubungan tersebut kehilangan sifat kemanusiaan dan kerakyatannya.

Karena itu, salah satu gejala penting dari negara yang terinfeksi adalah ketika energi negara lebih banyak digunakan untuk mengawasi rakyat daripada memperbaiki dirinya sendiri. Rakyat terus diperiksa, sementara kekuasaan tidak selalu diperiksa dengan tingkat ketelitian yang sama. Rakyat terus diminta membuktikan kepatuhan, sementara institusi negara tidak selalu menunjukkan akuntabilitas yang setara. Pada titik itulah negara mulai bergerak menjauh dari prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Negara yang sehat mengawasi kekuasaan agar tidak menyimpang dan melindungi rakyat agar dapat hidup dengan aman serta bermartabat. Negara yang terinfeksi justru berisiko membalik hubungan tersebut. Rakyat diposisikan sebagai objek kecurigaan yang permanen, sementara kekuasaan semakin jarang mempertanyakan dirinya sendiri. Ketika keadaan itu terjadi, negara tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pelayan rakyat, melainkan mulai memperlakukan rakyat sebagai pihak yang harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak memperoleh hak-haknya sendiri.

14.9. Gejala Sistemik, Bukan Insidental

Ketika berbagai persoalan muncul secara berulang dalam kehidupan bernegara, reaksi yang paling mudah biasanya adalah mencari pihak yang dapat disalahkan. Ketika hukum dianggap tidak adil, perhatian diarahkan kepada hakim, jaksa, polisi, atau pejabat tertentu. Ketika birokrasi dianggap korup, kesalahan diarahkan kepada aparatur yang melakukan penyimpangan. Ketika kebijakan dinilai tidak berpihak kepada rakyat, perhatian tertuju kepada menteri, anggota parlemen, atau pemimpin yang sedang berkuasa. Pendekatan semacam ini memang wajar karena manusia cenderung mencari penyebab yang dapat dilihat secara langsung.

Namun terdapat sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa persoalan yang sama terus muncul meskipun orang-orang yang berada di dalam sistem telah berganti berkali-kali? Mengapa keluhan mengenai ketimpangan hukum muncul dari generasi ke generasi? Mengapa persoalan birokrasi yang rumit tetap terdengar meskipun berbagai program reformasi telah dilakukan? Mengapa rakyat terus mengeluhkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat meskipun pemilu berlangsung secara berkala? Mengapa ketidakpercayaan terhadap institusi negara terus muncul dalam berbagai periode pemerintahan yang berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada satu kemungkinan yang tidak selalu nyaman untuk diterima, yaitu bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar persoalan individu. Persoalan yang muncul mungkin bukan hanya akibat perilaku beberapa orang.

Persoalan yang berulang mungkin berasal dari sesuatu yang lebih mendasar, yaitu desain sistem yang melahirkan pola yang sama secara terus-menerus.

Dalam dunia teknologi, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kesalahan pengguna dan kesalahan sistem. Jika sebuah komputer mengalami masalah karena pengguna salah menekan tombol, persoalan dapat diselesaikan dengan memberikan pelatihan kepada pengguna. Namun apabila komputer yang sama terus mengalami gangguan meskipun digunakan oleh orang yang berbeda-beda, maka perhatian harus diarahkan kepada sistem itu sendiri. Ketika kesalahan yang sama muncul berulang kali dalam kondisi yang berbeda, penyebabnya sering kali berada pada desain yang menjadi fondasi seluruh sistem.

Logika yang sama berlaku dalam kehidupan bernegara. Jika satu pejabat melakukan penyimpangan, persoalannya mungkin berada pada individu tersebut. Jika satu institusi mengalami masalah, persoalannya mungkin berada pada manajemen institusi tersebut. Namun jika gejala yang sama muncul di berbagai sektor, berbagai daerah, dan berbagai periode pemerintahan, maka perhatian harus diarahkan kepada struktur yang melahirkan gejala tersebut.

Inilah yang dimaksud dengan gejala sistemik. Gejala sistemik adalah gejala yang lahir dari cara sebuah sistem dirancang dan dijalankan. Gejala tersebut tidak bergantung pada satu individu tertentu. Orang dapat berganti. Jabatan dapat berubah. Pemerintahan dapat datang dan pergi. Namun pola masalah tetap muncul

karena akar persoalannya berada pada desain yang mendasari seluruh bangunan sistem.

Pemahaman ini sangat penting karena tanpa pemahaman tersebut, masyarakat akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Setiap kali muncul persoalan, perhatian hanya tertuju pada pelaku yang terlihat di permukaan. Ketika pelaku tersebut diganti, muncul harapan bahwa persoalan akan selesai. Namun beberapa waktu kemudian masalah yang serupa muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Siklus tersebut berulang terus-menerus karena penyebab utama tidak pernah benar-benar disentuh.

Dalam bab-bab sebelumnya telah dibahas berbagai gejala yang muncul dalam kehidupan bernegara. Hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Birokrasi yang lebih banyak membebani daripada melayani. Ekonomi yang menekan rakyat. Aparat yang kehilangan orientasi pelayanan. Kebijakan yang semakin elitis. Hilangnya kepercayaan publik. Rakyat yang semakin sering diposisikan sebagai objek pengawasan. Jika seluruh gejala tersebut dilihat secara terpisah, masing-masing tampak sebagai persoalan yang berbeda. Namun ketika dilihat sebagai satu kesatuan, muncul pola yang sangat jelas.

Seluruh gejala tersebut menunjukkan adanya perubahan hubungan antara rakyat dan negara. Negara yang seharusnya melayani rakyat mulai lebih banyak melayani dirinya sendiri. Negara yang seharusnya menjadi alat kedaulatan rakyat mulai semakin jauh dari rakyat. Negara yang seharusnya melindungi

masyarakat mulai lebih fokus mempertahankan struktur kekuasaannya.

Pola tersebut tidak lahir dalam satu malam. Pola tersebut terbentuk melalui akumulasi berbagai perubahan yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Karena itu, gejalanya pun tidak dapat dijelaskan hanya dengan menunjuk satu atau dua aktor tertentu.

Dalam pembahasan mengenai oligarki sebagai *malware*, telah dijelaskan bagaimana kekuatan ekonomi dapat memengaruhi arah sistem dari dalam. Dalam pembahasan mengenai demokrasi transaksional sebagai *spyware*, telah dijelaskan bagaimana persepsi masyarakat dapat dibentuk sehingga rakyat merasa terlibat meskipun pengaruhnya semakin terbatas. Dalam pembahasan mengenai kolonialisme modern sebagai *rootkit*, telah dijelaskan bagaimana berbagai bentuk ketergantungan dapat memengaruhi ruang kebijakan nasional tanpa harus menghilangkan simbol-simbol kemerdekaan.

Ketika ketiga lapisan tersebut bekerja secara bersamaan, lahirlah berbagai gejala yang tampak di permukaan kehidupan bernegara. Ketimpangan hukum bukan lagi sekadar persoalan aparat penegak hukum, birokrasi yang korup bukan lagi sekadar persoalan moral aparatur, dan kebijakan yang elitis bukan lagi sekadar persoalan pilihan sesaat. Seluruhnya menjadi bagian dari pola yang lebih besar, yaitu gejala-gejala tersebut merupakan konsekuensi dari cara sistem bekerja.

Karena itu, penyelesaian yang hanya berfokus pada individu sering kali menghasilkan perbaikan yang bersifat sementara. Pergantian pejabat mungkin memperbaiki keadaan untuk beberapa waktu. Reformasi pada satu institusi mungkin menghasilkan perubahan yang terbatas. Penegakan hukum terhadap beberapa pelaku mungkin menciptakan efek jera dalam jangka pendek. Namun apabila desain yang melahirkan persoalan tetap dipertahankan, gejala yang sama cenderung akan muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Keadaan ini dapat dianalogikan dengan sebuah bangunan yang mengalami retakan karena fondasinya bermasalah. Mengecat ulang dinding mungkin membuat retakan tidak terlihat untuk sementara waktu. Mengganti kusen atau jendela mungkin memperbaiki tampilan bangunan. Namun selama fondasi yang bermasalah tidak diperbaiki, retakan baru akan terus muncul. Masalah yang terlihat pada dinding sesungguhnya hanyalah gejala dari persoalan yang berada jauh lebih dalam.

Analogi tersebut sangat relevan dengan tesis besar buku ini mengenai negara yang salah desain. Sejak awal telah dijelaskan bahwa konstitusi berfungsi seperti *firmware* dalam sebuah sistem. Konstitusi menentukan hubungan antarlembaga negara. Konstitusi menentukan bagaimana kedaulatan dijalankan. Konstitusi menentukan siapa yang mengendalikan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan. Apabila desain dasar tersebut mengandung kelemahan, maka berbagai gejala yang

muncul pada tingkat operasional sering kali merupakan konsekuensi logis dari kelemahan tersebut.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan sila kelima mengenai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, negara seharusnya dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam kendali rakyat dan seluruh penyelenggaraan negara berorientasi pada keadilan sosial. Ketika berbagai gejala yang telah dibahas dalam bab ini terus muncul secara berulang, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya siapa yang melakukan kesalahan, tetapi juga apakah desain sistem yang ada masih mampu mewujudkan tujuan tersebut.

Dengan demikian, seluruh persoalan yang dibahas dalam bab ini tidak boleh dipahami sebagai kumpulan kejadian yang berdiri sendiri. Hukum yang timpang, birokrasi yang korup, ekonomi yang menekan rakyat, aparat yang kehilangan orientasi pelayanan, kebijakan yang elitis, dan hilangnya kepercayaan publik bukanlah serangkaian insiden yang kebetulan terjadi secara bersamaan. Seluruhnya merupakan gejala yang saling terhubung dan menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar pada tingkat sistem.

Kerusakan yang berulang biasanya berasal dari desain yang salah. Ketika gejala yang sama muncul terus-menerus meskipun pelaku, pejabat, dan pemerintahan telah berganti, persoalannya tidak lagi dapat dijelaskan sebagai kesalahan individu semata.

Gejala tersebut menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam pada struktur dan desain sistem negara. Karena itu, penyelesaian yang sesungguhnya tidak cukup dilakukan dengan mengganti orang, melainkan harus berani meninjau kembali desain yang melahirkan pola kerusakan tersebut sejak awal.

14.10. Negara yang Berubah Menjadi *Malware*

Setelah menelusuri berbagai pembahasan dalam bab ini, mulai dari perubahan orientasi negara yang semula melayani menjadi membebani, hukum yang kehilangan keseimbangannya, birokrasi yang berubah menjadi mesin ekstraksi, ekonomi yang semakin menekan rakyat, aparat yang kehilangan orientasi pelayanan, kebijakan yang semakin elitis, hingga hilangnya kepercayaan publik, muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah seluruh gejala tersebut merupakan persoalan yang berdiri sendiri, ataukah seluruhnya merupakan bagian dari satu pola yang lebih besar?

Pertanyaan tersebut membawa pembahasan kembali kepada analogi yang digunakan sepanjang buku ini. Dalam dunia teknologi, sebuah sistem yang terinfeksi tidak selalu menunjukkan kerusakan pada satu titik saja. Ketika sebuah komputer terkena *malware*, dampaknya tidak hanya muncul pada satu aplikasi tertentu. Kinerja sistem secara keseluruhan mulai terganggu. Sebagian fungsi berjalan tidak normal. Sebagian sumber daya digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya. Pengguna merasakan berbagai

masalah yang tampak berbeda-beda, tetapi sesungguhnya berasal dari akar persoalan yang sama.

Hal yang serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara. Ketika hukum kehilangan kemampuannya untuk menghadirkan keadilan, gejalanya tampak dalam bentuk ketimpangan penegakan hukum. Ketika birokrasi kehilangan orientasi pelayanan, gejalanya tampak dalam bentuk prosedur yang semakin membebani rakyat. Ketika ekonomi kehilangan orientasi kerakyatan, gejalanya tampak dalam bentuk meningkatnya tekanan hidup masyarakat. Ketika aparat kehilangan orientasi pengabdian, gejalanya tampak dalam bentuk hubungan yang semakin berjarak antara negara dan rakyat. Ketika kebijakan kehilangan kedekatannya dengan kebutuhan masyarakat, gejalanya tampak dalam bentuk keputusan yang semakin elitis. Ketika seluruh gejala tersebut berkumpul dalam satu sistem, yang sesungguhnya sedang terlihat bukanlah kumpulan masalah yang terpisah, melainkan gejala dari sebuah infeksi yang telah menjalar ke berbagai bagian negara.

Pada titik ini, analogi *malware* menjadi semakin relevan. Sebuah *malware* tidak selalu menghancurkan sistem secara langsung. Dalam banyak kasus, *malware* justru menggunakan sistem untuk mencapai tujuannya sendiri. Komputer tetap menyala. Program tetap berjalan. Sistem operasi tetap aktif. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun sebagian sumber daya sistem telah dialihkan untuk kepentingan yang bukan milik pengguna. Prosesor bekerja untuk sesuatu yang tidak diketahui pengguna. Memori digunakan untuk

aktivitas yang tidak memberikan manfaat kepada pemilik sistem. Energi yang seharusnya digunakan untuk melayani pengguna justru digunakan untuk mempertahankan keberadaan *malware* itu sendiri.

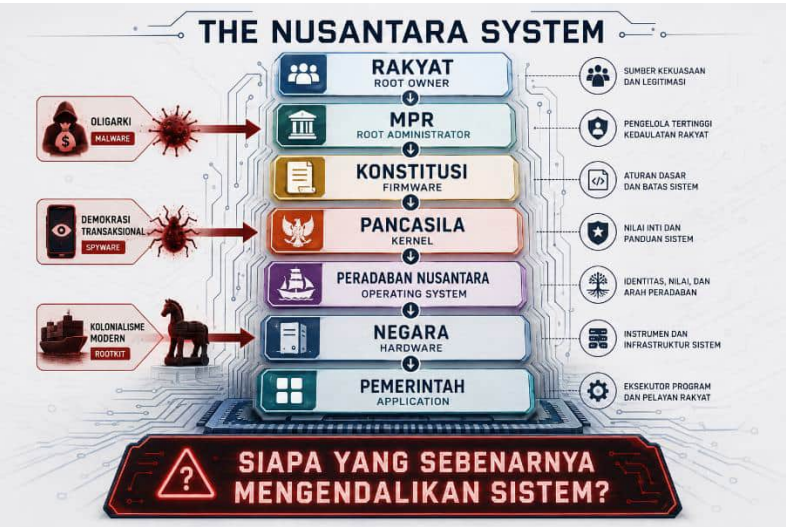

Gambaran tersebut memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan gejala negara yang telah mengalami penyimpangan orientasi. Negara tetap berdiri, konstitusi tetap berlaku, pemerintah tetap bekerja, pemilu tetap dilaksanakan, dan lembaga negara tetap beroperasi. Namun, semakin banyak energi nasional yang tidak lagi digunakan untuk melayani rakyat secara optimal. Sebagian energi terserap untuk mempertahankan struktur kekuasaan, sebagian terserap untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, dan sebagian lainnya terserap untuk memenuhi berbagai kepentingan yang semakin jauh dari kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, rakyat mulai merasakan bahwa negara tidak lagi hadir sebagai solusi, melainkan sebagai bagian dari persoalan yang harus dihadapi. Inilah titik yang paling berbahaya dalam proses infeksi sebuah negara. Bahaya terbesar bukan ketika negara runtuh, melainkan ketika negara tetap berdiri tetapi perlahan kehilangan tujuan pembentukannya. Negara masih memiliki seluruh simbol kenegaraan, masih memiliki legitimasi formal, dan masih memiliki perangkat hukum, namun fungsi dasarnya sebagai pelayan rakyat mulai melemah.

Pada kondisi seperti itu, rakyat tetap diwajibkan mematuhi aturan, membayar pajak, memenuhi kewajiban administratif, dan mendukung keberlangsungan negara. Akan tetapi manfaat yang diperoleh dari keberadaan negara tidak lagi tumbuh sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Hubungan antara negara dan rakyat menjadi tidak seimbang. Negara semakin banyak mengambil energi dari masyarakat, sementara kemampuan mengembalikan energi tersebut dalam bentuk pelayanan, perlindungan, dan kesejahteraan menjadi semakin terbatas.

Keadaan tersebut tidak lahir dalam satu malam. Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, infeksi negara berkembang melalui proses yang panjang.

Oligarki bekerja seperti *malware* yang memengaruhi sistem dari dalam. Demokrasi transaksional bekerja seperti *spyware* yang memengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil

keputusan. Kolonialisme modern bekerja seperti *rootkit* yang memengaruhi ruang kebijakan dan kedaulatan dari lapisan yang lebih dalam. Ketika seluruh lapisan tersebut bertemu, lahirlah berbagai gejala yang dibahas dalam bab ini. Gejala-gejala tersebut bukan penyebab utama. Gejala-gejala tersebut adalah akibat. Yang terlihat di permukaan hanyalah hasil dari berbagai gangguan yang telah lama bekerja di bawah permukaan sistem negara.

Karena itu, memahami gejala sangat penting, tetapi memahami akar persoalan jauh lebih penting. Jika perhatian hanya tertuju pada gejala, maka solusi yang dihasilkan biasanya bersifat sementara. Mengganti pejabat tertentu mungkin memperbaiki keadaan untuk beberapa waktu. Mengubah kebijakan tertentu mungkin mengurangi sebagian masalah. Membentuk lembaga baru mungkin memberikan harapan baru. Namun selama sumber infeksi tidak diatasi, gejala yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.
Di sinilah tesis besar buku Negara Salah Desain mulai menemukan bentuknya secara utuh.

Masalah terbesar yang dihadapi bukan semata-mata persoalan individu, bukan semata-mata persoalan moral, dan bukan semata-mata persoalan pelaksanaan. Masalah terbesar terletak pada desain sistem yang memungkinkan berbagai bentuk infeksi berkembang tanpa mekanisme koreksi yang memadai.

Ketika desain tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pusat kedaulatan yang sesungguhnya, berbagai penyimpangan akan menemukan ruang untuk tumbuh. Ketika kontrol rakyat terhadap negara semakin lemah,

negara semakin mudah dipengaruhi oleh oligarki, kelompok kepentingan, birokrasi yang membesar, maupun berbagai pengaruh eksternal. Sedikit demi sedikit, negara bergerak menjauh dari tujuan awal pembentukannya.

Dalam perspektif Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima, keadaan tersebut merupakan penyimpangan yang sangat serius. Kerakyatan menghendaki agar seluruh kekuasaan kembali kepada rakyat. Keadilan sosial menghendaki agar seluruh sumber daya negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika negara justru lebih banyak melayani kepentingan di luar rakyat, maka arah penyelenggaraan negara telah bergerak menjauh dari fondasi filosofis yang menjadi dasar pembentukannya.

Karena itu, bab ini harus ditutup dengan sebuah kesadaran yang jujur. Hukum yang timpang, birokrasi yang korup, ekonomi yang menekan rakyat, aparat yang kehilangan orientasi pelayanan, kebijakan yang elitis, serta hilangnya kepercayaan publik bukanlah sekadar kumpulan keluhan masyarakat. Seluruhnya adalah gejala bahwa sistem sedang mengalami gangguan yang serius. Seluruhnya adalah tanda bahwa negara membutuhkan proses pemulihan yang lebih mendasar daripada sekadar pergantian aktor atau perubahan kebijakan sesaat.

Ketika negara tidak lagi menjalankan fungsi utamanya untuk melayani rakyat, melainkan lebih banyak menyerap energi rakyat demi mempertahankan struktur, kepentingan, dan kekuasaan yang berkembang di dalamnya, negara berisiko berubah

menjadi *malware* bagi pemiliknya sendiri. Negara tetap berdiri. Kekuasaan tetap berjalan. Institusi tetap berfungsi. Namun sebagian besar energi yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat justru tersedot untuk menopang sistem yang telah bergerak menjauh dari tujuan pembentukannya. Pada titik itulah negara tidak lagi sekadar mengalami masalah, melainkan sedang mengalami infeksi yang memerlukan perbaikan pada tingkat desain yang paling mendasar.